



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2021**



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor -- Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor --).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
- (2) RKPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang.
- (3) RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP
- (2) Uraian dari sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD Tahun 2022 dan menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 24

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah.....	II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografis	II-2
2.1.1.3 Kondisi Geologis.....	II-3
2.1.1.4 Keadaan Hidrologis	II-7
2.1.1.5 Kondisi Klimatologis.....	II-9
2.1.1.6 Penggunaan Lahan.....	II-10
2.1.1.7 Indikasi Program Pemanfaatan Struktur Ruang/Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-25
2.1.1.7.1 Rencana Sistem Perdesaan dan Perkotaan	II-26
2.1.1.7.1.1 Rencana Sistem Perdesaan	II-26
2.1.1.7.1.2 Rencana Sistem Perkotaan	II-27
2.1.1.7.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.....	II-30
2.1.1.7.2.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Utama	II-30
2.1.1.7.2.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Lainnya.....	II-37
2.1.1.7.2.3 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan	II-41
2.1.1.7.2.4 Rencana Pengembangan Sarana Pendukung	II-43
2.1.1.7.3 Wilayah Rawan Bencana	II-45
2.1.1.8 Kondisi Demografi	II-50
2.1.1.8.1 Jumlah Penduduk.....	II-50

2.1.1.8.2	Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	II-52
2.1.1.8.3	Jumlah penduduk, Kepala Keluarga (KK) dan Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga.....	II-53
2.1.1.8.4	Laju Pertumbuhan Penduduk	II-54
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-55
2.1.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-55
2.1.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	II-55
2.1.2.1.2	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)	II-56
2.1.2.1.3	Laju Inflasi	II-60
2.1.2.1.4	Indeks Gini	II-61
2.1.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-61
2.1.2.1.6	Indeks Pembangunan Gender	II-64
2.1.2.1.7	Ketenagakerjaan.....	II-64
2.1.2.1.8	Angka Kriminalitas yang Tertangani	II-66
2.1.2.1.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-66
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-69
2.1.2.2.1	Angka Melek Huruf	II-70
2.1.2.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-70
2.1.2.2.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-71
2.1.2.2.4	Angka Harapan Hidup (AHH)	II-74
2.1.2.2.5	Persentase Balita Gizi Buruk.....	II-75
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-76
2.1.2.3.1	Seni Budaya Daerah	II-76
2.1.2.3.2	Pemuda dan Olahraga	II-77
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum.....	II-78
2.1.3.1	Fokus Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-78
2.1.3.1.1	Pendidikan.....	II-78
2.1.3.1.2	Kesehatan.....	II-83
2.1.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-100
2.1.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-102
2.1.3.1.5	Sosial.....	II-102
2.1.3.1.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-103

2.1.3.1.6.1	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-103
2.1.3.1.6.2	Bidang Bencana.....	II-105
2.1.3.2	Fokus Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-106
2.1.3.2.1	Ketenagakerjaan.....	II-106
2.1.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-106
2.1.3.2.3	Ketahanan Pangan.....	II-107
2.1.3.2.4	Pertanahan	II-108
2.1.3.2.5	Lingkungan Hidup.....	II-108
2.1.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-110
2.1.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-111
2.1.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-111
2.1.3.2.9	Perhubungan	II-112
2.1.3.2.10	Komunikasi dan Informatika.....	II-114
2.1.3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-115
2.1.3.2.12	Penanaman Modal.....	II-117
2.1.3.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	II-117
2.1.3.2.14	Statistik	II-118
2.1.3.2.15	Persandian	II-118
2.1.3.2.16	Kebudayaan.....	II-119
2.1.3.2.17	Perpustakaan.....	II-120
2.1.3.2.18	Kearsipan	II-121
2.1.3.3	Fokus Urusan Pilihan.....	II-122
2.1.3.3.1	Pariwisata	II-122
2.1.3.3.2	Pertanian	II-123
2.1.3.3.3	Energi dan Sumberdaya Mineral	II-124
2.1.3.3.4	Perdagangan.....	II-125
2.1.3.3.5	Perindustrian.....	II-126
2.1.3.3.6	Transmigrasi.....	II-128
2.1.3.4	Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan.....	II-129
2.1.3.4.1	Perencanaan.....	II-129
2.1.3.4.2	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	II-130
2.1.3.4.3	Pemerintahan Umum.....	II-131
2.1.3.4.4	Keuangan	II-136

2.1.3.4.5	Sekretariat Daerah.....	II-138
2.1.3.4.6	Kepegawaian.....	II-139
2.1.3.4.7	Pengawasan.....	II-140
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-141
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-141
2.1.4.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-141
2.1.4.1.2	Nilai Tukar Petani (NTP).....	II-142
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur	II-144
2.1.4.2.1	Perhubungan.....	II-144
2.1.4.2.2	Penataan Ruang	II-144
2.1.4.2.3	Air Bersih	II-145
2.1.4.3	Fokus Iklim Investasi	II-146
2.1.4.3.1	Proses Perijinan.....	II-146
2.1.4.3.2	Kondusifitas Daerah.....	II-146
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-147
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD	II-148
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-455
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-455
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-456
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021.....	III-1
3.1.2	Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	III-2
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-7
3.2.1.1	Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Menapai Target.....	III-7
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-11
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-15
3.2.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	III-17

3.2.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	III-17
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	IV-3
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional	IV-3
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur.....	IV-4
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun.....	IV-4
BAB V	RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1	Penerapan Indikator Kinerja Utama.....	VI-1
6.2	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VI-2
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun.....	II-1
Tabel 2.2	Jenis dan Luas Topografi Kabupaten Madiun	II-2
Tabel 2.3	Jenis dan Luas Kemiringan Lahan Kabupaten Madiun.....	II-3
Tabel 2.4	Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Madiun	II-6
Tabel 2.5	Tekstur Tanah dan Penyebarannya di Kabupaten Madiun	II-6
Tabel 2.6	Inventarisasi Sungai di Kabupaten Madiun.....	II-7
Tabel 2.7	Waduk-Waduk di Kabupaten Madiun	II-9
Tabel 2.8	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan dan Stasiun di Kabupaten Madiun	II-10
Tabel 2.9	Obyek Wisata di Kabupaten Madiun.....	II-22
Tabel 2.10	Jalan Kabupaten Madiun yang Termasuk Jalur Selingkar Wilis..	II-31
Tabel 2.11	Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis.....	II-32
Tabel 2.12	Jalan Tembus Potensial.....	II-34
Tabel 2.13	Capaian Layanan Persampahan di Kabupaten Madiun.....	II-41
Tabel 2.14	Kejadian Bencana Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.15	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	II-51
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan <i>Sex Ratio</i> di Kabupaten Madiun Tahun 2020	II-51
Tabel 2.17	Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	II-53
Tabel 2.19	Perkembangan Penduduk Berdasarkan Jumlah KK dan Rata-Rata Anggota Keluarga di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.20	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	II-54
Tabel 2.21	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	II-55

Tabel 2.22	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 (Juta Rupiah) Kabupaten Madiun	II-56
Tabel 2.23	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Madiun.....	II-58
Tabel 2.24	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun..	II-58
Tabel 2.25	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-59
Tabel 2.26	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-60
Tabel 2.27	Indeks Gini Kabupaten Madiun dan Jawa Timur Tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2.28	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional	II-62
Tabel 2.29	Indikator Kemiskinan Periode 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-63
Tabel 2.30	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Madiun Dibandingkan Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II-64
Tabel 2.31	Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020 ..	II-65
Tabel 2.32	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Madiun Dibandingkan Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II-65
Tabel. 2.33	Angka Kriminalitas di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.34	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	II-67
Tabel 2.35	Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-68
Tabel 2.36	Angka Melek Huruf di Kabupaten Madiun Dibandingkan dengan Jawa Timur Tahun 2016-2020	II-70
Tabel 2.37	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun dan Jawa Timur	II-71
Tabel 2.38	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Madiun Dibandingkan Dengan Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II-71
Tabel 2.39	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-72

Tabel 2.40	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-72
Tabel 2.41	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-73
Tabel 2.42	Angka Harapan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.43	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-75
Tabel 2.44	Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-77
Tabel 2.45	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.46	Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020 di Kabupaten Madiun...	II-79
Tabel 2.47	Angka Kelulusan Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-79
Tabel 2.48	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-80
Tabel 2.49	Pemerataan Tenaga Guru di Kabupaten Madiun Tahun 2020	II-80
Tabel 2.50	Persentase Sekolah Kondisi Baik Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-81
Tabel 2.51	APK PAUD Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-81
Tabel 2.52	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini	II-82
Tabel 2.53	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Sekolah Dasar	II-82
Tabel 2.54	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	II-83
Tabel 2.55	Perkembangan Angka Kematian IBU (AKI) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-84
Tabel 2.56	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-85
Tabel 2.57	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-85
Tabel 2.58	Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-86
Tabel 2.59	Perkembangan Kasus HIV/ AIDS di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	II-87

Tabel 2.60	Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Resiko Penderita di Kabupaten Madiun Sampai Dengan Tahun 2020	II-87
Tabel 2.61	Perkembangan Cakupan Pengobatan Lengkap dan Kesembuhan TB Paru di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	II-88
Tabel 2.62	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Madiun Tahun 2020.....	II-88
Tabel 2.63	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Tahun 2020 di Kabupaten Madiun	II-89
Tabel 2.64	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2020 di Kabupaten Madiun.....	II-90
Tabel 2.65	Data IKM Rumah Sakit Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.66	Standar Ketenagaan pada Puskesmas Wilayah Perkotaan	II-90
Tabel 2.67	Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 di Kabupaten Madiun.....	II-91
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Kesehatan di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.69	Realisasi Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020.....	II-92
Tabel 2.70	Perkembangan Desa ODF Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.71	Data Sebaran Kasus <i>Covid-19</i> Tahun 2020 di Kabupaten Madiun	II-99
Tabel 2.72	Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-100
Tabel 2.73	Indikator Urusan Perumahan dan Pemukiman Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-102
Tabel 2.74	Capaian Urusan Sosial Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-103
Tabel 2.75	Target dan Capaian Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Tahun 2020	II-104
Tabel 2.76	Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020`	II-105
Tabel 2.77	Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-106
Tabel 2.78	Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-107

Tabel 2.79	Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	II-107
Tabel 2.80	Capaian Urusan Pangan Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun...	II-108
Tabel 2.81	Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-109
Tabel 2.82	Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-110
Tabel 2.83	Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	II-111
Tabel 2.84	Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2016-2020.....	II-113
Tabel 2.86	Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020 ..	II-114
Tabel 2.87	Data Keragaan Koperasi Tahun 2016-2020	II-115
Tabel 2.88	Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020	II-116
Tabel 2.89	Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020	II-117
Tabel 2.90	Capaian Urusan Statistik Tahun 2016-2020	II-118
Tabel 2.91	Capaian Urusan Persandian Tahun 2016-2020.....	II-118
Tabel 2.92	Capaian Indikator Bidang Kebudayaan Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2.93	Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2.94	Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2.95	Perkembangan Bidang Pariwisata Tahun 2016-2020	II-122
Tabel 2.96	Pertumbuhan Produksi Tanaman Utama Tahun 2016-2020	II-123
Tabel 2.97	Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016-2020	II-124
Tabel 2.98	Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020	II-125
Tabel 2.99	Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020	II-128
Tabel 2.100	Capaian Indikator Bidang Transmigrasi di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020	II-128
Tabel 2.101	Indikator Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-129
Tabel 2.102	Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun.....	II-130
Tabel 2.103	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2020	II-131
Tabel 2.104	Nilai LPPD Tahun 2016-2020	II-133

Tabel 2.105	Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun.....	II-134
Tabel 2.106	Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020.....	II-137
Tabel 2.107	Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020.....	II-138
Tabel 2.108	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020.	II-139
Tabel 2.109	Pelaksanaan <i>Quality Assurance (QA)</i> atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2020.....	II-140
Tabel 2.110	Persentase Fungsional Auditor Tahun 2016-2020.....	II-141
Tabel 2.111	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2016-2020	II-142
Tabel 2.112	Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2020.....	II-142
Tabel 2.113	Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020	II-144
Tabel 2.114	Capaian Urusan Penataan Ruang Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun	II-145
Tabel 2.115	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	II-145
Tabel 2.116	Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020 ..	II-148
Tabel 2.117	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Madiun.....	II-150
Tabel 2.118	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-456
Tabel 3.1	Indikator Makro Ekonomi Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2022	III-2
Tabel 3.2	Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Madiun Tahun 2021 Dan 2022.....	III-4
Tabel 3.3	Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022	III-10
Tabel 3.4	Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022.....	III-13
Tabel 3.5	Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022	III-18
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.....	IV-2
Tabel 4.2	Hubungan RKP dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV-5

Tabel 4.3	Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2022.....	IV-6
Tabel 4.4	Keseusaian Prioritas Daerah, Program, Indikator Kinerja Program, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab	IV-10
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022.....	V-1
Tabel 6.1	Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2022	VI-1
Tabel 6.2	Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (<i>Impact</i>) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2022	VI-1
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Madiun	VI-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2022 merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi tentang pelaksanaan RKPD setiap tahunnya. Baik RPJPD, RPJMD dan RKPD ketiga dokumen tersebut disusun saling bersinergis dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah supaya lebih terfokus pada pencapaian target yang sudah ditentukan secara tertulis.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.

Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dalam rangka penyusunan RKPD, Bappeda harus melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan dan penetapan RKPD harus tepat waktu, tepat sasaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian prioritas pusat. Bagi Kepala Daerah yang tidak menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD, akan dikenai sanksi

administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKPD dilakukan dan disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66133);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto –Surabaya – Sidoarjo – Lamongan - Kawasan Bromo – Tengger – Semeru Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 13 Tahun 2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

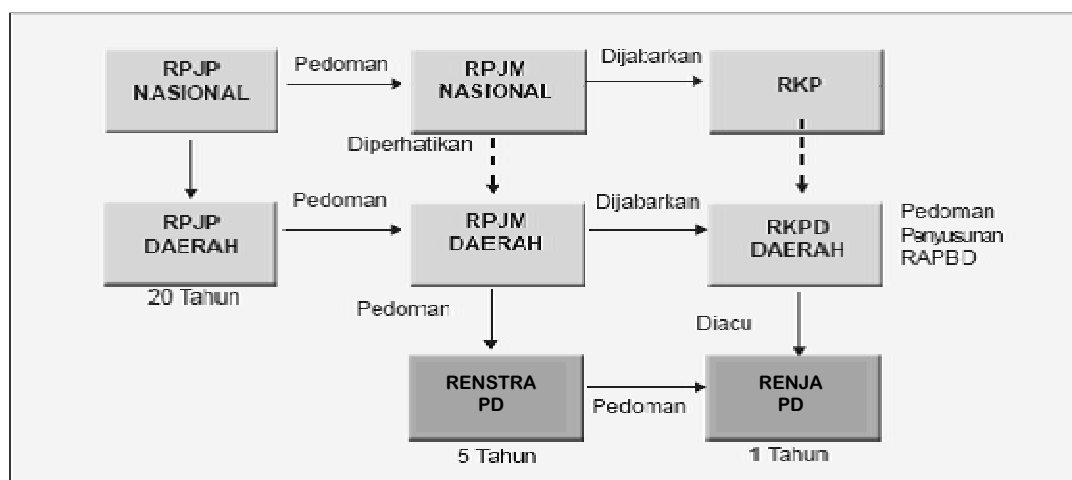
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya disinergikan dengan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD ini.

Dokumen RKPD ini merupakan acuan bagi seluruh perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) untuk tahun yang sama. Karena materi penyusunan RKPD Tahun 2022 diambil dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yaitu pada tahun ketiga, maka RKPD selaras dengan RPJMD. Begitu pula halnya dengan Renstra dengan Renja PD. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja PD. Penyusunan RKPD harus disusun saling bersinergis dan saling terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat.

Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Madiun yaitu:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Menyinkronkan agenda dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Madiun;
2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Madiun;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Memberikan gambaran mengenai proyeksi rencana kerangka daerah sebagai referensi dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pelaku pembangunan daerah;
5. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2022, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Madiun memiliki wilayah seluas 101.086 Ha atau 1.010,86 Km², secara astronomis terletak pada 111^o25'45" - 111^o51' Bujur Timur dan 7^o12' - 7^o48'30" Lintang Selatan dengan batas-batas secara administratif adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
2. Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

Secara administratif Kabupaten Madiun terdiri atas 206 desa/kelurahan (198 desa dan 8 kelurahan) yang tersebar di 15 kecamatan.

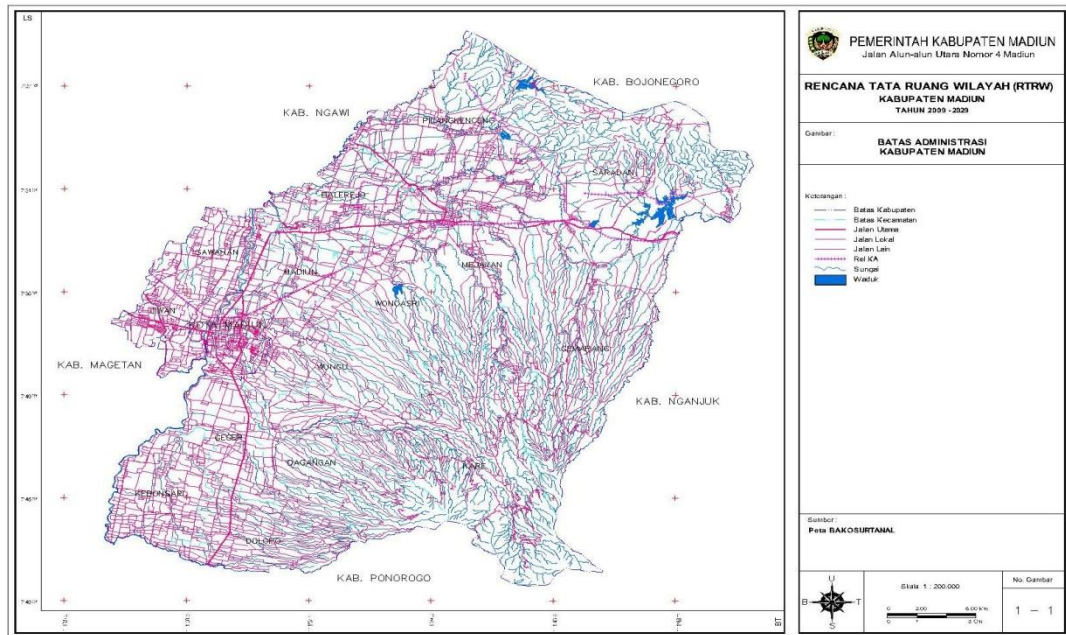
Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan
Di Kabupaten Madiun

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kebonsari	14	-	47,45
2	Geger	19	-	36,61
3	Dolopo	10	2	48,85
4	Dagangan	17	-	72,36
5	Wungu	12	2	45,54
6	Kare	8	-	190,85
7	Gemarang	7	-	101,97
8	Saradan	15	-	152,92
9	Pilangkenceng	18	-	81,34
10	Mejayan	11	3	55,22
11	Wonoasri	10	-	33,93
12	Balerejo	18	-	51,98
13	Madiun	12	1	35,93
14	Sawahan	13	-	22,15
15	Jiwan	14	-	33,76
JUMLAH		198	8	1.010,86

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Kare dengan luas 190,85 km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Sawahan dengan luas 22,15 km².

Gambar 2.1.
Peta Batas Administrasi Kabupaten Madiun



Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

2.1.1.2 Kondisi Topografis

Topografi di Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan dengan posisi terendah terdapat di lembah-lembah Bengawan Madiun berdekatan dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21 - 100 mdpl. Kemudian berturut-turut ke arah selatan yang semakin bertambah tinggi hingga ketinggian hampir 2.000 mdpl. Kecamatan-kecamatan dengan ketinggian antara 1000-2000 mdpl diantaranya adalah Kecamatan Kare, Gemarang dan Dagangan sedangkan kecamatan dengan ketinggian >2000 mdpl adalah Kecamatan Kare.

Tabel 2.2
Jenis dan Luas Topografi Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Topografi (Ha)						Jumlah
		0-50 m dpl	50-100 m dpl	100-500 m dpl	500-1000 m dpl	1000-2000 m dpl	>2000 m dpl	
1.	Kebonsari	0,00	3.940,16	804,84	0,00	0,00	0,00	4.745,00
2.	Geger	0,00	2.427,94	1.233,06	0,00	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	0,00	0,41	4.881,93	2,66	0,00	0,00	4.885,00
4.	Dagangan	0,00	485,14	5.134,75	1.378,99	237,12	0,00	7.236,00
5.	Wungu	0,00	1.809,78	2.744,22	0,00	0,00	0,00	4.554,00
6.	Kare	0,00	0,00	8.885,10	6.125,13	4.002,56	72,21	19.085,00
7.	Gemarang	0,00	0,00	0,18	8.790,93	1.391,16	14,73	10.197,00
8.	Saradan	0,00	2.540,13	12.579,44	172,42	0,00	0,00	15.292,00
9.	Pilangkenceng	0,00	6.034,58	2.099,42	0,00	0,00	0,00	8.134,00
10.	Mejayan	0,00	2.290,89	3.231,11	0,00	0,00	0,00	5.522,00
11.	Wonoasri	0,00	2.059,79	1.333,21	0,00	0,00	0,00	3.393,00
12.	Balerejo	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	1,89	3.263,73	327,38	0,00	0,00	0,00	3.593,00
14.	Sawahan	12,07	2.202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
15.	Jiwan	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		13,96	35.629,49	43.254,63	16.470,13	5.630,84	86,95	101.086,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

Sebagaimana halnya topografi, maka Kelerengan di Kabupaten Madiun juga bervariasi mulai dari kelerengan 0-8% sampai >45%. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerengan 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare.

Sedangkan kecamatan-kecamatan yang berada pada ketinggian 1000 sampai >2000 meter di atas permukaan laut umumnya mempunyai kelerengan wilayah di >25%. Kecamatan dimaksud antara lain adalah Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Wungu, Gemarang, Mejayan dan Wonoasri, dimana kecamatan-kecamatan tersebut umumnya berada di bagian selatan berdekatan dengan Pegunungan Wilis.

Tabel 2.3
Jenis dan Luas Kemiringan Lahan Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Kemiringan Lahan (Ha)					Jumlah
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%	
1.	Kebonsari	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00
2.	Geger	3.403,50	255,45	2,04	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	1.890,02	1.562,29	1.406,07	21,04	21,04	4.885,00
4.	Dagangan	1.021,50	1.948,52	1.112,50	2.499,55	2.499,55	7.236,00
5.	Wungu	1.075,50	1.589,73	1.853,53	19,48	19,48	4.554,00
6.	Kare	0,00	231,47	5.425,47	10.685,75	10.685,75	19.085,00
7.	Gemarang	1.538,62	1.797,02	3.685,77	1.523,53	1.523,53	10.197,00
8.	Saradan	14.881,34	410,66	0,00	0,00	0,00	15.292,00
9.	Pilangkenceng	8.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,00
10.	Mejayan	1.602,27	2.128,89	1.448,12	0,00	0,00	5.522,00
11.	Wonoasri	1.406,66	513,63	1.147,45	0,00	0,00	3.393,00
12.	Balerejo	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	3.055,90	95,02	411,48	0,00	0,00	3.590,00
14.	Sawah	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
15.	Jiwan	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		53.543,31	10.532,67	16.492,43	5.768,23	14.749,36	101.086,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

2.1.1.3 Kondisi Geologis

Jenis batuan yang membentuk Kabupaten Madiun :

1. Morfoset Jeding - Patukbanteng (Qj)

Satuan ini merupakan bentang alam yang terbentuk oleh hasil kegiatan erupsi Kepundan Jeding - Patukbanteng. Penyebarannya meliputi Kecamatan Kebonsari dan Kare dengan luas mencapai 7.667,99 ha.

2. Morfonit Tanjungsari (Qjt)

Satuan ini dikuasai oleh tuf lapili batu apung dengan sisipan batu pasir gunung api dan tuf kerikilan di beberapa tempat. Morfonit ini mempunyai

permukaan topografi yang lebih luas, serta kemiringan lereng lebih landai, jika dibandingkan dengan seluruh morfosetnya yang kurang padat sehingga mudah tererosi. Batuan ini tersebar di Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu dan Kare dengan luas mencapai 13.918,18 ha.

3. Morfonit Ngebel (Qjn)

Batuan ini tersusun oleh breksi gunung api, tuf dan konglomerat gunung api, lapisannya tidak jelas. Batuan ini tersebar di Kecamatan Dolopo dan Dagangan dengan luas mencapai 601,30 ha.

4. Alluvium (Qa)

Batuan ini merupakan bahan gunung api berupa lumpur, pasir, kerikil, kerakal dan sedikit bongkah. Batuan ini tersebar di seluruh Kecamatan kecuali Dolopo, Kare dan Gemarang dengan luas mencapai 26.343,77 ha.

5. Morfoset Argokalangan Qav)

Satuan ini merupakan satuan termuda dari ketiga morfoset di Kompleks Gunung Wilis. Batuannya berupa endapan tefra dan lava andesit horeblend. Batuan ini tersebar di Kecamatan Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Mejayan, Wonoasri dan Madiun dengan luas mencapai 34.486,70 ha.

6. Formasi Notopuro (Qpnv)

Satuan ini merupakan breksi gunung api, tuf dan aglomerat. Satuan ini dijumpai di Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan dan Wonoasri dengan luas sebesar 13.871,88 ha.

7. Formasi Kabuh (Qpk)

Satuan ini merupakan batuan konglomerat, batu pasir setempat bersisipan lempung dan napal. Satuan ini dijumpai di Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng dengan luas mencapai 2.055,88 ha.

8. Breksi Pandan (Qpv)

Satuan ini merupakan breksi andesit dan dijumpai di Kecamatan Saradan dengan luas 993,69 ha.

9. Formasi Pucangan (Qtp)

Satuan ini merupakan batuan breksi dan batu pasir tufan.

Satuan ini dijumpai di Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng dengan luas mencapai 1.016,96 ha.

10. Formasi Klitik (Tpk)

Satuan ini merupakan batu gamping klastika dan terumbu dengan sisipan napal dan batu lempung. Satuan ini dijumpai di Kecamatan Pilangkenceng dengan luas mencapai 72,71 ha.

11. Formasi Sonde (Tps)

Satuan ini merupakan perselingan batu lempung dan batu pasir tufan, bersisipan batu gamping. Satuan ini dijumpai di Kecamatan Pilangkenceng seluas 11,84 ha.

12. Formasi Kalibeng (Tmk)

Satuan ini merupakan napal setempat bersisipan tuf, batu pasir tufan dan Kalkarenit. Jenis batuan ini dijumpai di Kecamatan Pilangkenceng seluas 45,91 ha.

13. Morfonit Sedudo (Qas)

Satuan ini dikuasai lava andesit horeblendita dengan sisipan breksi gunung api. Jenis batuan ini dijumpai di Kecamatan Kare dan Gemarang seluas 8.341,16 ha.

Jenis tanah di Kabupaten Madiun cukup bervariasi. Jenis tanah ini sangat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan dikembangkan di Kabupaten Madiun. Dari jenis tanah ini pun dapat diketahui kesesuaian pemanfaatan lahan.

Berdasarkan data yang didapat, jenis tanah di Kabupaten Madiun didominasi oleh jenis tanah alluvial dengan prosentase sebesar 36% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Madiun dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare dan Gemarang, disusul kemudian jenis tanah mediteran dengan prosentase sebesar 26% dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pilangkenceng, Jiwan dan Sawahan. Jenis tanah grumosol dengan prosentase sebesar 21% dengan penyebaran hanya beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Madiun dan Sawahan.

Jenis tanah latosol dengan prosentase sebesar 13% penyebarannya meliputi Kecamatan Dolopo, Wungu, Kare, Gemarang, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Untuk jenis tanah dengan luasan terkecil yaitu jenis tanah litosol dengan prosentase sebesar 4% penyebarannya meliputi Kecamatan Dagangan, Kare dan Saradan. Jenis tanah di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Tanah (Ha)					Jumlah
		Mediteran	Latosol	Alluvial	Litosol	Grumosol	
1.	Kebonsari	129,27	0,00	4.615,73	0,00	0,00	4.475,00
2.	Geger	1.951,00	9,01	1.701,00	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	1.285,74	758,03	2.841,24	0,00	0,00	4.885,00
4.	Dagangan	6.116,44	0,00	1.020,77	98,79	0,00	7.236,00
5.	Wungu	2.934,65	1.314,79	304,55	0,00	0,00	4.554,00
6.	Kare	5.133,95	9.511,10	0,00	4.439,95	0,00	19.085,00
7.	Gemarang	6.437,24	3.759,76	0,00	0,00	0,00	10.197,00
8.	Saradan	3.082,14	0,00	12.044,43	165,43	10.747,49	15.292,00
9.	Pilangkenceng	0,00	0,00	8.134,00	0,00	1.694,23	8.134,00
10.	Mejayan	3.438,37	638,65	1.444,99	0,00	860,73	5.522,00
11.	Wonoasri	2.050,28	0,93	1.341,78	0,00	48,32	3.393,00
12.	Balerejo	0,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	399,02	203,93	2.990,05	0,00	38,96	3.593,00
14.	Sawahan	0,00	0,00	2.215,00	0,00	13.655,28	2.215,00
15.	Jiwan	0,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		32.958,09	16.196,20	47.227,54	4.704,17	27.045,01	101.086,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021(RTRW 2009-2029)

Tekstur tanah adalah mineral-mineral padat yang menyusun partikel-partikel tanah dan dibedakan menjadi tiga bagian/fraksi sesuai dengan ukurannya yaitu :

1. Partikel liat : ukuran < 2 m (mikron)
2. Partikel debu : ukuran 2 m – 5 m (mikron)
3. Partikel pasir : ukuran 50 m – 2 mm (mikron)

Tekstur tanah menggambarkan perbandingan diantara ketiga fraksi tersebut. Dengan mengetahui tekstur tanah maka dapat diketahui mudah tidaknya tanah diolah karena tekstur tanah menentukan kekuatan agregasi partikel-partikel tanah.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, tekstur tanah di Kabupaten Madiun didominasi oleh tekstur sedang (debu) dengan prosentase 50,21% sedangkan tekstur halus (liat) dengan prosentase 49,79%.

Tabel 2.5
Tekstur Tanah dan Penyebarannya di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis Dan Luas Tekstur Tanah (Ha)		
		Halus	Sedang	Jumlah
1.	Kebonsari	4.745,00	0,00	4.745,00
2.	Geger	3.661,00	0,00	3.661,00

No	Kecamatan	Jenis Dan Luas Tekstur Tanah (Ha)		
		Halus	Sedang	Jumlah
3.	Dolopo	4.589,47	295,53	4.885,00
4.	Dagangan	0,00	7.236,00	7.236,00
5.	Wungu	3.950,86	603,14	4.554,00
6.	Kare	4.211,08	14.873,92	19.085,00
7.	Gemarang	0,00	10.197,00	10.197,00
8.	Saradan	3.060,72	12.231,28	15.292,00
9.	Pilangkenceng	8.130,42	3,58	8.134,00
10.	Mejayan	1.590,41	3.931,59	5.522,00
11.	Wonoasri	2.157,35	1.235,65	3.393,00
12.	Balerejo	5.198,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	3.443,05	149,95	3.593,00
14.	Sawah	2.215,00	0,00	2.215,00
15.	Jiwan	3.376,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		50.328,36	50.757,64	101.086,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

2.1.1.4 Kondisi Hidrologis

Di Kabupaten Madiun terdapat 41 (empat puluh satu) sungai, antara lain Kali Jerohan, Kali Kembang, Kali Bruwok, Kali Notopuro, Kali Catur, Kali Asin, Kali Sono, Kali Sareng dan kali-kali lainnya yang memuat debit aliran dan manfaat irigasi dari masing-masing sungai tersebut. Pola aliran sungai-sungai yang ada di Kabupaten Madiun tersebut pada umumnya memiliki pola radial, dengan sebagian besar merupakan sungai musiman yaitu sungai yang meresapkan air hujan ke dalam tanah, atau disebut juga sungai influent. Sedangkan sungai pola radial merupakan ciri khas sungai yang mengalir di daerah gunung berapi pada batuan alluvial, hal ini sesuai dengan kualifikasi produk sebaran batuan, bahwa jenis batuan adalah alluvial bekas aktivitas gunung berapi.

Tabel 2.6
Inventarisasi Sungai di Kabupaten Madiun

No.	Nama sungai	Panjang Sungai (km)	Manfaat Irigasi (ha)
1.	Kali Madiun	27,90	3.278,00
2.	Kali Asin	8,00	2.803,00
3.	Kali Jerohan	50,60	-
4.	Kali Berangkal	14,50	227,00
5.	Kali Catur	32,00	2.854,00
6.	Kali Gunting	32,25	252,00
7.	Kali Glonggong	4,70	232,00
8.	Sungai Kelepek	12,50	433,00
9.	Kali Sareng	20,25	1.366,00

No.	Nama sungai	Panjang Sungai (km)	Manfaat Irigasi (ha)
10.	Kali Batil	17,25	1.108,00
11.	Sungai Gondang	9,10	372,00
12.	Sungai Semawur	4,55	404,00
13.	Kali Sono	10,00	314,00
14.	Kali Piring	10,00	280,00
15.	Kali Bribis	10,00	197,00
16.	Kali Blodro	10,00	422,00
17.	Kali Kentar	10,40	106,00
18.	Kali Kembang	30,40	2.167,00
19.	Kali Abu	14,40	374,00
20.	Kali Gondang	15,00	14,00
21.	Kali Mundu	30,40	479,00
22.	Kali Sukoliman	5,00	30,00
23.	Kali Uluh	21,20	86,00
24.	Kali Sarangan	20,00	630,00
25.	Kali Jumok	15,00	320,00
26.	Kali Padas	13,00	86,00
27.	Kali Lengkowo	7,00	242,00
28.	Kedung Brubus	9,00	-
29.	Ngasinan	12,50	-
30.	Notopuro	33,75	3.089,00
31.	Gede	21,25	483,00
32.	Tangkil	5,00	-
33.	Gruwok	13,75	2.238
34.	Nampu	7,50	47,00
35.	Sukorejo	5,00	-
36.	Kali Palem	5,00	Suplisi Waduk Notopuro
37.	Sumber Agung	6,75	-
38.	Kali Gendo	1,75	Saluran Suplisi Waduk Notopuro
39.	Kali Ulomati	1,25	Suplisi Waduk Saradan
40.	Kali Lemah bang	1,00	Suplisi Waduk Saradan
41.	Saradan/Blangambi	6,25	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

Kawasan di bagian Selatan Kabupaten Madiun merupakan daerah resapan air hujan yang diperkirakan merupakan areal cadangan air tanah walupun terbatas kapasitasnya. Kondisi ini ditandai dengan adanya sumber-sumber air di Kabupaten Madiun yang berjumlah 114 sumber air. Sumber-sumber air tersebut dimanfaatkan untuk air irigasi dan air minum, namun sayangnya dari 114 sumber air tersebut 10 (sepuluh) sumber air telah tidak berfungsi lagi (mati).

Tabel 2.7
Waduk-waduk di Kabupaten Madiun

No.	Nama Waduk	Lokasi Desa	Kecamatan
1.	Dawuhan	Sidomulyo	Wonoasri
2.	Notopuro	Duren	Pilangkenceng
3.	Saradan	Sugihwaras	Saradan
4.	Kedungbrubus	Bulu	Pilangkenceng
5.	Kresek	Kresek	Wungu

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

Kondisi hidrogeologi Kabupaten Madiun termasuk dalam Zona Madiun yang merupakan dataran rendah yang luas. Zona Madiun umumnya ditutupi oleh endapan alluvial yang sebagian besar ditutupi oleh endapan alluvium yang terdiri dari bahan rombakan rempah gunung berapi seperti kerikil, tuff, pumice, dan pasir yang bejari jemari.

2.1.1.5 Kondisi Klimatologis

Keadaan iklim di Kabupaten Madiun ditandai dengan keadaan curah hujan dan intensitas hujan, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Dengan tipe iklim yang ada di Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Schmidt dan Ferguson, wilayah ini termasuk iklim dengan Tipe C yaitu iklim sedang yang merupakan daerah tidak kering dan tidak basah. Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 20° - 35° C.

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Berdasarkan jumlah hari hujan di masing-masing kecamatan, rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Untuk data curah hujan tahun 2020, dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan dan Stasiun di Kabupaten Madiun Tahun 2020

Curah Hujan Menurut Bulan dan Lokasi Penakar Tahun 2020

Stasiun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kedung Banteng	97	208	485	91	30	0	0	0	0	0	95	345	1.351
Notopuro	109	250	505	220	0	0	0	0	0	0	42	452	1.578
Wates	212	195	383	276	12	0	0	0	0	0	34	208	1.320
Giringan	528	389	481	342	49	0	13	0	0	0	50	254	2.106
Dungus	369	294	474	251	0	0	22	0	0	20	28	254	1.712
Gombal	217	305	386	290	5	0	0	0	0	0	8	338	1.549

Catatan : Berdasar data dari UPT PSDA Tahun 2020 hanya beberapa stasiun yang dilakukan pengamatan

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Hari Hujan Menurut Bulan dan Lokasi Penakar Tahun 2020

Stasiun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kedung Banteng	7	10	15	4	2	0	0	0	0	0	3	10	51
Notopuro	10	10	12	7	0	0	0	0	0	0	3	13	55
Wates	13	15	14	14	2	0	0	0	0	0	2	6	66
Giringan	18	17	16	18	3	0	1	0	0	0	3	12	88
Dungus	15	18	14	14	0	0	1	0	0	2	3	13	80
Gombal	15	14	14	16	1	0	0	0	0	0	2	16	78

Catatan : Berdasar data dari UPT PSDA Tahun 2020 hanya beberapa stasiun yang dilakukan pengamatan

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Madiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan

Hutan yang ada di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan rakyat.

- a. Hutan lindung tersebar di Kecamatan Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan dengan luas mencapai 5.314 ha.
- b. Hutan rakyat tersebar di Kecamatan Geger, Wungu, Kare, Pilangkenceng, dan Mejayan dengan luas mencapai kurang lebih 672 ha.

c. Hutan produksi memiliki luas kurang lebih 32.265,1 ha yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Berdasarkan pengelolaannya kawasan hutan produksi berada di 3 (tiga) Kesatuan Pemangkuan Hutan yaitu KPH Lawu, KPH Madiun, dan KPH Saradan.

2. Sawah

Sawah di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi sawah irigasi (baik teknis, setengah teknis, sederhana maupun irigasi desa/non PU) serta sawah tadah hujan.

d. Sawah irigasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Madiun dengan luas mencapai kurang lebih 30.419 ha.

e. Sedangkan sawah tadah hujan sebagian besar terdapat di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonosari, Balerejo dan Madiun dengan luas mencapai kurang lebih 2.196,86 ha.

3. Ladang/ Kebun Campur

Secara umum ladang/kebun campur tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Madiun namun konsentrasi terbesar berada di beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Wungu seluas 62 Ha, Kecamatan Sawahan seluas 63 Ha dan Kecamatan Dagangan seluas 1.201 Ha. Secara keseluruhan luas ladang/kebun campur di Kabupaten Madiun mencapai 1.325,20 ha.

4. Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Madiun pada umumnya merupakan perusahaan swasta/negara seperti perkebunan Kandangan yang berada di Kecamatan Kare. Luas kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun mencapai 3.479 ha yang tersebar di Kecamatan Kare seluas 3.304 ha dan Kecamatan Pilangkenceng seluas 175 ha.

5. Semak Belukar

Merupakan tanah yang tidak diusahakan dan dibiarkan ditumbuhi pohon-pohon perdu. Semak Belukar di Kabupaten Madiun pada umumnya berada di sekitar areal hutan di Kecamatan Dolopo, Wungu dan Pilangkenceng dengan luas mencapai kurang lebih 237 ha.

6. Rumah, Bangunan (Permukiman)

Yang dimaksud dengan rumah, bangunan dalam peta penggunaan lahan adalah penggunaan lahan untuk permukiman maupun penggunaan lahan untuk fasilitas umum serta perdagangan dan jasa.

Permukiman di Kabupaten Madiun tersebar secara merata di seluruh wilayah. Permukiman tersebut dapat dibedakan menjadi permukiman pedesaan dan permukiman perkotaan. Untuk permukiman perkotaan pada umumnya mengelompok pada suatu kawasan karena adanya faktor daya tarik seperti fasilitas umum atau perdagangan dan jasa. Namun ada beberapa permukiman perkotaan yang berkembang sesuai dengan jaringan jalan yang ada. Adapun ciri dari permukiman perkotaan adalah jarak antar bangunan sempit, koefisien dasar bangunan berkisar antara 70-100. Sedangkan Untuk permukiman pedesaan pada umumnya mengikuti jaringan jalan yang ada, sedangkan tanah garapannya berada di luar kawasan permukiman. Adapun ciri dari permukiman pedesaan adalah jarak antar bangunan lebar, koefisien dasar bangunan berkisar antara 40-60%.

Bila ditinjau dari kondisi bangunan yang ada, maka untuk permukiman pedesaan sebagian besar merupakan permukiman non permanen dan tersebar hampir di seluruh wilayah perencanaan. Rumah non permanen di Kabupaten Madiun terbanyak berada di Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Kare, Gemarang, Balerejo.

7. Industri

Industri di Kabupaten Madiun sebagian besar berupa industri kecil dan sedang. Lokasi industri berkembang ke arah Selatan dan Timur. Industri yang ada di Kabupaten Madiun antara lain Pabrik Gula Kanigoro di Kecamatan Wungu, Pabrik Gula Pagotan di Kecamatan Dagangan, Industri Kayu lapis, pupuk organik dan tapioka di Kecamatan Dolopo Industri keramik di Kecamatan Geger, sedangkan industri di kawasan timur meliputi pabrik sepatu dan *chopstick* di Kecamatan Mejayan dan rokok di Kecamatan Pilangkenceng dan Kecamatan Madiun.

8. Peternakan

Potensi Peternakan di Kabupaten Madiun, diklasifikasikan atas 2 (dua) hal, yaitu potensi ternak kecil dan potensi ternak besar. Potensi ternak kecil, terdiri dari beberapa jenis ternak, yaitu, ayam buras, ayam petelur, dan ayam ras pedaging, Berdasarkan pengamatan di lapangan, saat ini terjadi aglomerasi

pengembangan ternak ayam pada suatu lokasi seperti di Kecamatan Wungu tepatnya di Desa Bantengan maupun di Kelurahan Munggut. Selain teraglomerasi pada suatu kawasan, pengembangan peternakan mulai tumbuh secara sporadis di beberapa desa di Kabupaten Madiun. Sedangkan potensi ternak besar meliputi ternak sapi, terutama sapi potong. Sapi selain sebagai penghasil daging, dapat juga sebagai alternatif sumber energi, dengan cara memanfaatkan kotorannya untuk diolah menjadi biogas.

9. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Madiun adalah kawasan Hutan Lindung. Kawasan hutan lindung yang terdapat di bagian selatan dan sebagian di utara meliputi Kecamatan Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan dengan luas mencapai 4.938,7 ha.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah adanya perubahan alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan budidaya pada beberapa titik. Untuk menjaga kawasan lindung dimaksud agar tetap lestari diperlukan pengelolaan sebagai berikut :

- a. Membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
- b. Melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
- c. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
- d. Melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk obyek wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup;
- e. Mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung;
- f. Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung; dan
- g. Mengendalikan kawasan sekitar secara ketat.
- h. Menjaga keseimbangan fungsi ekosistem dan lingkungan di bagian barat Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya, rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Madiun meliputi, kawasan hutan lindung,

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi.

a. Kawasan Hutan Lindung.

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Madiun seluas kurang lebih 5.314 ha, yang tersebar di kecamatan Kare, Gemarang, Dagangan, dan Saradan.

b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya.

Untuk arahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi kawasan resapan air di Kabupaten Madiun. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Tujuan penetapan kawasan ini adalah untuk menjaga fungsi kawasan tersebut agar tetap berfungsi dengan optimal. Luasan kawasan ini di Kabupaten Madiun adalah seluas kurang lebih 70.887 ha.

c. Kawasan Perlindungan Setempat.

Untuk arahan kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar sumber mata air. Untuk lebih jelas mengenai penjelasan diatas dapat dilihat dibawah ini.

1) Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Tujuan ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Adapun luasan kawasan sempadan sungai yang ada di Kabupaten Madiun adalah kurang lebih 2.573 ha, meliputi Kali Madiun, Kali Asin, Kali Jerohan, Kali Brangkal, Kali Catur, Kali Bunting, Kali Glonggong, Sungai Klepek, Kali Sareng, Kali Batil, Sungai Gondang, Sungai Semawur, Kali Sono, Kali Piring, Kali Bribis, Kali Blodro, Kali Kentar, Kali Kembang, Kali Abu, Kali Gondang, Kali Mundu, Kali Sukoliman, Kali Uluh, Kali Sarangan, Kali Jumok, Kali Padas, Kali Lengkowo, Sungai Kedungbrubus,

Sungai Ngasinan, Sungai Notopuro, Sungai Gede, Sungai Tangkil, Sungai Bruwok, Sungai Nampu, Sungai Sukorejo, Kali Palem, Sungai Sumber Agung, Kali Gendo, Kali Ulomati, Kali Lemahbang, dan Sungai Saradan/Blangambi.

2) Kawasan Sekitar Danau/Waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk. Adapun kriteria penetapan sempadan danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan sempadan danau atau waduk mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk sebagai potensi sumberdaya air permukaan. Sempadan waduk atau danau yang direncanakan di Kabupaten Madiun antara lain : Sempadan Waduk Widas, Waduk Saradan dan Notopuro, Dawuhan dan Kedungbrubus

3) Kawasan Sekitar Mata Air

Mata Air yang ada di Kabupaten Madiun cukup banyak. Berdasarkan data dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun, mata air yang ada di Kabupaten Madiun sebanyak 114 mata air yang sudah dimanfaatkan untuk air irigasi dan air minum. Dari 114 mata air yang ada di Kabupaten Madiun, mata air dengan debit maksimum 100 liter/detik antara lain Mata Air Dilem di Desa Kare Kecamatan Kare, Mata Air Sambong di Desa Batok Kecamatan Kare, Mata Air Sekebo di Desa Randualas Kecamatan Kare, Mata Air Jirak di Desa Tawangrejo Kecamatan Kare dan Mata Air Gebangarum di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri, dimana mata air tersebut dimanfaatkan untuk irigasi.

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bantuan geologi alami yang telah ada. Adapun tujuan perlindungan adalah melindungi kekayaan hasil budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan astrologi, monumen nasional, keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan dari ancaman kepunahan yang disebabkan

oleh kegiatan alam maupun bencana. Di Kabupaten Madiun terdapat cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dapat dikategorikan menjadi empat bagian yakni lingkungan non bangunan, lingkungan bangunan non gedung, lingkungan bangunan gedung dan halamannya dan kebun raya. Untuk Kabupaten Madiun, yang dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah :

1) Lingkungan Non Bangunan

Di Kabupaten Madiun dijumpai kawasan lingkungan non bangunan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut

- Monumen Kresek/Madiun Affair 48
- Peninggalan Sejarah Nglambangan

2) Lingkungan Bangunan Gedung

Di Kabupaten Madiun lingkungan bangunan non gedung yang berfungsi sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

- Makam Kuncen
- Situs Sewulan
- Makam Mbah Moch Bin Oemar dan Masjid Al Muttaqin
- Makam Patih Kutho Miring Dusun Gentong Desa Putat Kecamatan Geger dan Makam Ki Ageng Rendeng Desa Kincangwetan Kecamatan Jiwan
- Komplek Madiun Lama (Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo)

3) Lingkungan Bangunan Gedung Dan Halamannya

Kawasan lingkungan bangunan gedung dan halamannya merupakan cagar budaya yang bersifat pelestarian terhadap bangunan kuno peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan sebagai ciri cagar budaya setempat. Bangunan gedung cagar budaya di Jawa Timur meliputi Pabrik Gula Pagotan dan Kanigoro.

e. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Kabupaten Madiun merupakan wilayah rawan bencana alam diantaranya, rawan banjir dan rawan kebakaran.

f. Kawasan Lindung Geologi.

Kabupaten Madiun merupakan wilayah rawan bencana alam diantaranya, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, dan kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap air tanah.

10. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat. Luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Madiun kurang lebih 40.631 ha (kurang lebih 40 % dari luas wilayah Kabupaten Madiun), yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun.

b. Kawasan Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Madiun mencapai luas kurang lebih 5.821 ha (kurang lebih 5% dari luas wilayah Kabupaten Madiun) yang tersebar di kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan dan Wonoasri.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian

Lahan pertanian di Kabupaten Madiun meliputi persawahan sepanjang tahun yang dapat ditanami padi karena adanya cukup air, baik dari irigasi teknis maupun irigasi sederhana. Sedangkan pertanian lahan kering biasanya beragam, saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau atau palawija, misal: kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Alokasi pemanfaatan kawasan budidaya pertanian dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Pertanian Sawah

Penggunaan sawah di Kabupaten Madiun meliputi sawah irigasi teknis, sawah setengah teknis, sawah irigasi sederhana, irigasi desa/Non PU dan sawah tadah hujan. Perkembangan wilayah di Kabupaten Madiun menuntut adanya penyediaan lahan untuk pengembangan kegiatan budidaya, permukiman, perdagangan dan jasa, industri maupun fasilitas umum. Dengan akan ditetapkannya Perkotaan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun, maka secara tidak langsung pada kawasan tersebut akan berkembang kegiatan terbangun. Konsekuensinya akan terjadi perubahan penggunaan lahan non budidaya ke budidaya. Kenyataannya Perkotaan Mejayan berada pada kawasan yang sebagian besar wilayahnya perumakan areal persawahan. Kondisi ini tidak bisa dihindari, sehingga perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi lahan terbangun di Perkotaan Mejayan dapat diganti pada wilayah lain dengan melakukan peningkatan dari sawah tadah hutan, sawah irigasi sederhana menjadi sawah irigasi teknis. Luasan kawasan pertanian sawah yang direncanakan kurang lebih 31.594 ha (kurang lebih 31 % dari luas wilayah Kabupaten Madiun), dengan perincian sistem irigasi meliputi Sawah Irigasi Teknis, Sawah Irigasi Setengah Teknis, Sawah irigasi Sederhana, Sawah Irigasi Non PU, dan Sawah Tadah Hujan. Dari rencana luas lahan pertanian sawah tersebut diatas, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 21.587,4 ha. Adapun penyebaran lahan sawah beririgasi di Kabupaten Madiun meliputi Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo, Madiun, Sawahan dan Jiwan. Sedangkan penyebaran lahan sawah tadah hujan meliputi Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo, dan Madiun.

2) Tegal/Kebun/ Ladang

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang biasanya pada saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau atau palawija, misal: kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Kawasan pertanian lahan kering yang dimaksud adalah tegal/ kebun/ ladang. Tegal/kebun/ladang yang direncanakan di Kabupaten Madiun seluas kurang lebih 2.643 ha (kurang lebih 2% dari luas wilayah Kabupaten Madiun). Luas tegal/kebun/ladang mengalami penurunan karena dimanfaatkan untuk lahan

terbangun. Adapun penyebarannya berada di seluruh kecamatan. Untuk peningkatan nilai manfaat dilakukan melalui penerapan sistem pergiliran, tumpang sari dan sebagainya.

3) Hortikultura

Kawasan hortikultura merupakan kawasan komoditi buah-buahan dan sayuran.

Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 2.321 ha (kurang lebih 2% dari luas wilayah Kabupaten Madiun).

d. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing serta prospek ekonomi yang dimiliki. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam dua kelompok yakni perkebunan tanaman tahunan seperti kopi, coklat dan karet, dan perkebunan tanaman semusim antara lain tembakau, tebu, panili dan sebagainya. Kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun dikelola oleh perusahaan seperti perkebunan kopi Kandangan yang terletak di Kecamatan Kare dengan luas mencapai kurang lebih 862 ha dan di Kecamatan Wungu seluas kurang lebih 1 ha, dimana kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai fungsi lindung. Luas keseluruhan kawasan peruntukkan perkebunan kurang lebih 18.912 ha, meliputi kecamatan Gemarang, Kare, Dagangan, Dolopo, dan Saradan.

e. Kawasan Peruntukan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Madiun adalah perikanan darat yang dikembangkan di kolam/sungai, waduk. Adapun arahan pengelolaan kawasan perikanan adalah mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan khususnya kolam/sungai dan waduk. Pengembangan budidaya perikanan kolam diarahkan di Kecamatan Dolopo, Kebonsari, dan Balerejo sedangkan pengembangan budidaya perikanan waduk diarahkan di Kecamatan Wungu, Wonoasri, Pilangkenceng, dan Saradan.

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pada dasarnya penambangan adalah proses pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar pula gangguan terhadap keseimbangan lingkungan dengan demikian kemungkinan terjadinya degradasi semakin besar pula, metoda penambangan akan mempengaruhi besar kecilnya perubahan terhadap bentang alam. Potensi jenis tambang yang ada di Kabupaten Madiun

meliputi kecamatan Kare dan Dagangan berupa pertambangan mineral logam berupa emas, seluruh wilayah kabupaten Madiun berupa pertambangan mineral bukan logam serta pertambangan batuan berupa tanah urug dan sirtu. Sedangkan dalam proses eksplorasi adalah panas bumi berada di Desa Sareng Kecamatan Geger, Desa Segulung Kecamatan Dagangan, dan Desa Batok Kecamatan Gemarang. Sedangkan potensi pertambangan minyak dan gas bumi berada di kecamatan Saradan

g. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Madiun merupakan kebutuhan pembangunan wilayah mengingat peran strategis sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan kawasan industri didasarkan pada aspek ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan perekonomian regional.

Industri di Kabupaten Madiun sebagian besar berupa industri kecil dan sedang. Lokasi industri pada umumnya berkembang ke arah selatan tepatnya di Kecamatan Geger dan Wungu yang berbatasan langsung dengan Kota Madiun. Industri yang ada di Kabupaten Madiun antara lain Pabrik Gula Pagotan, Chemical Industri, Pabrik Gula Kanigoro yang semuanya berada di Kecamatan Geger dan Wungu. Selain ke arah selatan, industri dan pergudangan juga tumbuh dan berkembang ke arah Timur karena pengaruh dari Jalan arteri primer Surabaya - Madiun.

h. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Madiun sebenarnya cukup berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki obyek wisata yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Kabupaten Madiun. Potensi pariwisata di kabupaten Madiun meliputi, pariwisata di bidang agro yang terletak di kawasan Gunung Wilis dengan perkebunan kopi dan kakao, pariwisata seni budaya dengan kesenian dongkrek.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Madiun, untuk perwilayahan pariwisata di Kabupaten Madiun yaitu :

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Caruban Raya, dengan arahan

- a. tema produk pariwisata adalah pariwisata budaya tradisi dan pariwisata kreatif;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Mejayan, Madiun, Wonoasri, Balerejo, Jiwan, dan Sawahan;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya budaya tradisi dan industri kreatif sebagai produk pariwisata kreatif berdaya saing internasional;
 - d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus olahraga tradisional, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus olahraga tradisional.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kawasan Lereng Gunung Wilis dan sekitarnya, dengan arahan :
- a. tema produk pariwisata adalah pariwisata sejarah dan wisata agro;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan, Dolopo, Kebonsari, dan Geger;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan terhadap peninggalan sejarah masa lalu dengan pengembangan sumber daya alam berbasis agro sebagai produk pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dunia;
 - d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus sejarah, cagar budaya, dan pendidikan agro, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus sejarah dan cagar budaya.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kawasan Lereng Gunung Pandan dan sekitarnya, dengan arahan :
- a. tema produk pariwisata adalah ekowisata alam dan warisan budaya;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk ekowisata alam dan budaya berdaya saing internasional;
 - d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus keanekaragaman hayati dan cagar budaya, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus keanekaragaman hayati dan cagar budaya.

Berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor 188.45/441/KPTS/402.013/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/396A/KPTS/402.013/2016 Tentang Destinasi Wisata Kabupaten Madiun, dapat disampaikan obyek wisata di Kabupaten Madiun, antara lain:

Tabel 2.9
Obyek Wisata di Kabupaten Madiun

No	Obyek Wisata	Lokasi
A. WISATA ALAM		
1	Wana Wisata Grape	Desa Kresek, Kec. Wungu
2	DungusForest Park	Kel. Wungu, Kec. Wungu
3	Air Terjun Seweru/Slampir	Desa Kare, Kec.Kare
4	Agro Wisata Perkebunan Kopi Kandangan	Desa Kare, Kec.Kare
5	Wana Wisata Tambak Lare	Desa Kare, Kec. Kare
6	Wana Wisata NongkoIjo	Desa Kare, Kec. Kare
7	Air Terjun KrecekanDenu	Desa Kepel, Kec. Kare
8	Air Terjun Banyu Lawe	Desa Kepel, Kec. Kare
9	GligiForest Park	Desa Kepel, Kec. Kare
10	Air Terjun Selo Aji	Desa Randu Alas, Kec. Kare
11	Air Terjun Coban Kromo	Desa Bodag, Kec.Kare
12	Wana Wisata Selo Gedong	Desa Bodag, Kec. Kare
13	Air Terjun Panguripan	Desa Cermo, Kec. Kare
14	Hutan Pinus Hargo Wilis Poleng	Desa Cermo, Kecamatan Kare
15	Wana Wisata Watu Rumpuk	Desa Mendak, Kec. Dagangan
16	Air Terjun Jambu	Desa Mendak, Kec. Dagangan
17	Pesanggrahan	Desa Segulung, Kec. Dagangan
18	Bukit Asmara Puyangan	Desa Durenan, Kec. Saradan
19	Air Terjun Coban Drajat	Desa Durenan, Kec. Gemarang
20	Air Terjun Jomblang Tengah	Desa Sidomulto, Kecamatan Wonoasri
B. WISATA BUATAN		
1	Monumen Korban Keganasan PKI Tahun 1948 Madiun	Desa Kresek, Kecamatan Wungu
2	Madiun Umbul Square	Desa Glonggong, Kec. Dolopo
3	Waduk Bening Widas	Desa Pajaran, Kec. Saradan
4	Waduk Notopuro	Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng
5	Waduk Saradan	Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan
6	Waduk Kedung Brubus	Desa Bulu, Kecamatan

No	Obyek Wisata	Lokasi
		Pilangkenceng
7	Waduk Dawuhan	Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri
8	Pesona Kali Wungu	Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu
C. DESA WISATA		
1	Desa Wisata Kresek	Desa Kresek, Kecamatan Wungu
2	Desa Wisata Brumbun	Desa Brumbun, Kecamatan Wungu
3	Desa Wisata Nglambangan	Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu
4	Desa Wisata Batok	Desa Batok, Kecamatan Gemarang
5	Desa Wisata Durenan	Desa Durenan, Kecamatan Gemarang
6	Desa Wisata Gunungsari	Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun
7	Desa Wisata Segulung	Desa Segulung, Kecamatan Dagangan
8	Desa Wisata Mendak	Desa Mendak, Kecamatan Dagangan
9	Desa Wisata Kare	Desa Kare, Kecamatan Kare
10	Desa Wisata Candimulyo	Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo
11	Desa Wisata Singgahan	Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari
12	Desa Wisata Tambakmas	Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari
13	Desa Wisata Kaliabu	Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan
D. WISATA SEJARAH		
1	Candi Wonorejo	Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan
2	Prasasti Mruwak	Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan
3	Prasasti Klagenserut	Desa Klagenserut, Kecamatan Jiwan
4	PrasastiBibrik	Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan
5	Situs Ngurawan	Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo
E. WISATA RELIGI		
1	Makam KH. Basyariah	Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan
2	Masjid Agung dan Makam Desa Sewulan	Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan

No	Obyek Wisata	Lokasi
3	Makam/Punden Lambang Kuning	Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu
4	Makam Kuncen	Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan
5	Masjid Quba	Kecamatan Mejayan
6	Makam Syekh Maulana Abdullah	Desa Bodag, Kecamatan Kare
F. WISATA BUDAYA		
1	Sanggar Kesenian Dongkrek	Desa Sumberbening , Kecamatan Balerejo Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan
2	Padepokan Seni Kirun	Desa Bagi, Kecamatan Madiun
3	SEPASMA	Kecamatan Mejayan
4	Perguruan Ilmu Sejati	Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan
5	Padepokan IKS (Ikatan Kera Sakti)	Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri
6	Padepokan Pencak Silat Pandan Alas	Desa Kare, Kecamatan Kare
7	Larung Sesaji Wadung Bening Widas	Desa Pajaran, Kecamatan Saradan
8	Kurasan Sumber Belerang di Umbul	Desa Glonggong, Kec. Dolopo
G. RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN MADIUN		
1	Lapangan Sugihwaras	Kecamatan Saradan
2	Lapangan Ngale	Kecamatan Pilangkenceng
3	Lapangan Buduran	Kecamatan Wonoasri
4	Lapangan Simo	Kecamatan Balerejo
5	Lapangan Kelurahan Nglames	Kecamatan Madiun
6	Lapangan Sawahan	Kecamatan Sawahan
7	Lapangan Wayut	Kecamatan Jiwan
8	Lapangan Purworejo	Kecamatan Geger
9	Lapangan Sewulan	Kecamatan Dagangan
10	Lapangan Balerejo	Kecamatan Balerejo
11	Lapangan Mojopurno	Kecamatan Wungu
12	Lapangan Batok Dusun Kebatu	Kecamatan Gemarang
13	RTH Seweru Kare	Kecamatan Kare
14	Lapangan Mlilir	Kecamatan Dolopo

Sumber : Disparpora Kabupaten Madiun, Tahun 2019 (SK Destinasi Wisata 2019)

i. Kawasan Peruntukan Permukiman

Tujuan pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

- Mendistribusikan perkembangan fisik, kependudukan dan keramaian Kabupaten Madiun ke arah selatan, barat dan utara,
- Menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman di Kabupaten Madiun,
- Menciptakan generator bagi Kabupaten Madiun, khususnya pada bagian selatan, barat dan utara.

Berdasarkan konsep tersebut, maka permukiman di Kabupaten Madiun dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1) permukiman perkotaan dan 2) Permukiman Perdesaan dengan luas rencana pengembangan kurang lebih 13.861 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

j. Kawasan Peruntukan Lainnya

Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya difokuskan pada pemanfaatan kawasan peternakan. Pada saat ini, di wilayah Kabupaten Madiun mulai tumbuh pada beberapa kawasan peternakan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, saat ini terjadi aglomerasi pengembangan ternak ayam pada suatu lokasi seperti di kecamatan Wungu tepatnya di desa Bantengan. Kawasan peternakan dalam skala besar diarahkan di kecamatan Wungu seluas kurang lebih 16 ha dan kecamatan Mejayan seluas kurang lebih 16 ha, sedangkan pengembangan peternakan yang dilakukan setiap keluarga diarahkan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

2.1.1.7 Indikasi Program Pemanfaatan Struktur Ruang/Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi Kabupaten Madiun serta tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 yang tercantum dalam Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Visi:

KABUPATEN MADIUN YANG MAJU, BERBASIS AGRO MENUJU SEJAHTERA

Berdasarkan visi tersebut indikasi program pemanfaatan struktur ruang di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

2.1.1.7.1 Rencana Sistem Perdesaan dan Sistem Perkotaan

2.1.1.7.2.1 Rencana Sistem Perdesaan

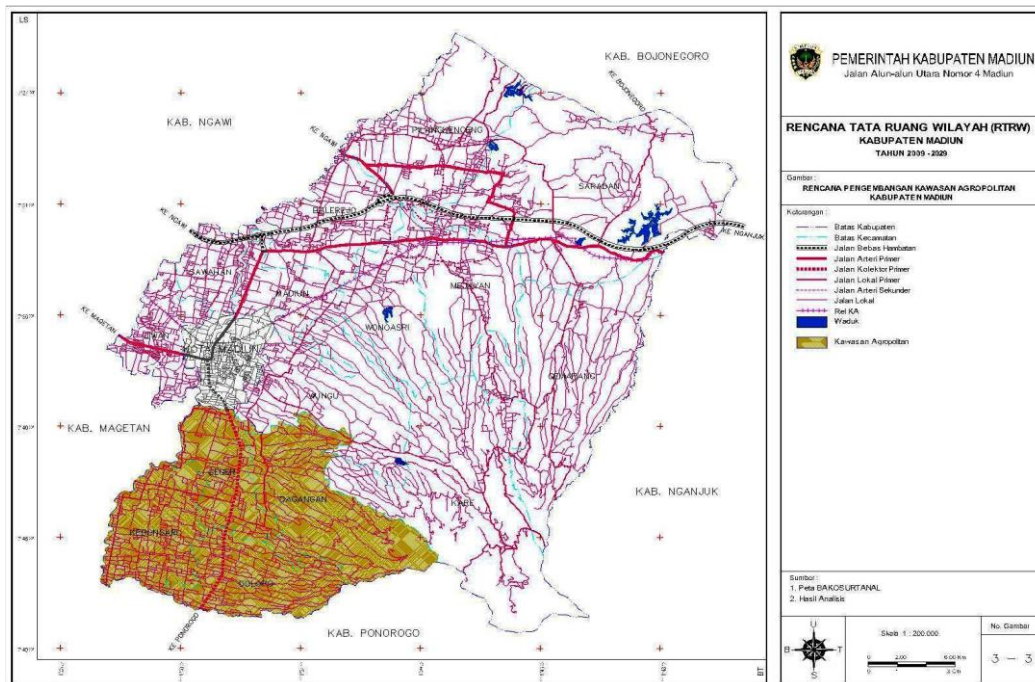
Sistem pusat permukiman pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan antar desa
2. Pusat pelayanan setiap desa
3. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

Pusat pelayanan desa tersebut secara berjenjang memiliki hubungan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat, dengan perkotaan pusat SSWP dan dengan Perkotaan Mejayan yang dipersiapkan menjadi Ibukota Kabupaten maupun dengan Kota Madiun sebagai Pusat SWP di Jawa Timur bagian barat. Struktur ruang perdesaan tersebut merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP. Salah satu bentuk pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Madiun adalah pengembangan kawasan Agropolitan di Geger, Dolopo, Dagangan dan Kebonsariserta kawasan Agropolitan Wilis.

Kawasan agropolitan yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keuangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis yang merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan pedesaan pertanian. Kawasan agropolitan dengan ketersediaan sumberdayanya, tumbuh dan berkembang dengan mengakses, melayani, dan mendorong usaha agrobisnis di desa-desa kawasan (*hinterland*) dan desa-desa sekitarnya. Sesuai Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 24 Januari 2007 Nomor 050/41/201.2/2007 tentang Penetapan Kabupaten Madiun sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur kemudian di tindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor 271 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Agropolitan Gedangsari, yaitu meliputi Kecamatan Geger, Dolopo, Dagangan, dan Kebonsari atau disebut Gedangsari. Produk unggulan yang dikembangkan di kawasan Agropolitan Gedangsari meliputi kakao, buah-buahan, tebu, sapi potong, domba dan ikan segar.

Gambar 2.2
Wilayah Agropolitan di Kabupaten Madiun



Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2020 (RTRW 2009-2029)

2.1.1.7.2.2 Rencana Sistem Perkotaan

1. Hierarki atau Besaran Perkotaan

Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi perkembangan luasan kawasan perkotaan mengindikasikan pola perkembangan yang berbeda. Berdasarkan potensi perkembangan perkotaan tersebut hirarki perkotaan di Kabupaten Madiun berdasarkan tipe perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Perkotaan Kecil (jumlah penduduk 50.000 - 100.000 jiwa) : Perkotaan Mejayan
- b. Perkotaan Lainnya (jumlah penduduk < 25.000 jiwa) : seluruh Ibukota Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun

2. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Setiap kawasan perkotaan akan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan hirarki perkotaan masing-masing. Penentuan Sub Satuan Wilayah Pengembangan dilakukan dengan pendekatan homogenitas, pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang dilakukan. Untuk itu, dibuat sesuai dengan hirarki perkotaan masing-masing dan fungsi yang harus diemban bagi setiap wilayah pendukung.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki fungsi :

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah.

- b. Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah *hinterland*, sehingga diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan.
- c. Sebagai motor penggerak perekonomian wilayah.
- d. Sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah.

Satuan wilayah pengembangan diharapkan dapat berperan secara efektif untuk:

- a. Menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara berhirarki dari tingkat pelayanan lokal, regional dan nasional.
- b. Mendukung strategi kebijakan keruangan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Madiun.
- c. Mendukung rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Madiun yang tidak terpisahkan dari struktur tata ruang wilayah Propinsi.

Kabupaten Madiun terbagi dalam 4 (empat) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yang dibentuk di Kabupaten Madiun adalah :

- a. **SSWP - I adalah** kawasan yang dipersiapkan menjadi bagian dari Ibukota Kabupaten dengan fungsi utama pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan. SSWP I merupakan pusat pengembangan Mejayan, meliputi : Kecamatan Mejayan, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Saradan dan Kecamatan Balerejo.

Fungsi wilayah SSWP I adalah :

- Pusat pemerintahan Kabupaten
 - Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten
 - Pusat pelayanan umum skala Kabupaten
 - Kawasan pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan dan industri.
- b. **SSWP - II adalah** kawasan-kawasan yang menjadi wilayah limpahan dari Kota Madiun dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta permukiman, meliputi : Kecamatan Jiwan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Madiun dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Sidorejo, Desa Munggut, Desa Pilangrejo, Desa Mojopurno, Desa Mojoyayung, Desa Bantengan, Desa Tempursari, dan Desa Nglanduk).

Fungsi wilayah SSWP II adalah :

- Pertahanan dan keamanan
- Perdagangan dan jasa
- Pertanian
- Peternakan
- Perkebunan
- Industri kecil

- c. **SSWP - III adalah** kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan, agrowisata, ekowisata, dan agroforestry, di Kabupaten Madiun, meliputi : Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger, Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Kebonsari.

Fungsi wilayah SSWP III adalah :

- Perdagangan dan jasa
- Pertanian
- Peternakan
- Perikanan
- Perkebunan
- Industri kecil pengolah hasil
- Kawasan lindung
- Pariwisata

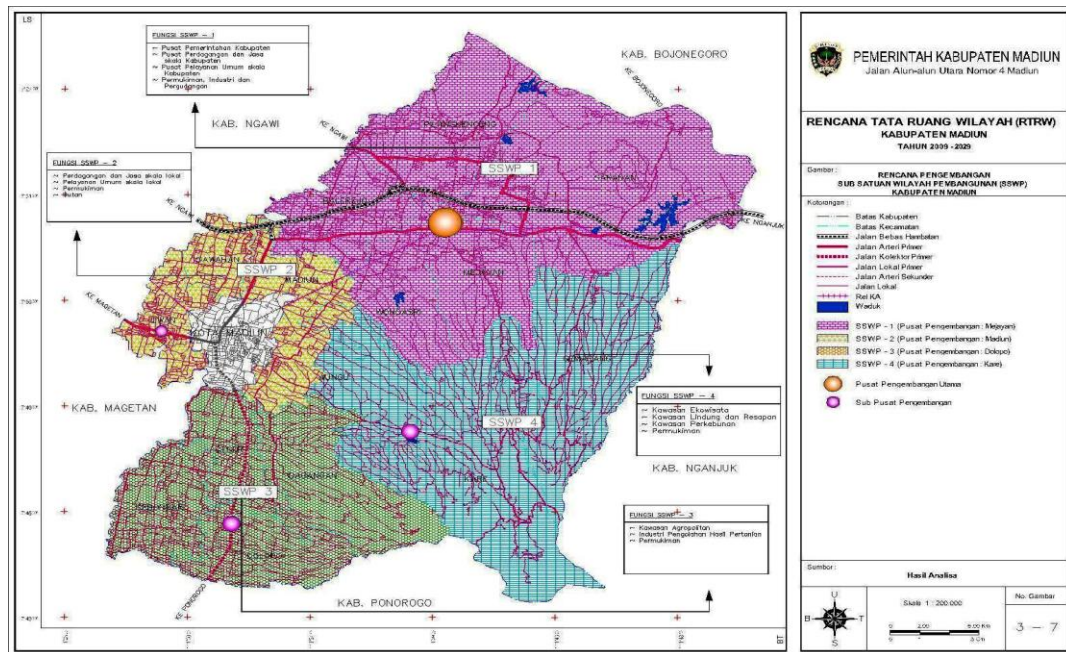
- d. **SSWP - IV adalah** kawasan-kawasan yang direncanakan untuk pengembangan ekowisata dan fungsi lindung di Kabupaten Madiun (Ecological City), meliputi : Kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Karangrejo, Desa Brumbun, Desa Kresek, Desa Wungu, Desa Nglambangan dan Desa Sobrah).

Fungsi wilayah SSWP IV adalah :

- Perdagangan dan jasa
- Pertanian
- Peternakan
- Perkebunan
- Kawasan lindung
- Pariwisata

Gambar 2.3

Rencana Sub Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Madiun



Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2020 (RTRW 2009-2029)

2.1.1.7.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

2.1.1.7.2.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

1. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Untuk mengantisipasi permasalahan prasarana transportasi yang terjadi saat ini maupun masa yang akan datang serta upaya pengembangan wilayah secara optimal maka rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Madiun, antara lain :

- a. Rencana Peningkatan Jalan Menuju *Interchange* (Pintu Tol) Jalan Tol dan Stasiun Kereta Api

Dengan telah dibangunnya jalan tol untuk ruas jalan di wilayah Kabupaten Madiun dan Pengembangan Stasiun serta Peningkatan Status Stasiun Kereta Api, perlu direncanakan pembangunan dan peningkatan jalan, yaitu :

- 1) Pada ruas-ruas jalan menuju *Interchange* (Pintu Tol) Madiun (Bagi/Dumpil) dan Muneng (Purworejo), baik dari Arah Kota Madiun-Dolopo, Madiun-Maospati dan Kota Caruban-Saradan.
- 2) Pada ruas - ruas jalan menuju Stasiun Caruban, Saradan dan Babatan.

- b. Jalan penghubung antara jalan nasional dengan rencana jalan selingkar wilis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, kawasan Selingkar Wilis menjadi Kawasan prioritas pembangunannya, terutama infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten.

Adapun ruas jalan Kabupaten Madiun yang termasuk dalam jalur Selingkar Wilis yang menjadi prioritas pembangunannya adalah:

Tabel 2.10
Jalan Kabupaten Madiun yang Termasuk Jalur Selingkar Wilis

No	Ruas	Panjang(Km)
1	Jl. Mundu - Bts. Nganjuk (153)	11,18
2	Jl. Kare - Mundu (024)	14,24
3	Jl. Kare - Plosorejo (148)	4,71
4	Jl. Plosorejo - Bts. Ponorogo (149)	8,38
JUMLAH		38,51

Gambar 2.4
Jalur Ring 1 Selingkar Wilis di Kabupaten Madiun

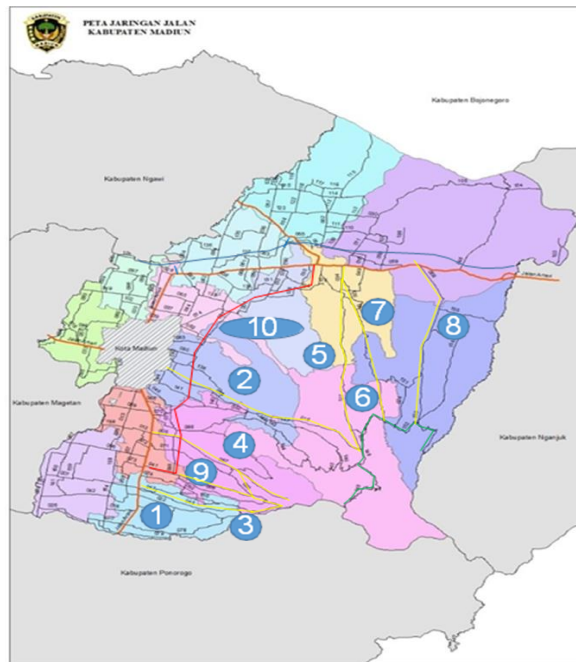


Untuk rencana pembangunan jalan penghubung menuju Selingkar Wilis, sebagai berikut

Tabel 2.11
Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis

No	Ruas	Panjang(Km)
1	Jl. Dolopo - Bts. Ponorogo (022)	5,67
2	Jl. Batas Kota Madiun - Dungus - Kare(016)	9,74
3	Jl. Segulung - Suluk (090)	14,96
4	Jl. Dagangan - Pesanggrahan(087)	11,5
5	Jl. Blabakan - Randualas (127)	14,52
6	Jl. Kare - Randualas (150)	3,43
7	Caruban-Morang-Kare	20,00
8	Jl. Saradan - Mundu (008)	12,11
9	Jl. Slambur -Segulung (041) Ketandan-Mendak (089) Mendukung Pembangkit Listrik Panas Bumi	16,55
10	Jalan lingkar selatan	28,30
JUMLAH		139,78

Gambar 2.5
Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis



c. Sistem Jaringan Jalan

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan meliputi :

- 1) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer : Ruas Nganjuk - Mejayan-
Ngawi.
- 2) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer : Ruas Mejayan- Madiun -
Maospati - Ngawi.
- 3) Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer: Ruas Madiun - Ponorogo.

- 4) Jalan strategis nasional : Ruas Madiun - Ponorogo.
- 5) Jalan Kabupaten sebagai Jalan Lokal Primer, meliputi ruas :
 - Nganjuk - Madiun - Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/Ngadipono);
 - Sawahan (Nganjuk) - Gemarang - Saradan - Pilangkenceng - Sekar (Bojonegoro);
 - Dolopo - Krandegan - Gorang-Gareng (Kabupaten Magetan);
 - Bulu - Kenongorejo - Sekar (Kabupaten Bojonegoro);
 - Mejayan - Klecorejo - Wonorejo - Kebonagung - Tawangrejo - Batok (kawasan panas bumi) - Cermo - Randualas - Kare - Kuwiran - Wungu - Karangrejo - Mojopurno - Sidorejo - Dagangan - Kepet - Sareng (kawasan panas bumi) - Geger - Slambur;
 - Slambur - Geger - Kepet - Dagangan - Sidorejo - Mojopurno - Nglanduk -Dimong - Kebonagung - Balerejo - Kedungjati - Pacinan - Simo - Muneng - Kreet - Kenongorejo - Bulu -Sekar (Kabupaten Bojonegoro);
 - Demangan (Kota Madiun) - Putat - Sambirejo - Kedondong - Rejosari - Mojorejo - Tambakmas - Ponorogo.
- 6) Jalan kota, meliputi : Ruas lingkaran perkotaan Mejayan.

d. Jalan Tembus Potensial

Jalan potensial yang dikembangkan di Kabupaten Madiun, meliputi:

- 1) Lingkar Wilis/Ngadipono (Nganjuk - Madiun -Ponorogo)
 Jalan tembus ini direncanakan untuk optimalisasi pengembangan kawasan wisata Gunung Wilis dan agrowisata sehingga diharapkan kawasan wisata Gunung Wilis dapat dikembangkan dan sekaligus mempermudah distribusi hasil kegiatan pertanian disekitarnya.
- 2) Sawahan (Kabupaten Nganjuk) - Gemarang - Saradan - Pilangkenceng - Sekar (Kabupaten Bojonegoro)
 Jalan tembus ini dikembangan untuk optimalisasi Waduk Kedungbrubus sebagai salah satu objek wisata di Kabupaten Madiun, maupun meningkatkan aksesibilitas dari Bojonegoro ke Perkotaan Mejayan.
- 3) Randualas - Kawasan Agrowisata Gunung Wilis.

Tabel 2.12
Jalan Tembus Potensial

NO.	Nama Ruas	Panjang (Km)
1.	Jl. Lembahbang - Bts. Bojonegoro (Klino) (048)	11,98
2.	Jl. Ngepeh-Tulung (011) - Klagon (105)	19,00
3.	Jl. Bajulan-Kengorejo (002) -Sumbengandu-Bulu (112)- Bts Bojonegoro (Sekar) (115)	14,5
4.	Jl. Balerejo-muneng	7,8
5.	Jl. Teguhan-Bibrik (093)- Sidomulyo-Kanung (102) - Tiron	6,5
6.	Jl. Uteran – Batas Magetan (006)	7,1
7.	Jembatan Tiron (melintasi Kali Madiun)	0,280
	Jumlah	66.88

2. Rencana Fungsi Jaringan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan membagi sistem jaringan jalan dalam dua sistem yaitu Sistem Primer dan Sistem Sekunder. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan primer ini meliputi arteri primer, kolektor primer dan lokal primer. Secara administratif sistem jaringan jalan primer merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

Sistem jaringan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan. Sistem jaringan sekunder ini meliputi arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder dan jalan lingkungan. Secara administratif sistem jaringan jalan sekunder merupakan kewenangan Pemerintah Kota atau Kabupaten.

Berdasarkan kriteria tersebut, jaringan jalan di Kabupaten Madiun berdasarkan fungsinya sebagai berikut :

- a. Jalan nasional sebagai jalan arteri primer : Ruas Nganjuk – Mejayan– Ngawi.
- b. Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer : Ruas Mejayan– Madiun – Maospati – Ngawi.
- c. Pengusulan ruas jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi, yang merupakan ruas penghubung dengan perbatasan daerah sekitar, meliputi ruas :
 - 1) Ruas jalan Bagi – Batas Ngawi sepanjang 2,71 km;
 - 2) Ruas jalan Pule – Batas Ngawi sepanjang 1,50 km;
 - 3) Ruas jalan Balerejo – Muneng sepanjang 7,80 km;

- 4) Ruas jalan Kaligunting – Bajulan sepanjang 4,96 km;
 - 5) Ruas jalan Pattimura sepanjang 1,00 km;
 - 6) Ruas jalan Uteran – Batas Magetan sepanjang 7,11 km;
 - 7) Ruas jalan Lemahbang – Klino sepanjang 11,98 km;
 - 8) Ruas jalan Krokeh – Batas Magetan sepanjang 5,37 km;
 - 9) Ruas jalan Jiwan – Batas Magetan sepanjang 3,52 km.
- d. Jalan strategis nasional meliputi Ruas Madiun – Ponorogo, ruas Caruban – Saradan, ruas Caruban – Batas Kota Madiun, ruas Madiun – Maospati serta ruas Caruban – Ngawi.
- e. Jalan Kabupaten sebagai Jalan Lokal Primer, meliputi ruas:
- 1) Nganjuk – Madiun – Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/Ngadipono).
 - 2) Sawahan (Nganjuk) – Gemarang – Saradan – Pilangkenceng – Sekar (Bojonegoro).
 - 3) Dolopo – Krandegan – Gorang-Gareng (Kabupaten Magetan).
 - 4) Bulu – Kenongorejo – Sekar (Kabupaten Bojonegoro).
 - 5) Mejayan – Klecorejo – Wonorejo – Kebonagung – Tawangrejo – Batok (kawasan panas bumi) – Cermo – Randualas – Kare – Kuwiran – Wungu – Karangrejo – Mojopurno – Sidorejo – Dagangan – Kepet – Sareng (kawasan panas bumi) – Geger – Slambur.
 - 6) Slambur – Geger – Kepet – Dagangan – Sidorejo – Mojopurno – Nglanduk – Dimong – Kebonagung – Balerejo – Kedungjati – Pacinan – Simo – Muneng – Kreet – Kenongorejo – Bulu – Sekar (Kabupaten Bojonegoro).
 - 7) Demangan (Kota Madiun) – Putat – Sambirejo – Kedondong – Rejosari – Mojorejo – Tambakmas – Ponorogo.
- f. Jalan kota, meliputi : Ruas lingkar perkotaan Mejayan.
- g. Jalan lingkungan, meliputi : Ruas di lingkungan permukiman dan ruas yang menghubungkan antar permukiman di seluruh kecamatan.
3. Rencana Sistem Pelayanan Angkutan Umum

a. Rencana Pengembangan Terminal

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Madiun, untuk itu perlu direncanakan pengembangan terminal baik terminal barang maupun penumpang. Pengembangan terminal tersebut dapat menunjang segala aktivitas maupun kegiatan terutama sektor perekonomian. Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1) Terminal Penumpang

Terminal penumpang merupakan terminal angkutan darat dimana bus antar wilayah baik antar propinsi ataupun antar kabupaten dapat melakukan transit sesuai dengan jalur tujuan. Seiring dengan perkembangan angkutan penumpang Kabupaten Madiun, maka perlu pembenahan sarana dan prasarana penunjang terminal yang sesuai dengan fungsinya/kelasnya.

Rencana pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Madiun adalah:

- a) Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan Terminal Mejayandi Perkotaan Mejayan sebagai terminal tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota, antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Rencana pengembangan terminal di Mejayan dari tipe B menjadi Tipe A, memerlukan lahan pengembangan yang lebih luas, sehingga terminal ini perlu untuk dipindahkan pada wilayah yang strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terminal Mejayan sebagai terminal Tipe A melayani jalur antar kota atau propinsi dengan trayek Surabaya - Mejayan - Madiun - Ponorogo/Magetan dan Surabaya - Mejayan - Ngawi - Solo.
- b) Selain terminal utama, pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Madiun meliputi pengoptimalan Sub Terminal di Perkotaan Dolopo (terminal tipe C) baik pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana maupun pengembangan jalur angkutan.
- c) Pengembangan kawasan parkir di koridor jalan arteri primer.

2) Terminal Agribis

Selain pengembangan terminal barang, Kabupaten Madiun memerlukan terminal induk sebagai pusat pengembangan agribis (terminal agrobis) yang direncanakan di Kecamatan Dolopo.

4. Jalur Kereta Api Umum

a. Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Umum

Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api umum yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Pengembangan jaringan jalur ganda (double track) kereta api umum pada jalur Nganjuk – Madiun – Ngawi dan telah selesai dilaksanakan;
- 2) Mengembangkan kereta api komuter ruas Madiun – Ponorogo melalui konservasi jaringan jalur kereta api umum yang mati.

Sedangkan rencana pengembangan stasiun kereta api yang perlu dilakukan antara:

- 1) Meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan di Stasiun Kereta Api Caruban, Saradan dan Babadan;
- 2) Meningkatkan status Stasiun Kereta Api Caruban dan Saradan menjadi stasiun pemberangkatan dan pemberhentian dengan menambah frekuensi kelas eksekutif, dan Stasiun Babadan sebagai stasiun barang.

b. Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Umum

1) Sempadan Jaringan Kereta Api

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan daerah manfaat jalan kereta api adalah jalan rel beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel. Daerah milik jalan kereta api yaitu daerah manfaat jalan kereta api beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk pengamanan konstruksi.

- a) Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) Kereta Api
- b) Ruang Milik Jalan (Rumija) Kereta Api
- c) Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) Kereta Api

Untuk perlindungan sempadan kereta api antara lain meliputi upaya penataan kawasan dengan cara merelokasi pada penduduk yang berada di sempadan rel, pengadaan taman, jalan yang menghubungkan antar kelurahan/desa, serta penataan/perbaikan lahan sempadan.

2.1.1.7.2.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

a. Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik

Pengembangan pembangkit tenaga listrik pada kawasan perencanaan diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan daya listrik, meliputi :

- 1) Mengoptimalkan PLTA Golang dan Giringan di Kecamatan Kare
- 2) Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan listrik dan pemenuhan energi. Pembangkit listrik

yang sekarang sedang dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di Desa Sareng Kecamatan Geger, Desa Segulung Kecamatan Dagangan, dan Desa Batok Kecamatan Gemarang.

- 3) Pengembangan energi baru dan terbarukan meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga biogas bagi kawasan terpencil yang tidak memperoleh pasokan tenaga listrik dari PLN baik secara swadaya masyarakat, bantuan dari Pemerintah maupun bantuan dari swasta.

b. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Energi

Tujuan dari rencana pengembangan jaringan prasarana energi adalah memenuhi kebutuhan akan sistem prasarana dan sarana jaringan energi yang berfungsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan/pembangunan daerah, terdiri dari :

- 1) Pengembangan Jaringan Minyak dan Gas Bumi
- 2) Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Gardu Induk Distribusi Listrik

2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan tower *BTS (Base Transceiver Station)* sangat penting untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi masyarakat, sehingga *BTS* dapat menjangkau ke pelosok perdesaan. Dalam pemanfaatannya *BTS* direncanakan menjadi *BTS* terpadu, hal ini dilakukan untuk menghindari terciptanya hutan tower.

3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Kabupaten/ Kota

Kabupaten Madiun memiliki sumberdaya air cukup besar baik dari beberapa sungai yang melintasi Kabupaten Madiun maupun dari sumber-sumber air yang berada di waduk-waduk. Dari 41 sungai yang melalui Kabupaten Madiun terdapat tiga sungai yang berada pada perbatasan Wilayah Kabupaten Madiun dengan wilayah lainnya. Sungai-sungai tersebut adalah: 1) Kali Madiun yang melalui Kota Madiun dan menjadi

wilayah perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, serta perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, 2) Kali Asin yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo, serta 3) Kali Widias yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Kali Madiun dan Kali Asin dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi di kabupaten/kota tersebut, sehingga dalam pengelolaannya perlu melibatkan kerjasama antara kabupaten/kota tersebut.

b. Rencana Pengembangan Wilayah Sungai Kabupaten Termasuk Waduk, Situ dan Embung

- 1) Usaha menambah penampungan air pada musim hujan (retarding) untuk dimanfaatkan pada musim kemarau/kering, dengan menambah waduk-waduk atau embung dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada.
- 2) Rekayasa daerah tangkapan air untuk memperoleh resapan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya, dengan tujuan untuk mempengaruhi siklus hidrologi air tanah.
- 3) Menetapkan sempadan sungai yang didukung oleh penegakan hukum.
- 4) Melakukan penyuluhan dan pendidikan masyarakat lewat berbagai media menyangkut berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasinya.

c. Pengembangan Jaringan Irigasi

Rencana pengembangan prasarana pengairan lebih ditekankan pada upaya-upaya perbaikan saluran yang sebagian besar dalam kondisi rusak. Pengembangan akan dilakukan untuk setiap wilayah pelayanan pengairan di wilayah Kabupaten Madiun antara lain: perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air; dan perluasan daerah tangkapan air.

Sedangkan upaya pengembangan pelayanan pengairan dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air
- 2) Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai
- 3) Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi

4) Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air

d. Pengembangan Jaringan Air Baku untuk Air Bersih

Arahan pengembangan dan pengelolaan jaringan air baku untuk air bersih adalah sebagai berikut :

- 1) Air di badan-badan sungai yang berada di luar kawasan lindung dan merupakan sumber utama dengan debit yang besar dan kualitas air yang sedang sampai baik, dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, perikanan dan air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan.
- 2) Air di badan-badan sungai yang termasuk kawasan lindung tidak boleh dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, kecuali untuk kondisi khusus atau telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang.
- 3) Air di sejumlah mata air di kawasan perbukitan yang kondisi tutupan lahannya terpelihara dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan debit yang aman bagi kelestarian mata air dan bagi kawasan di bawahnya.
- 4) Air tanah dangkal di kawasan permukiman dapat dimanfaatkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih domestik pada skala penggunaan individu (unit rumah tangga) yang relatif kecil.
- 5) Air tanah dalam, jika potensinya mencukupi maka dapat dimanfaatkan dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.

4. Pengembangan Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Madiun terbagi dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem air bersih yang diusahakan secara mandiri oleh masyarakat (HIPPAM/swakelola).

5. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir

Banjir merupakan momok bagi kawasan rawan banjir, terutama pada kawasan dengan ketinggian yang lebih rendah dari muka air sungai/air laut, kawasan pertemuan sungai dengan sungai, kawasan dengan drainase yang buruk, dan kawasan yang mempunyai tingkat porositas tanah yang rendah. Pengendalian banjir dapat dilakukan dengan pendekatan secara struktur dan non struktur.

2.1.1.7.2.3 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

1. Rencana Sistem Persampahan

Capaian pelayanan persampahan di Kabupaten Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.13
Capaian Layanan Persampahan di Kabupaten Madiun

NO	KOMPONEN	CAPAIAN (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pencapaian pengurangan kuantitas sampah dari sumbernya	1,51	2,32	3,13	3,93	4,74
2	Pencapaian layanan pengelolaan sampah	19,71	19,71	30,87	36,44	42,02

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/kota, Tahun 2021

a. Jumlah Timbunan Sampah

Pola pembuangan sampah yang ada di Kabupaten Madiun dilaksanakan dengan sistem individual dan komunal yang sudah dilayani oleh sistem pengelolaan sampah umum, mulai dari pengumpulan, hingga pembuangan akhir, yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sementara untuk Tempat Pembuangan Sampah yang berupa container dan landasannya terdapat 34 unit.

b. Daerah Pelayanan

Daerah pelayanan meliputi seluruh desa di Kabupaten Madiun. Dengan sistem manajemen pengelolaan sampah, terutama untuk pengangkutan dari TPS menuju TPA yang dilakukan secara terintegrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

c. Kebutuhan Peralatan Persampahan

Berdasarkan prediksi jumlah timbulan sampah Kabupaten Madiun, maka dapat ditentukan jumlah kebutuhan peralatan persampahan yang harus dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun khususnya untuk pelayanan Kabupaten Madiun.

1) Umur TPA

Berdasarkan data eksisting, TPA Kaliabu seluas 6 ha diperkirakan masih mampu menampung kebutuhan sampah Kabupaten Madiun sampai Tahun 2023.

2) Arah Pengembangan

Berdasarkan hasil prediksi dan permasalahan yang ada, maka arahan pengembangan prasarana persampahan meliputi :

- a) Umur TPA Kaliabu diperkirakan sampai Tahun 2023. Perlu adanya alternatif lokasi TPA baru, mengingat lokasi TPA Kaliabu berdekatan dengan penetapan Kawasan Perkotaan Mejayan yang dipersiapkan menjadi Ibukota Kabupaten Madiun. Selain itu perlu juga alternatif lokasi TPA baru untuk wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan.
- b) Pemilihan lokasi baru untuk tempat pembuangan akhir harus sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan.
- c) Pengurangan masukan sampah ke TPA dengan konsep *reduce-reuse-recycle* di sekitar wilayah sumber sampah.
- d) Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis.
- e) Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak.
- f) Mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPA.

2. Rencana Sistem Sanitasi Lingkungan

Tujuan rencana sistem sanitasi lingkungan adalah memenuhi kebutuhan akan sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan air limbah domestik (air limbah rumah tangga) yang berasal dari perumahan dan permukiman, dalam mencapai ruang hidup yang sehat dan produktif. Arah pengembangan pengelolaan sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Limbah Rumah Tangga
- b. Untuk Limbah Cair Rumah Sakit/Puskesmas
- c. Untuk Limbah Cair Industri

3. Rencana Sistem Pengembangan Jaringan Drainase

Tujuan dari rencana sistem pengembangan saluran drainase di Kabupaten Madiun adalah mengalirkan air permukaan ke badan air penerima atau bendungan resapan buatan, dalam mencapai ruang hidup yang sehat dan produktif. Sistem drainase di Kabupaten Madiun masih menggunakan sistem drainase gabungan, adalah sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama baik untuk air permukaan maupun air limbah yang diolah. Penanganan pada sistem drainase di Kabupaten Madiun adalah :

- a. Saluran primer : melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan lainnya
- b. Saluran sekunder, saluran tersier dengan berbagai dimensi yang mengikuti sistem jaringan jalan

2.1.1.7.2.4 Rencana Pengembangan Prasarana Pendukung

1. Fasilitas Pendidikan

Arahan pembangunan fasilitas pendidikan di kabupaten Madiun sebagai berikut:

- a. Pembangunan fasilitas pendidikan ditekankan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui membenahan prasarana dan sarana yang telah ada maupun pembangunan fasilitas baru mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai SLTP.
- b. Untuk pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan baru tingkat dasar sampai SLTP dilakukan secara tersebar pada lokasi-lokasi fasilitas umum disekitar kawasan permukiman yang sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.

2. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan diarahkan sebagai berikut:

- a. Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang ada maupun pembangunan fasilitas kesehatan baru.
- b. Pembangunan fasilitas kesehatan baru dilakukan tersebar pada lokasi-lokasi yang strategis, dekat dengan lingkungan permukiman dan mudah dijangkau.

3. Fasilitas Peribadatan

Pembangunan fasilitas peribadatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan skala pelayanannya.

4. Fasilitas Perdagangan

Kebutuhan fasilitas utama perdagangan adalah pasar. Selain fasilitas tersebut pada kawasan Perkotaan Mejayan dibutuhkan juga hotel, restoran, *showroom*, aktivitas perbankan dan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya.

5. Fasilitas Pemerintahan

Pembangunan gedung-gedung pemerintahan terus dikembangkan di pusat pemerintahan di Perkotaan Mejayan.

6. Taman dan Fasilitas Olah Raga

Pengembangan fasilitas olah raga di Kabupaten Madiun dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan olah raga baik pada skala kabupaten maupun kecamatan. Untuk Kabupaten Madiun dibutuhkan fasilitas olah raga berupa :

- a. Lapangan olah raga skala kecamatan yang dialokasikan di setiap kecamatan.
- b. Lapangan olah raga skala kabupaten yang dialokasikan di Perkotaan Mejayan.

7. Fasilitas Seni dan Budaya

Pengembangan fasilitas seni dan budaya di Kabupaten Madiun berupa ruang serbaguna, gedung pertemuan serta fasilitas kesenian dan budaya. Pembangunan fasilitas seni dan budaya dilakukan dengan pengembangan fasilitas yang sudah ada maupun pembangunan fasilitas baru. Untuk kebutuhan fasilitas baru, dibutuhkan penambahan:

- a. Dibutuhkan 1 (satu) unit gedung pertemuan dialokasikan di Perkotaan Mejayan.
- b. Dibutuhkan 1 (satu) unit balai budaya dialokasikan di Perkotaan Mejayan.

8. Fasilitas Pemakaman

Pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum di daerah.

9. Ruang Terbuka Hijau

Pembagian RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki oleh kota/kawasan perkotaan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai. Sedangkan yang termasuk RTH privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi RTH kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Madiun adalah paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Pembagian RTH ini terdiri

dari RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.

2.1.1.7.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi:

1. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya gerakan tanah tersebut, maka Kabupaten Madiun dibedakan menjadi :

a. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada daerah ini sangat jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah baru maupun gerakan tanah lama, terkecuali pada daerah sekitar tebing sungai. Daerah yang termasuk dalam zona ini meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare dan Dagangan. Luas zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah mencapai luas 35.853,59 ha.

b. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan gerakan tanah rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya zona ini jarang terjadi gerakan tanah apabila lereng tidak mengalami gangguan dan jika terdapat gerakan tanah lama umumnya lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah kecil mungkin dapat terjadi terutama pada tebing lembah sungai (alur). Daerah yang termasuk dalam zona ini adalah seluruh kecamatan kecuali Jiwan, Sawahan, Kebonsari dan Balerejo dimana keempat kecamatan tersebut masuk dalam zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Luas zona kerentanan gerakan tanah rendah mencapai luas 47.314,04 ha.

c. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan gerakan tanah menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah berdimensi kecil dan besar terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, peralihan litologi atau tebing jalan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama serta erosi lateral yang kuat.

Lereng pada umumnya dibentuk oleh endapan aluvium (Qa), morfosit

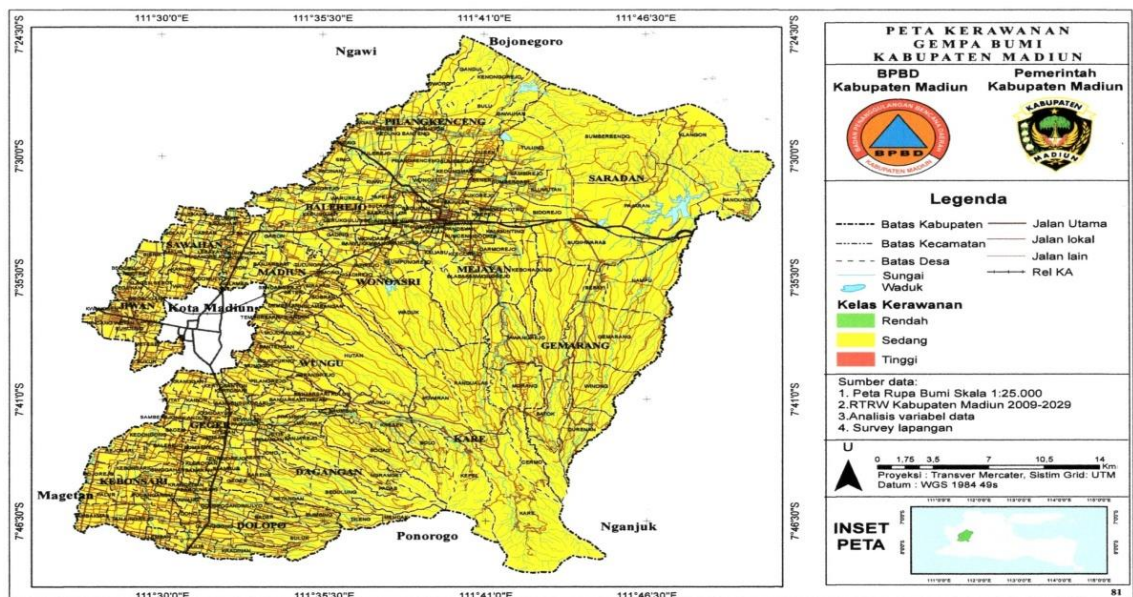
Argokalangan (Qav), Morfoset Jeding - Patukbanteng (Qj), Morfosit Tanjungsari (Qjt) dan Morfosit Ngebel (Qjn). Daerah yang termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah di Kabupaten Madiun antara lain Kecamatan Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Mejayan, Wonoasri dan Madiun dengan luas penyebaran mencapai 15.642,87 ha.

d. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan baru masih aktif bergerak, terutama disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan dalam waktu lama serta erosi lateral yang kuat.

Lereng pada umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan dasar dari morfonit Tanjungsari (Qjt), Morfonit Argokalangan (Qav), Morfoset Jening - Patukbanteng (Qj), Morfonit Ngebel (Qjn). Daerah yang termasuk dalam zona ini adalah Kecamatan Dagangan dan Kare dengan luas mencapai 2.275,47 ha.

Gambar 2.6
Peta Kerawanan Gempa Bumi Kabupaten Madiun

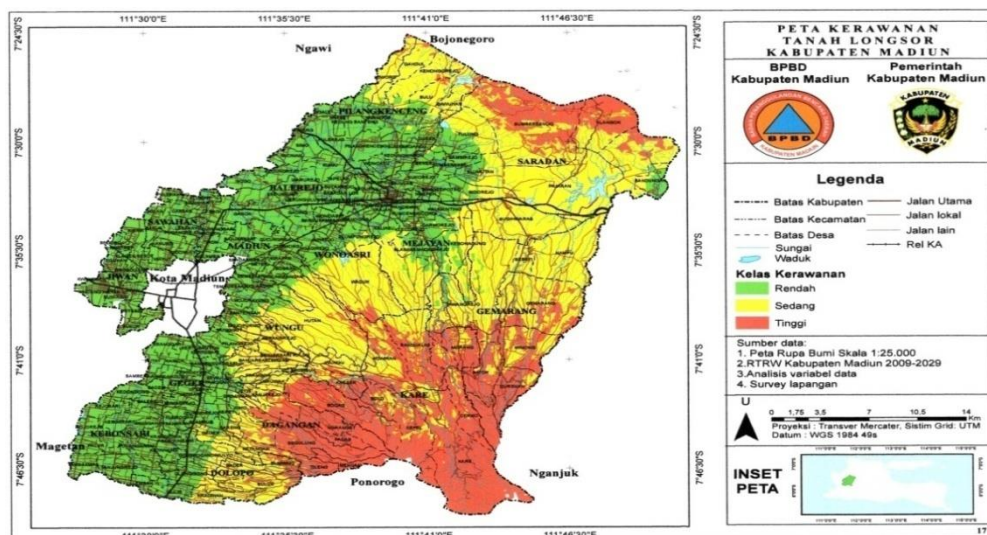


Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2021

Kabupaten Madiun dilalui oleh zona patahan yaitu pada daerah bagian utara Kecamatan Saradan. Di daerah ini pernah terjadi setidaknya satu kali gempa dengan kekuatan 4.0 SR pada bulan Juni 2015 dan beberapa gempa dengan skala rendah dan terjadi dengan intensitas yang tinggi (gempa swarm) pada bulan Februari 2016. Pada bulan Juni 2015 gempa terjadi di Dusun Pohulung, Desa Klangon dengan kedalaman 5 km dan menimbulkan kerusakan bangunan rumah

warga. Sedangkan gempa berikutnya pada Februari 2016 tidak begitu terasa goncangannya, karena merupakan gempa swarm. Di sebelah timur laut G. Pandan terdapat patahan aktif dengan orientasi barat daya-timur laut dan mekanisme patahan mengiri (sinistral).

Gambar 2.7
Peta Kerawanan Tanah Longsor Kabupaten Madiun



Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2021

Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerengan 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang berada pada ketinggian 1000 sampai >2000 meter di atas permukaan laut umumnya mempunyai kelerengan wilayah di >25%. Kondisi lereng demikian memiliki potensi ancaman gerakan tanah (tanah longsor) cukup tinggi. Beberapa wilayah yang terdapat pada kawasan tersebut antara lain adalah Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Gemarang, Saradan, Mejayan dan Wonoasri, dimana kecamatan-kecamatan tersebut umumnya berada di bagian selatan berdekatan dengan Pegunungan Wilis.

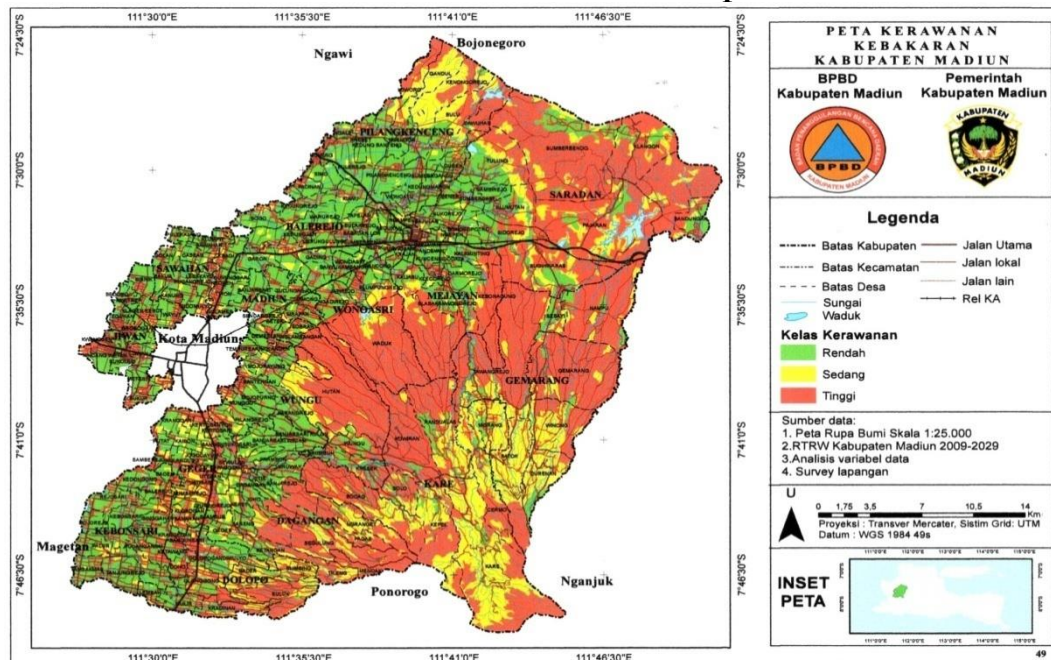
2. Kawasan Rawan Kebakaran

Bencana kebakaran tidak terlepas dari kondisi kerawanan kekeringan di Kabupaten Madiun. Sebagian dari kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun tergolong sebagai kawasan rawan kekeringan. Rawan kekeringan di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kawasan rawan kekeringan karena wilayah tersebut memiliki potensi air tanah sangat kecil
- b. Kawasan rawan kekeringan terutama untuk pertanian karena berada di tepian hutan dan berada di dataran tinggi kapur seperti Kecamatan

Pilangkenceng, Saradan, Geger dan Wungu.

Gambar 2.8
Peta Kerawanan Kebakaran Kabupaten Madiun



Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2021

Sebagian besar dari Kabupaten Madiun merupakan daerah hutan dengan luas mencapai kurang lebih 40.631 ha yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Kawasan hutan ini sebagian besar merupakan hutan jati. Pada musim kemarau pohon jati pada umumnya akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Pada saat inilah kawasan hutan jati tampak kering dan gersang sehingga dengan terik matahari yang panas maka kawasan ini sangat rawan terhadap kebakaran.

3. Kawasan Rawan Banjir

Di Kabupaten Madiun terdapat 2 (dua) kriteria genangan di daerah sekitar Kali Madiun yang sering mengalami banjir. Dua kriteria tersebut adalah:

a. Genangan banjir akibat hujan lokal.

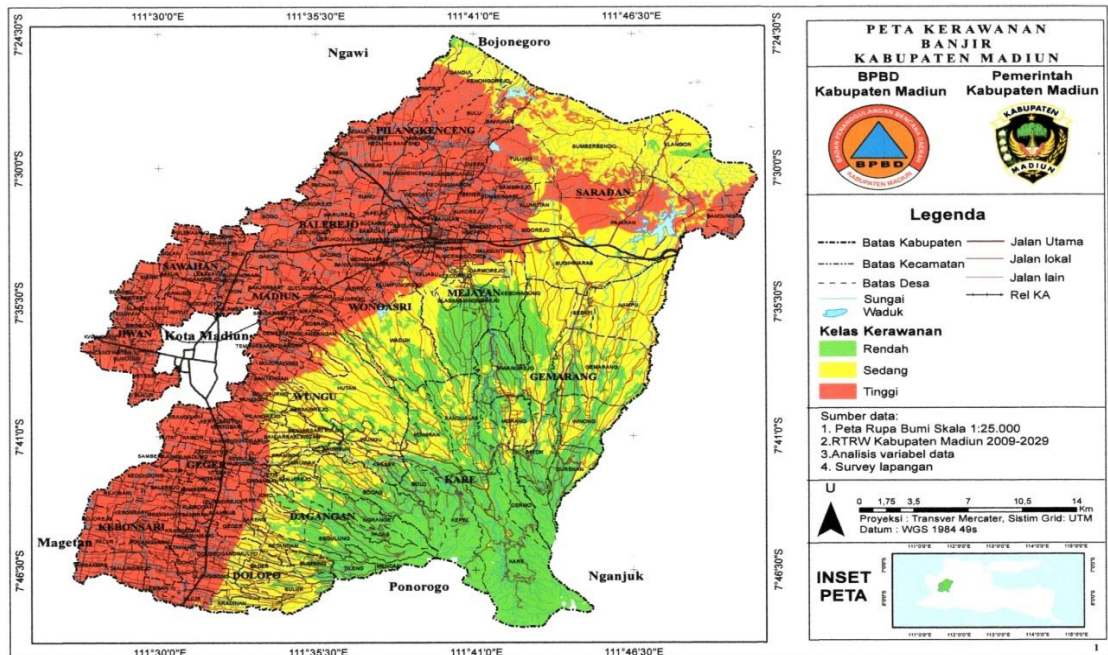
Genangan banjir akibat hujan lokal ini sering terjadi di sekitar anak-anak sungai yang disebabkan oleh tingginya curah hujan lokal, yang tidak dapat di alirkan secara gravitasi ke anak-anak sungai atau ke Kali Madiun karena tingginya permukaan air di anak-anak sungai tersebut

b. Genangan banjir akibat luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo.

Genangan banjir akibat luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo ini sering terjadi di sepanjang Kali Bengawan Solo antara muara Kali

Tambakrono hingga mendekati Perkotaan Mejayan.

Gambar 2.9
Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Madiun



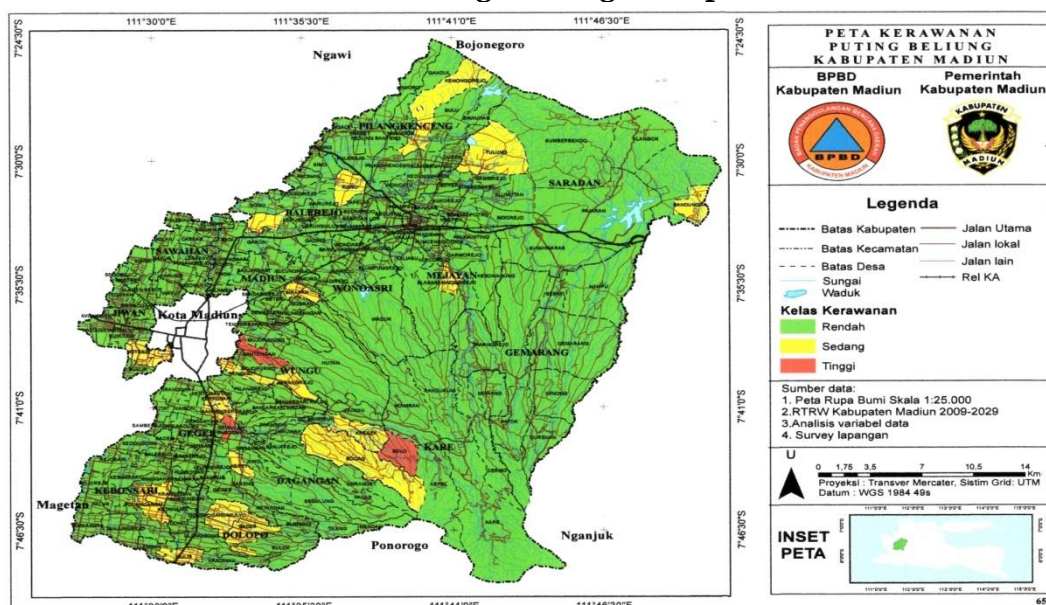
Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2021

Apabila ditinjau dari kondisi topografi Kabupaten Madiun, lokasi banjir pada umumnya merupakan lembah atau cekungan, yaitu dataran dengan elevasi lebih rendah daripada elevasi dataran di sekitarnya seperti yang sering terjadi di Kecamatan Balerejo. Kejadian banjir terbesar terjadi awal tahun 2019 akibat intensitas hujan yang tinggi yang berlangsung pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2019 dan mengakibatkan 58 desa dari 12 kecamatan di Kabupaten Madiun terdampak. Dengan kerugian meliputi Rumah Tangga terdampak ada 5.707 KK, Rumah terdampak ada 5.086 unit, Lahan pertanian terdampak ada 497 Hektare , Ternak mati terdiri 10 ekor sapi, 69 ekor kambing dan 4.058 ekor ayam. Sedangkan Infrastruktur yang terdampak antara lain 7 Sayap Dam pada Dam Sidorejo, Bruwok, dan Gendong, Kaligunting, Kaliabu, Serut, Nampu , 7 Saluran sekunder pada Saluran Sekunder Sidorejo, Wates, Bangunsari, Pacinan, BNP2, Tebon, dan Cau. 3 Jembatan yaitu Jembatan Kertosari, Tebon, Tawangrejo, Desa Sumberbening. Selain itu juga terjadi longsor pada Ruas Jalan Segulung - Suluk , dan Longsor pada bahu Jalan Nasional Caruban - Ngawi.

4. Kawasan Rawan Puting Beliung

Bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Madiun Juga meliputi bencana angin Topan atau angin puting beliung. Tahun 2020 tercatat 29 kejadian bencana Angin puting beliung.

Gambar 2.10
Peta Kerawanan Puting Beliung Kabupaten Madiun



Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2021

Gambaran lebih rinci terkait bencana yang terjadi di Kabupaten Madiun, kami sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Kejadian Bencana Kabupaten Madiun
Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angin Topan	10	1	7	32	29
2	Banjir	15	9	13	36	26
3	Tanah Longsor	21	27	9	5	12
4	Kebakaran	8	1	2	22	11
5	Gempa Bumi	0	0	0	1	0

Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2021

2.1.1.8 Kondisi Demografi

2.1.1.8.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Madiun mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Madiun
Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	(%)
		Laki-laki	Perempuan			
1	2016	361.527	364.289	725.816	6.539	0,90
2	2017	365.550	365.779	731.329	5.513	0,76
3	2018	368.957	373.302	742.259	10.930	1,47
4	2019	372.047	377.019	749.066	6.807	0,97
5	2020	374.371	379.794	754.165	5.099	0,68

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2021

Perbandingan jumlah penduduk pada tahun 2020 dengan 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,68% yaitu dari 749.066 jiwa tahun 2019 menjadi 754.165 jiwa atau mengalami kenaikan 5.099 jiwa pada tahun 2020.

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 lebih kecil 0,34% dibanding tahun 2019. Sedangkan kondisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
di Kabupaten Madiun Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Kebonsari	29.614	30.685	60.299	97
2	Dolopo	30.585	31.263	61.848	98
3	Geger	32.667	33.545	66.212	97
4	Dagangan	27.024	27.077	54.101	100
5	Kare	17.163	17.197	34.360	100
6	Gemarang	18.101	17.736	35.837	102
7	Wungu	29.471	30.061	59.532	98
8	Madiun	19.347	20.266	39.613	95
9	Jiwan	29.059	29.737	58.796	98
10	Balerejo	22.448	23.003	45.451	98
11	Mejayan	23.672	23.692	47.364	100
12	Saradan	36.497	36.223	72.720	101
13	Pilangkenceng	27.876	28.112	55.988	99

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
14	Sawahan	12.807	13.124	25.931	98
15	Wonoasri	18.040	18.073	36.113	99
Jumlah		374.371	379.794	754.165	99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2021

Dari data sex ratio sebesar 99 terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan dengan perbedaan jumlah yang tipis atau nyaris berimbang. Adapun untuk penduduk terbanyak berada di Kecamatan Saradan dengan jumlah penduduk sebesar 72.720 jiwa.

2.1.1.8.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pembagian penduduk berdasarkan usia sangat penting diketahui untuk memprediksikan jumlah kondisi regenerasi, angka ketergantungan (*dependency ratio*) karena bentuk struktur penduduk berdasarkan usia dapat diketahui jumlah penduduk yang paling banyak dalam kelompok usia tertentu. Kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia yang dibedakan secara rinci antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur di
Kabupaten Madiun Tahun 2016 - 2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 9	90.790	89.886	93.050	91.822	90.382
10 - 19	93.178	94.511	97.261	100.926	101.243
20 - 29	97.516	98.303	97.619	98.108	100.616
30 - 39	110.298	109.340	107.102	105.782	107.280
40 - 49	114.257	115.415	113.993	113.527	118.225
50 - 59	103.682	103.281	106.130	107.631	108.927
60 - 69	66.217	67.742	73.158	76.327	76.712
> 70	49.878	49.516	53.946	54.943	50.780
JUMLAH	725.816	727.994	742.259	749.066	754.165

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2021

Berdasarkan kelompok usia, maka angka tertinggi ada pada kelompok usia 40-49, diikuti kelompok umur 30-39 tahun dan kelompok usia 50-59 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kelompok usia terbesar merupakan kelompok usia produktif yang cukup besar di Kabupaten Madiun.

Dari data tersebut dapat dihitung perkembangan angka ketergantungan (*dependency ratio*) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)
Di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Umur 15-64	Jumlah Penduduk Umur 0-14 + 65 ke atas	<i>Depedency Ratio</i>
1	2016	509.665	216.151	42,41
2	2017	511.184	220.145	43,07
3	2018	515.045	227.214	44,11
4	2019	519.996	229.070	44,05
5	2020	530.364	223.801	42,19
Rata-rata		517.251	223.276	43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2021

Dilihat dari kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia, diperoleh nilai angka ketergantungan (*dependency ratio*) tahun 2020 sebesar 42,19 artinya setiap 100 jiwa penduduk usia produktif akan menanggung beban 42 jiwa yang tidak produktif. Oleh karena itu, angka beban tanggungan Kabupaten Madiun dikategorikan rendah.

Adapun kategorisasi angka beban tanggungan yaitu:

- a. Angka beban tanggungan tinggi : ≥ 70
- b. Angka beban tanggungan sedang : 51 - 69
- c. Angka beban tanggungan rendah : ≤ 50

2.1.1.8.3 Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga (KK) dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kondisi kependudukan dan jumlah rata-rata anggota keluarga, karena dengan jumlah rata-rata anggota keluarga kecil mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat membaik dan menjadi lebih terjamin kehidupan keluarga sesuai dengan yang dicanangkan program KB (Keluarga Berencana).

Perkembangan penduduk berdasarkan jumlah KK selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, yang antara lain diakibatkan adanya penghapusan data ganda kependudukan sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan pasal 7(g) Penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan

dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Jika dilihat dari rata-rata anggota keluarga selama periode 2016-2020 relatif sama.

Tabel 2.19
Perkembangan penduduk berdasarkan Jumlah KK dan Rata-rata Anggota Keluarga di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk	KK	Perkembangan KK (%)	Rata-rata Jumlah Anggota RT
1	2016	725.816	248.624	-0,54	2,92
2	2017	731.330	252.442	1,51	2,90
3	2018	742.259	262.681	3,90	2,83
4	2019	749.066	267.528	1,81	2,80
5	2020	754.165	275.671	2,95	2,74

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2021

2.1.1.8.4 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Madiun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi yang naik turun, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	
			Absolut	Relative (%)
1	2016	725.996	6.719	0,93
2	2017	731.329	5.333	0,73
3	2018	742.259	10.930	1,47
4	2019	749.066	6.807	0,91
5	2020	754.165	5.099	-0,04

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2021

Tabel 2.20 memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Madiun dari tahun 2016-2020 yang sangat fluktuatif. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 10.930 jiwa atau naik sebesar 1,47 % dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,04%. Kenaikan ataupun penurunan ini dapat disebabkan karena adanya penambahan kelahiran, perbaikan data kependudukan yang terus menerus, pelayanan administrasi kependudukan melalui mobil keliling dan fasilitas akte *online*, mutasi penduduk antar daerah dan

faktor-faktor pendukung lainnya.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*addedvalue*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*grossvalueadded*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

Tabel 2.21
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nasional	5,02	5,40	5,17	5,02	2,07
2	Jawa Timur	5,50	5,46	5,50	5,52	-2,39
3	Kab. Madiun	5,42	5,42	5,10	5,42	-1,69

Sumber: BPS, Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2020 mengalami kontraksi dari 5,42% pada Tahun 2019 menjadi -1,69 persen pada tahun 2020. Dari 17 jenis lapangan usaha terdapat 11 (sebelas) lapangan usaha mengalami perlambatan, yaitu : Jasa Lainnya sebesar -14,39 persen, penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -8,03 persen, Jasa Perusahaan sebesar -7,38 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar -6,35 persen, Konstruksi sebesar -6,15 persen, Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor sebesar -5,75 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar -5,23 persen, Administrasi

Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -2,20 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -1,49 persen, Industri Pengolahan sebesar -1,41 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -1,09 persen.

Dilihat dari kontribusinya maka terlihat bahwa Kabupaten Madiun berciri agraris. Dilihat dari perkembangannya, peran sektor pertanian semakin berkurang. Hal ini disebabkan dengan beralihnya fungsi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Madiun. Sektor pendukung pertanian yang saat ini ada seperti industri alat pertanian masih belum memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan struktur pertumbuhan ekonomi.

Sektor industri pengolahan yang ada di Kabupaten Madiun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, salah satunya industri pengolahan yang berbahan baku dari hasil pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Perdagangan merupakan sektor yang juga berkontribusi membentuk struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun. Perdagangan besar maupun eceran tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun. Kontribusi aktif perdagangan disebabkan semakin baiknya infrastruktur, sarana prasarana, transportasi yang menunjang perdagangan. Salah satu infrastruktur utama yaitu adanya kualitas jalan yang baik dan dilaluinya wilayah Kabupaten Madiun oleh jalur Tol Trans Jawa.

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Peningkatan produktifitas, skala usaha, dan nilai tambah barang dan jasa melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna dan ekonomi kreatif di semua sektor merupakan strategi yang sangat efektif untuk mendorong peningkatan PDRB di semua sektor. Hasil analisis pertumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.22
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016 - 2020
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 (Juta Rupiah)
Kabupaten Madiun

No	Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.453.728,51	2,55	3.492.699,27	1,13	3.413.896,41	(2,26)	3.489.565,93	2,22	3.529.158,62	1,13

No	Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
2	Pertambangan dan Penggalian	115.318,77	4,05	121.489,84	5,35	124.515,21	2,49	125.121,78	0,49	117.176,83	-6,35
3	Industri Pengolahan	1.138.654,01	6,05	1.231.189,27	8,13	1.351.346,64	9,76	1.448.367,99	7,18	1.427.885,13	-1,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.044,11	2,47	11.496,37	4,10	12.583,60	9,46	13.433,87	6,76	13.233,19	-1,49
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.161,50	5,02	20.284,28	5,86	21.431,83	5,66	23.003,20	7,33	23.810,51	3,51
6	Konstruksi	1.267.430,85	7,11	1.396.635,65	10,19	1.535.716,03	9,96	1.626.630,42	5,92	1.526.666,40	-6,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.829.452,90	6,84	1.962.849,99	7,29	2.129.366,30	8,48	2.304.013,04	8,20	2.171.576,89	-5,75
8	Transportasi dan Pergudangan	265.704,93	8,70	288.979,93	8,76	211.184,47	8,52	230.613,88	7,17	218.561,23	-5,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	898.123,21	7,63	963.749,64	7,31	313.605,27	8,01	336.092,19	7,14	309.100,68	-8,03
10	Informasi dan Komunikasi	319.759,49	7,32	342.134,85	7,00	1.040.985,96	8,43	1.115.302,78	3,57	1.196.824,22	7,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	201.692,48	6,17	216.238,73	7,21	370.963,05	7,59	384.197,38	6,06	380.010,98	-1,09
12	Real Estate	38.293,31	5,53	40.497,24	5,76	232.646,68	7,76	246.753,62	6,62	255.848,00	3,69
14	Jasa Perusahaan	654.381,88	4,52	668.956,88	2,23	43.638,20	2,04	46.526,91	3,80	43.092,76	-7,38
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	495.871,25	5,96	525.804,07	6,04	682.624,46	6,54	708.587,05	6,16	692.971,99	-2,20
16	Jasa Pendidikan	99.110,22	5,81	104.394,34	5,33	560.188,96	7,81	594.679,30	7,27	603.620,36	1,50
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280.557,81	4,81	297.525,01	6,05	112.549,19	10,16	120.729,96	6,24	131.928,77	9,28
18	Jasa lainnya	265.704,93	8,70	288.979,93	8,76	327.765,43	8,52	348.220,94	7,17	298.117,32	-14,39
	PDRB	11.268.897,88	5,27	11.879.336,61	5,42	12.485.007,71	5,10	13.161.840,22	5,42	13.161.840,22	-1,69

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2021

Tabeldiatas merupakan gambaran PDRB dan kontribusi ekonomi menurut kategori selama tahun 2016 s/d 2020 atas dasar Harga Konstan Tahun 2017. Bersumber dari cara perhitungan tersebut, maka angka PDRB adalah angka yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Dilihat dari capaian PDRB, pada Tahun 2020 mengalami kontraksi di beberapa sektordisebabkan pandemi *Covid-19*. Kontraksi terdalam dialami sektor Jasa Lainnya sebesar 14,39. Di sisi lain beberapa sektor usaha mengalami perkembangan seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya sebesar 9,28 dan Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 7,31. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang diperoleh dan juga tercermin dari angka pertumbuhan yang dicapai.

Tabel 2.23
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016 – 2020
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Madiun

No	Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,071,565.3	33.31	5,193,231.2	31.71	5.238.173,45	29.70	5.462.368,54	28.85	5.584.019,16	29,52
2	Pertambangan dan Penggalian	156,748.9	1.03	168,427.8	1.03	178.352,01	1.01	181.271,30	0.96	171.624,03	0,91
3	Industri Pengolahan	1,500,509.9	9.85	1,670,199.4	10.20	1.879.372,63	10.66	2.054.893,70	10.85	2.080.044,45	11,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,213.4	0.09	15,257.8	0.09	17.316,58	0.10	18.781,35	0.10	18.694,95	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,258.6	0.15	25,066.8	0.15	26.667,86	0.15	28.290,29	0.15	9.358,12	0,16
6	Konstruksi	1,875,264.2	12.32	2,121,269.0	12.95	2.354.269,37	13.35	2.506.518,83	13.24	2.358.085,42	12,47
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,381,909.0	15.64	2,597,440.3	15.86	2.936.344,16	16.65	3.254.290,39	17.19	3.176.178,14	16,79
8	Transportasi dan Pergudangan	243,790.6	1.60	273,538.6	1.67	302,493.7	1.72	338,142.30	1.79	327.372,46	1,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	343,509.2	2.26	385,858.2	2.36	423,765.2	2.40	459,827.91	2.43	427.623,29	2,26
10	Informasi dan Komunikasi	973,657.1	6.39	1,064,849.2	6.50	1,150,789.7	6.53	1,248,415.84	6.59	1.344.341,37	7,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	402,647.8	2.64	444,342.8	2.71	494,350.5	2.80	516,855.25	2.73	518.329,58	2,74
12	Real Estate	247,157.9	1.62	272,176.4	1.66	303,331.9	1.72	330,169.10	1.74	350.005,25	1,85
14	Jasa Perusahaan	50,969.0	0.33	55,851.1	0.34	62,689.5	0.36	68,594.09	0.36	65.135,35	0,34
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	879,025.4	5.77	932,518.2	5.69	996,364.6	5.65	1,089,978.35	5.76	1.112.746,53	5,88
16	Jasa Pendidikan	610,503.8	4.01	664,239.2	4.06	720,324.5	4.08	777,423.67	4.11	799.763,51	4,23
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117,968.6	0.77	128,472.2	0.78	139,069.5	0.79	153,036.97	0.81	170.051,63	0,90
18	Jasa lainnya	335,252.3	2.20	362,103.5	2.21	412,421.5	2.34	442,692.89	2.34	383.781,70	2,03
	PDRB	15,226,950.8	100	16,374,841.5	100	17,636,096.7	100	18,931,550.75	100	18.917.154,93	100

Sumber: HasilkoordinasiBappedaKabupatenMadiundengan BPS, 2021

Sedangkan pada tabel 2.23 diatas merupakan gambaran PDRB dan kontribusi ekonomi menurut kategori selama tahun 2016 s/d 2020 atas dasar Harga Berlaku. Tahun 2020 Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih tetap merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang paling tinggi yaitu sebesar 29,52persen. Untuk kategori PerdaganganBesardanEceran, Reparasi Mobil danSepeda Motormemberikan kontribusi mencapai 16,79 persen kemudian disusul kategoriKonstruksi mencapai 12,47 persen dan sektor Industri Pengolahan mencapai 11,00 persen.

Tabel 2.24
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun

No	Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.31	30.65	31.71	29.40	29.70	27.34	28.85	26.51	29,52	1,13
2	Pertambangan dan Penggalian	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00	0.96	0.95	0,91	-6,35
3	Industri Pengolahan	9.85	10.10	10.20	10.36	10.66	10.82	10.85	11.00	11,00	-1,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0,10	-1,49

5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.17	0.15	0.17	0.15	0.17	0.15	0.17	0,16	3,51
6	Konstruksi	12.32	11.25	12.95	11.76	13.35	12.30	13.24	12.36	12,47	-6,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.64	16.23	15.86	16.52	16.65	17.06	17.19	17.51	16,79	-5,75
8	Transportasi dan Pergudangan	1.60	1.60	1.67	1.64	1.72	1.69	1.79	1.75	1,73	-5,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.26	2.36	2.36	2.43	2.40	2.51	2.43	2.55	2,26	-8,03
10	Informasi dan Komunikasi	6.39	7.97	6.50	8.11	6.53	8.34	6.59	8.47	7,11	7,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.64	2.84	2.71	2.88	2.80	2.97	2.73	2.92	2,74	-1,09
12	Real Estate	1.62	1.79	1.66	1.82	1.72	1.86	1.74	1.87	1,85	3,69
14	Jasa Perusahaan	0.33	0.34	0.34	0.34	0.36	0.35	0.36	0.35	0,34	-7,38
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.77	5.81	5.69	5.63	5.65	5.47	5.76	5.38	5,88	-2,20
16	Jasa Pendidikan	4.01	4.40	4.06	4.43	4.08	4.49	4.11	4.52	4,23	1,50
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.77	0.88	0.78	0.88	0.79	0.90	0.81	0.92	0,90	9,28
18	Jasa lainnya	2.20	2.49	2.21	2.50	2.34	2.63	2.34	2.65	2,03	-14,39
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-1,69

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2021

Tabel 2.25
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2019 - 2020
Kabupaten Madiun

No	Kategori	Pertumbuhan 2019*)		Pertumbuhan 2020**)	
		Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.87	-2.26	4.28	2.22
2	Pertambangan dan Penggalian	5.89	2.49	1.64	0.49
3	Industri Pengolahan	12.52	9.76	9.34	7.18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.49	9.46	8.46	6.76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.39	5.66	6.08	7.33
6	Konstruksi	10.98	9.96	6.47	5.92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.05	8.48	10.83	8.20
8	Transportasi dan Pergudangan	10.59	8.63	11.78	9.20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.82	8.52	8.51	7.17
10	Informasi dan Komunikasi	8.07	8.01	8.48	7.14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.25	8.43	4.55	3.57
12	Real Estate	11.45	7.59	8.85	6.06
14	Jasa Perusahaan	12.24	7.76	9.42	6.62
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.85	2.04	9.40	3.80
16	Jasa Pendidikan	8.44	6.54	7.93	6.16
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.25	7.81	10.04	7.27
18	Jasa lainnya	13.90	10.16	7.34	6.24
	PDRB	7.70	5.10	7.35	5.42

Sumber : Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2021

*)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Beberapa penyebab inflasi antara lain:

1. Adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi (*Demand Pull Inflation*)
2. Kenaikan biaya produksi(*Cost Push Inflation*)
3. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat
4. Inflasi dari luar negeri(*Imported Inflation*)
5. Inflasi dari dalam negeri (*Domestic Inflation*)

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat inflasi, yaitu:

1. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran. Permintaan barang dapat ditekan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar berbelanja dalam jumlah yang wajar sesuai kebutuhan. Dianjurkan agar tidak membiasakan berbelanja dalam jumlah yang berlebihan dan menimbun barang untuk persediaan dalam jangka yang relatif lama. Sementara itu, penawaran barang dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan produktifitas semua sektor.
2. Efisiensi ekonomi untuk menekan biaya produksi dengan cara penyediaan fasilitas infratraktur yang menunjang kegiatan ekonomi
3. Menekan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara menumbuhkan budaya menabung mulai usia dini.

Laju inflasi tahun kalender di Kabupaten Madiun pada bulan Desember 2020 berada pada angka 1,86 persen, lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Tahun 2019.

Tabel 2.26
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
Madiun (%)	2,25	4,78	2,71	2,20	1,86	2,76
Jawa Timur (%)	2,72	4,04	2,86	2,12	1,44	2,64
Nasional (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	2,83

Sumber : Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2021

*)Angka Sementara proyeksi metode Bappenas

2.1.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mendeteksi ketimpangan pendapatan antar golongan yang terjadi. Semakin tinggi angka Gini Indeks maka semakin tinggi ketimpangan itu. Sampai dengan tahun 2020, tercatat angka gini indeks Kabupaten Madiun berada pada angka 0,357 (lihat tabel 2.24), sebuah angka yang sangat rendah, jauh lebih rendah dari angka Jawa Timur maupun nasional yang pada tahun 2020 mencapai angka di atas 0,37. Namun demikian terlihat kecenderungan angka ini terus meningkat. Angka Gini indeks yang rendah banyak ditemukan di daerah-daerah yang belum berkembang. Tampaknya terdapat hubungan yang cukup signifikan antara perkembangan ekonomi dengan Gini Indeks, semakin bercorak agraris sebuah wilayah, maka semakin rendah Gini Indeksnya.

Tabel 2.27
Indeks Gini Kabupaten Madiun dan Jawa Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Madiun	0,34	0,32	0,332	0,333	0,357
2	Provinsi Jawa Timur	0,40	0,42	0,38	0,36	0,37

Sumber : BPS, Jawa Timur dalam Angka, Tahun 2021

Angka Indeks Gini yang rendah ini cukup selaras dengan angka yang lain, data kontribusi PDRB dan penduduk menunjukkan hal itu. Tabel 2.27 menyajikan fenomena ketidakmerataan antar golongan secara lebih detail. Selain menunjukkan fenomena ketidakmerataan, data ini juga menunjukkan produktivitas masing masing sektor ekonomi.

2.1.2.1. 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM merupakan indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Madiun dari tahun 2016-2020 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.28
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	IPM Kab. Madiun	69,67	70,27	71,01	71,69	71,73
2	IPM Jawa Timur	69,74	70,27	70,77	71,50	71,71
3	IPM Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS, 2021

Dari tabel di atas terlihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun juga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan di Kabupaten Madiun telah fokus terhadap pembangunan manusianya, sehingga dapat meningkatkan mutu penduduk Kabupaten Madiun sebagai subyek pembangunan. Dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi penduduk Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2020 sebesar 71,73 di atas capaian Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 71,71. Capaian ini termasuk tinggi, di atas angka 70. Peningkatan IPM dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pendidikan yang diindikasikan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan daya beli masyarakat.

Indikator kesehatan yang dihitung dari Angka Harapan Hidup yang merupakan representasi dimensi umur panjang dan sehat/cerminan kualitas fisik penduduk suatu daerah, indikator pendidikan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang mencerminkan *output* pengetahuan atau memberikan gambaran, kualitas non fisik penduduk, sedangkan indikator ekonomi dihitung dari kemampuan daya beli yang digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Indikator kesejahteraan IPM dapat dilengkapi dengan kinerja kesejahteraan yang lebih detail yakni penduduk miskin. Data yang tersedia menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Madiun masih tinggi. Dilihat dari perkembangannya, persentase penduduk miskin Madiun juga berfluktuasi.

Tabel 2.29
Indikator Kemiskinan Periode 2016-2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (000)	85.97	83.43	77.75	71.91	78.30
2	Prosentase Penduduk Miskin	12,69	12.28	11.42	10,54	11,46
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	294.451	306.679	327.536	344.994	364.638
4	P1	2,08	2.65	1.60	1.53	1.63
5	P2	0,56	0.78	0.34	0.34	0.35

Sumber : BPS 2021

Kemiskinan merupakan salah satu bagian dari masalah klasik pembangunan yang belum terpecahkan sampai sekarang karena bersifat kompleks dan membutuhkan penanganan lintas sektoral. Padahal di satu sisi, pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Miskin merupakan suatu kondisi belum terpenuhinya hak - hak dasar kebutuhan primer individu secara manusiawi dan belum mampu mengembangkan kehidupannya secara lebih bermartabat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, dan budaya.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan atau yang dikenal dengan istilah P1 yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami kenaikan dan indeks Keparahan (P2) yang memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin berada dilevel diatasnya dari tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun semakin terkendali. Begitu pula halnya dengan Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp. 364.638,00 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar Rp. 344.994,00. Idealnya meningkatnya garis kemiskinan perlu diimbangi dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk, karena apabila tidak maka persentase jumlah penduduk miskin akan bertambah.

Hal ini yang terjadi di Kabupaten Madiun, dimana pertumbuhan pendapatan per kapita tidak dapat mengimbangi naiknya garis kemiskinan sehingga penurunan angka kemiskinan menjadilambat bahkan cenderung meningkat akibat dampak pandemi *Covid-19*.

2.1.2.1. 6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan IPG sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dapat berimplikasi kepada pembangunan perempuan.

Tabel 2.30
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Madiun Dibandingkan Dengan Jawa Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Madiun	91,57	91,57	91,13	91,81	91,79
2	Jawa Timur	91,77	91,07	90,77	90,91	91,07

Sumber: BPS Kabupaten Madiun, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Madiun pada Tahun 2020 mengalami penurunan dengan angka 91,79 dibandingkan tahun 2019 sebesar 91,81.

2.1.2.1. 7 Ketenagakerjaan

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah adalah terserapnya penduduk pada lapangan kerja yang tersedia yang ditunjukkan oleh rasio penduduk bekerja. Ketika penduduk banyak bekerja artinya semakin sedikit penduduk yang tidak bekerja atau menganggur. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Tabel 2.31 menunjukkan rasio penduduk yang bekerja yang dicapai Madiun ternyata cukup fluktuatif, walaupun pada tahun terakhir terlihat berada pada tingkat yang cukup tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang

dilakukan mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang tersedia. Sejalan dengan fluktuasi rasio penduduk yang bekerja, maka tingkat pengangguran terbukapun fluktuatif.

Tabel 2.31
Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk Bekerja	96,15	97,1	96,19	96,38	95,2

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun, 2021

Tabel 2.32
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Madiun Dibandingkan Jawa Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Madiun	3,19	3,19	3,71	3,52	4,80
2	Jawa Timur	4,21	4,00	3,91	3,82	5,84

Sumber : BPS Kab. Madiun, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Madiun secara umum lebih rendah dari pada Jawa Timur, tetapi mengalami fluktuasi. TPT di Kabupaten Madiun disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Rata-rata jumlah usia produktif di Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan 2020 yang cukup besar yaitu sebesar 517.251 jiwa, pada tahun 2020 jumlah usia produktif (15-64 tahun) sebesar 530.364 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2019 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan bencana demografi karena kesenjangan *demand and supply*;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Madiun yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenagakerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenagakerja;
4. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal; dan

5. Kurang optimalnya pengawasan terhadap tenaga kerja (lembaga/perusahaan, dan pekerja).

2.1.2.1. 8 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Madiun dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Capaian kinerja keamanan dan ketertiban di Kabupaten Madiun Tahun 2016 sampai dengan 2020 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Angka Kriminalitas di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kriminalitas	260	231	181	173	157

Sumber: Satpol PP Kab. Madiun, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Madiun semakin menurun dari tahun ke tahun dan pada tahun 2020 jumlah kriminalitas 157 kejadian, menurun dari tahun 2019 dengan 173 kejadian. Penurunan angka kriminalitas disebabkan oleh penambahan jumlah pamong praja dan linmas, petugas keamanan serta keterlibatan seluruh unsur masyarakat, penegak hukum, dan *stakeholders* dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Madiun.

2.1.2.1. 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Madiun. IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air, udara dan tutupan hutan sebagai indikator.

Tabel 2.34
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Madiun
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	79,52	78,37	77,91	75,98	76,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Madiun, 2021

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan dengan bobot 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 - 90
3. Baik: : 74 - 82
4. Cukup : 66 - 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 - 58
7. Waspada : <50

IKLH telah menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan pada RPJM Nasional 2015-2019 dengan *baseline* tahun 2014 sebesar 63,0-64,0 (kurang) dan target sampai dengan 2019 sebesar 66,5-68,5 (cukup). Adapun IKLH Kabupaten Madiun tahun 2020 adalah sebesar 75,77 (baik). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan di dukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Madiun mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung

pembangunan. Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat diperbaharui seperti hutan, tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah dimanfaatkan seperti sumber daya lahan dan hutan.

Tabel 2.35
Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,61	84,87	82,39	84,07	84,66
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,22	56,09	56,96	48,71	47,39
3	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	93,17	90,22	90,26	90,38	90,38
4	Pencemaran Pemantauan status mutu air	45,16	51,61	44,04	51,61	51,61
5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,32	0,47	0,47	0,47	0,47
6	Persentase penanganan sampah (Persentase sampah yang terangkut)	26,33	27,23	28,92	28,92	28,92
7	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)	7,07	7,14	7,09	7,07	0
8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen (amdal, UKL-UPL) (%)	100	100	100	100	100
9	Rasio Tempat penampungan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,32	9,07	9,07	9,07	9,07
10	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100
11	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Urusan Lingkungan Hidup)	9,09	9,12	9,12	9,12	9,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Madiun, 2021

Tabel diatas menunjukkan capaian urusan lingkungan hidup tahun 2016-2020 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Indeks Kualitas Udara meningkat dari tahun 2019-2020, tahun 2019 sebesar 84,07 menjadi 84,66 di tahun 2020;
- 2) Indeks Kualitas Udara meningkat dari tahun 2019-2020, tahun 2019 sebesar 84,07 menjadi 84,66 di tahun 2020;

- 3) Indeks Tutupan Hutan tahun 2018 sebesar 90,26 meningkat menjadi 90,38 ditahun 2019
- 4) Pencemaran pemantauan status mutu air cenderung meningkat, tahun 2018 sebesar 44,09 menjadi 100 ditahun 2020;
- 5) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen, tahun tahun 2015-2020 sebesar 100%;
- 6) Rasio tempat penampungan sampah persatuan penduduk, tahun 2015 sebesar 0,32%, tahun 2016-2020 sebesar 9,07%;
- 7) Penegakan hukum lingkungan tahun 2016-2020 sebesar 100%. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB.

Penurunan indeks kualitas air di Kabupaten Madiun selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 disebabkan Karena sungai-sungai di Kabupaten Madiun yang merupakan titik *sample* mengalami kekeringan dari semester 1 bulan Juni sampai dengan semester 2 bulan Desember tidak ada air dan kering sehingga tidak bias dilakukan uji *sample* air dari sungai. Selain itu penurunan indeks kualitas air sungai juga disebabkan karena adanya proyek Nasional pembangunan jalan Tol Ngawi Kertosono yang melintas di Kabupaten Madiun sehingga banyak aktivitas truk-truk muatan tanah dan pasir yang berada di kabupaten Madiun sehingga adanya peningkatan nilai cemaran SO₂ dan NO₂ dan Pembangunan rel kereta Api *double track* yang melintas di daerah Kabupaten Madiun yang memberikan dampak secara langsung terhadap pencemaran sungai di Kabupaten Madiun. Hal tersebut juga berpengaruh langsung terhadap pencemaran udara di Kabupaten Madiun yang terbukti dengan menurunnya Indeks Kualitas Udara pada tahun 2019 dan tahun 2020.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja fokus kesejahteraan social dilakukan terhadap indicator angka melek huruf yang diperbarui dengan angka harapan lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, persentase penduduk yang memiliki lahan dan rasio penduduk yang bekerja.

2.1.2.2.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 2.36
Angka Melek Huruf di Kabupaten Madiun Dibandingkan dengan Jawa Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Madiun	89,49	100	100	100	100
2	Jawa Timur	91,59	91,82	91,85	92,32	92,5

Sumber : BPS Jawa Timur Dalam Angka, 2021

Sejak Tahun 2017 sudah tidak dilakukan perhitungan Angka Melek Huruf karena dunia pendidikan telah berkembang sebagaimana ditetapkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui metode baru dimana pengukuran IPM tidak lagi menggunakan Angka Melek Huruf sebagai indikator pendidikan karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan daerah dengan baik.

2.1.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kabupaten Madiun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 7,16 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7tahun atau lebih) di Kabupaten Madiun dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP. Sehingga untuk mencapai target rata-rata lama bersekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya dan kerjakeras lagi dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Berikut gambaran rata-rata lama sekolah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Madiun.

Tabel 2.37
Rata-Rata Lama Sekolah(RLS) Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun dan Jawa Timur

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Madiun	7,00	7,3	7,57	7,80	7,16
2	Provinsi Jawa Timur	7,23	7,34	7,34	7,39	7,78

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka (BPS), 2021

Capaian angka RLS Kabupaten Madiun pada tahun 2020 turun dibandingkan capaian tahun 2019 yang menunjukkan angka 7,8. Hal ini perlu ditingkatkan lagi mengingat capaian ini masih pada jenjang tamat 7 tahun atau setara SMP.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah gambaran lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak usia 7 tahun ke atas sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun. Indikator HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan pendidikan di berbagai jenjang. Capaian HLS di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.38
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Madiun Dibandingkan dengan
Jawa Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Madiun	13,11	13,12	13,13	13,14	13,16
2	Provinsi Jawa Timur	12,98	13,09	13,10	13,16	13,19

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, 2021

Kecenderungan angka HLS di perkotaan lebih besar dari wilayah kabupaten disebabkan karakteristik penduduk perkotaan lebih beragam dan memiliki cara pandang lebih terbuka terhadap pendidikan sehingga penduduk perkotaan bersekolah lebih lama atau berpendidikan lebih tinggi. Selain itu, juga sarana dan prasarana pendidikan lebih memadai.

2.1.2.2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah

semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Tabel 2.39 menyajikan capaian kinerja partisipasi sekolah di kabupaten Madiun. Tabel menunjukkan APS tingkat SMP/MTs masih fluktuatif, namun pada dasarnya APS di Kabupaten Madiun tidak menjadikan masalah dikarenakan capaian APS mendekati 100 atau bahkan lebih, hal ini disebabkan masih ada penduduk usia sekolah yang melanjutkan ke pondok pesantren, bersekolah diluar Kabupaten Madiun/pindah sekolah dan bahkan ada yang tidak melanjutkan/*Drop out*.

APS untuk mengetahui seberapa banyak penduduk memanfaatkan fasilitas pendidikan. Semakin tinggi angka APS semakin terbuka peluang bagi penduduk untuk mengakses pendidikan. APS Kabupaten Madiun, jika dilihat dari jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah APS. Hal ini mencerminkan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah kesempatan menikmati akses pendidikan.

Tabel 2.39
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun

No	APS	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	103,48	107,70	99,10	99,39	107,70
2	SMP/MTs	99,41	89,68	96,54	97,21	89,68

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun Tahun 2021

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD atau SMP sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Madiun pada Tahun 2016–2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	103,44	103,47	102,19	101,51	99,67
2	SMP/MTs	97,57	97,66	96,95	96,5	100,33

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, 2021

Realisasi Angka Partisipasi Kasar SD/MI tahun 2020 adalah 99,67%. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dibawah 100% menunjukkan bahwa jumlah siswa keseluruhan di tingkat SD/MI/Paket sejumlah 54.578 orang dari 61.447 orang penduduk usia 7-12 tahun. Untuk Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs tahun 2020 adalah 100,33%. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs diatas 100% menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan siswa jenjang SMP/MTs/Paket B lebih besar dari jumlah penduduk Kabupaten Madiun usia 13-15 tahun.

Untuk meningkatkan APK SD/MI dan SMP/MTs terutama untuk SD dan SMP yang menjadi kewenangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk meningkatkan mutu baik dari sarana prasarana, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta membangun sistem pendidikan yang lebih baik antara lain dengan menerapkan ekstra keagamaan serta penguatan pembinaan karakter siswa.

Untuk mengetahui daya serap pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang berasal dari Kabupaten Madiun dengan penduduk Kabupaten Madiun pada usia sekolah.

Tabel 2.41
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	94,22	94,36	96,47	85,58	96,17
2	SMP/MTs	76,21	73,81	96,57	88,7	88,76

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, 2021

APM Kabupaten Madiun masih fluktuatif namun tidak signifikan. Selama periode 2016 – 2020 APM jenjang SMP/MTs masih dibawah APM jenjang SD/MI.

Angka Partisipasi Murni SD/MI pada tahun 2020 sebesar 96,17%, mengalami kenaikan 10,59% jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2019. APM SD/MI kurang dari 100% berarti bahwa tidak semua anak usia 7-12 tahun bersekolah tepat di jenjang SD/MI. Untuk Angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 88,76%, mengalami kenaikan 0,06% jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2019. APM SMP/MTs kurang dari 100% berarti bahwa tidak semua anak usia 13-15 tahun bersekolah tepat di jenjang SMP/MTs.

Belum maksimalnya APM SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Madiun, antara lain terjadi karena selain karena adanya penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kabupaten Madiun, melanjutkan ke pondok pesantren atau tidak sekolah, juga terdapat penduduk usia sekolah yang masih duduk di jenjang bawah atau sudah duduk di jenjang atasnya. Misal untuk APM SD/MI terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang sudah sekolah di SMP/MTs atau masih sekolah di TK, atau anak SD yang masih berusia kurang dari 7 tahun.

Untuk meningkatkan APM SD/MI dan SMP/MTs terutama untuk SD dan SMP yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada sekolah agar menyekolahkan anaknya sesuai dengan jenjang usia sekolahnya. Selain itu dalam aplikasi Dapodik sudah terdapat warning untuk siswa baru yang mendaftar di bawah usia seharusnya. Apabila terdapat siswa baru yang mendaftar di bawah usia seharusnya maka harus melampirkan rekomendasi dari psikolog atau dewan guru.

2.1.2.2.4 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup mencerminkan “lama hidup” sekaligus status kesehatan suatu masyarakat. Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan kualitas peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Angka Harapan Hidup Kabupaten Madiun yang selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya memberi arti peningkatan terhadap upaya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.42
Angka Harapan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Madiun	70,55	70,77	70,97	71,22	71,38
2	Jawa Timur	70,74	70,80	70,97	71,18	71,30

Sumber : BPS Jawa Timur dalam Angka, 2021

Tabel di atas menunjukkan angka harapan hidup Kabupaten Madiun lebih rendah daripada Jawa Timur namun dilihat perkembangan dari tahun ke tahun Kabupaten Madiun telah mempersempit jarak dengan capaian Jawa Timur.

2.1.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase Balita Gizi Buruk adalah persentase balita kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan dan umur. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur atau panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Balita(usia 0-59 bulan) merupakan kelompok umur yang rentan terkena masalah gizi, padahal mereka adalah aset bangsa untuk kemajuan di masa datang. Masalah gizi adalah gangguan kesehatan seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhannya akan zat gizi yang diperoleh dari makanan. Masalah gizi (*malnutrition*), dibagi dalam dua kelompok yaitu masalah gizi-kurang (*under nutrition*) dan masalah gizi-lebih (*over nutrition*), baik berupa masalah gizi-makro ataupun gizi-mikro.

Salah satu arah kebijakan perbaikan gizi sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN adalah peningkatan surveilans gizi, termasuk pemantauan pertumbuhan. Kegiatan surveilans gizi meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian serta diseminasi informasi bagi pemangku kepentingan. Informasi dari surveilans gizi dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan segera maupun untuk perencanaan program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang serta untuk perumusan kebijakan.

Persentase balita gizi buruk menunjukkan berfluktuasi. Menurunnya persentase balita gizi buruk menggambarkan bahwa program/kegiatan terkait penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Madiun berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya menangani masalah ini dengan harapan balita di Kabupaten Madiun tidak ada yang mengalami gizi buruk yang kemudian berdampak pada peningkatan kualitas balita yang merupakan salah satu kunci sukses pembangunan di masa mendatang.

Tabel 2.43
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase balita gizi buruk	0,25	0,2	0,78	1,19	2,18

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2021

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1 Seni Budaya Daerah

Pelestarian seni dan budaya merupakan tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah. Pemerintah harus mampu memfasilitasi serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam upaya melestarikan seni budaya tradisi yang tumbuh, berkembang dan menjadi bagian dari masyarakat. Dimana, secara filosofis sebenarnya kebudayaan adalah identitas utama suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan timbul dengan tujuan membedakan ciri khas suatu kelompok dengan kelompok lain, budaya lokal yang dilestarikan meliputi 10 obyek Pemajuan Kebudayaan yaitu:

1. Manuskrip sebanyak 43buah. Manuskrip adalah naskah kuno ciptaan masyarakat Kabupaten Madiun, yang tersebar di beberapa lokasi yaitu di Kabupaten Madiun sebanyak 12 buku dan 31 buku di Luar Kabupaten Madiun (di perpustakaan Jogjakarta, Perpustakaan Solo, Perpustakaan UI dll), rencana akan dilakukan digitalisasi manuskrip tahu Kuning Desa Nglambangan;
2. Tradisi Lisan yaitu Cerita rakyat yang diwariskan turun temurun, (Cerita Keris Tundung Mediu, Cerita Raden Ajeng Retno Tradisi Lisan sebanyak 8 yaitu Djumlah, Cerita Dongkrek Madiun, Cerita Kerajaan Gelang-gelang, Cerita Berdirinya Masjid Basyariyah Sewulan, Cerita Putri Cacing Dolopo, Cerita Ratu Kencana Wungu, Cerita Nyai Lambang Kuning Desa Nglambangan);
3. Bahasa yaitu Bahasa yang beredar di Masyarakat Kabupaten Madiun (bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Arab, Jepang, Korea dll);
4. Adat Istiadat (Upacara Labuhan Tulak Bilahi Desa Kreet, Bersih Desa, Pembagian Warisan, Pembagian Air Irigasi, Metil/Panen Padi, Tradisi Syukuran Kemerdekaan, Tradisi Sungkeman Silaturahmi, dll)
5. Pengetahuan Tradisi bersumber dari tradisi yang ada di Kabupaten Madiun (pembuatan jamutradisional, pembuatan brem, manco, membatik, dll)
6. Teknologi Tradisi yaitu pemanfaatan teknologi tradisional yang diwariskan pada generasi berikutnya (teknologi pembuatan alat dongkrek, teknologi pembuatan gerabah, dokar, teknik ani-ani, pembuatan jamu, brem, gula merah, dll)
7. Seni, di Kabupaten Madiun terdapat 29 jenis kesenian dan 732 jumlah pelaku seni yang memiliki KIKK (Kartu Induk Kesenian dan Kebudayaan)

8. Permaianan rakyat, yaitu permainan tradisi yang berkembang di masyarakat (egrang, tlompah panjang, dakon, macanan, betengan, patil lele, bekelan, nekeran, dll)
9. Olah raga tradisional, yaitu olah raga yang masuk data KONI, untuk diikuti lomba Olahraga Tradisional (Pencak Silat dan egrang, tlompah panjang, dagongan, gobak sodor)
10. Ritus (Upacara Kelahiran, Upacara Tingkepan, Upacara 7 Bulanan /Piton-piton, Tradisi Lamaran, Upacara Pernikahan, Upacara Kematian, Upacara Labuhan Tulak Bilahi Desa Krebet, Bersih Desa, Pembagian Warisan, Pembagian Air Irigasi, Metil /Panen Padi, Tradisi Syukuran Kemerdekaan, Tradisi Sungkeman Silaturahmi, dll)

Di sisi lain, secara umum, Pemerintah Kabupaten Madiun telah melakukan pelestarian seni dan budaya melalui beberapa kegiatan antara lain pengadaan alat kesenian bagi sekolah, Pengiriman Misi Kesenian dan lomba tingkat Provinsi, lomba kesenian daerah tingkat Kabupaten, Peningkatan SDM bagi Pendidik Seni Budaya serta pelaksanaan kemah karakter sebagai implementasi pendidikan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.44
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
2	Jumlah Grup kesenian	384	479	309	649	732

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Madiun, 2021

Jumlah gedung kesenian pada tahun 2020 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu 4 gedung, karena belum ada pembangunan gedung kesenian baru di Kabupaten Madiun. Sedangkan, Jumlah grup kesenian pada tahun 2020 berjumlah 732 grup. Grup kesenian disini yang dimaksud adalah kelompok kesenian yang terdaftar dalam Buku Induk Kesenian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat untuk melestarikan kesenian dan budaya daerah sangat besar.

2.1.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

Pemuda dan olahraga dilaksanakan untuk mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, keterampilan,

kewirausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral serta meningkatkan kualitas prasarana dan sarana serta prestasi olah raga melalui peran serta masyarakat.

Tabel 2.45
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Madiun
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	24	13	23	23	23
2.	Jumlah Organisasi Olah Raga	14	16	16 15	16 17	16 23
3.	Jumlah Aktivitas dan Pengembangan Kepemudaan	4	7	7	7	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Madiun, Tahun 2021(ada perbedaan data dari prolap Disparpora)

Capaian urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan 2020, melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olah raga dan jumlah aktivitas dan pengembangan kepemudaan hampir stagnan, hanya mengalami sedikit peningkatan dan penurunan yang tidak berarti. Hal ini disebabkan lemahnya pendataan yang mengakibatkan kesulitan dalam memberikan pendekatan dan pemberdayaan yang lebih tepat dan intensif.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerataan, peluasan dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah terus berupaya mewujudkan melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Kinerja pendidikan secara umum telah disajikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini disajikan berbagai aspek pendidikan yang menjadi pendukung

capaian pendidikan itu. Untuk itu bagian ini disajikan dalam dua kelompok yakni pendidikan dasar dan PAUD.

1) Pendidikan Dasar

Melengkapi kinerja rata rata lama sekolah, dapat disajikan angka tingkat angka putus sekolah dang tingkat kelulusan. Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa disuatu daerah. Makin kecil nilainya makin baik, artinya putus sekolah makin kecil. Nilai ideal=0,berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Madiun tahun 2016 - 2020 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.46
Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01
2	SMP/MTs	0,09	0,10	0,20	0,05	0,06

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs. Angka putus sekolah berfluktuasi. Angka Putus Sekolah SD/MI tahun 2016 sebesar 0,02 dan SMP/MTs 0,09. Tahun 2020 berkurang menjadi 0,01 untuk Angka Putus Sekolah SD/MI dan 0,06 untuk SMP/MTs. Angka kelulusan menunjukkan persentase siswa yang dapat lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Tabel berikut menyajikan capaian tingkat kelulusan di kabupaten Madiun. Dari tabel yang tersaji dapat dilihat bahwa Madiun belum mampu untuk mencapai angka kelulusan dan angka melanjutkan secara berkelanjutan. Artinya angka 100% pernah tercapai, namun itu tidak berkelanjutan, sebab tahun berikutnya kinerjanya kembali kurang dari 100.

Tabel 2.47
Angka Kelulusan Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan SD/MI	100,80	100,88	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,29	95,67	100	100	99,95
3	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	88,19	90,99	90,99	114,23	86,07
4	Angka Melanjutkan dari	98,73	96,77	97,95	101,9	93,99

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	SD/MI ke SMP/MTs					
5	Guru yang memiliki Kualifikasi S1 / D-IV	94,65	95,32	96,39	97,36	97,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2021

2) Ketersediaan Tenaga Pendidik (Guru)

Ketersediaan tenaga pendidik dapat dilihat dari dua aspek yakni ketersediannya dibandingkan jumlah murid dan sebarannya. Pada rentang tahun 2016-2020 jumlah guru SD/MI cukup stabil, begitu pula dengan jumlah muridnya. Pada tahun 2020 pada jenjang SD/MI, rasio guru terhadap murid mengalami penurunan yang sebelumnya 1:13 menjadi 1:15. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 1 orang guru mengajar 15 murid.

Pada jenjang SMP/MTs juga mengalami hal yang sama, terjadi kenaikan jumlah guru, sehingga rasio guru terhadap murid berubah dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 1 guru untuk 4 murid. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru terutama di jenjang SMP/MTs semakin meningkat. Adapun Rasio guru/murid dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.48
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	12	11	12	13	15
2	SMP/MTs	13	12	13	16	4

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Sedangkan dari aspek sebarannya, masih terdapat kekurangan pada guru kelas, guru agama islam, guru penjaskes dan kepala sekolah yang PNS untuk SD dan SDLB. Kekurangan ini merata di semua wilayah kecamatan. Pemerataan tenaga guru di Kabupaten Madiun tersaji dalam table berikut.

Tabel 2.49
Pemerataan Tenaga Guru di Kabupaten Madiun Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Kekurangan
1	Lembaga SDN	402	0
2	Jumlah Rombel	2.481	0
3	Kepala SDN	279	123
4	Guru Kelas	1.530	951

No	Uraian	Jumlah	Kekurangan
5	Guru Agama Islam	122	280
6	Guru Agama Kristen	8	0
7	Guru Penjaskes	235	167
8	Guru Bahasa Inggris	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, 2021

3) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan dengan kondisi baik merupakan salah satu fasilitas pendukung pembangunan manusia seperti tersaji dalam table berikut:

Tabel. 2.50
Persentase Sekolah Kondisi Baik Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	87,6	91,74	92,37	92,37	90,59
2	SMP/MTs	95,93	92,96	91,92	91,92	88,08

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan sarana pendidikan belum sepenuhnya dalam kondisi baik. Kerusakan bangunan disebabkan oleh tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan karena penyusutan, akibat ulah manusia, perilaku alam, akibat beban fungsi yang berlebih atau karena pengaruh fisika/kimia/serangga.

4) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar pada PAUD di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020 tersaji pada table berikut.

Tabel. 2.51
APK PAUD Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	PAUD	83,58	89,03	90,84	85,4	118,26

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun Th. 2021

APK pada jenjang SD/MI (lihat Tabel 2.40) lebih dari 100 berkontribusi terhadap berkurangnya APK PAUD, yaitu masih ada penduduk usia dini yang bersekolah dijenjang SD/MI. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa usia dini yang seharusnya masih di jenjang pendidikan usia dini bersekolah di SD/MI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. pendidikan anak usia dini;
2. pendidikan dasar; dan
3. pendidikan kesetaraan.

Berikut adalah target capaian SPM di Kabupaten Madiun yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.52
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini

No.	Indikator	Target	Capaian	
			2019	2020
1	Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100%	88,02%	99,33%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun Th. 2021

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah lulus atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini yaitu sebesar 11,31% poin dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan di tahun 2020 ini didukung dengan upaya sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini kepada masyarakat melalui PKK dan Pemerintah Desa.

Tabel. 2.53
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Pada Sekolah Dasar

No.	Indikator	Target	Capaian	
			2019	2020
1	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100%	93,68%	95,42%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun Th. 2021

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah lulus atau sedang belajar di sekolah dasar yaitu sebesar 1,74% dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan di tahun 2020 ini didukung dengan upaya penanganan anak berpotensi putus sekolah melalui sekolah dengan visitasi kerumah dan pendampingan agar anak-anak yang berpotensi putus sekolah dapat tetap sekolah. Selain itu juga bersinergi dengan kecamatan dan desa untuk ikut

peduli dan berperan aktif dalam memonitor warganya yang usia sekolah untuk tidak putus sekolah.

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah lulus atau sedang belajar di sekolah dasar yaitu sebesar 2,68% dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan di tahun 2020 ini didukung dengan upaya penanganan anak berpotensi putus sekolah melalui sekolah dengan visitasi kerumah dan pendampingan agar anak-anak yang berpotensi putus sekolah dapat tetap sekolah. Selain itu juga bersinergi dengan kecamatan dan desa untuk ikut peduli dan berperan aktif dalam memonitor warganya yang usia sekolah untuk tidak putus sekolah.

Tabel. 2.54
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan

No.	Indikator	Target	Capaian	
			2019	2020
1	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	100%	0,91	3,10%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun Th. 2021

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah formal, yang sudah lulus maupun yang sedang belajar di pendidikan kesetaraan yaitu sebesar 2,19% dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan di tahun 2020 ini didukung dengan upaya penyebarluasan informasi tentang pendidikan kesetaraan kepada masyarakat, melalui media elektronik maupun melalui Desa. Selain itu juga bersinergi dengan Kecamatan dan Desa untuk mendorong warganya yang belum tamat pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan non formal.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Bidang Kesehatan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan di Kabupaten Madiun diarahkan melalui upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan kesehatan diartikan sebagai pelayanan kesehatan yang bermutu yang memuaskan pemakai jasa pelayanan serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika pelayanan profesi. Wujud nyata hal tersebut harus berupa pemeliharaan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dengan mengikutsertakan sebesar-besarnya peran aktif segenap anggota masyarakat.

Situasi derajat kesehatan masyarakat digambarkan melalui angka mortalitas yang terdiri dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) dan status gizi balita serta indikator lainnya.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator kesehatan yang cukup penting dimana AKI diketahui dari jumlah kematian karena kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Angka Kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan *praenatal* dan *obstetric*.

Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistim rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Tabel 2.55
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 LH	108,97	157,60	65,80	146,64	173,39

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2021

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Madiun cenderung meningkat. Pada tahun 2020 angka kematian ibu mengalami peningkatan dengan angka 173,39, capaian ini belum mencapai target Kabupaten Madiun tahun 2020 sebesar 100/100.000 kelahiran hidup. Untuk itu harus dilakukan upaya untuk menurunkan angka tersebut, antara lain dengan dengan meningkatkan kompetensi bidan dalam kegawatdaruratan maternal, pelaksanaan kelas ibu

hamil, *Ante Natal Care*(ANC) secara terpadu dan pembinaan petugas pada puskesmas.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi merupakan peluang bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Perhitungan Angka Kelangsungan Hidup Bayi = (1 - Angka Kematian Bayi). AKHB di Kabupaten Madiun tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.56
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	AKHB	0,81	2,24	2,65	0,89	0,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2021

Kelangsungan Hidup anak ditunjukkan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA).

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Salah satu indikator yang paling menonjol dalam menilai derajat kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB = IMR). Angka Kematian Bayi dihitung dari banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Manfaat dari IMR ini, adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan *antenatal*, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Tabel 2.57
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	AKB	8,72	6,64	6,66	6,99	7,28

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2021

Penyebab kematian bayi secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua factor yaitu penyebab langsung yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur dan kelahiran kontinental serta penyebab tidak langsung yaitu ibu

hamil resiko tinggi yang kurang gizi, kehamilan pada usia terlalu muda dan terlalu tua.

AKB digunakan untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo natal* dan kematian lain. Kematian *neo natal* disebabkan faktor endogen yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kehamilan, pola pemberian ASI, kebersihan dan nutrisi. Kematian karena sebab lain merupakan faktor eksogen yaitu faktor sosial ekonomi seperti budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Penurunan AKB merupakan dampak positif meningkatnya persalinan dengan bantuan medis dan proporsi tingkat pendidikan perempuan.

4. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKABA kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Tabel 2.58
Angka Kematian Balita di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	AKABA	1,85	0,65	0,68	0,9	0,68

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2021

Tabel di atas menunjukkan AKABA di Kabupaten Madiun fluktuatif. Setelah terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebanyak 0,9 per 1000 kelahiran hidup, tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 0,68 per 1000 kelahiran hidup.

5. HIV dan AIDS

Sampai dengan Desember 2016, jumlah kasus *AIDS* yang dilaporkan adalah 17.394 orang dan 39.224 kasus *HIV*. Dari jumlah tersebut 3.679 (21,15%) diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sebenarnya terjadi, dan dari hasil estimasi sampai dengan tahun 2012 diperkirakan jumlah ODHA di Jawa Timur mencapai 57.321 orang. Dan sejak September 2003, Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai wilayah dengan prevalensi *HIV* yang terkonsentrasi bersama 5 (lima) provinsi lainnya, yaitu DKI, Jakarta, Papua, Bali, Riau dan Jawa Barat.

Berdasarkan waktu, maka nampak sekali pesatnya peningkatan jumlah penderita *HIV/AIDS* dari waktu ke waktu. Kalau tahun 1989 hanya 1 orang penderita yang dilaporkan maka mulai tahun 1999 meningkat tajam sekali dari tahun ke tahun dan jumlahnya terus bertambah hingga Desember 2017. Penambahan kasus AIDS dari tahun ke tahun sebagian besar berasal dari faktor seksual.

Tabel 2.59
Perkembangan Kasus *HIV/AIDS* di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus <i>HIV</i>	56	105	74	115	88
2	Kasus <i>AIDS</i>	19	11	0	5	5
3	Kasus kematian akibat <i>AIDS</i>	24	23	24	25	13

Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kab. Madiun, 2021

Perkembangan kasus *HIV/AIDS* di Kabupaten Madiun dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, di mana terjadi kenaikan kasus *HIV*, kasus *AIDS* dan kasus kematian akibat *AIDS* di tahun 2019 dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 115 kasus *HIV*, 5 kasus *AIDS* dan 25 kasus kematian akibat *AIDS*.

Tabel 2.60
Proporsi Kasus *AIDS* Berdasarkan Resiko Penderita di Kabupaten Madiun sampai dengan Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	IDU/Narkoba Suntik	13	1,46
2	WPSL	66	7,39
3	WPSTL	0	0
4	Waria	14	1,54
5	<i>Gay</i>	22	2,46
6	Pelanggan WPS	123	13,77
7	IRT/Pasangan	95	10,64
8	Perinatal	21	2,35
9	Faktor lainnya	108	12,09
10	Dari ibu	8	0,98
11	Heteroseksual	423	47,37

Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kab. Madiun, 2021

Ditinjau dari daricara penularan pada kasus AIDS dari data laporan surveilans nampak bahwa faktor resiko tertinggi adalah heteroseksual 30,6%, Pelanggan WPS 19,4% dan faktor lainnya sebesar 16,88%.

6. Tuberculosis

Capaian indikator program, Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua di Indonesia dalam jumlah penemuan penderita TB BTA positif kasus baru (di bawah Jawa Barat). Jumlah kasus TBC di Jawa Timur sampai dengan 12 Maret 2018 sebesar 51.701 kasus dengan penemuan kasus baru positif/CDR sebesar 43% menempati urutan kedelapan dari 33 Propinsi di Indonesia, sedangkan jumlah kasus TBC di Kabupaten Madiun sebesar 1.013 dengan CDR 52 %. Capaian penemuan kasus baru/CDR masih di bawah target nasional yaitu 70%.

Tabel 2.61
Perkembangan Cakupan Pengobatan Lengkap dan Kesembuhan TB Paru di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kesembuhan TBC	465	482	384	309	22
2	Pengobatan TBC	23	392	679	768	249

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2021

Kinerja kesehatan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Terdapat beberapa standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi daerah.

Tabel 2.62
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Madiun Tahun 2020

No	Uraian	Capaian (%)
1	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	66,65
2	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	14,23
3	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10,04
4	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	31,66
5	Persentase ODGJ mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	97,08
6	Persentase Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas	92,30
7	Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan keluarga bagi anak SD	
8	Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugarannya	85,18
9	Cakupan pelayanan kesehatan haji	
10	Persentase pelayanan kesehatan dengan alat kesehatan yang memenuhi standar	69,29
11	Cakupan sarana kesehatan penunjang yang memenuhi standar	82,11
12	Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standar	92,00
13	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai	

No	Uraian	Capaian (%)
	standar	
14	Persentase orang beresiko terinfeksi <i>HIV</i> mendapatkan pemeriksaan <i>HIV</i> sesuai standar	75,14
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	95,56
16	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,72
17	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (<i>neo natal</i>)	97,30
18	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,63
19	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,67

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2021

Tabel 2.63
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Tahun 2016-2020
di Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio puskesmas per satuan penduduk	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
2	Rasio poliklinik per satuan penduduk	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13
3	Rasio pustu per satuan penduduk	0,86	0,9	0,9	0,9	0,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2021

Dilihat dari tabel di atas, rasio sarana kesehatan di Kabupaten Madiun masih belum memenuhi syarat. Idealnya satu puskesmas melayani 30.000 penduduk (sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat melalui tenaga medis yang profesional dan terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit. Rasio rumah sakit per satuan penduduk belum memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Idealnya satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk.

Tabel 2.64
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 di Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,004	0,004	3/681394	2/682684	2/683784

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2021

Kualitas dan mutu pelayanan Rumah Sakit antara lain dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun IKM dari 2 Rumah Sakit milik Pemerintah di Kabupaten Madiun dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.65
Data IKM Rumah Sakit di Kabupaten Madiun Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	RSUD Caruban	74,89%	77,08%	80,93%	81,04%	81,14%
2	RSUD Dolopo	61,14%	74,66%	74,80%	80,56%	80,70%

Selama periode tahun 2016–2020 capaian IKM pada RSUD Caruban dan RSUD Dolopo setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup berarti. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan semakin puas dengan kinerja layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit. Namun demikian masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi pada tahun-tahun yang akan datang, antara lain :

- Kecepatan pelayanan (waktu tunggu dan kepastian jadwal)
- Sarana dan prasarana pelayanan
- Sikap dan perilaku petugas (kesopanan dan keramahan)

Ketenagaan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan pelayanan terutama pelayanan di puskesmas. Berikut standar ketenagaan pada puskesmas wilayah perkotaan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Tabel 2.66
Standar Ketenagaan pada Puskesmas Wilayah Perkotaan

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga (orang)	
		Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap
1	Dokter atau dokter primer lainnya	2	1
2	Dokter Gigi	1	1
3	Perawat	6	5
4	Bidan	7	4

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga (orang)	
		Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1	1
7	Ahli Teknologi Laboartorium Medik	1	1
8	Tenaga Gizi	2	1
9	Tenaga Kefarmasian	2	1
10	Tenaga Administrasi	3	3
11	Pekarya	2	2

Rasio tenaga dokter dan tenaga paramedis per 100.000 jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh dokter dan paramedis dibanding jumlah penduduk. Rasio dokter dan tenaga paramedis di Kabupaten Madiun masih perlu adanya penambahan tenaga dokter dan para medis guna memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standart.

Tabel 2.67
Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 di Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio dokter per 100.000 penduduk	11,80	12,94	12,77	14,60	14,92
2	Rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk	79,50	104,28	102,44	116,30	122,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2021

Berbagai sarana dan prasarana yang tersedia di atas bermuara pada terlayannya kesehatan penduduk. Aspek-aspek inilah yang menjelaskan kinerja kesehatan (AHH, AKI, AKHB, AKABA dan balita gizi buruk) belum dapat tercapai secara optimal.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Kesehatan di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	91,22	91,15	93,36	94,74	87,82
2	Cakupan Desa/Kelurahan Universal ChildImmunitization (UCI)	71,36	81,1	85,44	88,35	83,01
3	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
4	Cakupan Penemuan dan Penganganan Penderita TBC BTA positif	73,24	73,24	77,24	83,47	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100
6	Cakupan Kunjungan Bayi	95,28	95,24	94,47	96,34	97,30
7	Cakupan Puskesmas	173,33	173,33	173,33	173,33	173,33
8	Cakupan Puskesmas Pembantu	28,16	91,15	91,15	91,15	91,15
9	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel 2.69
Realisasi Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN INDIKATOR SPM		
		INDIKATOR	TARGET	2018	2019	2020
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	90,40%	91,99%	96,59%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	91,49%	93,61%	91,35%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	96,01%	98,38%	96,82%
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	85,85%	87,86%	67,00%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	98,63%	32,84%	30,42%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	1,49%	40,43%	66,65%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	16,37%	54,03%	37,72%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	10,29%	14,05%	10,04%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	36,04%	47,81%	31,66%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	64,06%	102,93%	97,23%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	73,04%	34,56%

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN INDIKATOR SPM		
		INDIKATOR	TARGET	2018	2019	2020
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunity deficiency Virus/ HIV</i>)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi <i>HIV</i> mendapatkan pelayanan deteksi dini <i>HI V</i> sesuai standar	100%	100%	71,89%	75,14%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang belum mencapai target antara lain adalah:

a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

➤ **Permasalahan**

- 1) Posyandu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan situasi pandemi ;
- 2) Kunjungan pada PAUD dan TK tidak bisa dilaksanakan dikarenakan sekolah libur;
- 3) Orangtua enggan membawa anaknya ke Puskesmas atau Posyandu setelah Zona berubah karena takut terpapar *Covid-19*.

➤ **Solusi**

- 1) Dilakukan kunjungan rumah oleh petugas setelah kondisi zona wilayah berubah kuning hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontak dengan balita;
- 2) Kegiatan posyandu dapat dilaksanakan bila kondisi wilayah sudah memungkinkan (zona hijau) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjadwalkan kedatangan untuk menghindari kerumunan.

b. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

➤ **Permasalahan**

Adanya perubahan ketentuan kebijakan dalam penentuan sasaran, Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang dilakukan penjangkauan hanya siswa kelas 1 dan kelas 7 pada saat perencanaan masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 sedangkan sasaran yang digunakan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 adalah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerjanya yaitu usia 7 sampai 15 tahun.

➤ **Solusi**

- 1) Penjaringan yang akan dilakukan untuk tahun selanjutnya pada semua siswa pendidikan dasar mulai usia 7 sampai 15 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
- 2) Penjaringan kesehatan dilakukan juga pada pondok pesantren bagi anak usia pendidikan dasar yang mengikuti pendidikan pondok pesantren tetapi tidak sekolah umum.

c. Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

➤ **Permasalahan**

- 1) Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan di Posbindu yang belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kegiatan;
- 2) Masih terbatasnya jumlah petugas kesehatan dalam melaksanakan kegiatan skrining kesehatan di Posbindu;
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana di Posbindu berupa Posbindu KIT yang belum mencukupi terutama bahan medis habis pakai.

➤ **Solusi**

- 1) Melakukan entri data berupa Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan skrining kesehatan di Posbindu pada aplikasi *e-Link* sehingga capaian kegiatan dapat terpantau;
- 2) Pemberdayaan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan di Posbindu;
- 3) Pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan posbindu untuk kelancaran kegiatan skrining kesehatan di Posbindu.

d. Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

➤ **Permasalahan**

- 1) Masih adanya penduduk usia 60 tahun keatas yang belum mendapatkan skrining kesehatan dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan;
- 2) Keterbatasan tenaga dan sarana prasaran untuk melakukan skrining;

- 3) Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan di Posyandu Lansia yang belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kegiatan.

➤ **Solusi**

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan melalui kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan skrining kesehatan bagi masyarakat yang berusia 60 tahun keatas dan tidak bisa melakukan kunjungan ke posyandu lansia;
 - 2) Pemberdayaan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan bagi penduduk usia 60 tahun keatas guna membantu petugas kesehatan;
 - 3) Pelaporan hasil kegiatan skrining kesehatan di Posyandu Lansia agar dientri pada aplikasi *e-Link* sehingga capaian kegiatan dapat terpantau.
- e. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

➤ **Permasalahan**

Masih adanya masyarakat yang tidak melakukan pemeriksaan secara rutin antara lain pemeriksaan tekanan darah, dikarenakan tidak dirasakannya gangguan kesehatan yang bermakna akibat hipertensi yang dapat menyebabkan kejadian fatal.

➤ **Solusi**

- 1) Peningkatan pelayanan skrining kesehatan khususnya pada usia produktif 15-59 tahun serta usia 60 tahun keatas sebagai upaya deteksi dini penyakit hipertensi yang dilaksanakan di Posbindu dan Posyandu Lansia bila kondisi wilayah sudah memungkinkan (zona hijau) ;
 - 2) Meningkatkan kegiatan promosi oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dalam penanganan penderita hipertensi.
- f. Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

➤ **Permasalahan**

- 1) Penemuan penderita diabetes mellitus cenderung pasif dikarenakan masih adanya penduduk yang tidak melakukan skrining deteksi dini penyakit diabetes melitus;

- 2) Fungsi Posbindu dalam hal skrining deteksi dini penyakit diabetes mellitus belum optimal untuk dilakukan rujukan pelayanan kesehatan dikarenakan jumlah tenaga/sarana/prasarana terbatas;

➤ **Solusi**

- 1) Peningkatan pelayanan skrining deteksi dini penyakit diabetes melalui kegiatan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan;
- 2) Sosialisasi bagi masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi tentang pentingnya skrining kesehatan Penyakit Tidak Menular termasuk penyakit hipertensi dan diabetes melitus;
- 3) Peningkatan fungsi Posbindu agar dapat merujuk penderita yang terdeteksi diabetes mellitus ke pelayanan kesehatan sehingga segera mendapatkan penanganan lebih lanjut.

g. Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

➤ **Permasalahan**

- 1) Selama terjadinya pandemi *Covid 19* kunjungan pasien ke pelayanan kesehatan menurun sehingga pengawasan dan penemuan penderita TBC juga menurun drastis;
- 2) Adanya stigma *Covid-19* dari masyarakat, sehingga cenderung menyembunyikan gejala batuk yang dialami, sedangkan investigasi kontak pada pasien yang bergejala, pasien memilih menghindari kunjungan dari petugas/kader;
- 3) Terbatasnya jumlah tenaga melaksanakan TB dikarenakan tugas *tracing* yang lebih *Covid-19* dan input data terkait pandemik, sehingga program TBC sedikit terkesampingkan;
- 4) Adanya pencatatan dan pelaporan TBC menggunakan aplikasi baru yaitu SITB (SISTEM INFORMASI TUBERKULOSIS) sehingga memerlukan pemahaman yang lebih untuk menyamakan persepsi programmer. Untuk itu data TBC yang seharusnya bisa di-*entry* pada aplikasi jadi tidak bisa masuk.

➤ **Solusi**

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penyakit TBC baik melalui kunjungan pasif maupun aktif dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan;
- b. Edukasi masyarakat tentang *Covid-19* serta pendekatan secara persuasif;

- c. Melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan di layanan, serta pendekatan dengan penentu kebijakan (Puskesmas dan RumahSakit) terkait program TBC;
- d. Melakukan pendampingan serta pelatihan pencatatan dan pelaporan TBC pada aplikasi SITB dengan monev yang berkesinambungan;
- h. Persentase orang dengan risiko terinfeksi *HIV* mendapatkan pelayanan deteksi dini *HIV* sesuai standar.

➤ **Permasalahan**

- 1) Sasaran orang dengan risiko terinfeksi *HIV* yang dilakukan deteksi dini yaitu ibu hamil, pasien TBC, waria, LSL (lelaki suka lelaki) dan PSK tetapi dari populasi kunci tersebut tidak semuanya bisa dilakukan skrining dikarenakan:
 - Masih adanya ibu hamil yang belum melakukan pemeriksaan *HIV* terutama ibu hamil yang periksa di praktek mandiri bidan (PMB) dan praktek dokter spesialis (SPOG), apabila sudah melakukan pemeriksaan pelaporan tidak disampaikan pada fasilitas kesehatan terdekat;
 - Masih adanya pasien TBC yang berobat diwilayah luar kabupaten Madiun sehingga tidak bisa terdeteksi;
 - Jumlah waria dan PSK yang tidak sesuai dengan perkiraan, banyak yang berpindah tempat dan belum mau diperiksa status *HIV*;
- 2) Belum terampilnya petugas dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan hasil skrining pada aplikasi SIHA sehingga data ada yang hilang atau tidak terbaca pada aplikasi tersebut.

➤ **Solusi**

- 1) Terkait sasaran yang masih belum tercakup dalam skrining, hal yang harus dilakukan yaitu :
 - Menyediakan reagen *HIV* serta blanko pemeriksaan kepada praktek mandiri bidan (PMB) dan praktek dokter spesialis (SPOG) apabila ada ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan di puskesmas;
 - Mewajibkan semua pasien TBC untuk diperiksa status *HIV* di setiap puskesmas;
 - Mendata jumlah waria dan PSK kemudian dilakukan skrining *HIV*;
 - Melakukan mobile *VCT* diwilayah yang dianggap berisiko;

- 2) Meningkatkan pengetahuan petugas untuk pencatatan dan pelaporan pada aplikasi SIHA untuk petugas di puskesmas dan rumah sakit.

Cakupan Desa ODF

Program penyehatan lingkungan sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan serta dalam upaya pencapaian target *SDG's*, salah satu aksi nyata yang telah berlangsung adalah peningkatan penyediaan air minum, sanitasi, meningkatkan perilaku higienis masyarakat dengan tujuan utama untuk menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Salah satu masalah sanitasi yang ada di Kabupaten Madiun adalah masih adanya masyarakat yang buang air besar sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free (ODF)*. *Open Defecation Free (ODF)* adalah kondisi dimana seluruh masyarakat di wilayah desa/kelurahan telah terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Gambaran tentang jumlah desa yang bebas Buang Air Besar Sembarangan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.70
Perkembangan Desa ODF di Kabupaten Madiun Tahun 2016 - 2020

NO.	URAIAN	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Jumlah desa ODF	5	28	58	38	27
2.	Jumlah Desa ODF kumulatif	7	35	93	131	158
3.	Prosentase Desa ODF	3,4%	17%	45,1%	65,6%	76,7%

Cakupan Desa yang masyarakatnya sudah berperilaku terbebas dari buang air besar sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free (ODF)* sampai dengan tahun 2019 sebanyak 131 desa (65,6%) dan pada tahun 2020 sebanyak 158 desa (76,7%). Cakupan ini belum mencapai target 100 %, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, sosial budaya, status ekonomi, ketersediaan air bersih dan sarana yang kurang memadai. Dan dengan adanya pandemic *Covid-19* yang mana berpengaruh pada ketersediaan anggaran dan pembatasan kegiatan di wilayah sehingga kegiatan verifikasi, pemecuan dan sosialisasi tidak optimal.

Situasi penyebaran kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia diawali dengan dilaporkannya kasus pertama pada tanggal 2 maret 2020 dan

dengan cepat menyebar dan meningkat ke seluruh Indonesia. Di wilayah Kabupaten Madiun dilaporkan kasus pertama pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dikeluarkan Penetapan SK Bupati no 188.45/252/402.013/2020 pada tanggal 19 Maret 2020 tentang Status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Covid-19* di Kabupaten Madiun yang diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati untuk mengantisipasi meningkatnya resiko penyebaran *Covid-19* di bidang kemasyarakatan melalui Instruksi Bupati Madiun no 4/Instruksi/2020. Perkembangan kasus *Covid-19* di Kabupaten Madiun sampai pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat 390 kasus, sembuh sebanyak 258 kasus, meninggal sebanyak 29 kasus sebagaimana data dibawah ini :

Tabel 2.71
Data Sebaran Kasus *Covid-19* Kabupaten Madiun

No.	URAIAN	TAHUN 2020
1	Jumlah kasus konfirmasi	390
2	Jumlah kasus sembuh	258
3	Jumlah kasus meninggal	26
4	Jumlah yang dirawat di rs	313
5	Jumlah yang isolasi mandiri	77

Berbagai upaya pencegahan dan penanganan telah dilaksanakan untuk menekan penyebaran *Covid-19* diantaranya:

1. Pelaksanaan *tracing* terhadap kontak erat yaitu orang yang mempunyai riwayat kontak dengan kasus dari pasien yang terkonfirmasi sehingga bisa segera diketahui status kesehatan dari kontak erat;
2. *Testing* melalui pemeriksaan Rapid antigen ataupun PCR terhadap kontak erat agar segera diketahui status dari kontak erat apakah terkonfirmasi *Covid-19* atau tidak;
3. *Treatment* kepada pasien terkonfirmasi positif *Covid-19* dengan memantau pelaksanaan isolasi mandiri ataupun perawatan di RS sesuai tingkatan gejala yang dialami pasien;
4. Sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat dengan menggunakan berbagai media baik media cetak, brosur, televisi, radio ataupun siaran keliling kepada

masyarakat tentang pentingnya penegakan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas). Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan dengan sasaran masyarakat baik bagi pedagang, kelompok potensial, ormas, PKK, Darma Wanita, Organisasi profesi dan kelompok masyarakat lainnya sebagai upaya untuk mengingatkan masyarakat agar selalu disiplin terhadap protokol kesehatan;

5. Pelaksanaan Penyemprotan desinfeksi pada tempat-tempat yang sering digunakan secara bersama yang memungkinkan terjadinya penularan *Covid-19*;
6. Penegakan disiplin protokol kesehatan juga dilaksanakan oleh Satgas *Covid-19* Kabupaten Madiun dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 39 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Madiun;
7. Penerapan *One Gate System* di pintu masuk desa untuk memantau penerapan protokol kesehatan dan *monitoring* keluar masuk warga terutama bagi masyarakat luar yang akan masuk ke wilayah desa tersebut.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Undang - Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan sarana prasarana ke-PU-an yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, irigasi), air minum, penyediaan dan pengelolaan air bersih. Pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi perkembangan daerah dan peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2.72
Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jembatan kondisi baik (%)	85,61	87,07	95,26	96,55	96,55
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	58,16	64,91	486,04	507,32	546,20
3	Persentase jalan lingkungan pemukiman dalam	59,13	59,46	59,69	67,46	72,50

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	kondisi baik					
4	Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (m)	744.889	756.041,29	722.978	743.467,9	302.316,45
5	Jumlah rumah tangga penggunaan air bersih	17.780	18.380	19.619	20.824	21.204
6	Persentase Penduduk berakses air minum	53,26	56,60	63,66	68,93	74,20
7	Jumlah pengolahan air limbah domestik	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 persentase jembatan kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 96,55%. Adanya peningkatan/ penggantian 4 unit jembatan dari 224 unit jembatan menjadi 228 unit jembatan kondisi baik berdasarkan data base jembatan SK Bupati Nomor 188.45/101A/KPTS/402.013/2007. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam) juga meningkat sebesar 72,50% ditahun 2020. capaian kinerja indikator persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik hanya tercapai 60,66% dari yang ditargetkan tahun 2020 adalah 51,65% hanya tercapai 31,33%, dikarenakan berkurangnya anggaran pada P-APBD 2020 (*recofusing*) dan perubahan perhitungan teknis tentang kondisi jalan, dimana jalan-jalan kabupaten yang selama 3 tahun berturut-turut tanpa ada penanganan baik, peningkatan maupun pemeliharaan sehingga kondisi otomatis menjadi turun ke kondisi sedang walaupun kenyataannya dilapangan kondisinya masih baik, akan tetapi secara capaian indikator sasaran utama "persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap" tercapai diatas 100% yaitu 107,08% dari yg ditergetkan tahun 2020 sebesar 68,28 tercapai 73,51% .

Sedangkan jumlah rumah tangga pengguna air bersih naik setiap tahunnya, menjadi 21.204 di tahun 2020. Adanya penanganan penyediaan SPAM Pedesaan dengan penerima manfaat sebanyak 380 sambungan rumah. Sehingga persentase Penduduk berakses air minum meningkat setiap tahun, menjadi 74,20% ditahun 2020.

Namun demikian untuk capaian panjang irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 743.467,9 meter di Tahun 2019 menjadi 302.316,45 meter di Tahun 2020. Adanya perubahan terhadap data base sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/577/KPTS/402.013/2020, perubahan dimaksud

mengakomodir saluran primer dan sekunder, saluran tersier menjadi kewenangan urusan pertanian.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan perumahan dan Permukiman merupakan hal yang bersifat primer bagi setiap orang. Bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan kualitas baik, sehat dan layak huni akan memberikan rasa nyaman bagi orang yang menempatinnya. Untuk urusan perumahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73
Indikator Urusan Perumahan dan Pemukiman Tahun 2016 - 2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah RTLH	0	0	9.719	6.445	4.531
2	Persentase Rumah tidak layak huni	0	0	18,99	27,29	15,95
3	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)	180.008	181.440	171.721	174.995	176.909
4	Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	97,74	98,52	93.24	95.02	96.06
5	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	0	0	0	0	64,89

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

Pada tahun 2020, untuk rumah layak huni mengalami peningkatan menjadi 96,06 persen atau sejumlah 176.909 RLH dan terjadi penurunan jumlah rumah tidak layak huni sebesar 15,95% atau 4.531 unit. Pemenuhan RTLH dicukupi oleh alokasi dana desa yang mewajibkan untuk mengalokasikan minimal 2 unit RTLH dalam setiap tahun anggaran.

2.1.3.1.5 Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PPKS dan meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial, yaitu mencakup 26 item dalam penghitungan PPKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Data PPKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di Kabupaten Madiun dapat dilihat bahwa persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial menunjukkan peningkatan di tahun 2020 dan diikuti kenaikan Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial sampai dengan tahun 2020 mencapai 131%. Namun demikian yang masih perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya tidak sekedar pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Tabel 2.74
Capaian Urusan Sosial Tahun 2018-2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	305.556	329.181	335.007
2	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	106	123	131
3	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1,14	1,28	1,3

Sumber : Dinas Sosial, 2021

2.1.3.1.6 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.6.1 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi yang aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Madiun. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Madiun dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Berdasarkan hasil capaian kinerja keamanan dan ketertiban Kabupaten Madiun terlihat bahwa indeks ketertiban umum, pada tahun 2020 nilai indeks ketertiban umum pada angka 71,35 dari target 80,00 ,yang diukur dari :

1. Persentase kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan;
 2. Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada.
- sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Target dan Capaian Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Tahun 2020

No	Uraian	Target	Capaian
1	Persentase kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	100	100
2	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100
4	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Bidang Penanggulangan kebakaran	25	23
5	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan pemadam kebakaran dibawah pembinaan Bidang Penanggulangan kebakaran	25	21

Sumber : Satpol PP Kab. Madiun, 2021

Persentase kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan tidak mencapai target disebabkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diselesaikan dengan pembinaan yang persuasive.

Persentase menurunnya angka pelanggaran ketertiban dan ketentraman disebabkan adanya peningkatan kegiatan sosialisasi dan penegakan Perda dan Perkada. Disamping itu pula pemerintah Kabupaten Madiun juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, penegak hukum, perangkat daerah serta seluruh stakeholder dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Madiun. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut memberikan dampak terhadap penurunan kasus pelanggaran Perda dan Perkada.

2.1.3.1.6.2 Bidang Bencana

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 117 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana, kemudian diperjelas pada ayat (2) bahwa Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Adapun indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.76
Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Madiun
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio relawan bencana kabupaten (%)	60	60	60	60	60
2	Rasio desa tanggap bencana yang terlatih (%)	4	7	9	15	44
3	Jumlah layanan informasi rawan bencana	6	6	6	6	6
4	Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3	3	3	3	3
5	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban	54	38	31	96	78

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Madiun, Tahun 2021

Indikator urusan Pemerintahan Bidang dan Bencana yaitu rasio relawan bencana kabupaten dan rasio desa tanggap bencana yang terlatih. Rasio relawan bencana dari tahun 2016-2020 memiliki nilai tetap yaitu 60%. Rasio desa tanggap bencana yang terlatih cenderung meningkat pada periode 2016-2020. Pada tahun 2020 telah 44% desa terlatih tanggap bencana. Jumlah layanan informasi rawan bencana yang disediakan meliputi *Website, Whatsaap, Twitter, Facebook, Instagram* dan Radio Komunikasi yang dapat diakses seluruh warga Kabupaten Madiun dari situasi cuaca, titik kumpul pada saat kejadian bencana panggilan darurat bencana. Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi sosialisasi desa tangguh bencana, Sekolah aman bencana, Pelatihan TRC dan

relawan. Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban disesuaikan dengan kejadian bencana yang dilaporkan.

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Ketenagakerjaan

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja. Capaian kinerja ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.77
Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	66,2	76,2	69,52	70,73	79,9
2	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	1,28	1,02	1,5	15	20
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	71,78	74,84	66,5	89,64	42,15
4	Tingkat pengangguran terbuka	4,25	6,72	3,71	3,52	4,80
5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 (perusahaan)	465	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi
6	Persentase keselamatan dan perlindungan (%)	59,95	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi
7	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemda (%)	10	8	4	3	5

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya kualitas hidup perempuan dari sisi kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menyebabkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Tabel 2.78
Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016 - 2020
Kabupaten Madiun

No.	Kasus	2016			2017				2018			2019			2020		
		D	A	J	D	D	A	J	D	D	A	J	D	D	A	J	
1.	Fisik	1	0	1	3	0	3	1	0	1	2	0	2	0	2	2	
2.	Psikis	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	3	5	0	7	7	
3.	Seksual	0	26	26	0	17	17	1	13	14	0	6	6	0	10	10	
4.	Penelantaran ekonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	TKI/TKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah		1	26	27	3	17	20	5	14	19	4	9	13	0	19	19	

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2021

Catatan : D = Dewasa A = Anak J = Jumlah

Tabel 2.79
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani di
Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	66,2	76,2	69,52	70,73	79,9

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan persentase angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani, tahun 2016 - 2020 semua kasus tertangani 100%. Mulai tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Madiun kasus terbanyak yang ditangani adalah pelecehan seksual terhadap anak dan kekerasan fisik terhadap anak.

2.1.3.2.3 Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan memiliki aspek yang luas menyangkut bagaimana pangan berproduksi secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, aman, merata dan harga terjangkau oleh masyarakat. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi, distribusi dan pola konsumsi bahan pangan. Ketersediaan bahan pangan utama di Kabupaten Madiun yaitu

beras lebih banyak daripada kebutuhan konsumsi pangan penduduk atau terjadi surplus beras, begitu pula dengan ketersediaan jagung. Kabupaten Madiun merupakan salah satu penyangga pangan provinsi Jawa Timur. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di kabupaten lainnya. Dilihat dari PPH yang dicapai menunjukkan angka yang terus membaik pula.

Tabel 2.80
Capaian Urusan Pangan Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Regulasi Ketahanan Pangan	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Pangan Utama	311.851.44	314.774.47	344.858.41	385.532.45	347.181.06
3	Skor Pola Pangan Harapan	90,70	90,70	73,30	80,20	80,20

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.1.3.2.4 Pertanahan

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP).

Luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Madiun sampai dengan 31 Desember 2017 yaitu seluas 1.559.917 m² sedangkan tanah yang belum bersertifikat seluas 9.130.177 m². Terhadap tanah yang belum bersertifikat tersebut diantaranya merupakan tanah setren saluran dan juga hasil dari pengakuan tanah-tanah dibawah jalan daerah, jalan perkotaan ataupun jalan lingkungan sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Tahun Anggaran 2017 yang belum dapat kita mohonkan pensertifikatannya karena menunggu peraturan yang berlaku.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan di dukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Madiun mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung pembangunan. Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat diperbaharui seperti hutan, tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah dimanfaatkan seperti sumber daya lahan dan hutan.

Tabel 2.81
Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2020
di Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,61	84,87	82,39	84,07	84,66
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,22	56,09	56,96	48,71	50,00
3	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	93,17	90,22	90,26	90,38	90,38
4	Pencemaran Pemantauan status mutu air	45,16	51,61	44,04	51,61	51,61
5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,32	0,47	0,47	0,47	0,47
6	Persentase panganan sampah (Persentase sampah yang terangkut)	26,33	27,23	28,92	28,92	28,92
7	Cakupan penghijauan wilayah rawa longsor dan Sumber Mata Air	7,07	7,14	7,09	7,07	0
8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen (amdal, UKL - ULP) (%)	100	100	100	100	100
9	Rasio tempat penampungan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,32	9,07	9,07	9,07	9,07
10	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100
11	Rasio Ruang Terbuka hijau per satuan luas wilayah ber	9,09	9,12	9,12	9,12	9,12

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	HPL / HGB (Urusan Lingkungan Hidup)					

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan capaian urusan lingkungan hidup tahun 2016-2020. Indeks kualitas udara turun dari tahun 2016-2020, tahun 2016 sebesar 85,61 menjadi 84,66 di tahun 2020. Indeks kualitas air juga mengalami penurunan dari tahun 2016-2020, tahun 2016 sebesar 55,22 menjadi 50,00 ditahun 2020. Indeks tutupan hutan tahun 2016 sebesar 93,17 menurun menjadi 90,38 ditahun 2019-2020.

Pencemaran pemantauan status mutu air cenderung meningkat, tahun 2018 sebesar 44,04 menjadi 51,61 ditahun 2019-2020. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen, tahun tahun 2015-2020 sebesar 100%. Rasio tempat penampungan sampah per satuan penduduk, tahun 2016 sebesar 0,32%, tahun 2016-2020 sebesar 9,07%. Penegakan hukum lingkungan tahun 2016-2020 sebesar 100%. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 9,09 yang kemudian bertambah menjadi 9,12 di tahun 2017.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Sedangkan di Kabupaten Madiun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berikut merupakan gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Tabel 2.82
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP)(%)	n/a	n/a	83	84	84
2	Rasio bayi berakte kelahiran (persentase kepemilikan akta kelahiran)(%)	n/a	n/a	45.71	43.55	44.52
3	Rasio pasangan berakte nikah	n/a	n/a	19,63	66,25	70,69

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase kepemilikan KTP (%)	93	94	82.69	83.52	84.63
5	Rasio Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	854	882	457		445.21
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	Ada	ada	Ada	ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8	Rasio penduduk yang ber-KK	n/a	n/a	92.29	93.17	93.71

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun telah melaksanakan program-program pembangunan antara lain penyediaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 20% dalam rangka menyelesaikan permasalahan tingkat desa, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang akuntabel berbasis aspirasi masyarakat desa, program ketrampilan manajemen dan pengelolaan BUMDes, pengembangan lembaga ekonomi desa.

Tabel 2.83
Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	n/a	0,66	0,68	0,71	0,75
2	Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	60	65,3	65,3	65,3	65,3
3	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi	7,3	9,7	12,1	14,6	17
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap jumlah desa	14,6	12,62	15	14,6	14,1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Madiun, 2021

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%). Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan adalah diukur dengan indikator, sebagai berikut :

Tabel 2.84
Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%)	74,75	76,05	77,19	76,29	77,11
2	Laju pertumbuhan penduduk	0,31	0,28	0,22	0,19	-
3	Rata - rata jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksi (Total Fertility Rate / TFR)	2,02	2,02	2,19	2,23	-

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan indikator pengendalian penduduk dan KB tahun 2016 - 2020. Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif meningkat setiap tahun, dan pada tahun 2020 sebanyak 77,11% telah menjadi peserta KB aktif. Laju pertumbuhan Penduduk tahun 2016 sebanyak 0,31 dan tahun 2017 sebanyak 0,28. Kemudian laju pertumbuhan penduduk tersebut menurun kembali di tahun 2018 dengan menjadi 0,22 dan semakin menurun menjadi 0,19 di tahun 2019 dan meningkat signifikan di tahun 2020 yaitu 1,14. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan tahun 2016-2017 sebanyak 2,02 dan meningkat menjadi sebesar 2,17 di tahun 2020.

2.3.2.9 Perhubungan

Bidang perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kab. Madiun. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya. Dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jalan, memperlancar arus lalu lintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, maka ditetapkan beberapa indikator perhubungan sebagai berikut :

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PJU kondisi baik (titik)	2.924	4.568	4.673	4.696	4.892
2	Rasio ijin trayek	0,00001076	0,0000601	0,00007704	0,0000809	0,0000956
3	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	3.722	5.071	5.130	5.294	5.682
4	Pemasangan rambu - rambu					
	rambu - rambu	98	96	100	100	0
	<i>warning light</i>	104,88	100	100	100	0
	marka	98,78	99	100	100	0
	<i>Guard Rail</i>	20	83	100	0	0
5	Persentase kendaraan yang layak jalan	109,75	116	127.05	154.28	117.44
6	Panjang median jalan dalam kondisi baik (m)	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan capaian urusan perhubungan tahun 2016- 2020. PJU kondisi baik terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebanyak 2.924 titik, tahun 2017 sebanyak 4.568 titik, tahun 2018 sebanyak 4.673 titik, tahun 2019 sebanyak 4.696 titik, dan tahun 2020 semakin bertambah hingga mencapai 4.892 titik. Rasio ijin trayek pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,00001076, yang selanjutnya tahun 2020 menjadi sebesar 0,0000956. Jumlah uji kir angkutan umum cenderung terus meningkat dari tahun 2016 - 2020. Tahun 2016 jumlah uji kir sebanyak 3.722 unit, tahun 2017 sebanyak 5.071 unit, tahun 2018 sebanyak 5.130 unit, tahun 2019 meningkat menjadi 5.294 unit dan semakin bertambah hingga mencapai 5.682 unit di tahun 2020.

Marka terus mengalami peningkatan yaitu di tahun 2016 memiliki jumlah marka sebanyak 98,78, pada tahun 2017 jumlah marka sebanyak 99, dan di tahun 2018-2019 sebanyak 100. Guard rail juga berfluktuasi, tahun 2018 sebanyak 100, kemudian tahun 2017 sebanyak 83, dan terendah tahun 2016 sebanyak 20,00. Persentase kendaraan yang layak jalan terus mengalami peningkatan di tahun 2016 sebanyak 109,75 sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 116. Kemudian capaian persentase kendaraan yang layak jalan semakin bertambah hingga 127,05 di tahun 2018, tahun 2019 meningkat hingga 154,28, dan di tahun 2020 terjadi

penurunan menjadi 117,44. Panjang median jalan dengan kondisi baik, tahun 2016 sepanjang 6.500 meter, tahun 2017 hingga tahun 2020 panjang median jalan dengan kondisi baik yaitu 9.000 meter.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah jaringan komunikasi; (ii) jumlah pertemuan dengan media massa; (iii) jumlah web site milik pemda; (iv) jumlah PD yang memiliki jaringan internet (v) Jumlah *website* PD yang aktif (vi) Diseminasi informasi kepada masyarakat dan (vii) pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Strategi dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan akses data informasi bagi instansi dan masyarakat dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data dan instansi kemitraan dan kerjasama dengan media massa sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.86
Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jaringan komunikasi (1 Unit/Kecamatan)	15	15	15	15	15
2	Jumlah pertemuan dengan media massa	6	6	6	6	1
3	Ketersediaan Webside milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet	58	52	61	61	61
5	Jumlah website / blog resmi SKPD yang aktif	61	47	45	46	53
6	Pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui :					
	Media massa radio	12X	12X	12X	12X	setiap hari
	Media Baru / online website	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari
	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)					
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM tingkat Kecamatan	0	0	0	18	9
	Jumlah Aplikasi E - Goverment	46	79	79	84	11
7	Jumlah jaringan komunikasi (1 Unit/Kecamatan)	15	15	15	15	15
	Jumlah pertemuan dengan media massa	6	6	6	6	1
8	Ketersediaan Webside milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan Capaian urusan komunikasi dan informatika tahun 2016 - 2020. Pengelolaan *e-government* di Kabupaten Madiun belum maksimal, dikarenakan kurangnya update aplikasi yang ada dan pengelolaan terhadap aplikasi tersebut belum berjalan dengan baik. Disamping itu aplikasi *e-government* yang dimiliki oleh Kabupaten Madun belum terintegrasi sehingga pengelolaannya masih parsial di masing-masing OPD.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perkoperasian. Pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Madiun masih belum beraneka ragam dikarenakan banyaknya koperasi yang masih mempertahankan jenis usaha lamanya (simpan pinjam) dan enggan untuk mengembangkan jenis usaha baru lainnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Madiun terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Data Keragaan Koperasi 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	785	790	792	792	792
2	Koperasi Aktif	669	674	677	685	685
3	Koperasi Tidak Aktif	116	116	115	107	107
4	Jumlah Anggota	198.284	210.579	145.877	155.851	188.963
5	Jumlah Simpanan (Rp.000.000,-)	163.457	181.314	a.	193.314,519	365.037,624
6	Volume Usaha (Rp.000.000,00)	541.880	723.045	604.980,716	635.608,647	664.805,420
7	SHU (Rp.000.000,-)	21.896	23.335	46.427,472	47.121,078	48.005,709
8	Karyawan	1.337	1.367	1.241	1.214	1.143
9	Modal Sendiri (Rp.000.000,-)	270.120	265.615	309.426,497	354.878,097	365.037,624
10	Modal Luar (Rp.000.000,-)	487.990	452.858	555.503,327	498.147,911	505.345,552
11	Asset (Rp.000.000,00)	758.110	718.473	864.929,824	853.026,008	870.383,176

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Persentase Koperasi Aktif juga merupakan salah satu sarana atau alat Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan dan program-program pembangunan di Kabupaten Madiun. Secara kebijakan makro perekonomian, Pemerintah dapat mempengaruhi, mengendalikan atau mengawasi secara langsung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan anggota yang lebih baik melalui program dan kegiatan sesuai

dengan bidang koperasi tersebut. Dilihat dari sisi jumlah Koperasi Aktif, maka di Kabupaten Madiun telah mengalami peningkatan dari 690 unit koperasi pada tahun 2013 menjadi 790 unit koperasi pada akhir tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018-2020 jumlah koperasi menjadi 792 unit.

Langkah - langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam peningkatan Koperasi Aktif tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas kinerja koperasi dan sumberdaya pengurus koperasi.
- b. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan melalui laporan keuangan koperasi.
- c. Insentif bantuan permodalan bagi koperasi.
- d. Revitalisasi peran koperasi.

Oleh karena itu hal ini berdampak pula pada bertambahnya sumber modal didalam koperasi dari pihak pemerintah atau pihak ke tiga baik dalam bentuk bantuan maupun pinjaman dikarenakan manajemen atau pengelolaan koperasi sudah semakin baik. UMKM juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena berdampak pada peningkatan tenaga kerja dan berpengaruh pada meningkatnya PDRB atau pendapatan perkapita. Karakteristik utama yang dimiliki oleh UMKM salah satunya merupakan usaha padat karya yang menyerap tenaga kerja dimana peningkatan tenaga kerja. Langkah-langkah optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam peningkatan UMKM tersebut adalah meliputi:

- a. Inventarisasi data perkembangan UMKM dan peningkatan kualitas lembaga UMKM meliputi Manajemen, SDM dan Sarana Prasarana.
- b. Fasilitasi UMKM dengan Lembaga Keuangan dan Non Keuangan dalam segi permodalan.
- c. Fasilitasi promosi dan jaringan pemasaran. Fasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak swasta dalam bentuk CSR, Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.88
Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	UMKM (unit)	45.255	45.521	128.090	128.114	128,143
2	Tenaga Kerja (orang)	96.065	96.630	207.748	207.788	207.856

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Madiun dan BPS Kab Madiun, Data Diolah

2.3.2.12 Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan iklim investasi, maka Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perijinan usaha. Proses perijinan, khususnya perijinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.89
Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2020

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lama proses perijinan (dalam hari)	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	10	10	10
2.	Jumlah ijin yang diterbitkan (buah)	3.467	3.162	3.121	3.243	3.698	2.140	1.784	2.255

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Mengukur capaian urusan penanaman modal diukur berdasarkan dua indikator yaitu lama proses perijinan dan jumlah ijin yang diterbitkan. Lama proses perijinan dari tahun 2013 – 2020 tetap sama yaitu dalam rentang waktu 1-10 hari. Jumlah ijin yang diterbitkan 2 (dua) tahun terakhir mengalami kenaikan, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 3.243 ijin dan di tahun 2017 tercatat sebanyak 3.698 ijin. Adanya suatu peningkatan permohonan ijin usaha sebanyak 455 ijin. Hal ini mengindikasikan bahwa para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sudah mulai melihat peluang investasi yang baik di wilayah Kabupaten Madiun. Akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2018 yang hanya 2.140, kemudian semakin berkurang menjadi 1.784 di tahun 2019, dan mengalami sedikit penambahan pada tahun 2020 dengan menjadi 2.255.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi

harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi. Capaian indikator bidang kepemudaan dan olahraga dapat dilihat di Tabel 2.45.

2.3.2.14 Statistik

Dalam UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan.

Tabel 2.90
Capaian Urusan Statistik Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Buku “PDRB Kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.3.2.15 Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi Persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis *IT*.

Tabel 2.91
Capaian Indikator Persandian Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SDM Persandian	3	6	7	6	5
2	Persentase Informasi yang diamankan	100	104	94,25	96,97	67,50

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Indikator capaian urusan persandian tahun 2016 – 2020 yaitu Jumlah SDM persandian dan persentase informasi yang diamankan. Jumlah SDM persandian tahun 2016 yaitu sebesar 3 sedangkan di tahun 2020 jumlah SDM persandian menjadi 7. Persentase informasi yang diamankan data yang ada dimulai tahun 2016 sebesar 100 dan meningkat menjadi 104 pada tahun 2017. Persentase tersebut mengalami penurunan pada periode 2018-2020 dengan berakhir menjadi 67,50 di tahun 2020.

2.3.2.16 Kebudayaan

Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Madiun terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Tabel 2.92
Capaian Indikator Bidang Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	718	409	409	260	315
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	51	51	32	34	34
3	Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan	180	207	207	212	216

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Terkait dengan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, di Kabupaten Madiun terdapat beberapa obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan, yaitu:

1. Manuskrip sebanyak 43: Naskah kuno ciptaan masyarakat Kabupaten Madiun, yang ada Kab Madiun 12 buku dan 31 buku di Luar Kab. Madiun (di perpustakaan Jogjakarta, Perpustakaan Solo, Perpustakaan UI dll), rencana akan dilakukan digitalisasi manuskrip tahu Kuning Desa Nglambangan;
2. Tradisi Lesan yaitu Cerita rakyat yang diwariskan turun temurun, (Cerita Keris Tundung Mediun, Cerita Raden Ajeng Retno Tradisi Lesan sebanyak 8 yaitu Djumilah, Cerita Dongkrek Madiun, Cerita Kerajaan Gelang-gelang, Cerita Berdirinya Masjid Basyariyah Sewulan, Cerita Putri Cacing Dolopo,

- Cerita Ratu Kencana Wungu, Cerita Nyai Lambang Kuning Desa Nglambangan);
3. Bahasa yaitu Bahasa yang beredar di Masyarakat Kabupaten Madiun (bahasa Jawa, indonesia, Inggris, Arab, Jepang, Korea, dll);
 4. Adat Istiadat (Upacara Labuhan Tulak Bilahi Desa Kreet, Bersih Desa, Pembagian Warisan, Pembagian Air Irigasi, Metil/Panen Padi, Tradisi Syukuran Kemerdekaan, Tradisi Sungkeman Silaturahmi, dll);
 5. Pengetahuan Tradisi bersumber dari tradisi yang ada di Kabupaten Madiun(pembuatan Jamutradisional, pembuatan brem, manco, membatik dll)
 6. Teknologi Tradisi yaitu pemanfaatan Tehnologi tradisional yang diwariskan pada generasi berikutnya (Teknologi pembuatan alat dongkrek, teknologi pembuatan Gerabah, Dokar, Teknik ani-ani, pembuatan jamu, brem, gula merah, dll);
 7. Seni, di Kabupaten Madiun terdapat 29 jenis Kesenian, 732 jumlah pelaku seni yang memiliki KIKK (Kartu Induk Kesenian dan Kebudayaan);
 8. Permainan rakyat, yaitu permainan tradisi yang berkembang di masyarakat (Egrang, tlompah panjang, dakon, macanan, betengan, patil lele, bekelan, nekeran, dll);
 9. Olah raga Tradisional, yaitu Olah raga yang masuk data KONI, untuk diikuti lomba Olahraga Tradisional (Pencak silat dan Egrang, Tlompah panjang, Dagongan, Gobak sodor);
 10. Ritus (Upacara Kelahiran, Upacara Tingkepan, Upacara 7 Bulanan (Piton-piton), Tradisi Lamaran, Upacara Pernikahan, Upacara Kematian, Upacara Labuhan Tulak Bilahi Desa Kreet, Bersih Desa, Pembagian Warisan, Pembagian Air Irigasi, Metil/Panen Padi, Tradisi Syukuran Kemerdekaan, Tradisi Sungkeman Silaturahmi, dll).

2.3.2.17 Perpustakaan

Gambaran umum pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan yang didukung peran perpustakaan di Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.93
Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan (Unit)	57	57	57	57	57
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (pengunjung)	18.956	28.934	31.001	35.169	14.415
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	26.301	27.407	32.600	34.353	34.444

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Kinerja bidang perpustakaan di Kabupaten Madiun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, baik dari jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan maupun jumlah koleksi buku, meskipun jumlah perpustakaan pada tahun terakhir tidak ada peningkatannya, namun jumlah koleksi buku perpustakaan terdapat peningkatan sehingga berpengaruh terhadap jumlah pengunjung perpustakaan yang semakin meningkat. Akan tetapi di tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan menurun drastis menjadi 14.415 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Disebabkan pembatasan kunjungan pada masa pandemi *Covid-19*, namun masyarakat masih ada kepedulian dalam upaya menambah wawasan dan minat membaca baik yang dilaksanakan secara *online* maupun kehadiran.

2.3.2.18 Kearsipan

Pembangunan bidang kearsipan di Kabupaten Madiun dapat dilihat melalui peningkatan SDM pengelola arsip dan pengelolaan arsip secara baku. Capaian kinerja kearsipan di Kabupaten Madiun tahun 2016 - 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.94
Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	-	2	4	11	14,8
2	Jumlah peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	80	80	80	80	80

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Kinerja urusan kearsipan Kabupaten Madiun tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan yaitu dilihat dari peningkatan jumlah pengelolaan arsip secara baku. Untuk jumlah SDM pengelola kearsipan, dari tahun ketahun tidak

mengalami perubahan, namun secara kompetensi telah ditingkatkan melalui pelatihan kearsipan.

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

Bidang pariwisata yang dilaksanakan di setiap wilayah Kabupaten / Kota di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. Maraknya pembangunan pariwisata di berbagai daerah yang selama ini berlangsung, dapat dijadikan acuan dan motivasi untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Madiun karena dari aspek sumber daya alam Kabupaten Madiun memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi salah satu tujuan pariwisata nasional maupun internasional.

Tabel 2.95
Perkembangan Bidang Pariwisata Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kunjungan Wisata (orang)	406.762	438.906	544.781	464.597	130.024
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (Rp.000,-)	117.737	139.975	150.194	178.752,3	143.812,9
3.	Jumlah Obyek Wisata Yang Telah Dikembangkan (Unit)	7	11	12	13	22

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Pariwisata merupakan sektor utama dalam prioritas pembangunan kedepan di Kabupaten Madiun. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata yang ada. Data kunjungan wisatawan yang tercatat sampai dengan tahun 2020 di wilayah Kabupaten Madiun, ada pada 22 (dua puluh dua) destinasi sebanyak 28.020 orang. Capaian tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penurunan ini terjadi karena adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan pembatasan dan penutupan semua lokasi wisata. Sedangkan kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun 2020 sebanyak Rp 143.812.900,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Ratus Delapan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), capaian ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dan 2019, hal ini disebabkan selain karena

turunnya jumlah kunjungan wisata juga disebabkan kontribusi PAD ini yang dulunya didapatkan dari 3 (tiga) destinasi wisata yaitu Monumen Kresek, Wana Wisata Grape dan Waduk Bening/Widas Saradan, mulai tahun 2020 menjadi 2 (dua) destinasi yaitu Monumen Kresek dan Waduk Bening/Widas Saradan.

2.1.3.3.2 Pertanian

Pertanian meliputi semua sub sektor mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan hingga perkebunan. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian itu disumbang oleh pertumbuhan produksi pertanian yang juga relatif rendah. Tabel di bawah menyajikan pertumbuhan produksi beberapa komoditas pertanian utama.

Tabel 2.96
Pertumbuhan Produksi Tanaman Utama Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir
1	Padi	536.150,83	541.250,84	543.260,00	564.295,07	617.483,67	560.488,08
2	Jagung	46.043,00	59.126,57	56.730,62	89.322,51	66.795,95	63.603,73
3	Kedelai	4.804,00	3.491,00	2.580,47	1.483,00	1.638,61	2.799,42
4	Mangga	36.952,00	37.684,24	53.439,42	46.587,00	37.681,96	42.468,92
5	Porang	8.520,00	8.704,95	8.704,95	9.060,15	10.325,01	9.063,01
6	Kakao	859,60	917,69	848,90	860,10	511,92	799,64
7	Tebu	16.860,76	11.187,77	19.225,00	14.213,44	12.477,79	14.792,95
8	Cengkeh	383,00	451,66	360,73	356,08	178,02	345,90
9	Ikan	3.178,69	3.444,38	3.467,97	4.408,53	4.050,85	3.710,08

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, data diolah Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa komoditas pertanian yang mengalami penurunan produksi. Porang dan kakao adalah produk yang diunggulkan dan memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Namun demikian hingga saat ini porang dan kakao masih menjadi produk yang dijual dalam bentuk mentah. Dengan demikian maka nilai tambah dari produk-produk unggulan ini masih relatif rendah dan belum bisa menambah pendapatan petani secara signifikan. Menurunnya beberapa komoditas sektor pertanian disebabkan oleh

beberapa aspek. Pertama, untuk tanaman padi dan palawija persoalan yang dihadapi adalah produksi cenderung naik akan tetapi kurang signifikan.

Komoditas padi cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 mencapai 617.483,67 ton. Demikian juga komoditas porang mengalami kenaikan dari tahun 2016 hanya 8.250 ton per tahun, pada tahun 2020 mencapai 10.325,01 per tahun. Untuk komoditas lain mengalami penurunan produksi.

2.1.3.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya dinamika dan ragam serta perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan disegala bidang, hal tersebut akan meningkatkan aktifitas pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berdampak terjadinya ketidakseimbangan fungsi lindung dan ekosistem serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Dengan kondisi tersebut, maka perlu direncanakan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral secara efektif dan efisien untuk menjamin ketersediaannya guna kemakmuran bagi masyarakat.

Tabel 2.97
Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalan (%)	4,05	5,35	2,49	0,49	BPS BELUM RILIS
2	Jumlah Pertambangan Berijin (Lokasi)	10	15	5*	1*	2*
3	Kontribusi Pertambangan PAD (Rp.000)	351.351	535.426	448.927	234.246	46.102

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Madiun, data diolah Tahun 2021

Badan Pendapatan Daerah, Data Diolah 2021

Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun (MDA.2021)

*) Angka Sementara

Peningkatan Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalan di tahun 2016 - 2017 sebesar 1,30 persen, dikarenakan adanya kegiatan penambangan Galian C di Kabupaten Madiun yang signifikan. Penambangan ini dipicu dengan adanya pembangunan Tol Trans Jawa dan Jalur Ganda (*double track*) Kereta Api yang melalui wilayah Kabupaten Madiun.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator (i) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; (ii) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%); (iii) Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina (PKL). Perdagangan di wilayah kabupaten Madiun didominasi oleh para pedagang dengan modal kecil. Modal merupakan salah satu indikator untuk menentukan pertumbuhan sektor perdagangan. Perdagangan di Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami trend kenaikan yang kurang signifikan. Kenaikan yang kurang signifikan ini juga dipengaruhi dari berbagai macam faktor diantaranya adalah faktor dari polapikir masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun yang sudah cukup puas dengan apa yang dihasilkan saat ini, tanpa berpikir untuk menambah nilai tambah dari komoditas yang diperdagangkan. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perdagangan selama kurun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.98
Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,64	15,86	16,65	17,19	16,79
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	29,00	32,7	35,8	28,67	28,78
3	Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina (PKL)	360	447	600	650	680

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, Tahun 2021 Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun 2021

Perdagangan di wilayah Kabupaten Madiun mayoritas didominasi oleh perdagangan dalam wilayah daerah. Perdagangan ini hanya memiliki pangsa pasar di wilayah Kabupaten Madiun. Dengan kenaikan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 0,49 persen menandakan bahwa sektor perdagangan masih mengalami perlambatan. Para pelaku perdagangan yang sudah melakukan aktivitas perdagangan antar daerah maupun antar pulau dari wilayah Kabupaten Madiun masih relatif sedikit dikarenakan kurang mengertinya para pelaku perdagangan dengan dinamika perdagangan yang ada saat ini khususnya di wilayah Indonesia. Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur sebenarnya bisa memanfaatkan Sistem Perdagangan Antar

Pulau (SIPAP) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, akan tetapi banyak pelaku usaha dan perdagangan enggan untuk masuk dalam sistem tersebut dikarenakan kualitas dan kuantitas dari komoditas yang akan diperdagangkan masih kurang memenuhi standar. Oleh karena itu peran dari Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Perangkat Daerah terkait guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari komoditi yang akan atau mungkin bias diperdagangkan melalui SIPAP diatas. Peluang inilah yang harus ditangkap dan dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan di wilayah Kabupaten Madiun sehingga target maupun tujuan dari sektor perdagangan dapat terealisasi.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun, kebijakan industri pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis agro yang ramah lingkungan. Sedangkan strategi yang dikembangkan adalah:

1. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
2. Mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;
3. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil usaha mikro dan industri kecil;
4. Meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
5. Mengembangkan kawasan industri menengah - besar pada lokasi khusus yang strategis;
6. Menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baik secara individual maupun komunal.
7. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri, antara lain penyediaan hunian dan berbagai fasilitas lingkungan bagi karyawan atau buruh industri, serta sarana dan prasarana pendukung keterkaitan proses produksi (hulu - hilir) seperti:

- a. Menggunakan metode dan/atau teknologi ramah lingkungan;
- b. Mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
- c. Menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri;
- d. Menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan industri terhadap kemungkinan adanya bencana industri;
- e. Meningkatkan nilai tambah, termasuk menggunakan kembali dan mendaur ulang;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
- g. Menjalinkan kerjasama dengan investor maupun dengan kabupaten/kota sekitar dalam pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
- h. Mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan;
- i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM);
- j. Mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif;
- k. Mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak dan lain-lain; dan,
- l. Menelusuri potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan.

Dari sentra industri yang sudah berkembang juga didukung dengan adanya peningkatan cakupan wilayah penambahan tenaga kerja yang semula hanya dalam wilayah satu kecamatan saja berkembang menjadi beberapa kecamatan yang berada disekitaran sentra industri tersebut. Sentra industri dengan skala besar hanya terdapat di sekitaran wilayah perbatasan dengan Kota Madiun, selebihnya sentra industri tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Madiun dengan skala sedang dan kecil. Ukuran sedang maupun kecilnya sentra industri ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang diserap serta komoditas apa yang diolah ataupun diperdagangkan.

Contoh dari sentra industri sedang adalah sentra industri pengolahan gembol/akar kayu jati yang tersentra di wilayah Kecamatan Saradan.

Pengembangan sentra sentra lainnya harus dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun bersama dengan pelaku industri lainnya.

Tabel 2.99
Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,85	10,2	10,66	10,85	11,00
2	Pertumbuhan Industri (%)	24,05	60,34	62,24	66,38	68,35
3	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	16	19	22	23	24
4	Jumlah sentra industri yang telah berkembang (unit)	85	104	108	113	135

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen dari Tahun 2019 sebesar 10,85 persen menjadi 11,00 persen di Tahun 2020. Kenaikan kontribusi tersebut banyak dipengaruhi oleh semakin tertariknya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun. Sedangkan Pertumbuhan Industri di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan sebesar 1,97 persen dari Tahun 2019 sebesar 66,38 persen menjadi 68,35 persen di Tahun 2020. Kenaikan pertumbuhan industri tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pembangunan infrastruktur skala nasional seperti Jalan Tol Trans Jawa dan Rel Kereta Api Ganda (*doubletrack*).

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Tujuan diadakan Transmigrasi:

1. Untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah nusantara;
2. Untuk pertahanan dan keamanan/hankam lokal nasional;
3. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib.

Tabel 2.100
Capaian Indikator Bidang Transmigrasi di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah transmigrasi umum (KK)	15	2	2	4	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Indikator bidang transmigrasi yaitu Jumlah Transmigrasi Umum (KK). Jumlah transmigrasi umum (KK) berfluktuasi dan ada kecenderungan berkurang.

jumlah transmigrasi umum (KK) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 15, sedangkan pada tahun 2020 tidak melaksanakan pemberangkatan transmigrasi umum. Untuk meningkatkan jumlah transmigrasi ini dibutuhkan peran pemerintah, diantaranya pemerataan penduduk ke daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal dan memberikan pelatihan serta keterampilan pada penduduk transmigrasi agar memanfaatkan potensi sumber daya alam sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya. Selain berdasarkan gambaran data di atas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian yakni berkurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi dan kurangnya kesiapan daerah tujuan penempatan transmigrasi.

2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan stakeholders serta meningkatkan kualitas dan manajemen data dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Tabel 2.101
Indikator Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (buah)	10	10	7	6	6
5	Persentase keterisian SIPD	75	80	80	100	100

Sumber : Bappeda Kab Madiun, 2021

Indikator Bidang Perencanaan, yaitu terealisasinya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda, tersedianya dokumen perencanaan

RPJMD yang telah ditetapkan PERDA, Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, jumlah dokumen perencanaan pembangunan, dan Persentase keterisian SIPD. Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sudah disahkan dalam status “Ada”.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kecenderungan menurun sesuai dengan kebutuhan pada tahun tersebut. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah dokumen perencanaan sebanyak 10 buah, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6 dokumen. Disebabkan adanya pengalihan penyusunan dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS, yang sebelumnya disusun oleh Bappeda dialihkan pada BPKAD.

Persentase keterisian pada SIPD pemerintah Kabupaten Madiun cenderung mengalami peningkatan, hal ini disebabkan elemen data SIPD tidak secara keseluruhan terdapat di wilayah Kabupaten Madiun. Pada tahun 2019 SIPD mengalami perubahan fungsi dari sebelumnya berbasis data base menjadi sebuah sistem perencanaan terintegrasi.

2.1.3.4.2 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun indikator Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.102
Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik Tahun 2016-2020
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Demo	0	11	0	0	2
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	4	5	7	4	6
3	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	4	4	6	5	4
4	Jumlah LSM	75	76	76	51	53

Sumber : Bakesbangpoldagri Kab. Madiun, 2021

Indikator bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Madiun Tahun 2016 - 2020 diantaranya yaitu jumlah demo, kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas, dan OKP, kegiatan pembinaan politik daerah, dan jumlah

LSM. Jumlah demo cenderung menurun dan di tahun 2020 terjadi sebanyak 2 kali demo. Dengan meningkatkan Koordinasi Kewaspadaan Dini dengan jajaran vertikal. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP juga semakin menurun menjadi 4 kali di tahun 2020. Disebabkan pengurangan jumlah pertemuan secara langsung, dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Begitu juga dengan pembinaan politik daerah. Jumlah LSM di kabupaten Madiun juga mengalami penurunan dari tahun 2016 – 2020, Tahun 2016 sebanyak 75, tahun 2017-2018 sebanyak 76, kemudian menurun menjadi 51 di tahun 2019, dan sebanyak 53 di tahun 2020. Disebabkan pemberlakuan sistem registrasi secara *online*-Ormas terhadap LSM, yang berdampak pada LSM yang tidak memenuhi syarat, akan tidak terdaftar pada sistem *e*-Ormas.

2.1.3.4.3 Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dari proses sampai dengan hasil. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Madiun tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.103
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2018		2019		2020	
		Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
I.	PROSES						
1.	Manajemen Perubahan (5)	5	0,76	5	2,00	2	1,69
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)	5	0,41	5	1,46	2	1,46
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi (6)	6	1,82	6	2,10	3	2,58
4.	Penataan Tatalaksana (5)	5	1,96	5	2,06	2,50	1,93

NO	URAIAN	2018		2019		2020	
		Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM (15)	15	8,35	15	8,96	3,00	2,78
6.	Penguatan Akuntabilitas (6)	6	1,65	6	2,19	2,50	2,25
7.	Penguatan Pengawasan (12)	12	4,92	12	5,49	2,50	1,76
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)	6	3,9	6	3,92	2,50	1,91
	TOTAL PROSES (60)	60	23,77	60	28,18	20	16,36
II.	HASIL						
1.	Akuntabilitas Kinerja(14)	14	8,510	14	9,80	10	7,97
2.	Kapasitas Organisasi (6)	6	3,820	6	4,62	10	8,15
3.	Persepsi Korupsi (7)	7	5,840	7	6,06	10	7,50
4.	Opini BPK (3)	3	3,000	3	3,00	-	-
5.	Persepsi Kualitas Pelayanan (10)	10	8,230	10	8,35	10	7,50
	TOTAL HASIL (40)	40	29,40	40	31,83	40	31,12
	INDEKS RB (I+II)	100	53,17	100	60,01	100	70,55

Sumber : Inspektorat Kab. Madiun, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2020 meningkat dengan nilai sebesar 70,55 (BB=sangat baik). Nilai ini melebihi IRB Propinsi Jawa Timur yang masih pada posisi kategori B (Baik). Peningkatan ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun telah melakukan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan. Ada beberapa prioritas reformasi birokrasi di Kabupaten Madiun yaitu:

1. Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Madiun terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana;
2. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan;
3. Prioritas peningkatan pelayanan yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;

4. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme/wilayah birokrasi bersih dan melayani, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya;
5. Prioritas Perangkat Daerah (PD) yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing PD dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Walaupun nilai indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Madiun telah mencapai kategori BB, namun nilai ini belum maksimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa komponen yang masih mendapatkan nilai rendah yaitu penguatan pengawasan (1,76), penataan peraturan perundang-undangan (1,46), manajemen perubahan (1,69) serta Penataan tata laksana (1,93).

Sementara itu, nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Madiun dari tahun 2016 juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 hasil evaluasi LPPD mendapatkan nilai skor 3,0784 dengan kategori prestasi sangat tinggi. Nilai LPPD Kabupaten Madiun pada tahun 2016 pada tingkat nasional, menempati peringkat 41 (empat puluh satu) dari 397 Kabupaten di seluruh Indonesia dengan skor 3,3267 atau sangat tinggi. Secara rinci hasil nilai LPPD Kabupaten Madiun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Nilai LPPD Tahun 2016-2016

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,3267	3,2240	3,3308	Hasil belum keluar	Belum dievaluasi
2	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	41	24	Penghargaan tertinggi	Hasil belum keluar	Belum dievaluasi

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Madiun, 2021

Penataan organisasi sebagai salah satu komponen pada Indeks Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk merespon perubahan kewenangan dan urusan dalam tata

kelembagaan daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Urusan wajib dan urusan pilihan diampu oleh 38 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Adanya 38 Perangkat Daerah yang mengampu masing-masing urusan diharapkan dapat lebih berperan dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggungjawab. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Madiun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Tabel 2.105

Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun

No	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Sekretariat Daerah (3 Asisten, 3 Staf Ahli dan 9 Bagian)	Fungsi penunjang untuk: a. Perumusan penyusunan kebijakan daerah b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah c. Pengoordinasian pelayan administratif dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara d. Penetapan pemantauan dan evaluasi perangkat daerah
2.	Sekretariat DPRD	Fungsi penunjang pendukung kegiatan DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi penunjang keuangan
5.	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi penunjang keuangan
6.	Badan Kepegawaian Daerah	Fungsi penunjang kepegawaian dan diklat
7.	Inspektorat	Fungsi penunjang pengawasan
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
9.	Dinas Kesehatan	Urusan pemerintahan bidang kesehatan
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan pemerintahan bidang komunikasi informasi, bidang statistik dan persandian
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal

No	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang pendidikan; kebudayaan
15.	Dinas Perhubungan	Urusan pemerintahan bidang perhubungan
16.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan.
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan pertanahan
18.	Dinas Sosial	Urusan pemerintahan bidang sosial
19.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan pemerintahan bidang pariwisata; kepemudaan dan olah raga
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan
21.	Dinas Tenaga Kerja	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; transmigrasi
22.	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro	Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23.	Dinas Ketahanan Pangan	Urusan pemerintahan bidang pangan
24.	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
25.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	Fungsi penunjang kenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan pemerintahan bidang kebakaran dan penyelamatan
28.	Bakesbangpoldagri	Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
29.	Kecamatan (15), Kelurahan (8)	Fungsi penunjang untuk: a. Pengoordinasian urusan pemerintahan umum b. Pengoordinasian urusan ketenteraman dan ketertiban c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan d. Pengoordinasian kegiatan kesejahteraan sosial e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat f. Pengoordinasian penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum h. Pengoordinasian pemerintahan kelurahan

Penataan organisasi ini diharapkan dapat menghasilkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-size*). Namun pada implementasinya terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah, antara lain:

- a. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset (Setda) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat masih melaksanakan urusan yang sama yaitu urusan pertanahan;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bappeda masih melaksanakan tugas terkait informasi dan publikasi Pembangunan Daerah;
- c. Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.1.3.4.4 Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penialian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2016 adalah WTP. Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, kinerja keuangan daerah Kabupaten Madiun masih sangat rendah khususnya kinerja pendapatan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan dalam APBD tahun 2016 baru mencapai 9,47%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Madiun masih rendah. Hal ini disebabkan karena potensi PAD belum tergali secara optimal. Hasil capaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.106
Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Realisasi PAD (Milyar)	163,58	241,94	219,04	229,20	243,40
3.	Realisasi PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (%)	9,47	13,76	11,97	11,77	13,46

Sumber : BPKAD, *Bapenda Kabupaten Madiun, Tahun 2021*

Sementara itu proporsi anggaran belanja untuk aparatur dari keseluruhan belanja masih di atas 50 persen atau masih lebih besar dari belanja publik. Secara rinci penjelasan mengenai proporsi anggaran belanja ada di bab III. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif dan efisien. Kondisi ini disebabkan antara lain:

1. Kultur *budget maximer* belum bisa dihilangkan
2. Sering terjadi perubahan regulasi dan kurang sinkronnya regulasi terkait pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat.
3. Keterlambatan petunjuk dan pelaksanaan teknis sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah
4. Tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah belum optimal.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah manajemen aset daerah. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara memadai. Beberapa aset pemerintah daerah Kabupaten Madiun belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa proses sertifikasi juga belum dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kurangnya komitmen pengguna barang dalam pengelolaan barang yang menjadi tupoksinya
2. Kurangnya pemahaman beberapa pengurus dan penyimpan barang di perangkat daerah terhadap administrasi pengelolaan
3. Terbatasnya personel yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA BMD
4. Belum sinerginya perencanaan anggaran dengan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan.

2.1.3.4.5 Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 29 mengamanatkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah Kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun indikator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.107
Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan survey IKM	10	15	18	15	15
2	ISO (SKPD)	0	0	1	2	2
3	Jumlah SPM yang telah dilaksanakan (bidang)	15	6	6	6	6
4	Penilaian predikat Laporan Kineja Pemerintah Daerah	B	B	B	BB	BB
5	Persentase SKPD yang sudah memiliki SOP	100	84,6	95	80,7	61,5
6	Jumlah Produk hukum yang diterbitkan	100	67	850	214	1.038
7	Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum	4	2	4	5	0
8	Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah	180	137	158	215	91
9	Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan wakil kepala daerah	170	123	135	119	26

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum, Bagian Prokopim Setda Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Pada indikator Sekretariat Daerah meliputi Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan survei IKM,ISO (SKPD), Jumlah SPM yang telah dilaksanakan (bidang),Penilaian predikat Laporan Kinerja Pemerintah Daerah tidak mengalami perubahan. Untuk indikator Persentase SKPD yang sudah memiliki SOP,Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum, Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan Wakil Kepala Daerah mengalami penurunan yang dikarenakan penyesuaian situasi pandemi Covid -19, yang menuntut pemerintah daerah melaksanakan pembatasan aktifitas.

2.1.3.4.6 Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan pengadaan pegawai melalui Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, secara kualitas ASN Kabupaten Madiun sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Madiun. Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Guna menunjang pencapaian kinerja yang optimal perlu dilakukan pelatihan/peningkatan kompetensi pegawai negeri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya, dapat tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pejabat yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (%)	89,76	72,9	77,7	70,8	68,7
2	Persentase jabatan struktural yang telah terisi	100	85,5	76,7	100	91,5

Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Pejabat Kabupaten Madiun yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan telah mencapai 89,76% dan telah mengisi seluruh jabatan struktural yang ada, kemudian di tahun

2020 turun menjadi 68,7%. Penyesuaian anggaran (*refocusing* dan rasionalisasi), menyebabkan pengurangan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, sehingga mempengaruhi penurunan jumlah peserta.

2.1.3.4.7 Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Madiun sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Penguatan pengawasan di Kabupaten Madiun memiliki nilai terendah dikomponen variabel Indeks Reformasi Birokrasi. Sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Pelaksanaan *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2020

No	Unsur-Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil <i>Self Assessment</i>		Hasil QA		Perubahan Nilai
			Skor	Nilai	Skor	Nilai	
1	Lingkungan Pengendalian	30,00	3,6250	1,0875	3,0000	0,9000	(0,1875)
2	Penilaian Resiko	20,00	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	-
3	Kegiatan Pengendalian	25,00	3,4545	0,8636	3,0000	0,7500	(0,1136)
4	Informasi dan Komunikasi	10,00	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	-
5	Pemantauan	15,00	3,0000	0,6000	3,0000	0,4500	(0,1500)
Jumlah		100,00	-	3,4511		3,000	(0,4511)
Keterangan		LEVEL 3 (Terdefinisi)					

Sumber: Inspektorat Kabupaten Madiun, 2021

Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Madiun belum berlangsung secara optimal disebabkan antara lain:

1. Kurangnya kompetensi APIP di bidang pengawasan.
2. Jumlah APIP yang tidak sebanding dengan jumlah OBRİK
3. Penerapan SPIP belum maksimal
4. Belum adanya aplikasi *e-LHP*

SPIP di Kabupaten Madiun mulai dilaksanakan pada tahun 2012 di 10 satuan organisasi pemerintah daerah antara lain (1) Inspektorat, (2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD), (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), (4) Dinas Pendidikan, (5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), (7) Bagian Organisasi (Setda), (8) Bagian Pemerintahan Umum (Setda) (9) Dinas Perhubungan, dan (10) Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan level

kapabilitas APIP di Kabupaten Madiun masih pada level 2, guna meningkatkan ke level 3, diperlukan persyaratan diantaranya sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Satgas;
2. Menyusun Perbup tentang pedoman penilaian resiko;
3. Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri level maturitas SPIP;
4. Standarisasi evaluator sejumlah ± 40 evaluator.

Pemenuhan terhadap Auditor dalam rangka pendampingan pembangunan daerah diupayakan untuk penambahan terhadap personil APIP, dapat sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.110
Persentase Fungsional Auditor Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Fungsional Auditor	20 %	20 %	20 %	48 %	50 %

Sumber : Inspektorat Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Persentase fungsional auditor di Kabupaten Madiun tahun 2016 masih sekitar 20% dan meningkat menjadi 50% di tahun 2020,

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara.

Konsumsi keluarga merupakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Tabel 2.111
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	829.647	422.919	922.114	891.858	917.158
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita	421.703	382.376	443.865	449.233	468.958

2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Kesejahteraan petani yang diindikasikan melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun 2016 - 2020 cenderung mengalami percepatan, walaupun di tahun 2017 mengalami perlambatan. Perlambatan ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih rendah daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Penurunan kondisi kesejahteraan petani di Kabupaten Madiun disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya biaya produksi (harga pupuk, sewa tanah) dan faktor cuaca yang ekstrim.

Tabel 2.112
Nilai Tukar Petani Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	108,13	106,25	106,53	102,43 107,12*	101,52

Sumber: BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Keterangan: Tahun 2016 sampai dengan 2018, cara perhitungan menggunakan tahun dasar 2012. Tahun 2019 sampai dengan 2020, cara perhitungan menggunakan tahun dasar 2018

**Tahun dasar 2012*

Kesejahteraan petani yang diindikasikan melalui Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan perbandingan atau rasio antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib).

Arti Angka NTP, yaitu :

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Kegunaan dan Manfaat dari pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebagai berikut:

- Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
- NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Sedangkan Cakupan Komoditas dari pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) meliputi:

- Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija
- Sub Sektor Hortikultura seperti: Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan
- Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antar daerah
- Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
- Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

NTP di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan Petani sudah mampu mencukupi kebutuhan faktor produksi pertanian dan konsumsi sehari-hari dari hasil usaha bertani.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

2.1.4.2.1 Perhubungan

Fungsi sektor perhubungan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Sektor perhubungan tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia tetapi juga mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dan membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Sektor Perhubungan berfungsi sebagai penunjang pembangunan (*thepromotionsector*) dan pemberi jasa (*theservicingsector*) bagi perkembangan ekonomi. Adapun capaian dari Urusan Perhubungan Kabupaten Madiun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.113
Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,002467	0,00238	0,00259	0,00251	0,00256
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	2.736.000	167.800	159.410	151.439	143.867
3	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	9,87	8.375	7.956	7.558	7.180

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Penataan wilayah di Kabupaten Madiun bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan Ruang dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 memuat rencana struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten.

Tabel 2.114
Capaian Urusan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	100	100	100	100	100
2	Jumlah produk hukum pemanfaatan ruang	7	7	1	1	1
3	Luas wilayah produktif (Ha)	42.513,56	42.513,56	42.513,56	507.640,45	507.640,45
4	Luas wilayah industri (Ha)	64,90	64,90	495,97	788,46	788,46
5	Luas wilayah kebanjiran (Ha)	13.345,00	13.345,00	13.345,00	111.06,35	111.060,35
6	Luas wilayah kekeringan (Ha)	31.641,00	31.641,00	31.641,00	111.06,35	111.060,35
7	Luas wilayah perkotaan (Ha)	4.605,82	4.605,82	4.605,82	182.985,64	182.985,64

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, Tahun 2021

2.1.4.2.3 Air Bersih

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%). Kebutuhan air bersih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan seperti tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.115
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Madiun Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	9,23	9,54	9,78	10,38	10,57

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2021

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih selalu naik setiap tahun. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 9,23 % menjadi 10,57% di tahun 2020.

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

2.1.4.1 Proses Perizinan

Salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian nasional adalah melalui peningkatan investasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat mendukung peningkatan ekosistem investasi, penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Implementasi dari peraturan pemerintah dimaksud adalah Perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dalam tiga klaster yaitu :

- a. Kegiatan usaha beresiko rendah;
- b. Kegiatan usaha beresiko menengah atau;
- c. Kegiatan usaha beresiko tinggi

Pada kegiatan usaha beresiko rendah dan menengah pelaku usaha hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar telah dapat melakukan persiapan dan operasional. Sedangkan untuk kegiatan usaha beresiko tinggi dipersyaratkan Nomor Induk Berusaha dan Izin. Hal ini akan semakin memudahkan pelaku berusaha sehingga iklim investasi dapat terjaga dengan baik.

Untuk mendukung pelaksanaan kemudahan berusaha, Kabupaten Madiun telah membangun Mal Pelayanan Publik yang merupakan integrasi pelayanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Madiun, Instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu lokasi. Saat ini terdapat 23 perangkat daerah/ instansi yang tergabung di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun dengan jumlah layanan sebanyak 193 jenis layanan.

2.1.4.2 Kondusifitas Daerah

Iklim investasi pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban pada daerah tersebut, disamping pelayanan perijinan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kondusifitas suatu daerah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun capaian indikator Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat di Tabel 2.102.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Madiun. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Madiun. Gambaran umum kondisi daerah dan aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan di Kabupaten Madiun adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk usia di atas 64 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar

konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan penduduk ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2019 adalah sebesar 44,05, lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 44,12.

Indikator ketenagakerjaan terdiri dari (i) rasio lulusan S1/S2/S3; dan (ii) rasio ketergantungan. Data dan informasi rasio lulusan S1/S2/S3 dimaksud dan rasio ketergantungan, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.116
Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Pekerjaan lulusan S1/S2/S3 (%)	13	16,31	6,61	7,86	7,03
2	<i>Dependency Ratio</i>	42,41	46,34	46,32	46,36	47,35

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Tahun 2021

Data ketenagakerjaan Kabupaten Madiun diukur berdasarkan rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dan *Dependency Ratio*. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dan *dependencyratio* cenderung berfluktuasi. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 tertinggi pada tahun 2016 sebesar 16,31% dan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 6,61%. *Dependency Ratio* paling tinggi di tahun 2020 sebesar 47,35 %, terendah di tahun 2016 sebesar 42,41 %

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 merupakan data dasar dalam penyusunan RKPd Tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut katagori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja atau keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Madiun secara rinci, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.117
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2020
Kabupaten Madiun

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
	Pendidikan			268.837.995,182	241.596.681,430		126.291.106,236		24.792.547,109		19,63		266.389.228,539		13,22	
	Program Pelayanan Kesekretariatan			2.107.773,224	2.107.773,224		-		-		-		2.107.773,224		100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A	75%												
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)		75%													
1.01.1.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	11	1.493.605,674	1.493.605,674		-		-		-		1.493.605,674			
		Presentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100%													
		jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	49													
1.01.1.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang disusun sesuai dengan peraturan	29	579.167,550	579.167,550		-		-		-		579.167,550			
1.01.1.01.01.08.03	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	jumlah tenaga penunjang SKPD yang terpenuhi	5	35.000,000	35.000,000		-		-		-		35.000,000			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	1.240.388,854		-		-		-		1.240.388,854		100,00	
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kebutuhan telepon, lair, dan listrik yang terpenuhi	-	-	110.713,382		-		-		-		110.713,382			
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan Kantor yang terpenuhi	-	-	46.918,850		-		-		-		46.918,850			
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan ATK yang terpenuhi	-	-	302.458,700		-		-		-		302.458,700			
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetak amplop, stop map, dan foto copy yang terpenuhi	-	-	134.240,807		-		-		-		134.240,807			
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	-	-	25.370,000		-		-		-		25.370,000			
1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	-	-	13.860,000		-		-		-		13.860,000			
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan Snack, makan, dan minum rapat/ tamu/ harian yang terpenuhi	-	-	117.002,900		-		-		-		117.002,900			
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kebutuhan perjalanan luar daerah yang terpenuhi	-	-	199.174,215		-		-		-		199.174,215			
1.01.1.01.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kebutuhan perjalanan dalam daerah yang terpenuhi	-	-	47.350,000		-		-		-		47.350,000			
1.01.1.01.01.01.23	Penyediaan Jasa Publikasi	Kebutuhan Jasa Publikasi yang terpenuhi	-	-	48.300,000		-		-		-		48.300,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.01.1.01.01.01.24	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jumlah jasa penunjang kinerja SKPD yang tersedia	-	-	195.000.000	-	-	-	-	-	-	195.000.000	-	-		
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	518.159.520	-	-	-	-	-	-	518.159.520	-	-	100.00	
1.01.1.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor (gudang) yang dibangun	-	-	47.050.000	-	-	-	-	-	-	47.050.000	-	-		
1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor baru yang diadakan	-	-	45.132.000	-	-	-	-	-	-	45.132.000	-	-		
1.01.1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung Kantor yang layak fungsi	-	-	47.626.100	-	-	-	-	-	-	47.626.100	-	-		
1.01.1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang layak fungsi	-	-	105.390.130	-	-	-	-	-	-	105.390.130	-	-		
1.01.1.01.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	persentase mebulair yang layak fungsi	-	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	9.000.000	-	-		
1.01.1.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	persentase alat kantor pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik) yang layak fungsi	-	-	98.800.000	-	-	-	-	-	-	98.800.000	-	-		
1.01.1.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung kantor (aula) yang direhab	-	-	165.161.290	-	-	-	-	-	-	165.161.290	-	-		
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APS PAUD	53.52	2,650,677,120	10,298,540,439	-	-	-	-	-	-	10,298,540,439	-	-	92.58	
		APK PAUD	45.34													
1.01.1.01.01.15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)	jumlah sekolah TK negeri yang mendapatkan layanan BOP PAUD	-	-	185.156.354	-	-	-	-	-	-	185.156.354	-	-		
1.01.1.01.01.15.70	Pendukung Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pendidik PAUD yang mendapat Jasa Mengajar	-	-	6.936.300.000	-	-	-	-	-	-	6.936.300.000	-	-		
1.01.1.01.01.15.87	BOP Madin (Banprop)	jumlah lembaga Madin yang terfasilitasi dalam pengelolaan dana BPDGS	-	-	68.504.450	-	-	-	-	-	-	68.504.450	-	-		
1.01.1.01.01.15.90	Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)	jumlah lembaga PAUD yang sarana prasarannya ditingkatkan	-	-	605.243.000	-	-	-	-	-	-	605.243.000	-	-		
1.01.1.01.01.15.91	Peningkatan Mutu PAUD (DID)	persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	-	-	730.013.700	-	-	-	-	-	-	730.013.700	-	-		
1.01.1.01.01.15.92	Peningkatan Mutu Kelembagaan PAUD (DID)	persentase lembaga PAUD yang sarprasnya memenuhi standar	-	-	1.773.322.935	-	-	-	-	-	-	1.773.322.935	-	-		
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka kelulusan paket A/B/C	100%	753,531,300	1,173,150,750	-	-	-	-	-	-	1,173,150,750	-	-	100.00	
1.01.1.01.01.18.19	Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional Pendidikan Non Formal (Banprop)	jumlah lembaga PKBM dari Kabupaten Madiun yang mengikuti HAI	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-		
1.01.1.01.01.18.25	Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	jumlah lulusan paket A/B/C	218 WB	676.856.000	794.725.000	-	-	-	-	-	-	794.725.000	-	-		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.01.1.01.01.18.27	Penyelenggaraan dan UNPK Paket A, B dan C	jumlah warga belajar yang mengikuti ujian paket yang lulus	-	-	223.267.800	-	-	-	-	-	-	223.267.800	-	-		
1.01.1.01.01.18.29	Peningkatan Mutu Pendidikan Informal	jumlah lembaga informal yang meningkat mutunya	-	-	68.482.650	-	-	-	-	-	-	68.482.650	-	-		
1.01.1.01.01.18.30	BOP Madin (Banprop)	jumlah lembaga Madin yang terfasilitasi dalam pengelolaan dana BPOGS	224 lembaga	76.675.300	76.675.300	-	-	-	-	-	-	76.675.300	-	-		
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	96.92%	20.492.406.350	31.620.126.500	-	-	-	-	-	-	31.620.126.500	-	-		
1.01.1.01.01.20.53	Penilaian Angka Kredit dan Naik Pangkat	jumlah pegawai yang mendapatkan layanan Penilaian Angka Kredit dan Naik Pangkat	-	-	24.412.000	-	-	-	-	-	-	24.412.000	-	-		
1.01.1.01.01.20.56	Insentif daerah PTK Non PNS SD	jumlah guru non PNS SD yang tersedia	-	-	6.265.200.000	-	-	-	-	-	-	6.265.200.000	-	-		
1.01.1.01.01.20.57	Insentif daerah PTK Non PNS SMP	jumlah guru non PNS SMP yang tersedia	-	-	571.400.000	-	-	-	-	-	-	571.400.000	-	-		
1.01.1.01.01.20.58	Insentif daerah PTK Non PNS Tenaga Administrasi	jumlah Tenaga Administrasi Non PNS yang tersedia	-	-	3.835.650.000	-	-	-	-	-	-	3.835.650.000	-	-		
1.01.1.01.01.20.59	Peningkatan Mutu Pendidik (DID)	jumlah pendidik yang lulus PPG	-	-	403.067.000	-	-	-	-	-	-	403.067.000	-	-		
1.01.1.01.01.20.60	Penunjang Kinerja Pendidikan Dasar (Banprop)	jumlah guru Non PNS yang mendukung kinerja pada SD/SMP negeri	-	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	28.000.000	-	-		
1.01.1.01.01.20.67	Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP yang terupdate datanya	3898 orang	10.047.650.000	10.047.650.000	-	-	-	-	-	-	10.047.650.000	-	-		
1.01.1.01.01.20.68	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP yang terlayani administrasi kepegawaiannya	725 orang	17.660.000	17.660.000	-	-	-	-	-	-	17.660.000	-	-		
1.01.1.01.01.20.69	Pembinaan, Pengembangan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP yang meningkat kompetensinya	346 orang	20.996.350	20.987.500	-	-	-	-	-	-	20.987.500	-	-		
1.01.1.01.01.20.70	Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di masa pandemi Covid-19	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP yang terupdate datanya	3898 orang	10.406.100.000	10.406.100.000	-	-	-	-	-	-	10.406.100.000	-	-		
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase lembaga sekolah yang terlayani	-	-	1.074.055.239	-	-	-	-	-	-	1.074.055.239	-	-	100.00	
1.01.1.01.01.22.41	Operasional BOS	jumlah lembaga sekolah yang terlayani dalam pengelolaan dana BOS	-	-	201.883.900	-	-	-	-	-	-	201.883.900	-	-		
1.01.1.01.01.22.46	Pangkalan Data Pendidikan	jumlah lembaga sekolah yang terlayani dalam pengelolaan Data Pokok Pendidikan	-	-	592.393.780	-	-	-	-	-	-	592.393.780	-	-		
1.01.1.01.01.22.52	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Pendidikan (DID)	jumlah peserta penyelenggaraan hari-hari besar Pendidikan	-	-	279.777.559	-	-	-	-	-	-	279.777.559	-	-		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.01.1.01.01.24	Program Pendidikan SD	APS SD	100	18,142,559,904	75,763,961,173		-		-		-		75,763,961,173		100.00	
		APK SD/MI	100													
		APM SD/MI	89.25													
		Angka Kelulusan SD/MI	100													
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	97.35													
		Persentase lembaga SD yang terakreditasi A	6.91%													
1.01.1.01.01.24.100	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SD/MI	Jumlah peserta Ujian Nasional SD/MI	-	-	279,150,256		-		-		-		279,150,256			
1.01.1.01.01.24.133	Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Jenjang SD	Jumlah tenaga guru Ekstrakurikuler wajib pendidikan karakter berbasis keagamaan Jenjang SD	-	-	2,508,000,000		-		-		-		2,508,000,000			
1.01.1.01.01.24.166	Olimpiade Siswa Jenjang SD	jumlah peserta Olimpiade Siswa Jenjang SD	-	-	221,798,500		-		-		-		221,798,500			
1.01.1.01.01.24.167	Peningkatan Mutu SD	jumlah lembaga SD yang meningkat mutunya	-	-	498,182,980		-		-		-		498,182,980			
1.01.1.01.01.24.180	Pembangunan Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK)	jumlah lembaga SD yang dibangun/ direhab/mendapatkan sarana prasarana	-	-	38,541,641,728		-		-		-		38,541,641,728			
1.01.1.01.01.24.181	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan SD (DID)	jumlah lembaga SD yang operasionalnya berjalan dengan baik	-	-	2,539,115,771		-		-		-		2,539,115,771			
1.01.1.01.01.24.182	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana SD	jumlah SD yang dibangun/ direhab sarprasnya	-	-	9,500,000,000		-		-		-		9,500,000,000			
1.01.1.01.01.24.183	Pengadaan Sarana Belajar SD	jumlah sarana belajar SD yang diadakan	-	-	1,499,300,000		-		-		-		1,499,300,000			
1.01.1.01.01.24.184	Pengadaan Sarana Belajar SD (DID)	jumlah sarana belajar SD yang diadakan	-	-	48,479,750		-		-		-		48,479,750			
1.01.1.01.01.24.185	Peningkatan Mutu Peserta Didik SD (DID)	jumlah peserta didik yang berprestasi di tingkat Kabupaten	12	1,811,758,750	1,960,948,750		-		-		-		1,960,948,750			
1.01.1.01.01.24.186	Peningkatan Mutu Kelembagaan SD (DID)	persentase kondisi bangunan SD baik	90.59	15,956,914,522	17,546,586,886		-		-		-		17,546,586,886			
1.01.1.01.01.24.188	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian SD (DID)	jumlah rumusan kebijakan tentang kurikulum yang ditindaklanjuti	2	373,886,632	620,756,552		-		-		-		620,756,552			
1.01.1.01.01.25	Program Pendidikan SMP	APS SMP	100	41,918,331,918	55,609,781,112		-		-		-		55,609,781,112		68.46	
		APK SMP/MTs	100													

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		APM SMP/MTs	73.6													
		Angka Kelulusan SMP	100													
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	87.5													
		Persentase lembaga SMP yang terakreditasi A	60.42%													
1.01.1.01.01.25.11	Operasional PPDB dan PLS	jumlah lembaga SMP yang PPDB dan PLS nya berjalan dengan baik	-	-	130.029.000	-	-	-	-	-	-	-	130.029.000			
1.01.1.01.01.25.12	Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	jumlah lembaga SMP yang terakreditasi	-	-	193.866.450	-	-	-	-	-	-	-	193.866.450			
1.01.1.01.01.25.13	Olimpiade/ Festival/ lomba siswa nasional SMP	jumlah siswa SMP yang berprestasi di tingkat Kabupaten	-	-	682.783.000	-	-	-	-	-	-	-	682.783.000			
1.01.1.01.01.25.95	Penyediaan Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran di SMP Satu Atap	lembaga SMP kecil yang operasionalnya terpenuhi	-	-	5.954.890	-	-	-	-	-	-	-	5.954.890			
1.01.1.01.01.25.138	Ujian Nasional SMP/ MTSN/ Negeri Swasta	jumlah peserta UN SMP/ MTSN/ Negeri Swasta	-	-	94.996.660	-	-	-	-	-	-	-	94.996.660			
1.01.1.01.01.25.173	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Jenjang SMP	Jumlah tenaga pendidik kegiatan Ekstrakurikuler wajib pendidikan karakter berbasis keagamaan Jenjang SMP	-	-	672.750.000	-	-	-	-	-	-	-	672.750.000			
1.01.1.01.01.25.184	Pembangunan Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)	jumlah lembaga SMP yang dibangun/ direhab/mendapatkan sarana prasarana	-	-	16.235.889.500	-	-	-	-	-	-	-	16.235.889.500			
1.01.1.01.01.25.185	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan SMP (DID)	persentase lembaga SMP yang operasionalnya berjalan dengan baik	-	-	1.304.576.612	-	-	-	-	-	-	-	1.304.576.612			
1.01.1.01.01.25.186	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana SMP	jumlah lembaga SMP yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi	-	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000			
1.01.1.01.01.25.187	Pengadaan Sarana Belajar SMP	jumlah lembaga yang memanfaatkan sarana belajar SMP yang diadakan	-	-	8.531.408.000	-	-	-	-	-	-	-	8.531.408.000			
1.01.1.01.01.25.188	Pengadaan Sarana Belajar SMP (DID)	jumlah lembaga SMP yang memanfaatkan sarana belajar SMP yang diadakan	-	-	917.640.000	-	-	-	-	-	-	-	917.640.000			
1.01.1.01.01.25.189	Peningkatan Mutu Peserta Didik SMP (DID)	jumlah peserta didik SMP yang berprestasi	31 orang	852.873.000	1.246.838.450	-	-	-	-	-	-	-	1.246.838.450			
1.01.1.01.01.25.190	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian SMP (DID)	Persentase lembaga SMP yang terakreditasi	100	77.637.350	232.153.550	-	-	-	-	-	-	-	232.153.550			
	Peningkatan Mutu Kelembagaan SMP	persentase kondisi bangunan SMP baik	95.00%	15.360.895.000	15.360.895.000	-	-	-	-	-	-	-	15.360.895.000			
	Program Penguatan Karakter Keagamaan	Rasio tenaga pendidik karakter keagamaan dengan jumlah kelas	1:3	3.886.550.000	3.183.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.183.000.000		81.90	
1.01.1.01.01.26.01	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SD	Rasio tenaga pendidik karakter keagamaan dengan jumlah kelas jenjang SD	1:3	627.000.000	627.000.000	-	-	-	-	-	-	-	627.000.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.01.1.01.01.26.02	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SMP	Rasio tenaga pendidik karakter keagamaan dengan jumlah kelas jenjang SMP	1:3	168.750.000	168.750.000		-		-		-		168.750.000			
1.01.1.01.01.26.03	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SD di masa pandemi Covid-19	Rasio tenaga pendidik karakter keagamaan dengan jumlah kelas jenjang SD	1:3	1.881.000.000	1.881.000.000		-		-		-		1.881.000.000			
1.01.1.01.01.26.04	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SMP di masa pandemi Covid-19	Rasio tenaga pendidik karakter keagamaan dengan jumlah kelas jenjang SMP	1:3	506.250.000	506.250.000		-		-		-		506.250.000			
	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase Operasional sekolah yang terpenuhi	12 bulan	59.007.744,619	59.007.744,619		-		-		-		59.007.744,619		53,11	
1.01.1.01.01.57.23.456	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri di masa pandemi Covid-19	Operasional SD negeri yang terpenuhi	12 bulan	39.594.365,022	19.413.379,597		-		-		-		19.413.379,597			
1.01.1.01.01.58.23.457	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri di masa pandemi Covid-19	Operasional SMP negeri yang terpenuhi	12 bulan	19.413.379,597	39.594.365,022		-		-		-		39.594.365,022			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		2.003.725,604		809,128,109		40,38		809,128,109		58,25	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	-	-	-											
1.01.1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-		440.250,605		134.699,048		30,60		134.699,048			
1.01.1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan peraturan	-	-	-		362.212,605		128.727,410		35,54		128.727,410			
1.01.1.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	-	-	-		78.038,000		5.971,638		7,65		5.971,638			
1.01.1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi Umum yang tersedia	-	-	-		658.285,824		258.501,025		39,27		258.501,025			
1.01.1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	-	-	-		14.997,456		7.433,000		49,56		7.433,000			
1.01.1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	-	-	-		3.858,580		-		-		-			
1.01.1.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	-	-	-		29.853,285		16.871,250		56,51		16.871,250			
1.01.1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	-	-	-		245.630,249		174.896,275		71,20		174.896,275			
1.01.1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	-	-	-		65.605,254		39.627,500		60,40		39.627,500			
1.01.1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	-	-	-		13.860,000		5.775,000		41,67		5.775,000			
1.01.1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	-	-	-		284.481,000		13.898,000		4,89		13.898,000			
		Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	-	-	-											

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.01.1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi	-	-	-		30.646,770		29.370.000		95.83		29.370.000			
1.01.1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Tersedia	-	-	-		30.646,770		29.370.000		95.83		29.370.000			
1.01.1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Tersedia	-	-	-		636.752,160		305.108.797		47.92		305.108.797			
1.01.1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi	-	-	-		155.042,160		45.858.797		29.58		45.858.797			
1.01.1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum yang Tersedia	-	-	-		481.710,000		259.250.000		53.82		259.250.000			
1.01.1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	-	-	-		237.790,245		81.449,239		34.25		81.449,239			
1.01.1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	-	-	-		125.260,905		45.084,239		35.99		45.084,239			
1.01.1.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	-	-	-		5.940,000		-		-		-			
1.01.1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	-	-	-		95.589,340		36.365,000		38.04		36.365,000			
1.01.1.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara	-	-	-		11.000,000		-		-		-			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	-	-	-		121,424,420,632		23,174,425,000		19.09		23,174,425,000			
		APS SD	-	-	-											
		Persentase lembaga SD terakreditasi A	-	-	-											
		APS SMP	-	-	-											
		Persentase lembaga SMP terakreditasi A	-	-	-											
		APS PAUD	-	-	-											
1.01.1.01.01.15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	-	-	-		73.221,865,632		20.291,000,000		27.71		20.291,000,000			
		APM SD	-	-	-											
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	-	-	-											
		Presentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	-	-	-											
		Presentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	-	-	-											

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Presentase bangunan SD kondisi baik	-	-	-											
1.01.1.01.01.15.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	-	-	-	4.635.000.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Prestasi Peserta didik SD di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional	-	-	-	50.000.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang tersedia	-	-	-	9.268.500.000	5.283.350.000		57.00			5.283.350.000				
1.01.1.01.01.15.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK jenjang SD yang dikembangkan karirnya	-	-	-	35.000.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Operasional SD yang terpenuhi	-	-	-	27.878.440.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah lembaga SD ditingkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS nya	-	-	-	37.500.000	7.650.000		20.40			7.650.000				
1.01.1.01.01.15.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Tersedia	-	-	-	780.000.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan yang tersedia	-	-	-	1.220.851.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang tersedia	-	-	-	4.489.317.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang tersedia	-	-	-	5.576.846.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang terpelihara	-	-	-	2.721.891.132			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terpelihara	-	-	-	411.520.500			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang terpelihara	-	-	-	640.000.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terpelihara	-	-	-	45.000.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	-	-	-	432.000.000			-	-			-			
1.01.1.01.01.15.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Lembaga Sekolah yang mendapatkan bantuan sarpras	-	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000		100.00			15.000.000.000				
1.01.1.01.01.16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	-	-	-	37.981.555.000	965.650.000		2.54			965.650.000				
		APM SMP/MTs	-	-	-											
		Presentase bangunan SMP kondisi baik	-	-	-											
		Presentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	-	-	-											

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Presentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	-	-	-											
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	-	-											
1.01.1.01.01.16.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sekolah Jumlah sarana, prasarana dan utilitas SMP yang dibangun	-	-	-	420.000.000										
1.01.1.01.01.16.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	-	-	-	8.929.306.600										
1.01.1.01.01.16.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru SMP yang direhab	-	-	-	1.319.631.800										
1.01.1.01.01.16.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS SMP yang direhab	-	-	-	240.592.200										
1.01.1.01.01.16.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SMP yang direhab	-	-	-	674.431.000										
1.01.1.01.01.16.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium SMP yang direhab	-	-	-	4.829.917.600										
1.01.1.01.01.16.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP yang direhab	-	-	-	1.588.011.800										
1.01.1.01.01.16.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa baru yang tersedia	-	-	-	1.425.960.000										
1.01.1.01.01.16.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka kelulusan SMP	-	-	-	60.000.000										
1.01.1.01.01.16.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Prestasi Peserta didik SMP di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional	-	-	-	160.000.000										
1.01.1.01.01.16.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK jenjang SMP	-	-	-	1.605.000.000	965.650.000		60.17		965.650.000					
1.01.1.01.01.16.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK jenjang SMP yang meningkat karirnya	-	-	-	49.000.000										
1.01.1.01.01.16.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Operasional SMP yang terpenuhi	-	-	-	16.667.704.000										
1.01.1.01.01.16.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga SMP ditingkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS nya	-	-	-	12.000.000										
1.01.1.01.01.17	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Presentase lembaga PAUD yang terakreditasi	-	-	-	8.770.600.000	1.882.800.000		21.47		1.882.800.000					
		Presentase bangunan PAUD kondisi baik	-	-	-											
		APK PAUD	-	-	-											
1.01.1.01.01.17.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	-	-	-	275.425.000										
1.01.1.01.01.17.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	-	-	-	255.937.500										

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.01.1.01.01.17.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	-	-	-		711.422.775		-		-		-			
1.01.1.01.01.17.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhab	-	-	-		188.259.500		-		-		-			
1.01.1.01.01.17.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD baru yang tersedia	-	-	-		50.000.000		-		-		-			
1.01.1.01.01.17.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD baru yang tersedia	-	-	-		350.955.225		-		-		-			
1.01.1.01.01.17.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD	-	-	-		100.000.000		-		-		-			
1.01.1.01.01.17.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah peserta didik PAUD	-	-	-		6.594.000.000	1.882.800.000		28.55		1.882.800.000				
1.01.1.01.01.17.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah PTK PAUD yang meningkat karirnya	-	-	-		30.000.000		-		-		-			
1.01.1.01.01.17.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Operasional PAUD yang terpenuhi	-	-	-		216.600.000		-		-		-			
1.01.1.01.01.18	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Kelulusan Paket A/B/C	-	-	-		1.450.400.000	34.975.000		2.41		34.975.000				
		Presentase PKBM yang terakreditasi	-	-	-											
		Presentase Lembaga PKBM yang difasilitasi	-	-	-											
		Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas	-	-	-											
1.01.1.01.01.18.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah perlengkapan PNF baru yang tersedia	-	-	-		420.000.000		-		-		-			
1.01.1.01.01.18.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik PNF yang terlayani	-	-	-		510.000.000	34.975.000		6.86		34.975.000				
1.01.1.01.01.18.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK PNF yang tersedia	-	-	-		410.400.000		-		-		-			
1.01.1.01.01.18.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK PNF yang meningkat karirnya	-	-	-		10.000.000		-		-		-			
1.01.1.01.01.18.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga PNF yang dibina	-	-	-		100.000.000		-		-		-			
	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah dokumen kurikulum SD yang tersusun	-	-	-		175.000.000		-		-		-			
		jumlah dokumen kurikulum PAUD yang tersusun	-	-	-											
1.01.1.01.01.19	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD yang tersusun	-	-	-		150.000.000		-		-		-			
1.01.1.01.01.19.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan lokal SD yang tersusun	-	-	-		34.535.687		-		-		-			
1.01.1.01.01.19.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal SD yang tersusun	-	-	-		34.535.803		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.01.1.01.01.19.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal SD yang tersedia	-	-	-	-	61.362.840	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.19.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum Muatan Lokal SD yang tersusun	-	-	-	-	19.565.670	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.20	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal PAUD yang tersusun	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.20.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar PAUD yang disusun	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.20.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal PAUD yang disusun	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.20.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal PAUD yang tersedia	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi	-	-	-	-	2.687.960,00	808.994,000	30,10	808.994,000						
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	-	-	-	-										
1.01.1.01.01.21	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio guru murid SD/MI	-	-	-	-	2.687.960,000	808.994,000	30,10	808.994,000						
		Rasio Guru murid SMP/MTs	-	-	-	-										
		Rasio Guru murid PAUD	-	-	-	-										
		Rasio Tutor PNF dengan peserta PNF/Kesetaraan	-	-	-	-										
1.01.1.01.01.21.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.21.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Penataan dan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	2.678.960,000	808.994,000	30,20	808.994,000						
	Kesehatan			260.695,181,081	499.375,750,441		334,714,879,710	27,123,528,226	8,10	526,499,278,667				35,24		
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	3,621,823,646	1,254,931,812		-	-	-	1,254,931,812						Dinas Kesehatan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80%													
1.02.1.02.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 kegiatan		1,183,659,312		-	-	-	1,183,659,312						
		Prosentase Peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100%													
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	13 orang													
		Jumlah tenaga Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) pada RSUD	8 orang													

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	9		33.397,500		-		-		-		33.397,500			
1.02.1.02.01.01.08.03	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	w Normal) Jumlah dukungan pembiayaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19	-		37.875,000		-		-		-		37.875,000			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	1.205.405,022		-		-		-		1.205.405,022			
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase kebutuhan surat menyurat terpenuhi	-	-	2.905,500		-		-		-		2.905,500			
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase kebutuhan operasional jasa telepon, air, listrik dan internet terpenuhi	-	-	361.281,947		-		-		-		361.281,947			
1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase kebutuhan tenaga kebersihan terpenuhi	-	-	119.780,500		-		-		-		119.780,500			
		Persentase alat kebersihan dan bahan pembersih terpenuhi	-	-												
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase kebutuhan ATK yang terpenuhi	-	-	70.299,280		-		-		-		70.299,280			
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan terpenuhi	-	-	17.696,250		-		-		-		17.696,250			
		Persentase kebutuhan penggandaan terpenuhi	-	-												
1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-	-	-		-		-		-					
1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat yang terpenuhi	-	-	34.426,000		-		-		-		34.426,000			
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat yang terpenuhi	-	-	118.163,745		-		-		-		118.163,745			
1.02.1.02.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Persentase kebutuhan perjalanan dalam daerah terpenuhi	-	-	41.340,000		-		-		-		41.340,000			
1.02.1.02.01.01.24	Penyediaan Jasa Publikasi	Persentase ketersediaan jasa publikasi yang terpenuhi	-	-	13.750,000		-		-		-		13.750,000			
1.02.1.02.01.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan	Persentase jasa pengamanan yang terpenuhi	-	-	102.011,800		-		-		-		102.011,800			
1.02.1.02.01.01.28	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Persentase jasa penunjang kinerja SKPD yang terpenuhi	-	-	323.750,000		-		-		-		323.750,000			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	-	-	276.130,981		-		-		-		276.130,981			
1.02.1.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Persentase peralatan kantor yang terpenuhi	-	-	14.250,000		-		-		-		14.250,000			
1.02.1.02.01.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase peralatan kantor yang terpenuhi	-	-	18.474,382		-		-		-		18.474,382			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
02.22																
1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/ operasional yang berfungsi baik	-	-	147,545,599	-	-	-	-	-	-	-	147,545,599			
1.02.1.02.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Persentase meubelair dalam kondisi baik	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000			
1.02.1.02.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	Persentase Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik) yang berfungsi baik	-	-	89,861,000	-	-	-	-	-	-	-	89,861,000			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	-	-	12,900,000	-	-	-	-	-	-	-	12,900,000			
1.02.1.02.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan oleh karyawan Dinas Kesehatan	-	-	12,900,000	-	-	-	-	-	-	-	12,900,000			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-	120,669,950	-	-	-	-	-	-	-	120,669,950			
1.02.1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-	-	8,205,700	-	-	-	-	-	-	-	8,205,700			
		Persentase capaian SPM masing-masing indikator 100%	-	-		-	-	-	-	-	-	-				
1.02.1.02.01.06.05	Penyusunan Pelaporan Kinerja Kepegawaian	Persentase ketersediaan Data Kepegawaian	-	-	3,129,750	-	-	-	-	-	-	-	3,129,750			
1.02.1.02.01.06.06	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase ketersediaan data kesehatan yang valid dan cepat	-	-	98,034,500	-	-	-	-	-	-	-	98,034,500			
1.02.1.02.01.06.07	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen anggaran dan pelaporan keuangan	-	-	11,300,000	-	-	-	-	-	-	-	11,300,000			
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	0	11,382,292,451	8,057,216,021								8,057,216,021			
		Angka Kematian Bayi	0	-	-								-			
		Prevalensi Balita Stunting	20.3	-	-								-			
1.02.1.02.01.16.54	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Persentase persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan pelayanan kesehatan yang dibiayai jampersal			1,893,528,503	-	-	-	-	-	-	-	1,893,528,503			
1.02.1.02.01.16.72	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (Pajak Rokok)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			168,948,641	-	-	-	-	-	-	-	168,948,641			
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar														
		Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas I) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Persentase anak usia pendidikan lanjutan pertama (Kelas 7) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Persentase anak usia pendidikan lanjut tingkat atas (Kelas 9) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja sesuai standart														
		Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
1.02.1.02.01.16.74	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal (Pajak Rokok)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar			255.861.400		-		-				255.861.400			
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar														
1.02.1.02.01.16.80	Pelayanan dan Intervensi Masalah Kekurangan Zat Gizi Mikro dan Makro (Pajak Rokok)	Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)			121.463.259		-		-				121.463.259			
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)														
		Cakupan Ibu nifas mendapat Vitamin A (%)														
		Cakupan ibu hamil mendapat Fe 3 (%)														
		Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)														
		Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium (%)														
		Cakupan Balita ditimbang di Posyandu (D/S) (%)														
		Cakupan Balita Naik berat badan di Posyandu (N/D) (%)														
		Cakupan Keluarga berperilaku Sadar Gizi (kadarzi) (%)														
		Cakupan kecamatan bebas rawan gizi (%)														
1.02.1.02.01.16.82	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Pajak Rokok)	Cakupan keluarga yang memiliki akses air minum berkualitas			947.035.656		-		-				947.035.656			
		Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan														
		Cakupan desa yang melaksanakan program STBM														
		Cakupan keluarga yang menggunakan jamban sehat														
		Cakupan TPM yang memenuhi syarat														
		Cakupan TTU yang memenuhi syarat														
		cakupan fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah sesuai peraturan														

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Cakupan kecamatan yang melaksanakan program kab/kota sehat														
		Cakupan desa yang melaksanakan program kab/kota sehat														
1.02.1.02.01.16.85	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (pajak Rokok)	Cakupan Rumah Tangga Sehat ber PHBS			498.989.900		-		-		-		498.989.900			
		Cakupan Desa Siaga Aktif														
		Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri														
1.02.1.02.01.16.86	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Cakupan puskesmas yang terbentuk pos UKK			58.455.600		-		-		-		58.455.600			
		Cakupan calon jemaah haji yang diperiksa kebugarannya														
		Cakupan Anak Sekolah (SD kelas 4-6 yang berusia 10-12 tahun) yang dilakukan														
1.02.1.02.01.16.87	Penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan 2019)	Prosentase obat gizi yang tersedia			480.943.616		-		-		-		480.943.616			
1.02.1.02.01.16.89	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan			2.681.378.246		-		-		-		2.681.378.246			
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)														
		Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat														
		Cakupan kecamatan yang melaksanakan program kab/kota sehat														
		Cakupan rumah tangga yang mengelola limbah padat														
		Cakupan Desa yang melaksanakan program kab/kota sehat														
1.02.1.02.01.16.91	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Cakupan Ibu nifas mendapat Vitamin A			1.250.000		-		-		-		1.250.000			
		Cakupan ibu hamil mendapat Fe 3														
		Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A														
1.02.1.02.01.16.96	Pengembangan Taman Posyandu (Banprop)	Cakupan Taman Posyandu Optimal			57.424.700		-		-		-		57.424.700			
1.02.1.02.01.16.97	Pendampingan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) - (Banprop)	Jumlah Poskestren yang dilakukan pendampingan			107.462.500		-		-		-		107.462.500			
1.02.1.02.01.16.98	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar			3.494.800		-		-		-		3.494.800			
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar														
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru														

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		lahir														
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar														
		Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas I) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Persentase anak usia pendidikan lanjutan pertama (Kelas 7) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Persentase anak usia pendidikan lanjut tingkat atas (Kelas 10) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja sesuai standart														
		Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
1.02.1.02.01.16.99	Peningkatan Pelayanan dan Intervensi Gizi Masyarakat	Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif			11.652.600		-	-					11.652.600			
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan														
		Cakupan Balita ditimbang di Posyandu (D/S)														
		Cakupan Balita Naik berat badan di Posyandu (N/D)														
		Cakupan Keluarga berperilaku Sadar Gizi (kadarzi)														
		Cakupan kecamatan bebas rawan gizi														
1.02.1.02.01.16.105	Jaminan Persalinan (Jampersal) (Penanganan COVID-19)	Persentase persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan pelayanan kesehatan yang dibiayai jampersal pada masa pandemi Covid-19			22.082.000		-	-					22.082.000			
1.02.1.02.01.16.108	Peningkatan Pelayanan Kesehatan keluarga di masa pandemi Covid-19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar			747.244.600		-	-					747.244.600			
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar														
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir														
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar														
		Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas I) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas I) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Persentase anak usia pendidikan lanjut tingkat atas (Kelas 9) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja sesuai standart														
		Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.40	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)(%)		-	21,555,184,385		-		-		-		21,555,184,385			
		Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif (%)		-			-		-		-					
		Cakupan rumah yang memenuhi sanitasi dasar (%)		-			-		-		-					
1.02.1.02.01.40.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Persentase kasus DBD yang ditindak lanjuti sesuai kriteria			110,455,000		-		-		-		110,455,000			
1.02.1.02.01.40.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			43,100,000		-		-		-		43,100,000			
1.02.1.02.01.40.06	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Vektor dan Zoonotik (Pajak Rokok)	Angka kesakitan Demam Berdarah per 100.000 penduduk			834,414,800		-		-		-		834,414,800			
		Persentase Angka Bebas Jentik					-		-		-					
		Persentase pelayanan Penderita Malaria sesuai standar					-		-		-					
1.02.1.02.01.40.07	Upaya Promotif dan Preventif untuk Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (Pajak Rokok)	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			708,010,500		-		-		-		708,010,500			
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar					-		-		-					
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					-		-		-					
		Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (%)					-		-		-					
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					-		-		-					
1.02.1.02.01.40.09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi			12,775,000		-		-		-		12,775,000			
1.02.1.02.01.40.12	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Cakupan penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan			800,000		-		-		-		800,000			
		Cakupan penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan					-		-		-					
		Cakupan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan					-		-		-					
		Cakupan penderita gangguan jiwa (ODGJ)berat mendapatkan pelayanan kesehatan					-		-		-					
		Persentase Kasus Pasung yang ditangani					-		-		-					
		Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara					-		-		-					

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12		
1.02.1.02.01.40.13	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK Penugasan 2019)	Persentase bahan pemeriksaan HIV yang tersedia			33.792,015		-		-		-		33.792,015					
1.02.1.02.01.40.14	Pengadaan cryo therapy dan posbindu kit (DAK Penugasan 2019)	Jumlah kesediaan alat cryo therapy pada puskesmas di Kab Madiun yang diadakan			932.065,659		-		-		-		932.065,659					
		Jumlah kesediaan posbindu kit pada desa di Kab Madiun yang diadakan																
1.02.1.02.01.40.16	Peningkatan imunisasi	Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi			8.700,000		-		-		-		8.700,000					
1.02.1.02.01.01.22	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pelayanan penderita penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	100%	2.708,614,203	9.435,535,705		-		-		-		9.435,535,705					
		Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	100%	-														
1.02.1.02.01.01.22.12	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Cakupan penduduk usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan			3.560,000		-		-		-		3.560,000					
		Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan																
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																
		Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara																
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar																
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar																
1.02.1.02.01.01.22.16		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Persentase penderita TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar			517.202,500		-		-		-		517.202,500				
			Angka keberhasilan pengobatan kasus TBC (Success Rate)															
			Persentase penderita kusta mendapatkan pelayanan sesuai standar															
			Persentase penderita HIV mendapatkan pengobatan sesuai standar															
	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar																	
	Persentase penderita diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standar																	
	Persentase penderita pnemonia balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar																	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Angka Kesakitan Demam Berdarah per 100.000 penduduk														
		Persentase kasus DBD yang ditindak lanjuti sesuai kriteria														
		Persentase Angka Bebas Jentik														
		Persentase pelayanan Penderita Malaria sesuai standar														
1.02.1.02.01.01.22.18	Peningkatan Imunisasi, Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			18.838.000		-		-		-		18.838.000			
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap														
		Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta														
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi < 24 jam														
		Persentase ketepatan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)														
		Persentase kelengkapan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)														
		Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate non polio														
		Persentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji														
1.02.1.02.01.01.22.23	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-			2.278.758.725		-		-		-		2.278.758.725			
1.02.1.02.01.01.22.24	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penanganan COVID-19) (DAK PENERANGAN)	Jumlah cartridge TCM yang diadakan			971.128.725		-		-		-		971.128.725			
1.02.1.02.01.01.22.25	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di masa pandemi Covid-19	Persentase penderita TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar			153.144.500		-		-		-		153.144.500			
		Angka keberhasilan pengobatan kasus TBC (Success Rate)														
		Persentase penderita kusta mendapatkan pelayanan sesuai standar														
		Persentase penderita HIV mendapatkan pengobatan sesuai standar														
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar														
		Persentase penderita diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standar														
		Persentase penderita pnemonia balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar														

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Angka Kesakitan Demam Berdarah per 100.000 penduduk														
		Persentase kasus DBD yang ditindak lanjuti sesuai kriteria														
		Persentase Angka Bebas Jentik														
		Persentase pelayanan Penderita Malaria sesuai standar														
1.02.1.02.01.01.22.26	Peningkatan Surveillance, Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Covid-19	Persentase pemenuhan bahan habis pakai dalam rangka percepatan penanganan Covid19			5.492.903,255		-		-		-		5.492.903,255			
		Persentase pemenuhan kebutuhan sprayer dalam rangka percepatan penanganan Covid - 19														
		Persentase pemenuhan kebutuhan sprayer dalam rangka percepatan penanganan Covid - 19														
1.02.1.02.01.39	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	4,478,765,022	17,230,212,157		-		-		-		17,230,212,157			
		Persentase sarana kesehatan yang memenuhi komitmen	100%	-												
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	-												
		Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	100%	-												
1.02.1.02.01.39.04	Distribusi Obat dan E-Logistik	Persentase pemenuhan kebutuhan sprayer dalam rangka percepatan penanganan Covid - 19			153,693,490		-		-		-		153,693,490			
		Cakupan penggunaan Aplikasi E-Logistik obat di GFK sesuai ketentuan														
1.02.1.02.01.39.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana peningkatan mutu, pengelolaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan yang terpenuhi			52,937,500		-		-		-		52,937,500			
1.02.1.02.01.39.07	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pajak Rokok)	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan			311,846,500		-		-		-		311,846,500			
1.02.1.02.01.39.19	Pengadaan Obat, Perbekalan Farmasi dan Sarana Kefarmasian (DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian)	Persentase puskesmas dengan ketersediaan Obat dan dan Perbekalan Kesehatan sesuai standart			2,911,544,887		-		-		-		2,911,544,887			
1.02.1.02.01.39.21	Penunjang DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian	Persentase Kegiatan DAK berjalan dengan lancar			82,661,700		-		-		-		82,661,700			
1.02.1.02.01.39.24	Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (pajak Rokok)	Persentase Produk Alkes dan PKRT dengan Kualitas Sesuai Standar Kesehatan			1,770,886,366		-		-		-		1,770,886,366			
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan alat kesehatan memenuhi standar kesehatan														

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Persentase RS ketersediaan alat kesehatan memenuhi standar kesehatan														
1.02.1.02.01.39.25	Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi Tenaga, Sarana Kesehatan Dan Penunjang	Persentase sarana kesehatan dan penunjang yang memiliki rekomendasi/pemenuhan komitmen ijin operasional			64.280.000		-		-		-		64.280.000			
		Jumlah tenaga fungsional kesehatan yang memiliki surat ijin praktek (SIP)/ surat ijin kerja (SIK)														
		Jumlah tenaga kesehatan yang naik jenjang jabatan														
		Persentase ketersediaan dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional yang terpenuhi														
1.02.1.02.01.39.26	Pembinaan Tenaga, Sarana Kesehatan Dan Penunjang	Persentase sarana kesehatan memenuhi standar			29.980.000		-		-		-		29.980.000			
1.02.1.02.01.39.28	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Obat dan Makanan (Pajak Rokok)	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar			201.478.000		-		-		-		201.478.000			
		Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar														
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas														
		Persentase sarana kefarmasian (IFK, Apotek, RS dan Klinik) yang melaporkan penggunaan obat golongan Narkotika dan Psikotropika melalui aplikasi SIPNAP														
		Persentase sarana kefarmasian (IFK, Apotek, RS dan Klinik) yang melaporkan penggunaan obat golongan Narkotika dan Psikotropika melalui aplikasi SIPNAP														
		Jumlah Desa yang telah disosialisasi GEMA CERMAT														
1.02.1.02.01.39.30	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sarana Kesehatan	Persentase sarana kesehatan dan penunjang yang memiliki rekomendasi/pemenuhan komitmen ijin operasional			54.624.000		-		-		-		54.624.000			
		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki dokumen pemetaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dan perencanaan kebutuhan														
		Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi														
		Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktek / surat ijin kerja														
		Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan														
		Jumlah tenaga kesehatan yang dinilai angka kreditnya														
		Jumlah dokter yang melaksanakan program internsip dapa Puskesmas dan Rumah Sakit														

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.39.32	Pengadaan Obat Perbekalan Farmasi dan Sarana Kefarmasian (Penanganan COVID-19) (DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian)	Persentase puskesmas dengan ketersediaan Obat dan dan Perbekalan Kesehatan sesuai standart			2.482.150.659		-		-		-		2.482.150.659			
1.02.1.02.01.39.33	Distribusi Obat dan E-Logistik (Penanganan COVID-19)	Jumlah pelaksanaan Distribusi Obat pada puskesmas Berjalan Lancar			46.387.400		-		-		-		46.387.400			
		Cakupan penggunaan Aplikasi E-Logistik obat di GFK sesuai ketentuan														
1.02.1.02.01.39.34	Pengadaan Obat Perbekalan Farmasi dan Sarana Kefarmasian (SILPA DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian 2019)	Persentase pemenuhan kebutuhan obat COVID-19			54.262.000		-		-		-		54.262.000			
1.02.1.02.01.39.35	Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Persentase Produk Alkes dan PKRT dengan Kualitas Sesuai Standar Kesehatan			490.012.000		-		-		-		490.012.000			
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan alat kesehatan memenuhi standar kesehatan														
		Persentase RS ketersediaan alat kesehatan memenuhi standar kesehatan														
1.02.1.02.01.39.36	Pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19	Persentase pemenuhan kebutuhan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19			8.523.467.655		-		-		-		8.523.467.655			
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas	100%	13,054,024,260	13,951,608,903		-		-		-		13,951,608,903			
1.02.1.02.01.25.24	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (DAK Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar)	Persentase pemenuhan sarana, prasarana & peralatan puskesmas yang diadakan			4.809.372.684		-		-		-		4.809.372.684			
1.02.1.02.01.25.26	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar)	Persentase Kegiatan DAK berjalan dengan lancar			406.470.500		-		-		-		406.470.500			
1.02.1.02.01.25.33	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DID)	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun			8.376.815.740		-		-		-		8.376.815.740			
1.02.1.02.01.25.34	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (SILPA DAK 2018)	-			358.949.979		-		-		-		358.949.979			
1.02.1.02.01.42	Program Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Persentase kegiatan bantuan operasional kesehatan pada puskesmas	100%	19,462,613,880	24,933,097,022		-		-		-		24,933,097,022			
1.02.1.02.01.42.27	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kebonsari (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kebonsari (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			583.004.902		-		-		-		583.004.902			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.42.28	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Gantrung (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gantrung (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			378.517.900		-		-		-		378.517.900			
1.02.1.02.01.42.29	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Geger (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Geger (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			626.208.943		-		-		-		626.208.943			
1.02.1.02.01.42.30	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kaibon (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kaibon (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			679.688.303		-		-		-		679.688.303			
1.02.1.02.01.42.31	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Bangunsari (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bangunsari (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			592.712.075		-		-		-		592.712.075			
1.02.1.02.01.42.32	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mililir (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Mililir (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			508.611.363		-		-		-		508.611.363			
1.02.1.02.01.42.33	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Dagangan (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Dagangan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			815.085.199		-		-		-		815.085.199			
1.02.1.02.01.42.34	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Jetis (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jetis (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			583.991.232		-		-		-		583.991.232			
1.02.1.02.01.42.35	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Wungu (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wungu (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			693.832.420		-		-		-		693.832.420			
1.02.1.02.01.42.36	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mojopurno (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Mojopurno (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			506.303.165		-		-		-		506.303.165			
1.02.1.02.01.42.37	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kare (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kare (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			830.000.000		-		-		-		830.000.000			
1.02.1.02.01.42.38	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Gemarang (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gemarang (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			806.929.425		-		-		-		806.929.425			
1.02.1.02.01.42.39	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Saradan (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Saradan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			887.901.575		-		-		-		887.901.575			
1.02.1.02.01.42.40	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Sumbersari (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sumbersari (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			760.030.300		-		-		-		760.030.300			
1.02.1.02.01.42.41	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Piliangkeng (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Piliangkeng (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			732.643.400		-		-		-		732.643.400			
1.02.1.02.01.42.42	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Krebet (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Krebet (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			633.100.150		-		-		-		633.100.150			
1.02.1.02.01.42.43	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mejayan (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Mejayan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			835.704.185		-		-		-		835.704.185			
1.02.1.02.01.42.44	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Klecorejo (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klecorejo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			521.278.850		-		-		-		521.278.850			
1.02.1.02.01.42.45	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Wonoasri (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wonoasri (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			569.609.825		-		-		-		569.609.825			
1.02.1.02.01.42.46	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Balerejo (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balerejo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			712.778.750		-		-		-		712.778.750			
1.02.1.02.01.42.47	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Simo (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Simo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			363.208.550		-		-		-		363.208.550			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.42.48	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Madiun (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Madiun (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			337.471,495		-		-		-		337.471,495			
1.02.1.02.01.42.49	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Dimong (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Dimong (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			271.288,680		-		-		-		271.288,680			
1.02.1.02.01.42.50	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Sawahan (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sawahan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			434.497,050		-		-		-		434.497,050			
1.02.1.02.01.42.51	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Jiwan (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jiwan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			664.626,960		-		-		-		664.626,960			
1.02.1.02.01.42.52	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Klagen Serut (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klagen Serut (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			586.319,100		-		-		-		586.319,100			
1.02.1.02.01.42.53	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK Non Fisik)	Persentase Kegiatan Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Berjalan Lancar			578.566,243		-		-		-		578.566,243			
1.02.1.02.01.42.54	Bantuan Operasional Kegiatan UKM Kabupaten	Persentase Kegiatan BOK UKM Kabupaten (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			1.179.614,240		-		-		-		1.179.614,240			
1.02.1.02.01.42.55	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kebonsari (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kebonsari (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			124.486,100		-		-		-		124.486,100			
1.02.1.02.01.42.56	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Gantrung (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gantrung (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			252.597,100		-		-		-		252.597,100			
1.02.1.02.01.42.57	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Geger (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Geger (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			230.177,100		-		-		-		230.177,100			
1.02.1.02.01.42.58	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kaibon (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kaibon (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			293.942,450		-		-		-		293.942,450			
1.02.1.02.01.42.59	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Bangunsari (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bangunsari (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			138.339,300		-		-		-		138.339,300			
1.02.1.02.01.42.60	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mililir (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Mililir (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			246.419,100		-		-		-		246.419,100			
1.02.1.02.01.42.61	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Dagangan (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Dagangan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			364.518,307		-		-		-		364.518,307			
1.02.1.02.01.42.62	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Jetis (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jetis (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			231.648,540		-		-		-		231.648,540			
1.02.1.02.01.42.63	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Wungu (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wungu (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			271.343,100		-		-		-		271.343,100			
1.02.1.02.01.42.64	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mojopurno (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Mojopurno (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			194.839,850		-		-		-		194.839,850			
1.02.1.02.01.42.65	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kare (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kare (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			373.807,700		-		-		-		373.807,700			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.01.42.66	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Gemarang (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gemarang (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			322.307.300		-		-		-		322.307.300			
1.02.1.02.01.01.42.67	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Saradan (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Saradan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			418.849.600		-		-		-		418.849.600			
1.02.1.02.01.01.42.68	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Sumber Sari (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sumber Sari (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			308.620.000		-		-		-		308.620.000			
1.02.1.02.01.01.42.69	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Pilangkenceng (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pilangkenceng (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			361.881.775		-		-		-		361.881.775			
1.02.1.02.01.01.42.70	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Krebet (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Krebet (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			275.303.500		-		-		-		275.303.500			
1.02.1.02.01.01.42.71	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Mejayan (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Mejayan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			407.419.980		-		-		-		407.419.980			
1.02.1.02.01.01.42.72	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Klecorejo (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klecorejo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			110.132.500		-		-		-		110.132.500			
1.02.1.02.01.01.42.73	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Wonoasri (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wonoasri (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			178.202.480		-		-		-		178.202.480			
1.02.1.02.01.01.42.74	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Balerejo (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balerejo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			436.553.500		-		-		-		436.553.500			
1.02.1.02.01.01.42.75	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Simo (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Simo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			291.412.050		-		-		-		291.412.050			
1.02.1.02.01.01.42.76	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Madiun (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Madiun (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			176.633.400		-		-		-		176.633.400			
1.02.1.02.01.01.42.77	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Dimong (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Dimong (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			161.400.450		-		-		-		161.400.450			
1.02.1.02.01.01.42.78	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Sawahan (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sawahan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			119.630.090		-		-		-		119.630.090			
1.02.1.02.01.01.42.79	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Jiwan (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jiwan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			248.831.150		-		-		-		248.831.150			
1.02.1.02.01.01.42.80	Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Klagen Serut (DAK Non Fisik) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klagen Serut (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			221.547.100		-		-		-		221.547.100			
1.02.1.02.01.01.42.81	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK NON FISIK) (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Berjalan Lancar			5.520.900		-		-		-		5.520.900			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.01.42.82	Bantuan Operasional Kegiatan UKM Kabupaten (Penanganan COVID-19)	Persentase Kegiatan BOK UKM Kabupaten (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar			493.208.320		-		-		-		493.208.320			
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Cukai)	Persentase puskesmas yang melayani sesuai SPM	100%	7.198.977.826	8.982.149.093		-		-		-		8.982.149.093			
	Program Penyelenggaraan BLUD Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas BLUD		28.678.635.476	55.876.237.458		-		-		-		55.876.237.458			
1.02.1.02.01.34	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan masyarakat umum yang mendapat pelayanan kesehatan	100%	386.594.892	348.910.379		-		-		-		348.910.379			
1.02.1.02.01.34.06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pada Puskesmas Milir	Cakupan masyarakat umum pada Puskesmas Milir yang mendapat pelayanan kesehatan			48.409.500		-		-		-		48.409.500			
1.02.1.02.01.34.08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pada Puskesmas Jetis	Cakupan masyarakat umum pada Puskesmas Jetis yang mendapat pelayanan kesehatan			58.481.474		-		-		-		58.481.474			
1.02.1.02.01.34.22	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pada Puskesmas Madiun	Cakupan masyarakat umum pada Puskesmas Madiun yang mendapat pelayanan kesehatan			40.342.861		-		-		-		40.342.861			
1.02.1.02.01.34.23	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pada Puskesmas Dimong	Cakupan masyarakat umum pada Puskesmas Dimong yang mendapat pelayanan kesehatan			54.833.000		-		-		-		54.833.000			
1.02.1.02.01.34.24	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pada Puskesmas Sawahan	Cakupan masyarakat umum pada Puskesmas Sawahan yang mendapat pelayanan kesehatan			63.316.436		-		-		-		63.316.436			
1.02.1.02.01.34.26	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pada Puskesmas Klagenserut	Cakupan masyarakat umum pada Puskesmas Klagenserut yang mendapat pelayanan kesehatan			83.527.108		-		-		-		83.527.108			
1.02.1.02.01.35	Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan masyarakat peserta jaminan kesehatan nasional pada FKTP yang mendapat pelayanan kesehatan (Kapitasi)	100%	3.844.427.886	3.090.383.488		-		-		-		3.090.383.488			
1.02.1.02.01.35.06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milir (Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milir yang mendapat pelayanan kesehatan (Kapitasi)			322.326.624		-		-		-		322.326.624			
1.02.1.02.01.35.08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Jetis (Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Jetis yang mendapat pelayanan kesehatan (Kapitasi)			587.589.264		-		-		-		587.589.264			
1.02.1.02.01.35.22	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Madiun (Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Madiun yang mendapat pelayanan kesehatan (Kapitasi)			471.789.516		-		-		-		471.789.516			
1.02.1.02.01.35.23	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Dimong (Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Dimong yang mendapat pelayanan kesehatan (Kapitasi)			366.242.324		-		-		-		366.242.324			
1.02.1.02.01.35.24	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Sawahan (Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Sawahan yang mendapat pelayanan kesehatan (Kapitasi)			557.007.889		-		-		-		557.007.889			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.35.26	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Klagenserut (Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Klagenserut yang mendapat pelayanan kesehatan (Kapitasi)			584.054.000		-		-		-		584.054.000			
1.02.1.02.01.35.32	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milir (Klaim Non Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milir yang mendapat pelayanan kesehatan (Klaim Non Kapitasi)			5.973.000		-		-		-		5.973.000			
1.02.1.02.01.35.34	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Jetis (Klaim Non Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Jetis yang mendapat pelayanan kesehatan (Klaim Non Kapitasi)			11.860.000		-		-		-		11.860.000			
1.02.1.02.01.35.48	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Madiun (Klaim Non Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Madiun yang mendapat pelayanan kesehatan (Klaim Non Kapitasi)			8.631.250		-		-		-		8.631.250			
1.02.1.02.01.35.49	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Dimong (Klaim Non Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Dimong yang mendapat pelayanan kesehatan (Klaim Non Kapitasi)			9.447.000		-		-		-		9.447.000			
1.02.1.02.01.35.50	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Sawahan (Klaim Non Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Sawahan yang mendapat pelayanan kesehatan (Klaim Non Kapitasi)			32.514.000		-		-		-		32.514.000			
1.02.1.02.01.35.52	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Klagenserut (Klaim Non Kapitasi)	Cakupan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Klagenserut yang mendapat pelayanan kesehatan (Klaim Non Kapitasi)			21.622.000		-		-		-		21.622.000			
1.02.1.02.01.35.79	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milir (SILPA Kapitasi JKN 2018)	-			42.440.000		-		-		-		42.440.000			
1.02.1.02.01.35.80	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Jetis (SILPA Kapitasi JKN 2018)	-			4.445.081		-		-		-		4.445.081			
1.02.1.02.01.35.81	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Madiun (SILPA Kapitasi JKN 2018)	-			29.170.503		-		-		-		29.170.503			
1.02.1.02.01.35.82	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Dimong (SILPA Kapitasi JKN 2018)	-			8.368.537		-		-		-		8.368.537			
1.02.1.02.01.35.83	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Sawahan (SILPA Kapitasi JKN 2018)	-			26.902.500		-		-		-		26.902.500			
1.02.1.02.01.35.84	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Klagenserut (SILPA Kapitasi JKN 2018)	-			-		-		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.38	Program pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	79%	20,859,754,695	32,820,637,267		-		-		-		32,820,637,267			
		Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	60%	-	-		-		-		-		-			
1.02.1.02.01.38.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (PBI-D)			15,595,368,000		-		-		-		15,595,368,000			
1.02.1.02.01.38.02	Kemitraan Ssuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)	Jumlah pembayaran premi asuransi bagi masyarakat miskin			5,617,931,000		-		-		-		5,617,931,000			
1.02.1.02.01.38.04	Pelayanan sunatan masal	Jumlah anak yang mendapat pelayanan sunatan massal tepat sasaran			55,000,000		-		-		-		55,000,000			
1.02.1.02.01.38.08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standar			3,589,000		-		-		-		3,589,000			
1.02.1.02.01.38.11	Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase puskesmas yang terakreditasi			58,580,800		-		-		-		58,580,800			
		Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan														
		Jumlah puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS														
1.02.1.02.01.38.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota			103,960,000		-		-		-		103,960,000			
1.02.1.02.01.38.16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ponkesdes (Banprop)	Jumlah perawat ponkesdes memberikan pelayanan kesehatan			946,185,000		-		-		-		946,185,000			
1.02.1.02.01.38.17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus	Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan			534,972,726		-		-		-		534,972,726			
1.02.1.02.01.38.18	Pendukung Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan di Puskesmas Se Kab. Madiun	Jumlah puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS			20,700,000		-		-		-		20,700,000			
1.02.1.02.01.38.23	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ponkesdes	Jumlah perawat ponkesdes memberikan pelayanan kesehatan			1,310,114,343		-		-		-		1,310,114,343			
1.02.1.02.01.38.24	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Standart (Banprop)	Jumlah dokter kontrak Banprop yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap			120,600,000		-		-		-		120,600,000			
1.02.1.02.01.38.71	Akreditasi Puskesmas	Jumlah dokter kontrak Banprop yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap			894,358,884		-		-		-		894,358,884			
1.02.1.02.01.38.72	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)	Persentase FKTP memenuhi standar kredensialing/rekredensialing			704,157,107		-		-		-		704,157,107			
1.02.1.02.01.38.73	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)	Cakupan desa yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar			1,645,608,559		-		-		-		1,645,608,559			
		Cakupan pelayanan kesehatan bergerak														
1.02.1.02.01.38.76	Pelayanan Pengobatan Massal (DID)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal			92,695,566		-		-		-		92,695,566			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.01.38.77	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat yang berdampak COVID-19	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (PBI-D)			4.786.042.830		-		-		-		4.786.042.830			
1.02.1.02.01.01.38.78	Akreditasi Puskesmas (Penanganan COVID-19)	Persentase puskesmas terakreditasi			-		-		-		-		-			
1.02.1.02.01.01.38.79	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus Covid-19	Persentase RS yang terakreditasi			330.773.452		-		-		-		330.773.452			
		Persentase pelayanan kesehatan rujukan														
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal														
		Persentase anak yang mendapat pelayanan Khitanan Massal														
		Persentase ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan														
		Persentase penanggulangan bencana														
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran di rumah sakit			-	41.668.453.848		-		-	-		41.668.453.848			RSUD Caruban
1.02.1.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim			755.500		-		-		-		755.500			
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediaannya listrik, air, telepon, internet			1.108.834.754		-		-		-		1.108.834.754			
1.02.1.02.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediaannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor			50.578.050		-		-		-		50.578.050			
1.02.1.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediaannya jasa administrasi keuangan			9.463.900		-		-		-		9.463.900			
1.02.1.02.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediaannya ATK			270.163.100		-		-		-		270.163.100			
1.02.1.02.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediaannya barang cetakan dan penggandaan			632.258.355		-		-		-		632.258.355			
1.02.1.02.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediaannya komponen instalasi listrik/penerangan			145.241.635		-		-		-		145.241.635			
1.02.1.02.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediaannya bahan bacaan (koran)			10.710.000		-		-		-		10.710.000			
1.02.1.02.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediaannya Makanan dan minum harian, rapat dan tamu			350.144.950		-		-		-		350.144.950			
1.02.1.02.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah			137.787.875		-		-		-		137.787.875			
1.02.1.02.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah			22.955.000		-		-		-		22.955.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.02.01.26	Penyediaan Jasa Perijinan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit				11.800.000		-		-		-		11.800.000			
1.02.1.02.02.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja RSUD Caruban (BLUD)	Tersedianya jasa penunjang kinerja			38.825.385.229		-		-		-		38.825.385.229			
1.02.1.02.02.01.31	Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis				3.750.000		-		-		-		3.750.000			
1.02.1.02.02.01.32	Penyediaan Jasa Pindah Kantor	Tersedianya jasa pindah kantor			3.300.000		-		-		-		3.300.000			
1.02.1.02.02.01.34	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan				85.325.500		-		-		-		85.325.500			
1.02.1.02.02.01.35	Penyusunan Naskah Akademik Pengadaan Barang Jasa BLUD dan Penyusunan Draft Peraturan Direktur (BLUD)				-		-		-		-		-			
1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi			-	1.915.959.458		-		-	-		1.915.959.458			
1.02.1.02.02.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				224.000.000		-		-		-		224.000.000			
1.02.1.02.02.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				537.583.940		-		-		-		537.583.940			
1.02.1.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				369.671.039		-		-		-		369.671.039			
1.02.1.02.02.02.46	Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit				107.705.379		-		-		-		107.705.379			
1.02.1.02.02.02.49	Renovasi Bangunan Rumah Sakit				439.632.600		-		-		-		439.632.600			
1.02.1.02.02.02.50	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit				237.366.500		-		-		-		237.366.500			
1.02.1.02.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang berseragam sesuai standar			-	194.653.125		-		-	-		194.653.125			
1.02.1.02.02.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan				194.653.125		-		-		-		194.653.125			
1.02.1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat pelatihan > 20 jam setahun			-	1.449.354.989		-		-	-		1.449.354.989			
1.02.1.02.02.05.04	Pelatihan Teknis Fungsional Internal				201.053.100		-		-		-		201.053.100			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02 . 1.02.02 . 05.05	Pelatihan Teknis Fungsional Eksternal				462.440,315		-		-		-		462.440,315			
1.02 . 1.02.02 . 05.06	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional (Angka Kredit)				23.600,000		-		-		-		23.600,000			
1.02 . 1.02.02 . 05.08	Studi Banding				95.979,000		-		-		-		95.979,000			
1.02 . 1.02.02 . 05.09	value Gathering				251.749,750		-		-		-		251.749,750			
1.02 . 1.02.02 . 05.10	Focus Group Discussion (FGD)				28.115,000		-		-		-		28.115,000			
1.02 . 1.02.02 . 05.13	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat dan asuransi Ketenagakerjaan				370.459,824		-		-		-		370.459,824			
1.02 . 1.02.02 . 05.14	Pelaksanaan Rekrutmen tenaga BLUD				15.958,000		-		-		-		15.958,000			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi	100%	3.750.000,000	9.828.414,472		-		-		-		9.828.414,472			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit				7.591.141,167		-		-		-		7.591.141,167			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 83	Pengadaan alat - alat kesehatan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit untuk pelayanan Covid-19				1.750.122,527		-		-		-		1.750.122,527			
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 84	Pengadaan alat - alat kesehatan Rumah Sakit untuk pelayanan Covid-19				487.150,778		-		-		-		487.150,778			
1.02 . 1.02.02 . 33	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	92%	59.160.000,000	66.671.763,778		-		-		-		66.671.763,778			
		Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	60%	-	-		-		-		-		-			
		Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	80%	-	-		-		-		-		-			
		Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	80%	-	-		-		-		-		-			
1.02 . 1.02.02 . 33.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat				144.681,125		-		-		-		144.681,125			
1.02 . 1.02.02 . 33.16	Peningkatan Jejaring Pelayanan Kesehatan dengan Lintas Sektor				16.145,000		-		-		-		16.145,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.02.02.33.22	Operasional Pelayanan dan Pendukung Pelayanan				64.324.045.892		-		-		-		64.324.045.892			
1.02.1.02.02.02.33.25	Operasional pelayanan dan pendukung pelayanan Covid-19				2.186.891.761		-		-		-		2.186.891.761			
1.02.1.02.02.44	Program Penatalaksanaan Keuangan dan Akuntansi	Persentase Capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar			84.062.000		-		-		-		84.062.000			
1.02.1.02.02.44.03	Pengawasan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)				37.587.000		-		-		-		37.587.000			
1.02.1.02.02.44.07	Penyusunan Pelaporan Keuangan				46.475.000		-		-		-		46.475.000			
1.02.1.02.02.44.10	Audit Eksternal				-		-		-		-					
1.02.1.02.02.45	Program Penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Keperawatan	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar			12.430.075.977		-		-		-		12.430.075.977			
		Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit bidang penunjang yang memenuhi standar akreditasi (Pokja APK, AP, PP, PAB, MKI, PPK, PPI, SKP, HPK, MDG, S)			-		-		-		-					
1.02.1.02.02.45.02	Maintenance dan Surveilans ISO				105.855.000		-		-		-		105.855.000			
1.02.1.02.02.45.03	Akreditasi Rumah Sakit				220.817.419		-		-		-		220.817.419			
1.02.1.02.02.45.04	Pelayanan Sunatan Massal				18.410.000		-		-		-		18.410.000			
1.02.1.02.02.45.05	Pelayanan Penguburan Mayat Tidak dikenal				972.000		-		-		-		972.000			
1.02.1.02.02.45.19	Pengadaan Gelang Pasien				58.905.000		-		-		-		58.905.000			
1.02.1.02.02.45.20	Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit (Pelayanan)				2.715.719.308		-		-		-		2.715.719.308			
1.02.1.02.02.45.21	Pengadaan Bangunan Sarana Pelayanan Rumah Sakit				439.216.500		-		-		-		439.216.500			
1.02.1.02.02.45.23	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit				42.980.000		-		-		-		42.980.000			
1.02.1.02.02.45.25	Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan (BLUD)				237.389.231		-		-		-		237.389.231			
1.02.1.02.02.45.26	Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan (DAU Infrastruktur)				4.605.546.719		-		-		-		4.605.546.719			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.02.45.27	Pembangunan Gedung Rawat Inap Jiwa (DAU Infrastruktur)				3.984.264.800		-		-		-		3.984.264.800			
1.02.1.02.02.46	Program Penyelenggaraan Penunjang Medis dan Non Medis	Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar		-	20.603.009,302		-		-		-		20.603.009,302			
		Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit bidang penunjang yang memenuhi standar akreditasi (Pokja PKPD, Pokja MFK)		-			-		-		-					
1.02.1.02.02.46.03	Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit				911.939.227		-		-		-		911.939.227			
1.02.1.02.02.46.12	Pemeriksaan Kultur Kuman				2.283.000		-		-		-		2.283.000			
1.02.1.02.02.46.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit				190.282.607		-		-		-		190.282.607			
1.02.1.02.02.46.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit				321.203.006		-		-		-		321.203.006			
1.02.1.02.02.46.18	Pengadaan Pakaian Pasien dan Pakaian Kerja Lapangan				115.870.850		-		-		-		115.870.850			
1.02.1.02.02.46.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit				401.316.247		-		-		-		401.316.247			
1.02.1.02.02.46.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Rumah Sakit				185.548.180		-		-		-		185.548.180			
1.02.1.02.02.46.23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kualitas Air Bersih, Limbah, Ruangan, dan Peralatan Makan Rumah Sakit				46.788.300		-		-		-		46.788.300			
1.02.1.02.02.46.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kebersihan Rumah Sakit				1.764.622.113		-		-		-		1.764.622.113			
1.02.1.02.02.46.28	Pengadaan Linen Rumah Sakit				189.600.000		-		-		-		189.600.000			
1.02.1.02.02.46.30	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)				635.079.950		-		-		-		635.079.950			
1.02.1.02.02.46.31	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit				15.838.475.822		-		-		-		15.838.475.822			
1.02.1.02.02.47	Program pelayanan kesehatan Rujukan (DAK)	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi	100%	14.848.680,600	22.656.251,940		-		-		-		22.656.251,940			
1.02.1.02.02.47.02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit (DAK)				13.981.977.000		-		-		-		13.981.977.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.02.47.63	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit (Penunjang DAK)				241.946.000		-		-		-		241.946.000			
1.02.1.02.02.01.47.31	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit				7.263.233.140		-		-		-		7.263.233.140			
1.02.1.02.02.01.47.32	Pengadaan Prasarana Rumah Sakit				1.169.095.800		-		-		-		1.169.095.800			
1.02.1.02.02.01.48	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan (Cukai)	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit yang layak fungsi	100%	509.577.873	5.988.243.691		-		-		-		5.988.243.691			
					66.510.937.653		-		-		-		66.510.937.653			
1.02.1.02.02.01.48.63	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan/ Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (CUKAI)				5.873.685.216		-		-		-		5.873.685.216			
1.02.1.02.02.01.48.64	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Cukai) (Penanganan COVID-19)				114.558.475		-		-		-		114.558.475			
1.02.1.02.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	-	-	2.604.146.602		-		-		-		2.604.146.602			RSUD Dolopo
1.02.1.02.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	-	-	2.484.000		-		-		-		2.484.000			
1.02.1.02.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang diadakan	-	-	556.191.132		-		-		-		556.191.132			
1.02.1.02.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang diadakan	-	-	162.422.920		-		-		-		162.422.920			
1.02.1.02.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	-	-	25.272.750		-		-		-		25.272.750			
1.02.1.02.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	-	-	15.360.000		-		-		-		15.360.000			
1.02.1.02.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum untuk pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	-	-	347.989.700		-		-		-		347.989.700			
1.02.1.02.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang disediakan	-	-	75.439.000		-		-		-		75.439.000			
1.02.1.02.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan	-	-	16.960.000		-		-		-		16.960.000			
1.02.1.02.03.01.30	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja RSUD Dolopo (BLUD)	Jumlah jasa penunjang kinerja pelayanan	-	-	1.351.595.100		-		-		-		1.351.595.100			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.03.01.33	Penyediaan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	50.432.000	-	-	-	-	-	-	50.432.000	-	-		
1.02.1.02.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SPM bidang tata usaha	-	-	368.946.957	-	-	-	-	-	-	368.946.957	-	-		
1.02.1.02.03.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Pengadaan komputer dan printer	-	-	125.905.950	-	-	-	-	-	-	125.905.950	-	-		
1.02.1.02.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM, service, pajak dan sparepart yang terpenuhi	-	-	243.041.007	-	-	-	-	-	-	243.041.007	-	-		
1.02.1.02.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SPM bidang tata usaha	-	-	53.865.000	-	-	-	-	-	-	53.865.000	-	-		
1.02.1.02.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah diklat yang dilaksanakan	-	-	53.865.000	-	-	-	-	-	-	53.865.000	-	-		
1.02.1.02.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SPM Bidang Keuangan	-	-	69.650.000	-	-	-	-	-	-	69.650.000	-	-		
1.02.1.02.03.06.08	Pengendalian dan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit	Jumlah SIM BLUD dan konsultasi pelaporan BLUD	-	-	69.650.000	-	-	-	-	-	-	69.650.000	-	-		
1.02.1.02.03.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru - paru / rumah sakit mata	Persentase SPM Bidang Penunjang yang dicapai	90.63%	3.000.000.000	32.211.217.853	-	-	-	-	-	-	32.211.217.853	-	-		
1.02.1.02.03.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang diadakan		1.000.000.000	5.518.127.434		-		-		-	5.518.127.434		-		
1.02.1.02.03.26.18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan	15 item alat	1.500.000.000	611.212.622		-		-		-	611.212.622		-		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDS/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDS/d Tahun 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDS/d (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDS/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
			kesehatan													
1.02.1.02.03.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah item perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	-	-	330.989,017		-		-		-		330.989,017			
1.02.1.02.03.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah BAHAP, bahan kimia dan obat-obatan yang diadakan	-	-	8.250.699,904		-		-		-		8.250.699,904			
1.02.1.02.03.26.24	Pengadaan pencetakan administrasi rumah sakit	Jumlah blanko administrasi yang diadakan	-	-	138.487,789		-		-		-		138.487,789			
1.02.1.02.03.26.27	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	Jumlah gedung dan alat kesehatan yang diadakan	-	-	8.438.601,572		-		-		-		8.438.601,572			
1.02.1.02.03.26.71	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Pajak Rakok)	-			3.427.434,510		-		-		-		3.427.434,510			
1.02.1.02.03.01.47	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	-	18.800.000,000	8.401,012,552		-		-		-		8.401,012,552			
1.02.1.02.03.01.47.64	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	Gedung dan alat kesehatan yang diadakan	2 gedung dan 10 item kesehatan	18.800.000,000	2.192.061,180		-		-		-		2.192.061,180			
1.02.1.02.03.01.47.65	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit untuk penanganan Covid-19 (DAK)				6.208.951,372		-		-		-		6.208.951,372			
1.02.1.02.03.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru - paru / rumah sakit mata	Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	-	-	1.243,937,663		-		-		-		1.243,937,663			
1.02.1.02.03.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit yang diadakan	-	-	174.500,100		-		-		-		174.500,100			
1.02.1.02.03.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah yang diadakan	-	-	288.360,720		-		-		-		288.360,720			
1.02.1.02.03.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	-	-	207.786,249		-		-		-		207.786,249			
1.02.1.02.03.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit yang diadakan	-	-	125.872,000		-		-		-		125.872,000			
1.02.1.02.03.27.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Rumah Sakit	Pemeliharaan taman yang diadakan	-	-	29.412,000		-		-		-		29.412,000			
1.02.1.02.03.27.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kebersihan Rumah Sakit	Pemeliharaan kebersihan rumah sakit	-	-	418.006,594		-		-		-		418.006,594			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.03.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	-	-	49,234,878	-	-	-	-	-	-	-	49,234,878	-	-	
1.02.1.02.03.28.03	Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	Pengiriman limbah B3	-	-	49,234,878	-	-	-	-	-	-	-	49,234,878	-	-	
1.02.1.02.03.28.04	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Jumlah pemeriksaan mutu eksternal yang dilakukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.03.33	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Cost Recovery Rate	65%	23,140,398,371	56,691,028,893	-	-	-	-	-	-	-	56,691,028,893	-	-	
1.02.1.02.03.33.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah kegiatan peningkatan promosi RS	-	-	50,527,001	-	-	-	-	-	-	-	50,527,001	-	-	
1.02.1.02.03.33.03	Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah in house training, bimbingan dan survey akreditasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.03.33.04	Pelayanan Sunatan Massal	Jumlah anak yang dikhitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.03.33.05	Pelayanan Penguburan Mayat Tidak dikenal	Jumlah mayat tak dikenal yang dikuburkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.03.33.07	Operasional dan Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	42,789,705,515	-	-	-	-	-	-	-	42,789,705,515	-	-	
1.02.1.02.03.33.22	Akreditasi Rumah Sakit (Pajak Rokok)	-	-	-	87,381,100	-	-	-	-	-	-	-	87,381,100	-	-	
1.02.1.02.03.33.23	Operasional dan Pengembangan Rumah Sakit (DAU)	-	-	-	583,217,737	-	-	-	-	-	-	-	583,217,737	-	-	
1.02.1.02.03.02.33.24	Operasional dan pengembangan Rumah Sakit untuk penanganan Covid-19	-	-	-	13,180,197,540	-	-	-	-	-	-	-	13,180,197,540	-	-	
1.02.1.02.03.01.48	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan (Cukai)	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpenuhi	15%	510,000,000	15,041,257,819	-	-	-	-	-	-	-	15,041,257,819	-	-	
1.02.1.02.03.01.48.63	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan/ Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (CUKAI)	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang tersedia	1 gedung rawat inap	510,000,000	15,041,257,819	-	-	-	-	-	-	-	15,041,257,819	-	-	
1.02.1.02.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	1,600,628,139	-	118,750,000	-	7.42	-	118,750,000	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02.1.02.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		192.500.000		97.750.000		50.78		97.750.000			
1.02.1.02.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-		192.500.000		97.750.000		50.78		97.750.000			
1.02.1.02.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		468.409.158		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		18.234.905		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		50.000.000		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		147.535.630		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		35.285.145		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		217.353.478		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		658.937.386		21.000.000		3.19		21.000.000			
1.02.1.02.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		1.650.000		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		416.787.386		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		240.500.000		21.000.000		8.73		21.000.000			
1.02.1.02.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		280.781.595		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		55.000.000		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		55.000.000		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		170.781.595		-		0.00		-			
1.02.1.02.01.01	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	-	-	-		52.593.671,07		16.895.181,050		32.12		16.895.181,050			
		Angka Kematian Bayi	-	-	-											
		Prevalensi Bayi Stunting	-	-	-											
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	-	-	-											

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit	-	-												
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	-	-												
1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	15.385.836.643		3.706.500		0.02		3.706.500				
1.02.1.02.01.01.15.02	Pembangunan Puskesmas				-	6.254.263.600		-		0.00		-				
1.02.1.02.01.01.15.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				-	2.440.322.923		-		0.00		-				
1.02.1.02.01.01.15.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				-	1.403.482.692		-		0.00		-				
1.02.1.02.01.01.15.16	Pengadaan Obat, Vaksin				-	5.181.818.359		3.706.500		0.07		3.706.500				
1.02.1.02.01.01.15.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				-	105.949.069		-		0.00		-				
1.02.1.02.01.01.16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	36.614.296.936		16.884.711.550		46.12		16.884.711.550				
1.02.1.02.01.01.16.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				-	7.158.782.427		6.800.430.760		94.99		6.800.430.760				
1.02.1.02.01.01.16.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2.487.160.397		-		0.00		-				
1.02.1.02.01.01.16.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	50.000.000		-		0.00		-				
1.02.1.02.01.01.16.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	192.535.615		-		0.00		-				
1.02.1.02.01.01.16.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	125.000.000		-				-				
1.02.1.02.01.01.16.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				-	133.118.640		-				-				
1.02.1.02.01.01.16.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	190.247.250		-		0.00		-				
1.02.1.02.01.01.16.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				-	31.969.400		-		0.00		-				
1.02.1.02.01.01.16.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				-	27.000.000		-		0.00		-				
1.02.1.02.01.01.16.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	389.178.874		63.000.000		16.19		63.000.000				
1.02.1.02.01.01.16.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				-	19.873.751.379		9.823.480.300		49.43		9.823.480.300				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02 . 1.02.01.01 .16.33	Operasional Pelayanan Puskesmas				-		63.000,000		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .16.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-		1.255.200,000		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .16.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				-		1.690.390,000		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .16.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				-		50.709,105		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .16.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				-		1.528.222,869	197.800,490		12,94		197.800,490				
1.02 . 1.02.01.01 .16.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				-		72.168,450		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .16.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				-		104.054,551		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .16.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				-		30.914,179		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .16.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				-		2.864,400		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .16.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				-		2.864,400		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .16.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				-		777.525,000		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .16.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				-		377.640,000		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .18	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		593.537,500	6.763,000		1,14		6.763,000				
1.02 . 1.02.01.01 .18.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				-		205.898,500	6.000,000		2,91		6.000,000				
1.02 . 1.02.01.01 .18.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				-		387.639,000	763,000		0,20		763,000				
1.02 . 1.02.01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	-	-	-		293.829,505	397.770,000		135,37		397.770,000				
		Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	-	-	-											
1.02 . 1.02.01.01 .19	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				-		22.676,250		-		0,00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .19.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				-		22.676,250		-		0,00		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02 . 1.02.01.01 .20	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				-		-		397.770.000		-		397.770.000			
1.02 . 1.02.01.01 .20.02					-		-		397.770.000		-		397.770.000			
1.02 . 1.02.01.01 .21	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		271.153.255		-		0.00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .21.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		271.153.255		-		0.00		-			
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	-	-	-		233.839.200		-		-		-			
1.02 . 1.02.01.01 .22	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				-		20.410.000		-		0.00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .22.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				-		20.410.000		-		0.00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .24	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				-		111.745.000		-		0.00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .24.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				-		111.745.000		-		0.00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .27	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				-		101.684.200		-		0.00		-			
1.02 . 1.02.01.01 .27.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				-		101.684.200		-		0.00		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	-	-	-	2,312,972,800	-	-	-	-	-	-	-	0.00		
1.02.1.02.01.01.28	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	168,727,800		-		0.00			-			
1.02.1.02.01.01.28.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	168,727,800		-		0.00			-			
1.02.1.02.01.01.29	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	2,023,216,000		-		0.00			-			
1.02.1.02.01.01.29.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				-	2,023,216,000		-		0.00			-			
1.02.1.02.01.01.30	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	121,029,000		-		0.00			-			
1.02.1.02.01.01.30.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	121,029,000		-		0.00			-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	198,706,798,929		-		-			-	0.00	RSUD Caruban	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	-	-												
		Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	-	-												
		Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	-	-												
		Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	-	-												
		Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	-	-												
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	-	-	-	26,325,575,550		-		-			-	0.00		
		Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	-	-												
		Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	-	-												
		Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	-	-												
1.02.1.02.01.02.15	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	26,325,575,550		-		0.00			-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.02 . 1.02.01.02 . 15.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				-		24,154,568,116		-		0.00		-			
1.02 . 1.02.01.02 . 15.16	Pengadaan Obat, Vaksin				-		200,350,000		-		0.00		-			
1.02 . 1.02.01.02 . 15.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai				-		1,970,657,434		-		0.00		-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		35,113,196,655		3,075,825,736				3,075,825,736		2.85	RSUD Dolopo
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	-	-												
		Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	-	-												
		Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	-	-												
		Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	-	-												
		Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	-	-												
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	-	-	-		17,534,367,853		6,636,001,440		37.85		6,636,001,440		12.31	
		Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	-	-												
		Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	-	-												
		Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	-	-												
1.02 . 1.02.01.03 . 15	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	-	-	-		17,532,417,853		6,636,001,440		37.85		6,636,001,440			
1.02 . 1.02.01.03 . 15.05	Pengembangan Rumah Sakit	Gedung dan alat kesehatan yang diadakan	-	-	-		5,320,714,403		1,690,224,240		31.77		1,690,224,240			
1.02 . 1.02.01.03 . 15.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang diadakan	-	-	-		8,711,703,450		1,445,777,200		16.60		1,445,777,200			
1.02 . 1.02.01.03 . 15.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik yang diadakan	-	-	-		3,500,000,000		3,500,000,000		100.00		3,500,000,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			162.644.083,725	283.487.285,926		79.303.780,741		3.475.155,316		4,38		286.972.441,242		49,28	
1.03.1.03.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	1.689.270,621	1.774.711,031		-		-		-		1.774.711,031		105,06	Dinas PUPR
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	100													
1.03.1.03.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				1.734.914,731		-		-		-		1.734.914,731			
1.03.1.03.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				39.796,300		-		-		-		39.796,300			
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	-	-	1.228.004,291		-		-		-		1.228.004,291		81,36	
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.426,151		-		-		-		133.426,151			
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				37.530,700		-		-		-		37.530,700			
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				92.400,000		-		-		-		92.400,000			
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				216.012,920		-		-		-		216.012,920			
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.579,700		-		-		-		20.579,700			
1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.810,500		-		-		-		1.810,500			
1.03.1.03.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.267,500		-		-		-		4.267,500			
1.03.1.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				17.322,000		-		-		-		17.322,000			
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman				9.727,500		-		-		-		9.727,500			
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				368.855,525		-		-		-		368.855,525			
1.03.1.03.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah				44.270,000		-		-		-		44.270,000			
1.03.1.03.01.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan				102.671,795		-		-		-		102.671,795			
1.03.1.03.01.01.26	Penyediaan Jasa Publikasi				86.730,000		-		-		-		86.730,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.03.1.03.01.01.27	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				92.400.000		-		-		-		92.400.000			
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana perkantoran yang terpenuhi	-	-	315.889.285		-		-		-		315.889.285		44.32	
1.03.1.03.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				79.695.000		-		-		-		79.695.000			
1.03.1.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor				47.672.550		-		-		-		47.672.550			
1.03.1.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional				145.149.347		-		-		-		145.149.347			
1.03.1.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor				33.778.173		-		-		-		33.778.173			
1.03.1.03.01.02.45	Peralatan/ Pendukung Lelang				9.594.215		-		-		-		9.594.215			
1.03.1.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-	17.737.000		-		-		-		17.737.000		59.12	
1.03.1.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17.737.000		-		-		-		17.737.000			
1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		-	-	2.957.254.800		-		-		-		2.957.254.800		98.15	
1.03.1.03.01.15.07	Pembangunan Bangunan Pendukung Jalan dan Jembatan				2.455.787.150		-		-		-		2.455.787.150			
1.03.1.03.01.15.08	Pembangunan Trotoar				501.467.650		-		-		-		501.467.650			
1.03.1.03.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong	Persentase panjang saluran drainase kondisi baik	-	-	7.650.700.400		-		-		-		7.650.700.400		137.93	
1.03.1.03.01.16.03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				7.451.050.400		-		-		-		7.451.050.400			
1.03.1.03.01.16.07	Penyusunan Master Plan Drainase (Pajak Rokak)				199.650.000		-		-		-		199.650.000			
1.03.1.03.01.42	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik	-	-	73.555.967.953		-		-		-		73.555.967.953		109.27	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.03.1.03.01.42.02	Peningkatan Jalan				50,194,804,453		-		-		-		50,194,804,453			
1.03.1.03.01.42.03	Peningkatan Jembatan				2,959,183,200		-		-		-		2,959,183,200			
1.03.1.03.01.42.04	Peningkatan Jalan (Pajak Rokok)				2,987,911,000		-		-		-		2,987,911,000			
1.03.1.03.01.42.13	Peningkatan Jalan (DAK)				16,879,290,400		-		-		-		16,879,290,400			
1.03.1.03.01.42.14	Penunjang Peningkatan Jalan (Penunjang DAK)				235,208,900		-		-		-		235,208,900			
1.03.1.03.01.42.17	Penyusunan Data Aset Tanah Jalan				-		-		-		-		-			
1.03.1.03.01.42.18	Penyusunan Master Plan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Jalan				299,570,000		-		-		-		299,570,000			
1.03.1.03.01.43	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Sedang	-	-	12,630,186,142		-		-		-		12,630,186,142		120.67	
1.03.1.03.01.43.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (rutin)				7,563,902,642		-		-		-		7,563,902,642			
1.03.1.03.01.43.07	Pemeliharaan Berkala Jalan				5,066,283,500		-		-		-		5,066,283,500			
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi kondisi baik (m)	-	-	22,801,211,408		-		-		-		22,801,211,408		99.02	
		Cakupan luas sawah yang terairi (Ha)	-	-												
1.03.1.03.01.24.01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi				502,930,600		-		-		-		502,930,600			
1.03.1.03.01.24.07	Pembangunan Reservoir				3,594,411,500		-		-		-		3,594,411,500			
1.03.1.03.01.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi				1,748,099,866		-		-		-		1,748,099,866			
1.03.1.03.01.24.23	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah				2,064,971,600		-		-		-		2,064,971,600			
1.03.1.03.01.24.24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi				4,548,469,200		-		-		-		4,548,469,200			
1.03.1.03.01.24.41	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Daerah Irigasi (DAK Penugasan)				7,124,963,666		-		-		-		7,124,963,666			
1.03.1.03.01.24.42	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Daerah Irigasi (Penunjang DAK Penugasan)				166,528,276		-		-		-		166,528,276			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
103.103.01.24.55	Penanganan Infrastruktur Irigasi (DID)				2.998.836.700		-		-		-		2.998.836.700			
103.103.01.24.56	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Daerah Irigasi (Sisa DAK)				52.000.000		-		-		-		52.000.000			
103.103.01.38	Program Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)	Panjang daerah irigasi kondisi baik (m)	-	-	7.881.785.334		-		-		-		7.881.785.334		1393.28	
103.103.01.38.01	Rehabilitasi/pemeliharaan Daerah Irigasi (IPDMIP)				7.804.335.334		-		-		-		7.804.335.334			
103.103.01.38.02	Penunjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Irigasi (IPDMIP)				77.450.000		-		-		-		77.450.000			
103.103.01.28	Program Pengendalian Banjir	Panjang saluran pembuangan kondisi baik			2.695.685.300		-		-		-		2.695.685.300		286.15	
103.103.01.28.06	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai				2.695.685.300		-		-		-		2.695.685.300			
103.103.01.39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/kelurahan	Perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	20,661	9,980,992,725	11,578,336,605		-		-		-		11,578,336,605		50.84	
103.103.01.39.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan				1.351.324.600		-		-		-		1.351.324.600			
103.103.01.39.05	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur desa(DBGHCT)				-		-		-		-		-			
103.103.01.39.08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK)				1.679.973.750		-		-		-		1.679.973.750			
103.103.01.39.09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Penunjang DAK)				55.854.455		-		-		-		55.854.455			
103.103.01.39.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK Penugasan)				2.986.580.400		-		-		-		2.986.580.400			
103.103.01.39.12	Penunjang Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Penunjang DAK penugasan)				204.183.900		-		-		-		204.183.900			
103.103.01.39.27	Pembangunan Infrastruktur Kelurahan				5.269.449.500		-		-		-		5.269.449.500			
103.103.01.39.29	Penunjang Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Daerah Perkotaan dan / atau Perdesaan (DAK)				30.970.000		-		-		-		30.970.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.03.1.03.01.01.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase sarana prasarana penunjang infrastruktur kondisi baik	100%	1.107.000.000	1.255.565.385		-		-		-		1.255.565.385		86.17	
1.03.1.03.01.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Berat				714.440.385		-		-		-		714.440.385			
1.03.1.03.01.01.23.04	Pengadaan Alat-Alat Berat (DID)				541.125.000		-		-		-		541.125.000			
1.03.1.03.01.31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Persentase gedung kantor/dinas/badan kondisi baik	73.33%	13.589.108.146	23.697.479.270		-		-		-		23.697.479.270		87.63	
1.03.1.03.01.31.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Madiun (Pajak Rokok)				9.995.306.420		-		-		-		9.995.306.420			
1.03.1.03.01.31.22	Pembangunan Sarana Prasarana kepada Instansi Vertikal				378.569.200		-		-		-		378.569.200			
1.03.1.03.01.31.23	Penyusunan DED Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Madiun				182.526.850		-		-		-		182.526.850			
1.03.1.03.01.31.32	Pembangunan Kampung Pesilat				4.949.651.100		-		-		-		4.949.651.100			
1.03.1.03.01.31.43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Madiun				8.079.648.750		-		-		-		8.079.648.750			
1.03.1.03.01.31.45	Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung				111.776.950		-		-		-		111.776.950			
1.03.1.03.01.48	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase dokumen tata ruang dan rencana detail tata ruang yang tersusun	53.33%	479.196.000	621.432.400		-		-		-		621.432.400		65.48	
1.03.1.03.01.32.18	Penyusunan RDR dan Peraturan Zonasi				277.655.000		-		-		-		277.655.000			
1.03.1.03.01.32.24	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung				40.689.700		-		-		-		40.689.700			
1.03.1.03.01.32.25	Pelayanan Penerbitan Keterangan Rencana Kabupaten Madiun (KRK)				35.440.200		-		-		-		35.440.200			
1.03.1.03.01.48.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata ruang				226.723.500		-		-		-		226.723.500			
1.03.1.03.01.48.06	Penerbitan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR)				40.924.000		-		-		-		40.924.000			
1.03.1.03.01.37	Program Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi yang bersertifikat tenaga terampil	40%	391.151.752	256.528.801		-		-		-		256.528.801		33.12	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDS/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDS/d Tahun (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDS/d (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDS/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.03.1.03.01.37.01	Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi				27.467.751		-		-		-		27.467.751			
1.03.1.03.01.37.04	Pembekalan dan Uji Kompetensi Dengan MTU				92.628.300		-		-		-		92.628.300			
1.03.1.03.01.37.05	Penyusunan Harga Bahan dan Upah Kegiatan Jasa Konstruksi				36.662.750		-		-		-		36.662.750			
1.03.1.03.01.37.06	Penyusunan Analisa Standart Belanja Konstruksi				99.770.000		-		-		-		99.770.000			
1.03.1.03.01.01.45	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dan jembatan kondisi baik (baik+sedang)	68.65%	97.950.907,529	78.047.952.900		-		-		-		78.047.952.900		79.68	
1.03.1.03.01.01.45.01	Peningkatan Jalan (DAU)				22.053.339.050		-		-		-		22.053.339.050			
1.03.1.03.01.01.45.02	Peningkatan Jalan (Pajak Rokok)				2.201.080.095		-		-		-		2.201.080.095			
1.03.1.03.01.01.45.05	Pemeliharaan berkala jalan				5.000.326.580		-		-		-		5.000.326.580			
1.03.1.03.01.01.45.06	Peningkatan Jembatan				5.090.624.600		-		-		-		5.090.624.600			
1.03.1.03.01.01.45.07	Pembangunan Trotoar				18.955.766.200		-		-		-		18.955.766.200			
1.03.1.03.01.01.45.08	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong				10.282.082.400		-		-		-		10.282.082.400			
1.03.1.03.01.01.45.09	Pembangunan bangunan pendukung jalan dan jembatan				5.150.587.500		-		-		-		5.150.587.500			
1.03.1.03.01.01.45.10	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan (rutin)				8.842.884.275		-		-		-		8.842.884.275			
1.03.1.03.01.01.45.11	Penunjang peningkatan jalan (Penunjang DAK)				471.262.200		-		-		-		471.262.200			
1.03.1.03.01.01.45.13	Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pola Padat Karya Tunai (Covid19 - New Normal)				-		-		-		-		-			
1.03.1.03.01.01.46	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	61.65%	7.350.616,421	8.298.457,030		-		-		-		8.298.457,030		112.89	
1.03.1.03.01.01.46.01	Pembangunan Infrastruktur Kelurahan				7.622.739.300		-		-		-		7.622.739.300			
1.03.1.03.01.01.46.03	Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)				675.717.730		-		-		-		675.717.730			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.03.1.03.01.01.47	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	77.31%	30,105,840,530	23,307,763,305		-		-		-		23,307,763,305		77.42	
1.03.1.03.01.01.47.02	Pembangunan Reservoir				2,811,405,300		-		-		-		2,811,405,300			
1.03.1.03.01.01.47.03	Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi (rutin)				1,600,503,300		-		-		-		1,600,503,300			
1.03.1.03.01.01.47.04	Rehabilitasi / Pemeliharaan daerah irigasi (DAK)				5,170,107,373		-		-		-		5,170,107,373			
1.03.1.03.01.01.47.05	Penunjang rehabilitasi / pemeliharaan daerah irigasi (penunjang DAK)				136,307,332		-		-		-		136,307,332			
1.03.1.03.01.01.47.06	Rehabilitasi jaringan irigasi				8,755,429,400		-		-		-		8,755,429,400			
1.03.1.03.01.01.47.09	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan- badan sungai				4,834,010,600		-		-		-		4,834,010,600			
1.03.1.03.01.01.47.12	Pengelolaan Jaringan Irigasi Pola Padat Karya Tunai (Covid19 - New Normal)				-		-		-		-		-			
1.03.1.03.01.44	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur (Cukai)				2,924,637,286		-		-		-		2,924,637,286			
1.03.1.03.01.44.01	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan menuju Kawasan Wisata (Cukai)				1,172,429,700		-		-		-		1,172,429,700			
1.03.1.03.01.49.01	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan menuju Kawasan Wisata				1,752,207,586		-		-		-		1,752,207,586			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		3,444,237,494		653,941,132		18.99		653,941,132		1.50	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-											
1.03.1.03.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan perencanaan yang terpenuhi			-		58,271,925		-		-		-			
1.03.1.03.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan laporan pemerintah yang disusun			-		58,271,925		-		-		-			
1.03.1.03.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan dokumen aset yang terpenuhi			-		9,998,800		-		-		-			
1.03.1.03.01.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen aset yang tersusun			-		9,998,800		-		-		-			
1.03.1.03.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi			-		792,654,377		191,625,010		24.18		191,625,010			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.03.1.03.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi			-		9,184,648		-		-		-			
1.03.1.03.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor yang terpenuhi			-		125,120,730		5,625,000		4.50		5,625,000			
1.03.1.03.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan spanduk dan alat / bahan kebersihan kantor yang terpenuhi			-		23,830,980		996,500		4.18		996,500			
1.03.1.03.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan ATK dan mamin rapat yang terpenuhi			-		232,351,845		103,463,000		44.53		103,463,000			
1.03.1.03.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan fc. cetak dan jilid yang terpenuhi			-		43,488,389		7,992,100		18.38		7,992,100			
1.03.1.03.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan publikasi yang terpenuhi			-		64,177,785		17,058,000		26.58		17,058,000			
1.03.1.03.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam yang terpenuhi			-		294,500,000		56,490,410		19.18		56,490,410			
1.03.1.03.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan			-		718,605,020		-		-		-			
1.03.1.03.01.01.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan			-		115,386,500		-		-		-			
1.03.1.03.01.01.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat berat, alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan			-		517,791,670		-		-		-			
1.03.1.03.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kebutuhan kantor yang diadakan			-		85,426,850		-		-		-			
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi			-		703,102,200		238,732,884		33.95		238,732,884			
1.03.1.03.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan air, listrik dan telepon kebutuhan kantor yang terbayar			-		164,237,004		49,757,884		30.30		49,757,884			
1.03.1.03.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi, jasa kebersihan dan jasa keamanan yang terpenuhi			-		538,865,196		188,975,000		35.07		188,975,000			
1.03.1.03.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi			-		1,161,605,172		223,583,238		19.25		223,583,238			
1.03.1.03.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara			-		199,255,120		75,226,838		37.75		75,226,838			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.03. 1.03.01.01. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang terpelihara			-		133.060,620		10.672.500		8.02		10.672.500			
1.03. 1.03.01.01. 09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah sarana prasarana alat berat yang dipelihara (unit)			-		557.967,730		112.424,400		20.15		112.424,400			
		Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dicetak									-		-			
		Jumlah lokasi yang terlayani alat berat									-		-			
1.03. 1.03.01.01. 09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang terpelihara			-		9.150,460		-		-		-			
1.03. 1.03.01.01. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan sarpras gedung kantor yang dipelihara			-		262.171,242		25.259,500		9.63		25.259,500			
											-		-			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan irigasi kondisi baik (m)	-	-	-		21.558.748,781		920.078,627		4.27		920.078,627		1.35	
		Panjang saluran pembuangan dalam kondisi baik	-	-									-			
		Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	-	-									-			
1.03. 1.03.01.01. 15	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		3.323,211,426		-		-		-			
1.03. 1.03.01.01. 15.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				-		1.742.225,695		-		-		-			
1.03. 1.03.01.01. 15.27	Rehabilitasi Kanal Banjir				-		1.304.917,033		-		-		-			
1.03. 1.03.01.01. 15.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir				-		176.099,698		-		-		-			
1.03. 1.03.01.01. 15.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				-		99.969,000		-		-		-			
1.03. 1.03.01.01. 16	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		18.235.537,355		920.078,627		5.05		920.078,627			
1.03. 1.03.01.01.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				-		2.981.481,446		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
16.14																
1.03. 1.03.01.01. 16.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				-	1.380.806.647		863.281.700		62.52		863.281.700				
1.03. 1.03.01.01. 16.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi				-	630.802.526		8.144.014		1.29		8.144.014				
1.03. 1.03.01.01. 16.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				-	207.847.775		-		-		-				
1.03. 1.03.01.01. 16.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				-	12.934.999.278		48.652.913		0.38		48.652.913				
1.03. 1.03.01.01. 16.13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah				-	99.599.683		-		-		-				
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase peningkatan jaringan SPAM di kawasan perdesaan	-	-	-	5.681.156.000		-		-		-		-	0.00	
		persentase kebutuhan air minum sehari-hari yang terlayani	-	-	-							-				
1.03. 1.03.01.01. 17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				-	5.047.556.000		-		-		-				
1.03. 1.03.01.01. 17.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				-	100.000.000		-		-		-				
1.03. 1.03.01.01. 17.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				-	4.947.556.000		-		-		-				
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun	-	-	-	239.034.683		-		-		-		-	0.00	
1.03. 1.03.01.01. 19	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	239.034.683		-		-		-				
1.03. 1.03.01.01. 19.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				-	192.000.000		-		-		-				
1.03. 1.03.01.01. 19.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				-	47.034.683		-		-		-				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi dalam kondisi baik	-	-	-	3,697,350,534		99,137,000		2.68		99,137,000		0.87		
1.03.1.03.01.01.20	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	3,697,350,534		99,137,000		2.68		99,137,000				
1.03.1.03.01.01.20.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				-	3,697,350,534		99,137,000		2.68		99,137,000				
	Program Pengembangan Pemukiman	Jumlah infrastruktur kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah yang terbangun	-	-	-	5,217,225,988		109,785,000		2.10		109,785,000		0.68		
1.03.1.03.01.01.21	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				-	5,217,225,988		109,785,000		2.10		109,785,000				
1.03.1.03.01.01.21.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				-	5,217,225,988		109,785,000		2.10		109,785,000				
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung kantor / dinas / badan kondisi baik	-	-	-	10,015,333,339		73,640,000		0.74		73,640,000		0.24		
1.03.1.03.01.01.22	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				-	10,015,333,339		73,640,000		0.74		73,640,000				
1.03.1.03.01.01.22.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				-	145,550,318		-		-		-				
1.03.1.03.01.01.22.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				-	9,869,783,021		73,640,000		0.75		73,640,000				
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	-	-	-	348,350,310		-		-		-				
1.03.1.03.01.01.23	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				-	348,350,310		-		-		-				
1.03.1.03.01.01.23.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan				-	348,350,310		-		-		-				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	-	-	-	27.450.673,95		1.610.955,557		5,87		1.610.955,557		1,89		
		Persentase panjang jalan dalam kondisi sedang	-	-	-							-				
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	-	-	-							-				
1.03. 1.03.01.01. 24	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				-	27.450.673,957		1.610.955,557		5,87		1.610.955,557				
1.03. 1.03.01.01. 24.05	Pembangunan Jalan				-	10.356.809,000		-		-		-				
1.03. 1.03.01.01. 24.09	Rehabilitasi Jalan				-	6.654.265,147		160.857,000		2,42		160.857,000				
1.03. 1.03.01.01. 24.11	Pemeliharaan Rutin Jalan				-	8.138.670,240		1.370.494,557		16,84		1.370.494,557				
1.03. 1.03.01.01. 24.18	Rehabilitasi Jembatan				-	1.852.229,873		75.234,000		4,06		75.234,000				
1.03. 1.03.01.01. 24.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				-	448.699,697		4.370,000		0,97		4.370,000				
												-				
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	-	-	-	252.806,435		5,150,000		2,04		5,150,000		0,67		
1.03. 1.03.01.01. 25	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				-	114.233,830		-		-		-				
1.03. 1.03.01.01. 25.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				-	114.233,830		-		-		-				
1.03. 1.03.01.01. 26	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-	24.736,646		5.150,000		20,82		5.150,000				
1.03. 1.03.01.01. 26.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				-	24.736,646		5.150,000		20,82		5.150,000				
1.03. 1.03.01.01. 28	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				-	113.835,959		-		-		-				
1.03. 1.03.01.01. 28.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				-	113.835,959		-		-		-				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun	-	-	-	1,398,863,220		2,468,000		0.18		2,468,000		0.06		
1.03.1.03.01.01.29	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				-	1,343,914,040		450,000		0.03		450,000				
1.03.1.03.01.01.29.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				-	434,716,300		-		-		-				
1.03.1.03.01.01.29.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				-	909,197,740		450,000		0.05		450,000				
1.03.1.03.01.01.32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				-	54,949,180		2,018,000		3.67		2,018,000				
1.03.1.03.01.01.32.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				-	54,949,180		2,018,000		3.67		2,018,000				
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					2,071,250,203	16,834,578,301	5,500,140,424	327,503,248	5.95		17,162,081,549		29.71		
1.04.1.04.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	801,596,834	735,328,643		-		-			735,328,643		91.73		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	100									-				
1.04.1.04.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	40 orang	1,097,279,904	716,723,643		-		-		-	716,723,643				
1.04.1.04.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	7 Dokumen	34218,580	18,605,000		-		-		-	18,605,000				
1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	-	-	852,390,826		-		-		-	852,390,826		103.46		
1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42,608,000		-		-		-	42,608,000				
1.04.1.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				7,553,700		-		-		-	7,553,700				
1.04.1.04.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12,000,000		-		-		-	12,000,000				
1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				108,812,350		-		-		-	108,812,350				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				62.638,300		-		-		-		62.638,300			
1.04.1.04.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				63.695,450		-		-		-		63.695,450			
1.04.1.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				14,400,000		-		-		-		14,400,000			
1.04.1.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman				96.133,150		-		-		-		96.133,150			
1.04.1.04.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				191.805,675		-		-		-		191.805,675			
1.04.1.04.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah				86.810,000		-		-		-		86.810,000			
1.04.1.04.01.01.20	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				15,000,000		-		-		-		15,000,000			
1.04.1.04.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan				100,234,200		-		-		-		100,234,200			
1.04.1.04.01.01.22	Penyediaan Jasa Publikasi				50,700,001		-		-		-		50,700,001			
													-			
1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	308,320,922		-		-		-		308,320,922		145.31	
1.04.1.04.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				-		-		-		-		-			
1.04.1.04.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				-		-		-		-		-			
1.04.1.04.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor				108,200,000		-		-		-		108,200,000			
1.04.1.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional				147,500,922		-		-		-		147,500,922			
1.04.1.04.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor				52,620,000		-		-		-		52,620,000			
													-			
1.04.1.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-	34,254,200		-		-		-		34,254,200		105.11	
1.04.1.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				34,254,200		-		-		-		34,254,200			
													-			
1.04.1.04.01.23	Program Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	40%	1,119,050,369	1,703,837,376		-		-		-		1,703,837,376		76.88	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.04.1.04.01.23.01	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan RTLH yang terbangun	1 dokumen	413,547,640	591,507,652		-		-		-		591,507,652			
1.04.1.04.01.23.02	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (Penunjang DAK)				149,654,554		-		-		-		149,654,554			
1.04.1.04.01.23.05	Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana kawasan permukiman				82,720,000		-		-		-		82,720,000			
1.04.1.04.01.23.06	Pengelolaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Susun	Jumlah Rehab dan Pemeliharaan n Rumah Susun (unit)	1 lokasi	373,568,558	312,069,145		-		-		-		312,069,145			
1.04.1.04.01.23.07	Perencanaan dan Kebijakan perumahan dan kawasan permukiman (DID)				166,380,000		-		-		-		166,380,000			
1.04.1.04.01.01.26.06	Fasilitasi Pengelolaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rusun (COVID19-New Normal)				174,292,175		-		-		-		174,292,175			
1.04.1.04.01.01.26.07	Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (COVID19-New Normal)				227,213,850		-		-		-		227,213,850			
													-			
1.04.1.04.01.24	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	47.75%	150,603,000	380,006,444		-		-		-		380,006,444		127.41	
1.04.1.04.01.24.01	Pendampingan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)				54,425,579		-		-		-		54,425,579			
1.04.1.04.01.24.02	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)				96,295,959		-		-		-		96,295,959			
1.04.1.04.01.24.03	Pengembangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Laporan penujung kota tanpa kumuh (kotaku)	1 dokumen	65,901,775	22,324,014		-		-		-		22,324,014			
1.04.1.04.01.01.27.03	Pengembangan Komunitas Perumahan dan Kawasan Permukiman				10,982,842		-		-		-		10,982,842			
1.04.1.04.01.01.27.04	Fasilitasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (COVID19-New Normal)	Jumlah laporan pelaksanaan PAMSIMAS	1 dokumen	61,700,195	95,187,550		-		-		-		95,187,550			
1.04.1.04.01.01.27.05	Fasilitasi Pencegahan Kawasan Kumuh (COVID19-New Normal)				47,367,500		-		-		-		47,367,500			
1.04.1.04.01.01.27.06	Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Pedesaan (COVID19-New Normal)				53,423,000		-		-		-		53,423,000			
													-			
1.04.1.04.01.25	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah					12,820,439,890		-			-		12,820,439,890			
1.04.1.04.01.25.01	Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah					6,290,437,090		-			-		6,290,437,090			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.04.1.04.01.25.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Jumlah peserta sosialisasi dan Penyuluhan PTSL	40	19.828.883	25.070.000		-		-		-		25.070.000			
1.04.1.04.01.25.05	Penatagunan Tanah				61.660.000		-		-		-		61.660.000			
1.04.1.04.01.25.06	Koordinasi dan Fasilitasi sengketa pertanahan (DID)				92.564.000		-		-		-		92.564.000			
1.04.1.04.01.25.07	Pengadaan dan Pesertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah (Pajak Rokok)				40.295.000		-		-		-		40.295.000			
1.04.1.04.01.01.25.08	Pengadaan Tanah	Tersedianya pengadaan Tanah	2000 m2	4.335.703.050	6.309.413.800		-		-		-		6.309.413.800			
1.04.1.04.01.01.25.10	Koordinasi dan Fasilitasi Sengketa Pertanahan	Jumlah penanganan sengketa tanah	2	64.125.826	1.000.000		-		-		-		1.000.000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		993.220.443		305.202.649		30.73		305.202.649		2.33	
		Keputusan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
1.04.1.04.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			-		15.818.400		-		-		-			
1.04.1.04.01.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-		10.725.000		-		-		-			
1.04.1.04.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-		5.093.400		-		-		-			
1.04.1.04.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		377.537.188		72.466.700		19.19		72.466.700			
1.04.1.04.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		21.151.405		-		-		-			
1.04.1.04.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		140.651.608		39.193.500		27.87		39.193.500			
1.04.1.04.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		34.759.175		9.520.200		27.39		9.520.200			
1.04.1.04.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		8.870.000		3.350.000		37.77		3.350.000			
1.04.1.04.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		172.105.000		20.403.000		11.85		20.403.000			
1.04.1.04.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		75.273.000		-		-		-			
1.04.1.04.01.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		75.273.000		-		-		-			
1.04.1.04.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		322.332.595		152.435.259		47.29		152.435.259			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.04 . 1.04.01.01 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		71.639,365		20.851,684		29.11		20.851,684			
1.04 . 1.04.01.01 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		250.693,230		131.583,575		52.49		131.583,575			
1.04 . 1.04.01.01 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		202.259,260		80.300,690		39.70		80.300,690			
1.04 . 1.04.01.01 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		172.009,260		72.390,190		42.09		72.390,190			
1.04 . 1.04.01.01 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		30.250,000		7.910,500		26.15		7.910,500			
													-			
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	-	-	-		228,026,923		149,678,048		65.64		149,678,048		21.34	
		jumlah rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana	-	-									-			
		Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	-	-									-			
1.04 . 1.04.01.01 .19	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				-		228,026,923		149,678,048		65.64		149,678,048			
1.04 . 1.04.01.01 .19.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				-		168,230,700		90,834,048		53.99		90,834,048			
1.04 . 1.04.01.01 .19.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				-		59,796,223		58,844,000		98.41		58,844,000			
													-			
	Program Kawasan Pemukiman	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	-	-			730,000,000		93,007,650		12.74		93,007,650		0.64	
1.04 . 1.04.01.01 .23	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				-		250,000,000		-		-		-			
1.04 . 1.04.01.01 .23.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				-		250,000,000		-		-		-			
1.04 . 1.04.01.01 .24	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				-		480,000,000		93,007,650		19.38		93,007,650			
1.04 . 1.04.01.01 .24.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				-		325,000,000		39,466,810		12.14		39,466,810			
1.04 . 1.04.01.01 .24.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				-		155,000,000		53,540,840		34.54		53,540,840			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Jumlah kawasan kumuh baru yang tumbuh	-	-	-	68.891.000	9.175.000	13.32	9.175.000	0.13						
1.04 . 1.04.01.01 .25	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				-	68.891.000	9.175.000	13.32	9.175.000							
1.04 . 1.04.01.01 .25.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				-	68.891.000	9.175.000	13.32	9.175.000							
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	-	-	-	473.222.501	69.818.500	14.75	69.818.500	4.80						
1.04 . 1.04.01.01 .26	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				-	473.222.501	69.818.500	14.75	69.818.500							
1.04 . 1.04.01.01 .26.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				-	100.000.139	-	-	-							
1.04 . 1.04.01.01 .26.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				-	184.796.362	23.318.500	12.62	23.318.500							
1.04 . 1.04.01.01 .26.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				-	188.426.000	46.500.000	24.68	46.500.000							
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Orang/Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU Tingkat Kemampuan Kecil	-	-	-	4.000.000.000	5.824.050	0.15	5.824.050	1.89						
2.04 . 1.04.01.01 .19	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	4.000.000.000	5.824.050	0.15	5.824.050							
2.04 . 1.04.01.01 .19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	4.000.000.000	5.824.050	0.15	5.824.050							
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				6.825.978.514	13.117.711.489	4.067.136.633	1.135.433.508	27.92	14.253.144.997	27.87					

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05.1.05.02.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	2,337,693,474	2,811,852,667		-		-		-		2,811,852,667			
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80	-									-		-	Satpol PP
1.05.1.05.02.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				2,644,110,167		-		-		-		2,644,110,167			
1.05.1.05.02.01.08.03	HUT dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja				7,442,500		-		-		-		7,442,500			
1.05.1.05.02.01.08.04	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)				160,300,000		-		-		-		160,300,000			
													-			
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	-	-	671,633,568		-		-		-		671,633,568		102.87	
1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				50,254,012		-		-		-		50,254,012			
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				24,000,000		-		-		-		24,000,000			
1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				39,794,118		-		-		-		39,794,118			
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				13,920,182		-		-		-		13,920,182			
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				11,464,728		-		-		-		11,464,728			
1.05.1.05.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				4,162,000		-		-		-		4,162,000			
1.05.1.05.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3,330,000		-		-		-		3,330,000			
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				34,571,400		-		-		-		34,571,400			
1.05.1.05.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				174,787,128		-		-		-		174,787,128			
1.05.1.05.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah				45,350,000		-		-		-		45,350,000			
1.05.1.05.02.01.25	Penyediaan Jasa Publikasi				15,000,000		-		-		-		15,000,000			
1.05.1.05.02.01.26	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				255,000,000		-		-		-		255,000,000			
													-			
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	1,946,058,071		-		-		-		1,946,058,071		108.68	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05.1.05.02.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				1.497.000.000		-		-		-		1.497.000.000			
1.05.1.05.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				64.865.000		-		-		-		64.865.000			
1.05.1.05.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				208.689.869		-		-		-		208.689.869			
1.05.1.05.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				25.603.202		-		-		-		25.603.202			
1.05.1.05.02.02.47	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Pajak Rokok)				149.900.000		-		-		-		149.900.000			
													-			
1.05.1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	-	-	601,976,000		-		-		-		601,976,000		89.43	
1.05.1.05.02.05.09	Pelaksanaan peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja				519.201.000		-		-		-		519.201.000			
1.05.1.05.02.05.10	Pelaksanaan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja (Pajak Rokok)				82.775.000		-		-		-		82.775.000			
													-			
1.05.1.05.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertraman Masyarakat	-	-	951,114,899		-		-		-		951,114,899		48.13	
1.05.1.05.02.16.15	Sosialisasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Pajak Rokok)				-		-		-		-		-			
1.05.1.05.02.16.16	Pengamanan, Pengawasan dan Patroli Wilayah (DID)				342.645.000		-		-		-		342.645.000			
1.05.1.05.02.16.18	Pendukung Pelaksanaan Pileg dan Pilpres				90.844.025		-		-		-		90.844.025			
1.05.1.05.02.16.19	Pelatihan Penanggulangan Kebakaran (Pajak Rokok)				193.250.000		-		-		-		193.250.000			
1.05.1.05.02.16.20	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pajak Rokok)				324.375.874		-		-		-		324.375.874			
1.05.1.05.02.16.21	Pencegahan Bahaya Kebakaran				-		-		-		-		-			
													-			
1.05.1.05.02.01.29	Program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	70%	1,123,682,800	269,875,840		-		-		-		269,875,840		24.02	
1.05.1.05.02.01.29.01	Pengamanan, Pengawasan dan Patroli Wilayah				235.279.840		-		-		-		235.279.840			
1.05.1.05.02.01.29.03	Pembeberdayaan Perlindungan Masyarakat				34.596.000		-		-		-		34.596.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05.1.05.02.23	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	Presentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	70%	707,214,603	1,311,355,460		-		-		-		1,311,355,460		93.63	
1.05.1.05.02.23.01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS (Pajak Rokok)				221,007,700		-		-		-		221,007,700			
1.05.1.05.02.23.02	Pembinaan dan Pengawasan Perda dan Perkada (Pajak Rokok)				350,645,350		-		-		-		350,645,350			
1.05.1.05.02.23.03	Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada (DID)				114,098,899		-		-		-		114,098,899			
1.05.1.05.02.23.04	Penyuluhan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Pajak Rokok)				53,693,000		-		-		-		53,693,000			
1.05.1.05.02.23.05	Pencegahan Pelanggaran Peraturan Daerah Melalui Pembentukan KADARKUMDA (Pajak Rokok)				203,728,301		-		-		-		203,728,301			
1.05.1.05.02.01.23.06	Pemberantasan Rokok Ilegal				368,182,210		-		-		-		368,182,210			
1.05.1.05.02.01.30	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Persentase respontime terhadap laporan kejadian kebakaran	80%	500,000,000	838,026,050		-		-		-		838,026,050		167.61	
1.05.1.05.02.01.30.01	Peningkatan Pencegahan Kejadian Kebakaran				422,700,000		-		-		-		422,700,000			
1.05.1.05.02.01.30.02	Pelayanan Penanganan Kebakaran				415,326,050		-		-		-		415,326,050			
1.05.1.05.03.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	542,920,821	644,305,263		-		-		-		644,305,263		118.67	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80%	-	-		-		-		-		-			
1.05.1.05.03.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				635,555,263		-		-		-		635,555,263			
1.05.1.05.03.01.08.04	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)				8,750,000		-		-		-		8,750,000			
1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	277,968,555		-		-		-		277,968,555		96.61	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				19,077,555		-		-		-		19,077,555			
1.05.1.05.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				12,000,000		-		-		-		12,000,000			
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				48,861,000		-		-		-		48,861,000			
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				24,379,500		-		-		-		24,379,500			
1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5,991,800		-		-		-		5,991,800			
1.05.1.05.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				11,156,950		-		-		-		11,156,950			
1.05.1.05.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				4,440,000		-		-		-		4,440,000			
1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				8,742,000		-		-		-		8,742,000			
1.05.1.05.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				129,929,750		-		-		-		129,929,750			
1.05.1.05.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah				13,390,000		-		-		-		13,390,000			
1.05.1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	-	-	158,539,598		-		-		-		158,539,598		93.56	
1.05.1.05.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				9,721,085		-		-		-		9,721,085			
1.05.1.05.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				135,401,013		-		-		-		135,401,013			
1.05.1.05.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12,125,000		-		-		-		12,125,000			
1.05.1.05.03.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				1,292,500		-		-		-		1,292,500			
1.05.1.05.03.24	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Prosentase korban bencana yang tertangani	-	-	124,212,500		-		-		-		124,212,500		71.97	
1.05.1.05.03.24.01	Pengadaan Logistik Kebencanaan				-		-		-		-		-			
1.05.1.05.03.24.05	Penanganan Bencana Alam				124,212,500		-		-		-		124,212,500			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDS/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDS/d Tahun 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDS/d (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDS/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05.1.05.03.25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan rumah yang rusak akibat bencana alam	-	-	49,754,950	-	-	-	-	-	-	49,754,950	-	-	32.78	
1.05.1.05.03.25.01	Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana Alam				-							-				
1.05.1.05.03.25.02	Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana Bidang Sosbud dan Ekonomi				49,754,950							49,754,950				
1.05.1.05.03.26	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	-	-	800,037,617	-	-	-	-	-	-	800,037,617	-	-	155.36	
1.05.1.05.03.26.01	Pembentukan/Pengembangan Desa Tangguh di Daerah Rawan Bencana				295,912,600							295,912,600				
1.05.1.05.03.26.03	Pelatihan Siaga Bencana				58,131,517							58,131,517				
1.05.1.05.03.26.04	Pembentukan/Pengembangan Sekolah/Madrasah Aman Bencana				33,765,000							33,765,000				
1.05.1.05.03.26.05	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam				297,273,500							297,273,500				
1.05.1.05.03.26.06	Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (Pajak Rokok)				114,955,000							114,955,000				
1.05.1.05.03.01.28	Program Penanggulangan Bencana	Persentase informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti	100%	1,614,466,816	1,661,000,451	-	-	-	-	-	-	1,661,000,451	-	-	102.88	
1.05.1.05.03.01.28.01	Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana				858,104,451							858,104,451				
1.05.1.05.03.01.28.02	Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana				316,084,000							316,084,000				
1.05.1.05.03.01.28.03	Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana				7,622,000							7,622,000				
1.05.1.05.03.01.28.04	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Pada Masa Pandemi Covid-19				55,750,000							55,750,000				
1.05.1.05.03.01.28.05	Kedaruratan dan Logistik Pada Masa Pandemi Covid-19				423,440,000							423,440,000				
												-				
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	883,179,710			335,756,510			335,756,510			1.80	SATPOL PP
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-							-				
1.05.1.05.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	65,149,695			-			-				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05.1.05.01.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-		65,149,695		-		-		-			
1.05.1.05.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		197,034,700		-		-		-			
1.05.1.05.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		197,034,700		-		-		-			
1.05.1.05.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		186,350,000	71,856,067		38.56		71,856,067				
1.05.1.05.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		7,000,000	3,287,735		46.97		3,287,735				
1.05.1.05.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		61,500,000	7,930,000		12.89		7,930,000				
1.05.1.05.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		14,200,000	1,100,000		7.75		1,100,000				
1.05.1.05.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		14,450,000	7,224,332		50.00		7,224,332				
1.05.1.05.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		3,600,000	1,740,000		48.33		1,740,000				
1.05.1.05.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		85,600,000	50,574,000		59.08		50,574,000				
1.05.1.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		303,645,315	199,697,469		65.77		199,697,469				
1.05.1.05.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		85,687,315	49,697,469		58.00		49,697,469				
1.05.1.05.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		7,558,000	3,500,000		46.31		3,500,000				
1.05.1.05.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		210,400,000	146,500,000		69.63		146,500,000				
1.05.1.05.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		131,000,000	64,202,974		49.01		64,202,974				
1.05.1.05.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		131,000,000	64,202,974		49.01		64,202,974				
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan	-	-	-		1,065,588,734	97,060,000		9.11		97,060,000		2.45		
		Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	-	-								51,830,000				
1.05.1.05.01.01.15	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		1,034,014,734	86,260,000		8.34		86,260,000				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05 . 1.05.01.01 .15.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah				-		347,177,000		41,030,000		11.82		41,030,000			
1.05 . 1.05.01.01 .15.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				-		55,000,000		-		-		-			
1.05 . 1.05.01.01 .15.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				-		152,823,000		-		-		-			
1.05 . 1.05.01.01 .15.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				-		5,588,734		-		-		-			
1.05 . 1.05.01.01 .15.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				-		331,200,000		25,420,000		7.68		25,420,000			
1.05 . 1.05.01.01 .15.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada				-		142,226,000		19,810,000		13.93		19,810,000			
1.05 . 1.05.01.01 .17	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				-		31,574,000		10,800,000		34.21		10,800,000			
1.05 . 1.05.01.01 .17.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				-		31,574,000		10,800,000		34.21		10,800,000			
	Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kasus kebakaran yang tertangani	-	-	-		796,163,205		244,000,000		30.65		244,000,000		7.05	
		Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	-	-	-											
1.05 . 1.05.01.01 .23	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-		488,163,205		-		-		-			
1.05 . 1.05.01.01 .23.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-		250,000,000		-		-		-			
1.05 . 1.05.01.01 .23.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				-		238,163,205		-		-		-			
1.05 . 1.05.01.01 .26	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				-		308,000,000		244,000,000		79.22		244,000,000			
1.05 . 1.05.01.01 .26.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				-		308,000,000		244,000,000		79.22		244,000,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		605,309,341		201,413,326		33.27		201,413,326		2.60	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-											
1.05.1.05.02.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		98,750,850		-		-		-			
1.05.1.05.02.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		98,750,850		-		-		-			
1.05.1.05.02.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		231,998,798		94,684,125		40.81		94,684,125			
1.05.1.05.02.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		3,215,465		3,215,465		100.00		3,215,465			
1.05.1.05.02.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		31,297,420		30,910,000		98.76		30,910,000			
1.05.1.05.02.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		6,102,635		-		-		-			
1.05.1.05.02.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		67,956,288		28,825,760		42.42		28,825,760			
1.05.1.05.02.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		12,992,990		4,951,900		38.11		4,951,900			
1.05.1.05.02.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		4,680,000		1,240,000		26.50		1,240,000			
1.05.1.05.02.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		105,754,000		25,541,000		24.15		25,541,000			
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		304,623,836		121,976,148		40.04		121,976,148			
1.05.1.05.02.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		600,000		-		-		-			
1.05.1.05.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		79,198,836		33,976,148		42.90		33,976,148			
1.05.1.05.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		224,825,000		88,000,000		39.14		88,000,000			
1.05.1.05.02.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		273,959,693		106,729,201		38.96		106,729,201			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05.1.05.02.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		225.410.000		100.109.201		44.41		100.109.201			
1.05.1.05.02.01.09.05	Pemeliharaan Mebel				-		2.090.000		2.080.000		99.52		2.080.000			
1.05.1.05.02.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		22.511.148		4.540.000		20.17		4.540.000			
1.05.1.05.02.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		23.948.545		-		-		-			
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk	-	-	-		716.895.643		257.203.672		35.88		257.203.672		7.53	
		Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	-	-												
		Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	-	-												
1.05.1.05.02.01.20	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				-		716.895.643		257.203.672		35.88		257.203.672			
1.05.1.05.02.01.20.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota				-		587.429.880		242.478.172		41.28		242.478.172			
1.05.1.05.02.01.20.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				-		34.043.763		14.725.500		43.25		14.725.500			
1.05.1.05.02.01.20.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				-		95.422.000		-		-		-			
	Urusan Sosial						3.634.540.169		6.050.965.445		20.67		6.639.678.491		20.06	
1.06.1.06.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	438.342.285	603.544.146		-		-		-		603.544.146		137.69	Dinas Sosial
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	70	-									-			
1.06.1.06.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana						485.227.831		-		-		485.227.831			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDS/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDS Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDS Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDS (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDS/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.06.1.06.01.01.08.03	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)				118.316.315		-		-		-		118.316.315			
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhi kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			485.082.080		-		-		-		485.082.080		110.81	
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				491.800		-		-		-		491.800			
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				37.929.541		-		-		-		37.929.541			
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				42.583.900		-		-		-		42.583.900			
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				9.641.700		-		-		-		9.641.700			
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				6.977.000		-		-		-		6.977.000			
1.06.1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				5.158.000		-		-		-		5.158.000			
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3.600.000		-		-		-		3.600.000			
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				17.725.350		-		-		-		17.725.350			
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				162.667.089		-		-		-		162.667.089			
1.06.1.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				55.132.000		-		-		-		55.132.000			
1.06.1.06.01.01.23	Penyediaan Jasa Keamanan				101.175.700		-		-		-		101.175.700			
1.06.1.06.01.01.25	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				42.000.000		-		-		-		42.000.000			
													-			
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi			145.143.057		-		-		-		145.143.057		98.97	
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				20.268.200		-		-		-		20.268.200			
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				89.120.757		-		-		-		89.120.757			
1.06.1.06.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				1.025.000		-		-		-		1.025.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.06.1.06.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/ Printer/ AC dan Mesin Tik)				11.000,000		-		-		-		11.000,000			
1.06.1.06.01.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala Taman dan Satwa Kantor				23.729,100		-		-		-		23.729,100			
													-			
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	89.16%	556.398,146	79.958,402		-		-		-		79.958,402		13.07	
1.06.1.06.01.15.03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin				17.286,300		-		-		-		17.286,300			
1.06.1.06.01.15.09	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Bina Swadaya Masyarakat				62.672,102		-		-		-		62.672,102			
													-			
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	0.14%	1.875.008,256	1.494.971,090		-		-		-		1.494.971,090		64.30	
1.06.1.06.01.16.18	Rehabilitasi Penyandang Disabilitas				229.890,280		-		-		-		229.890,280			
1.06.1.06.01.16.19	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia				47.982,500		-		-		-		47.982,500			
1.06.1.06.01.16.20	Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang				76.866,500		-		-		-		76.866,500			
1.06.1.06.01.16.22	Pemberdayaan dan Permukiman Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Panti Weda				487.707,380		-		-		-		487.707,380			
1.06.1.06.01.16.25	Pemberian Santunan Anak Yatim (Pajak Rokok)				145.820,125		-		-		-		145.820,125			
1.06.1.06.01.16.25	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakmis dan anak yatim piatu				172.238,490		-		-		-		172.238,490			
1.06.1.06.01.16.26	Pemberian santunan kepada Yatim Piatu dalam rangka penanganan covid-19				334.465,815		-		-		-		334.465,815			
													-			
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	114.791,481	223.055,770		-		-		-		223.055,770		98.12	
1.06.1.06.01.21.07	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Orsos dan Lansia				123.352,020		-		-		-		123.352,020			
1.06.1.06.01.21.17	Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan, Retorasi Sosial dan Pendampingan				26.803,750		-		-		-		26.803,750			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.06.1.06.01.01.21.18	Pembinaan dan Pemberdayaan PSKS Penanganan Covid-19				67.500.000		-		-		-		67.500.000			
1.06.1.06.01.01.21.19	Bantuan Janda Perintis Kemerdekaan di masa pandemi covid-19				5.400.000		-		-		-		5.400.000			
1.06.1.06.01.24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	89.16%	650.000.000	3.019.210.900		-		-		-		3.019.210.900		136.81	
1.06.1.06.01.24.05	Verifikasi dan Validasi Bases Data Terpadu (BDT) Penanganan Kemiskinan				42.868.600		-		-		-		42.868.600			
1.06.1.06.01.24.06	Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH)				422.973.500		-		-		-		422.973.500			
1.06.1.06.01.24.07	Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)				220.239.200		-		-		-		220.239.200			
1.06.1.06.01.24.18	Penanganan dan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam				246.505.850		-		-		-		246.505.850			
1.06.1.06.01.24.20	Penanganan Korban Bencana Sosial				448.132.100		-		-		-		448.132.100			
1.06.1.06.01.24.21	Pemutakhiran data program Jaminan Sosial PBIID				82.375.700		-		-		-		82.375.700			
1.06.1.06.01.24.22	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)				366.468.100		-		-		-		366.468.100			
1.06.1.06.01.24.23	Penunjang Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat				138.983.700		-		-		-		138.983.700			
1.06.1.06.01.24.24	verifikasi, validasi dan pemutakhiran Basis data perlindungan sosial				12.030.000		-		-		-		12.030.000			
1.06.1.06.01.24.27	Penunjang Kegiatan bantuan sosial masyarakat dalam rangka penanganan covid-19				93.484.000		-		-		-		93.484.000			
1.06.1.06.01.24.28	Penanganan Korban bencana alam di masa pandemi covid-19				135.750.000		-		-		-		135.750.000			
1.06.1.06.01.24.29	verifikasi, validasi dan pemutakhiran basis data perlindungan sosial penanganan covid-19				289.369.650		-		-		-		289.369.650			
1.06.1.06.01.24.30	Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan covid-19				381.420.500		-		-		-		381.420.500			
1.06.1.06.01.24.31	Penanganan Korban bencana Sosial Penanganan Covid-19				138.610.000		-		-		-		138.610.000			
	Program penunjang urusan pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		407.696.339		95.753.596		23.49		95.753.596		0.73	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	daerah kabupaten/kota	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-												
1.06.1.06.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	62.364.666	11.471.940	18.39	11.471.940							
1.06.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-	3.406.800	1.928.340	56.60	1.928.340							
1.06.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	30.028.050	494.500	1.65	494.500							
1.06.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-	2.463.150	1.198.600	48.66	1.198.600							
1.06.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-	5.270.626	1.060.000	20.11	1.060.000							
1.06.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-	3.600.000	1.200.000	33.33	1.200.000							
1.06.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	17.596.040	5.590.500	31.77	5.590.500							
1.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	247.607.710	53.300.990	21.53	53.300.990							
1.06.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	300.000	-	-	-							
1.06.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-	53.053.880	18.500.990	34.87	18.500.990							
1.06.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	194.253.830	34.800.000	17.91	34.800.000							
1.06.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	97.723.963	30.980.666	31.70	30.980.666							
1.06.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	91.403.963	28.108.848	30.75	28.108.848							
1.06.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel				-	500.000	-	-	-							
1.06.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	4.320.000	2.871.818	66.48	2.871.818							
1.06.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	1.500.000	-	-	-							

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-	-	-	481,514,638		7,000,000		1.45		7,000,000		0.27		
		Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	-	-	-											
1.06. 1.06.01.01.15	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				-	135,852,934		-		-		-				
1.06. 1.06.01.01.15.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT				-	135,852,934		-		-		-				
1.06. 1.06.01.01.17	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				-	345,661,704		7,000,000		2.03		7,000,000				
1.06. 1.06.01.01.17.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				-	28,300,000		-		-		-				
1.06. 1.06.01.01.17.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				-	317,361,704		7,000,000		2.21		7,000,000				
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	-	-	-	880,239,673		7,000,000		0.80		7,000,000		0.13		
1.06. 1.06.01.01.19	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				-	90,306,640		2,000,000		2.21		2,000,000				
1.06. 1.06.01.01.19.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				-	90,306,640		2,000,000		2.21		2,000,000				
1.06. 1.06.01.01.20	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				-	789,933,033		5,000,000		0.63		5,000,000				
1.06. 1.06.01.01.20.03	Penyediaan Perumahan				-	201,532,980		-		-		-				
1.06. 1.06.01.01.20.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				-	151,745,940		-		-		-				
1.06. 1.06.01.01.20.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				-	344,396,313		5,000,000		1.45		5,000,000				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.06.1.06.01.01.20.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				-		92.257.800		-		-		-			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	-	-	-		796.705.830		23.280.000		2.92		23.280.000		0.64	
1.06.1.06.01.01.22	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-		796.705.830		23.280.000		2.92		23.280.000			
1.06.1.06.01.01.22.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-		213.921.975		-		-		-			
1.06.1.06.01.01.22.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-		264.385.229		-		-		-			
1.06.1.06.01.01.22.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				-		318.398.626		23.280.000		7.31		23.280.000			
													-			
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana	-	-	-		282.527.819		455.679.450		161.29		455.679.450		24.22	BPBD
		Persentase personil Tenaga yang dibina	-	-									-			
		Persentase korban bencana sosial yang difasilitasi	-	-									-			
1.06.1.06.01.01.23	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				-		40.350.000		364.326.100		902.91		364.326.100			
1.06.1.06.01.01.23.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				-		40.350.000		364.326.100		902.91		364.326.100			
1.06.1.06.01.01.24	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				-		242.177.819		91.353.350		37.72		91.353.350			
1.06.1.06.01.01.24.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				-		242.177.819		91.353.350		37.72		91.353.350			
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAJIAN DENGAN PELAYANAN DASAR												-			
	Urusan Tenaga Kerja						8,919,121,337	3,372,087,093	1,922,127,715		5.98		3,487,011,596		9.18	
2.01.2.01.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	754,536,418	783,278,110		-		-		-		783,278,110		103.81	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80	-												
2.01.2.01.01.01.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	12	555.536.418	665.645.110								665.645.110			
2.01.2.01.01.01.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	13	199.000.000	117.633.000								117.633.000			
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi	-	-	662.728.885								662.728.885		104.33	
2.01.2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase Jasa Surat menyurat yang didanai			109.000								109.000			
2.01.2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase Jasa-jasa yang tersedia			54.986.078								54.986.078			
2.01.2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase Jasa Kebersihan yang tersedia			103.424.500								103.424.500			
2.01.2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase ATK yang tersedia			53.880.350								53.880.350			
2.01.2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia			10.326.650								10.326.650			
2.01.2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia			3.680.600								3.680.600			
2.01.2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase Bahan Bacaan dan Peraturan yang tersedia			4.136.000								4.136.000			
2.01.2.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Makan dan minum yang tersedia			14.365.000								14.365.000			
2.01.2.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase Rapat luar daerah yang didanai			202.222.007								202.222.007			
2.01.2.01.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah				59.540.000								59.540.000			
2.01.2.01.01.01.23	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase Jasa Keamanan yang didanai			125.563.700								125.563.700			
2.01.2.01.01.01.24	Penyediaan Jasa Instruktur Senam	Prosentase Jasa Instruktur Senam yang didanai			495.000								495.000			
2.01.2.01.01.01.25	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Prosentase Jasa Penunjang Kinerja SKPD yang didanai			30.000.000								30.000.000			
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	-	-	170.096.843								170.096.843		61.90	
2.01.2.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedai			1.320.000								1.320.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.01.2.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Prosentase Pengadaan Peralatan Gedung			12.650.000		-		-		-		12.650.000			
2.01.2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase Pemeliharaan Gedung			46.416.303		-		-		-		46.416.303			
2.01.2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas			72.077.540		-		-		-		72.077.540			
2.01.2.01.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Prosentase Pemeliharaan Mebeleur			370.000		-		-		-		370.000			
2.01.2.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/ Printer/ AC dan Mesin Ketik)	Prosentase Pemeliharaan Alat Kantor			37.263.000		-		-		-		37.263.000			
													-			
2.01.2.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	-	-	78.528.000		-		-		-		78.528.000		81.86	
2.01.2.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun sesuai peraturan yang berlaku			76.428.000		-		-		-		76.428.000			
2.01.2.01.01.06.07	Penilaian Angka Kredit	Jumlah Tenaga Fungsional yang ternila			2.100.000		-		-		-		2.100.000			
													-			
2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	73%	1,182,510,567	30,096,300		-		-		-		30,096,300		2.01	
2.01.2.01.01.15.11	Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Berbasis Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan yang bersertifikas	128	1.057.510.567	-		-		-		-		-			
2.01.2.01.01.15.19	Pelatihan untuk Peningkatan Produktivitas Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pemantuan Produktivitas Kerja			-		-		-		-		-			
2.01.2.01.01.15.23	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	60	35.000.000	30.096.300		-		-		-		30.096.300			
2.01.2.01.01.15.24	Pelatihan dan Pemantuan Peningkatan Produktivitas Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pemantuan Produktivitas Kerja	180	90.000.000	-		-		-		-		-			
													-			
2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	68%	1,332,943,572	569,840,000		-		-		-		569,840,000		26.51	
2.01.2.01.01.16.11	Pelatihan Pengelolaan Edukasi Remiten bagi Keluarga TKI	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Keluarga TKI yang Mandiri	1000	333.673.250	-		-		-		-		-			
2.01.2.01.01.16.22	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang terlayani Bimbingan Jabatan	2500	532.372.000	-		-		-		-		-			
2.01.2.01.01.16.24	Pendataan Pengangguran	Jumlah Data Pengangguran			375.535.000		-		-		-		375.535.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.01.2.01.01.16.25	Penciptaan Wirausaha Baru				57.180.000		-		-		-		57.180.000			
2.01.2.01.01.16.26	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja (DID)	Jumlah Peserta Sosialisasi Prosedur Tenaga Kerja AKAD/AKAN			137.125.000		-		-		-		137.125.000			
2.01.2.01.01.16.10	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	160	466.898.312	-		-		-		-		-			
2.01.2.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Sengketa perusahaan-pekerja per tahun (%)	80	439.570.117	271.741.550		-		-		-		271.741.550		31.22	
2.01.2.01.01.17.19	Peningkatan Kapasitas Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Pembinaan Kapasitas Lembaga			26.099.000		-		-		-		26.099.000			
2.01.2.01.01.17.20	Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	Jumlah LKS Tripartit yang aktif			66.402.250		-		-		-		66.402.250			
2.01.2.01.01.17.21	Pendataan dan Validasi Data Ketenagakerjaan	Jumlah data ketenagakerjaan yang divalidas			-		-		-		-		-			
2.01.2.01.01.17.22	Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan (DID)				44.168.000		-		-		-		44.168.000			
2.01.2.01.01.17.23	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan (DID)				39.274.500		-		-		-		39.274.500			
2.01.2.01.01.17.24	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (DID)				54.218.000		-		-		-		54.218.000			
2.01.2.01.01.17.15	Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	20	312.570.117	13.478.500		-		-		-		13.478.500			
2.01.2.01.01.17.16	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah Syarat Kerja dan PP/PKB yang disusun	30	55.000.000	2.585.000		-		-		-		2.585.000			
2.01.2.01.01.17.18	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten	Jumlah Rumusan Kebijakan/Rekomendasi terkait UMK	1	72.000.000	25.516.300		-		-		-		25.516.300			
2.01.2.01.01.20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketenagakerjaan (CUKAI)	Jumlah peserta pelatihan yang terseleksi sesuai ketentuan	-	-	805.777.405		-		-		-		805.777.405		261.30	
2.01.2.01.01.20.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Cukai)	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Kerja			805.777.405		-		-		-		805.777.405			
2.01.2.01.01.18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Tenaga Kerja (CUKAI)	Persentase peserta pelatihan yang mandiri	65%	1.500.000.000	-		-		-		-		-			
2.01.2.01.01.18.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Cukai)	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Kerja yang bersertifikat	156	1.500.000.000	-		-		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		584,157,423		114,924,503		19.67		114,924,503		0.87	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-											
2.01.2.01.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						167,286,337		13,775,000		8.23		13,775,000			
2.01.2.01.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,000,639		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40,541,441		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9,062,460		676,000		7.46		676,000			
2.01.2.01.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						21,215,797		2,059,500		9.71		2,059,500			
2.01.2.01.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4,740,000		692,000		14.60		692,000			
2.01.2.01.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						86,726,000		10,347,500		11.93		10,347,500			
2.01.2.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						352,000,451		87,570,038		24.88		87,570,038			
2.01.2.01.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						70,689,703		10,268,542		14.53		10,268,542			
2.01.2.01.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						31,974,695		6,350,000		19.86		6,350,000			
2.01.2.01.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						249,336,053		70,951,496		28.46		70,951,496			
2.01.2.01.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64,870,635		13,579,465		20.93		13,579,465			
2.01.2.01.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						64,870,635		13,579,465		20.93		13,579,465			
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	-	-	-		694,130,994		-		-		-		0.00	
2.01.2.01.01.01.16	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan yang Bersertifikasi					574,130,994		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.16.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan yang Bersertifikasi					574,130,994		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.17	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi					50,000,000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.01.2.01.01.01.17.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi			-		50.000.000		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.20	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif			-		70.000.000		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.20.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif			-		70.000.000		-		-		-			
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	-	-	-		343.839.298		-		-		-		0.00	
2.01.2.01.01.01.21	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang dilayani Bimbingan Jabatan			-		280.455.413		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.21.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilayani dan ditempatkan			-		280.455.413		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.24	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan			-		63.383.885		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.24.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan			-		63.383.885		-		-		-			
	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun	-	-	-		300.000.000		-		-		-		0.00	
2.01.2.01.01.01.26	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah syarat Kerja dan PP / PKB yang disahkan			-		127.000.000		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.26.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah syarat Kerja dan PP / PKB yang disahkan			-		55.000.000		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.26.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsostek			-		72.000.000		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.27	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan			-		173.000.000		-		-		-			
2.01.2.01.01.01.27.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan			-		173.000.000		-		-		-			
	Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak						643.138.372				28.93		1.778.469.657		47.02	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran		-	563,435,686		-		-		-		563,435,686		119.81	Diars PPKB, PP dan PA
2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				55,923,112		-		-		-		55,923,112			
2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				54,643,990		-		-		-		54,643,990			
2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				19,155,500		-		-		-		19,155,500			
2.02.2.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				12,713,505		-		-		-		12,713,505			
2.02.2.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1,800,000		-		-		-		1,800,000			
2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				47,016,500		-		-		-		47,016,500			
2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				249,843,079		-		-		-		249,843,079			
2.02.2.02.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				11,940,000		-		-		-		11,940,000			
2.02.2.02.01.01.24	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				110,400,000		-		-		-		110,400,000			
2.02.2.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi		-	228,457,575		-		-		-		228,457,575		91.77	
2.02.2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				19,997,150		-		-		-		19,997,150			
2.02.2.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				171,982,335		-		-		-		171,982,335			
2.02.2.02.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				3,850,000		-		-		-		3,850,000			
2.02.2.02.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				32,628,090		-		-		-		32,628,090			
2.02.2.02.01.20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam ekonomi	51.70%	212,836,031	308,922,370		-		-		-		308,922,370		73.29	
2.02.2.02.01.20.03	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (DID)	Jumlah perempuan yang bekerja	132.250 org	79,000,000	74,593,750		-		-		-		74,593,750			
2.02.2.02.01.20.04	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender (DID)	Jumlah lembaga berbasis gender yang aktif	67 lembaga	88,000,000	83,540,000		-		-		-		83,540,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.02.2.02.01.20.05	Penyusunan Raperda PUG (DID)	Naskah akademik Perda PUG	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-
2.02.2.08.01.01.20.01	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				57.328.320	-	-	-	-	-	-	57.328.320	-	-	-	-
2.02.2.08.01.01.20.02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender				43.460.300	-	-	-	-	-	-	43.460.300	-	-	-	-
2.02.2.02.01.21	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.04	263.302.341	550.741.586	-	-	-	-	-	-	550.741.586	-	-	105.62	-
2.02.2.02.01.21.03	Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen data gender dan anak	4 dok	150.000.000	112.817.336	-	-	-	-	-	-	112.817.336	-	-	-	-
2.02.2.02.01.21.04	Fasilitasi Kecamatan dan Desa Layak Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang telah menginisiasi terwujudnya Kelana dan Dekela	-	-	147.000.000	-	-	-	-	-	-	147.000.000	-	-	-	-
2.02.2.02.01.21.12	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak	Jumlah pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	12 bln	150.000.000	143.069.888	-	-	-	-	-	-	143.069.888	-	-	-	-
2.02.2.02.01.21.14	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak (DID)				113.725.000	-	-	-	-	-	-	113.725.000	-	-	-	-
2.02.2.08.01.01.21.13	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Forum Anak dan lembaga layanan anak yang terfasilitasi	2 lembaga	120.000.000	34.129.362	-	-	-	-	-	-	34.129.362	-	-	-	-
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	-	-	-	165.000.000	30.823.220	18.68	-	-	-	30.823.220	-	-	4.36	-
2.02.2.08.01.01.15	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase focal poin OPD yang aktif			-	75.000.000	30.625.220	40.83	-	-	-	30.625.220	-	-	-	-
2.02.2.08.01.01.15.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan ARG			-	75.000.000	30.625.220	40.83	-	-	-	30.625.220	-	-	-	-
2.02.2.08.01.01.17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif			-	90.000.000	198.000	0.22	-	-	-	198.000	-	-	-	-
2.02.2.08.01.01.17.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berkompeten			-	90.000.000	198.000	0.22	-	-	-	198.000	-	-	-	-
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	-	-	-	100,000,000		26,368,100		26.37		26,368,100		8.57		Dians PPKB, PP dan PA
2.02.2.08.01.01.26	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif			-	100,000,000		26,368,100		26.37		26,368,100				
2.02.2.08.01.01.26.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terfasilitasi			-	100,000,000		26,368,100		26.37		26,368,100				
												-				
	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak	-	-	-	173,613,758		69,721,120		40.16		69,721,120		13.06		
2.02.2.08.01.01.28	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani			-	173,613,758		69,721,120		40.16		69,721,120				
2.02.2.08.01.01.28.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam satu tahun			-	173,613,758		69,721,120		40.16		69,721,120				
												-				
	Urusan Pangan			1,765,539,748	#REF!	#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		
2.03.2.03.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	606,670,532	492,002,569		-		-			492,002,569		81.10		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80	-								-				
2.03.2.03.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				431,433,069		-		-			431,433,069				
2.03.2.03.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				60,569,500		-		-			60,569,500				
												-				
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	365,491,607		-		-			365,491,607		63.84		
2.03.2.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				1,565,100		-		-			1,565,100				
2.03.2.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				59,550,722		-		-			59,550,722				
2.03.2.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				32,400,000		-		-			32,400,000				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.03.2.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				33.630,150		-		-		-		33.630,150			
2.03.2.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				9,103,500		-		-		-		9,103,500			
2.03.2.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3,628,700		-		-		-		3,628,700			
2.03.2.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				12,622,900		-		-		-		12,622,900			
2.03.2.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				2,474,000		-		-		-		2,474,000			
2.03.2.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				4,740,500		-		-		-		4,740,500			
2.03.2.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				93,579,035		-		-		-		93,579,035			
2.03.2.03.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				52,970,000		-		-		-		52,970,000			
2.03.2.03.01.01.26	Penyediaan Jasa Publikasi				59,227,000		-		-		-		59,227,000			
2.03.2.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	-	-	168,549,283		-		-		-		168,549,283		107.82	
2.03.2.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				56,702,000		-		-		-		56,702,000			
2.03.2.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				86,462,183		-		-		-		86,462,183			
2.03.2.03.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				25,385,100		-		-		-		25,385,100			
2.03.2.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	-	-	59,720,000		-		-		-		59,720,000		74.69	
2.03.2.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				59,720,000		-		-		-		59,720,000			
2.03.2.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81	610,756,090	1,877,931,012		-		-		-		1,877,931,012		155.26	
2.03.2.03.01.15.01	Penanganan daerah rawan pangan				156,143,500		-		-		-		156,143,500			
2.03.2.03.01.15.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok (Pajak Rakok)				98,599,200		-		-		-		98,599,200			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.03.2.03.01.15.13	Pengembangan cadangan pangan daerah				963.354.000		-		-		-		963.354.000			
2.03.2.03.01.15.47	Analisis Ketersediaan Pangan				25.382.950		-		-		-		25.382.950			
2.03.2.03.01.15.58	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan				13.950.000		-		-		-		13.950.000			
2.03.2.03.01.15.59	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan (Pajak Rokok)				105.973.050		-		-		-		105.973.050			
2.03.2.03.01.01.15.59	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan				82.856.916		-		-		-		82.856.916			
2.03.2.03.01.01.15.60	Pengembangan cadangan pangan daerah untuk pembinaan kelompok lumbung dan pemberian bantuan isian lumbung				341.624.780		-		-		-		341.624.780			
2.03.2.03.01.01.15.61	Penanganan daerah rawan pangan untuk penyuluhan ketahanan pangan keluarga dan pemberian bantuan pangan sehat				63.095.966		-		-		-		63.095.966			
2.03.2.03.01.01.15.62	Laporan Berkala Dewan Ketahanan Pangan				26.950.650		-		-		-		26.950.650			
2.03.2.03.01.16	Program Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	76	401.722.828	522.454.698		-		-		-		522.454.698		65.67	
2.03.2.03.01.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan				62.526.500		-		-		-		62.526.500			
2.03.2.03.01.16.32	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Pajak Rokok)				57.628.500		-		-		-		57.628.500			
2.03.2.03.01.16.43	Pengembangan Olahan Pangan Lokal				98.189.000		-		-		-		98.189.000			
2.03.2.03.01.16.44	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (DID)				98.710.000		-		-		-		98.710.000			
2.03.2.03.01.16.45	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (DID)				46.742.000		-		-		-		46.742.000			
2.03.2.03.01.01.16.04	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan				-		-		-		-		-			
2.03.2.03.01.01.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan				9.975.000		-		-		-		9.975.000			
2.03.2.03.01.01.16.43	Pengembangan Olahan Pangan Lokal				3.005.050		-		-		-		3.005.050			
2.03.2.03.01.01.16.63	Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)				145.678.648		-		-		-		145.678.648			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.03.2.03.01.17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketenagakerjaan lingkup Ketahanan Pangan (CUKAI)	Jumlah produk olahan pangan yang dikembangkan	2	146,390,298	332,793,256		-		-		-		332,793,256		114.79	
2.03.2.03.01.17.02	Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal (Cukai)				332,793,256		-		-		-		332,793,256			
	Urusan Lingkungan Hidup			9,157,346,159	41,521,067,292		19,471,942,468		2,227,475,642		11.44		43,748,542,934		55.53	
2.05.2.05.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	1,363,377,421	2,234,127,745		-		-		-		2,234,127,745		163.87	Dinas Lingkungan Hidup
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	100										-			
2.05.2.05.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				1,105,003,245		-		-		-		1,105,003,245			
2.05.2.05.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				164,413,500		-		-		-		164,413,500			
2.05.2.05.01.01.08.03	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana (COVID19-New Normal)				964,711,000		-		-		-		964,711,000			
													-			
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Aparatur DPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	-	-	1,261,406,360		-		-		-		1,261,406,360		99.52	
2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				102,577,815		-		-		-		102,577,815			
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				72,000,000		-		-		-		72,000,000			
2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				55,673,870		-		-		-		55,673,870			
2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				42,977,000		-		-		-		42,977,000			
2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3,873,300		-		-		-		3,873,300			
2.05.2.05.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				23,504,250		-		-		-		23,504,250			
2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				13,344,000		-		-		-		13,344,000			
2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				36,664,400		-		-		-		36,664,400			
2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				239,246,525		-		-		-		239,246,525			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		$9 = 8/7 \times 100\%$		$10 = 6+8$		$11 = 10/5 \times 100\%$		12
2.05.2.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				50,790,000		-		-		-		50,790,000			
2.05.2.05.01.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan				188,755,200		-		-		-		188,755,200			
2.05.2.05.01.01.26	Penyediaan Jasa Publikasi				36,000,000		-		-		-		36,000,000			
2.05.2.05.01.01.27	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				396,000,000		-		-		-		396,000,000			
													-			
2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	-	-	315,338,221		-		-		-		315,338,221		79.31	
2.05.2.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				-		-		-		-		-			
2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				31,568,145		-		-		-		31,568,145			
2.05.2.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				223,439,276		-		-		-		223,439,276			
2.05.2.05.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				8,559,500		-		-		-		8,559,500			
2.05.2.05.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				51,771,300		-		-		-		51,771,300			
													-			
2.05.2.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen pelaporan kinerja yang tepat waktu	-	-	150,365,200		-		-		-		150,365,200		98.60	
2.05.2.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				150,365,200		-		-		-		150,365,200			
													-			
2.05.2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	36.36%	983,599,190	1,409,846,740		-		-		-		1,409,846,740		72.73	
2.05.2.05.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan				72,923,650		-		-		-		72,923,650			
2.05.2.05.01.16.22	Evaluasi Kebersihan dan Penataan Lingkungan				16,989,600		-		-		-		16,989,600			
2.05.2.05.01.16.24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup (Pajak Rokok)				149,328,550		-		-		-		149,328,550			
2.05.2.05.01.16.25	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Pajak Rokok)				286,603,700		-		-		-		286,603,700			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.05.2.05.01.16.27	Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup				38.547.500		-		-		-		38.547.500			
2.05.2.05.01.16.32	Pengkajian Lingkungan Hidup (DID)				208.390.450		-		-		-		208.390.450			
2.05.2.05.01.16.38	Pembinaan dan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan				203.282.500		-		-		-		203.282.500			
2.05.2.05.01.16.45	Inventarisasi Pencemaran Lingkungan Hidup (Pajak Rokok)				74.899.000		-		-		-		74.899.000			
2.05.2.05.01.01.16.07	Pengkajian Lingkungan Hidup				188.824.000		-		-		-		188.824.000			
2.05.2.05.01.01.16.17	Pendidikan Lingkungan Hidup				35.529.700		-		-		-		35.529.700			
2.05.2.05.01.01.16.27	Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup				47.160.600		-		-		-		47.160.600			
2.05.2.05.01.01.16.50	pemantauan kualitas lingkungan				87.367.490		-		-		-		87.367.490			
2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	22,1 Ha	3.229.914.920	5.928.058.880		-		-		-		5.928.058.880		92,68	
2.05.2.05.01.24.15	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (DID)				2.202.944.200		-		-		-		2.202.944.200			
2.05.2.05.01.24.29	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				131.215.000		-		-		-		131.215.000			
2.05.2.05.01.24.31	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				1.648.709.200		-		-		-		1.648.709.200			
2.05.2.05.01.24.33	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman dan monumen				34.666.780		-		-		-		34.666.780			
2.05.2.05.01.24.35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Median Jalan (Pajak Rokok)				194.400.000		-		-		-		194.400.000			
2.05.2.05.01.24.36	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Pajak Rokok)				313.929.000		-		-		-		313.929.000			
2.05.2.05.01.24.37	Pembangunan Pagar Makam				790.678.000		-		-		-		790.678.000			
2.05.2.05.01.24.39	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau				485.921.700		-		-		-		485.921.700			
2.05.2.05.01.24.40	Sarana Prasarana Operasional dan Pemeliharaan GOR				125.595.000		-		-		-		125.595.000			
2.05.2.05.01.25	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah dan Limbah Domestik	Persentase sampah yang tertangani	45%	2.199.313.326	4.046.190.374		-		-		-		4.046.190.374		92,90	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.05.2.05.01.25.39	Penunjang Kegiatan Bidang Sanitasi (DAK)				36.165.000		-		-		-		36.165.000			
2.05.2.05.01.25.40	Fasilitasi penilaian Kota Sehat/Adipura				158.352.150		-		-		-		158.352.150			
2.05.2.05.01.25.41	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Daerah Perkotaan dan / atau Perdesaan (DAK)				907.010.000		-		-		-		907.010.000			
2.05.2.05.01.25.43	Operasional dan Pemeliharaan Persampahan				626.834.000		-		-		-		626.834.000			
2.05.2.05.01.25.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan				1.292.192.756		-		-		-		1.292.192.756			
2.05.2.05.01.01.25.47	Penanganan Persampahan (COVID19-New Normal)				114.054.479		-		-		-		114.054.479			
2.05.2.05.01.01.25.48	Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan (COVID19-New Normal)				911.581.989		-		-		-		911.581.989			
													-			
2.05.2.05.01.26	Program Perlindungan Fungsi, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Sumber daya Hayati dan Adaptasi serta Mitigasi Perubahan Iklim	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air	43.40%	973.141.302									2.444.714.550		126.85	
2.05.2.05.01.26.05	Pengendalian Pencemaran dan Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup (Silpa DAK)				393.168.000		-		-		-		393.168.000			
2.05.2.05.01.26.06	Pengendalian Pencemaran dan Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup (DAK)				731.178.000		-		-		-		731.178.000			
2.05.2.05.01.26.07	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air				253.472.000		-		-		-		253.472.000			
2.05.2.05.01.26.08	Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				254.977.200		-		-		-		254.977.200			
2.05.2.05.01.26.09	Bina Lingkungan Lestari				229.092.200		-		-		-		229.092.200			
2.05.2.05.01.26.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem				241.429.750		-		-		-		241.429.750			
2.05.2.05.01.26.43	Inventarisasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (Pajak Rokok)				95.742.500		-		-		-		95.742.500			
2.05.2.05.01.01.26.48	Bina Lingkungan				245.654.900		-		-		-		245.654.900			
													-			
2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air yang tertangani	-	-	68.468.676								68.468.676		8.40	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.05.2.05.01.17.29	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- Sumber Air (DPAL)				68.468.676		-		-		-		68.468.676			
2.05.2.05.01.27	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Lingkungan Hidup (CUKAI)	Persentase sampah yang tertangani	45%	408.000.000	2.902.016.900		-		-		-		2.902.016.900		#VALUE!	
2.05.2.05.01.27.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Cukai)				-		-		-		-		-			
2.05.2.05.01.27.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Limbah Industri (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan) (Cukai)				-		-		-		-		-			
2.05.2.05.01.27.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan) (Cukai)				1.130.777.100		-		-		-		1.130.777.100			
2.05.2.05.01.27.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri (Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan)				1.412.943.300		-		-		-		1.412.943.300			
2.05.2.05.01.27.05	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri				358.296.500		-		-		-		358.296.500			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		13.500.255.215		1.537.011.629		11.39		1.537.011.629		3.76	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dan terlaksananya dokumen perencanaan lingkungan hidup	-	-	-		384.194.844		2.418.000		0.63		2.418.000		0.19	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	-	-	-		710.022.938		186.655.500		26.29		186.655.500		8.55	
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air	-	-	-		1.570.519.232		-		-		-		0.00	
		Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	-	-	-								-			
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase industri yang menerapkan sistem pengolahan limbah B3	-	-	-		6.735.720		-		-		-		0.00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan	-	-	-		10.000.000		-		-		-		0.00	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	-	-	-		216.065.000		10.731.000		4.97		10.731.000		1.61	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup	-	-	-		115.000.000		-		-		-		0.00	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	-	-	-		150.000.000	17.885.000		11.92		17.885.000		3.88		
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	-	-	-		2.809.149.519	472.774.513		16.83		472.774.513		5.49		
	Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			7.331.219.159	10.077.909.193		5.044.765.341	763.905.280		15.14		10.841.814.473		32.17		
2.06.2.06.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	1.323.277.666	932.950.169		-	-		-		932.950.169		70.50		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80%													
2.06.2.06.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				879.579.469		-	-		-		879.579.469				
2.06.2.06.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				53.370.700		-	-		-		53.370.700				
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	-	-	873.585.352		-	-		-		873.585.352		101.61		
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				114.346.449		-	-		-		114.346.449				
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				23.000.000		-	-		-		23.000.000				
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				109.014.000		-	-		-		109.014.000				
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				44.328.600		-	-		-		44.328.600				
2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				34.757.190		-	-		-		34.757.190				
2.06.2.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				10.290.373		-	-		-		10.290.373				
2.06.2.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				6.887.000		-	-		-		6.887.000				
2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				155.579.920		-	-		-		155.579.920				
2.06.2.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				304.436.820		-	-		-		304.436.820				
2.06.2.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				55.945.000		-	-		-		55.945.000				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.06.2.06.01.01.23	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				15.000.000		-		-		-		15.000.000			
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	-	-	34,610,500		-		-		-		34,610,500		5.03	
2.06.2.06.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				119.537.494		-		-		-		119.537.494			
2.06.2.06.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				320.740.680		-		-		-		320.740.680			
2.06.2.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				39.420.200		-		-		-		39.420.200			
2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				126.689.999		-		-		-		126.689.999			
2.06.2.06.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				34.610.500		-		-		-		34.610.500			
2.06.2.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang berseragam sesuai standar	-	-	59,852,000		-		-		-		59,852,000		59.85	
2.06.2.06.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				59.852.000		-		-		-		59.852.000			
2.06.2.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	-	-	104,434,900		-		-		-		104,434,900		90.09	
2.06.2.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				104.434.900		-		-		-		104.434.900			
2.06.2.06.01.17	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	98,5%	1,073,478,940	1,739,077,976		-		-		-		1,739,077,976		81.80	
2.06.2.06.01.17.03	Pengadaan Blangko dan Formulir Akta Catatan Sipil (DAK)				218.345.600		-		-		-		218.345.600			
2.06.2.06.01.17.04	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)				761.273.700		-		-		-		761.273.700			
2.06.2.06.01.17.05	Pelayanan Terpadu Penerbitan Akta Akta Pencatatan Sipil				50.125.200		-		-		-		50.125.200			
2.06.2.06.01.17.06	Pengaman Dokumen Akta-akta Pencatatan Sipil				159.588.000		-		-		-		159.588.000			
2.06.2.06.01.17.34	Pelayanan Akte kelahiran On Line				105.404.000		-		-		-		105.404.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.06.2.06.01.17.41	Pelayanan One Stop Service Desa				252.602.500		-		-		-		252.602.500			
2.06.2.06.01.17.42	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Era Pandemi Covid 19 (DAK non Fisik)				191.738.976		-		-		-		191.738.976			
													-			
2.06.2.06.01.18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid dan update	94,5%	2.043.090.615	2.251.349.376		-		-		-		2.251.349.376		55.64	
2.06.2.06.01.18.02	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)				443.412.190		-		-		-		443.412.190			
2.06.2.06.01.18.03	Penyusunan Buku Agregat dan Profil Kependudukan (DAK)				75.506.600		-		-		-		75.506.600			
2.06.2.06.01.18.04	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)				326.985.526		-		-		-		326.985.526			
2.06.2.06.01.18.17	Pengelolaan Administrasi Kependudukan				456.192.460		-		-		-		456.192.460			
2.06.2.06.01.18.18	Rekonsiliasi Data Kependudukan				886.176.000		-		-		-		886.176.000			
2.06.2.06.01.18.19	Penyusunan Perda tentang Administrasi Kependudukan				63.076.600		-		-		-		63.076.600			
													-			
2.06.2.06.01.19	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan oleh lembaga pengguna	75%	430.277.259	550.743.421		-		-		-		550.743.421		64.63	
		Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumen kependudukan	76.70%	-									-			
2.06.2.06.01.19.02	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat				115.063.600		-		-		-		115.063.600			
2.06.2.06.01.19.03	Pendampingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015				74.355.501		-		-		-		74.355.501			
2.06.2.06.01.19.04	Penataan Arsip Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				253.566.720		-		-		-		253.566.720			
2.06.2.06.01.19.05	Penerapan Go Digital dan Inovasi Pelayanan				107.757.600		-		-		-		107.757.600			
													-			
2.06.2.06.01.16	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang sudah memiliki kartu identitas	83.50%	2.461.094.679	3.531.305.499		-		-		-		3.531.305.499		72.80	
2.06.2.06.01.16.06	Pengadaan Tinta Cetak e-KTP (DAK)				661.720.000		-		-		-		661.720.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.06.2.06.01.16.07	Pemeliharaan Peralatan SIAK (DAK)				75.537.000		-		-		-		75.537.000			
2.06.2.06.01.16.08	Pengadaan Blangko Kartu Keluarga (DAK)				531.140.500		-		-		-		531.140.500			
2.06.2.06.01.16.09	Penerbitan Kartu Identitas Anak				549.340.000		-		-		-		549.340.000			
2.06.2.06.01.16.23	Pengadaan Tinta Komputer SIAK				88.126.500		-		-		-		88.126.500			
2.06.2.06.01.16.28	Pengaman Dokumen KTP Elektronik dan KK				192.500.000		-		-		-		192.500.000			
2.06.2.06.01.16.45	Pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik				68.706.000		-		-		-		68.706.000			
2.06.2.06.01.16.49	Pengadaan Tinta Cetak KIA				235.004.000		-		-		-		235.004.000			
2.06.2.06.01.16.50	Operasional Pelayanan Dokumen Kependudukan				776.344.999		-		-		-		776.344.999			
2.06.2.06.01.01.16.51	Pemeliharaan Peralatan SIAK				-		-		-		-		-			
2.06.2.06.01.01.16.52	Pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik Pada Masa Pandemi COVID 19				118.250.000		-		-		-		118.250.000			
2.06.2.06.01.01.16.53	Pemeliharaan Peralatan SIAK Pada Masa Pandemi COVID 19				106.150.000		-		-		-		106.150.000			
2.06.2.06.01.01.16.54	Jasa Layanan Pengiriman Dokumen Kependudukan yang meliputi Surat Pindah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Dokumen Kependudukan lainnya di Era Pandemi Covid-19				128.486.500		-		-		-		128.486.500			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		4.500.114.106		523.445.280		11.63		523.445.280			
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
		Persentase penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan	-	-	-								-			
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang sudah memiliki kartu identitas	-	-	-		1.116.588		146.780.000		13.145,40		146.780.000			
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	-	-	-		115.951.400		6.000.000		5,17		6.000.000			
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase database	-	-	-		427.583.247		87.680.000		20,51		87.680.000			
		kependudukan yang valid dan update	-	-	-								-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa			7,817,352,918	7,033,431,410		9,786,072,915		1,202,182,901		12.28		8,235,614,311		17.87	
2.07.2.07.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	1,084,502,599	920,920,213								920,920,213			
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80	-			-		-		-		-		#VALUE!	
2.07.2.07.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek, Kursus dan Pelatihan	12	815,568,830	777,654,404		-		-		-		777,654,404			
		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	13	815,568,830			-		-		-		-			
		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang layak fungsi	100	815,568,830			-		-		-		-			
2.07.2.07.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku	19	38,194,000	37,808,750		-		-		-		37,808,750			
2.07.2.07.01.01.08.03	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	2	106,115,521	105,457,059		-		-		-		105,457,059			
2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	1,200,251,886		-		-		-		1,200,251,886		105.29	
2.07.2.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar			95,592,900		-		-		-		95,592,900			
2.07.2.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor			36,000,000		-		-		-		36,000,000			
2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor			182,625,315		-		-		-		182,625,315			
2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan			67,675,935		-		-		-		67,675,935			
2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			7,574,045		-		-		-		7,574,045			
2.07.2.07.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			31,387,400		-		-		-		31,387,400			
2.07.2.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Media Informasi			1,500,000		-		-		-		1,500,000			
2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman			113,609,140		-		-		-		113,609,140			
2.07.2.07.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi, rapat dms dan konsultasi luar daerah			299,836,356		-		-		-		299,836,356			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.07.2.07.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis, konsultasi dalam daerah			154.050.000		-		-		-		154.050.000			
2.07.2.07.01.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan	Jumlah tenaga jasa pengamanan yang tersedia			102.671.795		-		-		-		102.671.795			
2.07.2.07.01.01.26	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah kegiatan yang dipublikasikan melalui Mass Media			92.729.000		-		-		-		92.729.000			
2.07.2.07.01.01.27	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Tersedianya jasa penunjang kinerja SKPD			15.000.000		-		-		-		15.000.000			
													-			
2.07.2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	-	-	204.220.397		-		-		-		204.220.397		72.70	
2.07.2.07.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan			54.670.000		-		-		-		54.670.000			
2.07.2.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor			9.342.000		-		-		-		9.342.000			
2.07.2.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional			104.300.415		-		-		-		104.300.415			
2.07.2.07.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			32.570.982		-		-		-		32.570.982			
2.07.2.07.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur			3.337.000		-		-		-		3.337.000			
													-			
2.07.2.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-	22.795.950		-		-		-		22.795.950		91.18	
2.07.2.07.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun			22.795.950		-		-		-		22.795.950			
													-			
2.07.2.07.01.21	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan	Persentase BUMDes yang aktif	24%	381.856.638	782.857.700		-		-		-		782.857.700		104.02	
		Persentase lembaga ekonomi yang aktif	44%				-		-		-		-			
2.07.2.07.01.21.05	Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah Desa yang dibina untuk pengembangan dan pendayagunaan SDA	-		27.055.000		-		-		-		27.055.000			
		Jumlah lembaga HIPDAM yang dimonitoring dan dievaluasi	-				-		-		-		-			
		Jumlah Pokmas Tepian Hutan yang dibina	-				-		-		-		-			
2.07.2.07.01.21.06	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes yang Aktif	48	135.896.000	147.812.900		-		-		-		147.812.900			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Jumlah Desa yang mendapat nominasi Desa Mawa Cara Award	5													
		Jumlah Lembaga UED yang Aktif	24													
		Jumlah Lembaga UED yang dibina	-													
		Jumlah Pasar Desa yang Aktif	30													
		Jumlah Pasar Desa yang dibina	-													
		Jumlah UPK Gerdu Taskin dan UPKU PPKM yang dibina	-													
		Jumlah UPK Gerdu Taskin UPKu PPKM yang Aktif	18													
2.07.2.07.01.2107	Inovasi Desa	Jumlah Desa yang menghasilkan replikasi	-	-	46,045.600		-		-		-		46,045.600			
		Jumlah Lembaga TPID yang terbentuk	-	-												
2.07.2.07.01.2108	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang membentuk	-	-	10,974.000		-		-		-		10,974.000			
		Kawasan Perekonomian Desa														
2.07.2.07.01.2115	Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Banprov	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dari Provinsi Jatim	7	33.000.000												
					30.000.000		-		-		-		30.000.000			
2.07.2.07.01.2116	Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Penunjang Kegiatan Kabupaten	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dari Pemkab Madiun	-	-	23,022.700		-		-		-		23,022.700			
2.07.2.07.01.2121	Desa "Mawa Cara" Award	Jumlah Desa yang mendapat nominasi Desa Mawa Desa Award	-	-	93,599.800		-		-		-		93,599.800			
2.07.2.07.01.2123	Pembinaan Pasca Pelaksanaan PNPM MPd	Dokumen pelaporan dan evaluasi pelestarian Pasca PNPM MPd	-	-	45,105.000		-		-		-		45,105.000			
		Jumlah BUMDes bersama yang mendapatkan penguatan manajerial	-	-												
		Jumlah kecamatan yang mendapat pendampingan untuk pembentukan BUMDes bersama	-	-												
		Jumlah kelompok pemanfaat dana bergulir yang aktif	-	-												
2.07.2.07.01.2124	Pemberdayaan BUMDes	Jumlah BUMDes yang Aktif	-	-	79,740.000		-		-		-		79,740.000			
		Jumlah BUMDes dengan tata kelola keuangan yang baik	-	-												

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.07.2.07.01.01.21.25	Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Kabupaten	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dari Pemkab Madiun	14	15.000.000												
2.07.2.07.01.01.21.26	Pemberdayaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam	Jumlah Inovasi Desa Terbaik Tingkat Kabupaten	5	201.263.000												
		Jumlah lembaga HIPDAM yang aktif	43													
		Jumlah Lembaga Tepian Hutan yang Aktif	45													
2.07.2.07.01.01.21.27	Pengembangan kawasan pedesaan dan kerjasama antar desa	Jumlah BUMDes Bersama yang terbentuk	1		76.470.250								76.470.250			
		Jumlah Desa yang memiliki potensi membentuk kawasan pedesaan untuk pengembangan ekonomi	3													
		Jumlah Kecamatan yang dibina Pasca PNPM-MPd	14													
2.07.2.07.01.22	Program Peningkatan Pembangunan dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	53%	1.691.961.638	2.547.300.144								2.547.300.144		76.02	
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan yang aktif	47%	-												
2.07.2.07.01.22.05	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah lembaga Pelaksana Gotong Royong terbaik dari Tingkat Kecamatan	-	-	184.748.354								184.748.354			
2.07.2.07.01.22.06	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan tepat waktu	-	-	96.922.500								96.922.500			
2.07.2.07.01.22.10	Pemberdayaan Kelembagaan Taman Posyandu	Jumlah Taman Posyandu terbaik yang dinilai	-	-	23.330.000								23.330.000			
2.07.2.07.01.22.11	Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Jumlah SD yang difasilitasi PMT-AS	-	-	34.773.250								34.773.250			
2.07.2.07.01.22.12	Pengukuran Tingkat Perkembangan Keswadayaan Masyarakat	Jumlah dokumen pengukuran keswadayaan masyarakat	-	-	9.500.000								9.500.000			
2.07.2.07.01.22.14	Pemberdayaan dan Penilaian Kinerja LPKMD/ K	Jumlah LPKMD/K yang dinilai	-	-	74.911.000								74.911.000			
		Jumlah pengurus LPKMD/K yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya dalam penguatan peran dan fungsi	-	-												
2.07.2.07.01.22.15	Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah PKK Desa/Kel yang dibina	-	-	644.096.840								644.096.840			
2.07.2.07.01.22.17	Penunjang Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)	Jumlah Desa/lokasi yang mendapatkan program TMMD	-	-	60.904.000								60.904.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.07.2.07.01.22.18	Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah peserta workshop pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	-	-	24.190.000	-	-	-	-	-	-	24.190.000	-	-	-	
2.07.2.07.01.22.19	Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah update profil Desa/Kelurahan	-	-	102.397.800	-	-	-	-	-	-	102.397.800	-	-	-	
2.07.2.07.01.22.21	Perlombaan Desa dan Kelurahan (DID)		-	-	331.457.000	-	-	-	-	-	-	331.457.000	-	-	-	
2.07.2.07.01.22.22	Penyusunan Regulasi yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) (DID)	Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang yang mengikuti perlombaan Desa/Kel. Kabupaten	-	-	98.525.000	-	-	-	-	-	-	98.525.000	-	-	-	
2.07.2.07.01.01.22.01	Pendampingan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Regulasi tentang LKD dan LAD yang tersusun	37	226.348.300	222.057.400	-	-	-	-	-	-	222.057.400	-	-	-	
		Jumlah Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan tepat waktu	198													
		Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang yang mendapatkan Juara perlombaan Desa/Kelurahan Tk Kabupaten	5													
		Jumlah Desa/Kelurahan yang telah updating profil Desa/Kelurahan	-													
		Jumlah KPM yang tersertifikasi	-													
2.07.2.07.01.01.22.02	Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Jumlah Lembaga Posyandu yang aktif	435	224.946.450	221.998.150	-	-	-	-	-	-	221.998.150	-	-	-	
		Jumlah LPKMD/K yang aktif	78													
		Jumlah pengurus LPKMD/K yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya dalam penguatan tugas dan fungsi	15													
		Jumlah PKK Aktif dengan pelaksanaan IO Program Pokok PKK	115													
		Jumlah RT/RW yang aktif	2790													
		Jumlah SD yang difasilitasi PMT-AS	1													
2.07.2.07.01.01.22.03	Pendukung pemberdayaan sosial budaya masyarakat	Jumlah Desa yang mendapatkan program TMMD	-	56.524.150	56.164.150	-	-	-	-	-	-	56.164.150	-	-	-	
		Jumlah Desa/Kelurahan Juara Penilaian Gotong Royong Terbaik	5													
		Jumlah dokumen pengukuran keswadayaan masyarakat	-													
		Jumlah peserta workshop pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	-													
2.07.2.07.01.01.22.23	Pemberdayaan dan Penataan Lembaga	Jumlah PKK Aktif dengan pelaksanaan IO Program Pokok PKK	115	361.770.550	361.324.700	-	-	-	-	-	-	361.324.700	-	-	-	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dimasa Pandemi Covid-19															
2.07.2.07.01.23	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan kapasitas pemerintahan desa yang baik	53%	846.267.582	1.355.085.120							1.355.085.120		80.86		
		Persentase BPD yang berfungsi dengan baik	38%													
2.07.2.07.01.23.03	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi pemilihan Kepala Desa	-	-	216.874.000							216.874.000				
		Jumlah Desa yang mengikuti pembekalan pemilihan Kepala Desa	-													
		Jumlah Desa yang dimonitoring pemilihan Kepala Desa	-													
		Jumlah Kepala Desa yang dilantik	-													
2.07.2.07.01.23.04	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Aparatur Desa Dan Unsur Kecamatan	Jumlah Desa dengan pengelolaan anggaran Desa yang baik	-	-	125.112.940							125.112.940				
		Jumlah Desa yang dibina dan dievaluasi dalam pengelolaan keuangan Desa	-	-												
2.07.2.07.01.23.12	Bintek Aparatur Pemerintah Desa dan Unsur Kecamatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Unsur Kecamatan yang dibina dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	41.073.000							41.073.000				
2.07.2.07.01.23.15	Penyusunan Regulasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengaturtentang Desa	Jumlah Regulasi tentang Desa yang disusun	-	-	52.722.000							52.722.000				
2.07.2.07.01.23.16	Peningkatan Kapasitas BPD, tertib administrasi dan Aset Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Bintek Administrasi	-	-	73.888.000							73.888.000				
		Jumlah Desa yang mendapatkan bimtek aset	-	-												
		Jumlah Desa yang mendapatkan bimtek BPD	-	-												
2.07.2.07.01.23.17	Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan Dana Transfer	-	-	251.119.600							251.119.600				
2.07.2.07.01.23.18	Fasilitasi Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (DID)	Jumlah Desa yang difasilitasi terkait pelepasan dan tukar menukar tanah Kas Desa	-	-	-							-				
2.07.2.07.01.23.19	Pengembangan kapasitas pemerintahan dan aparatur desa	Jumlah Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa	0	71.144.888	64.377.580							64.377.580				
		Jumlah Desa yang telah melaksanakan updating data base Pemerintahan Desa	198													
		Jumlah Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang mengikuti kompetensi	213													
		Jumlah Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa yang disusun	5													

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.07.2.07.01.01.23.20	Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa dengan pengelolaan anggaran Desa yang baik	198	529,349,600	501,250,000		-		-		-		501,250,000			
		Jumlah regulasi teknis tentang Pengelolaan Keuangan Desa	3										-			
2.07.2.07.01.01.23.21	Pembinaan pengelolaan administrasi dan aset desa	Jumlah Desa yang melakukan updating data aset Desa	198	15,000,000	350,000		-		-		-		350,000			
		Jumlah Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi Desa	105										-			
		Jumlah Desa yang terfasilitasi terkait pelepasan dan tukar menukar Tanah Kas Desa	1										-			
2.07.2.07.01.01.23.22	Pengembangan kapasitas lembaga desa	Jumlah BPD yang mengikuti peningkatan kompetensi	198	33,995,000	28,318,000		-		-		-		28,318,000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		4,649,735,592		149,724,151		3.22		149,724,151			
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	-		-		-		-		-			
	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Jumlah kerja sama Desa yang terbentuk	-	-	-		101,760,100		4,619,800		4.54		4,619,800			
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan kapasitas pemerintahan desa yang baik	-	-	-		3,383,813,323		1,035,535,000		30.60		1,035,535,000			
		Persentase BPD yang berfungsi dengan baik	-	-	-								-			
		Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	-	-	-								-			
	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	-	-	-		1,650,763,900		12,303,950		0.75		12,303,950			
		Persentase BUMDesa yang aktif	-	-	-								-			
		Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	-	-	-								-			
													-			
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			16,971,356,932	14,447,005,806		9,911,864,620		553,409,304		5.58		15,000,415,110		10.49	
2.08.2.08.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	539,466,216	712,289,678		-		-		-		712,289,678		132.04	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	75	-	-								-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.08.2.08.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	14	929.534.200	710.840.928		-		-		-		710.840.928			
		Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100										-			
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	10										-			
2.08.2.08.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				1.448.750		-		-		-		1.448.750			
													-			
2.08.2.08.01.01.15	Program Keluarga Berencana	Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	76.90%	6.448.779.538	9.482.148.428		-		-		-		9.482.148.428		74.61	
2.08.2.08.01.01.15.03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah promosi hak reproduksi individu yang dilakukan	12 kali	45.000.000	44.716.200		-		-		-		44.716.200			
2.08.2.08.01.01.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kelompok KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/ MKJP	61 kelp	147.000.000	219.312.650		-		-		-		219.312.650			
2.08.2.08.01.01.15.08	Pelayanan KB	Jumlah peserta KB Baru	17.825 org	220.500.000	263.169.800		-		-		-		263.169.800			
2.08.2.08.01.01.15.16	Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	15 Balai KB	4.411.430.000	6.224.152.509		-		-		-		6.224.152.509			
2.08.2.08.01.01.15.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (DAK Fisik)				2.639.117.269		-		-		-		2.639.117.269			
2.08.2.08.01.01.15.26	Standarisasi kapasitas tenaga kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)				81.530.000		-		-		-		81.530.000			
2.08.2.08.01.01.15.28	Pelayanan Keluarga Berencana dalam rangka penanganan Covid 19				10.150.000		-		-		-		10.150.000			
													-			
2.08.2.08.01.01.25	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	9.87%	1.828.406.477	3.881.210.600		-		-		-		3.881.210.600		107.19	
2.08.2.08.01.01.25.09	Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah kader IMP yang mandiri	643 orang	1.807.000.000	3.476.636.500		-		-		-		3.476.636.500			
2.08.2.08.01.01.25.10	Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah publikasi program melalui media elektronik dan non elektronik	3 paket	115.000.000	94.639.100		-		-		-		94.639.100			
2.08.2.08.01.01.25.22	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan	2 dok	87.000.000	282.144.500		-		-		-		282.144.500			
2.08.2.08.01.01.25.23	Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun	Jumlah kampung KB yang mandiri	31 desa	100.000.000	27.790.500		-		-		-		27.790.500			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.08.2.08.01.01.26	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun	7.25%	292.240,501	371,357,100	-	-	-	-	-	-	371,357,100	-	64.17		
2.08.2.08.01.01.26.12	Pemberdayaan Keluarga				79.669,300	-	-	-	-	-	-	79.669,300				
2.08.2.08.01.01.26.13	Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja (DID)				291,687,800	-	-	-	-	-	-	291,687,800				
												-				
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	840,730,620	231,685,004	27.56	231,685,004	1.78						
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-							-				
2.08.2.08.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pemerintahan yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku			-	1,500,000	-	-	-	-	-	-				
2.08.2.08.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku			-	1,500,000	-	-	-	-	-	-				
2.08.2.08.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana penunjang kantor tersedia			-	839,230,620	231,685,004	27.61	231,685,004			231,685,004				
2.08.2.08.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Jasa Listrik, Internet dan Telepon			-	839,230,620	231,685,004	27.61	231,685,004			231,685,004				
												-				
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun	-	-	-	241,656,000	-	-	-	-	-	-		0.00		
2.08.2.08.01.01.16	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data informasi kependudukan yang tersusun			-	241,656,000	-	-	-	-	-	-				
2.08.2.08.01.01.16.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah dokumen data mikro keluarga tingkat Desa/Kelurahan			-	75,000,000	-	-	-	-	-	-				
2.08.2.08.01.01.16.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				-	166,656,000	-	-	-	-	-	-				
												-				
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	-	-	-	8,604,478,000	303,727,500	3.53	303,727,500	1.11						
2.08.2.08.01.01.17	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK melalui advokasi dan KIE			-	5,278,060,000	19,290,700	0.37	19,290,700			19,290,700				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.08.2.08.01.01.17.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBP sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah publikasi program KKBP melalui media elektronik dan non elektronik			-		75.000.000		15.363.100		20.48		15.363.100			
2.08.2.08.01.01.17.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE Program KKBP untuk kegiatan BOKB			-		-		3.927.600				3.927.600			
2.08.2.08.01.01.17.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Persentase Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB di Kecamatan berjalan lancar			-		5.203.060.000		-		-		-			
2.08.2.08.01.01.18	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader IMP yang mandiri			-		1.670.280.000		281.800.000		16.87		281.800.000			
2.08.2.08.01.01.18.01	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kader IMP yang difasilitasi			-		-		281.800.000				281.800.000			
2.08.2.08.01.01.18.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif			-		1.670.280.000		-		-		-			
2.08.2.08.01.01.19	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar			-		1.621.138.000		2.636.800		0.16		2.636.800			
2.08.2.08.01.01.19.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Fasilitas Kesehatan, Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan distribusi Alat dan obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			-		150.000.000		-		-		-			
2.08.2.08.01.01.19.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			-		75.000.000		-		-		-			
2.08.2.08.01.01.19.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			-		1.226.138.000		-		-		-			
2.08.2.08.01.01.19.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Faskes yang mampu memberikan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi			-		50.000.000		-		-		-			
2.08.2.08.01.01.19.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar			-		50.000.000		2.636.800		5.27		2.636.800			
2.08.2.08.01.01.19.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan			-		70.000.000		-		-		-			
2.08.2.08.01.01.20	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBP			-		35.000.000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12	
2.08. 2.08.01.01. 20.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB	Persentase Kampung KB Aktif			-		35,000,000		-		-		-				
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	-	-	-		225,000,000		17,996,800		8.00		17,996,800		2.60		
2.08. 2.08.01.01. 21	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok UPPKS yang aktif			-		75,000,000		-		-		-				
2.08. 2.08.01.01. 21.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif			-		75,000,000		-		-		-				
2.08. 2.08.01.01. 22	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Persentase Kader tribina yang aktif			-		150,000,000		17,996,800		12.00		17,996,800				
		2. Persentase kelompok PIK-Remaja yang aktif			-								-				
2.08. 2.08.01.01. 22.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Jumlah kader Tribina yang aktif			-		150,000,000		17,996,800		12.00		17,996,800				
		2. Jumlah kelompok PIK-Remaja yang aktif			-								-				
	Urusan Perhubungan																
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Program Pelayanan Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	34,061,943,499	44,228,674,408		1,153,265,866	1,160,587,895		18,244,587,741		7,028,809,371		38.53		51,257,483,779	37.72
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skr)	100	-												1,160,587,895	100.63
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana							1,160,587,895								1,160,587,895	
																-	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran		-	881,002,333		-		-		-		881,002,333		95.11	
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				9,589,000		-		-		-		9,589,000			
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				65,931,480		-		-		-		65,931,480			
2.09.2.09.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				29,022,850		-		-		-		29,022,850			
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				50,212,000		-		-		-		50,212,000			
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				79,245,125		-		-		-		79,245,125			
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				41,404,700		-		-		-		41,404,700			
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				7,903,700		-		-		-		7,903,700			
2.09.2.09.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				27,508,850		-		-		-		27,508,850			
2.09.2.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				4,524,000		-		-		-		4,524,000			
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				42,782,800		-		-		-		42,782,800			
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				247,856,160		-		-		-		247,856,160			
2.09.2.09.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				20,240,000		-		-		-		20,240,000			
2.09.2.09.01.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan				97,281,668		-		-		-		97,281,668			
2.09.2.09.01.01.26	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				157,500,000		-		-		-		157,500,000			
													-			
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi			503,416,070		-		-		-		503,416,070		82.37	
2.09.2.09.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				87,125,500		-		-		-		87,125,500			
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				41,038,864		-		-		-		41,038,864			
2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				375,251,706		-		-		-		375,251,706			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.09.2.09.01.21	Program Peningkatan Pelayanan angkutan, kelaikan kendaraan dan sarana prasarana multimoda dan perkeretaapian	Persentase kendaraan laik jalan	90%	3,055,668,399	3,310,840,613	-	-	-	-	-	-	-	3,310,840,613	-	54.71	
2.09.2.09.01.21.02	Penyelenggaraan angkutan gratis				133,337,850	-	-	-	-	-	-	-	133,337,850			
2.09.2.09.01.21.03	Pengujian kendaraan bermotor				809,241,000	-	-	-	-	-	-	-	809,241,000			
2.09.2.09.01.21.04	Pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor				198,211,951	-	-	-	-	-	-	-	198,211,951			
2.09.2.09.01.21.06	Pembangunan Halte				647,952,750	-	-	-	-	-	-	-	647,952,750			
2.09.2.09.01.21.07	Pemeliharaan Halte				74,269,302	-	-	-	-	-	-	-	74,269,302			
2.09.2.09.01.21.08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor				190,492,500	-	-	-	-	-	-	-	190,492,500			
2.09.2.09.01.21.09	Pengiriman AbdiyasaTeladan				9,435,000	-	-	-	-	-	-	-	9,435,000			
2.09.2.09.01.21.10	Pengadaan Halte Bus				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.09.2.09.01.01.24.03	Penyelenggaraan Manajemen Angkutan, Penyediaan, Pemeliharaan Alat dan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor				1,068,583,380	-	-	-	-	-	-	-	1,068,583,380			
2.09.2.09.01.01.24.04	Penyelenggaraan Keselamatan dan Perkeretaapian				179,316,880	-	-	-	-	-	-	-	179,316,880			
2.09.2.09.01.01.26	Program sarana perlengkapan dan keselamatan jalan	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	65%	28,464,740,366	14,894,844,353	-	-	-	-	-	-	-	14,894,844,353	-	52.33	
2.09.2.09.01.01.26.01	Penyediaan sarana dan pemeliharaan sarana keselamatan lalu lintas				193,469,100	-	-	-	-	-	-	-	193,469,100			
2.09.2.09.01.01.26.02	Pembangunan, Pengendalian daya, Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) dan Penyediaan Jasa APJ				14,701,375,253	-	-	-	-	-	-	-	14,701,375,253			
2.09.2.09.01.01.23	Program Keselamatan dan Perlengkapan Sarana Jalan	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan			21,738,542,520	-	-	-	-	-	-	-	21,738,542,520	-	93.55	
2.09.2.09.01.23.01	Pengendalian daya PJU				396,838,609	-	-	-	-	-	-	-	396,838,609			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.09.2.09.01.23.02	Penyediaan Jasa PJJU				12.532.590.404		-		-		-		12.532.590.404			
2.09.2.09.01.23.03	Penyediaan PJJU				1.660.223.740		-		-		-		1.660.223.740			
2.09.2.09.01.23.04	Pemeliharaan rutin/berkala PJJU				339.084.350		-		-		-		339.084.350			
2.09.2.09.01.23.05	Penyediaan Data PJJU Berbasis Digital (Pajak Rokok)				-		-		-		-		-			
2.09.2.09.01.23.06	Pengadaan Pos Jaga Lintas Kereta Api				1.467.087.390		-		-		-		1.467.087.390			
2.09.2.09.01.23.07	Pengadaan Videotron (Pajak Rokok)				28.800.000		-		-		-		28.800.000			
2.09.2.09.01.23.23	Pengadaan Perlengkapan Video Tron				119.185.000		-		-		-		119.185.000			
2.09.2.09.01.23.24	Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan Perlitasan Sebidang				731.520.430		-		-		-		731.520.430			
2.09.2.09.01.23.25	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Perlitasan Sebidang				197.526.450		-		-		-		197.526.450			
2.09.2.09.01.23.26	Pengadaan Video Tron (DID)				505.121.100		-		-		-		505.121.100			
2.09.2.09.01.23.27	Pengadaan Rambu Lalu Lintas				765.334.953		-		-		-		765.334.953			
2.09.2.09.01.23.28	Pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ)				2.995.230.094		-		-		-		2.995.230.094			
2.09.2.09.01.22	Program Manajemen Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas	Persentase kesadaran tertib lalu lintas	83%	1.388.268.868	1.739.440.625		-		-		-		1.739.440.625		63.27	
2.09.2.09.01.22.01	Pengaturan, pengawalan, penegakan disiplin lalu lintas				104.133.000		-		-		-		104.133.000			
2.09.2.09.01.22.03	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu lintas (ANDALALIN)				-		-		-		-		-			
2.09.2.09.01.22.05	Inovasi pelopor keselamatan berlalu lintas				-		-		-		-		-			
2.09.2.09.01.22.07	Penanganan Parkir Bidang Perhubungan				625.604.200		-		-		-		625.604.200			
2.09.2.09.01.22.09	Pengembangan Database Kelengkapan Jalan (GIS)				-		-		-		-		-			
2.09.2.09.01.22.10	Wahana Tata Nugraha (WTN)				-		-		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.09.2.09.01.22.11	Fasilitasi Forum Lalu Lintas				2.650.000		-		-		-		2.650.000			
2.09.2.09.01.22.12	Manajemen Rekyasa Lalu Lintas Event Khusus				39.787.237		-		-		-		39.787.237			
2.09.2.09.01.01.22.13	Pemantauan, pengaturan, pengawalan, penegakan disiplin lalu lintas				128.189.500		-		-		-		128.189.500			
2.09.2.09.01.01.22.14	Manajemen Rekyasa Lalu Lintas, Andalalin dan Event Khusus				153.241.688		-		-		-		153.241.688			
2.09.2.09.01.01.22.15	Penanganan, pengaturan dan pengawasan titik parkir				607.570.000		-		-		-		607.570.000			
2.09.2.09.01.01.22.16	Penanganan, pengaturan dan pengawasan titik parkir (COVID19-New Normal)				78.265.000		-		-		-		78.265.000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		988.912.331		319.963.571		32.36		319.963.571		1.63	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
2.09.2.09.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		287.927.236		69.160.749		24.02		69.160.749			
2.09.2.09.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		70.171.541		24.927.249		35.52		24.927.249			
2.09.2.09.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		32.483.550		944.500		2.91		944.500			
2.09.2.09.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		30.995.145		6.913.500		22.31		6.913.500			
2.09.2.09.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		4.824.000		3.252.000		67.41		3.252.000			
2.09.2.09.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		149.453.000		33.123.500		22.16		33.123.500			
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		443.009.595		157.470.957		35.55		157.470.957			
2.09.2.09.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		5.997.700		2.414.000		40.25		2.414.000			
2.09.2.09.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		76.749.680		26.658.489		34.73		26.658.489			
2.09.2.09.01.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		360.262.215		128.398.468		35.64		128.398.468			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
08.04																
2.09. 2.09.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		257.975.500		93.331.865		36.18		93.331.865			
2.09. 2.09.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		257.975.500		93.331.865		36.18		93.331.865			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	-	-			17.255.675,410		6.708.845,800		38.88		6.708.845,800		12.64	
		Persentase kendaraan laik jalan	-	-												
		persentase angka tertib lalu lintas	-	-												
2.09. 2.09.01.01.15	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		207.813.210		173.280.800		83.38		173.280.800			
2.09. 2.09.01.01.15.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		13.089.120		-		0.00		-			
2.09. 2.09.01.01.15.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		194.724.090		173.280.800		88.99		173.280.800			
2.09. 2.09.01.01.16	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				-		478.037.322		61.214.500		12.81		61.214.500			
2.09. 2.09.01.01.16.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				-		478.037.322		61.214.500		12.81		61.214.500			
2.09. 2.09.01.01.18	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				-		762.788.350		250.000.000		32.77		250.000.000			
2.09. 2.09.01.01.18.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				-		762.788.350		250.000.000		32.77		250.000.000			
2.09. 2.09.01.01.19	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		579.318.611		-		0.00		-			
2.09. 2.09.01.01.19.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		233.349.116		-		0.00		-			
2.09. 2.09.01.01.19.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		229.800.000		-		0.00		-			
2.09. 2.09.01.01.19.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		116.169.495		-		0.00		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.09.2.09.01.01.20	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				-		14.997.991,497		6.224.350,500		41,50		6.224.350,500			
2.09.2.09.01.01.20.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				-		14.725.267,397		6.196.869,950		42,08		6.196.869,950			
2.09.2.09.01.01.20.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				-		197.604,000		15.610,000		7,90		15.610,000			
2.09.2.09.01.01.20.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				-		75.120,100		11.870,550		15,80		11.870,550			
2.09.2.09.01.01.21	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				-		43.784,400		-		0,00		-			
2.09.2.09.01.01.21.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				-		43.784,400		-		0,00		-			
2.09.2.09.01.01.23	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		185.942,020		-		0,00		-			
2.09.2.09.01.01.23.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		185.942,020		-		0,00		-			
	Urusan Komunikasi dan Informatika															
2.10.2.10.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	3.837,854,382	9.326,735,487		3.772,359,666		980,513,985		25,99		10,307,249,472		31,42	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80	847,755,382	834,172,750		-		-		-		834,172,750		98,40	
2.10.2.10.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100%	887,632,932,00	831,043,650		-		-		-		831,043,650			
2.10.2.10.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	21 dokumen	46,545,262,00	3,129,100		-		-		-		3,129,100			
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terebutuhnya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	773,102,880		-		-		-		773,102,880		125,45	
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				54,056,907		-		-		-		54,056,907			
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				150,000		-		-		-		150,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				12.000.000		-		-		-		12.000.000			
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				55.662.203		-		-		-		55.662.203			
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				32.686.414		-		-		-		32.686.414			
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				10.984.218		-		-		-		10.984.218			
2.10.2.10.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				43.580.144		-		-		-		43.580.144			
2.10.2.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			5.125.000		-		-		-		5.125.000			
2.10.2.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman			93.656.163		-		-		-		93.656.163			
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah			269.812.731		-		-		-		269.812.731			
2.10.2.10.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah			123.389.100		-		-		-		123.389.100			
2.10.2.10.01.01.21	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Tersedianya tenaga penunjang kinerja SKPD			60.000.000		-		-		-		60.000.000			
2.10.2.10.01.01.22	Penyediaan Jasa Pengamanan	Tersedianya tenaga pengamanan			12.000.000		-		-		-		12.000.000			
													-			
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	-		556.102.646		-		-		-		556.102.646		108.20	
2.10.2.10.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor			165.776.656		-		-		-		165.776.656			
2.10.2.10.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor			125.412.500		-		-		-		125.412.500			
2.10.2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas			210.262.584		-		-		-		210.262.584			
2.10.2.10.01.02.45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/Printer/AC dan Mesin Ketik)	Terpeliharanya alat kantor pendukung			54.650.906		-		-		-		54.650.906			
													-			
2.10.2.10.01.19	Program Tata Kelola E-Government dan Infrastruktur Jaringan TI dan Komunikasi	Persentase DPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik	20%	2.272.940.848	5.306.516.866		-		-		-		5.306.516.866		117.89	
2.10.2.10.01.19.03	Penguatan Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kebijakan yang mendukung tata kelola e-Gov	1 kebijakan	94.000.000.00	605.056.500		-		-		-		605.056.500			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Jumlah aplikasi e-Gov yang dikembangkan 79 aplikasi 79 aplikasi														
		Jumlah desa/kelurahan yang dilatih dalam pemanfaatan TIK											-			
		Jumlah PD yang dilatih dalam pemanfaatan TIK											-			
		Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5 orang										-			
		Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	43 PD										-			
2.10.2.10.01.19.04	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana prasarana Teknologi Informasi	Jumlah jaringaninternet dan sarpras TI yang terpasang dan terpelihara	53 titik	3.088.415.007.82	2.572.340.093		-		-		-		2.572.340.093			
		Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun	32 PD										-			
2.10.2.10.01.19.01	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana prasarana Teknologi Informasi (COVID19-New Normal)				1.610.356.273		-		-		-		1.610.356.273			
2.10.2.10.01.19.05	Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	3 aplikasi	398.322.500.00	518.764.000		-		-		-		518.764.000			
		Jumlah Desa/Kel. yang dilatih dalam pemanfaatan TIK	15 desa/kel										-			
													-			
2.10.2.10.01.20	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media	325	1.564.913.534	1.856.840.345		-		-		-		1.856.840.345		59.91	
2.10.2.10.01.20.01	Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Pemerintah Daerah	100 orang	561.092.920.00	1.077.344.000		-		-		-		1.077.344.000			
		Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan melalui Pemberitaan Advertorial pada Media Massa	150 berita advertorial										-			
2.10.2.10.01.20.03	Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM	Jumlah Dokumen LPPL Radio Puroboyo FM	1 dokumen	126.908.000.00	298.847.067		-		-		-		298.847.067			
		Jumlah Dialog Interaktif	10 kali										-			
2.10.2.10.01.20.04	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen PPIID Pembantu yang Tersusun	10 dokumen	169.741.350.00	213.268.300		-		-		-		213.268.300			
		Jumlah Kelembagaan KIM yang terbentuk	15 KIM										-			
2.10.2.10.01.20.06	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Informasi melalui Media Luar Ruang	50 buah	155.313.500.00	267.380.978		-		-		-		267.380.978			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Jumlah Cetak Kalender	1.850	eksemplar									-			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		828,399,388		289,163,873		34.91		289,163,873		1.97	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
2.10.2.10.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		16,176,850		14,675,100		90.72		14,675,100			
2.10.2.10.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		16,176,850		14,675,100		90.72		14,675,100			
2.10.2.10.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		431,438,295		68,929,340		15.98		68,929,340			
2.10.2.10.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		91,343,340		20,122,100		22.03		20,122,100			
2.10.2.10.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		116,826,887		23,467,040		20.09		23,467,040			
2.10.2.10.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		35,083,668		518,200		1.48		518,200			
2.10.2.10.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		6,032,400		1,745,500		28.94		1,745,500			
2.10.2.10.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		182,152,000		23,076,500		12.67		23,076,500			
2.10.2.10.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		4,845,924		1,168,500		24.11		1,168,500			
2.10.2.10.01.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		4,845,924		1,168,500		24.11		1,168,500			
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		161,360,529		60,722,683		37.63		60,722,683			
2.10.2.10.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		75,623,829		20,822,683		27.53		20,822,683			
2.10.2.10.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		85,736,700		39,900,000		46.54		39,900,000			
2.10.2.10.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		214,577,790		143,668,250		66.95		143,668,250			
2.10.2.10.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dimas Operasional atau Lapangan				-		115,775,715		47,005,571		40.60		47,005,571			
2.10.2.10.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		3,036,000		961,500		31.67		961,500			
2.10.2.10.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		95,766,075		95,701,179		99.93		95,701,179			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media	-	-	-		502.140.752	116.331.400		23.17		116.331.400		7.10		
2.10.2.10.01.01.15	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-		502.140.752	116.331.400		23.17		116.331.400				
2.10.2.10.01.01.15.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				-		184.302.750	70.481.000		38.24		70.481.000				
2.10.2.10.01.01.15.06	Pelayanan Informasi Publik				-		65.073.352	16.910.400		25.99		16.910.400				
2.10.2.10.01.01.15.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				-		252.764.650	28.940.000		11.45		28.940.000				
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase DPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik	-	-	-		2.441.819.526	575.018.712		23.55		575.018.712		7.44		
2.10.2.10.01.01.16	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-		1.338.140.000	565.078.712		42.23		565.078.712				
2.10.2.10.01.01.16.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				-		1.338.140.000	565.078.712		42.23		565.078.712				
2.10.2.10.01.01.17	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus			-		1.103.679.526	9.940.000		0.90		9.940.000				
2.10.2.10.01.01.17.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah			-		75.123.200	9.940.000		13.23		9.940.000				
		Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Government														
		Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK														
2.10.2.10.01.01.17.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Presentase Service Level Agreement			-		787.836.226	-		-		-				
2.10.2.10.01.01.17.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan			-		240.720.100	-		-		-				
	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro															
2.11.2.11.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	2,346,580,061	5,719,486,176		1,280,426,682	1,395,825,208				6,132,428,322		14,50		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	100	-								1,395,825,208		109,01		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.11.2.11.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				1.330.424.203		-		-		-		1.330.424.203			
2.11.2.11.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				30.401.005		-		-		-		30.401.005			
2.11.2.11.01.08.03	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana di Masa Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid 19				35.000.000		-		-		-		35.000.000			
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	1.457.156.791		-		-		-		1.457.156.791		105.78	
2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				505.026.380		-		-		-		505.026.380			
2.11.2.11.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				189.446.000		-		-		-		189.446.000			
2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				53.114.200		-		-		-		53.114.200			
2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				81.997.348		-		-		-		81.997.348			
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				48.467.900		-		-		-		48.467.900			
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				9.505.792		-		-		-		9.505.792			
2.11.2.11.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				5.584.000		-		-		-		5.584.000			
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				50.374.951		-		-		-		50.374.951			
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				305.167.460		-		-		-		305.167.460			
2.11.2.11.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				44.613.000		-		-		-		44.613.000			
2.11.2.11.01.01.26	Penyediaan Jasa Publikasi				83.859.760		-		-		-		83.859.760			
2.11.2.11.01.01.28	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				80.000.000		-		-		-		80.000.000			
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	-	-	273.004.655		-		-		-		273.004.655		110.24	
2.11.2.11.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				52.128.000		-		-		-		52.128.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.11.2.11.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				157.305.651		-		-		-		157.305.651			
2.11.2.11.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				18.646.000		-		-		-		18.646.000			
2.11.2.11.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor				44.925.004		-		-		-		44.925.004			
2.11.2.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-	26.736.644		-		-		-		26.736.644		61,20	
2.11.2.11.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				26.736.644		-		-		-		26.736.644			
2.11.2.11.01.19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro (CUKAI)	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	100 UM	257.500.000	790.293.674		-		-		-		790.293.674		306,91	
2.11.2.11.01.19.12	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Anyaman Plastik) (Cukai)				132.755.100		-		-		-		132.755.100			
2.11.2.11.01.19.21	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Ketrampilan Bordir)				-		-		-		-		-			
2.11.2.11.01.19.22	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Pembuatan Paving Pres dan Batu Bata Bagi IKM)				-		-		-		-		-			
2.11.2.11.01.19.23	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Ketrampilan Sablon Kaos)				-		-		-		-		-			
2.11.2.11.01.19.24	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Ketrampilan Batik) (Cukai)				99.905.000		-		-		-		99.905.000			
2.11.2.11.01.19.26	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Ketrampilan Menjahit / Konveksi)				-		-		-		-		-			
2.11.2.11.01.19.27	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan pembuatan beton pracetak bagi IKM)				-		-		-		-		-			
2.11.2.11.01.19.28	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi PKL/Asongan)				256.384.000		-		-		-		256.384.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.11.2.11.01.01.25.01	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Keterampilan Sablon Kaos)				93.379.990		-		-		-		93.379.990			
2.11.2.11.01.01.25.02	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat (Pelatihan Keterampilan Kerajinan (Craft))				145.284.084		-		-		-		145.284.084			
2.11.2.11.01.01.25.03	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Keterampilan Desain Batik Lanjutan)				62.585.500		-		-		-		62.585.500			
													-			
2.11.2.11.01.20	Program Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM	128,140	199,840,012	504,248,854		-		-		-		504,248,854		127,41	
2.11.2.11.01.20.01	Pelatihan Manajemen Praktis bagi Pelaku Usaha Mikro				52.987.030		-		-		-		52.987.030			
2.11.2.11.01.20.03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro				56.074.550		-		-		-		56.074.550			
2.11.2.11.01.20.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro				66.409.800		-		-		-		66.409.800			
2.11.2.11.01.20.05	Penumbuhan Wirausaha Baru				49.489.724		-		-		-		49.489.724			
2.11.2.11.01.20.06	Pelatihan Keterampilan Skema Pemulihan Usaha Mikro di Masa Kenormalan Baru				189.121.800		-		-		-		189.121.800			
2.11.2.11.01.20.07	Pelatihan Pelaku Usaha dalam rangka Pemanfaatan Online / Media Sosial di masa Kenormalan Baru				58.823.000		-		-		-		58.823.000			
2.11.2.11.01.20.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam rangka Pemulihan Dampak Ekonomi di Masa Kenormalan Baru				31.342.950		-		-		-		31.342.950			
													-			
2.11.2.11.01.21	Program Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	689	608,813,367	1,272,220,350		-		-		-		1,272,220,350		105,52	
2.11.2.11.01.21.02	Enterpreneurship Training dan Motivasi Pengembangan Usaha Koperasi				-		-		-		-		-			
2.11.2.11.01.21.04	Pelatihan Manajerial, Best Practice, Pengembangan Informasi dan jaringan Usaha Koperasi Bagi Unit Usaha Koperasi				223.015.700		-		-		-		223.015.700			
2.11.2.11.01.21.05	Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				48.420.150		-		-		-		48.420.150			
2.11.2.11.01.21.06	Sosialisasi Regulasi Peraturan Perkoperasian				-		-		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.11.2.11.01.21.07	Desiminasi Perlindungan Usaha dan Akses Permodalan Koperasi				-		-		-		-		-			
2.11.2.11.01.21.08	Bimbingan Teknis Perkoperasian				292.385.000		-		-		-		292.385.000			
2.11.2.11.01.21.14	Pengendalian dan Pengawasan Koperasi				44.550.000		-		-		-		44.550.000			
2.11.2.11.01.21.16	Pembinaan dan Penghargaan Koperasi berprestasi				-		-		-		-		-			
2.11.2.11.01.21.17	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi				276.350.500		-		-		-		276.350.500			
2.11.2.11.01.21.18	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah				387.499.000		-		-		-		387.499.000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		1.185.215.327		397.342.146		33.52		397.342.146		1.75	
		Keputusan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
2.11.2.11.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang sesuai peraturan			-		15.000.000		-		-		-			
2.11.2.11.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			-		15.000.000		-		-		-			
2.11.2.11.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum yang terpenuhi			-		257.218.509		69.133.114		26.88		69.133.114			
2.11.2.11.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik kantor yang tersedia			-		4.992.516		-		-		-			
2.11.2.11.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah komponen listrik kantor yang tersedia			-		98.532.146		29.710.314		30.15		29.710.314			
2.11.2.11.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			-		19.999.847		5.248.300		26.24		5.248.300			
2.11.2.11.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia			-		6.744.000		2.788.000		41.34		2.788.000			
2.11.2.11.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan dan konsultasi yang tersedia			-		126.950.000		31.386.500		24.72		31.386.500			
2.11.2.11.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi			-		740.322.400		273.948.441		37.00		273.948.441			
2.11.2.11.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia			-		479.992.400		169.337.205		35.28		169.337.205			
2.11.2.11.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia			-		260.330.000		104.611.236		40.18		104.611.236			
2.11.2.11.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang memadai			-		172.674.418		54.260.591		31.42		54.260.591			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.11.2.11.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			-		100.765.400		47.037.477		46,68		47.037.477			
2.11.2.11.01.01.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				-		10.000.000		-		-		-			
2.11.2.11.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara			-		9.971.500		-		-		-			
2.11.2.11.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara			-		29.987.100		7.223.114		24,09		7.223.114			
2.11.2.11.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang terpelihara			-		21.950.418		-		-		-			
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas.	-	-	-		73.550.000		-		-		-		0,00	
2.11.2.11.01.01.17	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi.			-		73.550.000		-		-		-			
2.11.2.11.01.01.17.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas			-		43.550.000		-		-		-			
2.11.2.11.01.01.17.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pemeriksaan kepatuhan			-		30.000.000		-		-		-			
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang sehat	-	-	-		67.000.000		-		-		-		0,00	
2.11.2.11.01.01.18	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang telah dinilai kesehatannya.			-		67.000.000		-		-		-			
2.11.2.11.01.01.18.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP-USP/KSPPS-USPPS yang telah difasilitasi penilaian kesehatan			-		67.000.000		-		-		-			
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	-	-	-		390.304.000		15.600.000		4,00		15.600.000		1,30	
2.11.2.11.01.01.19	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.			-		390.304.000		15.600.000		4,00		15.600.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.11.2.11.01.01.19.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah modul atau media pelatihan perkoperasian yang dikembangkan atau dihasilkan			-	390.304.000	7.800.000	2.00	7.800.000							
		Jumlah SDM pengelola koperasi yang difasilitasi melalui pelatihan perkoperasian														
		Jumlah SDM pengelola koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM														
2.11.2.11.01.01.19.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah modul atau media pelatihan usaha yang dikembangkan atau dihasilkan			-	-	7.800.000	-	7.800.000							
		Jumlah SDM pengelola usaha yang difasilitasi melalui pelatihan usaha														
		Jumlah SDM pengelola usaha yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM														
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi.	-	-	-	131.950.000	-	-	-					0.00		
2.11.2.11.01.01.20	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			-	131.950.000	-	-	-							
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran														
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan.														
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha.														
2.11.2.11.01.01.20.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya			-	131.950.000	-	-	-							
		Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses permodalan														
		Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan														
		Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk direstrukturisasi usahanya														
		Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan														
		Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses promosi														

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan kualitas produksinya											-			
		Jumlah Koperasi yang dikuatkan kelembagaannya											-			
		Jumlah koperasi yang terakses informasi perkoperasian											-			
													-			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	-	-	-	310.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00		
2.11.2.11.01.01.21	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pemberdayaan UM yang dilaksanakan	0.01	50.000.000	-	310.000.000	-	-	-	-	-	-	-			
2.11.2.11.01.01.21.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang terdata	714.00	50.000.000	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-			
2.11.2.11.01.01.21.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang dilatih			-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-			
													-			
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan pengembangan UMKM	-	-	-	90.356.800	-	-	-	-	-	-	-	0.00		
2.11.2.11.01.01.22	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase pengembangan UM yang dilaksanakan	0.14	305.000.000	-	90.356.800	-	-	-	-	-	-	-			
2.11.2.11.01.01.22.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UM yang difasilitasi pengembangan produk	180	305.000.000	-	90.356.800	-	-	-	-	-	-	-			
													-			
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
													-			
													-			
	Urusan Penanaman Modal			1,638,649,676	3,571,004,461	1,604,441,567	380,042,452	23.69	3,951,046,913	23.70						
2.12.2.12.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	595,091,683	1,455,784,358	-	-	-	1,455,784,358	244.63						
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80	-					-				-			
2.12.2.12.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				1,363,895,958				1,363,895,958							

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.12.2.12.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				66.503.400		-		-		-		66.503.400			
2.12.2.12.01.01.08.03	operasional kesekretariatan (Covid 19 new normal)				25.385.000		-		-		-		25.385.000			
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	586.473.604		-		-		-		586.473.604		131.54	
2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				83.541.076		-		-		-		83.541.076			
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				49.926.525		-		-		-		49.926.525			
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				5.488.845		-		-		-		5.488.845			
2.12.2.12.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				5.303.100		-		-		-		5.303.100			
2.12.2.12.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				2.718.000		-		-		-		2.718.000			
2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				21.567.155		-		-		-		21.567.155			
2.12.2.12.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				254.998.403		-		-		-		254.998.403			
2.12.2.12.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah				59.930.000		-		-		-		59.930.000			
2.12.2.12.01.01.21	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				53.600.000		-		-		-		53.600.000			
2.12.2.12.01.01.22	Penyediaan Jasa Publikasi				49.400.500		-		-		-		49.400.500			
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	620.608.029		-		-		-		620.608.029		302.39	
2.12.2.12.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				24.596.500		-		-		-		24.596.500			
2.12.2.12.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				21.594.100		-		-		-		21.594.100			
2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				103.823.792		-		-		-		103.823.792			
2.12.2.12.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC dan Mesin Tik)				26.485.137		-		-		-		26.485.137			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.12.2.12.01.02.45	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Pajak Rakok)				444,108,500		-		-		-		444,108,500			
2.12.2.12.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-	67,241,200		-		-		-		67,241,200		47.25	
2.12.2.12.01.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				67,241,200		-		-		-		67,241,200			
2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor skala menengah dan besar yang berinvestasi di Kab. Madiun	-	-	268,435,670		-		-		-		268,435,670		74.23	
2.12.2.12.01.16.12	Penyusunan Peraturan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Penanaman Modal yang disusun	-	-	-		-		-		-		-			
2.12.2.12.01.16.15	Penyusunan Peta Potensi Investasi	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi yang disusun	-	-	29,390,020		-		-		-		29,390,020			
2.12.2.12.01.16.22	Fasilitasi Percepatan Investasi	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	-	-	179,542,650		-		-		-		179,542,650			
2.12.2.12.01.16.25	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi	-	-	59,503,000		-		-		-		59,503,000			
2.12.2.12.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan (%)	-	-	144,926,950		-		-		-		144,926,950		139.72	
2.12.2.12.01.18.01	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	-	-	11,871,000		-		-		-		11,871,000			
2.12.2.12.01.18.05	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase dokumen perizinan yang diterbitkan	-	-	-		-		-		-		-			
2.12.2.12.01.18.06	Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat yang disusun	-	-	29,252,200		-		-		-		29,252,200			
2.12.2.12.01.20	Program Peningkatan Investasi Usaha	Jumlah publikasi data informasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	-	-	103,803,750		-		-		-		103,803,750			
2.12.2.12.01.20	Program Peningkatan Investasi Usaha	Jumlah investor skala menengah dan besar yang berinvestasi di Kab. Madiun	100 investor	468,877,614	246,550,500		-		-		-		246,550,500		52.58	
		Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	10%	-	-		-		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.12.2.12.01.01.20.01	Fasilitasi Percepatan Investasi	Jumlah event promosi investasi yang diikuti	6 event	300.000.000	124.927.000		-		-		-		124.927.000			
2.12.2.12.01.01.20.02	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rencana pengembangan penanaman modal yang disusun	1 dokumen	88.877,614	106.586.000		-		-		-		106.586.000			
2.12.2.12.01.01.20.03	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi	50%	80.000.000	15.037.500		-		-		-		15.037.500			
													-			
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan (%)	75%	105.802,764	-		-		-		-		-			
													-			
2.12.2.12.01.01.21	Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan				180.984,150		-		-		-		180.984,150			
2.12.2.12.01.01.21.01	Penyusunan Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan				175.988,150		-		-		-		175.988,150			
2.12.2.12.01.01.21.02	Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan				4.996,000		-		-		-		4.996,000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		897.546,967		354.790,452		39,53		354.790,452		3,39	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
2.12.2.12.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		9.155,300		303,600		3,32		303,600			
2.12.2.12.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		9.155,300		303,600		3,32		303,600			
2.12.2.12.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		182.427,547		42.718,202		23,42		42.718,202			
2.12.2.12.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		65.021,472		1.430,000		2,20		1.430,000			
2.12.2.12.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		7.482,750		-		-		-			
2.12.2.12.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				-		16.396,325		10.044,531		61,26		10.044,531			
2.12.2.12.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		93.527,000		31.243,671		33,41		31.243,671			
2.12.2.12.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		109.450,000		109.170,000		99,74		109.170,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.12.2.12.01.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		109.450.000		109.170.000		99,74		109.170.000			
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		425.684.400		166.544.724		39,12		166.544.724			
2.12.2.12.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		178.040.400		53.794.724		30,21		53.794.724			
2.12.2.12.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		247.644.000		112.750.000		45,53		112.750.000			
2.12.2.12.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		170.829.720		36.053.926		21,11		36.053.926			
2.12.2.12.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		129.257.695		35.088.926		27,15		35.088.926			
2.12.2.12.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		41.572.025		965.000		2,32		965.000			
													-			
	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi	-	-	-		80.929,010		3.592,000		4,44		3.592,000		1,03	
2.12.2.12.01.01.17	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-		80.929.010		3.592.000		4,44		3.592.000			
2.12.2.12.01.01.17.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				-		80.929.010		3.592.000		4,44		3.592.000			
													-			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kepuasan masyarakat per jenis layanan	-	-	-		174.883,830		16,170,000		9,25		16,170,000		3,02	
2.12.2.12.01.01.18	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				-		174.883.830		16.170.000		9,25		16.170.000			
2.12.2.12.01.01.18.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				-		59.201.230		7.721.000		13,04		7.721.000			
2.12.2.12.01.01.18.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				-		115.682.600		8.449.000		7,30		8.449.000			
													-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM	-	-	-		372,462,000		3,990,000		1.07		3,990,000		0.35		
2.12.2.12.01.01.19	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-		372,462,000		3,990,000		1.07		3,990,000				
2.12.2.12.01.01.19.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				-		74,389,072		490,000		0.66		490,000				
2.12.2.12.01.01.19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				-		259,499,687		3,500,000		1.35		3,500,000				
2.12.2.12.01.01.19.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				-		38,573,241		-		-		-				
													-				
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	-	-	-								-				
													-				
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	-	-	-		78,619,760		1,500,000		1.91		1,500,000		0.44		
2.12.2.12.01.01.20	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		78,619,760		1,500,000		1.91		1,500,000				
2.12.2.12.01.01.20.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				-		78,619,760		1,500,000		1.91		1,500,000				
													-				
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						2,452,413,179	4,040,571,852		2,078,007,989		19.38		4,443,197,000		21.13	
2.13.2.13.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	909,963,179	922,303,907		-						922,303,907		101.36		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80	-									-				
2.13.2.13.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				780,103,907		-		-		-		780,103,907				
2.13.2.13.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				142,200,000		-		-		-		142,200,000				
													-				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.13.2.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	755,010,802	-	-	-	-	-	-	755,010,802	-	-	83.37	
2.13.2.13.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				89,975,707	-	-	-	-	-	-	89,975,707	-	-		
2.13.2.13.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				50,860,000	-	-	-	-	-	-	50,860,000	-	-		
2.13.2.13.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				7,343,000	-	-	-	-	-	-	7,343,000	-	-		
2.13.2.13.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				39,329,250	-	-	-	-	-	-	39,329,250	-	-		
2.13.2.13.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				8,268,000	-	-	-	-	-	-	8,268,000	-	-		
2.13.2.13.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				22,813,880	-	-	-	-	-	-	22,813,880	-	-		
2.13.2.13.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				401,102,065	-	-	-	-	-	-	401,102,065	-	-		
2.13.2.13.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah				39,983,000	-	-	-	-	-	-	39,983,000	-	-		
2.13.2.13.01.01.21	Penyediaan Jasa Publikasi				23,335,900	-	-	-	-	-	-	23,335,900	-	-		
2.13.2.13.01.01.24	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				72,000,000	-	-	-	-	-	-	72,000,000	-	-		
2.13.2.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	192,662,193	-	-	-	-	-	-	192,662,193	-	-	122.31	
2.13.2.13.01.02.10	Pengadaan mebeleur				13,500,000	-	-	-	-	-	-	13,500,000	-	-		
2.13.2.13.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.13.2.13.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				25,000,000	-	-	-	-	-	-	25,000,000	-	-		
2.13.2.13.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				144,810,863	-	-	-	-	-	-	144,810,863	-	-		
2.13.2.13.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				3,190,880	-	-	-	-	-	-	3,190,880	-	-		
2.13.2.13.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung				6,160,450	-	-	-	-	-	-	6,160,450	-	-		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.13.2.13.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	-	-	105.650.000	-	-	-	-	-	-	105.650.000	-	70.43		
2.13.2.13.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				105.650.000							105.650.000				
2.13.2.13.01.23	Program Pengembangan Olah Raga	Persentase pemuda yang aktif	-	-	600.316.500	-	-	-	-	-	-	600.316.500	-	82.13		
		Jumlah atlit yang mendapat medali	-	-												
2.13.2.13.01.23.06	Penyelenggaraan Kejuaraan Pencak Silat Antar Pelajar (DID)				85.885.500							85.885.500				
2.13.2.13.01.23.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional dan Pemeliharaan GOR				-							-				
2.13.2.13.01.23.14	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat				251.988.000							251.988.000				
2.13.2.13.01.23.24	Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun (Pajak Rokok)				22.076.000							22.076.000				
2.13.2.13.01.23.25	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga				240.367.000							240.367.000				
2.13.2.13.01.24	Program Pengembangan Olahraga dan Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif	6%	1,542,450,000	693,084,000	-	-	-	-	-	-	693,084,000	-	44.93		
		Jumlah atlit yang mendapat medali	10	-								-				
2.13.2.13.01.24.01	Peningkatan SDM Kepemudaan				136.542.000							136.542.000				
2.13.2.13.01.24.02	Peningkatan Prestasi Olahraga				237.850.000							237.850.000				
2.13.2.13.01.24.03	Peningkatan Pemasarakatan Olahraga				318.692.000							318.692.000				
2.13.2.13.01.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga		-	-	55.259.050	-	-	-	-	-	-	55.259.050	-	69.07		
2.13.2.13.01.19.02	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi				55.259.050							55.259.050				
2.13.2.13.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		-	-	676.334.000	-	-	-	-	-	-	676.334.000	-	92.46		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.13.2.13.01.16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan				29.092.000		-		-		-		29.092.000			
2.13.2.13.01.16.10	Seleksi, Pembinaan, Pengiriman Paskibraka				647.242.000		-		-		-		647.242.000			
													-			
2.13.2.13.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				39.951.400		-		-		-		39.951.400		-	
2.13.2.13.01.20.19	Pelaksanaan Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Atlit				39.951.400		-		-		-		39.951.400			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-			825.113.085		194.556.319		23.58		194.556.319		1.81	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-									-			
2.13.2.13.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		150.700.000		-		-		-			
2.13.2.13.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		150.700.000		-		-		-			
2.13.2.13.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		674.413.085		194.556.319		28.85		194.556.319			
2.13.2.13.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-		674.413.085		194.556.319		28.85		194.556.319			
													-			
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	-	-	-		564.644.904		6.075.000		1.08		6.075.000		0.33	
2.13.2.13.01.15	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				-		564.644.904		6.075.000		1.08		6.075.000			
2.13.2.13.01.15.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				-		30.000.000		-		-		-			
2.13.2.13.01.15.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				-		534.644.904		6.075.000		1.14		6.075.000			
													-			
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				-		-		-		-		-			
													-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi	-	-	-	688.250,000	201.993,829		29.35		201.993,829		6.33			
2.13.2.13.01.01.19	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				-	488.250,000	192.493,829		39.43		192.493,829					
2.13.2.13.01.01.19.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota				-	488.250,000	192.493,829		39.43		192.493,829					
2.13.2.13.01.01.21	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				-	200.000,000	9.500,000		4.75		9.500,000					
2.13.2.13.01.01.21.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				-	200.000,000	9.500,000		4.75		9.500,000					
	Urusan Statistik					326.255,007	942.846,360	319.751,390	106.345,170	33.26	1.049.191,530		64.11			
2.14.2.10.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid	80%	326.255,007	471.423,180	-	-	-	-	-	471.423,180		72.96			
2.14.2.10.01.15.18	Kompilasi Data Statistik Sektoral				63.238,746	-	-	-	-	-	63.238,746					
2.14.2.10.01.15.20	Penyusunan Data Statistik Kewilayahan				159.829,066	-	-	-	-	-	159.829,066					
2.14.2.10.01.15.21	Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral (DID)				136.968,050	-	-	-	-	-	136.968,050					
2.14.2.10.01.01.15.17	Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral				67.517,962	-	-	-	-	-	67.517,962					
2.14.2.10.01.01.15.22	Forum Pengelolaan dan Pemanfaatan data Statistik Sektoral				43.869,356	-	-	-	-	-	43.869,356					
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan informasi statistik sektoral yang disediakan	-	-	-	319.751,390	106.345,170	33.26	106.345,170	10.74						
2.14.2.10.01.01.15	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-	319.751,390	106.345,170	33.26	106.345,170							
2.14.2.10.01.01.15.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				-	108.381,882	38.498,970	35.52	38.498,970							
2.14.2.10.01.01.15.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				-	211.369,508	67.846,200	32.10	67.846,200							
	Urusan Persandian				257.099,849	241.814,058	120.938,950	20.500,000	16.95	262.314,058		29.76				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.10.2.10.01.07	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase DPD yang telah melakukan pengklasifikasian informasi	47,54%	257,099,849	241,814,058		-		-		-		241,814,058		47,49	
2.10.2.10.01.07.03	Penyusunan Perencanaan, Kebijakan dan Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				47,954,500		-		-		-		47,954,500			
2.10.2.10.01.07.04	Pengelolaan Sumber Daya Persandian Meliputi SDM Materil Sandi dan Klasifikasi Informasi				83,760,000		-		-		-		83,760,000			
2.10.2.10.01.07.05	Operasional Pengaman Informasi Persandian dan Jaring Komunikasi Sandi				23,101,500		-		-		-		23,101,500			
2.10.2.10.01.07.06	Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)				-		-		-		-		-			
2.10.2.10.01.07.07	Asistensi Pembentukan CSIRT Sektor Pemerintah				-		-		-		-		-			
2.15.2.10.01.01.16.01	Operasional Pengamanan Informasi Persandian				7,680,000		-		-		-		7,680,000			
2.15.2.10.01.01.16.02	Penyusunan Kebijakan Persandian				36,213,158		-		-		-		36,213,158			
2.15.2.10.01.01.16.03	Pengelolaan Sumber Daya Persandian				38,004,900		-		-		-		38,004,900			
2.15.2.10.01.01.16.05	Pengelolaan Sumber Daya Persandian (COVID19-New Normal)				5,100,000		-		-		-		5,100,000			
													-			
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase informasi yang telah diamankan	-	-	-		120,938,950		20,500,000		16,95		20,500,000		5,51	
2.15.2.10.01.01.15	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-		72,749,000		4,500,000		6,19		4,500,000			
2.15.2.10.01.01.15.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-		8,798,900		4,500,000		51,14		4,500,000			
2.15.2.10.01.01.15.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-		63,950,100		-		-		-			
2.15.2.10.01.01.16	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				-		48,189,950		16,000,000		33,20		16,000,000			
2.15.2.10.01.01.16.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-		48,189,950		16,000,000		33,20		16,000,000			
													-			
	Urusan Budaya				1,500,000,000	4,126,156,200	1,691,724,425	138,500,000	8,19	4,264,656,200	90,63					

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDS/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDS/d Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDS/d (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDS/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	42.99%	1,500,000,000	2,063,078,100								2,063,078,100		97.09	
		Persentase benda situs cagar budaya yang dikembangkan	3.86%				-		-		-		-			
2.16 . 1.01.01 . 15.07	Aubade dan Gelar Seni Tasyakuran dalam Rangka HUT RI				100,000,000		-		-		-		100,000,000			
2.16 . 1.01.01 . 15.40	Pelestarian Cagar Budaya				386,950,000		-		-		-		386,950,000			
2.16 . 1.01.01 . 15.42	Pelestarian Seni dan Budaya (DID)				496,861,500		-		-		-		496,861,500			
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 43	Pelestarian Kesenian Daerah				275,390,500		-		-		-		275,390,500			
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 44	Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi				418,872,100		-		-		-		418,872,100			
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 45	Pengembangan Kelembagaan Budaya				385,004,000		-		-		-		385,004,000			
													-			
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	-	-	-		477,267,475		39,500,000		8.28		39,500,000		1.74	
2.16 . 1.01.01.01 . 15	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-		416,767,475		39,500,000		9.48		39,500,000			
2.16 . 1.01.01.01 . 15.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				-		377,267,475		-		-		-			
2.16 . 1.01.01.01 . 15.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				-		39,500,000		39,500,000		100.00		39,500,000			
2.16 . 1.01.01.01 . 17	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-		60,500,000		-		-		-			
2.16 . 1.01.01.01 . 17.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				-		60,500,000		-		-		-			
													-			
	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	-	-	-		79,974,000		-		-		-			
2.16 . 1.01.01.01 . 19	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		79,974,000		-		-		-			
2.16 . 1.01.01.01 . 19.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				-		38,474,000		-		-		-			
2.16 . 1.01.01.01 . 19.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				-		41,500,000		-		-		-			
													-			
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	-	-	-		20,000,000		20,000,000		100.00		20,000,000		-	
2.16 . 1.01.01.01 . 20	Penetapan Cagar Budaya Peringkat				-		20,000,000		20,000,000		100.00		20,000,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Kabupaten/Kota															
2.16.1.01.01.01.20.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				-		20.000.000		20.000.000		100.00		20.000.000			
	Urusan Perpustakaan			1,054,879,943	2,093,679,253		933,528,872		298,005,526		31.92		2,391,684,779		17.09	
2.17.2.17.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	746,613,452	686,081,868								686,081,868		91.89	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skar)	75	-			-		-		-		-			
2.17.2.17.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				669,284,868		-		-		-		669,284,868			
2.17.2.17.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				16,797,000		-		-		-		16,797,000			
2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	587,914,333		-		-		-		587,914,333		93.98	
2.17.2.17.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik				72,483,812		-		-		-		72,483,812			
2.17.2.17.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				48,629,800		-		-		-		48,629,800			
2.17.2.17.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				41,577,100		-		-		-		41,577,100			
2.17.2.17.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17,085,300		-		-		-		17,085,300			
2.17.2.17.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8,870,000		-		-		-		8,870,000			
2.17.2.17.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan				20,724,000		-		-		-		20,724,000			
2.17.2.17.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman				35,062,001		-		-		-		35,062,001			
2.17.2.17.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah				177,652,320		-		-		-		177,652,320			
2.17.2.17.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah				17,330,000		-		-		-		17,330,000			
2.17.2.17.01.01.23	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				148,500,000		-		-		-		148,500,000			
2.17.2.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	274,469,902		-		-		-		274,469,902		78.86	
2.17.2.17.01.02.10	Pengadaan Mebeleur				12,325,500		-		-		-		12,325,500			
2.17.2.17.01.02.10	Pengadaan Peralatan Kantor				31,359,200		-		-		-		31,359,200			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
02.11																
2.17.2.17.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				48,150,458		-		-		-		48,150,458			
2.17.2.17.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional				147,034,744		-		-		-		147,034,744			
2.17.2.17.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				35,600,000		-		-		-		35,600,000			
2.17.2.17.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-	18,620,000		-		-		-		18,620,000		85.61	
2.17.2.17.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18,620,000		-		-		-		18,620,000			
2.17.2.17.01.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menerapkan standart perpustakaan	-	-	240,670,500		-		-		-		240,670,500		65.62	
2.17.2.17.01.16.06	Lomba Minat Baca				196,335,500		-		-		-		196,335,500			
2.17.2.17.01.16.07	Lomba Perpustakaan dan Pengembangan Taman Bacaan				44,335,000		-		-		-		44,335,000			
	Program Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Budaya Baca	Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	-	-	-		-		-		-		-			
2.17.2.17.01.17	Program Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca	Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5%	308,266,491	285,922,650		-		-		-		285,922,650		92.75	
2.17.2.17.01.17.02	Pengadaan Perabot Kerja				22,687,500		-		-		-		22,687,500			
2.17.2.17.01.17.03	Pengadaan Peralatan TIK				18,810,000		-		-		-		18,810,000			
2.17.2.17.01.17.04	Pengadaan Bahan Perpustakaan				49,927,000		-		-		-		49,927,000			
2.17.2.17.01.17.06	Peningkatan Layanan, Otomasi dan Promosi Perpustakaan				90,331,400		-		-		-		90,331,400			
2.17.2.17.01.17.07	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				49,494,000		-		-		-		49,494,000			
2.17.2.17.01.17.23	Pengembangan Taman Pintar				24,970,000		-		-		-		24,970,000			
2.17.2.17.01.17.27	Survey IKM Pelayanan				29,702,750		-		-		-		29,702,750			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		649,296,991		215,968,426		33.26		215,968,426		2.08	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
2.17.2.17.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		314,085,141		71,552,026		22.78		71,552,026			
2.17.2.17.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		314,085,141		71,552,026		22.78		71,552,026			
2.17.2.17.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		131,211,850		35,166,400		26.80		35,166,400			
2.17.2.17.01.01.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		131,211,850		35,166,400		26.80		35,166,400			
2.17.2.17.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		204,000,000		109,250,000		53.55		109,250,000			
2.17.2.17.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		204,000,000		109,250,000		53.55		109,250,000			
													-			
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi	-	-	-		284,231,881		82,037,100		28.86		82,037,100		9.38	
2.17.2.17.01.01.15	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		258,988,000		58,459,500		22.57		58,459,500			
2.17.2.17.01.01.15.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		-		58,459,500		-		58,459,500			
2.17.2.17.01.01.15.08	Pengembangan Bahan Pustaka				-		200,000,000		-		-		-			
2.17.2.17.01.01.15.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				-		58,988,000		-		-		-			
2.17.2.17.01.01.16	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		25,243,881		23,577,600		93.40		23,577,600			
2.17.2.17.01.01.16.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				-		19,577,280		18,248,100		93.21		18,248,100			
2.17.2.17.01.01.16.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		5,666,601		5,329,500		94.05		5,329,500			
													-			
	Urusan Kearsipan						139,709,410		211,628,500		15.48		231,859,800		27.63	
2.18.2.17.01.19	Program Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai audit kearsipan eksternal	7.40	94,024,273	113,061,800		-		-		-		113,061,800		60.72	
2.18.2.17.01.19.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah						33,396,000		-		-		33,396,000			
2.18.2.17.01.19.05	Penataan Depo Arsip						73,395,800		-		-		73,395,800			
2.18.2.17.01.01.19.06	Pengelolaan Arsip Dinamis						6,270,000		-		-		6,270,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
2.18 . 2.17.01 . 20	Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Persentase DPD yang mengelola arsip secara baku	14.80%	45,685,137	98,566,700	-	-	-	-	-	-	98,566,700	108.94			
2.18 . 2.17.01 . 20.09	Bimbingan Teknis bagi Pengelola Arsip				37,968,700	-	-	-	-	-	-	37,968,700				
2.18 . 2.17.01 . 01 . 20 . 10	Pengawasan kearsipan Internal				15,682,500	-	-	-	-	-	-	15,682,500				
2.18 . 2.17.01 . 01 . 20 . 11	Penyusutan Arsip DPD				44,915,500	-	-	-	-	-	-	44,915,500				
	Program Pengelolaan Arsip	Indeks Ketersediaan Arsip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip	-	-	-	130,662,007	20,231,300	15.48	20,231,300	12.60						
2.18 . 2.17.01.01 . 15	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				-	25,008,800	-	-	-	-	-	-				
2.18 . 2.17.01.01 . 15.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				-	25,008,800	-	-	-	-	-	-				
2.18 . 2.17.01.01 . 16	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				-	40,038,075	20,231,300	50.53	20,231,300							
2.18 . 2.17.01.01 . 16.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				-	40,038,075	20,231,300	50.53	20,231,300							
2.18 . 2.17.01.01 . 17	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				-	65,615,132	-	-	-	-	-	-				
2.18 . 2.17.01.01 . 17.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				-	65,615,132	-	-	-	-	-	-				
	Urusan Pertanahan				4,542,986,121	12,820,439,890	4,000,000,000	5,824,050	0.15	12,826,263,940	32.81					
1.04 . 1.04.01 . 25	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah yang bersertifikat	76.74%	4,542,986,121	12,820,439,890	-	-	-	12,820,439,890	141.80						
1.04 . 1.04.01 . 25.01	Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah				6,290,437,090	-	-	-	6,290,437,090							
1.04 . 1.04.01 . 25.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)				7,730,000	-	-	-	7,730,000							
1.04 . 1.04.01 . 25.05	Penatagunan Tanah				79,000,000	-	-	-	79,000,000							
1.04 . 1.04.01 . 25.06	Koordinasi dan Fasilitasi sengketa pertanahan (DID)				92,564,000	-	-	-	92,564,000							
1.04 . 1.04.01 . 25.07	Pengadaan dan Pesertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah (Pajak Rokok)				40,295,000	-	-	-	40,295,000							

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.04.1.04.01.01.25.08	Pengadaan Tanah				6.309.413.800		-		-				6.309.413.800			
1.04.1.04.01.01.25.10	Koordinasi dan Fasilitasi Sengketa Pertanahan				1.000.000		-		-				1.000.000			
													-			
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terselesaikan	-	-	-		4.000.000,00		5.824.050		0.15		5.824.050		0.05	
2.04.1.04.01.01.19	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Terselesaikan			-		4.000.000,000		5.824.050		0.15		5.824.050			
2.04.1.04.01.19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-		4.000.000,000		5.824.050		0.15		5.824.050			
													-			
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah dokumen pengelolaan tanah kosong	-	-	-		-		-		-		-		0.00	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	-	-	-		-		-		-		-		0.00	
	Program Penatagunaan Tanah	Jumlah dokumen penatagunaan tanah	-	-	-		-		-		-		-		0.00	
	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Jumlah Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	-	-	-		-		-		-		-		0.00	
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penyelenggaraan Perizinan membuka tanah yang dikelola	-	-	-		-		-		-		-		0.00	
	URUSAN PILIHAN												-			
	Urusan Kelautan dan Perikanan															
3.01.3.03.01.25	Program Pengembangan Perikanan	Jumlah produksi perikanan	4,165.22	912.690,900	1,205,602,885		247,258,224		55,367,400		22.39		1,260,970,285		47.01	
3.01.3.03.01.25.22	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan				1,205,602,885		-		-		-		1,205,602,885		66.70	
3.01.3.03.01.25.23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK)				674,253,260		-		-		-		674,253,260			
3.01.3.03.01.25.24	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) (DAK)				397,157,600		-		-		-		397,157,600			
3.01.3.03.01.01.25.28	Kreasi Cipta Menu Olahan Berbahan Baku Ikan				120,692,000		-		-		-		120,692,000			
					13,500,025		-		-		-		13,500,025			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-	-	-		138,303,279		52,317,400		37.83		52,317,400		15.40		
3.01.3.03.01.01.15	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				-		28,676,500		3,050,000		10.64		3,050,000				
3.01.3.03.01.01.15.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				-		28,676,500		3,050,000		10.64		3,050,000				
3.01.3.03.01.01.24	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				-		109,626,779		49,267,400		44.94		49,267,400				
3.01.3.03.01.01.24.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		109,626,779		49,267,400		44.94		49,267,400				
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan hasil Produk Olahan Asal Ikan	-	-	-		80,278,445		-		-		-				
3.01.3.03.01.01.28	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				-		58,943,445		-		-		-				
3.01.3.03.01.01.28.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		58,943,445		-		-		-				
3.03.3.03.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		21,335,000		-		-		-				
3.03.3.03.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		21,335,000		-		-		-				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-	-	-		28,676,500		3,050,000		10.64		3,050,000		1.20		
	Urusan Pariwisata				8,341,155,154		10,864,015,074		3,211,627,803		92,035,175		2,87		10,956,050,249		39.44
3.02.2.13.01.18	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (unit)	13	4,909,143,362	5,717,085,854		-		-		-		5,717,085,854		58.52		
		Jumlah pelaku industri pariwisata yang sudah dibina (usaha)	24										-				
3.02.2.13.01.18.04	Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK)				1,904,928,474		-		-		-		1,904,928,474				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.02.2.13.01.18.05	Pengembangan Daya Tarik Wisata (Penunjang DAK)				38.620.000		-		-		-		38.620.000			
3.02.2.13.01.18.06	Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata				2.233.812.080		-		-		-		2.233.812.080			
3.02.2.13.01.18.07	Penyusunan DED Pusat Pelayanan Sekunder Pariwisata Daerah (DID)				99.820.000		-		-		-		99.820.000			
3.02.2.13.01.18.08	Festival Kampung Pesilat (DID)				620.805.000		-		-		-		620.805.000			
3.02.2.13.01.18.09	Festival Seni Instalasi Bambu				199.604.000		-		-		-		199.604.000			
3.02.2.13.01.18.12	Penyusunan Grand Design Pariwisata Daerah				274.999.100		-		-		-		274.999.100			
3.02.2.13.01.01.18.09	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi				197.233.000		-		-		-		197.233.000			
3.02.2.13.01.01.18.44	Pengembangan Daya Tarik Wisata				147.264.200		-		-		-		147.264.200			
													-			
3.02.2.13.01.19	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan	22	2.106.011.792	2.643.569.550		-		-		-		2.643.569.550		63.07	
		Jumlah kelembagaan pariwisata yang dikembangkan	16		0		-		-		-		-			
3.02.2.13.01.19.02	Pagelaran Seni dan Budaya				364.800.000		-		-		-		364.800.000			
3.02.2.13.01.19.06	Fasilitasi Kerjasama Pariwisata Daerah				412.865.550		-		-		-		412.865.550			
3.02.2.13.01.19.37	Festival Sepasar Ing Madiun				479.630.000		-		-		-		479.630.000			
3.02.2.13.01.19.38	Fasilitasi Pemilihan Duta Wisata (Pajak Rokok)				79.572.000		-		-		-		79.572.000			
3.02.2.13.01.19.39	Fasilitasi Pemilihan Duta Wisata Jawa Timur				-		-		-		-		-			
3.02.2.13.01.19.41	Fasilitasi Pemilihan Kangmas Nimas Kabupaten Madiun (Pajak Rokok)				-		-		-		-		-			
3.02.2.13.01.19.42	Pagelaran Wayang Kulit				148.728.000		-		-		-		148.728.000			
3.02.2.13.01.19.43	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah (DID)				721.573.000		-		-		-		721.573.000			
3.02.2.13.01.19.44	Promosi Pariwisata Selingkar Wilis (DID)				202.062.000		-		-		-		202.062.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.02.2.13.01.19.45	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah (Pajak Rokok)				98,400,000		-		-		-		98,400,000			
3.02.2.13.01.19.43	Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah (DID)				54,000,000		-		-		-		54,000,000			
3.02.2.13.01.19.45	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				81,939,000		-		-		-		81,939,000			
3.02.2.13.01.20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Pariwisata (CUKAI)	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina dengan dana cukai (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.02.2.13.01.20.02	Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Cukai)				-		-		-		-		-			
3.02.2.13.01.20.07	Peningkatan Kapasitas Pemuda (Cukai)				-		-		-		-		-			
3.02.2.13.01.20.08	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Cukai)				-		-		-		-		-			
3.02.2.13.01.21	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur lingkup Pariwisata (CUKAI)	Persentase sarana prasarana pariwisata yang dibangun dengan dana cukai (%)	15%	1,026,000,000	1,968,864,995	-	-	-	-	-	-	-	1,968,864,995		191.90	
3.02.2.13.01.21.01	Pembangunan Pemeliharaan Rehab Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata (Cukai)				1,968,864,995		-		-		-		1,968,864,995			
3.02.2.13.01.23	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan lingkup Pariwisata (CUKAI)	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina dengan dana cukai (%)	80%	300,000,000	534,494,675	-	-	-	-	-	-	-	534,494,675		178.16	
3.02.2.13.01.23.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Cukai)				280,340,000		-		-		-		280,340,000			
3.02.2.13.01.01.22.01	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat lingkup pariwisata (Cukai)				254,154,675		-		-		-		254,154,675			
3.02.2.13.01.15	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan	-	-	-	2,206,627,803	84,385,175	3.82	84,385,175	1.17						
3.02.2.13.01.01.15	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				-	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-			
3.02.2.13.01.01.15.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				-	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.02. 2.13.01.01.16	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-		598.800.000		55.597.000		9,28		55.597.000			
3.02. 2.13.01.01.16.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-		598.800.000		55.597.000		9,28		55.597.000			
3.02. 2.13.01.01.17	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-		957.827.803		28.788.175		3,01		28.788.175			
3.02. 2.13.01.01.17.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-		957.827.803		28.788.175		3,01		28.788.175			
3.02. 2.13.01.01.18	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				-		50.000.000		-		-		-			
3.02. 2.13.01.01.18.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata				-		50.000.000		-		-		-			
													-			
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	-	-	-		705.000.000		7.650.000		1,09		7.650.000		0,32	
3.02. 2.13.01.01.19	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-		705.000.000		7.650.000		1,09		7.650.000			
3.02. 2.13.01.01.19.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				-		605.000.000		7.650.000		1,26		7.650.000			
3.02. 2.13.01.01.19.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				-		100.000.000		-		-		-			
													-			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku industri pariwisata	-	-	-		300.000.000		-		-		-		0,00	
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	-	-	-								-			
3.02. 2.13.01.01.22	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				-		300.000.000		-		-		-			
3.02. 2.13.01.01.22.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				-		200.000.000		-		-		-			
3.02. 2.13.01.01.22.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				-		100.000.000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Urusan Pertanian				42,802,248,996		8,219,376,350		1,589,220,808		19.34		-		46.86	
3.03.3.03.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	13,164,310,389 993,069,282	1,418,933,709		-		-		-		44,391,469,804 1,418,933,709		142.88	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (Skor)	80				-		-		-		-			
3.03.3.03.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				1,368,662,609		-		-		-		1,368,662,609			
3.03.3.03.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				50,271,100		-		-		-		50,271,100			
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	1,141,572,587		-		-		-		1,141,572,587		126.23	
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				7,995,000		-		-		-		7,995,000			
3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				113,147,344		-		-		-		113,147,344			
3.03.3.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				225,000		-		-		-		225,000			
3.03.3.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				28,000,000		-		-		-		28,000,000			
3.03.3.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				116,408,325		-		-		-		116,408,325			
3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				22,379,700		-		-		-		22,379,700			
3.03.3.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				4,991,000		-		-		-		4,991,000			
3.03.3.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				16,580,680		-		-		-		16,580,680			
3.03.3.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3,720,000		-		-		-		3,720,000			
3.03.3.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				79,770,320		-		-		-		79,770,320			
3.03.3.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				448,325,218		-		-		-		448,325,218			
3.03.3.03.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				80,645,000		-		-		-		80,645,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.03.3.03.01.01.26	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				103,750,000		-		-		-		103,750,000			
3.03.3.03.01.01.27	Penyediaan Jasa Publikasi				115,635,000		-		-		-		115,635,000			
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	338,626,810	-	-	-	-	-	-	338,626,810	98.84			
3.03.3.03.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				81,970,000		-		-		-		81,970,000			
3.03.3.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				1,064,500		-		-		-		1,064,500			
3.03.3.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				153,471,010		-		-		-		153,471,010			
3.03.3.03.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				1,400,000		-		-		-		1,400,000			
3.03.3.03.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				43,637,700		-		-		-		43,637,700			
3.03.3.03.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala Taman dan Satwa Kantor				5,850,000		-		-		-		5,850,000			
3.03.3.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				51,233,600		-		-		-		51,233,600			
3.03.3.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	-	-	69,430,500	-	-	-	-	-	-	69,430,500				
3.03.3.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				69,430,500		-		-		-		69,430,500			
3.03.3.03.01.24	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (cukai)	Jumlah produksi tembakau	235.11	255,000,000	459,014,750	-	-	-	-	-	-	459,014,750	90.89			
3.03.3.03.01.24.09	Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau (Cukai)				209,840,750		-		-		-		209,840,750			
3.03.3.03.01.01.24.10	Penerapan Budidaya Tembakau yang baik di Masa Kenormalan Baru (Cukai)				-		-		-		-		-			
3.03.3.03.01.01.24.11	Penerapan Budidaya Tembakau Yang Baik (Cukai)				-		-		-		-		-			
3.03.3.03.01.01.24.12	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau				249,174,000		-		-		-		249,174,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.03. 3.03.01.27	Program Pemberdayaan Penyuluh dan Lembaga Petani	Persentase kelompok tani tingkat lanjut	79%	293,127,687	566,050,175	-	-	-	-	-	-	566,050,175	97.51			
		Persentase penyuluh tingkat ahli	67%									-				
3.03.3.03.01.27.15	Sarasehan Kelembagaan Petani				402,966,050	-	-	-	-	-	-	402,966,050				
3.03.3.03.01.01.27.06	Penguatan Kapasitas SDM dalam membangun Ketahanan Pangan di Masa Kenormalan Baru				31,084,125	-	-	-	-	-	-	31,084,125				
3.03.3.03.01.01.27.30	pameran hasil produksi				-	-	-	-	-	-	-	-				
3.03.3.03.01.01.27.31	penilaian kelas kelompok				132,000,000	-	-	-	-	-	-	132,000,000				
												-				
3.03. 3.03.01.34	Program Pengembangan Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan		857,000,000	838,678,700	-	-	-	-	-	-	838,678,700	69.48			
		Produksi tebu (ton)	20,001.69									-				
		Produksi kakao (biji kering) (ton)	883.20									-				
		Produksi cengkeh (bunga kering) (ton)	375.30									-				
		Produksi porang (ton)	9,056.63									-				
3.03.3.03.01.34.01	Pembangunan Sarana Prasarana Perkebunan				346,009,000	-	-	-	-	-	-	346,009,000				
3.03.3.03.01.34.02	Pendampingan Penanganan Pasca Panen Kakao (Pajak Rokok)				98,750,000	-	-	-	-	-	-	98,750,000				
3.03.3.03.01.01.34.03	rehabilitasi tanaman perkebunan				197,750,000	-	-	-	-	-	-	197,750,000				
3.03.3.03.01.01.34.09	Bantuan Sarana Produksi Komoditas Perkebunan untuk Mendukung Produksi di Masa Kenormalan Baru				196,169,700	-	-	-	-	-	-	196,169,700				
												-				
3.03. 3.03.01.33	Program Pengembangan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		1,418,000,000	1,056,035,160	-	-	-	-	-	-	1,056,035,160	45.56			
		Produksi mangga	55,598									-				
		Produksi durian	3,911									-				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Produksi jambu air	282										-			
		Produksi cabe	648										-			
		Produksi bawang merah	889										-			
3.03.3.03.01.33.01	Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)				587.962.500		-		-				587.962.500			
3.03.3.03.01.33.02	Rehabilitasi Infrastruktur Kebun Bibit				295.518.260		-		-				295.518.260			
3.03.3.03.01.33.03	Kajian Revisi Perda LP2B				74.700.000		-		-				74.700.000			
3.03.3.03.01.01.37.07	Pengembangan Kebun Bibit Hortikultura				97.854.400		-		-				97.854.400			
													-			
3.03.3.03.01.30	Program Pengembangan Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan		6.986.640.960		7.383.311.872		-		-			7.383.311.872		53.36	
		Produksi padi	545.435.21										-			
		Produksi jagung	56.9577.77										-			
		Produksi kedelai	2.592.34										-			
3.03.3.03.01.30.01	Perlindungan Tanaman Pangan				514.522.530		-		-				514.522.530			
3.03.3.03.01.30.12	Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (DAK)				3.032.200.000		-		-				3.032.200.000			
3.03.3.03.01.30.15	Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian (DID)				595.052.200		-		-				595.052.200			
3.03.3.03.01.30.16	Pengembangan Sarana Prasarana Infrastruktur Pertanian				3.014.834.060		-		-				3.014.834.060			
3.03.3.03.01.01.30.10	Pemanfaatan Pekarangan untuk mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Masa Kenormalan Baru				206.782.500		-		-				206.782.500			
3.03.3.03.01.01.30.18	Obor Pangan Lestari				19.920.582		-		-				19.920.582			
													-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.03. 3.03.01.31	Program Pengembangan Peternakan	Jumlah Produksi Peternakan		1,214,000,000	655,045,300		-		-		-		655,045,300		34.22	
		Produksi daging (ton)	6,333.91													
		Produksi telur (ton)	4,494.58													
		Produksi susu (ton)	421.88													
		Jumlah Populasi Ternak														
		Sapi potong	64,925													
		Sapi perah	216													
		Kambing	84,200													
		Domba	24,128													
		Ayam Buras	1,759,127													
		Ayam Petelur	211,527													
		Ayam Pedaging	323,080													
		Itik	45,426													
3.03.3.03.01.31.11	Pendistribusian Hasil Produksi Peternakan				67,283,000		-		-		-		67,283,000			
3.03.3.03.01.31.13	Rehabilitasi Puskesmas				585,326,800		-		-		-		585,326,800			
3.03.2.03.01.01.31.20	rehabilitasi sarana prasarana peternakan				2,435,500		-		-		-		2,435,500			
3.03.3.03.01.32	Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Persentase partisipasi kelompok tani, GAPOKTAN, dan PSA	100%	719,072,460	2,029,683,750		-		-		-		2,029,683,750		142.53	
3.03.3.03.01.32.01	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (IPDMIP)				1,984,683,750		-		-		-		1,984,683,750			
3.03.3.03.01.01.32.02	Pendampingan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Penunjang IPDMIP)				45,000,000		-		-		-		45,000,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.03. 3.03.01.36	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketenagakerjaan lingkup Pertanian (Cukai)	Persentase kelompok ternak yang dibina	-	-	636.745,750	-	-	-	-	-	-	636.745,750	-	-	151,61	
3.03.3.03.01.36.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veretiner) (Cukai)				87.211,500	-	-	-	-	-	-	87.211,500				
3.03.3.03.01.36.02	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular) (Cukai)				85.354,000	-	-	-	-	-	-	85.354,000				
3.03.3.03.01.36.03	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Ternak) (Cukai)				72.214,350	-	-	-	-	-	-	72.214,350				
3.03.2.03.01.01.36.05	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pembinaan dan pelatihan kelompok ternak di masa kenormalan baru)				93.373,700	-	-	-	-	-	-	93.373,700				
3.03.2.03.01.01.36.06	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pembinaan pembibitan, produksi dan reproduksi ternak dimasa kenormalan baru)				124.238,300	-	-	-	-	-	-	124.238,300				
3.03.2.03.01.01.36.07	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular di masa kenormalan baru)				174.353,900	-	-	-	-	-	-	174.353,900				
3.03. 3.03.01.01.35	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat lingkup Pertanian (Cukai)	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan bibit	4 kelompok	428.400,000	163.500,000	-	-	-	-	-	-	163.500,000	-	-	38,17	
3.03.3.03.01.01.35.01	Bantuan Sarana Produksi Bibit/ Benih Perkebunan (Cukai)				163.500,000	-	-	-	-	-	-	163.500,000				
						-	-	-	-	-	-	-				
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Pemberdayaan Ekonomi				414,411,110	-	-	-	-	-	-	414,411,110			-	
3.03.3.03.01.01.35.02	Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Masa Kenormalan Baru (Cukai)				141.677,300	-	-	-	-	-	-	141.677,300				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.03.3.03.01.01.35.03	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat (Cukai)				96.032.250		-		-		-		96.032.250			
3.03.3.03.01.01.35.04	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat (Pisang Cavendis dan Rojo) (Cukai)				176.701.560		-		-		-		176.701.560			
							-		-		-		-			
3.03.3.03.01.01.38	Program Prasarana dan Sarana Pertanian				4.230.084.325		-		-		-		4.230.084.325		-	
3.03.3.03.01.01.38.01	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian				-		-		-		-		-			
3.03.3.03.01.01.38.02	Sarana produksi dan alat mesin pertanian				48.189.700		-		-		-		48.189.700			
3.03.3.03.01.01.38.03	Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian				857.658.500		-		-		-		857.658.500			
3.03.3.03.01.01.38.04	Pengembangan sarana prasarana infrastruktur pertanian				2.916.756.595		-		-		-		2.916.756.595			
3.03.3.03.01.01.38.05	Rehabilitasi Infrastruktur Kebun Bibit				181.357.480		-		-		-		181.357.480			
3.03.3.03.01.01.38.07	Sarana produksi dan alat mesin pertanian untuk mendukung Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid 19				187.016.300		-		-		-		187.016.300			
3.03.3.03.01.01.38.08	Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (Silpa DAK)				39.105.750		-		-		-		39.105.750			
							-		-		-		-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		838.980.463		233.086.110		27.78		233.086.110		0.50	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
3.03.3.03.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		275.498.750		79.171.600		28.74		79.171.600			
3.03.3.03.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		5.000.000		2.577.000		51.54		2.577.000			
3.03.3.03.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		13.915.000		-		-		-			
3.03.3.03.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		5.000.000		4.502.000		90.04		4.502.000			
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		110.033.500		53.795.850				53.795.850			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
06.04											48.89					
3.03. 3.03.01.01. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		12.000.000		879.650		7.33		879.650			
3.03. 3.03.01.01. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		3.500.250		1.360.100		38.86		1.360.100			
3.03. 3.03.01.01. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		126.050.000		16.057.000		12.74		16.057.000			
3.03. 3.03.01.01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		407.972.063		128.260.121		31.44		128.260.121			
3.03. 3.03.01.01. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		5.111.643		4.393.000		85.94		4.393.000			
3.03. 3.03.01.01. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		143.332.420		23.617.121		16.48		23.617.121			
3.03. 3.03.01.01. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		259.528.000		100.250.000		38.63		100.250.000			
3.03. 3.03.01.01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		155.509.650		25.654.389		16.50		25.654.389			
3.03. 3.03.01.01. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		131.509.650		21.369.389		16.25		21.369.389			
3.03. 3.03.01.01. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		12.000.000		4.285.000		35.71		4.285.000			
3.03. 3.03.01.01. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		5.000.000		-		-		-			
3.03. 3.03.01.01. 09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		7.000.000		-		-		-			
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	-	-	-		358.157.000		8.820.000		2.46		8.820.000		0.36	
3.03. 3.03.01.01. 15	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				-		287.309.000		8.820.000		3.07		8.820.000			
3.03. 3.03.01.01. 15.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				-		226.244.000		8.820.000		3.90		8.820.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.03. 3.03.01.01. 15.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				-		61.065.000	-	-	-	-	-	-			
3.03. 3.03.01.01. 21	Pengembangan Prasarana Pertanian				-		70.848.000	-	-	-	-	-	-			
3.03. 3.03.01.01. 21.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya				-		70.848.000	-	-	-	-	-	-			
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	-	-	-		95.800.000	-	-	-	-	-	-		0.00	
3.03. 3.03.01.01. 30	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				-		95.800.000	-	-	-	-	-	-			
3.03. 3.03.01.01. 30.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				-		95.800.000	-	-	-	-	-	-			
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						269.944.707	126.370.200				126.370.200				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	-	-	-		530.526.710	-	-	-	-	-	-		0.00	
3.03. 3.03.01.01. 22	Pembangunan Prasarana Pertanian				-		530.526.710	-	-	-	-	-	-			
3.03. 3.03.01.01. 22.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				-		64.232.000	-	-	-	-	-	-			
3.03. 3.03.01.01. 22.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				-		466.294.710	-	-	-	-	-	-			
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	-	-	-		2.479.039.124	737.132.278	29.73	737.132.278	29.73	737.132.278	9.07			
3.03. 3.03.01.01. 34	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				-		2.479.039.124	737.132.278	29.73	737.132.278	29.73	737.132.278	9.07			
3.03. 3.03.01.01. 34.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				-		153.750.000	38.437.303	25.00	38.437.303	25.00	38.437.303	25.00			
3.03. 3.03.01.01. 34.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				-		2.100.000.000	698.694.975	33.27	698.694.975	33.27	698.694.975	33.27			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.03. 3.03.01.01. 34.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				-		192.679,574		-		-		-			
3.03. 3.03.01.01. 34.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				-		32.609,550		-		-		-			
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral															
3.05 . 2.12.01 . 18	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah energi baru terbarukan yang dikembangkan (unit)	1 unit	229,261,595	195,753,280						-		195,753,280		43.11	
		Jumlah PAD sektor pertambangan yang diterima (juta)			195,753,280		-		-		-		195,753,280		43.11	
		Persentase rekomendasi pemanfaatan ESDM yang diterbitkan	100%										-			
3.05 . 2.12.01 . 18.01	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengusahaan Energi Sumber Daya Mineral (Pajak Rokok)						172.750,530		-		-		172.750,530			
3.05 . 2.12.01 . 18.02	Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengusahaan Energi Sumber Daya Mineral						23.002,750		-		-		23.002,750			
													-			
	Urusan Industri															
3.07 . 2.11.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Peningkatan IKM	3.10%	1,604,056,600 364,423,866	1,050,003,800 342,164,900		546,667,055		-		-		1,050,003,800 342,164,900		28.43 47.41	
3.07 . 2.11.01 . 16.16	Pendamping Kegiatan APP Bidang Industri						54,624,350		-		-		54,624,350			
3.07 . 2.11.01 . 16.22	Sosialisasi dan Fasilitasi Program Standarisasi Produk IKM						-		-		-		-			
3.07 . 2.11.01 . 16.27	Pelatihan Dasar Desain Kemasan dan Packaging Produk IKM						54,084,400		-		-		54,084,400			
3.07 . 2.11.01 . 16.28	Pelatihan Peningkatan Diversifikasi Produk Kopi dan Coklat						100,237,350		-		-		100,237,350			
3.07 . 2.11.01 . 16.29	Pelatihan Pengembangan Pembuatan Aneka Makanan dan Minuman Olahan						70,333,500		-		-		70,333,500			
3.07 . 2.11.01 . 16.30	Pembinaan dan Pengembangan IKM melalui Pola DVDP (Pajak Rokok)						62,885,300		-		-		62,885,300			
3.07 . 2.01.01 . 01 . 16 . 32	Pengembangan Sentra Industri Kreatif						-		-		-		-			
													-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.07.2.11.01.20	Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Perindustrian (CUKAI)	Jumlah IKM yang dibina	130 IKM	1,239,632,734	182,837,000		-		-		-		182,837,000		7.45	
3.07.2.11.01.20.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Ketrampilan Bordir dan Konveksi) (Cukai)				83,396,000		-		-		-		83,396,000			
3.07.2.11.01.20.02	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Pembuatan Vaving Press dan Beton Pracetak) (Cukai)				99,441,000		-		-		-		99,441,000			
													-			
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah rencana pembangunan industri	-	-	-		74,156,355		-		-		-			
3.07.2.01.01.01.15	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				-		74,156,355		-		-		-			
3.07.2.01.01.01.15.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				-		74,156,355		-		-		-			
													-			
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM yang mendapatkan izin usaha	-	-	-		94,029,645		-		-		-			
3.07.2.01.01.01.16	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)				-		51,920,590		-		-		-			
3.07.2.01.01.01.16.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Inform				-		51,920,590		-		-		-			
3.07.2.01.01.01.17	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				-		42,109,055		-		-		-			
3.07.2.01.01.01.17.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				-		42,109,055		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas	-	-			42,109,055		-				-			
	Urusan Perdagangan			7,660,007,373	19,513,060,462	8,131,576,590	1,792,391,361	22.04	21,305,451,823	60.26						
3.06.2.11.01.01.21	Program pembinaan dan peningkatan pedagang formal	Jumlah pedagang formal	naik 1 % pertahun	828,219,111	547,806,216	-	-	-	547,806,216	66.14						
3.06.2.11.01.01.21.01	Pengembangan Usaha Perdagangan				89,214,372	-	-	-	89,214,372							
3.06.2.11.01.01.21.02	Pengembangan Dan Pemasaran Produk Unggulan				-	-	-	-	-							
3.06.2.11.01.01.21.04	Pelayanan Tera Dan Tera Ulang UTTP				118,231,950	-	-	-	118,231,950							
3.06.2.11.01.01.21.06	Kalibrasi Dan Verifikasi Peralatan Standar Laboratorium Kemetrolagian				74,308,372	-	-	-	74,308,372							
3.06.2.11.01.01.21.07	Peningkatan Pengawasan pedagang tertib niaga				-	-	-	-	-							
3.06.2.11.01.01.21.08	Pengembangan Usaha Pemasaran dalam rangka Ekspor				29,944,700	-	-	-	29,944,700							
3.06.2.11.01.01.21.09	Pengembangan Usaha Perdagangan dalam rangka Pemulihan Dampak Ekonomi di Masa Kenormalan Baru				39,139,920	-	-	-	39,139,920							
3.06.2.11.01.01.21.10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan (Resi Gudang)				196,966,902	-	-	-	196,966,902							
3.06.2.11.01.01.23	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Jumlah pasar ber kriteria SNI	2 pasar	1,840,866,614	4,547,369,506	-	-	-	4,547,369,506	124.73						
2.11.2.11.01.23.02	Peningkatan SDM bagi Pengelola dan Pedagang Pasar Daerah (Pajak Rokok)				45,420,000	-	-	-	45,420,000							
2.11.2.11.01.23.06	Rehabilitasi Pasar Daerah				1,214,141,200	-	-	-	1,214,141,200							
2.11.2.11.01.23.07	Penunjang E- Retribusi Pasar (Pajak Rokok)				98,716,500	-	-	-	98,716,500							
2.11.2.11.01.23.12	Peningkatan Kualitas Aparatur dalam rangka Pelayanan Pasar				267,550,000	-	-	-	267,550,000							
2.11.2.11.01.23.43	Pengelolaan Operasional Keamanan, Kebersihan dan Kelistrikan Pasar				581,469,402	-	-	-	581,469,402							

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.06.2.11.01.01.23.01	Rehabilitasi Pasar Daerah				1.258.027.245		-		-		-		1.258.027.245			
3.06.2.11.01.01.23.03	Peningkatan SDM Bagi Pengelola Dan Pedagang Pasar Daerah				-		-		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.23.04	Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Pasar				255.700.000		-		-		-		255.700.000			
3.06.2.11.01.01.23.05	Pengelolaan Operasional Keamanan, Kebersihan Dan Kelistrikan Pasar				731.715.659		-		-		-		731.715.659			
3.06.2.11.01.01.23.06	Sosialisasi dan Peningkatan SDM Bagi Pengelola Dan Pedagang Pasar Daerah terhadap Covid 19 di masa kenormalan baru				66.225.600		-		-		-		66.225.600			
3.06.2.11.01.01.23.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pasar Daerah				28.403.900		-		-		-		28.403.900			
3.06.2.11.01.01.22	Program Operasi Pasar	Persentase subsidi harga	10%	678.750.000	126.860.241		-		-		-		126.860.241		18,69	
3.06.2.11.01.01.22.02	Monitoring Harga Sembako Dan Barang Penting Lainnya				-		-		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.22.03	Penyediaan Data Inflasi Daerah				-		-		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.22.04	operasi pasar mandiri				15.100.000		-		-		-		15.100.000			
3.06.2.11.01.01.22.05	operasi pasar mandiri dalam rangka menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan di Masa Kenormalan Baru				34.848.741		-		-		-		34.848.741			
3.06.2.11.01.01.22.06	Monitoring harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting lainnya dalam rangka menjaga rantai pasok dan distribusi di Masa Kenormalan Baru				76.911.500		-		-		-		76.911.500			
3.06.2.11.01.01.25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Lingkup Perdagangan (Cukai)	Jumlah PKL/Asongan yang dibina	80 PKL/Asongan	247.500.000	259.815.435		-		-		-		259.815.435		104,98	
3.06.2.11.01.01.25.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi PKL/Asongan)				-		-		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.25.02	Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat				217.951.497		-		-		-		217.951.497			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDS/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDS Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDS Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDS (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDS s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.06.2.11.01.01.25.03	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi PKL/Asongan di Masa Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid 19)				4.863.938		-		-		-		4.863.938			
3.06.2.11.01.01.24	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai (legal)	Persentase barang kena cukai ilegal	0%	98.460.768	111.588.814		-		-		-		111.588.814		57.23	
3.06.2.11.01.01.24.01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran/Penjual Eceran				111.588.814		-		-		-		111.588.814			
3.06.2.11.01.18	Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah sarana perdagangan yang memadai	634 unit	4.794.429.991	4.163.090.019		-		-		-		4.163.090.019		43.85	
3.06.2.11.01.18.11	Operasional Operasi pasar Khusus				180.006.900		-		-		-		180.006.900			
3.06.2.11.01.18.13	Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK)				2.456.059.825		-		-		-		2.456.059.825			
3.06.2.11.01.18.60	Penunjang Revitalisasi Pasar Tradisional				-		-		-		-		-			
3.06.2.11.01.18.72	Sosialisasi Kebijakan Kemetrolagian dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)				68.918.932		-		-		-		68.918.932			
3.06.2.11.01.18.73	Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Laboratorium Kemetrolagian				50.736.506		-		-		-		50.736.506			
3.06.2.11.01.18.76	Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL)				-		-		-		-		-			
3.06.2.11.01.18.77	Bimbingan Manajemen dan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha				50.150.450		-		-		-		50.150.450			
3.06.2.11.01.18.79	Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK)				478.320.000		-		-		-		478.320.000			
3.06.2.11.01.18.83	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrolagian				-		-		-		-		-			
3.06.2.11.01.18.84	Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP (DID)				124.085.656		-		-		-		124.085.656			
3.06.2.11.01.18.85	Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan (Pajak Rokok)				218.431.500		-		-		-		218.431.500			
3.06.2.11.01.18.86	Revitalisasi Pasar Tradisional (Sisa DAK)				488.370.250		-		-		-		488.370.250			
3.06.2.11.01.18.87	Monitoring Harga Sembako dan Barang Penting Lainnya (Pajak Rokok)				48.010.000		-		-		-		48.010.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan	-	-	-		38.000.000		-		-		-		0.00	
3.06.2.11.01.01.20	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan distribusi B2			-		38.000.000		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.20.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap PA-B2 dan P-B2 yang dilaksanakan			-		38.000.000		-		-		-			
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	-	-	-		1.573.620.530		375.400.887		23.86		375.400.887		6.97	
3.06.2.11.01.01.22	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-		867.891.785		197.807.500		22.79		197.807.500			
3.06.2.11.01.01.22.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan			-		412.600.000		4.557.500		1.10		4.557.500			
3.06.2.11.01.01.22.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang difasilitasi			-		455.291.785		193.250.000		42.45		193.250.000			
3.06.2.11.01.01.23	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan			-		705.728.745		177.593.387		25.16		177.593.387			
3.06.2.11.01.01.23.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan			-		85.970.530		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.23.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya yang dibina			-		619.758.215		177.593.387		28.66		177.593.387			
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	-	-	-		782.150.000		159.681.350		20.42		159.681.350		6.11	
3.06.2.11.01.01.24	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-		96.000.000		6.470.000		6.74		6.470.000			
3.06.2.11.01.01.24.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				-		65.000.000		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.24.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				-		31.000.000		6.470.000		20.87		6.470.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
3.06.2.11.01.01.25	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				-		661.150.000		153.211.350		23.17		153.211.350			
3.06.2.11.01.01.25.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				-		75.000.000		30.080.180		40.11		30.080.180			
3.06.2.11.01.01.25.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				-		586.150.000		123.131.170		21.01		123.131.170			
3.06.2.11.01.01.26	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		25.000.000		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.26.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				-		25.000.000		-		-		-			
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan fasilitas Produk Ekspor Unggulan	-	-	-		160.916.000		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.27	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi bagi produk ekspor	0	-	-		160.916.000		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.27.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dgang Nasional yang dilaksanakan	0	-	-		125.916.000		-		-		-			
3.06.2.11.01.01.27.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaksanaan Misi Dagang	0	-	-		35.000.000		-		-		-			
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal	-	-	-		155.839.000		62.381.550		40.03		62.381.550		13.02	
3.06.2.11.01.01.28	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				-		155.839.000		62.381.550		40.03		62.381.550			
3.06.2.11.01.01.28.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang				-		120.000.000		34.948.420		29.12		34.948.420			
3.06.2.11.01.01.28.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				-		35.839.000		27.433.130		76.55		27.433.130			
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	-	-	-											

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Urusan Transmigrasi			59,503,368	69,311,000		62,029,708		-		-		69,311,000		22.45	
3.08.2.01.01.18	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase transmigran umum yang berhasil	100%	59,503,368	34,655,500		-		-		-		34,655,500		29.41	
3.08.2.01.01.18.06	Penggerakan Transmigrasi	Jumlah Animo Transmigrasi (KK)			14,914,000		-		-		-		14,914,000			
3.08.2.01.01.18.07	Kerjasama Antar Daerah di Bidang Transmigrasi	Jumlah Kesepakatan (MoU)			7,465,500		-		-		-		7,465,500			
3.08.2.01.01.18.08	Pemindahan Transmigrasi	Jumlah Transmigran Siap Berangkat (KK)			12,276,000		-		-		-		12,276,000			
3.08.2.01.01.01.15.09	Penggerakan, Kerjasama, dan Fasilitas Pemindahan Transmigrasi	Jumlah Transmigran Siap Berangkat (KK)	5	59,502,720	-		-		-		-		-			
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran umum yang berhasil	-	-	-		62,029,708		-		-		-			
3.08.2.01.01.01.17	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Transmigran Siap Berangkat			-		62,029,708		-		-		-			
3.08.2.01.01.17.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Transmigran Siap Berangkat			-		62,029,708		-		-		-			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
	Perencanaan															
4.03.4.03.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	5,319,668,468 1,275,338,084	20,023,409,606 1,365,056,168		10,905,376,810		4,415,790,459		40.49		24,439,200,065 1,365,056,168		61.60	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (Skor)	80				-		-		-		-		107.03	
4.03.4.03.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				1,273,514,520		-		-		-		1,273,514,520			
4.03.4.03.01.01.08.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran				22,069,250		-		-		-		22,069,250			
4.03.4.03.01.01.08.03	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)				69,472,398		-		-		-		69,472,398			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.03. 4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	1,300,534,737								1,300,534,737			
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				134,298,814								134,298,814			
4.03.4.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				43,200,000								43,200,000			
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				121,582,200								121,582,200			
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				21,451,700								21,451,700			
4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12,140,500								12,140,500			
4.03.4.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				15,198,095								15,198,095			
4.03.4.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				5,104,000								5,104,000			
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				57,882,750								57,882,750			
4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				644,992,527								644,992,527			
4.03.4.03.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				39,470,000								39,470,000			
4.03.4.03.01.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan				102,670,150								102,670,150			
4.03.4.03.01.01.26	Penyediaan Jasa Publikasi				102,544,001								102,544,001			
4.03. 4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	550,947,215								550,947,215			
4.03.4.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur				-								-			
4.03.4.03.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				140,855,000								140,855,000			
4.03.4.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				110,347,780								110,347,780			
4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				187,075,135								187,075,135			
4.03.4.03.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				2,918,500								2,918,500			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.03.4.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				89.000.000		-		-		-		89.000.000			
4.03.4.03.01.02.46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/Printer/AC dan Mesin Ketik)				20.750.800		-		-		-		20.750.800			
													-			
4.03.4.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-	21.064.000		-		-		-		21.064.000		70.15	
4.03.4.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				21.064.000		-		-		-		21.064.000			
													-			
4.03.4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPd dengan RPJMD	100%	1.135.984.965	2.309.022.249		-		-		-		2.309.022.249		102.64	
		Persentase capaian kinerja program	80%										-			
		Persentase usulan Musrenbang yang terakhomodir dalam RKPd	Minimal 50%										-			
4.03.4.03.01.21.12	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)				447.623.975		-		-		-		447.623.975			
4.03.4.03.01.21.08	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah				826.814.550		-		-		-		826.814.550			
4.03.4.03.01.21.98	Pengumpulan, Verifikasi dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Perencanaan Pembangunan Daerah				410.969.860		-		-		-		410.969.860			
4.03.4.03.01.21.99	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kab. Madiun				118.617.600		-		-		-		118.617.600			
4.03.4.03.01.21.100	Penyusunan Materi Penunjang Perubahan RPJMD				273.343.264		-		-		-		273.343.264			
4.03.4.03.01.21.101	Penguatan Perencanaan Pembangunan Daerah				231.653.000		-		-		-		231.653.000			
													-			
4.03.4.03.01.26	Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian program dalam RKPd dengan RPJMD di bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah	100%	1.834.961.501	3.033.448.863		-		-		-		3.033.448.863		83.07	
		Persentase capaian kinerja program di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	80%										-			
		Persentase usulan Musrenbang yang terakhomodir dalam RKPd di bidang Infrastruktur Wilayah	Minimal 50%										-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.03.4.03.01.01.26.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan				302.303.950		-		-		-		302.303.950			
4.03.4.03.01.01.26.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan PU, Perhubungan dan Penataan Ruang				739.195.500		-		-		-		739.195.500			
4.03.4.03.01.01.26.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kominfo				929.176.457		-		-		-		929.176.457			
4.03.4.03.01.26.04	Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Pajak Rokok)				160.351.432		-		-		-		160.351.432			
4.03.4.03.01.01.26.80	Pendukung Kegiatan Integrated Participatory Development and management of Irrigation Sector Project (IPDMIP)				902.421.524		-		-		-		902.421.524			
													-			
4.03.4.03.01.01.27	Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Persentase kesesuaian program dalam RKPd dengan RPJMD di bidang Ekonomi dan SDA	100%	435.902.049	626.834.379		-		-		-		626.834.379		72.61	
		Persentase capaian kinerja program di Bidang Ekonomi dan SDA	80%										-			
		Persentase usulan Musrenbang yang terakhomdir dalam RKPd di bidang Ekonomi dan SDA	Minimal 50%										-			
4.03.4.03.01.01.27.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro				109.985.500		-		-		-		109.985.500			
4.03.4.03.01.01.27.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Pariwisata				134.171.629		-		-		-		134.171.629			
4.03.4.03.01.01.27.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pertanian, Pangan dan LH				382.677.250		-		-		-		382.677.250			
													-			
4.03.4.03.01.01.28	Program Perencanaan Bidang Sosbud dan Penmas	Persentase kesesuaian program dalam RKPd dengan RPJMD di bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia	100%	637.481.870	804.797.192		-		-		-		804.797.192		63.75	
		Persentase capaian kinerja program di bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia	80%										-			
		Persentase usulan Musrenbang yang terakhomdir dalam RKPd di bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia	Minimal 50%										-			
4.03.4.03.01.01.28.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat				428.847.692		-		-		-		428.847.692			
4.03.4.03.01.01.28.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia				64.805.000		-		-		-		64.805.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.03.4.03.01.01.28.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur				96.152.200		-		-		-		96.152.200			
4.03.4.03.01.28.05	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/ Lembaga/ Perusahaan (DID)				214.992.300		-		-		-		214.992.300			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-			1.703.590.793		643.651.210		37.78		643.651.210		3.52	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-									-			
4.03.4.03.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		116.569.870		35.555.000		30.50		35.555.000			
4.03.4.03.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		116.569.870		35.555.000		30.50		35.555.000			
4.03.4.03.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		473.900.000		267.750.000		56.50		267.750.000			
4.03.4.03.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-		473.900.000		267.750.000		56.50		267.750.000			
4.03.4.03.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		403.108.885		122.711.034		30.44		122.711.034			
4.03.4.03.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		10.441.860		1.554.000		14.88		1.554.000			
4.03.4.03.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		13.393.380		-		-		-			
4.03.4.03.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		2.669.508		645.000		24.16		645.000			
4.03.4.03.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		122.893.571		47.233.070		38.43		47.233.070			
4.03.4.03.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		15.668.566		12.000		0.08		12.000			
4.03.4.03.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		5.244.000		1.778.000		33.91		1.778.000			
4.03.4.03.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		232.798.000		71.488.964		30.71		71.488.964			
4.03.4.03.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		17.323.735		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.03. 4.03.01.01. 07.05	Pengadaan Mebel				-		17.323.735		-		-		-			
4.03. 4.03.01.01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		426.535.843		141.715.984		33.22		141.715.984			
4.03. 4.03.01.01. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		129.473.594		38.629.344		29.84		38.629.344			
4.03. 4.03.01.01. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		297.062.249		103.086.640		34.70		103.086.640			
4.03. 4.03.01.01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		266.152.460		75.919.192		28.52		75.919.192			
4.03. 4.03.01.01. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		211.449.700		59.149.192		27.97		59.149.192			
4.03. 4.03.01.01. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		19.990.000		9.615.000		48.10		9.615.000			
4.03. 4.03.01.01. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		34.712.760		7.155.000		20.61		7.155.000			
													-			
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	-	-	-		1.209.600.945		717.489.250		59.32		717.489.250		19.29	
4.03. 4.03.01.01. 15	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				-		858.262.633		570.002.750		66.41		570.002.750			
4.03. 4.03.01.01. 15.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				-		858.262.633		570.002.750		66.41		570.002.750			
4.03. 4.03.01.01. 16	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-		188.376.360		13.145.000		6.98		13.145.000			
4.03. 4.03.01.01. 16.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD				-		138.379.020		13.145.000		9.50		13.145.000			
4.03. 4.03.01.01. 16.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				-		49.997.340		-		-		-			
4.03. 4.03.01.01. 17	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-		162.961.952		134.341.500		82.44		134.341.500			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.03. 4.03.01.01. 17.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				-		162.961.952		134.341.500		82.44		134.341.500			
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	-	-	-		2.165.801.596		332.369.079		15.35		332.369.079		4.99	
		Persentase PD Bidang Ekonomidan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	-	-	-								-			
		Persentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75%	-	-	-								-			
4.03. 4.03.01.01. 18	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				-		204.427.460		8.696.000		4.25		8.696.000			
4.03. 4.03.01.01. 18.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				-		13.600.915		1.488.000		10.94		1.488.000			
4.03. 4.03.01.01. 18.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				-		14.625.605		-		-		-			
4.03. 4.03.01.01. 18.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				-		116.396.804		1.070.000		0.92		1.070.000			
4.03. 4.03.01.01. 18.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				-		13.374.636		-		-		-			
4.03. 4.03.01.01. 18.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				-		13.413.200		4.650.000		34.67		4.650.000			
4.03. 4.03.01.01. 18.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				-		30.759.500		-		-		-			
4.03. 4.03.01.01. 18.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				-		2.246.800		1.488.000		66.23		1.488.000			
4.03. 4.03.01.01. 19	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				-		266.006.743		28.139.500		10.58		28.139.500			
4.03. 4.03.01.01. 19.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				-		16.193.700		613.500		3.79		613.500			
4.03. 4.03.01.01. 19.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				-		6.198.500		2.515.500		40.58		2.515.500			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.03. 4.03.01.01. 19.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				-		20.064.000		-		-		-			
4.03. 4.03.01.01. 19.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				-		61.073.600	20.000.000		32.75		20.000.000				
4.03. 4.03.01.01. 19.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				-		12.435.968	-		-		-				
4.03. 4.03.01.01. 19.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				-		6.198.500	2.236.000		36.07		2.236.000				
4.03. 4.03.01.01. 19.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				-		20.064.000	-		-		-				
4.03. 4.03.01.01. 19.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				-		123.778.475	2.774.500		2.24		2.774.500				
4.03. 4.03.01.01. 20	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				-		1.695.367.393	295.533.579		17.43		295.533.579				
4.03. 4.03.01.01. 20.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				-		1.727.110	-		-		-				
4.03. 4.03.01.01. 20.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				-		1.663.100	-		-		-				
4.03. 4.03.01.01. 20.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				-		40.977.395	-		-		-				
4.03. 4.03.01.01. 20.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				-		74.914.345	-		-		-				
4.03. 4.03.01.01. 20.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				-		169.367.673	12.889.100		7.61		12.889.100				
4.03. 4.03.01.01. 20.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				-		32.445.160	-		-		-				
4.03. 4.03.01.01. 20.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				-		1.374.272.610	282.644.479		20.57		282.644.479				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Keuangan			10,553,083,164	31,711,060,847		26,455,106,475		4,777,996,362		18.06		36,489,057,209		2.45	
4.04.4.04.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	2,223,953,128	2,420,908,142		-		-		-		2,420,908,142		108.86	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (Skor)	80				-		-		-		-			
4.04.4.04.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				1,625,295,682		-		-		-		1,625,295,682			
4.04.4.04.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				642,907,500		-		-		-		642,907,500			
4.04.4.04.01.01.08.03	operasional kesekretariatan (covid 19 new normal)				152,704,960		-		-		-		152,704,960			
4.04.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	1,724,837,897		-		-		-		1,724,837,897		116.21	
4.04.4.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				423,300		-		-		-		423,300			
4.04.4.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				152,892,715		-		-		-		152,892,715			
4.04.4.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				225,000		-		-		-		225,000			
4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				93,698,000		-		-		-		93,698,000			
4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				150,014,350		-		-		-		150,014,350			
4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				95,703,750		-		-		-		95,703,750			
4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				27,843,650		-		-		-		27,843,650			
4.04.4.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				15,638,000		-		-		-		15,638,000			
4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				226,699,250		-		-		-		226,699,250			
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				609,248,882		-		-		-		609,248,882			
4.04.4.04.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				39,970,000		-		-		-		39,970,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDS/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDTahun n-1) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDS/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDS/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04.4.04.01.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan				102.905.000		-		-		-		102.905.000			
4.04.4.04.01.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Publik				76.076.000		-		-		-		76.076.000			
4.04.4.04.01.01.28	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				133.500.000		-		-		-		133.500.000			
4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	648.416.722		-		-		-		648.416.722		95.12	
4.04.4.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				103.395.000		-		-		-		103.395.000			
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				278.808.222		-		-		-		278.808.222			
4.04.4.04.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				192.558.600		-		-		-		192.558.600			
4.04.4.04.01.02.46	Pemeliharaan Hardware SIMDA Keuangan				73.654.900		-		-		-		73.654.900			
4.04.4.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				18.900.000		-		-		-		18.900.000			
4.04.4.04.01.05.40	Pengembangan PNS melalui Diklat/ Workshop/ Seminar/ Semiloka/ Sosialisasi				18.900.000		-		-		-		18.900.000			
4.04.4.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	-	-	737.164.250		-		-		-		737.164.250		92.25	
4.04.4.04.01.06.12	Peningkatan Kinerja PPKD selaku SKPKD dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				707.189.250		-		-		-		707.189.250			
4.04.4.04.01.06.14	Peningkatan Kinerja Penatausahaan Dokumen Arsip (Pajak Rokok)				29.975.000		-		-		-		29.975.000			
4.04.4.04.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan Raperda APBD dan Raperda P.APBD tepat waktu	100%	1.419.305.245	1.909.540.189		-		-		-		1.909.540.189		67.94	
4.04.4.04.01.17.26	Penunjang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Perubahan APBD				393.805.000		-		-		-		393.805.000			
4.04.4.04.01.17.58	Penyusunan Standart Biaya Jasa Penunjang Kegiatan dan ASB				147.950.000		-		-		-		147.950.000			
4.04.4.04.01.17.94	Klinik Anggaran				85.580.000		-		-		-		85.580.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04.4.04.01.17.95	Pendampingan E-Budgeting				20,190,000		-		-		-		20,190,000			
4.04.4.04.01.17.96	Rekonsiliasi OPA				19,800,000		-		-		-		19,800,000			
4.04.4.04.01.17.97	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD				67,126,250		-		-		-		67,126,250			
4.04.4.04.01.17.98	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD				159,867,500		-		-		-		159,867,500			
4.04.4.04.01.01.17.105	Perencanaan Anggaran				115,355,000		-		-		-		115,355,000			
4.04.4.04.01.01.17.106	Penyusunan Anggaran				284,140,600		-		-		-		284,140,600			
4.04.4.04.01.01.17.107	Pengendalian Anggaran				615,725,839		-		-		-		615,725,839			
4.04.4.04.01.18	Program fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase dokumen pencairan sesuai ketentuan daerah	100%	555,284,430	1,157,981,150		-		-		-		1,157,981,150		105.30	
4.04.4.04.01.18.08	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Surat Penyediaan Dana				449,219,500		-		-		-		449,219,500			
4.04.4.04.01.18.48	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Pengelolaan Gaji PNS				86,790,000		-		-		-		86,790,000			
4.04.4.04.01.18.61	Penatausahaan dan Pelaporan Pembayaran BPJS Kesehatan JKK dan JKM				29,296,000		-		-		-		29,296,000			
4.04.4.04.01.01.23.04	Penatausahaan penerbitan SP2D				74,454,500		-		-		-		74,454,500			
4.04.4.04.01.01.23.05	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah, SPD dan DTH/RTH				390,728,500		-		-		-		390,728,500			
4.04.4.04.01.01.23.06	Rekonsiliasi Pengelolaan Gaji PNS				127,492,650		-		-		-		127,492,650			
4.04.4.04.01.19	Program Penatausahaan Aset dan Akuntansi	Persentase DPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	100%	1,008,873,085	1,879,288,971		-		-		-		1,879,288,971		94.06	
		Persentase kepatuhan DPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	100%	-			-		-		-					
4.04.4.04.01.19.05	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik daerah				129,175,379		-		-		-		129,175,379			
4.04.4.04.01.19.07	Pengelolaan Administrasi Pelaporan Aset				69,604,000		-		-		-		69,604,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04.4.04.01.19.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah				32.372.360		-		-		-		32.372.360			
4.04.4.04.01.19.56	Rekonsiliasi Penyempurnaan Neraca Aktiva Tetap				17.775.000		-		-		-		17.775.000			
4.04.4.04.01.19.57	Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya				31.020.000		-		-		-		31.020.000			
4.04.4.04.01.19.58	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				143.334.400		-		-		-		143.334.400			
4.04.4.04.01.19.59	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				51.772.500		-		-		-		51.772.500			
4.04.4.04.01.19.60	Penyusunan Standart Satuan Harga				149.820.000		-		-		-		149.820.000			
4.04.4.04.01.19.62	Inventarisasi dan Penghapusan Aset				210.385.000		-		-		-		210.385.000			
4.04.4.04.01.19.63	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset				711.724.332		-		-		-		711.724.332			
4.04.4.04.01.19.64	Akutansi dan Laporan Keuangan				332.306.000		-		-		-		332.306.000			
							-		-		-					
4.04.4.04.01.22	Program Peningkatan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Persentase realisasi pencairan belanja tidak langsung non gaji		-	158.426.145		-		-		-		158.426.145		-	
4.04.4.04.01.22.01	Validasi Belanja Tidak Langsung Non Gaji				158.426.145		-		-		-		158.426.145			
							-		-		-					
4.04.4.04.02.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	1.216.106.256	1.304.131.732		-		-		-		1.304.131.732		107.24	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	75	-			-		-		-					
4.04.4.04.02.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	13	1.201.106.256	1.169.729.678		-		-		-		1.169.729.678			
		Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang layak fungsi (%)	100	-			-		-		-					
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	1	-			-		-		-					
4.04.4.04.02.01.08.03	operasional kesekretariatan (covid 19 new normal)	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	18	15.000.000	134.402.054		-		-		-		134.402.054			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04.4.04.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	1.239.142.066	-	-	-	-	-	-	-	1.239.142.066	-	92.68	
4.04.4.04.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	151.027.750	-	-	-	-	-	-	-	151.027.750	-		
4.04.4.04.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya jasa kebersihan kantor	-	-	97.754.588	-	-	-	-	-	-	-	97.754.588	-		
4.04.4.04.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya alat tulis kantor	-	-	164.160.685	-	-	-	-	-	-	-	164.160.685	-		
4.04.4.04.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	-	-	60.618.300	-	-	-	-	-	-	-	60.618.300	-		
4.04.4.04.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	-	-	11.597.000	-	-	-	-	-	-	-	11.597.000	-		
4.04.4.04.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhinya bahan bacaan	-	-	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	-		
4.04.4.04.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	-	-	92.225.100	-	-	-	-	-	-	-	92.225.100	-		
4.04.4.04.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	175.653.947	-	-	-	-	-	-	-	175.653.947	-		
4.04.4.04.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	-	103.835.000	-	-	-	-	-	-	-	103.835.000	-		
4.04.4.04.02.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan	terlaksananya jasa keamanan kantor	-	-	101.568.496	-	-	-	-	-	-	-	101.568.496	-		
4.04.4.04.02.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Publik	terlaksananya jasa resepsionis kantor	-	-	71.051.200	-	-	-	-	-	-	-	71.051.200	-		
4.04.4.04.02.01.28	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak/pkwt	-	-	115.550.000	-	-	-	-	-	-	-	115.550.000	-		
4.04.4.04.02.01.30	Penyediaan Jasa Publikasi	Terpenuhinya jasa publikasi	-	-	89.000.000	-	-	-	-	-	-	-	89.000.000	-		
4.04.4.04.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	317.965.372	-	-	-	-	-	-	-	317.965.372	-	111.82	
4.04.4.04.02.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan alat kantor	-	-	33.550.000	-	-	-	-	-	-	-	33.550.000	-		
4.04.4.04.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	-	-	62.389.000	-	-	-	-	-	-	-	62.389.000	-		
4.04.4.04.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	-	-	180.768.872	-	-	-	-	-	-	-	180.768.872	-		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04.4.04.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur kantor	-	-	9.597,500	-	-	-	-	-	-	9.597,500	-	-	-	-
4.04.4.04.02.02.49	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kantor dan Rumah Tangga	terpeliharanya alat kantor dan rumah tangga	-	-	31.660,000	-	-	-	-	-	-	31.660,000	-	-	-	-
4.04.4.04.02.20	Program Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan	205.726	435.800,967	936.065,810	-	-	-	-	-	-	936.065,810	-	-	108.46	-
		Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan														
		Persentase peningkatan target pajak daerah	0.73%													
4.04.4.04.02.20.04	Penyelenggaraan Penetapan PBB P2	jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak	-	-	170.839,680	-	-	-	-	-	-	170.839,680	-	-	-	-
4.04.4.04.02.20.41	Pengelolaan BPHTB	jumlah Validasi BPHTB yang sudah terselesaikan	3000 ajuan	36.000,000	147.933,850	-	-	-	-	-	-	147.933,850	-	-	-	-
4.04.4.04.02.20.81	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah (DID)	pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	93.835,500	-	-	-	-	-	-	93.835,500	-	-	-	-
4.04.4.04.02.20.82	Pemeliharaan Aplikasi PBB P2 dan Aplikasi Mapada	Jumlah aplikasi yang dipelihara	-	-	206.800,000	-	-	-	-	-	-	206.800,000	-	-	-	-
4.04.4.04.02.01.10.03	Penilaian Obyek Khusus dan Pemutakhiran Data PBB-P2	Jumlah desa yang dilaksanakan pemutakhiran	2	23.800,967	73.091,700	-	-	-	-	-	-	73.091,700	-	-	-	-
4.04.4.04.02.01.10.16	Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	jumlah peningkatan target pajak daerah (milyar)	6.76 M	100.000,000	1.008,000	-	-	-	-	-	-	1.008,000	-	-	-	-
4.04.4.04.02.01.10.17	Pendataan dan Penyelenggaraan penetapan pajak daerah	jumlah dokumen pendataan obyek PAD	1 dokumen	276.000,000	242.557,080	-	-	-	-	-	-	242.557,080	-	-	-	-
		jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak	400000 SPPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04.4.04.02.21	Program Penatausahaan, Verifikasi dan Penagihan Daerah	Jumlah pengajuan keberatan / pengurangan yang diverifikasi	1.250	2.041,852,830	1.402,761,977	-	-	-	-	-	-	1.402,761,977	-	-	34.69	-
		Persentase realisasi pajak daerah tahun berkenaan	100%													
		Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi (dokumen)	12													
4.04.4.04.02.21.34	Pemberian Hadiah dan Biaya Pemungutan untuk Kecamatan, Desa, dan Kelurahan yang Berprestasi	pemberian hadiah dan biaya pemungutan yang dilaksanakan	-	-	1.015,071,193	-	-	-	-	-	-	1.015,071,193	-	-	-	-
4.04.4.04.02.21.35	Penyediaan Barang Cetak Sarana Pemungutan PAD	jenis barang cetak PAD yang tercetak	-	-	196.239,333	-	-	-	-	-	-	196.239,333	-	-	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04.4.04.02.01.21.37	Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PBB Dan PAD	jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilaksanakan	2 kali	415.000.000	137.392.951		-		-		-		137.392.951			
4.04.4.04.02.01.21.40	Penagihan dan monitoring PBB-2	Jumlah desa yang telah melunasi PBB	2 dokumen	1.600.000.000	54.058.500		-		-		-		54.058.500			
		Jumlah SPPT PBB-P2 yang terdistribusi	-	-									-			
		Jumlah Pelunasan SPPT PBB-P2	-	-									-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		2.249.874,017		355.050,862		15,78		355.050,862		0,34	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
4.04.4.04.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		168.431,130		39.416,000		23,40		39.416,000			
4.04.4.04.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		168.431,130		39.416,000		23,40		39.416,000			
4.04.4.04.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		274.492,000		18.982,000		6,92		18.982,000			
4.04.4.04.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-		274.492,000		18.982,000		6,92		18.982,000			
4.04.4.04.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		55.000,000		-		-		-			
4.04.4.04.01.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		55.000,000		-		-		-			
4.04.4.04.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		466.870,799		81.793,637		17,52		81.793,637			
4.04.4.04.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		5.998,993		95,000		1,58		95,000			
4.04.4.04.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		38.706,215		-		-		-			
4.04.4.04.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		326.927,921		54.005,037		16,52		54.005,037			
4.04.4.04.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		95.237,670		27.693,600		29,08		27.693,600			
4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		743.196,678		144.112,690		19,39		144.112,690			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04. 4.04.01.01. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		2.000,000		150,000		7.50		150,000			
4.04. 4.04.01.01. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		271.908,170		40.281,290		14,81		40.281,290			
4.04. 4.04.01.01. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		469.288,508		103.681,400		22,09		103.681,400			
4.04. 4.04.01.01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		541.883,410		70.746,535		13,06		70.746,535			
4.04. 4.04.01.01. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		358.286,260		70.746,535		19,75		70.746,535			
4.04. 4.04.01.01. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		123.117,500		-		-		-			
4.04. 4.04.01.01. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		60.479,650		-		-		-			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase DPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	-	-	-		2.300.980,104		309.445,300		13,45		309.445,300		0,02	
4.04. 4.04.01.01. 15	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				-		1.485.105,546		147.962,500		9,96		147.962,500			
4.04. 4.04.01.01. 15.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				-		106.128,400		-		-		-			
4.04. 4.04.01.01. 15.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				-		105.378,400		-		-		-			
4.04. 4.04.01.01. 15.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				-		30.752,700		-		-		-			
4.04. 4.04.01.01. 15.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				-		30.752,700		-		-		-			
4.04. 4.04.01.01. 15.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				-		24.288,000		-		-		-			
4.04. 4.04.01.01. 15.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				-		24.288,000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04. 4.04.01.01. 15.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				-		693.375.514		110.850.000		15.99		110.850.000			
4.04. 4.04.01.01. 15.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				-		242.931.587		37.112.500		15.28		37.112.500			
4.04. 4.04.01.01. 15.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				-		100.791.615		-		-		-			
4.04. 4.04.01.01. 15.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				-		126.418.630		-		-		-			
4.04. 4.04.01.01. 16	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				-		500.000.000		105.480.500		21.10		105.480.500			
4.04. 4.04.01.01. 16.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				-		244.577.197		32.374.500		13.24		32.374.500			
4.04. 4.04.01.01. 16.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				-		159.500.338		37.947.000		23.79		37.947.000			
4.04. 4.04.01.01. 16.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				-		95.922.465		35.159.000		36.65		35.159.000			
4.04. 4.04.01.01. 17	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				-		315.874.558		56.002.300		17.73		56.002.300			
4.04. 4.04.01.01. 17.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				-		9.514.692		-		-		-			
4.04. 4.04.01.01. 17.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran				-		250.480.254		56.002.300		22.36		56.002.300			
4.04. 4.04.01.01. 17.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				-		55.879.612		-		-		-			
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase DPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	-	-	-		2.646.860.213		427.831.879		16.16		427.831.879		5.26	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04. 4.04.01.01.20	Pengelolaan Barang Milik Daerah				-		2.646.860,213		427.831,879		16.16		427.831,879			
4.04. 4.04.01.01.20.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah				-		1.259.834,850		273.665,159		21.72		273.665,159			
4.04. 4.04.01.01.20.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah				-		327.878,613		66.762,500		20.36		66.762,500			
4.04. 4.04.01.01.20.07	Pengamanan Barang Milik Daerah				-		1.002.742,125		77.904,220		7.77		77.904,220			
4.04. 4.04.01.01.20.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				-		56.404,625		9.500,000		16.84		9.500,000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		1.268.846,546		471.632,013		37.17		471.632,013		2.03	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
4.04. 4.04.02.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	-	-	-		120.058,047		58.656,502		48.86		58.656,502			
4.04. 4.04.02.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-		120.058,047		58.656,502		48.86		58.656,502			
4.04. 4.04.02.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	-	-	-		298.192,551		82.044,728		27.51		82.044,728			
4.04. 4.04.02.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-		2.946,075		150,000		5.09		150,000			
4.04. 4.04.02.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	-		142.271,565		38.048,150		26.74		38.048,150			
4.04. 4.04.02.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		-	-	-		28.365,321		11.320,200		39.91		11.320,200			
4.04. 4.04.02.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-		6.491,500		2.008,000		30.93		2.008,000			
4.04. 4.04.02.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material		-	-	-		7.163,090		-		-		-			
4.04. 4.04.02.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-		110.955,000		30.518,378		27.51		30.518,378			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04. 4.04.02.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah	-	-	-		10.000.000	2.720.000		27.20		2.720.000				
4.04. 4.04.02.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-		10.000.000	2.720.000		27.20		2.720.000				
4.04. 4.04.02.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang	-	-	-		689.390.043	286.116.707		41.50		286.116.707				
4.04. 4.04.02.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	-		1.000.000	-		-		-				
4.04. 4.04.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	-		173.771.288	84.801.302		48.80		84.801.302				
4.04. 4.04.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	-		514.618.755	201.315.405		39.12		201.315.405				
4.04. 4.04.02.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	-	-		151.205.905	42.094.076		27.84		42.094.076				
4.04. 4.04.02.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	-		115.947.110	32.254.076		27.82		32.254.076				
4.04. 4.04.02.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-		26.620.000	9.840.000		36.96		9.840.000				
4.04. 4.04.02.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	-		8.638.795	-		-		-				
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD	-	-	-		1.055.423.836	86.116.200		8.16		86.116.200			2.65	
4.04. 4.04.02.01.21	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	-	-	-		1.055.423.836	86.116.200		8.16		86.116.200				
		Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan	-	-	-											
		Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan	-	-	-											
		Persentase realisasi PAD tahun berkenaan	-	-	-											
		Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang di verifikasi (ajuan)	-	-	-											
		Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi	-	-	-											

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.04.4.04.02.01.21.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pendataan obyek PAD	-	-	-	-	223.289,150	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.04.4.04.02.01.21.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah peningkatan target pajak daerah	-	-	-	-	172.492,147	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.04.4.04.02.01.21.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah desa yang dilaksanakan pemutakhiran	-	-	-	-	224.492,603	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.04.4.04.02.01.21.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen verifikasi piutang	-	-	-	-	2.022,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.04.4.04.02.01.21.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah desa yang melunasi PBB P2	-	-	-	-	248.498,700	86.116,200	34,65	-	86.116,200	-	-	-	-	
		Jumlah pelunasan SPPT PBB P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.04.4.04.02.01.21.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	184.628,736	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah sarana pemungutan yang tercetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kepegawaian			10,837,560,289	22,226,063,083		6,296,172,125	1,559,628,224	24,77		23,785,691,307		52,41			
4.05.4.05.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	1,239,379,393	1,192,220,355						1,192,220,355		96,19			
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (Skor)	80													
4.05.4.05.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Kepuasan pelayanan Kesekretariatan	12	1,303,290,704	934,101,822		-	-	-	-	934,101,822		-			
4.05.4.05.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				59,213,700		-	-	-	-	59,213,700		-			
4.05.4.05.01.01.08.03	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)				198,904,833		-	-	-	-	198,904,833		-			
							-	-	-	-	-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			1,336,906,736		-		-		-		1,336,906,736		-	
4.05.4.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik air telpon tercukupi	100%	253,615,961	200,822,867		-		-		-		200,822,867			
4.05.4.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor terjaga	100%	101,010,000	96,195,070		-		-		-		96,195,070			
4.05.4.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	kebutuhan ATK kantor tercukupi	100%	102,293,961	94,139,100		-		-		-		94,139,100			
4.05.4.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kebutuhan cetak pengandaan tercukupi	100%	18,977,401	17,100,000		-		-		-		17,100,000			
4.05.4.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	penerangan dan komponen tercukupi	100%	20,814,770	24,794,000		-		-		-		24,794,000			
4.05.4.05.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	perawatan alat kantor dan perlengkapan terpenuhi	100%	74,446,929	123,984,950		-		-		-		123,984,950			
4.05.4.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tercukupinya buku dan bacaan terpenuhi	100%	8,001,000	7,130,000		-		-		-		7,130,000			
4.05.4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makan dan minum	100%	239,394,750	184,582,174		-		-		-		184,582,174			
4.05.4.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat Koordinasi luar Daerah	100%	256,430,234	341,527,629		-		-		-		341,527,629			
4.05.4.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat Koordinasi dalam Daerah	100%	15,750,000	27,500,000		-		-		-		27,500,000			
4.05.4.05.01.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan	Terpenuhinya jasa keamanan	100%	101,885,700	96,916,100		-		-		-		96,916,100			
4.05.4.05.01.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Publik	Terpenuhinya Jasa Pelayanan	100%	67,200,000	58,614,846		-		-		-		58,614,846			
4.05.4.05.01.01.28	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kinerja SKPD	100%	15,750,000	14,400,000		-		-		-		14,400,000			
4.05.4.05.01.01.29	Penyediaan Jasa Publikasi	Terpenuhinya Jasa Publikasi	100%	27,720,000	49,200,000		-		-		-		49,200,000			
							-		-		-		-			
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-		408,448,682		-		-		-		408,448,682		-	
4.05.4.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				19,910,000		-		-		-		19,910,000			
4.05.4.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	114,560,514	177,088,264		-		-		-		177,088,264			
4.05.4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				184,308,918		-		-		-		184,308,918			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.05.4.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				2.716.500		-		-		-		2.716.500			
4.05.4.05.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	Terpeliharanya peralatan Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	100%	26.377.218	24.425.000		-		-		-		24.425.000			
													-			
4.05.4.05.01.02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	-		408.448.682		-		-		-		408.448.682		684.74	
4.05.4.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				19.910.000		-		-		-		19.910.000			
4.05.4.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				177.088.264		-		-		-		177.088.264			
4.05.4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				184.308.918		-		-		-		184.308.918			
4.05.4.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				2.716.500		-		-		-		2.716.500			
4.05.4.05.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				24.425.000		-		-		-		24.425.000			
													-			
4.05.4.05.01.29	Program Penyusunan, Penetapan, Kebutuhan dan Pengadaan serta Pengembangan Karier dan Kompetensi Pegawai	Jumlah dokumen penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai tepat waktu	1	2.933.667.594	6.477.571.856		-		-		-		6.477.571.856		111.49	
		ASN yang mengikuti uji kompetensi	200 orang										-			
		ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	140 orang										-			
4.05.4.05.01.29.01	Penyusunan, Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN	Penyusunan Bazeting ASN Kabupaten Madiun /DPD	1	41.473.341	1.054.481.228		-		-		-		1.054.481.228			
4.05.4.05.01.29.02	Pengembangan Kompetensi ASN	ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	140	407.780.132	161.429.000		-		-		-		161.429.000			
4.05.4.05.01.29.04	Pendidikan Karakter Dasar ASN menuju Birokrasi Pancasila	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dasar	300 Orang	836.382.750	707.962.700		-		-		-		707.962.700			
4.05.4.05.01.29.05	Penyelenggaraan Diklat dan Tugas Belajar (DID)	PNS yang harus mengikuti Diklat PIM II, PIM III, PIM IV	85	1.181.002.463	1.389.582.078		-		-		-		1.389.582.078			
4.05.4.05.01.29.06	Latihan Dasar CPNS				3.024.116.850		-		-		-		3.024.116.850			
4.05.4.05.01.29.07	Diklat Pemadam Kebakaran dan Bencana Alam (Pajak Rokok)				140.000.000		-		-		-		140.000.000			
4.05.4.05.01.29.09	Diklat Intelijen				-		-		-		-		-			
													-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.05.4.05.01.01.30	Program Mutasi Pegawai	Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi	85%	550,928,622	1,022,279,100		-		-		-		1,022,279,100		93.70	
		Persentase pelayanan kepegawain yang tepat waktu	97%										-			
4.05.4.05.01.01.30.01	Kenaikan Pangkat dan Perpindahan Pegawai	Prosentase Pelayanan Mutasi Pegawai Tepat Waktu	95%	130,743,375	161,137,350		-		-		-		161,137,350			
4.05.4.05.01.01.30.02	Promosi dan Mutasi Jabatan PNS	Prosentase Mutasi Jabatan sesuai Kompetensi	85%	436,389,030	861,141,750		-		-		-		861,141,750			
													-			
4.05.4.05.01.31	Program Pembinaan, Data, dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	97%	332,294,447	534,312,261		-		-		-		534,312,261		81.19	
		Persentase pembaruan data kepegawain	89%										-			
		Persentase ASN yang memiliki capaian kinerja lebih dari 75	98%										-			
4.05.4.05.01.31.02	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi				-		-		-		-		-			
4.05.4.05.01.31.03	Pembinaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS				80,839,166		-		-		-		80,839,166			
4.05.4.05.01.31.04	Pengelolaan Data dan Layanan Kepegawain				211,519,750		-		-		-		211,519,750			
4.05.4.05.01.31.07	Administrasi Pensiun dan Kegiatan Pelepasan ASN Purna Bakti (DID)				225,423,345		-		-		-		225,423,345			
4.05.4.05.01.31.03	Pembinaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS				-								-			
4.05.4.05.01.31.09	Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN				16,530,000								16,530,000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		943,548,228		285,056,359		30.21		285,056,359		2.01	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
4.05.4.05.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		67,540,481		25,661,500		37.99		25,661,500			
4.05.4.05.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		67,540,481		25,661,500		37.99		25,661,500			
4.05.4.05.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		278,619,760		72,905,299		26.17		72,905,299			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.05. 4.05.01.01. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		6.892,611		2.655.000		38.52		2.655.000			
4.05. 4.05.01.01. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		45.229,348		11.935.500		26.39		11.935.500			
4.05. 4.05.01.01. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		24.913,680		16.793,989		67.41		16.793,989			
4.05. 4.05.01.01. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		49.945,720		6.252.000		12.52		6.252.000			
4.05. 4.05.01.01. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		13.908,400		350.000		2.52		350.000			
4.05. 4.05.01.01. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		6.480.000		1.940.000		29.94		1.940.000			
4.05. 4.05.01.01. 06.07	Penyediaan Bahan/Material				-		73.881,901		17.872,210		24.19		17.872,210			
4.05. 4.05.01.01. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				-		3.686,100		505.400		13.71		505.400			
4.05. 4.05.01.01. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		53.682.000		14.601,200		27.20		14.601,200			
4.05. 4.05.01.01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		42.937,785		41.800.000		97.35		41.800.000			
4.05. 4.05.01.01. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		42.937,785		41.800.000		97.35		41.800.000			
4.05. 4.05.01.01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		478.921,412		129.911,060		27.13		129.911,060			
4.05. 4.05.01.01. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		1.000.000		160.000		16.00		160.000			
4.05. 4.05.01.01. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		199.120,490		63.447,782		31.86		63.447,782			
4.05. 4.05.01.01. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		278.800,922		66.303,278		23.78		66.303,278			
4.05. 4.05.01.01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		75.528,790		14.778.500		19.57		14.778.500			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.05. 4.05.01.01. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		25.352.435		9.346.500		36.87		9.346.500			
4.05. 4.05.01.01. 09.05	Pemeliharaan Mebel				-		1.122.000		-		-		-			
4.05. 4.05.01.01. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		29.054.355		5.432.000		18.70		5.432.000			
4.05. 4.05.01.01. 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		20.000.000		-		-		-			
													-			
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penetapan kebutuhan ASN	-	-	-		3.465.527.441		704.459.147		20.33		704.459.147		6.61	
		Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi	-	-	-								-			
		Persentase kedisiplinan ASN	-	-	-								-			
		Persentase Penilaian Kinerja ASN	-	-	-								-			
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	-	-								-			
4.05. 4.05.01.01. 15	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				-		562.512.707		92.856.500		16.51		92.856.500			
4.05. 4.05.01.01. 15.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				-		45.221.643		12.054.500		26.66		12.054.500			
4.05. 4.05.01.01. 15.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN				-		355.931.064		1.330.000		0.37		1.330.000			
4.05. 4.05.01.01. 15.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				-		74.500.000		56.162.000		75.39		56.162.000			
4.05. 4.05.01.01. 15.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				-		86.860.000		23.310.000		26.84		23.310.000			
4.05. 4.05.01.01. 16	Mutasi dan Promosi ASN				-		587.414.578		373.780.397		63.63		373.780.397			
4.05. 4.05.01.01. 16.01	Pengelolaan Mutasi ASN				-		9.596.400		-		-		-			
4.05. 4.05.01.01. 16.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				-		61.343.070		28.606.400		46.63		28.606.400			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12						
4.05.4.05.01.01.16.03	Pengelolaan Promosi ASN				-		516.475.108		345.173.997		66.83		345.173.997									
4.05.4.05.01.01.17	Pengembangan Kompetensi ASN				-		2.308.351.656		234.527.250		10.16		234.527.250									
4.05.4.05.01.01.17.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				-		637.500.000		177.277.250		27.81		177.277.250									
4.05.4.05.01.01.17.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat				-		1.670.851.656		57.250.000		3.43		57.250.000									
4.05.4.05.01.01.18	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				-		7.248.500		3.295.000		45.46		3.295.000									
4.05.4.05.01.01.18.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				-		7.248.500		3.295.000		45.46		3.295.000									
													-									
	Penelitian dan Pengembangan						861.924.939		3.827.397.318				334.706.601		102.537.500		30.64		3.929.934.818		143.62	
4.07.4.03.01.21	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	10 inovasi	861.924.939	1.913.698.659		-		-		-		1.913.698.659		112.11							
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti / diterbitkan / dipublikasikan	10 publikasi & kajian										-									
4.07.4.03.01.21.14	Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				741.026.959		-		-		-		741.026.959									
4.07.4.03.01.21.15	Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, SOSBUD, PEN MAS				442.532.500		-		-		-		442.532.500									
4.07.4.03.01.21.16	Inovasi Dan Penerbitan Hasil - Hasil Kelitbangan				223.153.450		-		-		-		223.153.450									
4.07.4.03.01.21.17	Analisis Capaian Indeks Kesalehan Sosial (Pajak Rokok)				102.535.250		-		-		-		102.535.250									
4.07.4.03.01.21.18	Analisis Indikator bidang Ekonomi, SDA, Sosbud, dan Penmas (Pajak Rokok)				113.395.000		-		-		-		113.395.000									
4.07.4.03.01.21.19	Inovasi Pemanfaatan Limbah Tahu (Pajak Rokok)				195.373.750		-		-		-		195.373.750									
4.07.4.03.01.21.20	Penyusunan SAKIP melalui SIMDA SAKIP (Pajak Rokok)				30.281.250		-		-		-		30.281.250									
4.07.4.03.01.01.21.17	Inovasi Daerah pada Tatanan Normal Baru dan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah				65.400.500		-		-		-		65.400.500									
													-									

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	-	-	-		334,706,601		102,537,500		30.64		102,537,500		9.96	
		Persentase pemanfaatan hasil kegiatan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	-	-	-									-		
4.07.4.03.01.01.15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				-		151,798,996		100,288,000		66.07		100,288,000			
4.07.4.03.01.01.15.12	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan				-		51,798,996		288,000		0.56		288,000			
4.07.4.03.01.01.15.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan				-		100,000,000		100,000,000		100.00		100,000,000			
4.07.4.03.01.01.16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				-		51,799,655		-		-		-			
4.07.4.03.01.01.16.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				-		51,799,655		-		-		-			
4.07.4.03.01.01.18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				-		131,107,950		2,249,500		1.72		2,249,500			
4.07.4.03.01.01.18.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				-		131,107,950		2,249,500		1.72		2,249,500			
													-			
	Pengawasan								4,862,883,036		21.88		12,170,623,417		48.59	
4.02.4.02.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	1,127,432,858	1,106,731,942								1,336,683,077		118.56	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)	75	-										-		
4.02.4.02.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana						1,273,434,177		-		-		1,273,434,177			
4.02.4.02.01.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran						63,248,900		-		-		63,248,900			
													-			
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	793,512,653								793,512,653			
4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat												-		86.07	
													-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				95.951.256		-		-		-		95.951.256			
4.02.4.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				263.500		-		-		-		263.500			
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				98.961.900		-		-		-		98.961.900			
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				68.961.200		-		-		-		68.961.200			
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				16.923.500		-		-		-		16.923.500			
4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				9.287.500		-		-		-		9.287.500			
4.02.4.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				5.656.000		-		-		-		5.656.000			
4.02.4.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				87.845.550		-		-		-		87.845.550			
4.02.4.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				279.647.344		-		-		-		279.647.344			
4.02.4.02.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				19.930.000		-		-		-		19.930.000			
4.02.4.02.01.01.20	Penyediaan Souvenir				10.132.800		-		-		-		10.132.800			
4.02.4.02.01.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan				99.952.103		-		-		-		99.952.103			
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	248.411.143		-		-		-		248.411.143		94.27	
4.02.4.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				63.435.000		-		-		-		63.435.000			
4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				25.808.950		-		-		-		25.808.950			
4.02.4.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				142.677.093		-		-		-		142.677.093			
4.02.4.02.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				16.490.100		-		-		-		16.490.100			
4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	-	-	361.617.560		-		-		-		361.617.560		119.54	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.02.4.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal				361.617.560		-		-		-		361.617.560			
4.02.4.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	-	-	507,000		-		-		-		507,000		3.34	
4.02.4.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				507,000		-		-		-		507,000			
4.02.4.02.01.23	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase DPD yang melaksanakan penerapan SPIP sesuai dengan peraturan yang berlaku	57.50%	672,644,250	1,075,229,800		-		-		-		1,075,229,800		159.85	
4.02.4.02.01.23.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah				67,670,500		-		-		-		67,670,500			
4.02.4.02.01.23.12	Evaluasi Penerapan SPIP di DPD				93,543,000		-		-		-		93,543,000			
4.02.4.02.01.23.36	Pengawasan Pelayanan Publik				263,443,500		-		-		-		263,443,500			
4.02.4.02.01.23.37	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala				454,422,500		-		-		-		454,422,500			
4.02.4.02.01.23.38	Review Laporan Keuangan				132,969,000		-		-		-		132,969,000			
4.02.4.02.01.23.39	Penilaian Integritas				63,181,300		-		-		-		63,181,300			
4.02.4.02.01.24	Program Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPD	A	266,076,550	628,448,834		-		-		-		628,448,834		236.19	
4.02.4.02.01.24.04	Monitoring Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi				172,554,500		-		-		-		172,554,500			
4.02.4.02.01.24.07	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				229,903,850		-		-		-		229,903,850			
4.02.4.02.01.24.09	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				145,932,184		-		-		-		145,932,184			
4.02.4.02.01.24.10	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran				80,058,300		-		-		-		80,058,300			
4.02.4.02.01.23	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	-	-	1,108,955,904		-		-		-		1,108,955,904		150.12	
		Persentase penyelesaian tindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan	-	-			-		-		-					

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Level maturitas SPIP	-	-												
		Persentase nilai evaluasi SAKIP OPD minimal 88	-	-												
		Opini BPK terhadap LKPD	-	-												
4.02.4.02.01.23.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah				73.121.400	-		-		-			73.121.400			
4.02.4.02.01.23.06	Review Rencana Kerja Anggaran (RKA)				9.962.400	-		-		-			9.962.400			
4.02.4.02.01.23.10	Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan				97.783.300	-		-		-			97.783.300			
4.02.4.02.01.23.11	Monitoring Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK)				5.441.920	-		-		-			5.441.920			
4.02.4.02.01.23.12	Evaluasi Penerapan SPIP di OPD				63.200.000	-		-		-			63.200.000			
4.02.4.02.01.23.13	Evaluasi Sakip OPD				283.010.775	-		-		-			283.010.775			
4.02.4.02.01.23.14	Review RENJA				5.120.000	-		-		-			5.120.000			
4.02.4.02.01.23.24	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				812.500	-		-		-			812.500			
4.02.4.02.01.23.31	Unit Pengendalian Gratifikasi				13.800.000	-		-		-			13.800.000			
4.02.4.02.01.23.33	Review Lakip Pemerintah Daerah				5.600.000	-		-		-			5.600.000			
4.02.4.02.01.23.36	Pengawasan Pelayanan Publik				152.569.200	-		-		-			152.569.200			
4.02.4.02.01.23.37	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala (DID)				289.770.000	-		-		-			289.770.000			
4.02.4.02.01.23.38	Review Laporan Keuangan				7.695.000	-		-		-			7.695.000			
4.02.4.02.01.23.39	Penilaian Integritas (Pajak Rokok)				51.978.500	-		-		-			51.978.500			
4.02.4.02.01.23.40	Publikasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pajak Rokok)				49.090.909	-		-		-			49.090.909			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-			1.064.407,196		286.949,409		26,96	286.949,409		1,91	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.02. 4.02.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	8	130.000.000	-		10.921.000	-		-		-				
4.02. 4.02.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-		10.921.000	-		-		-				
4.02. 4.02.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase administrasi kepegawaian yang terlayani	-	-	-		148.500.000	74.101.500		49.90		74.101.500				
4.02. 4.02.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-	-		148.500.000	74.101.500		49.90		74.101.500				
4.02. 4.02.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase administrasi umum yang terlayani	-	-	-		347.728.161	71.230.895		20.48		71.230.895				
4.02. 4.02.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-		5.013.800	245.000		4.89		245.000				
4.02. 4.02.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-		14.764.310	-		-		-				
4.02. 4.02.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-	-		16.000.000	-		-		-				
4.02. 4.02.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	-		60.000.000	19.386.895		32.31		19.386.895				
4.02. 4.02.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		-	-	-		14.868.253	575.000		3.87		575.000				
4.02. 4.02.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-		5.262.198	1.328.000		25.24		1.328.000				
4.02. 4.02.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-	-		29.998.100	23.501.500		78.34		23.501.500				
4.02. 4.02.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-		201.821.500	26.194.500		12.98		26.194.500				
4.02. 4.02.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase pengadaan barang daerah	-	-	-		141.655.525	-		-		-				
4.02. 4.02.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-		141.655.525	-		-		-				
4.02. 4.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-		285.602.660	96.359.287		33.74		96.359.287				
4.02. 4.02.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prosentase jasa penunjang yang tersedia	-	-	-		5.387.500	49.000		0.91		49.000				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.02.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	-		110.000.060	41.615.512		37.83		41.615.512				
4.02.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	-		170.215.100	54.694.775		32.13		54.694.775				
4.02.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase barang milik daerah yang terpelihara	-	-	-		129.999.850	45.257.727		34.81		45.257.727				
4.02.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	-		99.989.850	37.098.127		37.10		37.098.127				
4.02.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-		30.010.000	8.159.600		27.19		8.159.600				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang mendapatkan Nilai hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A)	-	-	-		439.660.640	51.735.980		11.77		51.735.980			3.33	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-											
4.02.01.01.15	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				-		326.645.040	51.378.980		15.73		51.378.980				
4.02.01.01.15.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jml OPD yang dievaluasi saki	53 OPD	150.000.000	-		68.388.500	-		-		-				
4.02.01.01.15.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LHP reguler yang terbit	251 LHP	255.000.000	-		56.614.560	-		-		-				
4.02.01.01.15.03	Reviu Laporan Kinerja	- Jml dokumen reviu LKjIP	1 dokumen	9.000.000	-		49.999.931	7.200.000		14.40		7.200.000				
		- Jml dok. reviu LPPD														
4.02.01.01.15.04	Reviu Laporan Keuangan	Jml dokumen reviu Laporan keuangan	1 dokumen	20.000.000	-		21.053.010	19.872.480		94.39		19.872.480				
4.02.01.01.15.05	Pengawasan Desa	jml dokumen laporan pengawasan desa yg terbit	-	-	-		44.298.650	3.885.500		8.77		3.885.500				
4.02.01.01.15.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP	10 OPD	15.000.000	-		24.965.039	1.008.000		4.04		1.008.000				
4.02.01.01.15.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	prosentase pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	90%	-	-		61.325.350	19.413.000		31.66		19.413.000				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		prosentase pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti	85%	50.000.000												
4.02.4.02.01.01.16	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				-	113.015.600	357.000	0.32				357.000				
4.02.4.02.01.01.16.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah kerugian daerah/negara yang selesai	-	-	-	23.020.800	357.000	1.55				357.000				
4.02.4.02.01.01.16.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah kasus pengaduan yang masuk	45 kasus	90.000.000	-	89.994.800	-	-				-				
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Level kapabilitas APIP atau jumlah rumusan kebijakan teknis pengawasan	-	-	-	350.679.528	47.835.308	13.64				47.835.308			3.74	
		Persentase pendampingan, asistensi, dan verifikasi kepada OPD yang sesuai peraturan berlaku	-	-	-							-				
4.02.4.02.01.01.17	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				-	70.444.510	28.300.000	40.17				28.300.000				
4.02.4.02.01.01.17.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	-	-	-	70.444.510	28.300.000	40.17				28.300.000				
4.02.4.02.01.01.18	Pendampingan dan Asistensi				-	280.235.018	19.535.308	6.97				19.535.308				
4.02.4.02.01.01.18.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah dokumen revidu yang terbit (revidu RKA, revidu Renja, Revidu RKPD)	-	-	-	27.909.300	-	-				-				
4.02.4.02.01.01.18.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	prosentase ASN yang telah melakukan pelaporan LHK-ASN	50%	-	-	49.974.650	8.241.200	16.49				8.241.200				
4.02.4.02.01.01.18.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen tentang pencegahan korupsi yang diterbitkan (UPP, UPG, RADPK)	-	-	-	175.018.818	4.286.000	2.45				4.286.000				
4.02.4.02.01.01.18.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang sudah membangun zona integritas	4 OPD	85.000.000	-	27.332.250	7.008.108	25.64				7.008.108				
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											-				
	Sekretariat Daerah															
4.01.4.01.03.07.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	25.957.890,314 6,613,303,465	116,695,217,78 5 9,760,283,50 9							116,695,217,785 9,760,283,509			67,30 147,59	Bagian Umum

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)	80	-			-		-		-		-			
4.01.4.01.03.07.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				9,164,909,431		-		-		-		9,164,909,431			
4.01.4.01.03.07.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				246,806,550		-		-		-		246,806,550			
4.01.4.01.03.07.08.03	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)				348,567,528		-		-		-		348,567,528			
													-			
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	8,695,498,886		-		-		-		8,695,498,886		133.57	
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				26,732,500		-		-		-		26,732,500			
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1,275,534,110		-		-		-		1,275,534,110			
4.01.4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1,163,760,050		-		-		-		1,163,760,050			
4.01.4.01.03.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				148,773,000		-		-		-		148,773,000			
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				537,257,027		-		-		-		537,257,027			
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				52,946,020		-		-		-		52,946,020			
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				87,287,469		-		-		-		87,287,469			
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				59,980,018		-		-		-		59,980,018			
4.01.4.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				3,905,000		-		-		-		3,905,000			
4.01.4.01.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				5,472,500		-		-		-		5,472,500			
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				57,472,639		-		-		-		57,472,639			
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				2,547,094,070		-		-		-		2,547,094,070			
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				1,449,785,955		-		-		-		1,449,785,955			
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah						-		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.01.20	Penyediaan Souvenir						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Publik						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD						-		-		-		-			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-											0.00	
4.01.4.01.03.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)						-		-		-		-			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		-	1,956,589,500			-		-		-		-		0.00	
4.01.4.01.03.16.05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.16.16	Peningkatan Pelayanan Acara-acara Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah						-		-		-		-			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	129,297,685			-		-		-		-		0.00	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)	80	-												

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.02.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-			-		-		-		-		0.00	
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-			-		-		-		-		0.00	
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-			-		-		-		-		0.00	
4.01.4.01.03.06.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah berkualitas yang ditetapkan dan diundangkan	70 buah	182,098,198			-		-		-		-		0.00	
4.01.4.01.03.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.26.08	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.26.11	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan						-		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.26.13	Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.26.44	Peningkatan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah HAM (RADHAM)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.26.45	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Miskin						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.02.43	Program Fasilitasi Hukum	Persentase kasus hukum perdata, TUN dan pidana yang tertangani sampai tingkat incrach (putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	100%	647,809,196			-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
4.01.4.01.03.02.43.03	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Miskin						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.08.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	156,183,804			-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (skor)	80				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.08.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.08.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah						-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bagian Organisasi

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-									-			0.00
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional												-			
4.01.4.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)												-			
4.01.4.01.03.32	Program Tatalaksana dan Kelembagaan	Persentase evaluasi tuisi perangkat daerah	-	-									-			0.00
		Persentase Terwujudnya penentuan nama jabatan dan persyaratan jabatan	-	-												
		Persentase terwujudnya instrumen persyaratan jabatan struktural	-	-												
		Persentase Terwujudnya tertib pemakaian atribut PNS	-	-												
		Ditetapkan ISO pada perangkat daerah	-	-												
		Persentase SOP OPD yang dievaluasi	-	-												
		nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat OPD	-	-												
4.01.4.01.03.32.07	Evaluasi Kelembagaan												-			
4.01.4.01.03.32.12	Penyusunan Analisa Jabatan												-			
4.01.4.01.03.32.16	Standart Kompetensi Jabatan												-			
4.01.4.01.03.32.17	Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai (TPP)												-			
4.01.4.01.03.32.19	Evaluasi Standart Operasional Prosedur (SOP)												-			
2.12.4.01.03.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		-	-									-			0.00
2.12.4.01.03.18.09	Survey dan Penyusunan IKM (DID)												-			
2.12.4.01.03.18.10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (DID)												-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.33	Program Kinerja dan Reformasi Birokrasi		-	-											0.00	
4.01.4.01.03.33.04	Pendampingan Penyusunan SAKIP DPD (Pajak Rokak)															
4.01.4.01.03.33.05	Monitoring dan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi															
4.01.4.01.03.33.13	Peningkatan Budaya Kerja															
4.01.4.01.03.33.33	Penyusunan LAKIP															
4.01.4.01.03.08.50	Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	Prosentase DPD yang LKJIP nya sesuai dengan ketentuan	90%	677,591,100												
4.01.4.01.03.08.50.01	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan															
4.01.4.01.03.08.50.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik															
4.01.4.01.03.08.50.03	Peningkatan kualitas Kelambagaan															
4.01.4.01.03.08.50.04	Penguatan Reformasi Birokrasi															
4.01.4.01.03.10.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	415,127,696											0.00	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80	-												
4.01.4.01.03.10.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terebutuhnya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-											0.00	
4.01.4.01.03.10.51	Program Penunjang Administrasi Pembangunan															

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.10.51.01	Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.10.51.02	Pengendalian Kebijakan Pembangunan Daerah						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.10.51.03	Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan Pembangunan Daerah						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.06.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	159,028,940			-		-		-		-		0.00	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-		-			
4.01.4.01.03.06.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.06.08.03	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-			-		-		-		-		0.00	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-			-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor						-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				11,909,485		-		-		-		11,909,485			Bagian Perekonomian
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				59,349,500		-		-		-		59,349,500			
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				4,269,000		-		-		-		4,269,000			
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				84,630,490		-		-		-		84,630,490			
					8,933,900		-		-		-		8,933,900			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		-		-		56,557,978		-	
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				56,557,978		-		-		-		56,557,978			
4.01.4.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				46,807,978		-		-		-		46,807,978			
					9,750,000		-		-		-		9,750,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.35	Program Penunjang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan perekonomian dan SDA	3 kebijakan	1,044,493,980	1,065,028,350	-	-	-	-	-	-	1,065,028,350	-	51.24		
4.01.4.01.03.35.06	Pengawasan dan Monitoring Pengendalian Inflasi serta Pengembangan Ekonomi Daerah				64,335,000	-	-	-	-	-	-	64,335,000	-			
4.01.4.01.03.35.14	Penyampaian Informasi Ketentuan peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku kepentingan Serta Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai				509,590,040	-	-	-	-	-	-	509,590,040	-			
4.01.4.01.03.35.15	Fasilitasi Pengembangan Perusahaan Daerah				243,378,250	-	-	-	-	-	-	243,378,250	-			
4.01.4.01.03.35.20	Penyediaan Souvenir				229,988,300	-	-	-	-	-	-	229,988,300	-			
4.01.4.01.03.35.29	Penyusunan Data Hasil Produksi				1,382,000	-	-	-	-	-	-	1,382,000	-			
4.01.4.01.03.35.30	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ESDM dan LH				16,354,760	-	-	-	-	-	-	16,354,760	-			
4.01.4.01.03.06.46	Program Sosialisasi ketentuan dibidang CUKAI (CUKAI)	Persentase kecamatan yang mendapatkan sosialisasi ketentuan dibidang CUKAI	20%	525,000,000	588,709,950	-	-	-	-	-	-	588,709,950	-	112.14		
4.01.4.01.03.06.46.01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan Serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai				266,920,200	-	-	-	-	-	-	266,920,200	-			
4.01.4.01.03.06.46.02	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Serta Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan dibidang Cukai Pada Masa Pandemi Covid-19				321,789,750	-	-	-	-	-	-	321,789,750	-			
4.01.4.01.03.06.52	Pembinaan Bidang Industri				28,763,000	-	-	-	-	-	-	28,763,000	-			
4.01.4.01.03.06.52.01	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok				28,763,000	-	-	-	-	-	-	28,763,000	-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.06.44	Program Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah urusan kebijakan untuk penanganan inflasi	2 kebijakan	100.000.000	86.236.250	-	-	-	-	-	-	86.236.250	-	86.24		
4.01.4.01.03.06.44.01	Pengawasan dan Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah				86.236.250	-	-	-	-	-	-	86.236.250	-			
4.01.4.01.03.03.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	6.112.028.341	59.679.375	-	-	-	-	-	-	59.679.375	-	0.98		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80									-				
4.01.4.01.03.03.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				54.188.125	-	-	-	-	-	-	54.188.125				
4.01.4.01.03.03.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				5.491.250	-	-	-	-	-	-	5.491.250				
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100.00	-	346.536.164	-	-	-	-	-	-	346.536.164		111.46		
4.01.4.01.03.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				161.349.908	-	-	-	-	-	-	161.349.908				
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				23.102.000	-	-	-	-	-	-	23.102.000				
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12.996.000	-	-	-	-	-	-	12.996.000				
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				7.829.200	-	-	-	-	-	-	7.829.200				
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				130.266.056	-	-	-	-	-	-	130.266.056				
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				10.993.000	-	-	-	-	-	-	10.993.000				
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	-	8.696.943.168	-	-	-	-	-	-	8.696.943.168		221.15		
4.01.4.01.03.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				188.696.563	-	-	-	-	-	-	188.696.563				
4.01.4.01.03.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas				976.655.900	-	-	-	-	-	-	976.655.900				

Bagian Perlengkapan

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				1.098.884.800		-		-		-		1.098.884.800			
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				21.919.905		-		-		-		21.919.905			
4.01.4.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				3.550.000		-		-		-		3.550.000			
4.01.4.01.03.02.51	Pengadaan Mebeleur (DID)				912.716.000		-		-		-		912.716.000			
4.01.4.01.03.02.52	Pengadaan Sarana Prasarana untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (DID)				234.850.000		-		-		-		234.850.000			
4.01.4.01.03.02.53	Pengadaan Kendaraan Dinas				530.000.000		-		-		-		530.000.000			
4.01.4.01.03.02.54	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (Pajak Rokok)				4.441.074.000		-		-		-		4.441.074.000			
4.01.4.01.03.02.55	Pengadaan Peralatan Kantor (DAU)				49.115.000		-		-		-		49.115.000			
4.01.4.01.03.02.56	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (DAU)				239.481.000		-		-		-		239.481.000			
4.01.4.01.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang berseragam sesuai standar	100.00	-	6.256.195.435		-		-		-		6.256.195.435		89.81	
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				5.810.285.300		-		-		-		5.810.285.300			
4.01.4.01.03.03.06	Belanja pakaian upacara beserta kelengkapannya (DID)				445.910.135		-		-		-		445.910.135			
4.01.4.01.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100.00	-	9.800.000		-		-		-		9.800.000		178.18	
4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				9.800.000		-		-		-		9.800.000			
4.01.4.01.03.36	Program Perlengkapan dan Pengelolaan Barang	Persentase data aset daerah yang valid	70%	170.289.000	200.036.366		-		-		-		200.036.366		59.32	
		Persentase aset tanah yang belum bersertifikat	70%													
		Persentase rencana kebutuhan barang yang terpenuhi	70%													
4.01.4.01.03.36.03	Pembayaran Klaim Asuransi Bencana Alam Gedung Kantor				50.275.210		-		-		-		50.275.210			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12	
4.01.4.01.03.36.04	Pensertifikatan Tanah Aset Pemkab				149.761.156		-		-		-		149.761.156				
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	100.00	-	237.009.520		-		-		-		237.009.520		76.23		
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				17.124.000		-		-		-		17.124.000				
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				11.303.700		-		-		-		11.303.700				
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				936.000		-		-		-		936.000				
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				23.758.000		-		-		-		23.758.000				
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				177.487.820		-		-		-		177.487.820				
4.01.4.01.03.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Publik				6.400.000		-		-		-		6.400.000				
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	-	65.348.353		-		-		-		65.348.353		1.66		
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				65.348.353		-		-		-		65.348.353				
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang berseragam sesuai standar	100.00	-	282.409.427		-		-		-		282.409.427				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	100.00	-	13.677.478		-		-		-		13.677.478				
4.01.4.01.03.34	Program Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah				460.129.690		-		-		-		460.129.690				
4.01.4.01.03.34.04	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)				295.774.527		-		-		-		295.774.527				
4.01.4.01.03.34.05	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa				12.596.581		-		-		-		12.596.581				
4.01.4.01.03.34.06	Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah				22.365.682		-		-		-		22.365.682				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.34.14	Bimbingan Teknis Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa				49,190,400		-		-		-		49,190,400			
4.01.4.01.03.34.19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem LPSE				80,202,500		-		-		-		80,202,500			
4.01.4.01.03.05.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	432,168,316	489,690,147		-		-		-		489,690,147		113.31	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80	-									-			
4.01.4.01.03.05.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				489,690,147		-		-		-		489,690,147			
4.01.4.01.03.05.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				-								-			
													-			
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	600,636,924		-		-		-		600,636,924		114.91	
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				28,303,930		-		-		-		28,303,930			
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				45,471,710		-		-		-		45,471,710			
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				24,271,000		-		-		-		24,271,000			
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				129,751,178		-		-		-		129,751,178			
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				29,690,000		-		-		-		29,690,000			
4.01.4.01.03.01.30	Penyediaan Jasa Keamanan Masjid				129,145,553		-		-		-		129,145,553			
4.01.4.01.03.01.31	Penyediaan Jasa Kebersihan Masjid				214,003,553		-		-		-		214,003,553			
													-			
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	48,157,362		-		-		-		48,157,362		130.25	
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				38,752,802		-		-		-		38,752,802			
4.01.4.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				9,404,560		-		-		-		9,404,560			

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-	16,379,500	-	-	-	-	-	-	16,379,500	-	-	99.27	
4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				16,379,500	-	-	-	-	-	-	16,379,500	-	-		
4.01.4.01.03.37	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	70%	4,221,589,188	5,956,759,403	-	-	-	-	-	-	5,956,759,403	-	-	71.25	
		Indeks Kehidupan Beragama	75.5													
		Rasio tempat ibadah dengan jumlah pemeluk agama	4/1000													
4.01.4.01.03.37.01	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kehidupan Beragama				1,273,432,650	-	-	-	-	-	-	1,273,432,650				
4.01.4.01.03.37.02	Peringatan Hari Besar Agama				2,075,935,700	-	-	-	-	-	-	2,075,935,700				
4.01.4.01.03.37.03	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Keagamaan				1,070,034,300	-	-	-	-	-	-	1,070,034,300				
4.01.4.01.03.37.05	Pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) dan Pemulangan Jamaah Haji				305,138,000	-	-	-	-	-	-	305,138,000				
4.01.4.01.03.37.08	Koordinasi Bidang Transmigrasi, Pengendalian Penduduk dan KB, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana				35,145,000	-	-	-	-	-	-	35,145,000				
4.01.4.01.03.37.09	Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendidikan dan Kebudayaan				12,425,000	-	-	-	-	-	-	12,425,000				
4.01.4.01.03.37.10	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba MTQ Tingkat Propinsi (DID)				233,280,000	-	-	-	-	-	-	233,280,000				
4.01.4.01.03.05.48.03	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan				781,185,000	-	-	-	-	-	-	781,185,000				
4.01.4.01.03.05.48.08	sinkronisasi pengembangan UKS				31,199,500	-	-	-	-	-	-	31,199,500				
4.01.4.01.03.05.48.09	sinkronisasi lintas DPD bidang kesejahteraan rakyat				35,453,700	-	-	-	-	-	-	35,453,700				
4.01.4.01.03.05.48.10	Pengelolaan sarana prasarana peribadatan				72,538,953	-	-	-	-	-	-	72,538,953				
4.01.4.01.03.05.48.12	Fasilitasi pengembangan lokasi pemantauan rakyatul hilal				13,455,600	-	-	-	-	-	-	13,455,600				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.05.48.13		Verifikasi dan validasi bantuan sosial, hibah kepada kelompok masyarakat dan keagamaan			17.536.000		-		-		-		17.536.000			
4.01.4.01.03.09.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	359,663,231	381,033,698		-		-		-		381,033,698		105,94	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80													
4.01.4.01.03.09.08.01		Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana			380.873.698		-		-		-		380.873.698			
4.01.4.01.03.09.08.02		Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran			160.000		-		-		-		160.000			
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	456,714,957		-		-		-		456,714,957		149,86	
4.01.4.01.03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor			25.090.610		-		-		-		25.090.610			
4.01.4.01.03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			11.899.806		-		-		-		11.899.806			
4.01.4.01.03.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			15.652.000		-		-		-		15.652.000			
4.01.4.01.03.01.17		Penyediaan makanan dan minuman			20.519.200		-		-		-		20.519.200			
4.01.4.01.03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			278.563.341		-		-		-		278.563.341			
4.01.4.01.03.01.19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			104.990.000		-		-		-		104.990.000			
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	162,698,463		-		-		-		162,698,463		109,68	
4.01.4.01.03.02.12		Pengadaan Buku Kerja			55.000.000		-		-		-		55.000.000			
4.01.4.01.03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			85.703.463		-		-		-		85.703.463			
4.01.4.01.03.02.30		Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)			21.995.000		-		-		-		21.995.000			

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	-	-	27,504,890		-		-		-		27,504,890		104.18	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				27,504,890		-		-		-		27,504,890			
4.01.4.01.03.38	Program Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase fasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan terkait kegiatan pimpinan daerah	100%	985,318,470	1,366,762,400		-		-		-		1,366,762,400		70.04	
4.01.4.01.03.38.03	Fasilitasi Pimpinan Daerah Menjalin Kebersamaan dengan Wartawan (Pajak Rokok)				298,540,000		-		-		-		298,540,000			
4.01.4.01.03.38.04	Pelaksanaan Pertemuan Kehumasan				30,505,000		-		-		-		30,505,000			
4.01.4.01.03.38.05	Fasilitasi Pelaksanaan Upacara				652,592,364		-		-		-		652,592,364			
4.01.4.01.03.38.06	Fasilitasi Pelaksanaan Upacara (Pajak Rokok)				95,475,000		-		-		-		95,475,000			
4.01.4.01.03.38.08	Peningkatan Acara Keprotokolan				76,140,000		-		-		-		76,140,000			
4.01.4.01.03.38.11	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Daerah Beserta Jajaran dan Instansi Vertikal				102,335,750		-		-		-		102,335,750			
4.01.4.01.03.38.15	Fasilitasi Peliputan Dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah				111,174,286		-		-		-		111,174,286			
4.01.4.01.03.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	288,014,825	227,094,460		-		-		-		227,094,460		78.85	Bagian Administrasi Pemerintahan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-		-			
4.01.4.01.03.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				210,094,460		-		-		-		210,094,460			
4.01.4.01.03.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				17,000,000		-		-		-		17,000,000			
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	331,440,839		-		-		-		331,440,839		130.89	
4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				65,000		-		-		-		65,000			
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				32,686,045		-		-		-		32,686,045			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				7.090.000		-		-		-		7.090.000			
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				4.800.000		-		-		-		4.800.000			
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				77.414.350		-		-		-		77.414.350			
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				194.735.444		-		-		-		194.735.444			
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				14.650.000		-		-		-		14.650.000			
													-			
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	45.896.191		-		-		-		45.896.191		43.50	
4.01.4.01.03.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				5.350.000		-		-		-		5.350.000			
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				34.151.191		-		-		-		34.151.191			
4.01.4.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				6.395.000		-		-		-		6.395.000			
													-			
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	-	-	21.650.000		-		-		-		21.650.000		85.74	
4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				21.650.000		-		-		-		21.650.000			
													-			
4.01.4.01.03.42	Program Penunjang Administrasi Pemerintahan	Penegasan Batas Administrasi Wilayah (Kecamatan dan Desa)		782.285.379	922.285.200		-		-		-		922.285.200		59.24	
		Meningkatnya Peringkat LPPD Nasional	Peringkat 38	-									-			
		Meningkatnya Pelayanan Publik kepada masyarakat di kecamatan		-									-			
		Terselenggaranya peringatan hari jadi Provinsi		-									-			
		Jumlah rumusan kebijakan administrasi	43 dokumen	-									-			
4.01.4.01.03.42.02	Penunjang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				284.898.000		-		-		-		284.898.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.42.04	Peringatan Hari Jadi Provinsi				93.236.500		-		-		-		93.236.500			
4.01.4.01.03.42.05	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (DID)				326.252.000		-		-		-		326.252.000			
4.01.4.01.03.42.06	Penunjang Penyelenggaraan Perangkat Wilayah (DID)				132.991.200		-		-		-		132.991.200			
4.01.4.01.03.01.42.01	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				49.982.500		-		-		-		49.982.500			
4.01.4.01.03.01.42.03	Penunjang Penyelenggaraan Perangkat Wilayah				34.925.000		-		-		-		34.925.000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		-		-		-		-			
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		-		-		-		-			
		Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di Fasilitas	-	-	-		-		-		-		-			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	-	-	-		-		-		-		-			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan	-	-	-		-		-		-		-			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Keprotokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitas	-	-	-		-		-		-		-			
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Bidang hukum	-	-	-		323.375.946		86.380.500		26.71		86.380.500		0.65	
4.01.4.01.02.21	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				-		323.375.946		86.380.500		26.71		86.380.500			
4.01.4.01.02.21.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				-		75.000.000		9.682.500		12.91		9.682.500			
4.01.4.01.02.21.02	Fasilitasi Bantuan Hukum				-		141.608.421		50.000.000		35.31		50.000.000			
4.01.4.01.02.21.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				-		106.767.525		26.698.000		25.01		26.698.000			
													-			
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan	-	-	-		2.648.986.815		137.834.500		5.20		137.834.500		-	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi	-	-	-											
4.01.4.01.01.04.20	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				-		2.648.986.815		137.834.500		5.20		137.834.500			
4.01.4.01.01.04.20.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				-		2.549.380.115		135.889.500		5.33		135.889.500			
4.01.4.01.01.04.20.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				-		78.942.200		1.945.000		2.46		1.945.000			
4.01.4.01.01.04.20.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				-		20.664.500		-		0.00		-			
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	-	-	-		237.301.050		52.825.000		22.26		52.825.000		-	
4.01.4.01.01.01.19	Administrasi Tata Pemerintahan				-		205.645.690		44.795.000		21.78		44.795.000			
4.01.4.01.01.01.19.01	Penataan Administrasi Pemerintahan				-		4.477.000		-		0.00		-			
4.01.4.01.01.01.19.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				-		78.354.100		25.085.000		32.01		25.085.000			
4.01.4.01.01.01.19.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				-		122.814.590		19.710.000		16.05		19.710.000			
4.01.4.01.01.01.22	Fasilitasi Kerjasama Daerah				-		31.655.360		8.030.000		25.37		8.030.000			
4.01.4.01.01.01.22.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				-		31.655.360		8.030.000		25.37		8.030.000			
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan	-	-	-		481.001.000		24.250.000		5.04		24.250.000		-	
4.01.4.01.01.09.24	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				-		481.001.000		24.250.000		5.04		24.250.000			
4.01.4.01.01.09.24.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				-		292.550.000		15.300.000		5.23		15.300.000			
4.01.4.01.01.09.24.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				-		88.580.900		-		0.00		-			
4.01.4.01.01.09.24.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				-		99.870.100		8.950.000		8.96		8.950.000			
					-								-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	-	-	-		10,705,448	-	-		-		-		-	
4.01. 4.01.01.03.25	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						10,705,448				0.00					
4.01. 4.01.01.03. 25.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						5,000,000				0.00					
4.01. 4.01.01.03. 25.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik						5,705,448				0.00					
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	-	-	-		865,648,431	39,426,000	4.55		39,426,000		-			
4.01. 4.01.01.05.23	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						848,911,710	15,016,500	1.77		15,016,500					
4.01. 4.01.01.05. 23.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						107,770,760	-	0.00							
4.01. 4.01.01.05. 23.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						82,080,900	15,016,500	18.29		15,016,500					
4.01. 4.01.01.05. 23.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil						659,060,050	-	0.00							
4.01. 4.01.01.05.26	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						16,736,721	24,409,500	145.84		24,409,500					
4.01. 4.01.01.05. 26.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						4,780,263	23,568,000	493.03		23,568,000					
4.01. 4.01.01.05. 26.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						11,956,458	841,500	7.04		841,500					
	Sekretariat DPRD						82,129,453,740	45,583,868,460	8,707,780,389	19.10	90,837,234,129		38.77			
4.01.4.01.04.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	2,104,836,800	3,885,792,433							3,885,792,433		184.61		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	75	-												
4.01.4.01.04.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana						3,879,455,683					3,879,455,683				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.04.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				6.336.750		-		-		-		6.336.750			
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	3.122.054.846		-		-		-		3.122.054.846		114,40	
4.01.4.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				8.835.000		-		-		-		8.835.000			
4.01.4.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				192.816.419		-		-		-		192.816.419			
4.01.4.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				96.000.000		-		-		-		96.000.000			
4.01.4.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				90.337.400		-		-		-		90.337.400			
4.01.4.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				158.802.045		-		-		-		158.802.045			
4.01.4.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				24.688.500		-		-		-		24.688.500			
4.01.4.01.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				78.925.420		-		-		-		78.925.420			
4.01.4.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				64.920.000		-		-		-		64.920.000			
4.01.4.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				113.482.900		-		-		-		113.482.900			
4.01.4.01.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				1.885.363.735		-		-		-		1.885.363.735			
4.01.4.01.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				23.140.000		-		-		-		23.140.000			
4.01.4.01.04.01.25	Penyediaan Jasa Pengamanan				263.743.427		-		-		-		263.743.427			
4.01.4.01.04.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				121.000.000		-		-		-		121.000.000			
4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	1.145.543.943		-		-		-		1.145.543.943		127,34	
4.01.4.01.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				213.774.726		-		-		-		213.774.726			
4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				17.272.229		-		-		-		17.272.229			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				835.920.488		-		-		-		835.920.488			
4.01.4.01.04.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				-		-		-		-		-			
4.01.4.01.04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				78.576.500		-		-		-		78.576.500			
					-		-		-		-		-			
4.01.4.01.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang berseragam sesuai standar	-	-	416.856.000		-		-		-		416.856.000		71.80	
4.01.4.01.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				416.856.000		-		-		-		416.856.000			
					-		-		-		-		-			
4.01.4.01.04.39	Program Penyelenggaraan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase rancangan Peraturan Daerah yang disahkan	-	-	13.440.614,004		-		-		-		13.440.614,004		113.49	
4.01.4.01.04.39.05	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Perubahan APBD (DID)				891.217.938		-		-		-		891.217.938			
4.01.4.01.04.39.06	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD				2.236.890.405		-		-		-		2.236.890.405			
4.01.4.01.04.39.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				6.769.845.234		-		-		-		6.769.845.234			
4.01.4.01.04.39.11	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				364.770.000		-		-		-		364.770.000			
4.01.4.01.04.39.12	Studi Banding Pimpinan dan Anggota DPRD				2.983.697.427		-		-		-		2.983.697.427			
4.01.4.01.04.39.13	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD (DID)				43.820.000		-		-		-		43.820.000			
4.01.4.01.04.39.14	Penunjang Kegiatan Reses				2.500.000		-		-		-		2.500.000			
4.01.4.01.04.39.15	Penyusunan Alat Kelengkapan DPRD				134.353.000		-		-		-		134.353.000			
4.01.4.01.04.39.16	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Anggota DPRD				13.520.000		-		-		-		13.520.000			
					-		-		-		-		-			
4.01.4.01.04.40	Program Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase aspirasi masyarakat yang terlayani	100%	648.601,731	1.701.651,650		-		-		-		1.701.651,650		132.48	
4.01.4.01.04.40.01	Peningkatan inventarisasi dan pengolahan data Kegiatan DPRD				-		-		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.04.40.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan				21.875.000		-		-		-		21.875.000			
4.01.4.01.04.40.03	Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD				1.433.759.150		-		-		-		1.433.759.150			
4.01.4.01.04.40.04	Peningkatan Layanan Aspirasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga				246.017.500		-		-		-		246.017.500			
4.02.4.01.04.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	-	-	68.042.045		-		-		-		68.042.045		68.16	
4.02.4.01.04.20.09	Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI				68.042.045		-		-		-		68.042.045			
4.01.4.01.04.41	Program Perencanaan dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan sekretariat DPRD yang tersusun	-	-	16.706.000		-		-		-		16.706.000		47.13	
4.01.4.01.04.41.01	Penyelenggaraan Penyusunan dan Perencanaan Keuangan				16.706.000		-		-		-		16.706.000			
4.01.4.01.04.41.02	Peningkatan Penyelenggaraan Perbendaharaan				-		-		-		-		-			
4.01.4.01.04.41.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Pelaporan Keuangan				-		-		-		-		-			
4.01.4.01.04.01.47	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi	100%	10.237.066.900	17.267.465.949		-		-		-		17.267.465.949		168.68	
4.01.4.01.04.01.47.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				3.985.307.756		-		-		-		3.985.307.756			
4.01.4.01.04.01.47.03	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				11.257.084.193		-		-		-		11.257.084.193			
4.01.4.01.04.01.47.06	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD				30.000.000		-		-		-		30.000.000			
4.01.4.01.04.01.47.07	Penunjang Kegiatan Reses DPRD				3.662.500		-		-		-		3.662.500			
4.01.4.01.04.01.47.10	Inspeksi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah				23.560.000		-		-		-		23.560.000			
4.01.4.01.04.01.47.11	Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI				85.096.250		-		-		-		85.096.250			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.04.01.47.13	Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Pemulihan Bidang Pendidikan, Perekonomian, Kesehatan dan Sosial Ketenagakerjaan Akibat Pandemi Covid-19				1.843.990.250		-		-		-		1.843.990.250			
4.01.4.01.04.01.47.14	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pencegahan Atas Penyebaran Virus Covid-19 di wilayah Kabupaten Madiun				38.765.000		-		-		-		38.765.000			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		4.956.874.240		1.022.618.273		20.63		1.022.618.273		3.79	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
		Persentase penyelenggaraan administrasi DPRD	-	-	-								-			
		Persentase layanan keuangan DPRD	-	-	-								-			
		Persentase layanan kesejahteraan DPRD	-	-	-								-			
4.08.4.08.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		24.368.200		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		14.368.200		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		5.000.000		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		5.000.000		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	-	-	-		158.400.000		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-		158.400.000		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah			-		163.840.000		67.445.430		41.17		67.445.430			
4.08.4.08.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		20.000.000		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		20.000.000		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		123.840.000		67.445.430		54.46		67.445.430			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.08. 4.08.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	-	-	-		1.250.163.641		243.039.400		19.44		243.039.400			
4.08. 4.08.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		39.993.844		9.885.000		24.72		9.885.000			
4.08. 4.08.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		92.408.960		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		66.662.800		6.966.500		10.45		6.966.500			
4.08. 4.08.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		211.510.050		24.408.000		11.54		24.408.000			
4.08. 4.08.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		158.349.787		21.562.500		13.62		21.562.500			
4.08. 4.08.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		70.000.000		27.190.000		38.84		27.190.000			
4.08. 4.08.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				-		140.398.200		32.220.000		22.95		32.220.000			
4.08. 4.08.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		470.840.000		120.807.400		25.66		120.807.400			
4.08. 4.08.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya ketersediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah			-		467.640.660		42.262.000		9.04		42.262.000			
4.08. 4.08.01.01.07.05	Pengadaan Mebel				-		139.598.880		42.262.000		30.27		42.262.000			
4.08. 4.08.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		328.041.780		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah			-		1.297.070.038		280.804.692		21.65		280.804.692			
4.08. 4.08.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		10.000.000		3.690.000		36.90		3.690.000			
4.08. 4.08.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		290.100.000		73.960.142		25.49		73.960.142			
4.08. 4.08.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		996.970.038		203.154.550		20.38		203.154.550			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.08. 4.08.01.01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			-		1.595.391.701		389.066.751		24.39		389.066.751			
4.08. 4.08.01.01. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		321.306.330		154.172.647		47.98		154.172.647			
4.08. 4.08.01.01. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		702.114.772		188.795.604		26.89		188.795.604			
4.08. 4.08.01.01. 09.05	Pemeliharaan Mebel				-		25.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		140.000.000		38.111.000		27.22		38.111.000			
4.08. 4.08.01.01. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		347.570.410		2.800.000		0.81		2.800.000			
4.08. 4.08.01.01. 09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		59.400.189		5.187.500		8.73		5.187.500			
													-			
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah APBD	-	-	-		30.713.245.740		5.639.925.570		18.36		5.639.925.570		3.47	
		Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah Non APBD	-	-	-								-			
		Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan	-	-	-								-			
4.08. 4.08.01.01. 15	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu			-		3.285.488.600		1.355.251.000		41.25		1.355.251.000			
4.08. 4.08.01.01. 15.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				-		20.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01. 15.02	Pembahasan Rancangan Perda				-		1.596.042.500		584.196.500		36.60		584.196.500			
4.08. 4.08.01.01. 15.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				-		1.411.946.100		523.554.500		37.08		523.554.500			
4.08. 4.08.01.01. 15.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				-		247.500.000		247.500.000		100.00		247.500.000			
4.08. 4.08.01.01. 15.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD				-		10.000.000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.08. 4.08.01.01.16	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Jumlah kebijakan anggaran yang ditetapkan tepat waktu			-		2.100.641.295		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.16.01	Pembahasan KUA dan PPAS				-		241.829.750		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.16.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				-		242.852.565		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.16.03	Pembahasan APBD				-		602.400.850		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.16.04	Pembahasan APBD Perubahan				-		500.489.065		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.16.05	Pembahasan Laporan Semester				-		10.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.16.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				-		503.069.065		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.17	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan			-		236.576.300	54.030.000		22.84		54.030.000				
4.08. 4.08.01.01.17.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				-		10.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.17.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				-		10.000.000	1.485.000		14.85		1.485.000				
4.08. 4.08.01.01.17.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				-		10.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.17.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				-		10.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.17.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				-		10.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.17.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				-		75.243.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.17.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran				-		20.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.17.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				-		91.333.300	52.545.000		57.53		52.545.000				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.08. 4.08.01.01.18	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD yang dilaksanakan			-		9.424.658.365		685.691.070		7.28		685.691.070			
4.08. 4.08.01.01.18.01	Orientasi DPRD				-		7.460.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.18.02	Pendalaman Tugas DPRD				-		1.343.057.000		197.736.070		14.72		197.736.070			
4.08. 4.08.01.01.18.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan				-		836.193.600		412.955.000		49.39		412.955.000			
4.08. 4.08.01.01.18.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				-		150.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.18.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				-		180.000.000		75.000.000		41.67		75.000.000			
4.08. 4.08.01.01.18.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				-		6.663.795.200		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.18.07	Penyusunan Program Kerja DPRD				-		244.152.565		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.19	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun			-		1.192.000.000		820.000		0.07		820.000			
4.08. 4.08.01.01.19.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah				-		75.000.000		300.000		0.40		300.000			
4.08. 4.08.01.01.19.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				-		10.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.19.03	Pelaksanaan Reses				-		1.107.000.000		520.000		0.05		520.000			
4.08. 4.08.01.01.20	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase jumlah kode etik DPRD yang disahkan			-		15.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.20.01	Penyusunan Kode Etik DPRD				-		10.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.20.02	Pengawasan Kode Etik DPRD				-		5.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.21	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah yang disetujui			-		10.000.000		-		-		-			
4.08. 4.08.01.01.21.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah				-		10.000.000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.08.4.08.01.01.22	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase jumlah tugas DPRD yang difasilitasi			-		13.763.480.505		3.513.458.500		25.53		3.513.458.500			
4.08.4.08.01.01.22.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				-		12.973.125.700		3.354.404.500		25.86		3.354.404.500			
4.08.4.08.01.01.22.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				-		251.010.805		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.22.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				-		40.000.000		2.775.000		6.94		2.775.000			
4.08.4.08.01.01.22.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				-		499.344.000		156.279.000		31.30		156.279.000			
4.08.4.08.01.01.23	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan			-		575.400.675		25.650.000		4.46		25.650.000			
		Persentase jumlah layanan kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan											-			
4.08.4.08.01.01.23.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				-		359.400.675		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.23.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				-		216.000.000		25.650.000		11.88		25.650.000			
4.08.4.08.01.01.24	Layanan Administrasi DPRD	Persentase jumlah layanan administrasi DPRD yang dilaksanakan sesuai kebutuhan			-		110.000.000		5.025.000		4.57		5.025.000			
4.08.4.08.01.01.24.02	Fasilitasi Fraksi DPRD				-		40.000.000		-		-		-			
4.08.4.08.01.01.24.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				-		70.000.000		5.025.000		7.18		5.025.000			
													-			
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												-			
	Kesatuan Bangsa dan Politik															
1.05.1.05.01.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	3.670,015,821	10,614,164,766	442,173,788	916,720,534						12,026,993,487		19,46	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	80										916,720,534		207,32	
1.05.1.05.01.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana						906.490.534		-		-		906.490.534			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05.1.05.01.01.08.02		Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran			10.230.000		-		-		-		10.230.000			
1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	398.747.485		-		-		-		398.747.485		102.07	
1.05.1.05.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			41.568.250		-		-		-		41.568.250			
1.05.1.05.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor			5.014.500		-		-		-		5.014.500			
1.05.1.05.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor			39.626.625		-		-		-		39.626.625			
1.05.1.05.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			18.396.100		-		-		-		18.396.100			
1.05.1.05.01.01.11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			6.840.000		-		-		-		6.840.000			
1.05.1.05.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman			29.971.080		-		-		-		29.971.080			
1.05.1.05.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			173.790.930		-		-		-		173.790.930			
1.05.1.05.01.01.19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah			16.963.000		-		-		-		16.963.000			
1.05.1.05.01.01.23		Penyediaan Jasa Pengamanan			12.000.000		-		-		-		12.000.000			
1.05.1.05.01.01.25		Penyediaan Jasa Publikasi			10.577.000		-		-		-		10.577.000			
1.05.1.05.01.01.26		Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD			41.000.000		-		-		-		41.000.000			
1.05.1.05.01.01.27		Penyediaan Jasa Pelayanan Publik			3.000.000		-		-		-		3.000.000			
													-			
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja yang terpenuhi	-	-	205.912.074		-		-		-		205.912.074		133.83	
1.05.1.05.01.02.11		Pengadaan Peralatan Kantor			52.717.500		-		-		-		52.717.500			
1.05.1.05.01.02.12		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			51.294.825		-		-		-		51.294.825			
1.05.1.05.01.02.13		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			90.755.824		-		-		-		90.755.824			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05.1.05.01.02.14	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				-											
1.05.1.05.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				11,143,925								11,143,925			
1.05.1.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai (%)	-	-	6,562,880								6,562,880		14.59	
1.05.1.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				6,562,880								6,562,880			
1.05.1.05.01.01.31	Program Pencegahan Penanganan Konflik	Persentase potensi gangguan / konflik yang teratasi	100%	210,954,700	1,052,171,800								1,052,171,800		498.77	
1.05.1.05.01.01.31.01	Fasilitasi Kewaspadaan Daerah				135,076,500								135,076,500			
1.05.1.05.01.01.31.02	Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosial				-								-			
1.05.1.05.01.01.31.03	Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah				896,139,800								896,139,800			
1.05.1.05.01.01.31.04	Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia) Kabupaten Madiun				20,955,500								20,955,500			
													-			
	Program Pendidikan Politik Masyarakat Dan Hubungan Lembaga	Prosentase Peran Serta Pemilih Dalam Pengembangan Etika Dan Budaya Politik											-			
		Prosentase Peran Ormas / LSM											-			
													-			
1.05.1.05.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	95%	116,006,589	170,173,000								170,173,000		146.69	
1.05.1.05.01.2125	Pembinaan Partai Politik				42,654,500								42,654,500			
1.05.1.05.01.2129	Pembinaan Ormas dan LSM				127,518,500								127,518,500			
													-			
1.05.1.05.01.27	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Beragama	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan			326,032,000								326,032,000		86.99	
1.05.1.05.01.27.01	Pembinaan Forum Pembaaran Kebangsaan				34,110,000								34,110,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
1.05.1.05.01.27.02	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama				35.990,000		-		-		-		35.990,000			
1.05.1.05.01.27.04	Aktualisasi Nilai Pancasila				32.371,500		-		-		-		32.371,500			
1.05.1.05.01.27.05	Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan				34.534,500		-		-		-		34.534,500			
1.05.1.05.01.27.06	Desk Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden				84.862,000		-		-		-		84.862,000			
1.05.1.05.01.27.07	Sosialisasi Integrasi Bangsa (DID)				104.164,000		-		-		-		104.164,000			
													-			
1.05.1.05.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				1.878.341,750		-		-		-		1.878.341,750		92.80	
1.05.1.05.01.15.07	Pemantapan Stabilitas Bidang Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Sosial				101.200,000		-		-		-		101.200,000			
1.05.1.05.01.15.10	Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI Kabupaten Madiun				132.433,750		-		-		-		132.433,750			
1.05.1.05.01.15.12	Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (DID)				871.120,000		-		-		-		871.120,000			
1.05.1.05.01.15.17	Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah				540.725,000		-		-		-		540.725,000			
1.05.1.05.01.15.18	Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosial				43.210,000		-		-		-		43.210,000			
1.05.1.05.01.15.19	Fasilitasi Kewaspadaan Daerah				125.130,000		-		-		-		125.130,000			
1.05.1.05.01.15.20	Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat				64.523,000		-		-		-		64.523,000			
													-			
1.05.1.05.01.32	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	40%	2.900.880,744	352.420,860		-		-		-		352.420,860		12.15	
1.05.1.05.01.01.32.01	Pembinaan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)				7.383,210		-		-		-		7.383,210			
1.05.1.05.01.01.32.03	Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)				62.679,400		-		-		-		62.679,400			
1.05.1.05.01.01.32.04	Sosialisasi Integrasi Bangsa				50.780,000		-		-		-		50.780,000			
1.05.1.05.01.01.32.05	Fasilitasi Pelaksanaan Upacara				231.578,250		-		-		-		231.578,250			
													-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		649,635,249		202,730,907		31.21		202,730,907		2.22	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-											
4.12.4.12.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		14,999,069		-		-		-			
4.12.4.12.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD			-		14,999,069		-		-		-			
4.12.4.12.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		204,907,680		50,619,500		24.70		50,619,500			
4.12.4.12.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan			-		16,309,634		14,338,500		87.91		14,338,500			
4.12.4.12.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan perlengkapan Kantor Yang Disediakan			-		33,923,561		13,989,000		41.24		13,989,000			
4.12.4.12.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor Yang Disediakan			-		54,917,465		17,450,000		31.77		17,450,000			
4.12.4.12.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan penggandaan Yang Disediakan			-		15,311,020		3,842,000		25.09		3,842,000			
4.12.4.12.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan			-		84,446,000		1,000,000		1.18		1,000,000			
4.12.4.12.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		8,970,000		-		-		-			
4.12.4.12.01.01.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		8,970,000		-		-		-			
4.12.4.12.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		276,741,400		106,964,395		38.65		106,964,395			
4.12.4.12.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayarkan			-		97,041,400		34,464,395		35.52		34,464,395			
4.12.4.12.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dilaksanakan			-		179,700,000		72,500,000		40.35		72,500,000			
4.12.4.12.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		144,017,100		45,147,012		31.35		45,147,012			
4.12.4.12.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan			-		9,160,000		4,582,800		50.03		4,582,800			
4.12.4.12.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Yang Dilaksanakan			-		114,857,100		40,564,212		35.32		40,564,212			
4.12.4.12.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Yang Dilaksanakan			-		20,000,000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-		74,087,390		-		-		-		0.00	
4.12.4.12.01.01.15	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			-		74,087,390		-		-		-			
4.12.4.12.01.01.15.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			-		74,087,390		-		-		-			
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Demokrasi Indonesia	-	-	-		32,126,301		-		-		-		0.00	
4.12.4.12.01.01.16	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Penyelenggaraan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			-		32,126,301		-		-		-			
4.12.4.12.01.01.16.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah anggota Partai Politik yang mengikuti sosialisasi			-		32,126,301		-		-		-			
		jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik											-			
													-			
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	-	-	-		53,019,569		-		-		-		0.00	
4.12.4.12.01.01.17	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			-		53,019,569		-		-		-			
4.12.4.12.01.01.17.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah anggota Ormas yang dibina			-		53,019,569		-		-		-			
		Jumlah Ormas yang mendapatkan hibah											-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Keamanan Manusia	-	-	-		1,147,851,700	268,212,000	23.37			268,212,000		4.54		
4.12.4.12.01.01.19	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Penanganan konflik Sosial sesuai dengan ketentuan			-		1,147,851,700	268,212,000	23.37			268,212,000				
		Jumlah Pencegahan konflik sosial dengan baik			-							-				
4.12.4.12.01.01.19.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di				-		192,281,200	46,866,000	24.37			46,866,000				
4.12.4.12.01.01.19.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan			-		415,685,000	9,569,000	2.30			9,569,000				
4.12.4.12.01.01.19.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah pencegahan konflik sosial dengan baik			-		73,070,800	48,927,000	66.96			48,927,000				
4.12.4.12.01.01.19.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten			-		466,814,700	162,850,000	34.89			162,850,000				
												-				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	-	-	-							-		-		
												-				
	UNSUR KEWILAYAHAN											-				
	Kecamatan						21,831,133,176	58,003,188,580				58,003,188,580		-		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.05.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	266,418,229	275,844,772		-	-	-	-		275,844,772		103.54		Kecamatan Balerejo
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-	-	-	-		-				
4.01.4.01.05.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				275,844,772		-	-	-	-		275,844,772				
4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			160,931,380		-	-	-	-		160,931,380		92.27		
4.01.4.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				31,859,830		-	-	-	-		31,859,830				
4.01.4.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				37,200,000		-	-	-	-		37,200,000				
4.01.4.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				17,115,850		-	-	-	-		17,115,850				
4.01.4.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				10,451,700		-	-	-	-		10,451,700				
4.01.4.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3,771,200		-	-	-	-		3,771,200				
4.01.4.01.05.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				7,325,600		-	-	-	-		7,325,600				
4.01.4.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				5,100,000		-	-	-	-		5,100,000				
4.01.4.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				15,760,000		-	-	-	-		15,760,000				
4.01.4.01.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				13,987,200		-	-	-	-		13,987,200				
4.01.4.01.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				18,360,000		-	-	-	-		18,360,000				
							-	-	-	-		-				
4.01.4.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			60,138,629		-	-	-	-		60,138,629		66.92		
4.01.4.01.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				9,150,000		-	-	-	-		9,150,000				
4.01.4.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				45,763,629		-	-	-	-		45,763,629				
4.01.4.01.05.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				5,225,000		-	-	-	-		5,225,000				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu			14,560,700		-		-		-		14,560,700		90.23	
4.01.4.01.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				14,560,700		-		-		-		14,560,700			
4.01.4.01.05.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	89.35%	453,232,354	298,891,550		-		-		-		298,891,550		33.30	
4.01.4.01.05.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa				62,170,000		-		-		-		62,170,000			
4.01.4.01.05.29.30	Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan				72,090,300		-		-		-		72,090,300			
4.01.4.01.05.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan				66,605,000		-		-		-		66,605,000			
4.01.4.01.05.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				41,637,250		-		-		-		41,637,250			
4.01.4.01.05.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				9,942,000		-		-		-		9,942,000			
4.01.4.01.05.29.34	Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan (Pajak Rokok)				46,447,000		-		-		-		46,447,000			
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	268,230,820	-		-		-		-		-			
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80		-		-		-		-		-			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			-		-		-		-		-			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			-		-		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	89.35%	426,033,600	105,631,714		-		-		-		105,631,714			
4.01.4.01.06.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	270,939,266	184,286,357		-		-		-		184,286,357		68.02	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-		-			
4.01.4.01.06.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				184,286,357		-		-		-		184,286,357			Kecamatan Dagangan

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhi kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			185,357,122		-		-		-		185,357,122		103.53	
4.01.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				27,614,122		-		-		-		27,614,122			
4.01.4.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				28,800,000		-		-		-		28,800,000			
4.01.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				11,748,500		-		-		-		11,748,500			
4.01.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				7,949,000		-		-		-		7,949,000			
4.01.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				9,187,000		-		-		-		9,187,000			
4.01.4.01.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				5,000,000		-		-		-		5,000,000			
4.01.4.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3,335,000		-		-		-		3,335,000			
4.01.4.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				15,890,000		-		-		-		15,890,000			
4.01.4.01.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				35,854,500		-		-		-		35,854,500			
4.01.4.01.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				34,928,000		-		-		-		34,928,000			
	Penyediaan Jasa Publikasi				5,051,000		-		-		-		5,051,000			
4.01.4.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	150,439,960		-		-		-		150,439,960		141.75	
4.01.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				79,842,000		-		-		-		79,842,000			
4.01.4.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				65,186,060		-		-		-		65,186,060			
4.01.4.01.06.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				5,411,900		-		-		-		5,411,900			
4.01.4.01.06.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	88%	295,624,509	340,713,500		-		-		-		340,713,500		58.20	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		$9 = 8/7 \times 100\%$		$10 = 6+8$		$11 = 10/5 \times 100\%$		12
4.01.4.01.06.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa				32.665.000		-		-		-		32.665.000			
4.01.4.01.06.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban				49.567.000		-		-		-		49.567.000			
4.01.4.01.06.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan				96.685.500		-		-		-		96.685.500			
4.01.4.01.06.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				102.845.000		-		-		-		102.845.000			
4.01.4.01.06.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				15.151.000		-		-		-		15.151.000			
4.01.4.01.06.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)				43.800.000		-		-		-		43.800.000			
													-			
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	220.632.109	215.141.473		-		-		-		215.141.473			
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-		-			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			-		-		-		-		-			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			-		-		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		803.539.051	-		-		-		-		-			
4.01.4.01.07.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	250.459.281	215.141.473		-		-		-		215.141.473		85.90	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-		-			
4.01.4.01.07.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				179.066.850		-		-		-		179.066.850			
4.01.4.01.07.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				17.773.600		-		-		-		17.773.600			
4.01.4.01.07.01.08.03	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)				18.301.023		-		-		-		18.301.023			
													-			
4.01.4.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			210.708.173		-		-		-		210.708.173		116.19	
4.01.4.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				22.640.910		-		-		-		22.640.910			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				44,400,000		-		-		-		44,400,000			
4.01.4.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				13,320,000		-		-		-		13,320,000			
4.01.4.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				6,415,100		-		-		-		6,415,100			
4.01.4.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5,999,500		-		-		-		5,999,500			
4.01.4.01.07.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				3,671,750		-		-		-		3,671,750			
4.01.4.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1,740,000		-		-		-		1,740,000			
4.01.4.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				12,822,000		-		-		-		12,822,000			
4.01.4.01.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				44,945,913		-		-		-		44,945,913			
4.01.4.01.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				36,000,000		-		-		-		36,000,000			
4.01.4.01.07.01.28	Penyediaan Jasa Publikasi				3,753,000		-		-		-		3,753,000			
4.01.4.01.07.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				15,000,000		-		-		-		15,000,000			
							-		-		-					
4.01.4.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			104,535,426		-		-		-		104,535,426		127.07	
4.01.4.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				11,999,700		-		-		-		11,999,700			
4.01.4.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				86,535,726		-		-		-		86,535,726			
4.01.4.01.07.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				6,000,000		-		-		-		6,000,000			
							-		-		-					
4.01.4.01.07.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi			718,728,026		-		-		-		385,881,238		27.11	
4.01.4.01.07.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa				73,577,900		-		-		-		73,577,900			
4.01.4.01.07.29.30	Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan				72,344,100		-		-		-		72,344,100			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.07.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan				68.338.950		-		-		-		68.338.950			
4.01.4.01.07.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				70.336.200		-		-		-		70.336.200			
4.01.4.01.07.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				52.384.088		-		-		-		52.384.088			
4.01.4.01.07.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)				48.900.000		-		-		-		48.900.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.07.02.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	416.444.690	132.234.938		-		-		-		132.234.938		31.75	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-					
4.01.4.01.07.02.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				132.234.938		-		-		-		132.234.938			
							-		-		-					
4.01.4.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terebutnya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			166.192.562		-		-		-		166.192.562		70.08	
4.01.4.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				23.663.596		-		-		-		23.663.596			
4.01.4.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				30.000.000		-		-		-		30.000.000			
4.01.4.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				5.695.500		-		-		-		5.695.500			
4.01.4.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				7.262.500		-		-		-		7.262.500			
4.01.4.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				2.548.000		-		-		-		2.548.000			
4.01.4.01.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1.999.000		-		-		-		1.999.000			
4.01.4.01.07.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				5.270.000		-		-		-		5.270.000			
4.01.4.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1.800.000		-		-		-		1.800.000			
4.01.4.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				14.877.000		-		-		-		14.877.000			
4.01.4.01.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				7.350.000		-		-		-		7.350.000			

Kelurahan Bangunsari

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDS/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				14.805.000		-		-		-		14.805.000			
4.01.4.01.07.01.27	Pembayaran PBB Tanah Eks Bengkok/ Tanah Kas Desa				17.243.216		-		-		-		17.243.216			
4.01.4.01.07.01.28	Penyediaan Jasa Publikasi				678.750		-		-		-		678.750			
4.01.4.01.07.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				33.000.000		-		-		-		33.000.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			39.871.799		-		-		-		39.871.799		19.82	
4.01.4.01.07.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				26.064.500		-		-		-		26.064.500			
4.01.4.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				5.465.400		-		-		-		5.465.400			
4.01.4.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				4.341.899		-		-		-		4.341.899			
4.01.4.01.07.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				4.000.000		-		-		-		4.000.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.07.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	88%	317.914.620	1.397.667.145		-		-		-		1.397.667.145		221.99	
4.01.4.01.07.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan				172.227.000		-		-		-		172.227.000			
4.01.4.01.07.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan				347.671.179		-		-		-		347.671.179			
4.01.4.01.07.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan				109.764.900		-		-		-		109.764.900			
4.01.4.01.07.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)				475.193.800		-		-		-		475.193.800			
4.01.4.01.07.02.30.42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)				11.237.500		-		-		-		11.237.500			
4.01.4.01.07.02.30.43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)				17.709.000		-		-		-		17.709.000			
4.01.4.01.07.02.30.44	Penyelenggaraan Pemerintahan (COVID 19 - NEW NORMAL)				72.539.216		-		-		-		72.539.216			
4.01.4.01.07.02.30.45	Penyelenggaraan Kemasyarakatan (COVID 19 - NEW NORMAL)				48.035.700		-		-		-		48.035.700			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.07.02.30.47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)				143.288.850		-		-		-		143.288.850			
4.01.4.01.07.03.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	312.677.671	109.984.616		-		-		-		109.984.616		35.18	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-		-			
4.01.4.01.07.03.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				109.774.616		-		-		-		109.774.616			
4.01.4.01.07.03.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				210.000		-		-		-		210.000			
4.01.4.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			180.058.730		-		-		-		180.058.730		74.00	
4.01.4.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				7.909.940		-		-		-		7.909.940			
4.01.4.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				24.000.000		-		-		-		24.000.000			
4.01.4.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				15.326.030		-		-		-		15.326.030			
4.01.4.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				4.559.600		-		-		-		4.559.600			
4.01.4.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1.791.050		-		-		-		1.791.050			
4.01.4.01.07.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				6.325.950		-		-		-		6.325.950			
4.01.4.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1.800.000		-		-		-		1.800.000			
4.01.4.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				9.318.000		-		-		-		9.318.000			
4.01.4.01.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				5.120.000		-		-		-		5.120.000			
4.01.4.01.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				14.175.000		-		-		-		14.175.000			
4.01.4.01.07.01.27	Pembayaran PBB Tanah Eks Bengkulu/ Tanah Kas Desa				17.733.160		-		-		-		17.733.160			
4.01.4.01.07.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				72.000.000		-		-		-		72.000.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			67.735.218		-		-		-		67.735.218		78.96	
4.01.4.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				56.530.400		-		-		-		56.530.400			
4.01.4.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				3.956.568		-		-		-		3.956.568			
4.01.4.01.07.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				7.248.250		-		-		-		7.248.250			
4.01.4.01.07.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	85.50%	123.316.490	1.469.387.690		-		-		-		1.469.387.690		601.68	
4.01.4.01.07.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan				225.407.000		-		-		-		225.407.000			
4.01.4.01.07.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan				408.507.000		-		-		-		408.507.000			
4.01.4.01.07.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan				91.297.700		-		-		-		91.297.700			
4.01.4.01.07.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dasar Tambahan)				342.281.000		-		-		-		342.281.000			
4.01.4.01.07.03.30.43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)				114.511.480		-		-		-		114.511.480			
4.01.4.01.07.03.30.44	Penyelenggaraan Pemerintahan (COVID 19 - NEW NORMAL)				60.437.450		-		-		-		60.437.450			
4.01.4.01.07.03.30.45	Penyelenggaraan Kemasyarakatan (COVID 19 - NEW NORMAL)				14.751.000		-		-		-		14.751.000			
4.01.4.01.07.03.30.46	Penyelenggaraan Pembangunan (COVID 19 - NEW NORMAL)				11.280.000		-		-		-		11.280.000			
4.01.4.01.07.03.30.47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)				200.915.060		-		-		-		200.915.060			
4.01.4.01.08.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	306.824.804	261.990.958		-		-		-		261.990.958		85.39	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-		-			
4.01.4.01.08.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100%	275.503.334	257.334.558		-		-		-		257.334.558			Kecamatan Geger

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Presentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100%				-		-		-		-			
4.01.4.01.08.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	1.726.000	776.400		-		-		-		776.400			
4.01.4.01.08.01.08.03	Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)				3.880.000		-		-		-		3.880.000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	235.475,754		-		-		-		235.475,754		106,05	
4.01.4.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	-	-	24.345,676		-		-		-		24.345,676			
4.01.4.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamananterbayar	-	-	51.000,000		-		-		-		51.000,000			
4.01.4.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	-	-	13.153,500		-		-		-		13.153,500			
4.01.4.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	-	-	9.518,600		-		-		-		9.518,600			
4.01.4.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	-	-	9.748,150		-		-		-		9.748,150			
4.01.4.01.08.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang terpenuhi	-	-	12.634,790		-		-		-		12.634,790			
4.01.4.01.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	-	-	3.480,000		-		-		-		3.480,000			
4.01.4.01.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi	-	-	10.519,700		-		-		-		10.519,700			
4.01.4.01.08.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi	-	-	34.294,338		-		-		-		34.294,338			
4.01.4.01.08.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpenuhi	-	-	44.989,000		-		-		-		44.989,000			
4.01.4.01.08.01.28	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah jasa publikasi kegiatan kantor yang terbayar	-	-	6.792,000		-		-		-		6.792,000			
4.01.4.01.08.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				15.000,000		-		-		-		15.000,000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	175.565,956		-		-		-		175.565,956		174,01	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.08.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan kantor yang tersedia	-	-	14,410,000	-	-	-	-	-	-	14,410,000	-	-	-	
4.01.4.01.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan gedung kantor yang tersedia	-	-	74,114,380	-	-	-	-	-	-	74,114,380	-	-	-	
4.01.4.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan pemeliharaan dinas operasional yang tersedia	-	-	66,980,616	-	-	-	-	-	-	66,980,616	-	-	-	
4.01.4.01.08.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah kebutuhan berkala mebeleur yang tersedia	-	-	9,818,260	-	-	-	-	-	-	9,818,260	-	-	-	
4.01.4.01.08.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	Jumlah kebutuhan kantor pendukung yang tersedia	-	-	10,242,700	-	-	-	-	-	-	10,242,700	-	-	-	
4.01.4.01.08.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	93%	307,843,329	446,159,661	-	-	-	-	-	-	446,159,661	-	-	73.18	
4.01.4.01.08.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa				83,215,500	-	-	-	-	-	-	83,215,500	-	-	-	
4.01.4.01.08.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban				78,951,480	-	-	-	-	-	-	78,951,480	-	-	-	
4.01.4.01.08.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan				143,491,931	-	-	-	-	-	-	143,491,931	-	-	-	
4.01.4.01.08.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				38,796,000	-	-	-	-	-	-	38,796,000	-	-	-	
4.01.4.01.08.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				36,260,500	-	-	-	-	-	-	36,260,500	-	-	-	
4.01.4.01.08.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)				65,444,250	-	-	-	-	-	-	65,444,250	-	-	-	
4.01.4.01.09.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	306,993,869	211,663,641	-	-	-	-	-	-	211,663,641	-	-	68.95	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80			-	-	-	-	-	-		-	-		
4.01.4.01.09.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				211,663,641	-	-	-	-	-	-	211,663,641	-	-	-	
4.01.4.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			243,301,760	-	-	-	-	-	-	243,301,760	-	-	106.75	
4.01.4.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				15,545,428	-	-	-	-	-	-	15,545,428	-	-	-	

Kecamatan Gemarang

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				36.000.000		-		-		-		36.000.000			
4.01.4.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				18.178.000		-		-		-		18.178.000			
4.01.4.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				9.039.000		-		-		-		9.039.000			
4.01.4.01.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5.202.000		-		-		-		5.202.000			
4.01.4.01.09.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				11.199.000		-		-		-		11.199.000			
4.01.4.01.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1.800.000		-		-		-		1.800.000			
4.01.4.01.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				55.830.550		-		-		-		55.830.550			
4.01.4.01.09.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				35.617.782		-		-		-		35.617.782			
4.01.4.01.09.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				39.890.000		-		-		-		39.890.000			
4.01.4.01.09.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				15.000.000		-		-		-		15.000.000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			83.585.990		-		-		-		83.585.990		87.81	
4.01.4.01.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				9.017.000		-		-		-		9.017.000			
4.01.4.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				67.978.990		-		-		-		67.978.990			
4.01.4.01.09.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				6.590.000		-		-		-		6.590.000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.09.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	93%	307.910.256	193.357.000		-		-		-		193.357.000		31.71	
4.01.4.01.09.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa				32.895.000		-		-		-		32.895.000			
4.01.4.01.09.29.30	Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan				56.615.000		-		-		-		56.615.000			
4.01.4.01.09.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan				19.937.000		-		-		-		19.937.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.09.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				7.930.000		-		-		-		7.930.000			
4.01.4.01.09.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				29.535.000		-		-		-		29.535.000			
4.01.4.01.09.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)				46.445.000		-		-		-		46.445.000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.10.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	227.332.565	225.573.877		-		-		-		225.573.877		99.23	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80		-		-		-		-		-			
4.01.4.01.10.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bintek, kursus dan pelatihan	1	301.824.804	225.573.877		-		-		-		225.573.877			
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	14				-		-		-		-			
		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang layak fungsi	68%				-		-		-		-			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	214.766.632		-		-		-		214.766.632		135.64	
4.01.4.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik yang terpenuhi	-	-	23.316.564		-		-		-		23.316.564			
4.01.4.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor yang terbayar	-	-	42.000.000		-		-		-		42.000.000			
4.01.4.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	-	-	12.464.000		-		-		-		12.464.000			
4.01.4.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	-	-	14.669.500		-		-		-		14.669.500			
4.01.4.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	-	-	5.358.230		-		-		-		5.358.230			
4.01.4.01.10.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang tersedia	-	-	4.093.900		-		-		-		4.093.900			
4.01.4.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	-	-	1.800.000		-		-		-		1.800.000			
4.01.4.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat yang tersedia	-	-	15.260.000		-		-		-		15.260.000			
4.01.4.01.10.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	-	-	34.824.438		-		-		-		34.824.438			

Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.10.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terlaksana	-	-	45.980.000	-	-	-	-	-	-	45.980.000	-	-	-	
4.01.4.01.10.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jasa penunjang kinerja SKPD yang terbayar	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	
4.01.4.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	109.836.229	-	-	-	-	-	-	109.836.229	-	-	135.71	
4.01.4.01.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	-	-	5.180.000	-	-	-	-	-	-	5.180.000	-	-	-	
4.01.4.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah servis, suku cadang, BBM dan pajak kendaraan dinas yang tersedia	-	-	80.656.229	-	-	-	-	-	-	80.656.229	-	-	-	
4.01.4.01.10.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	Pemeliharaan alat kantor pendukung yang terlaksana	-	-	24.000.000	-	-	-	-	-	-	24.000.000	-	-	-	
4.01.4.01.10.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	93%	240.442.203	443.335.475	-	-	-	-	-	-	443.335.475	-	-	93.10	
4.01.4.01.10.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksana	3	63.210.928	72.138.500	-	-	-	-	-	-	72.138.500	-	-	-	
		Jumlah rekomendasi APDDes yang terverifikasi sesuai dengan peraturan	14			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
4.01.4.01.10.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteraturan	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman Dan Keteraturan Yang Dilaksanakan	3	92.981.663	102.941.225	-	-	-	-	-	-	102.941.225	-	-	-	
4.01.4.01.10.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksana	3	59.021.078	85.770.750	-	-	-	-	-	-	85.770.750	-	-	-	
4.01.4.01.10.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	3	53.295.628	65.284.000	-	-	-	-	-	-	65.284.000	-	-	-	
4.01.4.01.10.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang terlaksana	3	39.334.031	48.465.500	-	-	-	-	-	-	48.465.500	-	-	-	
4.01.4.01.10.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteraturan (Pajak Rokok)				68.735.500	-	-	-	-	-	-	68.735.500	-	-	-	
4.01.4.01.11.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	285.201.649	239.052.955	-	-	-	-	-	-	239.052.955	-	-	83.82	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80			-	-	-	-	-	-		-	-		Kecamatan Kebonsari
4.01.4.01.11.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi		306.993.869	239.052.955	-	-	-	-	-	-	239.052.955	-	-		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhi nya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	242,614,227	-	-	-	-	-	-	-	242,614,227	-	110.09	
4.01.4.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	-	-	23,195,317	-	-	-	-	-	-	-	23,195,317	-		
4.01.4.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamanan terbayar	-	-	48,000,000	-	-	-	-	-	-	-	48,000,000	-		
4.01.4.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedian ya kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	-	-	25,371,270	-	-	-	-	-	-	-	25,371,270	-		
4.01.4.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedian ya kebutuha n barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	-	-	12,815,900	-	-	-	-	-	-	-	12,815,900	-		
4.01.4.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedian ya kebutuha n kompone n instalasi listrik/pe nerangan banguna n kantor yang terpenuhi	-	-	2,835,350	-	-	-	-	-	-	-	2,835,350	-		
4.01.4.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedian ya kebutuha n peralatan rumah tangga dan bahan pembersi h yang terpenuhi	-	-	2,981,200	-	-	-	-	-	-	-	2,981,200	-		
4.01.4.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedian ya kebutuha n bahan bacaan dan peraturan perundan gundanga n yang terpenuhi	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000	-		
4.01.4.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedian ya kebutuha n makanan dan minuman rapat yang terpenuhi	-	-	35,141,040	-	-	-	-	-	-	-	35,141,040	-		
4.01.4.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksan any Rapatrapat koordinas i dan konsultas i keluar daerah yang terpenuhi	-	-	34,974,150	-	-	-	-	-	-	-	34,974,150	-		
4.01.4.01.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksan any Rapatrapat koordinas i dan konsultas i dalam daerah yang terpenuhi	-	-	55,500,000	-	-	-	-	-	-	-	55,500,000	-		
4.01.4.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	71,654,496	-	-	-	-	-	-	-	71,654,496	-	89.79	
4.01.4.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di perbaharui	-	-	5,610,855	-	-	-	-	-	-	-	5,610,855	-		
4.01.4.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan Operasional kendaraan dinas yang terpenuhi	-	-	60,340,091	-	-	-	-	-	-	-	60,340,091	-		
4.01.4.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	Jumlah alat kantor pendukung yang terpelihara	-	-	5,703,550	-	-	-	-	-	-	-	5,703,550	-		
4.01.4.01.01.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	75%	305,338,020	344,722,510	-	-	-	-	-	-	-	344,722,510	-	57.01	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.11.29.16	Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		-	-	36,364,450		-		-		-		36,364,450			
4.01.4.01.11.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Prosentase penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	93,254,078	79,009,860		-		-		-		79,009,860			
4.01.4.01.11.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang terlaksana	100%	71,682,427	74,042,910		-		-		-		74,042,910			
4.01.4.01.11.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	prosentase penyelenggaraan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang terlaksana	100%	38,699,290	40,198,200		-		-		-		40,198,200			
4.01.4.01.11.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Prosentase penyelenggaraan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100%	73,905,866	75,047,090		-		-		-		75,047,090			
4.01.4.01.11.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)		-	-	40,060,000		-		-		-		40,060,000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.12.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	255,584,106	#VALUE!		-		-		-		#VALUE!		#VALUE!	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-		-			
4.01.4.01.12.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				148,127,079		-		-		-		148,127,079			
4.01.4.01.12.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				583,000		-		-		-		583,000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhiya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			141,282,509		-		-		-		141,282,509		76.88	Kecamatan Kare
4.01.4.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	21,654,108	8,034,489		-		-		-		8,034,489			
4.01.4.01.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	100%	50,400,000	36,844,000		-		-		-		36,844,000			
4.01.4.01.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	prosentase alat tulis kantor yang terpenuhi	100%	10,009,493	18,370,600		-		-		-		18,370,600			
4.01.4.01.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Presentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	7,742,280	7,047,600		-		-		-		7,047,600			
4.01.4.01.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase bahan bacaan dan perundang-undangan yang terpenuhi	100%	1,890,000	2,100,000		-		-		-		2,100,000			
4.01.4.01.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase makanan dan minuman harian dan rapat yang terpenuhi	100%	10,734,255	20,855,000		-		-		-		20,855,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi	100%	21.000.000	31.995.820	-	-	-	-	-	-	31.995.820				Kecamatan Madiun
4.01.4.01.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Prosentase Rapat-rapat dan konsultasi kedalam daerah yang terpenuhi	100%	37.800.000	16.035.000	-	-	-	-	-	-	16.035.000				
4.01.4.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			69.761.925							69.761.925		81.83		
4.01.4.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terpenuhi	100%	10.500.000	3.552.500	-	-	-	-	-	-	3.552.500				
4.01.4.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	91.489.440	63.100.475	-	-	-	-	-	-	63.100.475				
4.01.4.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	Prosentase Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor pendukung (Komputer, printer, AC dan mesin tik) yang terpenuhi	100%	9.450.000	3.108.950	-	-	-	-	-	-	3.108.950				
4.01.4.01.02.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		766.010.820	289.552.535							289.552.535		19.09		
4.01.4.01.02.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tata pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	64.987.125	69.155.715	-	-	-	-	-	-	69.155.715				
4.01.4.01.02.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan	Prosentase Penyelenggaraan ketentraman dan keterlibatan yang dilaksanakan	100%	91.805.280	84.899.780	-	-	-	-	-	-	84.899.780				
4.01.4.01.02.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Penyelenggaraan Prosentase pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksana	100%	54.324.113	55.348.940	-	-	-	-	-	-	55.348.940				
4.01.4.01.02.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksana	100%	54.820.500	24.778.800	-	-	-	-	-	-	24.778.800				
4.01.4.01.02.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksana	100%	38.382.340	9.560.000	-	-	-	-	-	-	9.560.000				
4.01.4.01.02.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan (Pajak Rokok)				45.809.300	-	-	-	-	-	-	45.809.300				
4.01.4.01.03.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	229.100.065	221.557.672							221.557.672		96.71		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80													
4.01.4.01.03.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				221.557.672	-	-	-	-	-	-	221.557.672				
						-	-	-	-	-	-	-				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			257,389,137								257,389,137			
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	21,654,108	59,458,197								59,458,197			151.77
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	100%	50,400,000	36,000,000								36,000,000			
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	prosentase alat tulis kantor yang terpenuhi	100%	10,009,493	26,275,650								26,275,650			
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Presentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	7,742,280	8,402,490								8,402,490			
4.01.4.01.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase Penyediaan peralatan rumah tangga yang terpenuhi	100%	4,005,698	10,861,400								10,861,400			
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase bahan bacaan dan perundang-undangan yang terpenuhi	100%	1,890,000	1,735,500								1,735,500			
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase makanan dan minuman harian dan rapat yang terpenuhi	100%	10,734,255	28,475,700								28,475,700			
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi	100%	21,000,000	24,980,200								24,980,200			
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Prosentase Rapat-rapat dan konsultasi kedalam daerah yang terpenuhi	100%	37,800,000	18,000,000								18,000,000			
4.01.4.01.03.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Prosentase Jasa publikasi yang terpenuhi	100%	2,985,150	43,200,000								43,200,000			
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			76,062,203								76,062,203			106.32
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terpenuhi	100%	10,500,000	16,027,000								16,027,000			
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	91,489,440	50,854,203								50,854,203			
4.01.4.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	Prosentase Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor pendukung (Komputer, printer, AC dan mesin tik) yang terpenuhi	100%	9,450,000	9,181,000								9,181,000			
4.01.4.01.03.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	93%	390,581,664	442,696,670								442,696,670			57.23
4.01.4.01.03.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tata pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	64,987,125	82,309,000								82,309,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.13.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterbiban	Prosentase Penyelenggaraan ketentraman dan keterbiban yang dilaksanakan	100%	91.805.280	86.633.350	-	-	-	-	-	-	86.633.350	-	-	-	
4.01.4.01.13.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Penyelenggaraan Prosentase pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksana	100%	54.324.113	97.238.900	-	-	-	-	-	-	97.238.900	-	-	-	
4.01.4.01.13.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksana	100%	54.820.500	22.831.500	-	-	-	-	-	-	22.831.500	-	-	-	
4.01.4.01.13.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksana	100%	38.382.340	58.163.250	-	-	-	-	-	-	58.163.250	-	-	-	
4.01.4.01.13.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterbiban (Pajak Rokok)				66.274.100	-	-	-	-	-	-	66.274.100	-	-	-	
4.01.4.01.13.01.29.34	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)				29.246.570	-	-	-	-	-	-	29.246.570	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.13.02.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	218.574.894	78.525.399	-	-	-	-	-	-	78.525.399	-	-	35.93	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.13.02.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				78.525.399	-	-	-	-	-	-	78.525.399	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			205.104.306	-	-	-	-	-	-	205.104.306	-	-	110.09	
4.01.4.01.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	21.654.108	11.996.009	-	-	-	-	-	-	11.996.009	-	-	-	
4.01.4.01.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		100%	50.400.000	28.000.000	-	-	-	-	-	-	28.000.000	-	-	-	
4.01.4.01.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		100%	10.009.493	13.916.000	-	-	-	-	-	-	13.916.000	-	-	-	
4.01.4.01.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100%	7.742.280	4.499.600	-	-	-	-	-	-	4.499.600	-	-	-	
4.01.4.01.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	4.005.698	11.000.000	-	-	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	
4.01.4.01.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100%	1.890.000	480.000	-	-	-	-	-	-	480.000	-	-	-	
4.01.4.01.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		100%	10.734.255	26.314.500	-	-	-	-	-	-	26.314.500	-	-	-	

Kelurahan Nglames

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100%	21.000.000	13.233.317		-		-		-		13.233.317			
4.01.4.01.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		100%	37.800.000	9.670.000		-		-		-		9.670.000			
4.01.4.01.13.01.27	Pembayaran PBB Tanah Eks Bengkok/ Tanah Kas Desa				6.794.880		-		-		-		6.794.880			
4.01.4.01.13.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD		100%	15.750.000	79.200.000		-		-		-		79.200.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			142.456.400		-		-		-		142.456.400		325.57	
4.01.4.01.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				81.802.400		-		-		-		81.802.400			
4.01.4.01.13.02.10	Pengadaan mebeleur				12.750.000		-		-		-		12.750.000			
4.01.4.01.13.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				23.000.000		-		-		-		23.000.000			
4.01.4.01.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				19.984.000		-		-		-		19.984.000			
4.01.4.01.13.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				4.920.000		-		-		-		4.920.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.13.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		805.742.946	1.537.140.285		-		-		-		1.537.140.285		96.33	
4.01.4.01.13.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan				104.075.000		-		-		-		104.075.000			
4.01.4.01.13.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan				538.351.375		-		-		-		538.351.375			
4.01.4.01.13.30.40	Penyelenggaraan Kemasayarakatan				84.033.000		-		-		-		84.033.000			
4.01.4.01.13.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)				343.831.500		-		-		-		343.831.500			
4.01.4.01.13.30.42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)				25.345.000		-		-		-		25.345.000			
4.01.4.01.13.02.30.43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NDRMAL)				114.009.930		-		-		-		114.009.930			
4.01.4.01.13.02.30.45	Penyelenggaraan Kemasayarakatan (COVID 19- NEW NORMAL)				51.392.000		-		-		-		51.392.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12	
4.01.4.01.13.02.30.47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)				276.102.480		-		-		-		276.102.480				
4.01.4.01.14.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	154,821,401	188,210,739		-		-		-		188,210,739				
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-				121.57		
4.01.4.01.14.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 kegiatan	198.741,021	188.210,739		-		-		-		188.210,739				
4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	150,707,402		-		-		-		150,707,402				96.64
4.01.4.01.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik yang terpenuhi	-	-	23.382.002		-		-		-		23.382.002				
4.01.4.01.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor yang terbayar	-	-	39.600.000		-		-		-		39.600.000				
4.01.4.01.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	-	-	24.404.600		-		-		-		24.404.600				
4.01.4.01.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	-	-	4.366.000		-		-		-		4.366.000				
4.01.4.01.14.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang tersedia	-	-	4.489.400		-		-		-		4.489.400				
4.01.4.01.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	-	-	3.000.000		-		-		-		3.000.000				
4.01.4.01.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat yang tersedia	-	-	14.795.400		-		-		-		14.795.400				
4.01.4.01.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	-	-	19.035.000		-		-		-		19.035.000				
4.01.4.01.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terlaksana	-	-	17.635.000		-		-		-		17.635.000				
4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	65,858,590		-		-		-		65,858,590				939.76
4.01.4.01.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	-	-	3.222.900		-		-		-		3.222.900				
4.01.4.01.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah servis, suku cadang, BBM dan pajak kendaraan dinas yang tersedia	-	-	51.227.690		-		-		-		51.227.690				

Kecamatan Mejayan

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.14.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	Pemeliharaan alat kantor pendukung yang terlaksana	-	-	11.408.000	-	-	-	-	-	-	11.408.000	-	-		
4.01.4.01.14.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	100%	874,187,328	565,661,820	-	-	-	-	-	-	565,661,820	-	32.67		
4.01.4.01.14.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang terlaksanakan	-	-	92.664.754	-	-	-	-	-	-	92.664.754	-	-		
4.01.4.01.14.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang terlaksanakan	-	-	135.756.100	-	-	-	-	-	-	135.756.100	-	-		
4.01.4.01.14.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	-	-	134.639.336	-	-	-	-	-	-	134.639.336	-	-		
4.01.4.01.14.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terlaksanakan	-	-	106.588.612	-	-	-	-	-	-	106.588.612	-	-		
4.01.4.01.14.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang terlaksanakan	-	-	27.513.218	-	-	-	-	-	-	27.513.218	-	-		
4.01.4.01.14.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)	-	-	68.499.800	-	-	-	-	-	-	68.499.800	-	-		
4.01.4.01.14.02.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	157,947,612	130,325,248	-	-	-	-	-	-	130,325,248	-	82.51		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80			-	-	-	-	-	-		-			
4.01.4.01.14.02.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				130.325.248	-	-	-	-	-	-	130.325.248	-	-		
4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			193,529,950	-	-	-	-	-	-	193,529,950	-	126.76		
4.01.4.01.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				11.473.010	-	-	-	-	-	-	11.473.010	-	-		
4.01.4.01.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-		
4.01.4.01.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				17.277.300	-	-	-	-	-	-	17.277.300	-	-		
4.01.4.01.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				341.000	-	-	-	-	-	-	341.000	-	-		
4.01.4.01.14.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				10.089.640	-	-	-	-	-	-	10.089.640	-	-		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1,800,000		-		-		-		1,800,000			
4.01.4.01.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				38,579,000		-		-		-		38,579,000			
4.01.4.01.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				11,970,000		-		-		-		11,970,000			
4.01.4.01.14.01.21	Peningkatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat				72,000,000		-		-		-		72,000,000			
							-		-		-					
4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			51,364,294		-		-		-		51,364,294		378.45	
4.01.4.01.14.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				6,365,000		-		-		-		6,365,000			
4.01.4.01.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				32,869,000		-		-		-		32,869,000			
4.01.4.01.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				6,130,294		-		-		-		6,130,294			
4.01.4.01.14.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				6,000,000		-		-		-		6,000,000			
							-		-		-					
4.01.4.01.14.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	100%	870,831,100	1,513,168,643		-		-		-		1,513,168,643		87.74	
4.01.4.01.14.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan				88,273,000		-		-		-		88,273,000			
4.01.4.01.14.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan				499,996,043		-		-		-		499,996,043			
4.01.4.01.14.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan				100,399,200		-		-		-		100,399,200			
4.01.4.01.14.30.40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)				626,155,400		-		-		-		626,155,400			
4.01.4.01.14.02.30.42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)				5,810,000		-		-		-		5,810,000			
4.01.4.01.14.02.30.43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)				110,004,500		-		-		-		110,004,500			
4.01.4.01.14.02.30.47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)				82,530,500		-		-		-		82,530,500			
							-		-		-					

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.14.03.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	357,865,144	122,813,611		-		-		-		122,813,611		34.32	Kelurahan Krajan
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-		-			
4.01.4.01.14.03.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				122,813,611		-		-		-		122,813,611			
4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			161,758,396		-		-		-		161,758,396		72.69	
4.01.4.01.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				6,623,846		-		-		-		6,623,846			
4.01.4.01.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				36,000,000		-		-		-		36,000,000			
4.01.4.01.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				22,271,400		-		-		-		22,271,400			
4.01.4.01.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				3,284,350		-		-		-		3,284,350			
4.01.4.01.14.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				8,678,800		-		-		-		8,678,800			
4.01.4.01.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1,800,000		-		-		-		1,800,000			
4.01.4.01.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				19,005,000		-		-		-		19,005,000			
4.01.4.01.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				6,350,000		-		-		-		6,350,000			
4.01.4.01.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				4,695,000		-		-		-		4,695,000			
4.01.4.01.14.01.21	Peningkatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat				53,050,000		-		-		-		53,050,000			
4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			7,005,000		-		-		-		7,005,000		4.55	
4.01.4.01.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				-		-		-		-		-			
4.01.4.01.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				2,255,000		-		-		-		2,255,000			
4.01.4.01.14.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				4,750,000		-		-		-		4,750,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDS/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDTahun n-1) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.0114.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	93%	355.208.834	1.536.010.050	-	-	-	-	-	-	1.536.010.050	-	218.35		
4.01.4.0114.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan				175.447.000	-	-	-	-	-	-	175.447.000	-			
4.01.4.0114.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan				406.405.800	-	-	-	-	-	-	406.405.800	-			
4.01.4.0114.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan				200.312.650	-	-	-	-	-	-	200.312.650	-			
4.01.4.0114.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)				446.484.600	-	-	-	-	-	-	446.484.600	-			
4.01.4.0114.03.30.42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)				4.993.200	-	-	-	-	-	-	4.993.200	-			
4.01.4.0114.03.30.43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)				32.753.600	-	-	-	-	-	-	32.753.600	-			
4.01.4.0114.03.30.47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)				269.613.200	-	-	-	-	-	-	269.613.200	-			
4.01.4.0114.04.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	341.158.592	309.531.994	-	-	-	-	-	-	309.531.994	-	90.73		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80			-	-	-	-	-	-	-	-			
4.01.4.0114.04.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				309.531.994	-	-	-	-	-	-	309.531.994	-			
4.01.4.0114.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			152.228.480	-	-	-	-	-	-	152.228.480	-	64.39		Kelurahan Pandean
4.01.4.0114.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				7.983.480	-	-	-	-	-	-	7.983.480	-			
4.01.4.0114.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				18.000.000	-	-	-	-	-	-	18.000.000	-			
4.01.4.0114.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-			
4.01.4.0114.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-			
4.01.4.0114.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				6.900.000	-	-	-	-	-	-	6.900.000	-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1,800,000		-		-		-		1,800,000			
4.01.4.01.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				25,380,000		-		-		-		25,380,000			
4.01.4.01.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				5,250,000		-		-		-		5,250,000			
4.01.4.01.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				3,465,000		-		-		-		3,465,000			
4.01.4.01.14.01.21	Peningkatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat				64,450,000		-		-		-		64,450,000			
							-		-		-					
4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			10,191,459		-		-		-		10,191,459		8.31	
4.01.4.01.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				-		-		-		-		-			
4.01.4.01.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				4,191,459		-		-		-		4,191,459			
4.01.4.01.14.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				6,000,000		-		-		-		6,000,000			
							-		-		-					
4.01.4.01.14.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	93%	242,849,964	1,516,854,356		-		-		-		1,516,854,356		315.39	
4.01.4.01.14.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan				123,765,000		-		-		-		123,765,000			
4.01.4.01.14.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan				549,303,900		-		-		-		549,303,900			
4.01.4.01.14.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan				86,750,000		-		-		-		86,750,000			
4.01.4.01.14.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)				683,060,206		-		-		-		683,060,206			
4.01.4.01.14.04.30.42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)				37,975,250		-		-		-		37,975,250			
4.01.4.01.14.04.30.43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)				36,000,000		-		-		-		36,000,000			
							-		-		-					
4.01.4.01.15.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	222,532,804	251,776,984		-		-		-		251,776,984		113.14	Kecamatan Pilangkenceng

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-		-			
4.01.4.01.15.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 kegiatan	265,120,622	249,959,984		-		-		-		249,959,984			
4.01.4.01.15.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturanyang berlaku	13 Documen	1,849,500	1,817,000		-		-		-		1,817,000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			208,760,913		-		-		-		208,760,913		130.77	
4.01.4.01.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik yang terpenuhi			24,612,413		-		-		-		24,612,413			
4.01.4.01.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor yang terbayar			36,000,000		-		-		-		36,000,000			
4.01.4.01.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia			19,180,000		-		-		-		19,180,000			
4.01.4.01.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			9,230,000		-		-		-		9,230,000			
4.01.4.01.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia			2,891,500		-		-		-		2,891,500			
4.01.4.01.15.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang tersedia			5,420,000		-		-		-		5,420,000			
4.01.4.01.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia			1,798,000		-		-		-		1,798,000			
4.01.4.01.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat yang tersedia			26,676,000		-		-		-		26,676,000			
4.01.4.01.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana			27,938,000		-		-		-		27,938,000			
4.01.4.01.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terlaksana			24,565,000		-		-		-		24,565,000			
4.01.4.01.15.01.28	Penyediaan Jasa Publikasi	Jasa publikasi yang terbayarkan			450,000		-		-		-		450,000			
4.01.4.01.15.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jasa penunjang kinerja SKPD yang terbayar			30,000,000		-		-		-		30,000,000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			124,153,821		-		-		-		124,153,821		166.47	
4.01.4.01.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana			72,900,000		-		-		-		72,900,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah servis, suku cadang, BBM dan pajak kendaraan dinas yang tersedia			39.353.821		-		-		-		39.353.821			
4.01.4.01.15.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	Pemeliharaan alat kantor pendukung yang terlaksana			11.900.000		-		-		-		11.900.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.15.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	100%	424.093.713	509.391.000		-		-		-		509.391.000		60.65	
4.01.4.01.15.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksanakan			104.765.000		-		-		-		104.765.000			
4.01.4.01.15.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan			100.220.000		-		-		-		100.220.000			
4.01.4.01.15.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksanakan			91.845.000		-		-		-		91.845.000			
4.01.4.01.15.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terlaksanakan			78.611.500		-		-		-		78.611.500			
4.01.4.01.15.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang terlaksanakan			65.139.500		-		-		-		65.139.500			
4.01.4.01.15.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)				68.810.000		-		-		-		68.810.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.16.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	355.782.567	209.898.387		-		-		-		209.898.387		59.00	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-					
4.01.4.01.16.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				209.030.387		-		-		-		209.030.387			
4.01.4.01.16.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				868.000		-		-		-		868.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			259.123.489		-		-		-		259.123.489		133.24	
4.01.4.01.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				21.315.751		-		-		-		21.315.751			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				48.000.000		-		-		-		48.000.000			
4.01.4.01.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				19.774.500		-		-		-		19.774.500			
4.01.4.01.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				6.265.500		-		-		-		6.265.500			
4.01.4.01.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				7.796.000		-		-		-		7.796.000			
4.01.4.01.16.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				4.700.000		-		-		-		4.700.000			
4.01.4.01.16.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3.600.000		-		-		-		3.600.000			
4.01.4.01.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				20.325.500		-		-		-		20.325.500			
4.01.4.01.16.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				39.936.238		-		-		-		39.936.238			
4.01.4.01.16.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				54.910.000		-		-		-		54.910.000			
4.01.4.01.16.01.22	Penyediaan Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				30.000.000		-		-		-		30.000.000			
4.01.4.01.16.01.28	Penyediaan Jasa Publikasi				2.500.000		-		-		-		2.500.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			79.312.697		-		-		-		79.312.697		44.07	
4.01.4.01.16.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				-		-		-		-		-			
4.01.4.01.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				5.580.000		-		-		-		5.580.000			
4.01.4.01.16.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				67.890.697		-		-		-		67.890.697			
4.01.4.01.16.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				5.842.000		-		-		-		5.842.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.16.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	93%	255,646,680	351,587,450		-		-		-		351,587,450		69.45	
4.01.4.01.16.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa				80.055.500		-		-		-		80.055.500			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12	
4.01.4.01.16.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban				97.699.000		-		-		-		97.699.000				
4.01.4.01.16.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan				63.582.850		-		-		-		63.582.850				
4.01.4.01.16.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				45.532.600		-		-		-		45.532.600				
4.01.4.01.16.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				32.682.500		-		-		-		32.682.500				
4.01.4.01.16.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)				32.035.000		-		-		-		32.035.000				
							-		-		-						
4.01.4.01.17.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	212.743,430	265.200,593		-		-		-		265.200,593		124,66		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-						
4.01.4.01.17.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawainan, dan sarana prasarana				265.200.593		-		-		-		265.200.593				
							-		-		-						
4.01.4.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			201.863,895		-		-		-		201.863,895		112,46		
4.01.4.01.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				17.497.295		-		-		-		17.497.295				
4.01.4.01.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				43.534.000		-		-		-		43.534.000				
4.01.4.01.17.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				29.324.500		-		-		-		29.324.500				
4.01.4.01.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				13.352.000		-		-		-		13.352.000				
4.01.4.01.17.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1.800.000		-		-		-		1.800.000				
4.01.4.01.17.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				26.088.000		-		-		-		26.088.000				
4.01.4.01.17.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				24.998.100		-		-		-		24.998.100				
4.01.4.01.17.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				30.270.000		-		-		-		30.270.000				
4.01.4.01.17.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				15.000.000		-		-		-		15.000.000				

Kecamatan Saradan

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.0117.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			72.291,523		-		-		-		72.291,523		162.76	
4.01.4.0117.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				10.748.400		-		-		-		10.748.400			
4.01.4.0117.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				51.525.123		-		-		-		51.525.123			
4.01.4.0117.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				10.018.000		-		-		-		10.018.000			
4.01.4.0117.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		947,163,534	597,127,850		-		-		-		597,127,850		31.83	
4.01.4.0117.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa				151,125.000		-		-		-		151,125.000			
4.01.4.0117.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban				96,402.600		-		-		-		96,402.600			
4.01.4.0117.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan				126,924.000		-		-		-		126,924.000			
4.01.4.0117.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				81,082.500		-		-		-		81,082.500			
4.01.4.0117.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				106,158.750		-		-		-		106,158.750			
4.01.4.0117.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)				35,435.000		-		-		-		35,435.000			
4.01.4.0118.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	317,820,829	270,305,515		-		-		-		270,305,515		85.05	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-					
4.01.4.0118.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			270,305,515		-		-		-		270,305,515			
		Presentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi					-		-		-					
4.01.4.0118.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			202,248,091		-		-		-		202,248,091		78.40	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	22.041.525	18.120.848		-		-		-		18.120.848			
4.01.4.01.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamananterbayar	4 Orang	37.800.000	36.000.000		-		-		-		36.000.000			
4.01.4.01.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	55 jenis	40.386.445	30.049.250		-		-		-		30.049.250			
4.01.4.01.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1 tahun	9.597.610	8.721.640		-		-		-		8.721.640			
4.01.4.01.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1 tahun	8.316.000	7.560.000		-		-		-		7.560.000			
4.01.4.01.18.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang terpenuhi	1 tahun	6.349.536	5.772.305		-		-		-		5.772.305			
4.01.4.01.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1 tahun	1.980.000	1.780.000		-		-		-		1.780.000			
4.01.4.01.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi			15.991.500		-		-		-		15.991.500			
4.01.4.01.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi			34.794.548		-		-		-		34.794.548			
4.01.4.01.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpenuhi	1 tahun	31.377.500	28.458.000		-		-		-		28.458.000			
4.01.4.01.18.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				15.000.000		-		-		-		15.000.000			
							-		-		-					
4.01.4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			193.651.047		-		-		-		193.651.047		253.01	
4.01.4.01.18.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				6.520.000		-		-		-		6.520.000			
4.01.4.01.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				57.538.947		-		-		-		57.538.947			
4.01.4.01.18.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				12.250.000		-		-		-		12.250.000			
4.01.4.01.18.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				117.342.100		-		-		-		117.342.100			
							-		-		-					
4.01.4.01.18.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		699.190.661	321.932.000		-		-		-		321.932.000		23.25	
4.01.4.01.18.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa				86.744.000		-		-		-		86.744.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.18.29.30	Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan				57,015,000		-		-		-		57,015,000			
4.01.4.01.18.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan				95,040,000		-		-		-		95,040,000			
4.01.4.01.18.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				15,840,000		-		-		-		15,840,000			
4.01.4.01.18.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				6,897,000		-		-		-		6,897,000			
4.01.4.01.18.29.34	Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan (Pajak Rokok)				60,396,000		-		-		-		60,396,000			
							-		-		-					
4.01.4.01.18.02.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	317,820,829	249,125,927		-		-		-		249,125,927		78.39	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-					
4.01.4.01.18.02.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				231,375,927		-		-		-		231,375,927			
4.01.4.01.18.02.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				17,750,000		-		-		-		17,750,000			
							-		-		-					
4.01.4.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran			214,576,672		-		-		-		214,576,672			
4.01.4.01.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				10,853,789		-		-		-		10,853,789			
4.01.4.01.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				17,157,000		-		-		-		17,157,000			
4.01.4.01.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				9,198,906		-		-		-		9,198,906			
4.01.4.01.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				2,000,000		-		-		-		2,000,000			
4.01.4.01.18.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				8,506,000		-		-		-		8,506,000			
4.01.4.01.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1,800,000		-		-		-		1,800,000			
4.01.4.01.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				20,587,750		-		-		-		20,587,750			
4.01.4.01.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				14,979,758		-		-		-		14,979,758			

Kelurahan Wungu

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				21,095,000		-		-		-		21,095,000			
4.01.4.01.18.01.27	Pembayaran PBB Tanah Eks Bengkok/ Tanah Kas Desa				11,198,469		-		-		-		11,198,469			
4.01.4.01.18.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				97,200,000		-		-		-		97,200,000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				15,675,000		-		-		-		15,675,000			
4.01.4.01.18.06.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15,675,000		-		-		-		15,675,000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			52,317,634		-		-		-		52,317,634		68.35	
4.01.4.01.18.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				3,247,000		-		-		-		3,247,000			
4.01.4.01.18.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				34,677,000		-		-		-		34,677,000			
4.01.4.01.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				7,020,634		-		-		-		7,020,634			
4.01.4.01.18.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				7,373,000		-		-		-		7,373,000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.18.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi		699,190,661	1,485,026,426		-		-		-		1,485,026,426		107.25	
4.01.4.01.18.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan				121,513,500		-		-		-		121,513,500			
4.01.4.01.18.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan				411,619,382		-		-		-		411,619,382			
4.01.4.01.18.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan				130,665,800		-		-		-		130,665,800			
4.01.4.01.18.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)				605,251,060		-		-		-		605,251,060			
4.01.4.01.18.02.30.42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dau Tambahan)				7,089,250		-		-		-		7,089,250			
4.01.4.01.18.02.30.43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)				39,164,434		-		-		-		39,164,434			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.18.02.30.44	Penyelenggaraan Pemerintahan (COVID 19 - NEW NORMAL)				55,240,000		-		-		-		55,240,000			
4.01.4.01.18.02.30.46	Penyelenggaraan Pembangunan (COVID 19 - NEW NORMAL)				900,000		-		-		-		900,000			
4.01.4.01.18.02.30.47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)				113,583,000		-		-		-		113,583,000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.18.03.08	Program Pelayanan Kesekretariatan				185,746,416		-		-		-		185,746,416		-	Kelurahan Munggut
4.01.4.01.18.03.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana				175,956,416		-		-		-		175,956,416			
4.01.4.01.18.03.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran				9,790,000		-		-		-		9,790,000			
							-		-		-		-			
4.01.4.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				242,825,246		-		-		-		242,825,246		-	
4.01.4.01.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				11,336,192		-		-		-		11,336,192			
4.01.4.01.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				21,787,340		-		-		-		21,787,340			
4.01.4.01.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				5,986,200		-		-		-		5,986,200			
4.01.4.01.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3,729,000		-		-		-		3,729,000			
4.01.4.01.18.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				9,523,820		-		-		-		9,523,820			
4.01.4.01.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1,380,000		-		-		-		1,380,000			
4.01.4.01.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				35,496,360		-		-		-		35,496,360			
4.01.4.01.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				10,315,000		-		-		-		10,315,000			
4.01.4.01.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				12,500,000		-		-		-		12,500,000			
4.01.4.01.18.01.27	Pembayaran PBB Tanah Eks Bengkulu/ Tanah Kas Desa				3,971,334		-		-		-		3,971,334			
4.01.4.01.18.01.29	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD				126,800,000		-		-		-		126,800,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				116,029,609		-		-		-		116,029,609		-	
4.01.4.01.18.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor				32,912,000		-		-		-		32,912,000			
4.01.4.01.18.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				56,170,100		-		-		-		56,170,100			
4.01.4.01.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				4,131,609		-		-		-		4,131,609			
4.01.4.01.18.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				21,201,900		-		-		-		21,201,900			
4.01.4.01.18.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)				1,614,000		-		-		-		1,614,000			
							-		-		-					
4.01.4.01.18.30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan				1,189,169,125		-		-		-		1,189,169,125		-	
4.01.4.01.18.30.38	Penyelenggaraan Pemerintahan				97,905,500		-		-		-		97,905,500			
4.01.4.01.18.30.39	Penyelenggaraan Pembangunan				295,874,025		-		-		-		295,874,025			
4.01.4.01.18.30.40	Penyelenggaraan Kemasyarakatan				68,481,100		-		-		-		68,481,100			
4.01.4.01.18.30.41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)				442,455,600		-		-		-		442,455,600			
4.01.4.01.18.03.30.43	Operasional Kesekretariatan (COVID 19 - NEW NORMAL)				12,000,000		-		-		-		12,000,000			
4.01.4.01.18.03.30.47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (COVID 19 - NEW NORMAL)				272,452,900		-		-		-		272,452,900			
							-		-		-					
4.01.4.01.19.01.08	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	249,050,787	185,248,690		-		-		-		185,248,690		74.38	Kecamatan Wonoasri
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	80				-		-		-					
4.01.4.01.19.01.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	10 Kegiatan	175,799,727	183,748,690		-		-		-		183,748,690			
		Presentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	68%	68,251,060			-		-		-					

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.19.01.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	13 dokumen	5.000.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	
4.01.4.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasi perkantoran	-	-	181,328,760	-	-	-	-	-	-	181,328,760	-	-	100.66	
4.01.4.01.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	-	-	21,093,650	-	-	-	-	-	-	21,093,650	-	-		
4.01.4.01.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamananterbayar	-	-	66,000,000	-	-	-	-	-	-	66,000,000	-	-		
4.01.4.01.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	-	-	15,636,850	-	-	-	-	-	-	15,636,850	-	-		
4.01.4.01.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	-	-	4,508,000	-	-	-	-	-	-	4,508,000	-	-		
4.01.4.01.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	-	-	3,304,000	-	-	-	-	-	-	3,304,000	-	-		
4.01.4.01.19.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang terpenuhi	-	-	2,397,000	-	-	-	-	-	-	2,397,000	-	-		
4.01.4.01.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	-	-	3,180,000	-	-	-	-	-	-	3,180,000	-	-		
4.01.4.01.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi	-	-	14,426,500	-	-	-	-	-	-	14,426,500	-	-		
4.01.4.01.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi	-	-	31,896,760	-	-	-	-	-	-	31,896,760	-	-		
4.01.4.01.19.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpenuhi	-	-	18,886,000	-	-	-	-	-	-	18,886,000	-	-		
4.01.4.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	73,703,886	-	-	-	-	-	-	73,703,886	-	-	107.99	
4.01.4.01.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan	-	-	9,482,000	-	-	-	-	-	-	9,482,000	-	-		
4.01.4.01.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah service, suku cadang, BBM dan pajak kendaraan yang tersedia	-	-	61,648,886	-	-	-	-	-	-	61,648,886	-	-		
4.01.4.01.19.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)	Jumlah pemeliharaan komputer, printer, AC yang dilaksanakan	-	-	2,573,000	-	-	-	-	-	-	2,573,000	-	-		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.01.4.01.19.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	13,134,000		-		-		-		13,134,000		95.63	
4.01.4.01.19.06.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran yang tersusun	-	-	13,134,000		-		-		-		13,134,000			
4.01.4.01.19.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	75%	268,124,340	339,995,800		-		-		-		339,995,800		64.03	
4.01.4.01.19.29.29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Tata pemerintahan Desa yang terlaksana	4 kegiatan	43,126,000	49,699,700		-		-		-		49,699,700			
		Jumlah rekomendasi APBDes yang terverifikasi sesuai dengan peraturan	10 desa				-		-		-					
4.01.4.01.19.29.30	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang terlaksana	6 kegiatan	78,530,000	81,101,100		-		-		-		81,101,100			
4.01.4.01.19.29.31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang terlaksana	5 kegiatan	58,620,000	77,592,000		-		-		-		77,592,000			
4.01.4.01.19.29.32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	4 kegiatan	41,036,000	46,035,500		-		-		-		46,035,500			
4.01.4.01.19.29.33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan yang terlaksana	5 kegiatan	45,811,499	39,085,500		-		-		-		39,085,500			
4.01.4.01.19.29.34	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok) yang terlaksana	-	-	46,482,000		-		-		-		46,482,000			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		243,159,961		69,227,120		28.47		69,227,120		0.93	Kecamatan Balerejo
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-											
4.11.4.11.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,052,961		-		-		-			
4.11.4.11.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2,052,961		-		-		-			
4.11.4.11.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						115,907,000		27,475,492		23.70		27,475,492			
4.11.4.11.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,400,000		1,153,000		48.04		1,153,000			
4.11.4.11.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11,607,000		4,839,500		41.69		4,839,500			
4.11.4.11.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6,000,000		1,121,250		18.69		1,121,250			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		70.500.000		13.665.942		19.38		13.665.942			
4.11.4.11.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		10.000.000		2.325.000		23.25		2.325.000			
4.11.4.11.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		5.400.000		2.200.000		40.74		2.200.000			
4.11.4.11.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		10.000.000		2.170.800		21.71		2.170.800			
4.11.4.11.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		98.700.000		36.430.628		36.91		36.430.628			
4.11.4.11.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		34.200.000		7.680.628		22.46		7.680.628			
4.11.4.11.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		4.500.000		-		-		-			
4.11.4.11.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		60.000.000		28.750.000		47.92		28.750.000			
4.11.4.11.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		26.500.000		5.321.000		20.08		5.321.000			
4.11.4.11.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		26.500.000		5.321.000		20.08		5.321.000			
													-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		47.527.300		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.01.01.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-		40.000.000		-		-		-			
4.11.4.11.01.01.15.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				-		40.000.000		-		-		-			
4.11.4.11.01.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		7.527.300		-		-		-			
4.11.4.11.01.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		7.527.300		-		-		-			
													-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		32.690.680		7.306.700		22.35		7.306.700		7.27	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.01.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		32.690.680		7.306.700		22.35		7.306.700			Kecamatan Degangan
4.11.4.11.01.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		32.690.680		7.306.700		22.35		7.306.700			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	11.385.220	-	-	-	-	-	-	-	0.00		
4.11.4.11.01.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		11.385.220		-		-		-			
4.11.4.11.01.01.27.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		11.385.220		-		-		-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	92.395.580	6.964.000	7.54	6.964.000		2.45					
4.11.4.11.01.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		92.395.580		6.964.000		7.54		6.964.000			
4.11.4.11.01.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		74.761.040		360.000		0.48		360.000			
4.11.4.11.01.01.28.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		17.634.540		6.604.000		37.45		6.604.000			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-								82.170.063		1.00	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-	238.246.203	82.170.063						-			
4.11.4.11.02.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		88.544.903		23.581.250		26.63		23.581.250			
4.11.4.11.02.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		2.419.200		-		-		-			
4.11.4.11.02.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		1.578.400		1.578.400		100.00		1.578.400			
4.11.4.11.02.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		26.264.203		14.569.850		55.47		14.569.850			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.02.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		2.521.100		2.453.000		97.30		2.453.000			
4.11.4.11.02.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material				-		6.520.000		-		-		-			
4.11.4.11.02.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				-		2.882.000		-		-		-			
4.11.4.11.02.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		46.360.000		4.980.000		10.74		4.980.000			
4.11.4.11.02.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		67.773.800		26.079.020		38.48		26.079.020			
4.11.4.11.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		26.373.800		6.579.020		24.95		6.579.020			
4.11.4.11.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		41.400.000		19.500.000		47.10		19.500.000			
4.11.4.11.02.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		81.927.500		32.509.793		39.68		32.509.793			
4.11.4.11.02.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		64.832.500		32.509.793		50.14		32.509.793			
4.11.4.11.02.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		7.095.000		-		-		-			
4.11.4.11.02.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		10.000.000		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		12.201.500		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.02.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		12.201.500		-		-		-			
4.11.4.11.02.01.16.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				-		12.201.500		-		-		-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		32.791.200		4.070.000		12.41		4.070.000		4.04	
4.11.4.11.02.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		32.791.200		4.070.000		12.41		4.070.000			
4.11.4.11.02.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		32.791.200		4.070.000		12.41		4.070.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-								-			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-		9.873,600	2.046,000					2.046,000		6.63	
4.11.4.11.02.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		9.873,600	2.046,000					2.046,000			
4.11.4.11.02.01.27.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		9.873,600	2.046,000					2.046,000			
													-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		194,155,600	36,176,000					36,176,000		5.96	
4.11.4.11.02.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		194,155,600	36,176,000					36,176,000			
4.11.4.11.02.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		69,234,800	21,336,000					21,336,000			
4.11.4.11.02.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		54,000,000	-					-			
4.11.4.11.02.01.28.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		70,920,800	14,840,000					14,840,000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		334,908,339	75,560,633					75,560,633		0.55	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
4.11.4.11.03.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		143,134,129	19,294,000					19,294,000			
4.11.4.11.03.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		5,324,565	245,000					245,000			
4.11.4.11.03.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		4,802,800	777,500					777,500			
4.11.4.11.03.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		43,025,964	11,310,500					11,310,500			
4.11.4.11.03.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		13,600,800	1,961,000					1,961,000			
4.11.4.11.03.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		1,980,000	870,000					870,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.03.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		74.400.000		4.130.000		5.55		4.130.000			
4.11.4.11.03.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		98.648.400		34.727.249		35.20		34.727.249			
4.11.4.11.03.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		28.448.400		5.977.249		21.01		5.977.249			
4.11.4.11.03.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		70.200.000		28.750.000		40.95		28.750.000			
4.11.4.11.03.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		93.125.810		21.539.384		23.13		21.539.384			
4.11.4.11.03.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		68.590.780		17.323.884		25.26		17.323.884			
4.11.4.11.03.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		7.982.250		-		-		-			
4.11.4.11.03.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		16.552.780		4.215.500		25.47		4.215.500			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		3.616.000		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.03.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		3.616.000		-		-		-			
4.11.4.11.03.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		3.616.000		-		-		-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		18.755.050		1.988.750		10.60		1.988.750		0.07	
4.11.4.11.03.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		18.755.050		1.988.750		10.60		1.988.750			
4.11.4.11.03.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		18.755.050		1.988.750		10.60		1.988.750			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		9.975.000		1.850.000		18.55		1.850.000		-	
4.11.4.11.03.01.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		9.975.000		1.850.000		18.55		1.850.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.03.01.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		9,975,000		1,850,000		18.55		1,850,000			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-		17,653,950		-		-		-			0.00
4.11.4.11.03.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		17,653,950		-		-		-			
4.11.4.11.03.01.27.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		17,653,950		-		-		-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		54,000,000		-		-		-			0.00
4.11.4.11.03.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		54,000,000		-		-		-			
4.11.4.11.03.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		54,000,000		-		-		-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		200,905,871		67,318,186		33.51		67,318,186			0.85
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
4.11.4.11.03.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		200,905,871		67,318,186		33.51		67,318,186			
4.11.4.11.03.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		200,905,871		67,318,186		33.51		67,318,186			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		94,300,000		34,585,000		36.68		34,585,000			121.15
4.11.4.11.03.02.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-		94,300,000		34,585,000		36.68		34,585,000			
4.11.4.11.03.02.15.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				-		94,300,000		34,585,000		36.68		34,585,000			
													-			

Kelurahan Bangunsari Dolopo

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		496,294,129		24,300,000		4.90		24,300,000		13.47	
4.11.4.11.03.02.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						374,505,132		-		-		-			
4.11.4.11.03.02.20.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						374,505,132		-		-		-			
4.11.4.11.03.02.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						121,788,997		24,300,000		19.95		24,300,000			
4.11.4.11.03.02.21.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						121,788,997		24,300,000		19.95		24,300,000			
													-			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		-		58,904,000		-		58,904,000		121.59	
4.11.4.11.03.02.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						-		58,904,000		-		58,904,000			
4.11.4.11.03.02.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						-		54,558,000		-		54,558,000			
4.11.4.11.03.02.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						-		4,346,000		-		4,346,000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		278,103,000		83,181,762		29.91		83,181,762		1.06	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		-		-		-		-		-	
4.11.4.11.03.03.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9,000,000		200,000		2.22		200,000			
4.11.4.11.03.03.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9,000,000		200,000		2.22		200,000			
4.11.4.11.03.03.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						269,103,000		82,981,762		30.84		82,981,762			
4.11.4.11.03.03.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						269,103,000		82,981,762		30.84		82,981,762			
													-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		120,497,000		30,866,000		25.62		30,866,000		108.12	
4.11.4.11.03.03.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						120,497,000		30,866,000		25.62		30,866,000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.03.03.15.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				-		120.497.000		30.866.000		25.62		30.866.000			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		415.150.000		4.906.000		1.18		4.906.000		2.72	
4.11.4.11.03.03.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-		334.150.000		4.906.000		1.47		4.906.000			
4.11.4.11.03.03.20.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-		199.550.000		-		-		-			
4.11.4.11.03.03.20.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				-		49.600.000		-		-		-			
4.11.4.11.03.03.20.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-		85.000.000		4.906.000		5.77		4.906.000			
4.11.4.11.03.03.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-		81.000.000		-		-		-			
4.11.4.11.03.03.21.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				-		81.000.000		-		-		-			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		-		45.517.000		-		45.517.000		93.96	
4.11.4.11.03.03.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		-		45.517.000		-		45.517.000			
4.11.4.11.03.03.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-		-		15.792.000		-		15.792.000			
4.11.4.11.03.03.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		-		29.725.000		-		29.725.000			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		349.786.476		77.425.528		22.14		77.425.528		0.98	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-											
4.11.4.11.04.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		128.123.211		22.746.700		17.75		22.746.700			
4.11.4.11.04.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		5.999.918		2.102.400		35.04		2.102.400			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.04.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		4.722.565		718.700		15,22		718.700			
4.11.4.11.04.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		31.874.578		11.671.000		36,62		11.671.000			
4.11.4.11.04.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		8.234.150		3.607.600		43,81		3.607.600			
4.11.4.11.04.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		1.980.000		750.000		37,88		750.000			
4.11.4.11.04.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		75.312.000		3.897.000		5,17		3.897.000			
4.11.4.11.04.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		17.155.765		-		-		-			
4.11.4.11.04.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		17.155.765		-		-		-			
4.11.4.11.04.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		107.104.700		39.711.008		37,08		39.711.008			
4.11.4.11.04.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		24.707.200		5.922.008		23,97		5.922.008			
4.11.4.11.04.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		82.397.500		33.789.000		41,01		33.789.000			
4.11.4.11.04.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		97.402.800		14.967.820		15,37		14.967.820			
4.11.4.11.04.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		59.174.750		14.967.820		25,29		14.967.820			
4.11.4.11.04.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		8.206.400		-		-		-			
4.11.4.11.04.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		30.021.650		-		-		-			
					-		-		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		9.281.800		-		-		-		0,00	
4.11.4.11.04.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		9.281.800		-		-		-			
4.11.4.11.04.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		9.281.800		-		-		-			
					-		-		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		58.641,100		4.635,000		7.90		4.635,000		2.57	
4.11.4.11.04.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		58.641,100		4.635,000		7.90		4.635,000			
4.11.4.11.04.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		58.641,100		4.635,000		7.90		4.635,000			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		9.244,400		-		-		-			
4.11.4.11.04.01.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		9.244,400		-		-		-			
4.11.4.11.04.01.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		9.244,400		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-		43.835,000		2.030,000		4.63		2.030,000		1.51	
4.11.4.11.04.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		43.835,000		2.030,000		4.63		2.030,000			
4.11.4.11.04.01.27.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		43.835,000		2.030,000		4.63		2.030,000			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		75.089,985		-		-		-			
4.11.4.11.04.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		75.089,985		-		-		-			
4.11.4.11.04.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		21.089,985		-		-		-			
4.11.4.11.04.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		54.000,000		-		-		-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		304,414,578		102,463,997				102,463,997		1.76	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-											
4.11.4.11.05.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		10.000,000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.05.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		10.000.000		-		-		-			
4.11.4.11.05.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		134.167.593		36.193.500		26.98		36.193.500			
4.11.4.11.05.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		23.064.400		21.230.000		92.05		21.230.000			
4.11.4.11.05.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		3.713.710		1.210.500		32.60		1.210.500			
4.11.4.11.05.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		38.469.483		9.293.000		24.16		9.293.000			
4.11.4.11.05.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		7.040.000		1.150.000		16.34		1.150.000			
4.11.4.11.05.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		1.980.000		450.000		22.73		450.000			
4.11.4.11.05.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		59.900.000		2.860.000		4.77		2.860.000			
4.11.4.11.05.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		103.385.195		40.953.877		39.61		40.953.877			
4.11.4.11.05.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		24.785.195		8.703.877		35.12		8.703.877			
4.11.4.11.05.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		78.600.000		32.250.000		41.03		32.250.000			
4.11.4.11.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		56.861.790		25.316.620		44.52		25.316.620			
4.11.4.11.05.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		51.929.170		23.966.620		46.15		23.966.620			
4.11.4.11.05.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		3.630.000		50.000		1.38		50.000			
4.11.4.11.05.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		1.302.620		1.300.000		99.80		1.300.000			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		19.090.000		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.05.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		19.090.000		-		-		-			
4.11.4.11.05.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		19.090.000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	35.000,000	5.779,500	16.51	5.779,500	5.37						
4.11.4.11.05.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	35.000,000	5.779,500	16.51	5.779,500							
4.11.4.11.05.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	35.000,000	5.779,500	16.51	5.779,500							
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	13.972,460	-	-	-							
4.11.4.11.05.01.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	13.972,460	-	-	-							
4.11.4.11.05.01.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-	13.972,460	-	-	-							
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	5.000,000	3.569,000	71.38	3.569,000	23.21						
4.11.4.11.05.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	5.000,000	3.569,000	71.38	3.569,000							
4.11.4.11.05.01.27.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-	5.000,000	3.569,000	71.38	3.569,000							
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	54.000,000	-	-	-							
4.11.4.11.05.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-	54.000,000	-	-	-							
4.11.4.11.05.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-	54.000,000	-	-	-							
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	340.998,105	125.835,876		125.835,876	1.44						
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-											
4.11.4.11.06.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	1.697,600	-	-	-							Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.06.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		1.697.600		-		-		-			
4.11.4.11.06.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		8.250.000		8.250.000		100.00		8.250.000			
4.11.4.11.06.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		8.250.000		8.250.000		100.00		8.250.000			
4.11.4.11.06.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		120.852.500		21.085.950		17.45		21.085.950			
4.11.4.11.06.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		1.050.000		-		-		-			
4.11.4.11.06.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		10.057.500		3.936.000		39.13		3.936.000			
4.11.4.11.06.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		7.795.000		2.158.200		27.69		2.158.200			
4.11.4.11.06.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		14.545.000		2.151.750		14.79		2.151.750			
4.11.4.11.06.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		1.980.000		750.000		37.88		750.000			
4.11.4.11.06.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		85.425.000		12.090.000		14.15		12.090.000			
4.11.4.11.06.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		33.791.505		33.253.000		98.41		33.253.000			
4.11.4.11.06.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		33.791.505		33.253.000		98.41		33.253.000			
4.11.4.11.06.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		90.246.000		31.023.324		34.38		31.023.324			
4.11.4.11.06.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		21.846.000		6.773.324		31.00		6.773.324			
4.11.4.11.06.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		68.400.000		24.250.000		35.45		24.250.000			
4.11.4.11.06.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		86.160.500		32.223.602		37.40		32.223.602			
4.11.4.11.06.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		74.610.500		29.353.602		39.34		29.353.602			
4.11.4.11.06.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		11.550.000		2.870.000		24.85		2.870.000			
													-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		16,781,000	-	-	-	-	-	-	0.00		
4.11.4.11.06.01.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-		12,851,000	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.06.01.15.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				-		6,497,500	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.06.01.15.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-		6,353,500	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.06.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		3,930,000	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.06.01.16.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				-		1,965,000	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.06.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		1,965,000	-	-	-	-	-	-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		15,823,400	-	-	-	-	-	-	0.00		
4.11.4.11.06.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		15,823,400	-	-	0	-	-	-			
4.11.4.11.06.01.19.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				-		14,513,400	-	-	0	-	-	-			
4.11.4.11.06.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		1,310,000	-	-	0	-	-	-			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		1,310,000	-	-	-	-	-	-	0.00		
4.11.4.11.06.01.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		1,310,000	-	-	0	-	-	-			
4.11.4.11.06.01.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		1,310,000	-	-	0	-	-	-			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-		18,260,000	3,240,000	17.74		3,240,000		5.77			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.06.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		18.260.000		3.240.000		17.74		3.240.000			
4.11.4.11.06.01.27.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		11.370.000		-		-		-			
4.11.4.11.06.01.27.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				-		5.580.000		2.590.000		46.42		2.590.000			
4.11.4.11.06.01.27.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				-		1.310.000		650.000		49.62		650.000			
													-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		71.815,950		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.06.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		71.815,950		-		0.00		-			
4.11.4.11.06.01.28.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		7.440.000		-		0.00		-			
4.11.4.11.06.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		6.222.500		-		0.00		-			
4.11.4.11.06.01.28.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				-		4.158.400		-		0.00		-			
4.11.4.11.06.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		53.995.050		-		0.00		-			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-								80.781,612		1.29	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		334.868,034		80.781,612				-			
4.11.4.11.07.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		3.490.806		-		-		-			
4.11.4.11.07.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		3.490.806		-		-		-			
4.11.4.11.07.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		132.992.063		21.533.285		16.19		21.533.285			
4.11.4.11.07.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		975.185		447.335		45.87		447.335			
4.11.4.11.07.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		30.052.654		10.016.000		33.33		10.016.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.07.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		3,441,295		2,000,000		58.12		2,000,000			
4.11.4.11.07.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		8,609,929		-		-		-			
4.11.4.11.07.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		1,980,000		450,000		22.73		450,000			
4.11.4.11.07.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		87,933,000		8,619,950		9.80		8,619,950			
4.11.4.11.07.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		31,335,480		-		-		-			
4.11.4.11.07.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		31,335,480		-		-		-			
4.11.4.11.07.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		95,234,080		35,724,797		37.51		35,724,797			
4.11.4.11.07.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		37,284,080		8,724,797		23.40		8,724,797			
4.11.4.11.07.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		57,950,000		27,000,000		46.59		27,000,000			
4.11.4.11.07.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		71,815,605		23,523,530		32.76		23,523,530			
4.11.4.11.07.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		57,740,095		20,883,210		36.17		20,883,210			
4.11.4.11.07.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		6,483,280		2,640,320		40.73		2,640,320			
4.11.4.11.07.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		7,592,230		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		3,061,500		-		-		-			0.00
4.11.4.11.07.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		3,061,500		-		-		-			
4.11.4.11.07.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		3,061,500		-		-		-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		30,020,510		-		-		-			0.00

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.07.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		30.020.510		-		0.00		-			
4.11.4.11.07.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		30.020.510		-		0.00		-			
													-			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		10.072.800		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.07.01.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		10.072.800		-		-		-			
4.11.4.11.07.01.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		10.072.800		-		-		-			
													-			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-		16.851.030		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.07.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		16.851.030		-		-		-			
4.11.4.11.07.01.27.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		16.851.030		-		-		-			
													-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		63.400.795		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.07.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		63.400.795		-		-		-			
4.11.4.11.07.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		9.994.160		-		-		-			
4.11.4.11.07.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		53.406.635		-		-		-			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-								63.329.927		0.95	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		225.568.153		63.329.927				-			
4.11.4.11.08.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		7.270.300		-		-		-			
4.11.4.11.08.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		7.270.300		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.08.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		72.219.400		9.028.000		12.50		9.028.000			
4.11.4.11.08.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		2.226.000		-		-		-			
4.11.4.11.08.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		7.000.000		-		-		-			
4.11.4.11.08.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		9.416.000		-		-		-			
4.11.4.11.08.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		33.876.800		7.858.000		23.20		7.858.000			
4.11.4.11.08.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		5.866.600		470.000		8.01		470.000			
4.11.4.11.08.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		2.310.000		700.000		30.30		700.000			
4.11.4.11.08.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material				-		1.886.600		-		-		-			
4.11.4.11.08.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		9.637.400		-		-		-			
4.11.4.11.08.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		89.384.000		35.225.697		39.41		35.225.697			
4.11.4.11.08.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		14.384.000		1.725.697		12.00		1.725.697			
4.11.4.11.08.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		75.000.000		33.500.000		44.67		33.500.000			
4.11.4.11.08.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		56.694.453		19.076.230		33.65		19.076.230			
4.11.4.11.08.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		47.694.453		19.076.230		40.00		19.076.230			
4.11.4.11.08.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		3.000.000		-		-		-			
4.11.4.11.08.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		6.000.000		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		8.825.000		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.08.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		8.825.000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.08.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		8.825.000	-	-	-	-	-	-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		21.177,950	-	-	-	-	-	-		0.00	
4.11.4.11.08.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		21.177.950	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.08.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		21.177.950	-	-	-	-	-	-			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		26.136,500	-	-	-	-	-	-		0.00	
4.11.4.11.08.01.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		26.136.500	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.08.01.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-		23.124.500	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.08.01.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		3.012.000	-	-	-	-	-	-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		79.463,400	-	-	-	-	-	-		0.00	
4.11.4.11.08.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		79.463.400	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.08.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		25.478.200	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.08.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		53.985.200	-	-	-	-	-	-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-								87.762,679		0.75	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		346.743,371		87.762,679				-			
4.11.4.11.09.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		2.426.521	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.09.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		2.426.521	-	-	-	-	-	-			
4.11.4.11.09.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		113.537.760		18.935.450				18.935.450			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
											16.68					
4.11.4.11.09.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		2.446.000		-		-		-			
4.11.4.11.09.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		4.750.000		-		-		-			
4.11.4.11.09.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		4.702.500		1.460.800		31.06		1.460.800			
4.11.4.11.09.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		26.409.260		6.813.400		25.80		6.813.400			
4.11.4.11.09.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		6.250.000		2.476.250		39.62		2.476.250			
4.11.4.11.09.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		1.980.000		725.000		36.62		725.000			
4.11.4.11.09.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		67.000.000		7.460.000		11.13		7.460.000			
4.11.4.11.09.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		39.598.500		-		-		-			
4.11.4.11.09.01.07.05	Pengadaan Mebel				-		15.664.300		-		-		-			
4.11.4.11.09.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		23.934.200		-		-		-			
4.11.4.11.09.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		131.678.350		49.760.409		37.79		49.760.409			
4.11.4.11.09.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		50.678.350		11.510.409		22.71		11.510.409			
4.11.4.11.09.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		81.000.000		38.250.000		47.22		38.250.000			
4.11.4.11.09.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		59.502.240		19.066.820		32.04		19.066.820			
4.11.4.11.09.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		39.100.740		19.066.820		48.76		19.066.820			
4.11.4.11.09.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		20.401.500		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		7.563,850		2.370,000		31.33		2.370,000		0.26	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.09.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		7.563.850		2.370.000		31.33		2.370.000			
4.11.4.11.09.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		7.563.850		2.370.000		31.33		2.370.000			
													-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		14.866,450		4,237,100		28.50		4,237,100		0.31	
4.11.4.11.09.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		14.866,450		4,237,100		28.50		4,237,100			
4.11.4.11.09.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		14.866,450		4,237,100		28.50		4,237,100			
													-			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-		10,604,700		858,000		8.09		858,000		2.63	
4.11.4.11.09.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		10,604,700		858,000		8.09		858,000			
4.11.4.11.09.01.27.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		10,604,700		858,000		8.09		858,000			
													-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		80,965,000		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.09.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		80,965,000		-		-		-			
4.11.4.11.09.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		11,599,300		-		-		-			
4.11.4.11.09.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		54,000,000		-		-		-			
4.11.4.11.09.01.28.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		15,365,700		-		-		-			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		291,595,990		-		-		-		0.00	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-						-		-			
4.11.4.11.09.02.17	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				-		291,595,990		-		-		-			Kelurahan Nglames

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12	
4.11.4.11.09.02.17.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				-		291.595.990		-		-		-				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		430.040.000		133.433.939		31.03		133.433.939		2.52		
4.11.4.11.09.02.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-		430.040.000		133.433.939		31.03		133.433.939				
4.11.4.11.09.02.20.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				-		238.724.120		31.658.000		13.26		31.658.000				
4.11.4.11.09.02.20.04	Evaluasi Kelurahan				-		191.315.880		101.775.939		53.20		101.775.939				
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		43.335.000		43.335.000		-		43.335.000		89.45		
4.11.4.11.09.02.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		-		43.335.000		-		43.335.000				
4.11.4.11.09.02.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-		-		9.539.000		-		9.539.000				
4.11.4.11.09.02.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		-		33.796.000		-		33.796.000				
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		74.404.010		14.630.000		19.66		14.630.000		8.24		
4.11.4.11.09.02.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		74.404.010		14.630.000		19.66		14.630.000				
4.11.4.11.09.02.28.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				-		74.404.010		14.630.000		19.66		14.630.000				
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-								57.979.137		0.37		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		165.868.800		57.979.137				-				
4.11.4.11.10.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		37.422.000		15.800.477		42.22		15.800.477				
4.11.4.11.10.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		3.497.900		1.484.813		42.45		1.484.813				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.10.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		21.428.000		8.969.452		41.86		8.969.452			
4.11.4.11.10.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		2.356.100		1.121.212		47.59		1.121.212			
4.11.4.11.10.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		3.180.000		1.325.000		41.67		1.325.000			
4.11.4.11.10.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		6.960.000		2.900.000		41.67		2.900.000			
4.11.4.11.10.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		75.266.300		32.097.160		42.64		32.097.160			
4.11.4.11.10.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		31.766.300		8.097.160		25.49		8.097.160			
4.11.4.11.10.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		43.500.000		24.000.000		55.17		24.000.000			
4.11.4.11.10.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		53.180.500		10.081.500		18.96		10.081.500			
4.11.4.11.10.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		48.340.500		10.081.500		20.86		10.081.500			
4.11.4.11.10.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		4.840.000		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		20.828.200		1.938.140		9.31		1.938.140		3.03	
4.11.4.11.10.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		20.828.200		1.938.140		9.31		1.938.140			
4.11.4.11.10.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		20.828.200		1.938.140		9.31		1.938.140			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		74.526.194		24.093.975		32.33		24.093.975		0.45	
4.11.4.11.10.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		60.114.694		24.093.975		40.08		24.093.975			
4.11.4.11.10.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		60.114.694		24.093.975		40.08		24.093.975			
4.11.4.11.10.01.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-		14.411.500		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.10.01.21.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				-		14,411,500		-		-		-			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		35,428,800		5,064,785		14.30		5,064,785		10.45	
4.11.4.11.10.01.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		35,428,800		5,064,785		14.30		5,064,785			
4.11.4.11.10.01.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-		15,169,900		-		-		-			
4.11.4.11.10.01.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		20,258,900		5,064,785		25.00		5,064,785			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-		25,418,600		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.10.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		25,418,600		-		-		-			
4.11.4.11.10.01.27.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				-		7,498,300		-		-		-			
4.11.4.11.10.01.27.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-		17,920,300		-		-		-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		57,697,300		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.10.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		57,697,300		-		-		-			
4.11.4.11.10.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		2,780,900		-		-		-			
4.11.4.11.10.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		54,916,400		-		-		-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		249,391,645		134,615,410		53.98		134,615,410		-	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-											
4.11.4.11.10.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		118,204,645		77,621,180		65.67		77,621,180			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.10.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		114.204.645		75.621.180		66.22		75.621.180			
4.11.4.11.10.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		4.000.000		2.000.000		50.00		2.000.000			
4.11.4.11.10.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		131.187.000		56.994.230		43.45		56.994.230			
4.11.4.11.10.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		15.942.000		5.944.230		37.29		5.944.230			
4.11.4.11.10.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		115.245.000		51.050.000		44.30		51.050.000			
													-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		550.608.355		51.035.000		9.27		51.035.000		36.91	
4.11.4.11.10.02.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-		550.608.355		51.035.000		9.27		51.035.000			
4.11.4.11.10.02.20.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				-		364.815.900		-		-		-			
4.11.4.11.10.02.20.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-		185.792.455		8.200.000		4.41		8.200.000			
4.11.4.11.10.02.20.04	Evaluasi Kelurahan				-		-		42.835.000		-		42.835.000			
													-			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		-		98.259.392		-		98.259.392		202.83	
4.11.4.11.10.02.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		-		98.259.392		-		98.259.392			
4.11.4.11.10.02.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-		-		56.366.392		-		56.366.392			
4.11.4.11.10.02.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		-		41.893.000		-		41.893.000			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		208.691.580		52.230.862		25.03		52.230.862		0.81	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-								-			
4.11.4.11.10.03.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		78.094.430		14.648.890		18.76		14.648.890			Kelurahan Krajan Mejayan
4.11.4.11.10.03.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		3.300.000		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.10.03.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		16.500.000		-		-		-			
4.11.4.11.10.03.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		9.173.120	2.576.200		28.08		2.576.200				
4.11.4.11.10.03.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		25.977.710	10.254.090		39.47		10.254.090				
4.11.4.11.10.03.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		3.163.600	993.600		31.41		993.600				
4.11.4.11.10.03.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		1.980.000	825.000		41.67		825.000				
4.11.4.11.10.03.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		18.000.000	-		-		-				
4.11.4.11.10.03.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		90.394.200	35.271.972		39.02		35.271.972				
4.11.4.11.10.03.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		17.794.200	2.271.972		12.77		2.271.972				
4.11.4.11.10.03.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		72.600.000	33.000.000		45.45		33.000.000				
4.11.4.11.10.03.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		40.202.950	2.310.000		5.75		2.310.000				
4.11.4.11.10.03.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		3.292.950	-		-		-				
4.11.4.11.10.03.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		12.160.000	2.310.000		19.00		2.310.000				
4.11.4.11.10.03.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		24.750.000	-		-		-				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		588.758.420	42.170.100		7.16		42.170.100			30.50	
4.11.4.11.10.03.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-		588.758.420	42.170.100		7.16		42.170.100				
4.11.4.11.10.03.20.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-		6.927.800	-		-		-				
4.11.4.11.10.03.20.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				-		315.114.280	-		-		-				
4.11.4.11.10.03.20.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-		166.361.840	11.610.000		6.98		11.610.000				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.10.03.20.04	Evaluasi Kelurahan				-		100.354.500		30.560.100		30.45		30.560.100			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-		73.203,675		-		73.203,675		151.11	
4.11.4.11.10.03.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		-		73.203,675		-		73.203,675			
4.11.4.11.10.03.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-		-		40.083,315		-		40.083,315			
4.11.4.11.10.03.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		-		33.120,360		-		33.120,360			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-								169.943,760		2.63	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		293.004,933		169.943,760		58.00		-			
4.11.4.11.10.04.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		62.941,533		27.946,960		44.40		27.946,960			
4.11.4.11.10.04.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		3.067,440		700.000		22.82		700.000			
4.11.4.11.10.04.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		17.862,160		17.862,160		100.00		17.862,160			
4.11.4.11.10.04.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		37.643,000		8.884,800		23.60		8.884,800			
4.11.4.11.10.04.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		4.368,933		500.000		11.44		500.000			
4.11.4.11.10.04.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		111.163,400		30.746,800		27.66		30.746,800			
4.11.4.11.10.04.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		18.163,400		7.846,800		43.20		7.846,800			
4.11.4.11.10.04.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		93.000,000		22.900,000		24.62		22.900,000			
4.11.4.11.10.04.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		118.900,000		111.250,000		93.57		111.250,000			
4.11.4.11.10.04.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dimas Operasional atau Lapangan				-		800.000		-		-		-			
4.11.4.11.10.04.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		8.750,000		2.000,000		22.86		2.000,000			

Kelurahan Pandean

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.10.04.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		109.350.000		109.250.000		99.91		109.250.000			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		505.395.000		21.130.000		4.18		21.130.000		15.28	
4.11.4.11.10.04.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-		440.354.000		19.690.000		4.47		19.690.000			
4.11.4.11.10.04.20.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				-		402.400.000		12.750.000		3.17		12.750.000			
4.11.4.11.10.04.20.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-		37.954.000		6.940.000		18.29		6.940.000			
4.11.4.11.10.04.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-		65.041.000		1.440.000		2.21		1.440.000			
4.11.4.11.10.04.21.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				-		65.041.000		1.440.000		2.21		1.440.000			
													-			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-				52.839.200		-		52.839.200		109.07	
4.11.4.11.10.04.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		-		52.839.200		-		52.839.200			
4.11.4.11.10.04.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		-		52.839.200		-		52.839.200			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-								86.035.798		1.33	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		333.640.222		86.035.798		25.79		-			
4.11.4.11.11.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		5.614.400		1.200.000		21.37		1.200.000			
4.11.4.11.11.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		5.614.400		1.200.000		21.37		1.200.000			
4.11.4.11.11.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		135.475.247		18.760.000		13.85		18.760.000			
4.11.4.11.11.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		6.785.790		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		14.848.550		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.11.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		7.777.000		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		50.675.307		12.040.000		23.76		12.040.000			
4.11.4.11.11.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		11.578.600		1.500.000		12.95		1.500.000			
4.11.4.11.11.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		2.310.000		540.000		23.38		540.000			
4.11.4.11.11.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		41.500.000		4.680.000		11.28		4.680.000			
4.11.4.11.11.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		107.173.320		46.943.758		43.80		46.943.758			
4.11.4.11.11.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		24.448.320		8.193.758		33.51		8.193.758			
4.11.4.11.11.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		82.725.000		38.750.000		46.84		38.750.000			
4.11.4.11.11.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		85.377.255		19.132.040		22.41		19.132.040			
4.11.4.11.11.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		70.869.025		19.132.040		27.00		19.132.040			
4.11.4.11.11.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		3.767.500		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		10.740.730		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		12.236.400		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.11.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		12.236.400		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		12.236.400		-		-		-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		44.951.180		10.495.000		23.35		10.495.000		7.59	
4.11.4.11.11.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		44.951.180		10.495.000		23.35		10.495.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.11.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		44.951.180		10.495.000		23.35		10.495.000			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		23.084.790		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		23.084.790		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-		23.084.790		-		-		-			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-		14.771.740		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		14.771.740		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.27.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				-		14.771.740		-		-		-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		61.710.245		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		61.710.245		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		7.532.000		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		54.178.245		-		-		-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		328.560.556		150.332.610				150.332.610		1.84	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-						45.75					
4.11.4.11.12.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		4.000.000		-		-		-			
4.11.4.11.12.01.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-		4.000.000		-		-		-			
4.11.4.11.12.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		101.496.640		38.379.000		37.81		38.379.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.12.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		5.266.500		2.150.000		40.82		2.150.000			
4.11.4.11.12.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		5.843.500		1.900.000		32.51		1.900.000			
4.11.4.11.12.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		31.216.640		12.789.000		40.97		12.789.000			
4.11.4.11.12.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		6.070.000		2.120.000		34.93		2.120.000			
4.11.4.11.12.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		3.600.000		1.500.000		41.67		1.500.000			
4.11.4.11.12.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		49.500.000		17.920.000		36.20		17.920.000			
4.11.4.11.12.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		29.800.000		29.260.000		98.19		29.260.000			
4.11.4.11.12.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		29.800.000		29.260.000		98.19		29.260.000			
4.11.4.11.12.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		106.668.000		46.729.570		43.81		46.729.570			
4.11.4.11.12.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		28.368.000		9.729.570		34.30		9.729.570			
4.11.4.11.12.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		78.300.000		37.000.000		47.25		37.000.000			
4.11.4.11.12.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		86.595.916		35.964.040		41.53		35.964.040			
4.11.4.11.12.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		62.817.681		26.882.540		42.79		26.882.540			
4.11.4.11.12.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		12.100.000		2.938.000		24.28		2.938.000			
4.11.4.11.12.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		11.678.235		6.143.500		52.61		6.143.500			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		6.583,050		1,527,000		23,20		1,527,000		7,54	
4.11.4.11.12.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		6.583.050		1.527.000		23.20		1.527.000			
4.11.4.11.12.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		6.583.050		1.527.000		23.20		1.527.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	20,303,680	630,000	3.10	630,000	1.01						
4.11.4.11.12.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	20,303,680	630,000	3.10	630,000							
4.11.4.11.12.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	20,303,680	630,000	3.10	630,000							
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	5,638,600	-	-	-							
4.11.4.11.12.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	5,638,600	-	-	-							
4.11.4.11.12.01.27.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-	5,638,600	-	-	-							
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	107,897,635	6,680,000	6.19	6,680,000	2.01						
4.11.4.11.12.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-	107,897,635	6,680,000	6.19	6,680,000							
4.11.4.11.12.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-	31,231,750	4,530,000	14.50	4,530,000							
4.11.4.11.12.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-	53,043,335	-	-	-							
4.11.4.11.12.01.28.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	23,622,550	2,150,000	9.10	2,150,000							
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	311,081,023	133,094,474	42.78	133,094,474	1.57						
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-											
4.11.4.11.13.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	222,107,023	91,231,186	41.08	91,231,186							
4.11.4.11.13.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-	13,379,350	3,212,151	24.01	3,212,151							
4.11.4.11.13.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	77,636,423	42,024,035	54.13	42,024,035							
4.11.4.11.13.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-	3,045,550	7,975,000	261.86	7,975,000							

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.13.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		2.244.000		750.000		33.42		750.000			
4.11.4.11.13.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		125.801.700		37.270.000		29.63		37.270.000			
4.11.4.11.13.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		10.000.000		-		-		-			
4.11.4.11.13.01.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		10.000.000		-		-		-			
4.11.4.11.13.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		78.974.000		41.863.288		53.01		41.863.288			
4.11.4.11.13.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		14.974.000		6.613.288		44.17		6.613.288			
4.11.4.11.13.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		64.000.000		35.250.000		55.08		35.250.000			
													-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		30.387.599		11.955.000		39.34		11.955.000		12.79	
4.11.4.11.13.01.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-		6.160.299		-		-		-			
4.11.4.11.13.01.15.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-		6.160.299		-		-		-			
4.11.4.11.13.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		24.227.300		11.955.000		49.35		11.955.000			
4.11.4.11.13.01.16.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				-		24.227.300		11.955.000		49.35		11.955.000			
													-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		98.732.400		36.465.000		36.93		36.465.000		12.01	
4.11.4.11.13.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		98.732.400		36.465.000		36.93		36.465.000			
4.11.4.11.13.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		12.834.000		6.400.000		49.87		6.400.000			
4.11.4.11.13.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		54.000.000		17.215.000		31.88		17.215.000			
4.11.4.11.13.01.28.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		16.458.000		2.775.000		16.86		2.775.000			
4.11.4.11.13.01.28.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				-		15.440.400		10.075.000		65.25		10.075.000			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-								74,130,126		0.48	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-			207,949,925		74,130,126		35.65		-			
4.11.4.11.14.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		64,435,029		27,055,723		41.99		27,055,723			
4.11.4.11.14.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		3,836,250		1,935,000		50.44		1,935,000			
4.11.4.11.14.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		16,053,950		15,804,193		98.44		15,804,193			
4.11.4.11.14.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		5,486,030		5,486,030		100.00		5,486,030			
4.11.4.11.14.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		8,594,999		3,830,500		44.57		3,830,500			
4.11.4.11.14.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		30,463,800		-		-		-			
4.11.4.11.14.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		86,969,896		33,169,588		38.14		33,169,588			
4.11.4.11.14.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		25,769,896		4,669,588		18.12		4,669,588			
4.11.4.11.14.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		61,200,000		28,500,000		46.57		28,500,000			
4.11.4.11.14.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		56,545,000		13,904,815		24.59		13,904,815			
4.11.4.11.14.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		56,545,000		13,904,815		24.59		13,904,815			
													-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		11,515,500		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.14.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		11,515,500		-		-		-			
4.11.4.11.14.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		11,515,500		-		-		-			
													-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		37,440,300		1,965,000		5.25		1,965,000		0.07	

Kecamatan Wungu

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.14.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		37.440,300		1.965,000		5,25		1.965,000			Kelurahan Wungu
4.11.4.11.14.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		37.440,300		1.965,000		5,25		1.965,000			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-		36.777,100		-		-		-			
4.11.4.11.14.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		36.777,100		-		-		-			
4.11.4.11.14.01.27.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		36.777,100		-		-		-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		127.141,250		2.947,500		2,32		2.947,500		0,75	
4.11.4.11.14.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		127.141,250		2.947,500		2,32		2.947,500			
4.11.4.11.14.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		25.220,950		2.947,500		11,69		2.947,500			
4.11.4.11.14.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		54.000,000		-		-		-			
4.11.4.11.14.01.28.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		47.920,300		-		-		-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-				102.751,322				102.751,322		0,67	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		322.323,230		102.751,322		31,88		-			
4.11.4.11.14.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		46.628,114		31.094,225		66,69		31.094,225			
4.11.4.11.14.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		15.517,924		12.936,614		83,37		12.936,614			
4.11.4.11.14.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		8.145,290		6.757,611		82,96		6.757,611			
4.11.4.11.14.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		-		-		-		-			
4.11.4.11.14.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		9.064,900		6.000,000		66,19		6.000,000			
4.11.4.11.14.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				-		-		-		-		-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.14.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		13.900.000		5.400.000		38.85		5.400.000			
4.11.4.11.14.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		182.047.215		60.458.628		33.21		60.458.628			
4.11.4.11.14.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		16.460.715		5.708.628		34.68		5.708.628			
4.11.4.11.14.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		9.586.500		-		-		-			
4.11.4.11.14.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		156.000.000		54.750.000		35.10		54.750.000			
4.11.4.11.14.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		93.647.901		11.198.469		11.96		11.198.469			
4.11.4.11.14.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		400.000		-		-		-			
4.11.4.11.14.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		11.453.349		11.198.469		97.77		11.198.469			
4.11.4.11.14.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		9.586.500		-		-		-			
4.11.4.11.14.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		72.208.052		-		-		-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		459.801.770		43.780.000		9.52		43.780.000		1.58	
4.11.4.11.14.02.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-		459.801.770		43.780.000		9.52		43.780.000			
4.11.4.11.14.02.20.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				-		299.485.850		-		-		-			
4.11.4.11.14.02.20.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-		43.312.500		3.000.000		6.93		3.000.000			
4.11.4.11.14.02.20.04	Evaluasi Kelurahan				-		117.003.420		40.780.000		34.85		40.780.000			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		-		77.758.650		-		77.758.650		160.51	
4.11.4.11.14.02.25	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****				-		-		77.758.650		-		77.758.650			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12	
4.11.4.11.14.02.25.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)				-				34.498.000		-		34.498.000				
4.11.4.11.14.02.25.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)				-				43.260.650		-		43.260.650				
													-				
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-								135.556,029		0,88		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-			396,646,600		135,556,029		34,18		-				
4.11.4.11.14.03.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		47.173.680		20.797.684		44,09		20.797.684				
4.11.4.11.14.03.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		12.815.108		6.720.994		52,45		6.720.994				
4.11.4.11.14.03.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		5.990.477		3.430.045		57,26		3.430.045				
4.11.4.11.14.03.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		6.367.381		3.722.050		58,45		3.722.050				
4.11.4.11.14.03.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		22.000.715		6.924.595		31,47		6.924.595				
4.11.4.11.14.03.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		129.371.000		58.774.091		45,43		58.774.091				
4.11.4.11.14.03.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		19.271.000		7.274.091		37,75		7.274.091				
4.11.4.11.14.03.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		110.100.000		51.500.000		46,78		51.500.000				
4.11.4.11.14.03.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		220.101.920		55.984.254		25,44		55.984.254				
4.11.4.11.14.03.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		7.901.920		1.084.254		13,72		1.084.254				
4.11.4.11.14.03.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		212.200.000		54.900.000		25,87		54.900.000				
													-				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		403.353,400		-		-		-				
4.11.4.11.14.03.20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-		403.353.400		-		-		-				
4.11.4.11.14.03.20.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				-		366.000.000		-		-		-				

Kelurahan Munggut

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.14.03.20.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-		6.625.000		-		-		-			
4.11.4.11.14.03.20.04	Evaluasi Kelurahan				-		30.728.400		-		-		-			
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		-		72.720.500	-			72.720.500		150.11	
4.11.4.11.14.03.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		-		72.720.500	-			72.720.500			
4.11.4.11.14.03.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-		-		48.997.700	-			48.997.700			
4.11.4.11.14.03.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		-		23.722.800	-			23.722.800			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-								74.664.243		0.48	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		260.801.119		74.664.243		28.63					
4.11.4.11.15.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		1.985.200		540.000		27.20		540.000			
4.11.4.11.15.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		1.985.200		540.000		27.20		540.000			
4.11.4.11.15.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		86.995.604		12.982.500		14.92		12.982.500			
4.11.4.11.15.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		2.092.900		986.500		47.14		986.500			
4.11.4.11.15.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		16.190.515		-		-		-			
4.11.4.11.15.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		3.404.500		1.000.000		29.37		1.000.000			
4.11.4.11.15.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		22.895.789		6.831.000		29.84		6.831.000			
4.11.4.11.15.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-		5.000.900		2.660.000		53.19		2.660.000			
4.11.4.11.15.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		3.675.000		1.325.000		36.05		1.325.000			
4.11.4.11.15.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material				-		3.650.000		180.000		4.93		180.000			

Kecamatan Wonoasri

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
4.11.4.11.15.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		30.086.000		-		-		-			
4.11.4.11.15.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		9.064.275		-		-		-			
4.11.4.11.15.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		9.064.275		-		-		-			
4.11.4.11.15.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		101.323.250		43.121.830		42.56		43.121.830			
4.11.4.11.15.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-		23.323.250		6.121.830		26.25		6.121.830			
4.11.4.11.15.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		78.000.000		37.000.000		47.44		37.000.000			
4.11.4.11.15.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		61.432.790		18.019.913		29.33		18.019.913			
4.11.4.11.15.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		53.812.830		16.799.413		31.22		16.799.413			
4.11.4.11.15.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		2.500.000		450.000		18.00		450.000			
4.11.4.11.15.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		5.119.960		770.500		15.05		770.500			
													-			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		6.500.000		-		-		-		0.00	
4.11.4.11.15.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		6.500.000		-		-		-			
4.11.4.11.15.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		6.500.000		-		-		-			
													-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-		30.531.000		-		-		-			
4.11.4.11.15.01.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-		30.531.000		-		-		-			
4.11.4.11.15.01.19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		30.531.000		-		-		-			
													-			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi (Tahun n-1) 2021 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	3	4	5		6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%		12
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		50,712,200		2,871,500		5.66		2,871,500		5.93	
4.11.4.11.15.01.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		50,712,200		2,871,500		5.66		2,871,500			
4.11.4.11.15.01.23.01	Simergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-		37,743,200		2,871,500		7.61		2,871,500			
4.11.4.11.15.01.23.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		12,969,000		-		-		-			
													-			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		59,764,000		560,000		0.94		560,000		0.14	
4.11.4.11.15.01.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		59,764,000		560,000		0.94		560,000			
4.11.4.11.15.01.28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		5,764,000		560,000		9.72		560,000			
4.11.4.11.15.01.28.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		54,000,000		-		-		-			
													-			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		-		-		-		-			
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	-	-	-		-		-		-		-		-	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-		-		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		23,084,790		-		-		-			
4.11.4.11.11.01.16.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		23,084,790		-		-		-			

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2022 tidak terlepas dari Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Madiun yang merupakan kristalisasi dari isu Strategis yang terjadi di setiap urusan serta berbagai dinamika yang terjadi baik ditingkat internal maupun eksternal. Adapun Isu strategis yang diangkat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang ditetapkan;
2. Penurunan angka kemiskinan perlu mendapat perhatian;
3. Pendapatan asli daerah belum optimal;
4. Daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana;
5. Sistem tata kelola pemerintahan yang masih perlu mendapat perhatian;
6. Indeks Pembangunan Manusia masih perlu mendapatkan perhatian.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKPD Tahun 2020 yang disusun berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 dimana memuat Visi Misi Bupati terpilih 2018 - 2023, serta merujuk pada isu strategis Kabupaten Madiun yang disinkronkan dengan prioritas Pusat, prioritas Provinsi Jawa Timur maka penekanan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Penguatan keberdayaan kelompok tani, melalui :
 - a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan teknik budidaya tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
2. Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung produksi pertanian, perikanan, peternakan, melalui :
 - a. Peningkatkan penyediaan Sapropdi dan sarana prasarana tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
3. Pengembangan Kawasan destinasi pariwisata :
 - a. Peningkatkan sarana prasarana destinasi wisata;
 - b. Peningkatkan pemahaman tentang kepariwisataan bagi pelaku usaha pariwisata;
 - c. Peningkatkan pengembangan industri pariwisata;
 - d. Stimulasi Pemulihan Industri Pariwisata.

4. Infrastruktur dasar: RTLH, Air Bersih dan Sanitasi Layak, melalui :
 - a. Peningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Peningkatkan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
5. Pemenuhan infrastruktur jaringan internet seluruh desa, melalui :
 - a. Peningkatkan kualitas sistem pelayanan berbasis sistem teknologi informasi;
 - b. Peningkatkan akses informasi.
6. Penguatan sistem perijinan dan investasi, melalui:
 - a. Peningkatkan sarana prasarana pelayanan serta kemudahan akses pelayanan pada entitas kelurahan/kecamatan;
 - b. Stimulasi Pemulihan ekonomi dan relaksasi investasi;
 - c. Peningkatkan kompetensi/kapasitas petugas pelayanan dan tenaga komisi teknis.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2.118
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya data pendidikan dengan data kependudukan 2. Masih terdapat anak putus sekolah dan anak tidak sekolah 3. Adanya pembatasan penganggaran pendidikan untuk infrastruktur
2	Urusan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka kematian pada bayi dan ibu melahirkan 2. Pencegahan dan penanganan stunting belum optimal 3. Kurangnya SDM tenaga kesehatan yang profesional 4. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular 5. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam penanganan Covid-19 6. Kurangnya SDM tenaga kesehatan yang terlatih dalam penanganan Covid-19 7. Ketersediaan bahan habis pakai, obat-obatan dan vaksindalam penanganan Covid-19
3	Urusan Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi jalan belum semuanya dalam kondisi baik/mantap 2. Ada sebagian kecil kegiatan fisik mengalami keterlambatan pelaksanaan dengan schedule yang telah disepakati
4	Urusan Perumahan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan kebijakan perumahan dan kawasan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	Kawasan Permukiman	permukiman belum mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Madiun
5	Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah perlu ditingkatkan kualitasnya 2. Pemenuhan SPM Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan kebakaran ditingkatkan kualitasnya
6	Urusan Sosial/ Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Verifikasi dan Validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang terintegrasi 2. Penanggulangan kemiskinan (PPKS) berbasis masyarakat masih relatif rendah. 3. Belum adanya sarana pelayanan dan panti rehabilitasi sosial tingkat kabupaten bagi PPKS. 4. Belum memiliki Kelembagan Sosial Persatuan Disabilitas dan Yatim piatu tingkat kabupaten.
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya Jumlah Pengangguran disebabkan masih belum pulihnya Ekonomi, sebagai Dampak Pandemi Covid-19 2. Kurangnya kesadaran LPK swasta tentang pentingnya Akreditasi bagi lembaganya 3. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja belum sesuai kompetensi yang dibutuhkan
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) hanya diampu 1 Bidang dengan SDM yang masih kurang sehingga diperlukan penambahan struktur pada lower management (setingkat Kasi) untuk lebih mengoptimalkan kinerja urusan PP dan PA 2. Belum semua masyarakat memahami Informasi pemenuhan hak anak sehingga masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan anak putus sekolah 3. Anggaran untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam mewujudkan kemandirian dipandang perlu untuk ditingkatkan supaya bisa mencapai hasil optimal
3	Urusan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dihadapkan pada masalah pokok yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Desakan peningkatan penduduk beserta aktivitas ekonominya menyebabkan: terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian, menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, dan persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman

II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
		<p>2. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor</p> <p>3. Cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar</p> <p>4. Masa panen yang tidak merata sepanjang bulan dan juga permainan tengkulak sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen</p> <p>5. Kurangnya peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah (bupati) yang menjadi acuan untuk beberapa kegiatan di bidang ketahanan pangan salah satu contoh seperti perda atau perbup untuk lumbung pangan masyarakat dalam rangka pengembangan cadangan pangan daerah</p> <p>6. Masih kurangnya pengetahuan dari Gapoktan atau poktan dalam pengelolaan lembaga, perijinan produk dan pemasaran komoditi pertanian dan menjaga kualitas produk pertanian pasca panen</p> <p>7. Pemanfaatan pangan lokal belum optimal karena secara potensi beberapa pangan lokal yang akan diangkat menjadi produk unggulan seperti umbi-umbian masih bersifat musiman dan penanaman sporadic.</p>
4	Urusan Pertanahan	1. Aset tanah daerah sebagian besar belum bersertifikat
5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Laboratorium Lingkungan Hidup belum beroperasi karena belum ada Kepala UPT, alat-alat laboratorium dan tenaga ahli yang memantau kualitas air, dan udara sehingga belum bisa mengoperasikan laboratorium tersebut
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>1. Masih Terdapat Masyarakat Miskin yang Belum Memiliki Identitas Kependudukan (NIK) terutama PPKS T4 - tempat tinggal tidak tetap,</p> <p>2. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Dispendukcapil dan Dinas Sosial yang menangani data masyarakat miskin yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)</p>
7	Urusan Pengendalian Kependudukan dan KB	<p>1. Pada tahun 2019 pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) tertunda dikarenakan alat untuk pelayanan MOW tidak tersedia dari Provinsi sehingga saat ini Kabupaten Madiun hanya mengandalkan Bhaksos dalam kegiatan MOW.</p> <p>3. KB Pria tidak banyak diminati oleh masyarakat</p> <p>4. Kemampuan Kader Tri Bina dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) belum optimal</p>

II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
		5. KB suntik masih banyak diminati masyarakat meskipun diketahui bahwa KB suntik banyak menimbulkan putus pakai sehingga menjadikan drop out peserta KB aktif dan menurut data terdapat 17,26% yang drop out dari peserta KB aktif
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Dana Desa mayoritas masih dominan untuk pembangunan infrastruktur sedangkan pemberdayaan belum menjadi prioritas, yang menjadikan hambatan menggali ide kreatif untuk inovasi Desa 2. Regulasi pembentukan BUMDes bersama belum tersusun. 3. Berkenaan dengan adanya Dana Desa yang besar dikawatirkan segala sesuatu diperhitungkan dengan nilai uang yang berdampak pada semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat akan menurun 4. Strategi pemberdayaan melalui pengalokasian berbagai bantuan yang telah berlangsung selama ini hanya menghasilkan distorsi dimana masyarakat penerima bantuan tidak semakin berdaya dan mandiri melainkan sebaliknya semakin tergantung terhadap bantuan dari luar karena data yang kurang akurat. 5. Kapasitas SDM aparatur Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa kurang optimal, masih ditemui kurang tertib dan disiplin penatausahaan pada sistem aplikasi keuangan Desa.
8	Urusan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi kinerja di Dinas Perhubungan terutama tenaga teknis bidang Kelistrikan dan Penguji Kendaraan Bermotor 2. Belum tersedianya data-data penunjang dibidang Perhubungan 3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas yang masih belum optimal dan masih tumpang tindih urusan dengan OPD lain atau Jajaran samping, sehingga menyebabkan banyak kendala dalam menjalankan kegiatan
9	Urusan Komunikasi & Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi teknis di bidang Persandian khususnya Sandiman 2. Keahlian Sumber Daya Manusia di bidang Persandian terbatas 3. Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidang TIK pada Diskominfo khususnya dan di semua OPD pada umumnya 4. Masih minimnya sarana prasarana di bidang TIK dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5. Masih terkendalanya masalah perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puruboyo FM
10	Urusan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi SDM Koperasi dan Usaha Mikro masih kurang adaptif terhadap era millennial yakni dinamisasi era digital 2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pengelola koperasi dan Usaha Mikro terhadap kesehatan dan kelangsungan koperasi 3. Kurangnya manajemen pengelolaan Usaha Mikro yang berimbang pada nilai jual dan nilai produk Usaha mikro. 4. Kurangnya promosi dan pemasaran produk produk usaha mikro

II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
		5. Produk produk usaha mikro banyak yang belum bernilai jual tinggi
11	Urusan Penanaman Modal	<p>1. Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Madiun sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi.</p> <p>2. Jumlah perusahaan yang rutin menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih sedikit, sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui perkembangan investasi riil di lapangan. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penyusunan kebijakan di bidang penanaman modal.</p> <p>3. Potensi dan peluang investasi belum dirumuskan dengan spesifik sesuai arah kebijakan daerah dan kebutuhan calon investor. Kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan juga belum cukup efektif dan efisien dalam menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi di Kabupaten Madiun</p> <p>4. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian sesuai harapan masyarakat</p> <p>5. Pelaksanaan Pergub No 49 Tahun 2016 terkait perizinan penambangan galian C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap merugikan pemerintah Kabupaten/ Kota. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Kabupaten/Kota yang paling sering menghadapi permasalahan terkait dampak lingkungan dari penambangan galian C. Permasalahan yang muncul seringkali harus diselesaikan oleh Bupati/Walikota dan bukan oleh Gubernur. Sedangkan pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki wewenang dalam penerbitan izin dan pengawasan penambangan Galian C</p> <p>6. Para penambang kurang sadar pajak karena belum memahami perhitungan pajak tambang sesuai Perbup Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Perbup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Kena Pajak dan Penunjukan Koordinator Penyampaian SPTPD serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun.</p> <p>7. Potensi energi baru terbarukan di Kabupaten Madiun sebagai energi alternatif di bidang ketenagalistrikan belum dipetakan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan seluruh kebijakan terkait energi sumber daya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten Madiun harus dapat menggali potensi energi alternatif yang dimiliki untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi sehingga dapat dikembangkan dan membawa manfaat bagi masyarakat.</p>
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	<p>1. Belum tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang representatif.</p> <p>2. Belum memadainya SDM pelatih olahraga.</p> <p>3. Pembinaan atlit masih kurang</p> <p>4. Belum terbentuknya organisasi pemuda yang bergerak di bidang wirausaha</p>
13	Urusan Statistik	1. Tupoksi pengelola data statistik sektoral belum terwadahi pada struktur kelembagaan OPD (setiap bidang/seksi)

II		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Konsistensi data statistik sektoral belum maksimal 3. Publikasi data statistik sektoral melalui media komunikasi/ multi media belum optimal
14	Urusan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kapasitas SDM Persandian belum memadai 2. Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan. 3. Kesadaran mengenai keamanan informasi belum berkembang secara optimal di lingkungan ASN Kab Madiun.
15	Urusan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Peraturan tentang Kabupaten Madiun Kampung Pesilat, Dewan Kebudayaan Kabupaten Madiun, dan Pengelolaan Cagar Budaya. 2. Perlunya sinkronisasi antar Perangkat Daerah tentang Data Pokok Terpadu/Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD), jenis kegiatan sesuai dengan Obyek Pemajuan Kebudayaan. 3. Kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang masih perlu ditingkatkan. 4. Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana Kebudayaan bagi sanggar seni sekolah dan masyarakat
16	Urusan Perpustakaan	Jumlah kunjungan pada masa pandemic menurun
17	Urusan Kearsipan	n.a.

III		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana prasarana tangkap ikan . 2. Kurangnya kebutuhan benih ikan 3. Kurangnya calon induk unggul 4. Kurangnya keragaman jenis ikan 5. Kurangnya ketersediaan jumlah pakan
2	Urusan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses jalan menuju destinasi wisata masih kurang memadai . 2. Sebagian besar destinasi yang ada bukan aset Pemda .
3	Urusan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak anak muda berfikir bahwa pertanian merupakan suatu kegiatan yang kurang menarik untuk dijalani dan lebih memilih pekerjaan diperkantoran . 2. Alih fungsi lahan yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya anggapan bahwa memertahankan lahan pertanian pada saat ini tidak lagi menguntungkan, yang kebanyakan akan dialih fungsikan sebagai tempat berdirinya bangunan/perumahan atau kebutuhan lainnya 3. Teknologi pertanian yang belum maksimal dalam menjangkau masyarakat petani 4. Pemasaran produk juga menjadi kendala dalam pertanian, hasil produk khususnya dari petani lokal yang belum mampu dipasarkan dengan baik 5. Bantuan pemerintah ke kelompok tani untuk pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana infrastruktur pertanian sampai saat ini masih dirasa sangat kurang
5	Urusan energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penataan kegiatan usaha pertambangan mineral batuan bukan logam (Galian C) yang terkait pajak dan prosedur pertambangan.

		2. Pengembangan Energi Baru Terbarukan belum berjalan secara optimal
		3. Energi kelistrikan di Bidang ESDM masih tahap rintisan, sehingga selalu koordinasi dengan ESDM Prov Jatim terkait pengembangan energi kelistrikan.
6	Urusan Perdagangan	1. Banyak pelaku usaha yang belum ijin usaha baik itu ijin usaha mikro maupun usaha kecil
		2. Kurangnya kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya
		3. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang peraturan cukai dan sanksinya
		4. Kurangnya kesadaran pedagang/pelaku usaha tentang tera UTTP
		5. Kurangnya kesadaran para pedagang pasar dalam hal retribusi dalam peningkatan PAD daerah
7	Urusan Perindustrian	1. Kurangnya pengetahuan dan informasi di dalam pengolahan dan pembuatan produk IKM
		2. Kurangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam peningkatan produk IKM
		3. Kurangnya promosi dan pemasaran produk-produk IKM yang ada di Kabupaten Madiun
8	Urusan Transmigrasi	1. Jadwal pemberangkatan yang disampaikan tidak sesuai waktunya, mundur dan tidak pasti sehingga Calon Transmigran yang akan berangkat cenderung berubah pendiriannya
		2. Calon Transmigran masih mempunyai anak usia sekolah atau akan ujian akhir sekolah
IV	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	
1	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Perkembangan Paham Radikalisme dan SARA di wilayah Kabupaten Madiun, cenderung terhadap pada generasi muda
		2. Rawannya potensi-potensi konflik antara Perguruan, Remaja, Ormas, Agama dan aliran Kepercayaan serta suku/ras.
		3. Belum maksimalnya dalam mendeteksi dini potensi-potensi konflik dan permasalahan - permasalahan yang timbul di wilayah Kabupaten Madiun.
		4. Belum Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baik di tingkat Kabupaten. Kecamatan Dan Desa / Kelurahan Se Kabupaten Madiun

BAB III
KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

Perekonomian Kabupaten Madiun tahun 2020 mengalami kontraksi, pertumbuhan sebesar 1,69 persen dibandingkan tahun 2019 pada 5,42 persen. Dampak pandemi COVID-19 menyeret turunnya pertumbuhan ekonomi secara global. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada kategori jasa lainnya, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dan kategori jasa perusahaan. Struktur perekonomian Kabupaten Madiun pada 2020 masih didominasi oleh kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; dan industri pengolahan; serta informasi dan komunikasi sebesar. peranan lima lapangan usaha tersebut masih menjadi kekuatan perekonomian Kabupaten Madiun.

Nilai PDRB Kabupaten Madiun atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 18,92 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,01 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 18,93 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh turunnya produksi diseluruh lapangan usaha, akibat adanya pandemi Covid yang memporak-porandakan perekonomian dunia. Proyeksi Nilai PDRB dasar harga berlaku tahun 2021 diprediksi meningkat 20,03 triliun rupiah dan Nilai PDRB dasar harga konstan 13.44 triliun rupiah.

Laju inflasi Kabupaten Madiun tahun 2020 pada angka 1,86, menurun dari tahun sebelumnya diangka 2,20. Hal ini menggambarkan keadaan stabilitas yang cukup terkendali, namun juga sebagai tanda adanya penurunan kemampuan daya beli masyarakat terutama diakibatkan pandemi *Covid-19*, sehingga langkah strategis kebijakan fiskal dan program kegiatan yang menjaga pemulihan ekonomi dilakukan melalui Realokasi dan Refocussing anggaran dalam rangka menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Proyeksi laju inflasi tahun 2021 diprediksi meningkat pada angka 1,97. Dengan Menekan angka peningkatan

harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta adanya ketidak lancaran distribusi barang

Setelah (minus) 1,69 pada tahun 2020, Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diprediksi meningkat pada angka 3,87, Apabila faktor dari vaksinasi dimasukkan, maka laju pertumbuhan Kab Madiun mencapai angka 4,9. Hal ini cukup positif. Selain itu untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per individu penduduk di Kabupaten Madiun dapat ditunjukkan oleh Pendapatan Perkapita dengan nilai sebesar Rp. 27.67 milyar, peningkatan pendapatan perkapita tahun 2021 diprediksi meningkat pada angka Rp. 29.22 milyar.

Tabel 3.1

Indikator Makro Ekonomi Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2020	2021**
1	PDRB (ADH Berlaku)	Rp.Juta	18.917.000,00	20.035.927,00
2	PDRB (ADH Konstan)	Rp.Juta	12.940.000,00	13.440.597,00
3	Inflasi	(%)	1,86	1,97
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	(-) 1,69	3,87
5	Pendapatan Perkapita	Rp.Ribu	27.670.000,00	29.229.000,00

** Angka sementara proyeksi

Sumber Data : Bappeda Kab.Madiun (hasil koordinasi dengan BPS)

3.1.2 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dengan realisasi kinerja ekonomi tahun 2020 yang minus 1,69 persen ditambah kondisi awal tahun 2021 yang masih diberlakukan kebijakan PPKM diperkirakan ekonomi tahun 2021 masih cukup berat. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu segera melakukan percepatan realisasi belanja dengan segera melaksanakan program yang telah disusun agar kinerja ekonomi ditahun 2021 dapat bergairah kembali, mengingat percepatan belanja pemerintah daerah baik

melalui anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan agar daya beli masyarakat tetap bisa terjaga.

Upaya untuk mengentot hampir semua sektor produksi masih belum bisa dilakukan secara maksimal karena terkendala peraturan PPKM, namun begitu masih ada beberapa sektor yang bisa didorong dalam situasi PPKM seperti sektor perdagangan maupun UMKM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat kembali mendongkrak daya beli masyarakat, selain itu beberapa sector masih perlu untuk diberikan dukungan agar bisa bertahan salah satunya adalah sektor rumah makan dan jasa, mengingat tahun sebelumnya kedua sektor tersebut terpuak cukup dalam sampai mengalami kontraksi hingga masing-masing sebesar 8,03% negatif dan 14,39% negatif, untuk itu pemerintah daerah agar memberikan dukungan agar kedua sektor tersebut pada tahun 2021 dapat bergerak kembali.

Program vaksinasi yang sudah mulai berjalan diharapkan dapat memberikan angin segar untuk mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat, namun memasuki tahun 2021 pada kuartal pertama kasus harian covid 19 di kabupaten madiun masih menunjukkan zona orange, sehingga mengganggu beberapa sektor ekonomi yang berupaya melakukan pemulihan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,87 persen dan 4,53 persen pada tahun 2022 maka beberapa upaya perlu dilakukan dengan harapan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 dapat kembali tumbuh positif sehingga ekonomi kabupaten madiun akan mengalami recovery secara signifikan.

Selanjutnya, melalui peningkatan konsumsi masyarakat yaitu semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak, mengingat konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat telah disalurkan Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah Daerah juga mendorong konsumsi pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBD, konsumsi juga diarahkan untuk produk kearifan lokal sehingga memberikan *multiplier effects* yang signifikan pada penguatan ekonomi lokal.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 pemerintah daerah telah melakukan upaya menjaga distribusi pangan, agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali, selain itu pemerintah pusat juga memberikan dukungan untuk menggerakkan dunia usaha melalui pemberian

insentif/stimulus kepada UMKM, antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro.

Seiring upaya pemerintah daerah untuk melakukan recovery ekonomi disaat pandemi *Covid-19*, sektor pangan merupakan salah satu sektor yang harus dijaga dan saat ini kontribusi PDRB pada sektor pertanian di kabupaten madiun berada pada kisaran 28%, hal ini tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi di wilayah Kabupaten Madiun. Terkait dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi di Kabupaten Madiun diarahkan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan serta melakukan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan jaring sosial dengan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Kebijakan sektor pertanian dalam merespon *Covid-19* dalam menjaga ketersediaan pangan dan harga pangan yang terjangkau di Kabupaten Madiun dengan memperkuat intensitas pertanian dan pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian memperbaiki logistik pangan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan mengurangi kelangkaan pangan dan disparitas bahan pokok pangan.

Tabel 3.2
Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Madiun
Tahun 2021 & Tahun 2022

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2021**)	2022***)
1	PDRB (ADH Berlaku)	Rp.Juta	20.035.927,00	21.382.088,00
2	PDRB (ADH Konstan)	Rp.Juta	13.440.597,00	14.049.229,00
3	Inflasi (IHK)	(%)	1,97	2,10
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	3,87	4,53
5	Pendapatan Perkapita	Rp.Ribu	29.229.000,00	31.145.000,00

***) **) = Angka proyeksi

Sumber Data : hasil koordinasi Bappeda Kab.Madiun dengan BPS

Sentimen dari faktor eksternal maupun internal sebagai dampak dari pandemic Covid-19 harus dikelola dengan baik agar pemulihan ekonomi di

Kabupaten Madiun dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan dapat tumbuh hingga mencapai level 3,87%, mengingat peranan sektor ekonomi yang cukup dominan seperti perdagangan, industri serta jasa akan mengalami pemulihan hingga meningkatkan elastisitas tenaga kerja dan berdampak pada berkurangnya tingkat pengangguran, indikasi ini dapat dilihat dari banyaknya sektor usaha yang sudah mulai melangsungkan usahanya walaupun dalam suasana PPKM serta berjalannya pelaksanaan program vaksinasi yang menasar pada angkatan kerja pada kelompok usia 20 sampai dengan 34 tahun yang diharapkan dapat kembali bekerja pada lapangan kerja terdampak pandemic *Covid-19* tersebut.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Madiun perlu menjaga denyut usaha dengan strategi mengembangkan tatanan kegiatan ekonomi yang baru agar sektor penghasil barang (*tradables*) yang terdampak pandemi dapat terus berjalan mengingat pertumbuhan sektor tersebut untuk menjaga daya beli sehingga dapat menjaga kemampuan PAD.

Percepatan pembangunan di Caruban dapat dijadikan episentrum aktivitas perekonomian di Kabupaten Madiun, dengan harapan berdampak pada ekspansi bisnis di wilayah sebagai pusat pemerintahan, tekanan ekonomi akibat pandemi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga tahun 2022 sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2022 ditargetkan berada pada kisaran 4,53%. Melalui pertumbuhan tersebut total output perekonomian Kabupaten Madiun di tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar 21 triliun rupiah. Peningkatan pembangunan ekonomi seharusnya sejalan dengan optimalisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan kemakmuran masyarakat seperti pembangunan infrastruktur. Namun bila kita lihat struktur belanja daerah Kabupaten Madiun yang masih didominasi oleh belanja pegawai dan barang jasa serta proporsi belanja modal masih relatif kecil, hal ini yang menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada perspektif jangka menengah perekonomian Kabupaten Madiun tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam dekade mendatang, mengingat beberapa hal. Pertama, peranan sektor ekonomi yang dominan (pertanian) belum bisa meningkatkan elastisitas penciptaan lapangan pekerjaan, fenomena ini dapat diindikasikan dengan kurangnya minat angkatan

kerja pada kelompok usia 20 sampai dengan 34 tahun yang mau bekerja pada sektor pertanian, sehingga masih tingginya kelompok usia tersebut yang merantau keluar Kabupaten Madiun.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Madiun perlu bekerja keras lagi mengingat dampak pandemi ini dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun naik kembali, karena sebagian besar keluarga di Kabupaten Madiun masih hidup sedikit di atas garis kemiskinan akan kembali terperosok kedalam garis kemiskinan. Dinamika perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah melalui instrumen distribusi dana perimbangan dan regulasi fiskal.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sebagai sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka struktur belanja Pemerintah Kabupaten Madiun telah menyesuaikan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang bisa dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Alokasi sumber daya daerah di prioritaskan pada kegiatan yang dapat memberi kepuasan bagi masyarakat, khususnya bidang ekonomi, sosial dan pelayanan dasar yang efisien, diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah pasca pandemi covid-19.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten Madiun sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah melalui kegiatan:

- a. Melaksanakan musrenbang pendapatan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan ;
- b. Mengoptimalkan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PD Penghasil ;
- d. Optimalisasi pengelolaan asset dan Pemanfaatan ;
- e. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah ;
- f. Pemutakhiran data dan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan kondisi terakhir (*update*) serta dilakukannya validasi Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. Mengoptimalkan kinerja Perusahaan Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- h. Melaksanakan rekonsiliasi dan monitoring PBB ke 15 (lima belas) Kecamatan secara rutin, serta melaksanakan penagihan tunggakan PBB kepada Wajib Pajak;
- i. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban petugas pemungut tingkat Desa dan Kelurahan;
- j. Meningkatkan SDM Aparatur bidang Pendapatan Daerah;
- k. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi atas tunggakan PBBP2;
- l. Mengembangkan Sistem digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

3.2.2 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD Kabupaten Madiun terdiri dari Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 diarahkan pada :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antar dinas terkait;
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
4. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah ;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah;
6. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

2. Memanfaatkan Potensi Pendapatan Daerah.

Pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Madiun melalui sinergitas antar Perangkat Daerah, peningkatan hubungan/kerjasama Antar Kabupaten/Kota.

3. Meningkatkan kinerja pelaporan dan evaluasi atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

Dalam dokumen RKPD Tahun 2022, target Pendapatan Daerah Rp. 1.801.173.950.063,00 mengalami penurunan 0,92% atau sebesar Rp. 16.633.582.934,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp. 1.801.173.950.063,00, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 226.901.708.105,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 220.768.373.044,00 mengalami kenaikan Rp. 6.133.335.061,00 atau sebesar 2,70 %. Kenaikan tersebut diperoleh dari:

- 1) Hasil Pajak Daerah naik sebesar 4,53 % yaitu Rp. 3.415.000.000,00 berasal dari kenaikan PBB, BPHTB, dan PPJ;
- 2) Hasil Retribusi Daerah naik sebesar 10,08 % yaitu Rp. 868.312.450,00;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik sebesar 9,05% karena Pendapatan dari PDAM, PD BPR dan PD Umbul yang naik secara signifikan yaitu Rp.707.815.188,00;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar 0,85% yaitu Rp. 1.142.207.423,00 yang berasal dari BLUD.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp. 1.563.081.712.009,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 1.585.320.263.009,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 22.238.551.000,00 atau sebesar 1,40%.

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar 1,51% yaitu Rp. 22.238.551.000,00. Penurunan ini adanya kebijakan program rasionalisasi dari Pemerintah diakibatkan situasi global dan nasional karena adanya dampak pandemi covid-19;
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah diasumsikan tetap.

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp. 11.190.529.949,00 dibanding tahun 2021 sebesar 11.718.896.944.00 mengalami penurunan Rp. 528.366.995,00 atau sebesar 4,72 %, diasumsikan terdapat penurunan hibah dari Pemerintah Pusat.

Tabel 3.3
Realisasi Tahun 2020 dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun -2022

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.513.458.691,00	229.206.394.170,37	258.193.555.386,02	220.768.373.044,00	226.901.708.105,00
a	Hasil Pajak Daerah	51.243.461.000,00	68.812.254.420,24	69.642.764.660,22	71.957.700.000,00	75.372.700.000,00
b	Hasil Retribusi Daerah	32.531.528.200,00	9.725.917.059,00	8.746.495.040,00	7.749.393.800,00	8.617.706.250,00
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.791.034.441,00	6.290.894.932,17	7.537.159.212,28	7.115.614.826,00	7.823.430.014,00
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	95.947.435.050,00	144.377.327.758,96	172.267.136.473,52	133.945.664.418,00	135.087.871.841,00
2	DANA PERIMBANGAN	1.276.829.781.650,00	1.305.223.591.072,00	1.174.980.529.263,00	-	-
a	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	78.658.491.650,00	88.702.981.984,00	87.376.932.705,00	-	-
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	877.868.685.000,00	904.957.172.000,00	819.494.603.000,00	-	-
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	320.302.605.000,00	311.563.437.088,00	268.108.993.558,00	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	325.833.987.660,00	412.586.789.854,00	409.265.366.040,00	11.718.896.944,00	11.190.529.949,00
a	Pendapatan Hibah	57.215.400.000,00	58.678.762.774,00	65.875.038.590,00	11.718.896.944,00	11.190.529.949,00
b	Dana Darurat	-	-	-	-	-
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	103.432.422.660,00	208.501.962.000,00	160.451.269.000,00	-	-
d	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	160.881.185.000,00	140.759.651.027,00	99.239.758.450,00	-	-
e	Transfer Pemerintah Pusat/Pendapatan Lainnya		107.805.053,00	64.337.347.000,00	-	-
f	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.304.980.000,00	4.538.609.000,00	19.361.953.000,00	-	-
4	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	1.585.320.263.009,00	1.563.081.712.009,00
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	1.471.899.797.000,00	1.449.661.246.000,00
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	113.420.466.009,00	113.420.466.009,00
	T O T A L	1.771.921.560.790,00	1.947.016.775.096,37	1.796.563.840.486,91	1.817.807.532.997,00	1.801.173.950.063,00

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja Kabupaten Madiun pada prinsipnya digunakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun yaitu Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan pemenuhan prioritas pembangunan daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Total rencana belanja daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.799.673.950.063,00 mengalami penurunan 2,21 % atau sebesar Rp. 39.717.615.361,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp. 1.839.391.565.424,00, dengan perincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi;

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.214.951.655.379,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 1.217.792.771.834,94 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.841.116.455,00 atau sebesar 0,23 %. dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 753.382.446.971,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp 415.701.810.870,00;
- 3) Belanja Subsidi dialokasikan sebesar Rp 515.000.000,00;
- 4) Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp 39.164.397.538,00;
- 4) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 6.188.000.000,00;

b. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 171.788.049.484,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 200.958.532.972,06 mengalami penurunan sebesar

Rp. 29.170.483.488,16 atau sebesar 16,98 %. dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- 1) Belanja modal tanah tidak dialokasikan;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp. 68.958.016.363,00;
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan dialokasikan sebesar Rp. 47.860.822.506,00;
- 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dialokasikan sebesar Rp. 50.071.187.523,00;
- 5) Belanja modal aset tetap lainnya dialokasikan sebesar Rp. 4.898.023.092,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 sama dengan tahun anggaran 2021.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 382.934.245.200,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 390.640.260.617,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.706.015.417,00 atau sebesar 2,01 %. dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil dialokasikan sebesar Rp 9.212.317.000,00 sama dengan tahun anggaran 2021;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp 373.721.928.200,00.

Tabel 3.4
Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi /Target Tahun 2021	Proyeksi /Target Tahun 2022
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.103.581.398.755,00	1.163.916.488.307,00	1.131.818.334.625,97	-	-
a	Belanja Pegawai	748.240.102.555,00	702.639.387.723,00	689.447.057.106,00	-	-
b	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
c	Belanja Subsidi	515.000.000,00	475.315.000,00	291.847.000,00	-	-
d	Belanja Hibah	66.106.274.360,00	27.999.659.481,00	28.524.264.589,00	-	-
e	Belanja Bantuan Sosial	3.958.500.000,00	10.757.500.000,00	8.151.000.000,00	-	-
f	Belanja Bagi Hasil kepada Prop / Kab / Kota dan PemDes	4.927.282.000,00	5.821.721.600,00	3.798.521.700,00	-	-
g	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop / Kab / Kota dan PemDes	277.834.239.840,00	414.779.982.003,00	383.956.440.596,97	-	-
h	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.442.922.500,00	17.649.203.634,00	-	-
2	BELANJA LANGSUNG	708.418.990.606,00	784.395.002.820,57	664.745.505.860,94	-	-
a	Belanja Pegawai	26.381.870.100,00	20.771.779.500,00	25.713.111.410,00	-	-
b	Belanja Barang &Jasa	384.877.267.704,00	405.670.563.666,90	384.602.565.184,80	-	-
c	Belanja Modal	297.159.852.802,00	357.952.659.653,67	254.429.829.266,14	-	-
3	BELANJA OPERASI	-	-	-	1.217.792.771.834,94	1.214.951.655.379,00
a	Belanja Pegawai	-	-	-	756.647.598.493,36	753.382.446.971
b	Belanja Barang &Jasa	-	-	-	419.357.513.899,58	415.701.810.870
c	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
d	Belanja Subsidi	-	-	-	1.929.152.000,00	515.000.000
e	Belanja Hibah	-	-	-	33.643.507.442,00	39.164.397.538
f	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	6.215.000.000,00	6.188.000.000

1	2	3	4	5	6	7
4	BELANJA MODAL	-	-	-	200.958.532.972,06	171.788.049.484,00
a	Belanja Modal Tanah	-	-	-	3.851.580.000,00	-
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	87.687.235.581,00	68.958.016.363
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	55.178.717.338,06	47.860.822.506
d	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	49.192.734.805,00	50.071.187.523
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	5.048.265.248,00	4.898.023.092
f	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
5	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
a	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
6	BELANJA TRANSFER	-	-	-	390.640.260.617,00	382.934.245.200,00
a	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	9.212.317.000,00	9.212.317.000,00
b	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	381.427.943.617,00	373.721.928.200,00
T O T A L		1.797.882.802.232,00	1.948.311.491.127,57	45.875.610.202,11	1.839.391.565.424,00	1.799.673.950.063,00

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 membawa pro dan kontra terhadap pelaksanaan pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN).

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial ;
- 2) Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil

- penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2022 diarahkan :

1. Dari Sisi Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
- b. Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) untuk menambah Dana Cadangan;
- c. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, dan provinsi;
- d. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng ;
- e. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat;

2. Dari Sisi Pengeluaran Daerah

Sumber pengeluaran daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Cadangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- b. Peningkatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun kepada BUMD untuk memenuhi kebutuhan modal minimal BUMD sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja BUMD sebagai sumber peningkatan PAD. Pemenuhan modal minimal BUMD juga harus disertai dengan peningkatan kinerja BUMD yang didukung oleh peraturan daerah yang baik dan pengelolaan BUMD oleh SDM yang profesional.

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 19.000.000.000,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 39.584.032.427,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 20.584.032.427,00 atau sebesar 108,34 %.

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.500.000.000,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 18.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 atau sebesar 12,20%. Secara umum maka penerimaan dan pembiayaan pada RKPD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	114.184.891.727,18	172.024.584.669,26	165.739.380.660,06	39.584.032.427,00	19.000.000.000,00
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81.719.453.049,77	172.022.584.669,26	165.739.380.660,06	39.584.032.427,00	19.000.000.000,00
b	Pencairan Dana Cadangan	32.437.909.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	27.529.025,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
e	Penerimaan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	18.000.000.000,00	20.500.000.000,00
a	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
b	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	8.000.000.000,00	10.500.000.000,00
c	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	102.264.769.021,18	167.024.584.669,26	161.239.380.660,06	57.584.032.427,00	39.500.000.000,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Madiun pada Tahun 2022 secara periodik dan normatif merupakan prioritas pembangunan pada tahun empat RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2022 selain berpijak pada beberapa ketentuan di atas, juga mengacu pada data permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis serta disinkronkan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2022 relevan dengan tujuan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Perangkat Daerah (PD) yang paling tinggi kontribusinya terhadap pencapaian target sasaran pembangunan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari Visi dan misi Kepala Daerah yang dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalnya. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Sebagai upaya untuk menjamin aspek keberlanjutan perencanaan daerah, maka RKPD Kabupaten Madiun tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2018 - 2023. Tujuan dan sasaran merupakan penterjemahan dari Visi dan Misi Kepala Daerah, agar setiap program dan kegiatan yang dirumuskan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Secara detail, alur pemikiran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA
DAN BERAKHLAK”**

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah “AYO APIK BARENG” yang merupakan seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Madiun dan sebagai penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Madiun 2018 - 2023 sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

**Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Madiun Tahun 2022**

No	VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK		
	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan kearifan lokal	Membangun harmonisasi social yang berpondasi dari nilai religius dan kearifan lokal	Menguatkan karakteristik kebudayaan
			Terwujudnya nilai-nilai keagamaan dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat
			Terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat
2	Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (<i>Good Governance</i>) untuk pelayanan publik	Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel

No	VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK		
	MISI	TUJUAN	SASARAN
3	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan	Meningkatnya daya saing ekonomi inklusif, mandiri dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian Terjaganya keseimbangan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya ketahanan bencana daerah Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal
4	Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu memperhatikan pencapaian visi dan misi pemerintah pusat; Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan memperhatikan pengembangan sektor/bidang unggulan/kompetitif nasional serta memahami isu strategis dunia internasional maupun domestik.

Prioritas pembangunan nasional muncul untuk mendorong pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan tema RKP Nasional Tahun 2022 yaitu "PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL", terdapat tujuh prioritas Nasional :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Kinerja pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Timur berasal dari capaian kinerja pembangunan ekonomi kabupaten/kota provinsi Jawa Timur secara agregat. Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki tugas memadukan antara kebijakan pemerintah nasional dengan kebijakan kabupaten/kota yang bersumber dari harapan atau aspirasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat program-program yang tersusun dalam RPJPD dan RPJMD Jawa Timur. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yaitu "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro*". Ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan;
2. Peningkatan layanan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
3. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
4. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
5. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
6. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun

Tema pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan telaah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023

yang pada saat ini sedang disusun bersamaan dengan pelaksanaan penyusunan RKPD Kabupaten Madiun 2022. Di sisi lain perumusan tema RKPD 2022 Kabupaten Madiun harus sinkron dengan tema pembangunan RKP Nasional dan juga arah kebijakan Provinsi Jawa Timur 2022. Hubungan tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut :

Gambar 4.1

Tema Pembangunan RKP, Provinsi dan Kabupaten Madiun



Dalam penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2022 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat Nasional maupun Provinsi, dengan keterkaitan/hubungan sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Hubungan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2022

	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN MADIUN
Tema	Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka meningkatkan Daya Saing daerah di Era Industri Perdagangan berbasis Agro	Stabilisasi dan Penguatan Perekonomian, Sosial dan Pelayanan Dasar
Prioritas	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengembangan usaha pedagang formal, usaha mikro, industri kecil dan menengah • Mengakselerasi Peningkatan dan Pemulihan Industri Pariwisata Lokal Pasca Pandemi Covid-19

	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN MADIUN
	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Menekan angka ketimpangan melalui bantuan sosial, pemberdayaan, Pelatihan Keterampilan dan kemudahan akses terhadap permodalan
	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;	Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan
	4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Menguatkan karakteristik kebudayaan
	5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	Peningkatan layanan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perekonomian • Optimalisasi pelayanan kesehatan
	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup • Terselenggaranya kegiatan mitigasi bencana daerah
	7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan hasil penyelarasan dengan RKP dan RPKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, maka RPKD Kabupaten Madiun tahun 2022 mengambil tema yaitu *“Stabilisasi dan Penguatan Perekonomian, Sosial dan Pelayanan Dasar”*. Dengan Isu dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Madiun Tahun 2022

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN
Masih terdapat anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	I	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	1. Meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik SD/MI, SMP/MTS dan Pendidikan Kejar Paket A/B/C

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN
			2. Mengakselerasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Proses Kegiatan Belajar Mengajar Melalui Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Guna dan Tepat Sasaran
Tingginya angka kematian pada bayi dan ibu melahirkan	II	Optimalisasi pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan perlindungan pelayanan kesehatan
			2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Kurangnya pengembangan usaha dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi	III	Peningkatan pengembangan usaha pedagang formal, usaha mikro, industri kecil dan menengah	1. Menstimulasi pertumbuhan dan pemulihan usaha pedagang formal, usaha mikro, industri kecil dan menengah pasca pandemic covid-19
			2. Meningkatkan sarana prasarana pengembangan Usaha Pedagang Formal, Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah
			3. Pengembangan sentra industri kreatif
	IV	Mengakselerasi Peningkatan dan Pemulihan Industri Pariwisata Lokal Pasca Pandemi Covid-19	1. Meningkatkan pengembangan industri pariwisata
			2. Stimulasi Pemulihan Industri Pariwisata
Masih terdapat kekurangan sarana prasarana pengairan pertanian	V	Meningkatkan Sarana-Prasarana Penunjang Produksi Pertanian Daerah	1. Meningkatkan kapasitas daya tampung air
			2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air irigasi (<i>reservoir</i>)
System pemerataan distribusi pendapatan masyarakat kurang optimal	VI	Menekan angka ketimpangan melalui bantuan sosial, pemberdayaan, Pelatihan Keterampilan dan kemudahan akses terhadap permodalan	1. Membantu membuka jalur akses permodalan masyarakat kurang mampu
			2. Meningkatkan aktivitas-aktivitas pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan keterampilan
			3. Mengoptimalkan

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN		SASARAN PEMBANGUNAN
				Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Kelompok Rentan Terdampak Pandemi Covid-19
Kondisi jalan belum semuanya dalam kondisi baik/mantap	VII	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perekonomian	1.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana-Prasarana Akses Penunjang Optimalisasi Arus Barang dan Jasa dan serta Mobilisasi skala Lokal
Menurunnya kualitas air dan kualitas udara	VIII	Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Mengoptimalkan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan dan Pencapaian Tujuan SDG's
Tingkat risiko bencana sedang	IX	Terselenggaranya kegiatan mitigasi bencana daerah	1.	Menguatkan Kelompok Tangguh Bencana dan Kriteria Tangguh Bencana Pada Desa-desa
Belum optimal dalam penyelesaian pelanggaran ketertiban dan ketenteraman	X	Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1.	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
Karakteristik kebudayaan belum maksimal	XI	Menguatkan karakteristik kebudayaan	1.	Meningkatkan pengembangan kebudayaan

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagai bahan perumusan kegiatan dan lokasi kegiatan. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Dalam rangka menjabarkan prioritas pembangunan daerah yang merujuk kepada penyelarasan dengan RKP dan RPKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, maka RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2022 telah menetapkan program prioritas, indikator program, pagu anggaran dan perangkat daerah penanggung jawab, sebagai berikut :

Tabel 4.4
Kesesuaian Prioritas Daerah, Program, Indikator Kinerja Program, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

TEMA NASIONAL	TEMA PROVINSI	TEMA KABUPATEN				
Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka meningkatkan Daya Saing daerah di Era Industri Perdagangan berbasis Agro	Stabilisasi dan Penguatan Perekonomian, Sosial dan Pelayanan Dasar				
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan	Peningkatan pengembangan usaha pedagang formal, usaha mikro, industri kecil dan menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah	1.205.540.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pengembangan UMKM	225.856.800	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	100.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Mengakselerasi Peningkatan dan Pemulihan Industri Pariwisata Lokal Pasca Pandemi Covid-19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan	2.250.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	450.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan pelaku industri pariwisata	100.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Menekan angka ketimpangan melalui bantuan sosial, pemberdayaan, Pelatihan Keterampilan dan kemudahan akses terhadap permodalan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase desa/ kelurahan yang diberdayakan	504.014.638	Dinas Sosial
				Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		

TEMA NASIONAL	TEMA PROVINSI	TEMA KABUPATEN				
Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka meningkatkan Daya Saing daerah di Era Industri Perdagangan berbasis Agro	Stabilisasi dan Penguatan Perekonomian, Sosial dan Pelayanan Dasar				
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase BUMDes yang aktif	410.667.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	171.950.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	694.130.994	Dinas Tenaga Kerja
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	92.257.800	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	811.938.600	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;	Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan	130.148.975.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APS SD		
				Persentase Lembaga SD Terakreditasi A		
				APS SMP		
				Persentase Lembaga SMP Terakreditasi A		
			APS PAUD			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah dokumen kurikulum SD yang tersusun	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah dokumen kurikulum PAUD yang tersusun		
Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Menguatkan karakteristik kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	557.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TEMA NASIONAL	TEMA PROVINSI	TEMA KABUPATEN				
Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka meningkatkan Daya Saing daerah di Era Industri Perdagangan berbasis Agro	Stabilisasi dan Penguatan Perekonomian, Sosial dan Pelayanan Dasar				
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	Peningkatan layanan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perekonomian	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	32.063.750.388	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Panjang jalan kondisi sedang		
				Persentase Jumlah jembatan kondisi baik		
		Meningkatkan sarana prasarana penunjang produksi pertanian daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	1.305.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	7.245.489.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Optimalisasi pelayanan kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa siaga aktif purnama mandiri	1.638.288.800	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	33.893.902.488	(26 Puskesmas)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standart	13.711.703.450	RSUD Dolopo
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standart	27.330.075.550	RSUD Caruban
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	36.573.576.100	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi						
Prevalensi bayi stunting						

TEMA NASIONAL	TEMA PROVINSI	TEMA KABUPATEN				
Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka meningkatkan Daya Saing daerah di Era Industri Perdagangan berbasis Agro	Stabilisasi dan Penguatan Perekonomian, Sosial dan Pelayanan Dasar				
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan rumah sakit	30.613.000.000	RSUD Dolopo
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan rumah sakit	66.000.000.000	RSUD Caruban
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan puskesmas	17.035.985.597	(26 Puskesmas)
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	930.542.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Terselenggaranya kegiatan mitigasi bencana daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk	1.016.396.493	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase korban terdampak bencana yang ditangani		
Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan						
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan dengan ketentuan	718.008.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase kasus pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan sesuai ketentuan		

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD).

Program prioritas yang direncanakan pembiayaannya pada tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2022 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Madiun yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun Anggaran 2020 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Adapun Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran (Rp),00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	575.276.788.807
2	Dinas Kesehatan	147.159.905.967
3	RSUD Caruban	110.920.318.404
4	RSUD Dolopo	52.864.400.105
5	Dinas PU dan Penataan Ruang	84.478.098.849
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.922.089.575
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9.746.332.344

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran (Rp),00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7.969.560.935
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.269.923.020
10	Dinas Sosial	7.141.092.782
11	Dinas Tenaga Kerja	5.942.677.259
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	5.557.821.316
13	Dinas Lingkungan Hidup	18.150.315.651
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.938.050.993
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.786.072.915
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak	22.254.915.966
17	Dinas Perhubungan	23.190.829.900
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.561.237.504
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	12.469.088.333
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.080.365.549
21	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	7.618.840.415
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.542.455.997
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	29.272.164.518
24	Bagian Administrasi Pemerintahan	435.864.070
25	Bagian Hukum	381.995.696
26	Bag Pengadaan Barang dan Jasa	345.900.937
27	Bag Kesejahteraan Rakyat	5.424.566.211
28	Bag Perekonomian	676.672.729
29	Bag Umum dan KDH dan WKDH	22.833.780.335
30	Bag Organisasi	485.071.996
31	Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.002.618.723
32	Bag Administrasi Pembangunan	500.000.000

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran (Rp),00
33	Sekretariat DPRD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	62.465.302.315
34	Kecamatan Balerejo	2.555.130.418
35	Kecamatan Dagangan	2.863.632.374
36	Kecamatan Dolopo	4.010.520.760
37	Kelurahan Bangunsari Dolopo	516.426.500
38	Kelurahan Mlilir	520.000.000
39	Kecamatan Geger	2.704.905.160
40	Kecamatan Gemarang	1.966.255.022
41	Kecamatan Jiwan	2.912.314.860
42	Kecamatan Kebonsari	2.104.525.244
43	Kecamatan Kare	2.238.003.630
44	Kecamatan Madiun	3.840.755.132
45	Kelurahan Nglames	541.950.000
46	Kecamatan Mejayan	4.567.849.210
47	Kelurahan Bangunsari Mejayan	534.000.000
48	Kelurahan Krajan	541.500.000
49	Kelurahan Pandean	700.000.000
50	Kecamatan Pilangkenceng	2.200.735.515
51	Kecamatan Sawahan	2.737.392.689
52	Kecamatan Saradan	2.835.472.109
53	Kecamatan Wungu	4.433.612.685
54	Kelurahan Wungu	503.502.500
55	Kelurahan Munggut	523.050.000
56	Kecamatan Wonoasri	2.165.615.294
57	Inspektorat	5.645.108.774

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran (Rp),00
58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.480.062.335
59	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.213.133.478
60	PPKD BUD	394.541.849.790
61	Badan Pendapatan Daerah	8.847.187.899
62	Badan Kepegawaian Daerah	7.371.943.158
JUMLAH ANGGARAN		1.799.673.950.063

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		66,005,254	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			69,305,517
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Pertauran Perundang-undangan yang Tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84 exemplar		13,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,553,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		284,481,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			298,705,050
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					31,046,770							32,599,109
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		31,046,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,599,109
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					636,752,160							668,589,768
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		155,042,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			162,794,268
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pelayanan Umum yang Tersedia"		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34 orang		481,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			505,795,500
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					301,790,245							313,129,757
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Unit		125,260,905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			131,523,950
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Terpelihara		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		82 buah		5,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,237,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		95,589,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,368,807		
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			75,000,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								130,148,975,000				113,428,064,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								61,663,764,000				64,138,353,000		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang terbangun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 ruang		960,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			960,000,000		
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan sekolah yang terbangun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 ruang		1,456,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			1,456,000,000		
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 ruang		1,064,820,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			1,597,230,000		
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Ruang Kelas yang direhab		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 ruang		4,497,010,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			4,946,711,000		
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah ruang guru yang di rehab		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 ruang		1,183,092,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			1,577,456,000		
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang di rehab		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 ruang		1,183,092,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			1,577,456,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehab		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 ruang		450,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			540,000,000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah		jumlah mebel sekolah baru yang tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53 paket		848,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			960,000,000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		jumlah perlengkapan sekolah baru yang tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		205 set		1,000,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			1,500,000,000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa		jumlah siswa SD yang mendapatkan bantuan perlengkapan siswa		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 Siswa		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		jumlah siswa SD yang mendapatkan bantuan biaya personil		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 Siswa		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		jumlah alat praktik dan peraga siswa baru yang tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 set		3,330,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			3,330,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Angka kelulusan SD		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Prestasi Peserta didik SD di tingkat Kabupaten, Provinsi Nasional dan Internasional		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 orang		57,800,000	DAU Tambah untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan			57,800,000	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah PTK jenjang SD		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4229 orang		9,203,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			9,203,550,000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah PTK jenjang SD yang mengikuti PTK SD		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Orang		35,000,000	Dana Insentif Daerah			36,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Operasional SD yang terpenuhi		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		36,207,900,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			36,207,900,000
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah lembaga SD ditingkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS nya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		406 lembaga		37,500,000	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan			37,500,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								38,818,951,000				19,564,201,000
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan SMP yang bangun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Ruang		608,400,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			608,400,000
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Laboratorium SMP yang dibangun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Ruang		684,450,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			684,450,000
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP yang dibangun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Ruang		1,377,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			1,377,640,000
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas SMP yg direhab		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Ruang		8,995,550,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			8,995,550,000
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		jumlah ruang guru SMP yang direhab		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Ruang		1,603,426,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			1,603,426,000
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang UKS yang direhab		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Ruang		240,592,200	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			240,592,200
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan SMP yang direhab		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Ruang		674,431,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			674,431,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium SMP yang direhab		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Ruang		337,335,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			337,335,000	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP yang direhab		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Ruang		220,257,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			220,257,000	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Meubel SMP baru yang tersedia		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67 Unit		1,309,809,800	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			1,309,809,800	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		jumlah siswa SMP yang mendapatkan bantuan biaya personil		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 Siswa		175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			175,000,000	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa baru yang tersedia		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 Paket		1,425,960,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			1,425,960,000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Angka Kelulusan SMP		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		60,000,000	Dana Insentif Daerah			0	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah prestasi peserta didik SMP di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan International		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81 Siswa		150,000,000	Dana Insentif Daerah			160,000,000	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah PTK jenjang SMP		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1737 orang		1,666,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,666,900,000	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		jumlah PTK jenjang SMP yang meningkat karirnya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Orang		69,000,000	Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			72,450,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Operasional Sekolah yang Terpenuhi		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		19,208,200,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			0	
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah lembaga SMP ditingkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS nya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48 Sekolah		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								20,715,500,000				20,774,250,000	
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD baru yang tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		50,000,000	Dana Insentif Daerah			75,000,000	
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		jumlah Siswa PAUD yang mendapatkan bantuan perlengkapan siswa		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 Siswa		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		jumlah siswa PAUD yang mendapatkan bantuan biaya personil		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 Siswa		75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			75,000,000	
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD baru yang tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Unit		165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			173,250,000	
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20100 orang		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			125,000,000	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah PTK PAUD yang tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1972 orang		7,045,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,045,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		jumlah PTK PAUD yang meningkat karirnya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		158 Orang		510,000,000	Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			535,500,000
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Operasional PAUD yang terpenuhi		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		12,645,000,000	DAK Non Fisik - BOP PAUD			12,645,000,000
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		jumlah lembaga PAUD yang meningkat Pengelolaan Dana BOP PAUD nya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		688 Lembaga		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50,000,000
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								8,950,760,000				8,951,260,000
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		jumlah peserta didik PNF yang mendapatkan bantuan biaya personil		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		789 Orang		260,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			260,000,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik PNF yang terlayani		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1500 orang		110,000,000	Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			110,000,000
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah PTK PNF yang tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1500 orang		410,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			410,400,000
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		jumlah PTK PNF yang meningkat karirnya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Orang		10,000,000	Dana Insentif Daerah			10,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Lembaga PNF yang Dibina		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		223 lembaga		7,394,960,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			7,394,960,000	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Operasional BOP Kesetaraan yang terpenuhi		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Lembaga		760,400,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			760,400,000	
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		jumlah lembaga PNF yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dan BOP Kesetaraan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Lembaga		5,000,000	Dana Insentif Daerah			5,000,000	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								150,000,000			150,000,000		
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								150,000,000			150,000,000		
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal SD yang tersusun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		34,535,687	Dana Insentif Daerah			34,535,687	
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Silabus Muatan Lokal SD yang tersusun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		34,535,803	Dana Insentif Daerah			34,535,803	
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal SD yang tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5694 Buku		61,362,840	Dana Insentif Daerah			61,362,840	
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum Muatan Lokal SD yang tersusun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		180 Orang		19,565,670	Dana Insentif Daerah			19,565,670	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								2,926,750,000			2,926,750,000		
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								2,926,750,000			2,926,750,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Dokumen Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		9,000,000	Dana Insentif Daerah			9,000,000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Dokumen Penataan dan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		2,917,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,917,750,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										707,201,475		721,311,548	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN										557,500,000		564,125,000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										325,000,000		327,500,000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		PPST, PSP, Aubade dan tasyakuran, Gelar seni budaya insidental		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kegiatan		275,000,000	Dana Insentif Daerah			275,000,000	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Peningkatan Mutu SDM Seni Budaya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		50,000,000	Dana Insentif Daerah			52,500,000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										125,000,000		125,000,000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Pemajuan Tradisi Budaya yang di lestarikan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 Tradisi		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		jumlah SDM kesenian tradisional yang meningkat kompetensinya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		206 Orang		15,000,000	Dana Insentif Daerah			15,000,000	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		jumlah pelaku seni yang mendapatkan apresiasi		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang		10,000,000	Dana Insentif Daerah			10,000,000	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota										107,500,000		111,625,000	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Jumlah Obyek Pemajuan lembaga adat dibina		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 jenis		15,000,000	Dana Insentif Daerah			15,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Jumlah SDM dan lembaga yang dibina		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		10,000,000	Dana Insentif Daerah			10,000,000
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana baru yang tersedia		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 lembaga		82,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			86,625,000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								125,000,000				131,250,000
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								125,000,000				131,250,000
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Sejarah Lokal yang tersusun		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			105,000,000
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		jumlah peserta lawatan sejarah		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang		25,000,000	Dana Insentif Daerah			26,250,000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								24,701,475				25,936,548
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								24,701,475				25,936,548
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya		Penetapan Cagar Budaya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 CB		24,701,475	Dana Insentif Daerah			25,936,548
										TOTAL			575,276,788,807				558,647,523,701

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						95,351,144,626	99,471,263,718					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						55,176,100,046	55,176,100,028					
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						53,544,445,602	53,544,445,602					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %			53,351,945,602	53,351,945,602	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pemberian insentif pada dokter WKDS Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 % 100 %			192,500,000	192,500,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						496,585,463	496,585,463					
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100 %			25,000,000	25,000,000	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100 %			75,000,000	75,000,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga	100 %			150,000,000	150,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase kebutuhan barang cetak dan penggandaan terpenuhi	100 %			45,000,000	45,000,000	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Persentase terpenuhinya makan minum rapat, harian pegawai dan tamu	100 % 100 %			201,585,463	201,585,463	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									659,287,386	659,287,368		
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase kebutuhan surat menyurat terpenuhi	100 %			2,000,000	2,000,000	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase kebutuhan operasional jasa telepon air listrik dan internet terpenuhi	100 %			416,787,386	416,787,368	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Terpenuhinya bahan, jasa keamanan dan Kebersihan	100 %			240,500,000	240,500,000	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									475,781,595	475,781,595		
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan Persentase kendaraan dinas yang terbayar	100 % 100 % 100 %			150,000,000	150,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	atau Kendaraan Dinas Jabatan						pajaknya Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan dinas						
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	100 %			155,000,000	155,000,000	
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase terpenuhinya pemeliharaan alat rumah tangga Persentase terpenuhinya pemeliharaan peralatan komputer, AC dan sarana prasarana lainnya Persentase terpenuhinya pemeliharaan tower	100 % 100 % 100 %			170,781,595	170,781,595	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									36,573,576,100	40,685,698,802		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									5,571,841,370	9,633,358,678		
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			jumlah puskesmas yang dibangun	1 unit			1,200,000,000	5,000,000,000	
1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Kebutuhan operasional pelayanan Palang Merah Indonesia berjalan lancar	100 %			750,000,000	750,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwana, Jiwana			Pengadaan Alat kesehatan Puskesmas terpenuhi	80 %			1,313,482,692	1,550,000,000	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwana, Jiwana			Cakupan penggunaan Aplikasi E-Logistik obat di GFK sesuai ketentuan Jumlah pelaksanaan Distribusi Obat pada Puskesmas Berjalan Lancar Persentase pemenuhan bahan habis pakai dalam rangka pemeriksaan HIV Persentase Penunjang Pengadaan obat dan vaksin tercukupi Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat dan dan Vaksin	100 % 26 100 % 100 % 100 %			2,158,358,678	2,158,358,678	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwana, Jiwana			Pemeliharaan alat kesehatan tercapai	26 Puskesmas			150,000,000	175,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										30,377,101,230	30,427,706,624	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwana, Semuana, Kelurahan			Presentase Bayi baru lahir mendapat pelayanan Bayi baru lahir Presentase bumil mendapat pelayanan antenatal sesuai	100 % 93 %			26,903,479	26,903,479	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
							standart						
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwana, Semua Kelurahan			presentase bayi baru lahir mendapat pelayanan bayi baru lahir Presentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standart Presentase persalinan bagi masyarakat tidak mampu	100 % 100 % 100 %			1,532,178,270	1,532,178,270	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan									1,432,200	2,864,400	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Cakupan Posyandu Purnama Mandiri Presentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	75.14 % 100 %			1,432,200	2,864,400	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwana, Semua Kelurahan			Presentase Anak usia lanjut pendidikan pertama (kelas 7) yang mendapatkan skrining sesuai standart Presentase anak usia pendidikan dasar (kelas 1-9) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart Presentase anak usia pendidikan lanjut	100 % 91 % 100 % 66 %			72,168,450	72,168,450	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							tingkat atas (kelas 9) yang mendapat skrining kesehatan sesuai standart Presentase pelayanan kesehatan remaja sesuai standart						
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			presentase usia 14 - 59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	70 %			27,756,897	47,756,897	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	20 %			30,914,179	30,914,179	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	12 %			55,000,000	58,500,000	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 %			30,000,000	31,000,000	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Angka Keberhasilan pengobatan TBC (succes Rate) Presentase penderita TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 % 100 %			50,000,000	50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaa sesuai standart Persentase penderita HIV mendapatkan pengobatan sesuai standart Presentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan informasi/ edukasi tentang HIV ADIS dan layanan kesehatan sesuai standart	100 % 100 % 100 %			350,000,000	390,000,000	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rujukan dan Penjemputan Pasien Covid-19 dari Puskesmas ke RS atau sebaliknya oleh Petugas Puskesmas Persentase Pemenuhan Pembayaranan Klaim Rumah Sakit dalam Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kesehatan Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 Persentase Pemenuhan Pembayaranan Klaim Rumah Sakit dalam	100 % 100 % 100 % 100 %			1,000,000,000	1,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Penatalaksanaa Pemulasaran Jenasah Penderita Covid-19 yang Meninggal di Rumah						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Balita 6-59 Bulan Mendapat Kapsul Vitamin A Cakupan balita ditimbang (D/S) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan balita naik BB (N/D) di posyandu Cakupan bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif Cakupan Ibu Hamil Mendapat Fe3 Cakupan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A Cakupan kecamatan bebas rawan gizi Cakupan keluarga sadar gizi (Kadarzi) Cakupan Remaja Putri Mendapat TTD Capaian Rumah Tangga berPHBS Prevalensi balita stunting (TB/U)	90.1 % 80.2 % 100 % 75 % 69 % 90.1 % 90.1 % 84 % 90.3 % 26 % 51 % 20.2 %		2,577,160,397	2,577,160,397		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Cakupan Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani Cakupan Calon Jemaah	30 % 100 % 100 %		50,000,000	60,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
							Haji yang Diperiksa Kebugarannya Cakupan Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK						
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			cakupan desa STBM Cakupan Desa yang melaksanakan Program kabupaten Sehat Cakupan Fasyankes yang melaksanakan Pengelolaan Limbah sesuai Peraturan Cakupan Kecamatan yang melaksanakan Program kabupaten Sehat Cakupan keluarga dengan akses sanitasi aman Cakupan keluarga dengan akses sanitasi layak Cakupan keluarga yang memiliki akses air minum berkualitas Cakupan TTU yang memenuhi syarat	0.5 % 60 % 80 % 100 % 10 % 100 % 94 % 83 %			669,124,100	736,036,512	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan Desa STBM Cakupan desa yang melaksanakan program kabupaten sehat Cakupan kecamatan yang melaksanakan program kabupaten sehat	100 % 0.5 % 60 % 100 % 100 % 94 % 75.14 % 100 % 51 %			150,000,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Cakupan Keluarga dengan Akses Sanitasi yang Aman Cakupan Keluarga dengan Akses Sanitasi yang Layak Cakupan Keluarga yang Memiliki Akses Air Minum Berkualitas Cakupan Posyandu Purnama Mandiri Cakupan Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK Cakupan Rumah tangga Ber PHBS Cakupan Tempat Pengolahan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang Mendapatkan Stiker Pembinaan Cakupan TPM yang Memenuhi Syarat Cakupan TTU yang memenuhi syarat Cakupan yasyankes yang melakukan pengolahan limbah yang memenuhi syarat presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart						
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Jiwon, Jiwon			Persentase terbentuknya kelompok Asuhan	20 % 60 % 45 %			133,118,640	133,118,640	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pendidikan dan Kesehatan					Mandiri (ASMAN) Presentase pembinaan ke penyehat tradisional Presentase penyehat tradisional yang memiliki STPT						
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Non Polio Persentase kelengkapan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini Dan Respon (SKDR) Persentase ketepatan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Persentase KLB di Desa/ Kelurahan yang Ditanggulangi Kurang dari 24 Jam Persentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Persentase Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Terhadap Sasaran yang Terdaftar Persentase Penanganan Kasus Konfirmasi	80 persen 93.6 persen 85 persen 3 orang 90 persen 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen		274,159,750	301,575,725		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
							Covid-19						
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwana, Jiwana			Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 persen			51,969,400	57,000,000	
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwana, Jiwana			Persentase Penanggulangan Bencana dan krisis kesehatan	89 %			523,251,280	523,251,280	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwana, Jiwana			Angka keberhasilan penanganan penderita Malaria (API) Angka kesakitan Demam Berdarah per 100.000 penduduk Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai	1 o/oo 48 Angka 100 % 12 % 21 % 15 % 100 persen 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			893,233,684	982,300,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							standar Persentase Angka Bebas Jentik Persentase kasus DBD yang ditindak lanjuti sesuai kriteria Persentase penderita Diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standart Persentase penderita Hepatitis yang mendapatkan pelayanan sesuai standart Persentase penderita HIV yang mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan sesuai standart Persentase penderita Kecacangan yang mendapatkan pelayanan sesuai standart Persentase penderita kusta mendapatkan pelayanan sesuai standart Persentase penderita pnemonia balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standart Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan dan						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							pengobatan (succes rate) sesuai standart						
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan didaftarkan sebagai peserta PBID, yang kartunya belum aktif Persentase masyarakat miskin yang menjadi PBID	100 % 17 %			20,173,751,379	20,173,751,379	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase Kasus KLB dan Penyakit Potensial Wabah yang spesimennya dikirim ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 %			15,000,000	0	
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prosentase Puskesmas yang terakreditasi	100 %			1,690,390,000	1,690,390,000	
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan									500,000,000	500,000,000	
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									624,633,500	624,633,500		
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan					Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasyankes lainnya yang beroperasi sesuai	170 Fasyankes			0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
	Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kesehatan					dengan peraturan yang berlaku						
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						Prosentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan	26.92 %			205,898,500	205,898,500	
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwon, Jiwon			Persentase anak yang mendapat pelayanan khitanan massal Persentase ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan pengobatan massal Persentase pelayanan kesehatan rujukan Persentase penanggulangan bencana Persentase RS yang terakreditasi	100 % 100 % 94 % 20 % 89 % 100 %			418,735,000	418,735,000	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									1,644,086,490	1,644,086,490		
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota									28,000,000	28,000,000		
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwon, Jiwon			Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan Rekomendasi Izin Praktek Jumlah Tenaga Kesehatan yang menjalankan prakteknya sesuai peraturan yang berlaku	1000 Tenaga Kesehatan 2000 Tenaga Kesehatan			28,000,000	28,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								1,338,870,490	1,338,870,490			
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan	50 orang			10,000,000	10,000,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Jumlah Dokter Umum yang Diberi Honor BK Khusus Bidang Kesehatan Jumlah Perawat Ponkesdes yang Diberi Honor BK Khusus Bidang Kesehatan	2 Orang 40 Orang			1,303,410,490	1,303,410,490	
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Jumlah Dokter Internsip yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia Jumlah Fasyankes yang melaporkannya Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan yang dinilai angka kreditnya	7 orang 170 Fasyankes 150 orang			25,460,000	25,460,000	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								277,216,000	277,216,000			
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jabatan Fungsional Kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi Jumlah Petugas mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Jumlah Petugas Pengelola Kefarmasian	50 orang 33 orang 171 orang			277,216,000	277,216,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							yang memperoleh bimtek						
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									319,093,190	327,089,598		
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									20,410,000	20,410,000		
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin	80 Data Sarana		20,410,000	20,410,000		
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									171,745,000	177,216,000		
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Jumlah Kegiatan Pengkajian Sertifikasi Produksi Jumlah Kegiatan Pengkajian Sertifikasi Produksi Jumlah Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan	1 kegiatan 200 PIRT 200 orang		171,745,000	177,216,000		
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									18,253,990	20,079,398		
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan					Cakupan DAM yang memenuhi syarat Cakupan TPM yang memenuhi syarat	56 % 37 %		18,253,990	20,079,398		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kesehatan											
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									7,000,000	7,700,000		
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						Cakupan tempat pengelolaan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan stiker pembinaan	6 %			7,000,000	7,700,000	
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga									101,684,200	101,684,200		
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sampel Makanan Industri Rumah Tangga Pangan yang diuji laboratoriumkan	62 sampel			101,684,200	101,684,200	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									1,638,288,800	1,638,288,800		
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									289,756,800	289,756,800		
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah distributor pangan olahan tersosialisasi Keamanan Pangan Jumlah Pondok Pesantren yang didampingi	40 orang 10 Ponpes 360 orang			289,756,800	289,756,800	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Jumlah Sasaran yang mengikuti yang mengikuti KIE						
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,348,532,000	1,348,532,000		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwana, Jiwana			Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A Cakupan Balita ditimbang di Posyandu (D/S) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Balita Naik berat badan di Posyandu (N/D) Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif Cakupan calon jemaah haji yang diperiksa kebugarannya Cakupan DAM yang Memenuhi Syarat Cakupan Desa STBM Cakupan Fasyankes yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah sesuai Peraturan Cakupan ibu hamil mendapat Fe 3 Cakupan Ibu nifas mendapat Vitamin A Cakupan kecamatan bebas rawan gizi Cakupan Keluarga berperilaku Sadar Gizi (kadarzi)	90.1 % 80.2 % 100 % 75.5 % 69 % 100 % 56 % 0.5 % 80 % 90.1 % 90.1 % 84 % 90.3 % 10 % 100 % 94 % 100 % 26 % 51 % 6 % 37 % 83 % 100 % 50 %			1,348,532,000	1,348,532,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Cakupan Keluarga dengan Akses Sanitasi Aman Cakupan Keluarga dengan Akses Sanitasi Layak Cakupan Keluarga yang Memiliki Akses Air Minum Berkualitas Cakupan puskesmas yang terbentuk pos UKK Cakupan remaja putri mendapat TTD cakupan rumah tangga ber PHBS Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang Mendapatkan Stiker Pembinaan Cakupan TPM yang Memenuhi Syarat Cakupan TTU yang Memenuhi Syarat Presentase kegiatan BOK UKM Kabupaten Berjalan lancar Presentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan						
TOTAL									95,351,144,626	99,471,263,718			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,532,669,707	1,558,794,279					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						870,819,707	896,944,279					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						870,819,707	896,944,279					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kebonsari	100 %			870,819,707	896,944,279	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						618,286,669	618,286,669					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						618,286,669	618,286,669					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			16,005,871	16,005,871	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			2,872,039	2,872,039	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			2,872,039	2,872,039	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			39,757,732	39,757,732	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Kebon Sari,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			34,796,388	34,796,388	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Kebonsari			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			10,052,135	10,052,135	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			237,723,060	237,723,060	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			2,154,029	2,154,029	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			4,503,767	4,503,767	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			40,979,887	40,979,887	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			19,985,357	19,985,357	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			18,800,672	18,800,672	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			8,616,116	8,616,116	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			96,232,883	96,232,883	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			82,934,694	82,934,694	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										35,900,482	35,900,482	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										35,900,482	35,900,482	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			35,900,482	35,900,482	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										7,662,849	7,662,849	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										7,662,849	7,662,849	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Kebonsari			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			7,662,849	7,662,849	
TOTAL											1,532,669,707	1,558,794,279	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Gantrung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,811,342,500	1,839,342,500					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,135,590,000	1,163,590,000					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,135,590,000	1,163,590,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gantrung	100 %			1,135,590,000	1,163,590,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						581,487,316	581,487,316					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						581,487,316	581,487,316					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			11,096,804	11,096,804	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			1,950,712	1,950,712	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			1,517,052	1,517,052	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			36,828,881	36,828,881	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Kebon Sari,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			47,520,795	47,520,795	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Gantrung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Sidorejo			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			12,436,036	12,436,036	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			3,250,826	3,250,826	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			4,496,976	4,496,976	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			2,399,760	2,399,760	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			241,343,832	241,343,832	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			17,119,718	17,119,718	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Kebon Sari,			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	100 %			36,990,718	36,990,718	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Gantrung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan		Sidorejo			Olahraga di puskesmas						
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			9,590,804	9,590,804	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			31,032,712	31,032,712	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			3,643,526	3,643,526	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			4,226,291	4,226,291	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			23,877,915	23,877,915	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional di puskesmas	100 %			13,057,702	13,057,702	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Gantrung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			79,106,256	79,106,256	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										94,265,184	94,265,184	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										94,265,184	94,265,184	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Sidorejo			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan tehnis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			94,265,184	94,265,184	
TOTAL											1,811,342,500	1,839,342,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,904,012,750	1,914,012,750					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,200,000,000	1,210,000,000					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,200,000,000	1,210,000,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Purworejo			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Geger	100 %			1,200,000,000	1,210,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						680,842,499	680,842,499					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						680,842,499	680,842,499					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			42,953,374	42,953,374	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			9,613,771	9,613,771	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			6,214,427	6,214,427	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			58,400,208	58,400,208	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Geger,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			50,363,414	50,363,414	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Geger			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			12,269,509	12,269,509	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			2,124,590	2,124,590	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di puskesmas	100 %			2,124,590	2,124,590	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			7,595,410	7,595,410	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			3,346,230	3,346,230	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			1,062,295	1,062,295	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	100 %			250,621,987	250,621,987	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Biasa (KLB)	Kesehatan					Biasa (KLB) di puskesmas						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			14,306,460	14,306,460	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			17,127,916	17,127,916	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			16,262,146	16,262,146	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			23,364,651	23,364,651	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			8,298,119	8,298,119	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			3,877,377	3,877,377	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di	100 %			79,147,364	79,147,364	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Kesehatan					puskesmas						
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			68,953,579	68,953,579	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			2,815,082	2,815,082	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									9,295,083	9,295,083		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									9,295,083	9,295,083		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			9,295,083	9,295,083	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									13,875,168	13,875,168		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									13,875,168	13,875,168		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Geger			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan tehnis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			13,875,168	13,875,168	
TOTAL										1,904,012,750	1,914,012,750		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kaibon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,679,745,882	1,756,921,575					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,027,523,132	1,104,698,825					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,027,523,132	1,104,698,825					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kaibon	100 %			1,027,523,132	1,104,698,825	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						615,286,290	615,286,290					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						615,286,290	615,286,290					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			21,449,072	21,449,072	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			31,392,752	31,392,752	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			5,984,571	5,984,571	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			62,939,423	62,939,423	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Geger,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			25,757,176	25,757,176	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kaibon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Kaibon			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			13,859,008	13,859,008	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			3,412,256	3,412,256	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			3,149,774	3,149,774	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			223,500,805	223,500,805	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			14,698,948	14,698,948	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			16,688,219	16,688,219	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Geger,			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di	100 %			21,317,674	21,317,674	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kaibon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan		Kaibon			puskesmas						
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			42,464,000	42,464,000	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			25,618,166	25,618,166	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			4,038,011	4,038,011	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			49,952,651	49,952,651	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			48,958,792	48,958,792	
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon			Persentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah di puskesmas	100 %			104,992	104,992	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										18,373,684	18,373,684	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										18,373,684	18,373,684	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Mlilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,034,559,250	1,036,559,250					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						499,196,500	501,196,500					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						499,196,500	501,196,500					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mlilir	100 %			499,196,500	501,196,500	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						531,203,892	531,203,892					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						531,203,892	531,203,892					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			21,263,313	21,263,313	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			4,074,649	4,074,649	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			1,901,503	1,901,503	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			55,822,697	55,822,697	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Dolopo,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			25,165,397	25,165,397	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Mlilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Mlilir			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			22,003,107	22,003,107	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			905,478	905,478	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			187,376,079	187,376,079	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			3,984,102	3,984,102	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			8,954,268	8,954,268	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			24,084,256	24,084,256	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Dolopo,			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di	100 %			48,175,214	48,175,214	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Mlilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan		Mlilir			puskesmas						
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			5,083,170	5,083,170	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			14,397,094	14,397,094	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			43,591,032	43,591,032	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional di puskesmas	100 %			18,109,553	18,109,553	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			45,769,693	45,769,693	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	100 %			543,287	543,287	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Mlilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Massal)						Massal) di puskesmas						
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									4,158,858	4,158,858		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									4,158,858	4,158,858		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			4,158,858	4,158,858	
TOTAL										1,034,559,250	1,036,559,250		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bangunsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,809,859,694	1,831,963,638					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,105,197,194	1,127,301,138					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,105,197,194	1,127,301,138					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bangunsari	100 %			1,105,197,194	1,127,301,138	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						680,682,922	680,682,922					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						680,682,922	680,682,922					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			32,515,809	32,515,809	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			15,629,006	15,629,006	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			52,882,827	52,882,827	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			27,712,992	27,712,992	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Dolopo,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			68,838,967	68,838,967	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bangunsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Bangunsari			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			11,993,622	11,993,622	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			1,245,528	1,245,528	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			3,321,407	3,321,407	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			467,073	467,073	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			251,679,864	251,679,864	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			11,676,822	11,676,822	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Dolopo,			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	100 %			15,938,712	15,938,712	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bangunsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan		Bangunsari			Olahraga di puskesmas						
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			11,376,027	11,376,027	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			5,589,513	5,589,513	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			8,607,012	8,607,012	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			117,972,727	117,972,727	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			42,612,250	42,612,250	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			622,764	622,764	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										10,379,398	10,379,398	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										10,379,398	10,379,398	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bangunsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			10,379,398	10,379,398	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										13,600,180	13,600,180	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										13,600,180	13,600,180	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			13,600,180	13,600,180	
TOTAL											1,809,859,694	1,831,963,638	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,330,864,495	2,443,389,740					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,607,503,495	1,720,028,740					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,607,503,495	1,720,028,740					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dagangan	100 %			1,607,503,495	1,720,028,740	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						669,045,763	669,045,763					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						669,045,763	669,045,763					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			56,539,607	56,539,607	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			17,166,233	17,166,233	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			4,337,279	4,337,279	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			15,082,006	15,082,006	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Dagangan,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			61,834,596	61,834,596	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Dagangan			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			6,270,765	6,270,765	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			10,973,839	10,973,839	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di puskesmas	100 %			9,406,148	9,406,148	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			1,828,973	1,828,973	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			5,643,689	5,643,689	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			209,026	209,026	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	100 %			254,551,038	254,551,038	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
	Biasa (KLB)	Kesehatan					Biasa (KLB) di puskesmas						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			24,286,685	24,286,685	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			12,314,822	12,314,822	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			17,332,521	17,332,521	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			34,765,878	34,765,878	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			1,895,652	1,895,652	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			7,472,662	7,472,662	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di	100 %			102,576,093	102,576,093	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
		Kesehatan					puskesmas						
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional di puskesmas	100 %			9,197,122	9,197,122	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			8,776,825	8,776,825	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			4,232,767	4,232,767	
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah di puskesmas	100 %			2,351,537	2,351,537	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									22,992,806	22,992,806		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									22,992,806	22,992,806		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			22,992,806	22,992,806	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									31,322,431	31,322,431		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									31,322,431	31,322,431		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Dagangan			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			31,322,431	31,322,431	
TOTAL										2,330,864,495	2,443,389,740		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Prioritas Pembangunan Nasional		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,813,189,750	1,813,189,750					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,084,932,000	1,084,932,000					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,084,932,000	1,084,932,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jetis	100 %			1,084,932,000	1,084,932,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						674,161,285	674,161,285					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						674,161,285	674,161,285					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			8,265,257	8,265,257	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			13,289,237	13,289,237	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			8,427,321	8,427,321	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			74,072,694	74,072,694	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Dagangan,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			15,891,226	15,891,226	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Jetis			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			3,457,362	3,457,362	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			3,889,533	3,889,533	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			1,944,766	1,944,766	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			258,295,877	258,295,877	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			21,500,473	21,500,473	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			28,155,031	28,155,031	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Dagangan,			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di	100 %			19,364,471	19,364,471	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
		Pendidikan dan Kesehatan		Jetis			puskesmas						
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			12,636,098	12,636,098	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			5,186,044	5,186,044	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			157,532,422	157,532,422	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional di puskesmas	100 %			10,804,258	10,804,258	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			29,720,534	29,720,534	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	100 %			1,728,681	1,728,681	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Massal)						Massal) di puskesmas						
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									18,907,451	18,907,451		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									18,907,451	18,907,451		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			18,907,451	18,907,451	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									35,189,014	35,189,014		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									35,189,014	35,189,014		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			35,189,014	35,189,014	
TOTAL										1,813,189,750	1,813,189,750		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,640,407,750	1,647,407,750					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,056,000,000	1,063,000,000					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,056,000,000	1,063,000,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wungu	100 %			1,056,000,000	1,063,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						555,010,180	555,010,180					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						555,010,180	555,010,180					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			24,236,386	24,236,386	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			9,610,866	9,610,866	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			9,356,610	9,356,610	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			13,628,106	13,628,106	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Wungu,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			26,703,836	26,703,836	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Wungu			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			18,662,369	18,662,369	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			10,170,228	10,170,228	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			204,542,713	204,542,713	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			46,480,587	46,480,587	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			3,535,171	3,535,171	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			30,778,650	30,778,650	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Wungu,			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di	100 %			34,300,396	34,300,396	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan		Wungu			puskesmas						
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			4,611,385	4,611,385	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			63,902,086	63,902,086	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			54,490,791	54,490,791	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									7,627,671	7,627,671		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									7,627,671	7,627,671		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			7,627,671	7,627,671	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									21,769,899	21,769,899		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									21,769,899	21,769,899		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Wungu			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			21,769,899	21,769,899	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
TOTAL									1,640,407,750	1,647,407,750			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Mojopurno

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,733,261,669	1,756,658,652					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,169,849,169	1,193,246,152					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,169,849,169	1,193,246,152					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mojopurno	100 %			1,169,849,169	1,193,246,152	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						519,940,391	519,940,391					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						519,940,391	519,940,391					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			24,613,529	24,613,529	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			8,309,136	8,309,136	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			11,024,406	11,024,406	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			47,925,545	47,925,545	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Wungu,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			25,891,135	25,891,135	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Mojopurno

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Mojopurno			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			19,983,778	19,983,778	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			13,372,197	13,372,197	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di puskesmas	100 %			13,372,197	13,372,197	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			5,212,584	5,212,584	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			1,429,090	1,429,090	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			197,194,375	197,194,375	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Wungu,			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di	100 %			24,451,470	24,451,470	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Mojopurno

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan		Mojopurno			puskesmas						
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			6,646,441	6,646,441	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			4,455,698	4,455,698	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			29,663,303	29,663,303	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			4,950,775	4,950,775	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			40,994,225	40,994,225	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			40,450,507	40,450,507	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									35,727,243	35,727,243		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									35,727,243	35,727,243		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Mojopurno

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			35,727,243	35,727,243	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										7,744,866	7,744,866	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										7,744,866	7,744,866	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wungu, Mojopurno			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			7,744,866	7,744,866	
TOTAL											1,733,261,669	1,756,658,652	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,894,198,527	3,002,838,366					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,172,796,777	2,281,436,616					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						2,172,796,777	2,281,436,616					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kare	100 %			2,172,796,777	2,281,436,616	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						696,080,561	696,080,561					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						696,080,561	696,080,561					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			19,642,655	19,642,655	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			5,360,847	5,360,847	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			8,637,124	8,637,124	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			19,865,385	19,865,385	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di	100 %			17,538,328	17,538,328	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
		Pendidikan dan Kesehatan					puskesmas						
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			4,750,418	4,750,418	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			253,138,397	253,138,397	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			89,302,896	89,302,896	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			6,697,334	6,697,334	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			21,568,248	21,568,248	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			64,671,738	64,671,738	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di	100 %			39,168,494	39,168,494	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan					puskesmas						
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			863,712	863,712	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			63,430,607	63,430,607	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			80,472,702	80,472,702	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			971,676	971,676	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									21,592,810	21,592,810		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									21,592,810	21,592,810		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			21,592,810	21,592,810	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									3,728,379	3,728,379		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									3,728,379	3,728,379		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Kare			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			3,728,379	3,728,379	
TOTAL											2,894,198,527	3,002,838,366	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,381,456,461	3,461,196,272					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,657,993,711	2,737,733,522					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						2,657,993,711	2,737,733,522					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gemarang	100 %			2,657,993,711	2,737,733,522	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						689,318,971	689,318,971					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						689,318,971	689,318,971					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			32,439,321	32,439,321	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			13,699,404	13,699,404	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										7,773,510	7,773,510	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			69,603,549	69,603,549	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di puskesmas	100 %			19,853,966	19,853,966	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			9,139,127	9,139,127	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			5,252,372	5,252,372	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			6,828,083	6,828,083	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			5,987,704	5,987,704	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			2,363,567	2,363,567	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			255,417,959	255,417,959	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			37,089,581	37,089,581	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			16,348,953	16,348,953	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			22,938,772	22,938,772	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			56,960,236	56,960,236	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			735,332	735,332	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			1,785,806	1,785,806	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			52,220,384	52,220,384	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	100 %			8,403,795	8,403,795	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
							Rujukan/Nasional di puskesmas						
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			64,477,550	64,477,550	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										18,383,301	18,383,301	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										18,383,301	18,383,301	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			18,383,301	18,383,301	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										15,760,478	15,760,478	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										15,760,478	15,760,478	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Gemarang, Gemarang			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			15,760,478	15,760,478	
TOTAL											3,381,456,461	3,461,196,272	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,215,463,604	3,464,197,689					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,487,340,856	2,736,074,941					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						2,487,340,856	2,736,074,941					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Saradan	100 %			2,487,340,856	2,736,074,941	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						671,108,027	671,108,027					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						671,108,027	671,108,027					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			9,309,957	9,309,957	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			8,083,382	8,083,382	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			9,807,400	9,807,400	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			14,067,185	14,067,185	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Saradan,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			14,067,185	14,067,185	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Sugihwaras			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			45,456,618	45,456,618	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			734,853	734,853	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			8,232,715	8,232,715	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			1,689,112	1,689,112	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			254,962,481	254,962,481	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			19,835,707	19,835,707	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Saradan,			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	100 %			673,209	673,209	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
		Pendidikan dan Kesehatan		Sugihwaras			Olahraga di puskesmas						
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			12,903,692	12,903,692	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			25,126,822	25,126,822	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			40,311,933	40,311,933	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			3,306,838	3,306,838	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			140,903,116	140,903,116	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Saradan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	100 %			61,635,822	61,635,822	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										41,991,597	41,991,597	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										41,991,597	41,991,597	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			41,991,597	41,991,597	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										15,023,124	15,023,124	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										15,023,124	15,023,124	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			15,023,124	15,023,124	
TOTAL											3,215,463,604	3,464,197,689	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sumber Sari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,747,332,250	2,890,561,250					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,046,135,000	2,189,364,000					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						2,046,135,000	2,189,364,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumber Sari			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sumber Sari	100 %			2,046,135,000	2,189,364,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						652,745,928	652,745,928					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						652,745,928	652,745,928					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumber Sari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			43,911,043	43,911,043	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumber Sari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			27,656,310	27,656,310	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumber Sari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			4,011,221	4,011,221	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumber Sari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			24,806,233	24,806,233	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Saradan,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			24,865,303	24,865,303	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sumpalsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Sumpalsari			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			31,833,047	31,833,047	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			8,972,467	8,972,467	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di puskesmas	100 %			8,442,405	8,442,405	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			14,039,272	14,039,272	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			1,688,935	1,688,935	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			291,611,779	291,611,779	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			27,550,752	27,550,752	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sumpalsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Kesehatan											
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			4,116,779	4,116,779	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			24,940,587	24,940,587	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			69,033,719	69,033,719	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			5,066,805	5,066,805	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			1,688,935	1,688,935	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			6,439,065	6,439,065	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpalsari			Persentase pelaksanaan kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	100 %			5,277,922	5,277,922	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sumpsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Laboratorium Rujukan/Nasional di puskesmas						
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpsi			Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sumpsi (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	100 %			22,993,245	22,993,245	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpsi			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			3,800,104	3,800,104	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									18,472,726	18,472,726		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									18,472,726	18,472,726		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpsi			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			18,472,726	18,472,726	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									29,978,596	29,978,596		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									29,978,596	29,978,596		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpsi			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			29,978,596	29,978,596	
TOTAL										2,747,332,250	2,890,561,250		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,392,842,157	2,443,909,939					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,702,259,409	1,753,327,191					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,702,259,409	1,753,327,191					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pilangkenceng	100 %			1,702,259,409	1,753,327,191	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						690,582,748	690,582,748					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						690,582,748	690,582,748					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			13,263,023	13,263,023	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			13,979,798	13,979,798	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			6,409,006	6,409,006	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			26,597,890	26,597,890	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di puskesmas	100 %			41,177,344	41,177,344	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			25,739,393	25,739,393	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			206,742	206,742	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			4,444,955	4,444,955	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			361,799	361,799	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			242,737,673	242,737,673	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			95,337,420	95,337,420	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			12,961,904	12,961,904	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			9,114,846	9,114,846	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			12,070,121	12,070,121	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			16,280,941	16,280,941	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			1,498,880	1,498,880	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			97,314,805	97,314,805	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase pelaksanaan kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional di puskesmas	100 %			17,056,224	17,056,224	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pilangkenceng (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	100 %			53,564,814	53,564,814	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Kenongorejo			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			465,170	465,170	
TOTAL											2,392,842,157	2,443,909,939	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Krebet

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,041,326,750	2,091,326,750					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,412,259,000	1,462,259,000					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,412,259,000	1,462,259,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Krebet			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Krebet	100 %			1,412,259,000	1,462,259,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						598,002,655	598,002,655					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						598,002,655	598,002,655					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Krebet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			22,688,470	22,688,470	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Krebet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			13,748,491	13,748,491	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Krebet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			5,496,139	5,496,139	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Krebet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			4,681,896	4,681,896	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Pilangkeng			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			13,231,447	13,231,447	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Kregbet

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		ng, Kregbet			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			6,412,163	6,412,163	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			3,206,081	3,206,081	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di puskesmas	100 %			3,206,081	3,206,081	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			508,902	508,902	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			2,748,070	2,748,070	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			916,023	916,023	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	100 %			227,501,898	227,501,898	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Kregbet

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Biasa (KLB)	Kesehatan					Biasa (KLB) di puskesmas						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			15,964,951	15,964,951	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			11,837,870	11,837,870	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			14,950,313	14,950,313	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			9,710,050	9,710,050	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			23,051,623	23,051,623	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			4,014,014	4,014,014	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Pilangkeng, Kregbet			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di	100 %			115,649,255	115,649,255	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Krebet

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Kesehatan					puskesmas						
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkencing, Krebet			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			92,982,779	92,982,779	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkencing, Krebet			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			5,496,139	5,496,139	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									17,811,563	17,811,563		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									17,811,563	17,811,563		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkencing, Krebet			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			17,811,563	17,811,563	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									13,253,532	13,253,532		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									13,253,532	13,253,532		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkencing, Krebet			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			13,253,532	13,253,532	
TOTAL											2,041,326,750	2,091,326,750	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,981,942,750	2,045,942,750					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,273,000,000	1,337,000,000					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,273,000,000	1,337,000,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mejayan	100 %			1,273,000,000	1,337,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						675,707,000	675,707,000					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						675,707,000	675,707,000					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			27,735,555	27,735,555	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			28,197,369	28,197,369	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			17,898,852	17,898,852	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			12,544,367	12,544,367	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Mejayan,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			40,301,682	40,301,682	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Mejayan			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			6,182,820	6,182,820	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			21,507,712	21,507,712	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di puskesmas	100 %			8,523,790	8,523,790	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			8,709,532	8,709,532	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			8,108,768	8,108,768	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			2,898,712	2,898,712	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	100 %			248,129,963	248,129,963	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Biasa (KLB)	Kesehatan					Biasa (KLB) di puskesmas						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			15,646,141	15,646,141	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			3,989,980	3,989,980	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			16,077,599	16,077,599	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			108,347,618	108,347,618	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			3,918,877	3,918,877	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Mejayan (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	100 %			87,507,339	87,507,339	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	100 %			1,236,564	1,236,564	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
	Imunisasi dan Pemberian Obat (Massal)	Kesehatan					Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat (Massal) di puskesmas						
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah di puskesmas	100 %			8,243,760	8,243,760	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									30,914,100	30,914,100		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									30,914,100	30,914,100		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			30,914,100	30,914,100	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									2,321,650	2,321,650		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									2,321,650	2,321,650		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			2,321,650	2,321,650	
TOTAL										1,981,942,750	2,045,942,750		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Klecorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,204,877,397	2,238,410,810					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,212,518,255	1,246,051,668					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,212,518,255	1,246,051,668					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Klecorejo	100 %			1,212,518,255	1,246,051,668	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						992,359,142	992,359,142					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						992,359,142	992,359,142					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			17,068,389	17,068,389	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			5,828,088	5,828,088	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			4,735,322	4,735,322	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			34,453,264	34,453,264	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Mejayan,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			26,670,164	26,670,164	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Klecorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Klecorejo			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			12,368,556	12,368,556	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			728,511	728,511	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			190,151,941	190,151,941	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			20,693,772	20,693,772	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			34,290,806	34,290,806	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			15,997,061	15,997,061	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di	100 %			18,222,350	18,222,350	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Klecorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							puskesmas						
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			31,221,901	31,221,901	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			3,278,300	3,278,300	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			44,391,195	44,391,195	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klecorejo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	100 %			530,802,500	530,802,500	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			1,457,022	1,457,022	
TOTAL											2,204,877,397	2,238,410,810	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,133,326,496	2,233,167,759					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,426,303,746	1,526,145,009					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,426,303,746	1,526,145,009					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wonoasri	100 %			1,426,303,746	1,526,145,009	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						686,751,566	686,751,566					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						686,751,566	686,751,566					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			26,054,347	26,054,347	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										7,853,225	7,853,225	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										13,972,620	13,972,620	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										30,698,969	30,698,969	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di puskesmas	100 %			33,672,995	33,672,995	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			23,450,626	23,450,626	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Kesehatan											
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			5,099,496	5,099,496	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di puskesmas	100 %			5,099,496	5,099,496	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			3,059,698	3,059,698	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			12,373,418	12,373,418	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			3,059,698	3,059,698	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			247,478,564	247,478,564	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			22,102,880	22,102,880	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
		Kesehatan											
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			11,833,586	11,833,586	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			43,905,745	43,905,745	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			23,952,381	23,952,381	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			1,019,899	1,019,899	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			83,589,386	83,589,386	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			15,298,489	15,298,489	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			65,526,803	65,526,803	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			7,649,245	7,649,245	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										20,271,184	20,271,184	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										20,271,184	20,271,184	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			20,271,184	20,271,184	
TOTAL											2,133,326,496	2,233,167,759	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,075,712,848	4,155,309,622					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,653,225,815	2,732,822,589					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						2,653,225,815	2,732,822,589					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Balerejo	100 %			2,653,225,815	2,732,822,589	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,364,486,376	1,364,486,376					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,364,486,376	1,364,486,376					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			31,941,506	31,941,506	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			14,562,294	14,562,294	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			7,254,349	7,254,349	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			22,737,513	22,737,513	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di puskesmas	100 %			11,043,935	11,043,935	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			11,172,131	11,172,131	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
		Kesehatan											
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			27,068,467	27,068,467	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di puskesmas	100 %			10,286,018	10,286,018	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			1,095,699	1,095,699	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			26,951,527	26,951,527	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			264,158,738	264,158,738	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			35,035,475	35,035,475	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			5,712,064	5,712,064	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			31,980,924	31,980,924	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			23,554,656	23,554,656	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			1,624,108	1,624,108	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			10,015,333	10,015,333	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			70,304,173	70,304,173	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo			Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balerejo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	100 %			754,739,250	754,739,250	
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah di puskesmas	100 %			3,248,216	3,248,216	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										37,895,854	37,895,854	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										37,895,854	37,895,854	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			37,895,854	37,895,854	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										20,104,803	20,104,803	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										20,104,803	20,104,803	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan					Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			20,104,803	20,104,803	
TOTAL											4,075,712,848	4,155,309,622	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Simo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,475,573,247	1,487,273,247					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						911,480,748	923,180,748					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						911,480,748	923,180,748					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Simo	100 %			911,480,748	923,180,748	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						523,629,430	523,629,430					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						523,629,430	523,629,430					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			28,657,620	28,657,620	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			11,178,866	11,178,866	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			8,527,959	8,527,959	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			15,989,923	15,989,923	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Balerejo,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			16,371,126	16,371,126	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Simo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Simo			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			11,206,753	11,206,753	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			18,369,916	18,369,916	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			5,930,503	5,930,503	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			7,214,813	7,214,813	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			785,265	785,265	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			197,432,375	197,432,375	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Balerejo,			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di	100 %			18,527,790	18,527,790	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Simo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan		Simo			puskesmas						
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			21,356,034	21,356,034	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			17,868,792	17,868,792	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			61,003,421	61,003,421	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			14,071,132	14,071,132	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			14,492,733	14,492,733	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Simo (DAK Non Fisik) Berjalan Lancar	100 %			54,644,409	54,644,409	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									40,463,069	40,463,069		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									40,463,069	40,463,069		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Simo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Balerejo, Simo			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			40,463,069	40,463,069	
TOTAL											1,475,573,247	1,487,273,247	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,205,514,060	1,236,575,499					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						672,961,810	704,023,249					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						672,961,810	704,023,249					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Madiun	100 %			672,961,810	704,023,249	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						523,108,005	523,108,005					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						523,108,005	523,108,005					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			20,360,165	20,360,165	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			18,055,679	18,055,679	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			16,250,111	16,250,111	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			25,499,433	25,499,433	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Madiun,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			11,293,175	11,293,175	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Tiron			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			16,453,719	16,453,719	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			11,062,915	11,062,915	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			3,119,369	3,119,369	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			186,300,501	186,300,501	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			36,967,613	36,967,613	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			11,985,761	11,985,761	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Madiun,			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di	100 %			13,228,794	13,228,794	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan		Tiron			puskesmas						
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			62,105,758	62,105,758	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			1,705,259	1,705,259	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			56,121,554	56,121,554	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			32,598,199	32,598,199	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									9,444,245	9,444,245		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									9,444,245	9,444,245		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Tiron			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			9,444,245	9,444,245	
TOTAL										1,205,514,060	1,236,575,499		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Dimong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,068,250,777	1,073,608,455					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						535,768,027	541,125,705					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						535,768,027	541,125,705					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dimong	100 %			535,768,027	541,125,705	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						499,394,416	499,394,416					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						499,394,416	499,394,416					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			22,995,661	22,995,661	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			1,978,400	1,978,400	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			4,464,082	4,464,082	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			14,406,809	14,406,809	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Madiun,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			17,803,975	17,803,975	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Dimong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Dimong			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			10,358,617	10,358,617	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			3,550,974	3,550,974	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di puskesmas	100 %			3,550,974	3,550,974	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			2,130,584	2,130,584	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			7,558,502	7,558,502	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			2,130,584	2,130,584	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	100 %			183,737,539	183,737,539	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Dimong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
	Biasa (KLB)	Kesehatan					Biasa (KLB) di puskesmas						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			8,301,548	8,301,548	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			7,690,091	7,690,091	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			12,913,005	12,913,005	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			27,854,936	27,854,936	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			4,261,169	4,261,169	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			57,058,003	57,058,003	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit	100 %			3,043,692	3,043,692	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Dimong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Rujukan/Nasional	Kesehatan					Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional di puskesmas						
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			103,605,271	103,605,271	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									14,609,721	14,609,721		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									14,609,721	14,609,721		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			14,609,721	14,609,721	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									18,478,613	18,478,613		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									18,478,613	18,478,613		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			18,478,613	18,478,613	
TOTAL											1,068,250,777	1,073,608,455	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,480,737,350	1,524,939,800					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						948,254,600	992,457,050					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						948,254,600	992,457,050					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sawahan	100 %			948,254,600	992,457,050	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						502,162,419	502,162,419					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						502,162,419	502,162,419					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			64,090,408	64,090,408	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			1,743,125	1,743,125	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			2,745,421	2,745,421	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			19,254,076	19,254,076	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Sawahan,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			18,941,446	18,941,446	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Sawahan			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			19,823,405	19,823,405	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			1,481,656	1,481,656	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			174,312	174,312	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			188,068,509	188,068,509	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			16,559,698	16,559,698	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			22,040,687	22,040,687	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Sawahan,			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di	100 %			8,014,139	8,014,139	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan		Sawahan			puskesmas						
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			8,225,387	8,225,387	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			784,406	784,406	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			1,525,234	1,525,234	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			23,345,250	23,345,250	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional di puskesmas	100 %			130,734	130,734	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Kajang			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			104,822,323	104,822,323	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			261,469	261,469	
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah di puskesmas	100 %			130,734	130,734	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										15,252,341	15,252,341	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										15,252,341	15,252,341	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pemenuhan kekurangan sumberdaya puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas	100 %			15,252,341	15,252,341	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										15,067,990	15,067,990	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										15,067,990	15,067,990	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Sawahan			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			15,067,990	15,067,990	
TOTAL											1,480,737,350	1,524,939,800	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Klagenserut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,421,675,040	1,426,152,775					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						840,212,790	844,690,525					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						840,212,790	844,690,525					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Klagenserut	100 %			840,212,790	844,690,525	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						543,098,623	543,098,623					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						543,098,623	543,098,623					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			27,200,084	27,200,084	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			3,813,565	3,813,565	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			3,763,386	3,763,386	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			18,967,467	18,967,467	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Jiwan,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100 %			32,356,692	32,356,692	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Klagenserut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Dasar	Pendidikan dan Kesehatan		Klagenserut			di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			15,743,315	15,743,315	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			6,623,560	6,623,560	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			1,204,284	1,204,284	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			203,511,788	203,511,788	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			10,805,248	10,805,248	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			17,925,647	17,925,647	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Jiwan,			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di	100 %			12,429,803	12,429,803	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Klagenserut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pendidikan dan Kesehatan		Klagenserut			puskesmas						
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			3,161,244	3,161,244	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			13,799,083	13,799,083	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			1,404,998	1,404,998	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			85,456,467	85,456,467	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			71,283,444	71,283,444	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			13,648,548	13,648,548	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										38,363,627	38,363,627	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										38,363,627	38,363,627	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Klagenserut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwon, Klagenserut			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan tehnis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			38,363,627	38,363,627	
TOTAL											1,421,675,040	1,426,152,775	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,851,917,750	1,856,917,750					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,237,645,000	1,242,645,000					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,237,645,000	1,242,645,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jiwan	100 %			1,237,645,000	1,242,645,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						601,502,523	601,502,523					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						601,502,523	601,502,523					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	100 %			23,556,801	23,556,801	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin di puskesmas	100 %			5,729,362	5,729,362	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas	100 %			5,980,191	5,980,191	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di puskesmas	100 %			22,277,476	22,277,476	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan		Kab. Madiun,			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan	100 %			41,580,477	41,580,477	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
	pada Usia Pendidikan Dasar	Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Jiwan, Jiwan			usia pendidikan dasar di puskesmas						
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas	100 %			15,573,615	15,573,615	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi di puskesmas	100 %			82,916,296	82,916,296	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat di puskesmas	100 %			7,223,858	7,223,858	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan tuberkulosis di puskesmas	100 %			2,207,290	2,207,290	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas	100 %			1,053,479	1,053,479	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas	100 %			230,360,809	230,360,809	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan gizi masyarakat di puskesmas	100 %			5,721,496	5,721,496	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas	100 %			1,960,254	1,960,254	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas	100 %			9,032,813	9,032,813	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan di puskesmas	100 %			22,211,558	22,211,558	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan surveilans kesehatan di puskesmas	100 %			37,458,273	37,458,273	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di puskesmas	100 %			15,611,961	15,611,961	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di puskesmas	100 %			35,764,168	35,764,168	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengembangan Nasional
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase kelancaran operasional pelayanan di puskesmas	100 %			34,529,861	34,529,861	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) di puskesmas	100 %			752,485	752,485	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										12,770,227	12,770,227	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										12,770,227	12,770,227	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan			Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100 %			12,770,227	12,770,227	
TOTAL											1,851,917,750	1,856,917,750	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						110,920,318,404	113,930,075,550					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						83,590,242,854	86,000,000,000					
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17,590,242,854	19,000,000,000					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun			17,590,242,854	19,000,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						66,000,000,000	67,000,000,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Terpenuhinya operasional pelayanan dan penunjang pelayanan rumah sakit	1 tahun			66,000,000,000	67,000,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						27,330,075,550	27,930,075,550					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						27,330,075,550	27,930,075,550					
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 3. Peningkatan Akses dan Mutu		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Pengadaan Gedung Pelayanan Rumah Sakit	1 Unit			96,780,453,300	96,780,453,300	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
		Pendidikan dan Kesehatan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan											
1 02 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Gedung RS layak fungsi	100 %			500,000,000	1,000,000,000	
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari							200,000,000	200,000,000	
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan yang tersedia	2 paket			2,200,000,000	300,000,000	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Jumlah Alat kesehatan/alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia	3 paket			30,000,000,000	42,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
		3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan											
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Terpenuhinya ketersediaan obat, BAHP, reagen dan bahan kimia rumah sakit	1 tahun			1,800,000,000	1,800,000,000	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Terpenuhinya ketersediaan bahan habis pakai	1 tahun			1,500,000,000	1,500,000,000	
TOTAL										110,920,318,404	113,930,075,550		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 RSUD Dolopo

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.00 RSUD Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						52,864,400,105	68,100,000,000					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						39,152,696,655	39,600,000,000					
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,539,696,655	8,600,000,000					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Terpenuhinya Gaji ASN	1 Tahun			8,539,696,655	8,600,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						30,613,000,000	31,000,000,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Terpenuhinya Operasional Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	1 Tahun			30,613,000,000	31,000,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						13,711,703,450	28,500,000,000					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						13,711,703,450	28,500,000,000					
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Terpenuhinya Gedung rumah Sakit sesuai MasterPlan	1 Gedung			7,711,703,450	15,000,000,000	
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Terpenuhinya sarana fasilitas rumah sakit	1 Paket			2,500,000,000	3,500,000,000	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Terpenuhinya Prasaranan rumah Sakit	1 Paket			2,500,000,000	5,000,000,000	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			Terpenuhinya Alat Kesehatan Ruamh Sakit	1 Paket			1,000,000,000	5,000,000,000	
									TOTAL	52,864,400,105	68,100,000,000						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						84,478,098,849	102,896,000,000					
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13,736,362,450	13,833,000,000					
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						58,271,925	60,000,000					
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pemerintah yang disusun	6 Dokumen			58,271,925	60,000,000	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,923,803,406	11,000,000,000					
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tercukupinya belanja ASN	14 bulan			10,923,803,406	11,000,000,000	
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9,998,800	11,000,000					
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen aset SKPD	1 dokumen			9,998,800	11,000,000	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						792,654,097	805,000,000					
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat-alat listrik yang diadakan	12 bulan			9,184,648	10,000,000	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	2. Peningkatan Kualitas		Kab. Madiun,			Jumlah peralatan gedung kantor yang	12 bulan			125,120,730	130,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
	Kantor	Infrastruktur		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			diadakan dan dipelihara						
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Spanduk dan bahan pembersih yang diadakan	12 bulan			23,830,980	25,000,000	
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ATK dan Mamin rapat yang tersedia	12 bulan			232,351,565	235,000,000	
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak, amplop, stopmap dan fotocopy yang diadakan	12 bulan			43,488,389	45,000,000	
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa publikasi, koran dan majalah yang terbayar	12 bulan			64,177,785	65,000,000	
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perjalanan dinas yang terpenuhi	12 bulan			294,500,000	295,000,000	
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										85,626,850	86,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tercukupinya peralatan dan mesin kantor yang diadakan	6 unit			85,626,850	86,000,000	
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										703,102,200	704,000,000	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Ketersediaan air, listrik dan telepon kebutuhan kantor	12 bulan			164,237,004	165,000,000	
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tercukupinya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan			538,865,196	539,000,000	
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,162,905,172	1,167,000,000	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	12 bulan			199,255,120	200,000,000	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya kendaraan dinas lapangan	12 bulan			133,060,620	134,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah saana prasarana alat berat dan alat ukur bahan laboratorium yang dipelihara	31 unit			559,267,730	560,000,000	
1 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel kantor yang dipelihara	25 unit			9,150,460	10,000,000	
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana gedung kantor kondisi baik	3 gedung			262,171,242	263,000,000	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										19,703,050,693	30,250,000,000	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										6,422,552,059	11,750,000,000	
1 03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan pola dan rencana pengelolaan SDA	1 Dokumen			50,000,000	150,000,000	
1 03 02 2.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							7,812,300,000	9,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 03 02 2.01 27	Rehabilitasi Kanal Banjir	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana pengendali banjir yang terbangun	15 lokasi			3,395,900,000	7,000,000,000	
1 03 02 2.01 54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana pengendali banjir yang dipelihara	5 lokasi			327,552,059	1,500,000,000	
1 03 02 2.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Administrasi penunjang operasional kegiatan yang diadakan	1 Paket			45,000,000	100,000,000	
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										13,280,498,634	18,500,000,000	
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan irigasi yang disusun	1 Dokumen			103,870,400	150,000,000	
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jaringan Irigasi yang ditingkatkan	7 lokasi			3,500,000,000	6,000,000,000	
1 03 02 2.02 13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua			Jumlah jaringan irigasi perpipaan yang ditingkatkan	7 lokasi			504,200,000	1,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah daerah irigasi yang ditingkatkan	7 lokasi			7,304,115,024	8,000,000,000	
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah wilayah jaringan irigasi yang dipelihara	2 Wilayah			1,581,100,000	3,000,000,000	
1 03 02 2.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							287,213,210	350,000,000	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										4,961,656,000	5,000,000,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										4,961,656,000	5,000,000,000	
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jaringan air bersih yang dibangun	7 lokasi			4,961,656,000	5,000,000,000	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										1,736,497,000	2,075,000,000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										1,736,497,000	2,075,000,000	
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Jumlah SPALD-S yang terbangun	200 unit			1,686,497,000	2,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Semua Kelurahan									
1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Administrasi penunjang operasional kegiatan yang diadakan	1 Paket			50,000,000	75,000,000	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									2,383,022,000	2,600,000,000		
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota									2,383,022,000	2,600,000,000		
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah saluran drainase yang dibangun atau direhabilitasi	12 Unit			2,383,022,000	2,600,000,000	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN									1,000,000,000	1,100,000,000		
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									1,000,000,000	1,100,000,000		
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana jalan kawasan strategis yang dibangun atau direhabilitasi	10 Unit			1,000,000,000	1,100,000,000	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									6,850,950,318	9,700,000,000		
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung									6,850,950,318	9,700,000,000		
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Administrasi penunjang operasional kegiatan KRK	1 Paket			171,950,318	200,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG												
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung			6,679,000,000	9,500,000,000	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										0	0	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota										0	0	
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan yang tersusun	1 Dokumen			0	0	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										32,063,750,388	36,050,000,000	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										32,063,750,388	36,050,000,000	
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	2 Unit			10,356,809,000	12,000,000,000	
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ruas jalan dan penahan jalan yang direhabilitasi atau ditingkatkan	8 Unit			8,593,141,367	9,500,000,000	
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua			jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	5 Unit			4,906,736,123	5,500,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
				Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah wilayah jalan yang dipelihara	15 Kecamatan			5,192,086,025	5,700,000,000	
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jembatan yang ditingkatkan / dipelihara	3 Unit			2,514,977,873	2,800,000,000	
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Administrasi penunjang operasional kegiatan DAK	1 Paket			500,000,000	550,000,000	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										252,810,000	319,000,000	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										114,234,000	132,000,000	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	80 Peserta			114,234,000	132,000,000	
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										29,662,000	55,000,000	
1 03 11 2.02 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen harga bahan dan upah yang disusun	1 Dokumen			29,662,000	55,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi										108,914,000	132,000,000	
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sosialisasi / bintek / workshop / lokakarya pembinaan jasa konstruksi yang diadakan	2 Kali			108,914,000	132,000,000	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										1,790,000,000	1,969,000,000	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										1,450,000,000	1,595,000,000	
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	1 Dokumen			350,000,000	385,000,000	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana rinci tata ruang yang tersusun	7 Dokumen			1,100,000,000	1,210,000,000	
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										340,000,000	374,000,000	
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kajian dan data kegiatan pemanfaatan ruang	2 paket			340,000,000	374,000,000	
TOTAL										84,478,098,849	102,896,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						11,537,089,576	11,537,089,576					
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,326,482,536	4,326,482,536					
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25,452,800	25,452,800					
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen			5,483,400	5,483,400	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen			19,969,400	19,969,400	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,323,627,693	3,323,627,693					
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang			3,307,809,293	3,307,809,293	
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumem			10,725,000	10,725,000	
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen			5,093,400	5,093,400	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						377,537,188	377,537,188					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan			21,151,405	21,151,405	
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan			140,651,608	140,651,608	
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan			34,759,175	34,759,175	
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan			8,870,000	8,870,000	
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan			172,105,000	172,105,000	
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									75,273,000	75,273,000		
1 04 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan			75,273,000	75,273,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									322,332,595	322,332,595		
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			71,639,365	71,639,365	
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan			250,693,230	250,693,230	
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									202,259,260	202,259,260		
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan			172,009,260	172,009,260	
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan			30,250,000	30,250,000	
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur					Terpeliharanya/Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan			0	0	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									215,264,662	215,264,662		
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									0	0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur					Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen			0	0	
1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen			0	0	
1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur					Jumlah Dokumen Pendataan Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen			0	0	
1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										0	0	
1 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 04 02 2.02 03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 02 2.02 04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur					Jumlah Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1 Kegiatan			0	0	
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										0	0	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang Direhabilitasi	50 Rumah			0	0	
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 02 2.03 03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										0	0	
1 04 02 2.04 01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus									215,264,662	215,264,662		
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Kegiatan			215,264,662	215,264,662	
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan									0	0		
1 04 02 2.06 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 02 2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)									0	0		
1 04 02 2.07 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									4,571,250,000	4,571,250,000		
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman									0	0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Kegiatan			0	0	
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha									250,000,000	250,000,000		
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 dokumen			250,000,000	250,000,000	
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha									4,321,250,000	4,321,250,000		
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	245 rumah			4,000,000,000	4,000,000,000	
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Lokasi			321,250,000	321,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									0	0	
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH									2,248,891,000	2,248,891,000		
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota									2,248,891,000	2,248,891,000		
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100 rumah			4,497,782,000	4,497,782,000	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									175,201,378	175,201,378		
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									175,201,378	175,201,378		
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen			100,000,000	100,000,000	
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi			150,402,756	150,402,756	
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana,	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur 2. Peningkatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	1 Kegiatan			100,000,000	100,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	dan Utilitas Umum Perumahan	Kualitas Infrastruktur		Semua Kelurahan			Utilitas Umum Perumahan						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										385,000,000	385,000,000	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN										100,000,000	100,000,000	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota										100,000,000	100,000,000	
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sengketa tanah yang dimediasi	2 kasus			100,000,000	100,000,000	
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG										185,000,000	185,000,000	
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong										185,000,000	185,000,000	
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1 dokumen			100,000,000	100,000,000	
2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemanfaatan Tanah Kosong	1 dokumen			85,000,000	85,000,000	
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH										100,000,000	100,000,000	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										100,000,000	100,000,000	
2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur									100,000,000	100,000,000	
TOTAL										11,922,089,576	11,922,089,576		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						7,969,560,935	8,086,052,935					
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,483,552,935	6,483,552,935					
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,328,552,935	5,328,552,935					
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji Pegawai	90 %			5,274,629,286	5,274,629,286	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Teselenggaranya Pelaporan Keuangan OPD	90 %			53,923,649	53,923,649	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						467,100,000	467,100,000					
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Listrik	90 %			72,000,000	72,000,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Administrasi yang dilaksanakan	90 %			110,000,000	110,000,000	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan			38,500,000	38,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	90 %			13,000,000	13,000,000	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan			3,600,000	3,600,000	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prosentase Rapat Kordinasi yang terlaksana	90 %			230,000,000	230,000,000	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									457,900,000	457,900,000		
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			200,000,000	200,000,000	
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan rumah tangga dalam kondisi baik	12 Bulan			47,500,000	47,500,000	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	100 %			210,400,000	210,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional	
		Bencana		Kelurahan										
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									230,000,000	230,000,000			
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya Pemeliharaan dan biaya operasional Kendaraan Dinas	12 Bulan			230,000,000	230,000,000		
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									718,008,000	780,500,000			
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									409,500,000	450,500,000			
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengamanan, Pengawasan dan Patroli Wilayah yang dilaksanakan	12 Bulan			100,000,000	120,000,000		
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	35 Keg			75,000,000	75,000,000		
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan					Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	2 Keg			50,000,000	55,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Ketahanan Bencana					Perlindungan Masyarakat						
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Linmas Aktif	4000 Org			35,000,000	40,000,000	
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan HUT dan Jambore yang Terlaksana	2 Kegiatan			25,000,000	31,500,000	
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kerjasama dalam rangka penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	45 Kerjasama			75,000,000	75,000,000	
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana					Jumlah sarana dan Prasarana ketentraman dan ketertiban umum kondisi baik	1 Unit			33,000,000	35,000,000	
1 05 02 2.01 09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan					Jumlah SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	15 SOP			6,500,000	7,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
		Ketahanan Bencana											
1 05 02 2.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prosentase Jumlah pelanggaran perda dan perkada yang menurun	90 %			10,000,000	12,000,000	
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									246,508,000	260,000,000		
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana					Jumlah Penegakan perda dan perbub sesuai ketentuan	75 Kasus			75,000,000	80,000,000	
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana					Jumlah pengawasan kepatuhan perda dan perbub	190 Keg			96,508,000	100,000,000	
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana					Jumlah penanganan atas pelanggaran perda dan perbub	75 Keg			75,000,000	80,000,000	
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									62,000,000	70,000,000		
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana					Kualitas sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS yang meningkat	90 %			62,000,000	70,000,000	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									768,000,000	822,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								362,000,000	409,000,000			
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana				Jumlah sosialisasi pencegahan kebakaran	8 Kegiatan			10,000,000	12,000,000		
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Prosentase Respon Cepat Penanggulangan Kejadian Kebakaran	90 %			192,000,000	222,000,000		
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana				Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran	80 Kasus			45,000,000	50,000,000		
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	90 %			100,000,000	110,000,000		
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	12 bulan			15,000,000	15,000,000		
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								396,000,000	400,000,000			
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan,		Jumlah Relawan Kebakaran yang Aktif dan Terlatih	32 Orang			396,000,000	400,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
		Ketahanan Bencana		Semua Kelurahan									
1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia										10,000,000	13,000,000	
1 05 04 2.05 01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana					Jumlah sosialisasi pencegahan kebakaran	8 Keg			10,000,000	13,000,000	
TOTAL										7,969,560,935	8,086,052,935		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3,269,923,020	3,269,923,020				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,253,526,527	2,253,526,527				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,643,694,200	1,643,694,200				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana				Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	100 %			1,643,694,200	1,643,694,200	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						231,998,798	231,998,798				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %			3,215,465	3,215,465	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	100 %			31,297,420	31,297,420	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %			6,102,635	6,102,635	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	100 %			67,956,288	67,956,288	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %			12,992,990	12,992,990	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	100 %			4,680,000	4,680,000	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %			105,754,000	105,754,000	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									103,873,836	103,873,836		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kebutuhan pengiriman surat yang terpenuhi	100 %			600,000	600,000	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %			79,198,836	79,198,836	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100 %			24,075,000	24,075,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
		Bencana		Kelurahan									
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									273,959,693	273,959,693		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100 %			225,410,000	225,410,000	
1 05 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebelair	100 %			2,090,000	2,090,000	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase peralatan dan mesin yang terpelihara	100 %			22,511,148	22,511,148	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100 %			23,948,545	23,948,545	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									1,016,396,493	1,016,396,493		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									35,000,000	35,000,000		
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana					Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun	1 dokumen			35,000,000	35,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									175,266,613	175,266,613		
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM/masyarakat yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana	60 orang			54,844,613	54,844,613	
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana					Persentase sarana prasarana kesiapsiagaan yang tersedia	100 %			10,000,000	10,000,000	
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana	100 %			10,000,000	10,000,000	
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kontijensi yang tersusun	1 dokumen			35,000,000	35,000,000	
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	750 orang			65,422,000	65,422,000	
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									583,629,880	583,629,880		
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			Jumlah kejadian bencana yang ditangani	84 kejadian			543,629,880	543,629,880	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
		Ketahanan Bencana		Semua Kelurahan									
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah logistik kebencanaan yang disediakan	200 paket			40,000,000	40,000,000	
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									222,500,000	222,500,000		
1 05 03 2.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana					Jumlah dokumen kebencanaan yang dihasilkan	2 dokumen			10,000,000	10,000,000	
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana									30,000,000	30,000,000	
1 05 03 2.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan kejadian bencana yang diterima	84 kejadian			182,500,000	182,500,000	
TOTAL										3,269,923,020	3,269,923,020		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7,141,092,782	7,141,092,782					
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,434,174,822	4,434,174,822					
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,000,000	2,000,000					
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah capaian yang terealisasi	12 kali			2,000,000	2,000,000	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,879,527,611	3,879,527,611					
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	35 Orang			3,879,527,611	3,879,527,611	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						103,615,538	103,615,538					
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							3,406,800	3,406,800	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan alat kantor yang tersedia	12 kali			35,028,050	35,028,050	
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua							2,463,150	2,463,150	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan	12 kali			9,770,626	9,770,626	
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							3,600,000	3,600,000	
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan Jumlah rapat yang dilaksanakan	35 orang 12 kali			49,346,912	49,346,912	
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									30,000,000	30,000,000		
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	5 barang			30,000,000	30,000,000	
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									316,307,710	316,307,710		
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							300,000	300,000	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan		Kab. Madiun, Semua							53,053,880	53,053,880	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
		Sosial		Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	13 orang			262,953,830	262,953,830	
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									102,723,963	102,723,963		
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset yang terpelihara	12 kali			91,403,963	91,403,963	
1 06 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset yang terpelihara	12 kali			500,000	500,000	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset yang terpelihara	15 kali			9,320,000	9,320,000	
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							1,500,000	1,500,000	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									504,014,638	504,014,638		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 06 02 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)										135,852,934	135,852,934	
1 06 02 2.01 01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang terfasilitasi pemberdayaan sosial	40 Desa/kelurahan			135,852,934	135,852,934	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										368,161,704	368,161,704	
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengumpulan sumbangan daerah Kabupaten	4 Orang			28,300,000	28,300,000	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial					Jumlah kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kabupaten	17 PSKS			339,861,704	339,861,704	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										940,239,673	940,239,673	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										90,306,640	90,306,640	
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Eks Psikotik yang dibantu Jumlah Jenazah Terlantar yang Ditangani Prosentasi PMKS yang ditangani	60 Orang 6 Orang 0.14 %			90,306,640	90,306,640	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										849,933,033	849,933,033	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panti yang mendapat permakanan	16 panti			201,532,980	201,532,980	
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Disabilitas yang Diberi Bantuan Jumlah Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi	525 Orang 20 Orang			151,745,940	151,745,940	
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anak Yatim Piatu yang Menerima Santunan Jumlah Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial	810 Anak 120 Orang			404,396,313	404,396,313	
1 06 04 2.02 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anak yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Jumlah Lansia yang mendapat Bantuan Jumlah Remaja yang dikirim mengikuti Pelatihan	20 Anak 100 Orang 18 Orang			92,257,800	92,257,800	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										811,938,600	811,938,600	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										811,938,600	811,938,600	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah keluarga miskin yang didata	254937 Orang			310,002,200	310,002,200	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah keluarga yg terfasilitasi bantuan sosial Jumlah peserta PBID	264962 Kk 50000 Jiwa			501,936,400	501,936,400	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										450,725,049	450,725,049	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										140,348,049	140,348,049	
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah korban bencana sosial yg tertangani Jumlah personil relawan Pelopor Perdamaian yang dibina	15 Kk 2 Orang			140,348,049	140,348,049	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										310,377,000	310,377,000	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan KSB + TAGANA yg dilaksanakan (sosialisasi, TMS, TTM, TMA) Jumlah kegiatan KSB yg dilaksanakan Jumlah personil KSB + TAGANA yg dibina	12 Kegiatan 12 Kegiatan 62 Orang			310,377,000	310,377,000	
TOTAL											7,141,092,782	7,141,092,782	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						5,712,461,551	6,328,616,907					
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,374,491,259	4,374,491,259					
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,790,333,836	3,790,333,836					
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dicukupi	12 Bulan			3,790,333,836	3,790,333,836	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						176,610,596	176,610,596					
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang tercukupi	12 Bulan			4,144,536	4,144,536	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tercukupi	12 Bulan			25,448,610	25,448,610	
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										12,023,440	12,023,440	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makanan dan minuman kantor yang tercukupi	12 Bulan			12,094,500	12,094,500	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			Barang Cetak dan Penggandaan yang tercukupi	12 Bulan			17,368,900	17,368,900	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Semua Kelurahan									
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tercukupi	12 Bulan			3,000,000	3,000,000	
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Biaya rapat konsultasi dan koordinasi SKPD yang tercukupi	12 Bulan			102,530,610	102,530,610	
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									15,400,000	15,400,000		
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	10 unit			0	0	
2 07 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										15,400,000	15,400,000	
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									276,879,227	276,879,227		
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang tercukupi	12 Bulan			54,533,100	54,533,100	
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan			0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kecamatan, Semua Kelurahan									
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan			222,346,127	222,346,127	
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										115,267,600	115,267,600	
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas yang tercukupi	12 Bulan			66,816,410	66,816,410	
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										31,951,190	31,951,190	
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										16,500,000	16,500,000	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										694,130,994	1,250,220,000	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										574,130,994	1,099,970,000	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pelatihan yang Bersertifikasi	128 orang			574,130,994	1,099,970,000	
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										50,000,000	50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase LPK yang terakreditasi	80 %			50,000,000	50,000,000	
2 07 03 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										70,000,000	100,250,000	
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100 %			70,000,000	100,250,000	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										329,446,040	349,452,040	
2 07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota										266,062,440	286,068,440	
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Pencari Kerja yang dilayani dan ditempatkan	2100 orang			266,062,440	286,068,440	
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota										63,383,600	63,383,600	
2 07 04 2.04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan yag diberdayakan)	200 Orang			63,383,600	63,383,600	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										314,393,258	354,453,608	
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										181,453,608	181,453,608	
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah Syarat Kerja dan PP/ PKB yang disyahkan	10 Berkas			38,523,000	38,523,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Kelurahan									
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja dan Jamsostek. Ketersediaan Data Ketenagakerjaan	608 Perusahaan 100 Perusahaan			142,930,608	142,930,608	
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										132,939,650	173,000,000	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	100 %			132,939,650	173,000,000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										168,186,000	189,741,372	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										74,156,355	95,711,727	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										74,156,355	95,711,727	
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						Jumlah Laporan hasil koordinasi	3 Dokumen			21,555,372	21,555,372	
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk khas daerah	30 IKM			52,600,983	74,156,355	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
	Serta Masyarakat			Kelurahan									
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA									51,920,590	51,920,590		
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									51,920,590	51,920,590		
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah IKM yang paham Kepengurusan IUI	50 IKM		51,920,590	51,920,590		
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									42,109,055	42,109,055		
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									42,109,055	42,109,055		
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah IKM faham perizinan melalui SIINas	100 IKM		42,109,055	42,109,055		
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									62,029,708	62,029,708		
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI									62,029,708	62,029,708		
3 32 04 2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian									62,029,708	62,029,708		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3 32 04 2.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Transmigran yang siap berngkat	5 KK			62,029,708	62,029,708	
TOTAL											5,942,677,259	6,580,387,987	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						4,971,876,719	4,971,876,719					
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,303,958,719	3,303,958,719					
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,603,958,737	2,603,958,737					
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai	12 Bulan			2,603,958,737	2,603,958,737	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						182,324,982	182,324,982					
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan			3,250,000	3,250,000	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan			56,440,000	56,440,000	
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan			14,500,000	14,500,000	
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							34,434,982	34,434,982	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan			6,700,000	6,700,000	
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2,000,000	2,000,000	
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bu			65,000,000	65,000,000	
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									90,000,000	90,000,000		
2 09 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan			30,000,000	30,000,000	
2 09 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan			60,000,000	60,000,000	
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									175,975,000	175,975,000		
2 09 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan			3,400,000	3,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Semua Kelurahan									
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air Listrik	12 Bulan			77,500,000	77,500,000	
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										95,075,000	95,075,000	
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									251,700,000	251,700,000		
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan			150,000,000	150,000,000	
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Peralatan Mesin dan Lainnya (AC, Komputer, Laptop, Printer)	12 Bulan			17,200,000	17,200,000	
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan			84,500,000	84,500,000	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									1,492,918,000	1,492,918,000		
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									250,000,000	250,000,000		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Jumlah dokumen terkait harga pangan dan NBM yang dimanfaatkan	2 Dokumen			50,000,000	50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Semua Kelurahan									
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen dan data terkait prognosa harga pangan yang dimanfaatkan	1 Paket			100,000,000	100,000,000	
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Toko Tani yang menyediakan bahan pangan di masyarakat	7 TTI			100,000,000	100,000,000	
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota									262,090,000	262,090,000		
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang dilatih dan dibina	7 Kelompok			100,000,000	100,000,000	
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun	12 ton			162,090,000	162,090,000	
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									980,828,000	980,828,000		
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Lomba Cipta Menu Jumlah masyarakat (kelompok olahan pangan, KWT dan PKK) yang dilatih dan dibina tentang olahan pangan lokal	2 Kegiatan 90 Orang 8 Kelompok			100,000,000	100,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
							Jumlah masyarakat (kelompok olahan pangan, KWT dan PKK) yang dilatih dan dibina tentang pangan lestari						
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengonekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi pekarangan lestari	25 lokasi			880,828,000	880,828,000	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN										100,000,000	100,000,000	
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota										100,000,000	100,000,000	
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Ketahanan Pangan	4 Kecamatan			100,000,000	100,000,000	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN										75,000,000	75,000,000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota										75,000,000	75,000,000	
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah masyarakat yang dilatih dan dibina tentang mutu dan keamanan pangan Persentase keamanan pangan segar asal tanaman yang diuji	80 orang 100 %			75,000,000	75,000,000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										585,944,597	484,685,597	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										289,439,000	188,180,000	
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota										289,439,000	188,180,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.00 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ternak yang mendapatkan bantuan pengobatan gangguan reproduksi Peternak anggota kelompok ternak yang dilatih dan dibina	245 ekor 4 kecamatan			289,439,000	188,180,000	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										185,944,597	185,944,597	
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian										185,944,597	185,944,597	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sarana Prasarana Peternakan yang dipelihara atau dibangun	1 Paket			185,944,597	185,944,597	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										110,561,000	110,561,000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota										110,561,000	110,561,000	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi pembinaan dan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	4 lokasi			110,561,000	110,561,000	
TOTAL											5,557,821,316	5,456,562,316	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						18,150,315,651	19,360,000,000					
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13,401,727,035	13,435,000,000					
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						164,850,000	170,000,000					
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen yang tersusun	14 dokumen			329,700,000	340,000,000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,922,703,689	9,950,000,000					
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase gaji ASN yang terbayar	100 %			9,922,703,689	9,950,000,000	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,314,173,346	3,315,000,000					
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100 %			3,314,173,346	3,315,000,000	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						400,000,000	760,000,000					
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						400,000,000	760,000,000					
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang yang tersusun	2 dokumen			150,000,000	160,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen			100,000,000	300,000,000	
2 11 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen			150,000,000	300,000,000	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										930,542,000	1,075,000,000	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										560,301,566	625,000,000	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi titik pantau Persentase limbah industri sesua bak mutu	20 sampler 100 %			200,000,000	200,000,000	
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembuatan biopori yang diadakan Jumlah sumur resapan yang diadakan	5 buah 5 sumur			100,000,000	150,000,000	
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			Persentase sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia	40 %			260,301,566	275,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
				Semua Kelurahan									
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									230,000,000	300,000,000		
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah informasi pencemaran lingkungan hidup yang diadakan	50 buah			100,000,000	150,000,000	
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			JUmlah pengawasan limbah yang diadakan	10 usaha			130,000,000	150,000,000	
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									140,240,434	150,000,000		
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah koordinasi yang dilakukan	12 kali			140,240,434	150,000,000	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									1,145,000,000	1,255,000,000		
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota									1,145,000,000	1,255,000,000		
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lampu hias yang terpelihara Jumlah taman yang terpelihara	10 taman 15 taman			1,000,000,000	1,100,000,000	
2 11 04 2.01 05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase satwa yan terpelihara	100 %			90,000,000	95,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
				Kelurahan									
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keagamaan Hayati	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa Berseri yang di bina Jumlah Desa Poklim yang di bina	3 desa 3 desa			55,000,000	60,000,000	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										9,458,000	10,000,000	
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3										9,458,000	10,000,000	
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah verifikasi dokumen yang terlaksana	15 dokumen			9,458,000	10,000,000	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										20,000,000	30,000,000	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										20,000,000	30,000,000	
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen			10,000,000	15,000,000	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen			10,000,000	15,000,000	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										216,065,000	300,000,000	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										216,065,000	300,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	5 kali			41,065,000	50,000,000	
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan sekolah Adiwiyata Jumlah tanaman adiwiyata yang diadakan	30 sekolah 30 sekolah			100,000,000	150,000,000	
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jmlah penyuluhan yang dilaksanakan	1 kali			75,000,000	100,000,000	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										115,000,000	120,000,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										115,000,000	120,000,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kantor yang di nilai Jumlah pembinaan sekolah adiwiyata jumlah peserta putra-putri lingkungan	68 kantor 80 sekolah 100 peserta			115,000,000	120,000,000	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										150,000,000	170,000,000	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota										150,000,000	170,000,000	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah pengaduan yang ditindalkanjuti	30 pengaduan			150,000,000	170,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional	
				Kelurahan										
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									1,762,523,616	2,205,000,000			
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah									1,762,523,616	2,205,000,000			
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penataan TPA yan diadakan Persentase TPA yang terpelihara	4 kali 4 kali			220,839,000	250,000,000		
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan operasional sampah yang terpelihara	12 bulan			991,684,616	1,000,000,000		
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah titik pantau yang terpelihara	20 titik			50,000,000	55,000,000		
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana persampahan yang tersedia	1 paket			200,000,000	550,000,000		
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah sarana prasarana TPA yang tersedia	10 buah			300,000,000	350,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Kabupaten/Kota			Kelurahan									
TOTAL											18,150,315,651	19,360,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5,938,050,993	5,938,050,993					
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,259,736,979	5,259,736,979					
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						198,100,000	198,100,000					
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya asistensi penyusunan RKA DAKNF	100 rupiah			18,100,000	18,100,000	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									30,000,000	30,000,000	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									150,000,000	150,000,000	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,781,757,677	3,781,757,677					
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100 rupiah			3,781,757,677	3,781,757,677	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						96,879,302	96,879,302					
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya jasa media sosialisasi perundang undangan	100 rupiah			96,879,302	96,879,302	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						755,000,000	755,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ketersediaan komponen instalasi listri	100 rupiah			5,000,000	5,000,000	
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							964,000,000	964,000,000	
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							20,000,000	20,000,000	
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							68,000,000	68,000,000	
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							40,000,000	40,000,000	
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							8,000,000	8,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
2 12 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							220,000,000	220,000,000	
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							180,000,000	180,000,000	
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									225,000,000	225,000,000		
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									225,000,000	225,000,000	
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									203,000,000	203,000,000		
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									3,000,000	3,000,000	
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									120,000,000	120,000,000	
2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									10,000,000	10,000,000	
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									70,000,000	70,000,000	
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									300,000,000	300,000,000		
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									300,000,000	300,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									300,000,000	300,000,000	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										378,314,014	378,314,014	
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan										378,314,014	378,314,014	
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									250,000,000	250,000,000	
2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									64,157,007	64,157,007	
2 12 04 2.01 03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									64,157,007	64,157,007	
TOTAL											5,938,050,993	5,938,050,993	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						23,190,829,900	25,425,890,000					
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,621,688,932	6,985,890,000					
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,000,000	6,000,000					
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	2 Dokumen			5,000,000	6,000,000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,464,188,932	5,656,890,000					
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	12 Bulan			5,459,188,932	5,650,890,000	
2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	12 Bulan			5,000,000	6,000,000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70,000,000	81,000,000					
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan	1 Paket			55,000,000	60,000,000	
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Tersedianya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 bulan			5,000,000	6,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
				Kelurahan									
2 15 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sosialisasi peraturan perundang-undangan (Abdiyasa)	1 Kegiatan			10,000,000	15,000,000	
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									306,500,000	345,000,000		
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen instalasi listrik /peneranga bangunan kantorn	1 Paket			20,000,000	25,000,000	
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			90,000,000	100,000,000	
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan Logistik Kantor	1 Paket			30,000,000	33,000,000	
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	12 Bulan			40,000,000	50,000,000	
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan			6,500,000	7,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Semua Kelurahan									
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang Dilaksanakan	12 Bulan			120,000,000	130,000,000	
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									454,400,000	467,000,000		
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa surat menyurat yang dilaksanakan	12 Bulan			6,000,000	7,000,000	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			78,400,000	80,000,000	
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan			370,000,000	380,000,000	
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									321,600,000	430,000,000		
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilaksanakan	12 Bulan			300,000,000	400,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
2 15 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan			21,600,000	30,000,000	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									16,569,140,968	18,440,000,000		
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									150,000,000	165,000,000		
2 15 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	1 Paket			10,000,000	15,000,000	
2 15 02 2.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten /kota	1 Kegiatan			140,000,000	150,000,000	
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									321,000,000	400,000,000		
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Operasional palang pintu Keretaapi perlintasan sebidang yang terbayar Tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan (pemeliharaan palang pintu keretaapi perlintasan sebidang)	12 orang 1 Paket			321,000,000	400,000,000	
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									100,370,000	135,000,000		
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur					Tersedianya Rehabilitasi/pemeliharaan terminal (Fasilitas utama atau pendukung	1 Kegiatan			100,370,000	135,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pendukung))						
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									625,000,000	650,000,000		
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota yang Dilaksanakan (Jumlah satuan Tugas Parkir dan monitoring yang dilaksanakan)	100 Orang			625,000,000	650,000,000	
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									530,000,000	625,000,000		
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 Paket			200,000,000	250,000,000	
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bukti Lulus uji pengujian kendaraan bermotor	1 Paket			230,000,000	250,000,000	
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 Paket			100,000,000	125,000,000	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									14,652,770,968	16,255,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas Jumlah tagihan listrik PJU yang terbayar	2 Paket 12 Bulan			14,412,770,968	16,000,000,000	
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota (pam lebar, tahun baru)	1 Kegiatan			190,000,000	200,000,000	
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 Kali			50,000,000	55,000,000	
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									40,000,000	50,000,000		
2 15 02 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penetapan kebijakan tata kelola Andalalin yang dilaksanakan	10 Dokumen			40,000,000	50,000,000	
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	160,000,000		
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu	5 Bus			150,000,000	160,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kelurahan			daerah kab/kota (bus balik gratis)						
TOTAL											23,190,829,900	25,425,890,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10,096,412,647	10,601,176,580					
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,180,010,512	8,589,011,039					
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16,931,692	17,778,277					
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya dokumen perencanaan bidang kominfo, statistik dan persandian	1 tahun			16,931,692	17,778,277	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,024,641,406	4,225,873,476					
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun			4,024,641,406	4,225,873,476	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3,268,524,750	3,431,950,988					
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan									3,268,524,750	3,431,950,988	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						453,010,209	475,660,720					
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun			95,910,507	100,706,032	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	1 tahun			122,668,231	128,801,643	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan/penggandaan	1 tahun			36,837,851	38,679,744	
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1 tahun			6,334,020	6,650,721	
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi OPD	1 tahun			191,259,600	200,822,580	
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										7,167,220	7,525,581	
2 16 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan sarpras gedung kantor dan lainnya	1 tahun			7,167,220	7,525,581	
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										184,428,555	193,649,983	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tercukupinya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun			79,405,020	83,375,271	
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Tercukupinya biaya pelayanan umum kantor	1 tahun			105,023,535	110,274,712	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Semua Kelurahan									
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										225,306,680	236,572,014	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas/operasional lapangan	1 tahun			121,564,501	127,642,726	
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	1 tahun			3,187,800	3,347,190	
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 tahun			100,554,379	105,582,098	
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										559,641,791	587,567,180	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										559,641,791	587,567,180	
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cetak kalender Dialog interaktif Jumlah dokumen Radio LPPL Proboyo FM Jumlah media luar ruang (bliho, spanduk, banner) Jumlah tenaa penyiar radio Puroboyo FM	1850 buah 24 kali 1 dokumen 50 unit 7 orang			193,571,888	203,193,782	
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua			Jumlah KIM yang dibina	60 kelompok			68,327,020	71,743,371	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
				Kecamatan, Semua Kelurahan									
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemraung Kepentingan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasi advetorial pada media massa Jumlah wartawan yang ikut desiminasi informasi pemerintah daerah	150 berita 100 media			265,402,883	278,673,027	
2 16 02 2.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarpras pendukung infokom publik	1 paket			32,340,000	33,957,000	
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA										1,356,760,344	1,424,598,361	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										462,394,879	485,514,623	
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jaringan internet dan sarpras TI yang terpasang dan terpelihara Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kabupaten Madiun	53 titik 39 PD			462,394,879	485,514,623	
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										894,365,465	939,083,738	
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah kebijakan yang mendukung tata kelola e Government Jumlah PD yang menggunakan sub	1 dokumen 46 PD 5 Orang			79,929,360	83,925,828	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Kabupaten/Kota			Kelurahan			domain pemerintah daerah Pengembangan kapasitas SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi						
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengelolaan pusat data pemerintah daerah	1 paket			560,000,000	588,000,000	
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Jumlah desa/kel yang dilatih dalam pemanfaatan TIK	2 aplikasi 20 desa/kel			254,436,105	267,157,910	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										337,838,959	354,730,908	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										337,838,959	354,730,908	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										337,838,959	354,730,908	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen statistik yang tersusun Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	6 dokumen 2 kali			114,850,976	120,593,525	
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen infografis yang tersusun Jumlah data dashboard yang tersedia Jumlah FGD yang dilaksanakan	1 dokumen 36 sektor 2 kali			222,987,983	234,137,383	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										126,985,898	133,335,192	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									126,985,898	133,335,192		
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									76,386,450	80,205,772		
2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kebijakan keamanan informasi yang disusun	1 dokumen			9,238,845	9,700,787	
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah	1 tahun			67,147,605	70,504,985	
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									50,599,448	53,129,420		
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jaring komunikasi sandi berbasis Radio HT yang tersedia	3 unit			50,599,448	53,129,420	
TOTAL										10,561,237,504	11,089,242,680		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						9,642,424,937	18,000,000					
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7,397,669,137	18,000,000					
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18,000,000	18,000,000					
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen perencanaan yang disusun	30 dokumen			18,000,000	18,000,000	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6,329,157,206	0					
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai	12 bulan			6,329,157,206	0	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						257,502,214	0					
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah komponen listrik yang tersedia	12 bulan			5,276,221	0	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik yang tersedia	12 bulan			98,532,146	0	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			jumlah barang cetak yang tersedia	12 bulan			19,999,847	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Kelurahan									
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 bulan			6,744,000	0	
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan	12 bulan			126,950,000	0	
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									600,322,400	0		
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			409,992,400	0	
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa pelayanan kantor	12 bulan			190,330,000	0	
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									192,687,317	0		
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan	12 bulan			100,765,400	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 17 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa pemeliharaan alat besar	12 bulan			25,000,000	0	
2 17 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya pemeliharaan mebel	12 bulan			9,971,500	0	
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa pemeliharaan peralatan	12 bulan			35,000,000	0	
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung	12 bulan			21,950,417	0	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										104,105,000	0	
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										104,105,000	0	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas	60 koperasi			58,550,000	0	
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua			jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap	30 koperasi			45,555,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kecamatan, Semua Kelurahan			PERPU						
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									147,000,000	0		
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									147,000,000	0		
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KSP/USP yang dilaksanakan penilaian kesehatan	130 koperasi		147,000,000	0		
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									390,304,000	0		
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									390,304,000	0		
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensi SDM nya	150 koperasi		390,304,000	0		
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									171,950,000	0		
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									171,950,000	0		
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya	135 koperasi		171,950,000	0		
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									1,205,540,000	0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									1,205,540,000	0		
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Usaha Mikro yang terdata	350 UM			90,000,000	0	
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UM yang bermitra	15 UM			30,000,000	0	
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UM yang terfasilitasi perijinan	35 UM			40,000,000	0	
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UM yang diberdayakan/dilatih	400 UM			1,045,540,000	0	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									225,856,800	0		
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									225,856,800	0		
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UM yang di fasilitasi pengembangan produk	260 UM			225,856,800	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Teknologi												
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang												
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata					Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	50 orang			49,000,000	0	
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri												
3 30 02 2.03 01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi perijinan STPW	50 orang			39,000,000	0	
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota												
3 30 02 2.06 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap PA-B2 dan P-B2 yang dilaksanakan	5 kali			25,000,000	0	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah sarana perdagangan yang tersedia	2 unit			222,663,396	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	12 pasar/unit			413,600,000	0	
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									710,000,000	0		
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	36 orang			610,000,000	0	
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengelola sarana perdagangan yang dibina	30 orang			100,000,000	0	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									774,950,000	0		
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									34,950,000	0		
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat agen dan pasar yang dikendalikan	16 unit			34,950,000	0	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									635,000,000	0		
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata									20,000,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota												
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komoditi yang dipantau di tingkat pasar	28 komoditi			100,000,000	0	
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	23 kali			515,000,000	0	
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									105,000,000	0		
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah distributor dan agen yang dipantau	117 distributor dan agen			105,000,000	0	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									95,000,000	0		
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									95,000,000	0		
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan misi dagang	3 kali			95,000,000	0	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									247,450,000	0		
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									247,450,000	0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	4050 UTTP			200,000,000	0	
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah wajib tera yang mengikuti penyuluhan	50 orang			47,450,000	0	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										270,000,000	0	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										270,000,000	0	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						Jumlah pelaksanaan promosi	3 kali			200,000,000	0	
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata					Jumlah fasilitasi pemasaran produk dalam negeri	5 kali			70,000,000	0	
TOTAL											12,489,088,333	18,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						9,786,072,915	12,333,058,499					
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,007,880,515	4,802,493,514					
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						59,387,000	41,999,999					
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	19 dokumen			59,387,000	41,999,999	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,556,279,715	3,556,279,715					
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase pegawai yang terbayarkan	100 %			3,556,279,715	3,556,279,715	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						795,399,200	712,399,200					
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan			4,460,000	4,460,000	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	8 unit			55,000,000	60,000,000	
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan			7,400,000	7,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Kelurahan									
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Tersedianya makan dan minum Tersedianya pendukung peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan			298,527,200	273,527,200	
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan			77,500,000	52,500,000	
2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12 bulan			1,980,000	1,980,000	
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya rapat koordinasi, rapat dinas dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan			350,532,000	312,532,000	
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										105,000,000	0	
2 13 01 2.07 05	Pengadaan Mebel			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	1 paket			40,000,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
2 13 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket			65,000,000	0	
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									362,474,000	362,474,000		
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	12 bulan			109,656,000	109,656,000	
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Keamanan Tersedianya Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Penunjang Kinerja Tersedianya Jasa Publikasi	3 orang 3 orang 1 orang 35 kali			252,818,000	252,818,000	
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									129,340,600	129,340,600		
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 bulan			112,304,700	112,304,700	
2 13 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya mebelair	12 bulan			1,270,500	1,270,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan			8,654,000	8,654,000	
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan			7,111,400	7,111,400	
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA										160,000,000	160,000,000	
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa										160,000,000	160,000,000	
2 13 02 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kecamatan yang terfasilitasi penataan kewenangan Desa	15 kecamatan			10,000,000	10,000,000	
2 13 02 2.01 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang terfasilitasi penyelenggaraan TMMD	1 Desa			150,000,000	150,000,000	
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA										117,500,000	513,867,982	
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa										117,500,000	513,867,982	
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kecamatan yang dibina Pasca PNPM-MPd Jumlah Kecamatan yang difasilitasi untuk pembentukan BUMDesa bersama	14 kecamatan 7 kecamatan			100,000,000	313,867,982	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
2 13 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang memiliki potensi membentuk kawasan pedesaan untuk pengembangan ekonomi	5 Desa			17,500,000	200,000,000	
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										3,083,374,700	4,056,740,103	
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										3,083,374,700	4,056,740,103	
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi Desa	145 Desa			23,210,000	24,210,000	
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas updating data IDM dan SDGs Jumlah Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan tepat waktu Jumlah KPM yang dibina	198 Desa 198 Desa 100 KPM			140,000,000	150,000,000	
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Regulasi Teknis tentang Keuangan Desa	198 Desa 4 regulasi			239,654,800	452,500,000	
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa dan Kecamatan yang mengikuti peningkatan kompetensi	213 lembaga			38,515,900	40,515,900	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa/Kelurahan yang telah updating profil Desa /Kelurahan	206 Desa/Kelurahan			30,000,000	30,000,000	
2 13 04 2.01 12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang telah melaksanakan updating data base Aparatur Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi bantuan iuran jaminan kesehatan dari APBD Kabupaten Jumlah produk hukum daerah yang mengatur Desa	198 Desa 198 Desa 4 produk hukum			2,294,793,000	2,947,930,003	
2 13 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang melakukan updating data aset Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi Tukar Menukar TKD	198 Desa 2 Desa			50,509,000	55,509,000	
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BPD yang dibina	198 Desa			27,378,200	116,761,400	
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang yang mendapatkan Juara Perlombaan Desa/ Kelurahan Tk. Kabupaten Jumlah Desa yang	5 Desa/Kelurahan 51 Desa			239,313,800	239,313,800	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							mendapatkan peningkatan kapasitas untuk pemutakhiran epdeskel						
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									1,417,317,700	2,799,956,900		
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									1,417,317,700	2,799,956,900		
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Posyandu yang aktif Jumlah LPKMD/K yang aktif Jumlah pengurus LPKMD/K yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya dalam penguatan tugas dan fungsinya Jumlah RT/RW yang aktif	725 lembaga 133 lembaga 98 lembaga 3460 lembaga			106,902,000	106,902,000	
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang telah melaksanakan pengukuran keswadayaan masyarakat Jumlah peserta workshop pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	98 Desa 150 Desa			49,748,400	199,748,400	
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah BUMDes yang aktif Jumlah Desa yang mendapat nominasi Desa Mawa Cara Award	84 lembaga 5 Desa 32 lembaga			410,667,300	1,184,346,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
	dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Kelurahan			Jumlah Lembaga UED yang aktif Jumlah Pasar Desa yang aktif Jumlah UPK Gerdu Taskin/UPKu PPKM yang aktif	50 lembaga 26 lembaga					
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang diberdayakan dalam pemanfaatan potensi SDA Jumlah Desa yang diberdayakan dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Jumlah lembaga HIPPPAM yang dibina Jumlah lembaga Tepian Hutan yang dibina	5 Desa 5 Desa 45 lembaga 30 lembaga			100,000,000	558,960,000	
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa/Kelurahan Juara Penilaian Gotong Royong Terbaik	5 Desa/Kelurahan			150,000,000	150,000,000	
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PKK aktif dengan pelaksanaan Program Pokok PKK	185 lembaga			600,000,000	600,000,000	
TOTAL									9,786,072,915	12,333,058,499			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						400,624,378	400,624,378					
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						124,999,716	124,999,716					
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						52,368,666	52,368,666					
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan ARG	32 %			52,368,666	52,368,666	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						28,035,194	28,035,194					
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitas kesehatan pemberdayaan dibidang politik, hukum, soial dan ekonomi	206 orang			28,035,194	28,035,194	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						44,595,856	44,595,856					
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berkompeten	350 orang			44,595,856	44,595,856	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						33,135,320	33,135,320					
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						18,056,060	18,056,060					
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yan terfasilitasi	30 layanan			18,056,060	18,056,060	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Kewenangan Kabupaten/Kota			Kelurahan									
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										15,079,260	15,079,260	
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terfasilitasi	30 lembaga			15,079,260	15,079,260	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										125,000,284	125,000,284	
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										21,018,754	21,018,754	
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah lembaga pemenuhan hak anak dari unsur Pemerintah, non Pemerintah, media, dan dunia usaha yang terfasilitasi	50 lembaga			21,018,754	21,018,754	
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										103,981,530	103,981,530	
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang terfasilitasi	200 lembaga			103,981,530	103,981,530	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										117,489,058	117,489,058	
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										44,181,258	44,181,258	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak			Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	40 kali			44,181,258	44,181,258	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			Semua Kelurahan			dalam satu tahun						
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									73,307,800	73,307,800		
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terfasilitasi	20 lembaga			73,307,800	73,307,800	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									21,854,291,588	21,854,291,588		
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									4,468,278,588	4,468,278,588		
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									2,000,000	2,000,000		
2 14 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	18 dokumen			2,000,000	2,000,000	
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,466,278,588	3,466,278,588		
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji dan tunjangan ASN	14 bulan			6,932,557,176	6,932,557,176	
2 14 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									12,000,000	12,000,000		
2 14 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kab. Madiun, Semua			Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan			12,000,000	12,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kecamatan, Semua Kelurahan									
2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									359,000,000	359,000,000		
2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat Tulis Kantor	12 bulan			40,000,000	40,000,000	
2 14 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat Rumah Tangga Kantor	12 bulan			20,000,000	20,000,000	
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makan minum rapat dan harian pegawai	12 bulan			50,000,000	50,000,000	
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cetak dan penggandaan	12 bulan			16,000,000	16,000,000	
2 14 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Surat kabar	12 bulan			3,000,000	3,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 14 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bahan/material	12 bulan			10,000,000	10,000,000	
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 bulan			220,000,000	220,000,000	
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										338,880,000	338,880,000	
2 14 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa pemaketan dan materai	12 bulan			2,000,000	2,000,000	
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Belanja Jasa Listrik, Internet dan Telepon	12 bulan			64,000,000	64,000,000	
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Tenaga Non ASN	12 bulan			272,880,000	272,880,000	
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										290,120,000	290,120,000	
2 14 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Biaya servis, suku cadang, BBM dan Pajak Kendaraan Dinas	12 bulan			208,000,000	208,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kelurahan									
2 14 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perawatan mebeleur	12 bulan			8,000,000	8,000,000	
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan			30,000,000	30,000,000	
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan			44,120,000	44,120,000	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										68,100,000	68,100,000	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										7,455,200	7,455,200	
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal						Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk	2 sekolah			7,455,200	7,455,200	
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										60,644,800	60,644,800	
2 14 02 2.02 02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data mikro keluarga tingkat Desa/Kelurahan	206 Desa/Kelurahan			60,644,800	60,644,800	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										15,405,173,000	15,405,173,000	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal										1,353,666,000	1,353,666,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah publikasi program melalui media elektronik dan non elektronik	5 paket			60,000,000	60,000,000	
2 14 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE program KKBPK untuk kegiatan BOKB	100 persen			192,426,000	192,426,000	
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kegiatan operasional Balai Penyuluhan KB di Kecamatan berjalan lancar	100 persen			1,101,240,000	1,101,240,000	
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									2,627,700,000	2,627,700,000		
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kader IMP yang difasilitasi	1306 orang			1,638,900,000	1,638,900,000	
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif	100 persen			1,977,600,000	1,977,600,000	
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									10,608,247,000	10,608,247,000		
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana			Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Persentase fasilitas Kesehatan, Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan distribusi	100 persen			65,884,000	65,884,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Semua Kelurahan			Alat dan Obat Kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB						
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			Kab. Madiun, Madiun Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35 persen			1,486,750,000	1,486,750,000	
2 14 03 2.03 05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	4 dokumen			35,000,000	35,000,000	
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100 persen			8,760,613,000	8,760,613,000	
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	100 persen			35,000,000	35,000,000	
2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Faskes yang mampu memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak - hak reproduksi Jumlah Kecamatan	29 faskes 15 kecamatan			40,000,000	40,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							dengan PKB/PLKB yang mampu memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak - hak reproduksi di kelompok kegiatan						
2 14 03 2.03 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	70 Persen			40,000,000	40,000,000	
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketersediaan dukungan operasional Pelayanan KB bergerak	100 persen			85,000,000	85,000,000	
2 14 03 2.03 12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	35 persen			60,000,000	60,000,000	
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									815,560,000	815,560,000		
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Komitmen dan peran serta stakeholder/mitra kerja yang mendukung operasional Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	39,4 Persen			30,000,000	30,000,000	
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas			Kab. Madiun,			Jumlah Rumah data kependudukan	4 Kampung			25,000,000	25,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Sektor di Kampung KB			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			paripurna di Kampung KB Percontohan	KB					
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Kampung KB Aktif	100 persen			760,560,000	760,560,000	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									1,912,740,000	1,912,740,000		
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									1,812,740,000	1,812,740,000		
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan sesuai rencana	100 persen			1,140,340,000	1,140,340,000	
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok UPPKS yang aktif	196 kelompok			65,000,000	65,000,000	
2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Persentase biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen			607,400,000	607,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kelurahan			yang disediakan						
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									100,000,000	100,000,000		
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kader Tri Bina yang aktif Jumlah Kelompok PIK Remaja yang aktif	1805 kader 70 kelompok			100,000,000	100,000,000	
TOTAL									22,254,915,966	22,254,915,966			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4,080,365,549	2,172,462,000					
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,419,153,549	1,065,000,000					
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9,000,000	50,000,000					
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	15 dokumen			9,000,000	50,000,000	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,560,103,933	0					
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	30 ASN			2,560,103,933	0	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						215,049,616	215,000,000					
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prosentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %			70,000,000	70,000,000	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %			7,500,000	10,000,000	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Pesentase bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang tersedia	100 %			10,000,000	10,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu yang diadakan	100 %			16,500,000	25,000,000	
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terpenuhi	100 %			111,049,616	100,000,000	
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									30,000,000	100,000,000		
2 18 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	10 Unit			30,000,000	100,000,000	
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									430,000,000	500,000,000		
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %			180,000,000	200,000,000	
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 %			250,000,000	300,000,000	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									175,000,000	200,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %			130,000,000	150,000,000	
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase peralatan dan mesin kantor yang terpe;ihara	100 %			45,000,000	50,000,000	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										70,000,000	225,000,000	
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										40,000,000	125,000,000	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan					Rumusan kebijakan daerah mengenai fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun	1 dokumen			20,000,000	50,000,000	
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan					Jumlah investor yang memanfaatkan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	10 Unit			20,000,000	75,000,000	
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										30,000,000	100,000,000	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan					Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi yang disusun	1 dokumen			30,000,000	100,000,000	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										80,950,000	300,000,000	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										80,950,000	300,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah event promosi investasi yang diikuti	1 event			80,950,000	300,000,000	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										95,000,000	135,000,000	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										95,000,000	135,000,000	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	75 %			60,000,000	75,000,000	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100 %			35,000,000	60,000,000	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										372,462,000	372,462,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										372,462,000	372,462,000	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi	60 %			75,000,000	75,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi kebijakan penanaman modal dan bimbingan teknis terkait OSS dan LKPM Online	210 Unit			259,500,000	259,500,000	
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan atas kegiatan usahanya	100 Unit			37,962,000	37,962,000	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									42,800,000	75,000,000		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									42,800,000	75,000,000		
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi			42,800,000	75,000,000	
TOTAL										4,080,365,549	2,172,462,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						4,818,840,415	4,915,082,426					
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,784,195,511	3,800,082,426					
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150,700,000	153,000,000					
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	10 dokumen			150,700,000	153,000,000	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,633,495,511	3,647,082,426					
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %			2,729,082,426	2,739,082,426	
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kepuasan ASN terhadap pelayanan Kesekretariatan Kinerja	90 %			904,413,085	908,000,000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						534,644,904	550,000,000					
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						534,644,904	550,000,000					
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tercapainya Kapasitas Kepemudaan	100 %			0	0	
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan	1. Peningkatan Nilai Tambah		Kab. Madiun,			Jumlah Pemuda berprestasi	1409 pemuda			534,644,904	550,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pasukan Pengibar Bendera	ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										500,000,000	565,000,000	
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										400,000,000	450,000,000	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Atlit Yang Berprestasi	136 atlit			400,000,000	450,000,000	
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										100,000,000	115,000,000	
2 19 03 2.05 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Olahraga Yang Melibatkan Masyarakat	4 jenis olahraga			100,000,000	115,000,000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										2,900,000,000	3,030,000,000	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										2,250,000,000	2,360,000,000	
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										150,000,000	155,000,000	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kawasan yg dikembangkan	2 kawasan			150,000,000	155,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									2,000,000,000	2,100,000,000		
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarpras yg dibangun di destinasi wisata	5 unit			2,000,000,000	2,100,000,000	
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota									100,000,000	105,000,000		
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi TDUP yang diberikan	5 dokumen			100,000,000	105,000,000	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									450,000,000	460,000,000		
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									450,000,000	460,000,000		
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah even pariwisata yang diikuti dan dilaksanakan	22 even			350,000,000	355,000,000	
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kerjasama ang Dihasilkan	3 dokumen			100,000,000	105,000,000	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									200,000,000	210,000,000		
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									100,000,000	105,000,000		
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan		Kab. Madiun, Semua			Jumlah Pelatihan Yang Terlaksana	100 %			0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pariwisata		Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelakuEkonomi Kreatif Yang Ditingkatkan kapasitasnya	30 orang			100,000,000	105,000,000	
3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif									100,000,000	105,000,000		
3 26 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata									100,000,000	105,000,000	
TOTAL										7,718,840,415	7,945,082,426		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						8,308,455,997	8,328,455,997					
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,449,467,997	3,449,467,997					
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,789,210,300	2,789,210,300					
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Terpenuhinya Gaji Pegawai	14 Bulan			2,789,210,300	2,789,210,300	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						342,055,847	342,055,847					
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Kebutuhan Peralatan Kantor Terpenuhi	12 Bulan			309,045,847	309,045,847	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan					Rapat-rapat Koordinasi Luar/Dalam Daerah Terpenuhi	12 Bulan			33,010,000	33,010,000	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						207,000,000	207,000,000					
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Pelayanan Kantor Terpenuhi	12 Bulan			207,000,000	207,000,000	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						111,201,850	111,201,850					
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhi	12 Bulan			111,201,850	111,201,850	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						4,858,988,000	4,878,988,000					
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						318,988,000	328,988,000					
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan	6. Peningkatan Kualitas		Kab. Madiun,			Penambahan jumlah sarana prasarana TIK	10 Unit			150,000,000	150,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
	Layanan Perpustakaan Elektronik	Pelayanan		Mejayan, Krajan									
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penambahan Jumlah Rak Buku	6 Rak Buku			6,000,000	6,000,000	
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penambahan Jumlah Perpustakaan Terakreditasi Satuan Pendidikan Dasar	12 Sekolah			15,000,000	15,000,000	
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Penambahan Jumlah Tenaga Perpustakaan yang memperoleh Bimtek	40 Orang			15,000,000	25,000,000	
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penambahan Jumlah Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar			24,000,000	24,000,000	
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koleksi Perpustakaan	28215 Eksemplar			435,952,000	435,952,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan											
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									4,540,000,000	4,550,000,000		
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Pembangunan gedung perpustakaan	1 unit			4,500,000,000	4,500,000,000	
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	15 Orang			25,000,000	30,000,000	
2 23 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Tingkat Keterpilihan Terhadap Seluruh Peserta	30 %			15,000,000	20,000,000	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									234,000,000	234,000,000		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									181,800,000	181,800,000		
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									57,000,000	57,000,000		
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengguna arsip dinamis pada pencipta arsip	28 %			15,000,000	15,000,000	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah OPD yang Melaksanakan Penyusutan Arsip Dinamis	1 tahun			32,000,000	32,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah OPD yang Dilakukan Pengawasan Arsip Dinamis	20 OPD			26,000,000	26,000,000	
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									97,800,000	97,800,000		
2 24 02 2.02 01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Diserahkan ke ANRI	50 Berkas			10,000,000	10,000,000	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Arsip Statis yang diakuisisi, dipreservasi, diolah dan dibuat akses arsipnya	650 berkas			87,800,000	87,800,000	
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									27,000,000	27,000,000		
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengguna Informasi dan Layanan Kearsipan melalui JIKN	100 Orang			7,000,000	7,000,000	
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah OPD yang mendapat pendampingan dan pembinaan kearsipan	35 OPD			20,000,000	20,000,000	
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									52,200,000	52,200,000		
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun									25,000,000	25,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penilaian dan penetapan arsip usul musnah	6 kegiatan			25,000,000	25,000,000	
2 24 03 2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota									26,200,000	26,200,000		
2 24 03 2.02 02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah arsip akibat bencana yang dipulihkan	4 OPD			26,200,000	26,200,000	
2 24 03 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota									1,000,000	1,000,000		
2 24 03 2.04 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah arsip hasil alih yang dinilai dan ditetapkan	20 berkas			1,000,000	1,000,000	
TOTAL										8,542,455,997	8,562,455,997		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
3																												
3	25																					270,000,000	231,000,000					
3	25	03																				50,000,000	52,500,000					
3	25	03	2.01																			50,000,000	52,500,000					
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah bantuan bibit ikan	50000 ekor									50,000,000	52,500,000					
3	25	04																				120,000,000	73,500,000					
3	25	04	2.04																			120,000,000	73,500,000					
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah penyediaan pakan ikan	1 UPT									70,000,000	73,500,000					
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah bantuan bibit ikan	40000 ekor									50,000,000	0					
3	25	06																				100,000,000	105,000,000					
3	25	06	2.03																			100,000,000	105,000,000					
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Terlaksananya lomba kreasi cipta menu	2 even									100,000,000	105,000,000					
3	27																					29,002,164,518	31,829,084,295					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									15,520,315,268	16,296,131,032		
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									24,000,000	25,000,000		
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 dokumen		24,000,000	25,000,000		
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									14,374,638,175	15,093,370,084		
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gaji dan tunjangan yang terpenuhi	12 bulan		14,374,638,175	15,093,370,084		
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									313,677,093	329,360,948		
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan komponen listrik yang terpenuhi	12 bulan		5,000,000	5,250,000		
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana perkantoran yang terpenuhi	1 paket		20,000,000	21,000,000		
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang terpenuhi	12 bulan		5,000,000	5,250,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			JUmlah kebutuhan logistik yang terpenuhi	12 bulan			110,000,000	115,500,000	
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	12 bulan			10,000,000	10,500,000	
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi	12 bulan			3,500,000	3,675,000	
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 bulan			160,177,093	168,185,948	
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										511,000,000	536,550,000	
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 bulan			5,000,000	5,250,000	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan			150,000,000	157,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengukuran
				Kelurahan									
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 bulan			356,000,000	373,800,000	
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									297,000,000	311,850,000		
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran yang dilaksanakan	12 bulan			130,000,000	136,500,000	
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang dilaksanakan	12 bulan			10,000,000	10,500,000	
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran yang dilaksanakan	12 bulan			150,000,000	157,500,000	
3 27 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran lainnya yang dilaksanakan	12 bulan			7,000,000	7,350,000	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									1,305,000,000	1,340,250,000		
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									1,305,000,000	1,340,250,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bibit buah- buahan yang diperbantukan Jumlah pengembangan kebun bibit	3000 batang 2 kebun			805,000,000	820,250,000	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengembangan tembakau	1 paket			500,000,000	520,000,000	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										7,245,489,000	9,064,525,000	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian										4,951,257,000	5,196,332,000	
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan sarana prasarana tembakau Penyediaan subsidi pupuk	1 paket 1 tahun			4,951,257,000	5,196,332,000	
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian										2,294,232,000	3,868,193,000	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbangunnya jaringan irigasi usahatani	3 unit			515,000,000	2,000,000,000	
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbangunnya infrastruktur pertanian	5 unit			1,554,232,000	1,631,943,000	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua			Penyediaan pestisida Rehabilitasi BPP Kare	1 paket 1 unit			225,000,000	236,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
	Prasarana Pertanian Lainnya	Pariwisata		Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										90,000,000	94,500,000	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										90,000,000	94,500,000	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelatihan agens hayati	15 kec			90,000,000	94,500,000	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										4,841,360,250	5,033,678,263	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										4,841,360,250	5,033,678,263	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah petugas yang mengikuti pembinaan	15 BPP			190,000,000	199,500,000	
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah petani yang mengikuti pembinaan	250 orang			1,125,000,000	1,131,500,000	
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peningkatan administrasi di BPP	15 BPP			153,750,000	161,437,500	
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua			Jumlah kelompokani, Gapoktan, P3A, GP3A yang melakukan	20 kelompok			3,372,610,250	3,541,240,763	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.00 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pariwisata		Kecamatan, Semua Kelurahan			sekolah lapang						
TOTAL										29,272,164,518	32,060,084,295		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0001 Bagian Administrasi Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						435,864,070	601,000,000			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						435,864,070	601,000,000			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan						369,470,050	495,000,000			
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Rumusan Kebijakan			35,052,790	45,000,000	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Rumusan Kebijakan			142,500,000	200,000,000	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Rumusan Kebijakan			191,917,260	250,000,000	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah						66,394,020	106,000,000			
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			Jumlah Dokumen Kerjasama yang dilaksanakan	9 dokumen			61,544,020	100,000,000	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			Jumlah evaluasi pelaksanaan kerjasama	9 dokumen			4,850,000	6,000,000	
TOTAL										435,864,070	601,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0002 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						381,995,696	0				
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						381,995,696	0				
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						381,995,696	0				
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah produk hukum daerah (Perda dan Perbup) yang sesuai/harmonis dengan peraturan per- UU-an yang baru dan lebih tinggi	75 buah			65,000,000	0	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kasus perdata, pidana dan TUN litigasi dan non litigasi yang tertangani	5 kasus			175,387,275	0	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah produk hukum daerah yang diupload ke website JDIH	45 buah			141,608,421	0	
TOTAL										381,995,696	0					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0003 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
											Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target
4																		
4	01													345,900,937	1,479,970,920			
4	01	03												345,900,937	1,479,970,920			
4	01	03	2.03											345,900,937	1,479,970,920			
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Realisasi jumlah Paket yang dilaksanakan melalui e tendering/ e seleksi terhadap jumlah paket e tendering/ e seleksi yang diumumkan dalam SiRUP Prosentase jumlah penyedia pada SPSE yang telah dilakukan penilaian kinerjanya Prosentase nilai belanja pengadaan pada APBD yang diumumkan dalam SiRUP	100 persen 70 persen 75 persen			5,000,000	493,323,640		
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase penanganan permasalahan/pengaduan pengguna sistem aplikasi pengadaan barang jasa yang ditindaklanjuti persentase penerapan e kontrak pada aplikasi SPSE untuk E-tendering/ E- seleksi persentase status paket selesai pada aplikasi katalog elektronik dan toko daring (e purchasing)	100 persen 100 persen 100 persen			78,750,000	493,323,640		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0003 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumah kebutuhan SDM untuk jabatan fngsinal pengelola pengadaan barang jasa (JFPBJ) yang terpenuhi Persentase nilai belanja pengadaan pada APBD yang melalui proses pemilihan dengan metode Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Swakelola yang telah memanfaatkan aplikasi SPSE (Non E Tendering , Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola) Tingkat Kematangan UKPBJ					262,150,937	493,323,640	
TOTAL									345,900,937	1,479,970,920				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0005 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						5,424,566,211	5,940,999,999					
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						5,424,566,211	5,940,999,999					
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						5,424,566,211	5,940,999,999					
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual yang dilaksanakan	3834 kegiatan			4,423,999,999	4,645,999,999	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan sosial yang dikeluarkan	4 kebijakan			950,566,212	1,195,000,000	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rumusan kebijakan Kesejahteraan Masyarakat yang dikeluarkan	3 Kebijakan			50,000,000	100,000,000	
TOTAL										5,424,566,211	5,940,999,999						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0006 Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						676,672,729	740,000,000					
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						676,672,729	740,000,000					
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						246,672,729	300,000,000					
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan BLUD yang dikeluarkan Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan BUMD yang dikeluarkan	1 Kebijakan 3 Kebijakan			161,000,000	200,000,000	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Operasi Bersama yang dilaksanakan Jumlah Rumusan Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang dikeluarkan	6 Kali 2 Kebijakan			85,672,729	100,000,000	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						430,000,000	440,000,000					
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah informasi yang dikumpulkan terkait barang kena cukai ilegal Jumlah Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang cukai Jumlah Penerima bantuan Subsidi Harga Tembakau yang diberikan Jumlah penerima BLT Tembakau yang	6 Kali 12 Kali 135726 Kg 1509 Orang 1 Kebijakan 5 Kali			410,000,000	415,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0006 Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
							diberikan Jumlah Rumusan Kebijakan Pertanian, Perikanan yang dikeluarkan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang cukai						
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rumusan Kebijakan Energi dan Air yang dikeluarkan	1 Kebijakan			20,000,000	25,000,000	
TOTAL										676,672,729	740,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						22,833,780,335	22,833,780,335					
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						22,833,780,335	22,833,780,335					
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						785,150,000	785,150,000					
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah dokumen RKA-SKPD dan perubahan RKA SKPD yang tersusun	4 dokumen 3 dokumen 4 dokumen			735,150,000	735,150,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yg tersusun Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	3 dokumen 2 dokumen			50,000,000	50,000,000	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,831,776,869	12,831,776,869					
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan Gaji dan tunjangan ASN sekretariat daerah	14 bulan			12,828,776,869	12,828,776,869	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	2 dokumen			3,000,000	3,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	/Semesteran SKPD			Semua Kelurahan			bulanan/triwulan /semesteran sekretariat daerah						
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1,500,000	1,500,000	
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah penatausahaan barang milik daerah sekretariat daerah	20 unit			1,500,000	1,500,000	
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,500,000	1,500,000	
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pendataan dan pengolah administrasi kepegawaian sekretariat daerah	125 dokumen			1,500,000	1,500,000	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,611,684,594	2,611,684,594	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sekretariat daerah	20 unit			42,996,450	42,996,450	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat daerah	50 unit			54,297,350	54,297,350	
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan Rumah Tangga sekretariat daerah	23 jenis			6,000,000	6,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor sekretariat daerah	35 jenis			175,875,000	175,875,000	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang cetakan dan penggandaan sekretariat daerah	8 jenis			116,125,000	116,125,000	
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah langganan Bahan Bacaan sekretariat daerah	120 eksemplar			50,000,000	50,000,000	
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ketersediaan bahan/material sekretariat daerah	3 jenis			712,400,000	712,400,000	
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kunjungan tamu ke sekretariat daerah	90 tamu			10,000,000	10,000,000	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan rapat koordinasi dan konsultasi sekretariat daerah	120 dokumen			1,443,990,794	1,443,990,794	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									950,000,000	950,000,000		
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan sekretariat daerah Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai klasifikasi	2 unit 2 unit			650,000,000	650,000,000	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel sekretariat daerah	2 unit			100,000,000	100,000,000	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya sekretariat daerah yang terlaksana	2 unit			100,000,000	100,000,000	
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sekretariat daerah	2 unit			100,000,000	100,000,000	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,326,668,936	2,326,668,936		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa surat menyurat sekretariat daerah	2 jenis			26,000,000	26,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sekretariat daerah	12 bulan			1,550,668,936	1,550,668,936	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat daerah	15 jenis			50,000,000	50,000,000	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	20 kelompok			700,000,000	700,000,000	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,450,000,000	1,450,000,000	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sekretariat daerah Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sekretariat daerah	20 unit 4 unit			1,300,000,000	1,300,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel sekretariat daerah yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit			50,000,000	50,000,000	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya sekretariat daerah yang terpelihara secara rutin/berkala	5 unit			50,000,000	50,000,000	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya sekretariat daerah yang terpelihara secara rutin/berkala Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sekretariat daerah yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit 2 unit			50,000,000	50,000,000	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										1,625,499,936	1,625,499,936	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	28 dokumen			762,159,436	762,159,436	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH yang terpenuhi	10 stel			100,000,000	100,000,000	
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah medical check up KDH/WKDH yang terfasilitasi	4 kali			70,000,000	70,000,000	
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terfasilitasi	24 dokumen			693,340,500	693,340,500	
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										250,000,000	250,000,000	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang terfasilitasi	10 jenis			100,000,000	100,000,000	
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang terfasilitasi	10 jenis			100,000,000	100,000,000	
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			jumlah kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang terpenuhi	9 bagian			50,000,000	50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
TOTAL										22,833,780,335	22,833,780,335		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0008 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						485,071,996	478,071,996					
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						485,071,996	478,071,996					
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi						485,071,996	478,071,996					
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat daerah yang terverifikasi Anjab, Evajab, Kelas Jabatab sampai dengan Skor atau Job Value dari ASN serta proses Kelembagaan PD Sesuai dengan Tugas Fungsi dan Peraturan Perundangan yang berlaku	60 PD			117,000,000	110,000,000	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya Kegiatan pelayanan Publik di PD secara menyeluruh serta Tata Laksana yang sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	40 PD			95,000,000	95,000,000	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyusunan Review Road Map RB terhadap 8 area perubahan serta Jumlah Perangkat Daerah yang sudah menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai dengan Perangkat daerah masing-masing	54 PD			118,057,596	118,057,596	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0008 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Monev, evaluasi dan pengendalian terhadap Pelayanan Publik dan Tata Laksana di Perangkat Daerah sesuai dengan karakter PD dan Peraturan Perundangan yang berlaku	40 PD			90,000,000	90,000,000	
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pendampingan serta Jumlah PD yang menyusun dan melaporkan dan menganalisis Target Kinerja secara Triwulan sampai dengan Akhir Tahun sesuai dengan Target yang telah ditetapkan sebagai syarat dalam Pelaporan pada Kementerian PAN dan RB	62 PD			65,014,400	65,014,400	
TOTAL											485,071,996	478,071,996	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0009 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1,002,618,723	1,002,618,723				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,002,618,723	1,002,618,723				
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1,002,618,723	1,002,618,723				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi keprotokolan kegiatan Pimpinan	305 kegiatan			841,309,138	841,309,138	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi komunikasi kegiatan Pimpinan	4 unsur			20,805,100	20,805,100	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan Pimpinan	305 kegiatan			140,504,485	140,504,485	
TOTAL										1,002,618,723	1,002,618,723					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0010 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						500,000,000	500,000,000				
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						500,000,000	500,000,000				
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						500,000,000	500,000,000				
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi penyusunan program pembangunan	4 dokumen			1,200,000,000	1,200,000,000	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengendalian dan evaluasi program pembangunan	3 Dokumen			200,000,000	200,000,000	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan	3 Dokumen			200,000,000	200,000,000	
TOTAL											500,000,000	500,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	02				SEKRETARIAT DPRD						62,464,302,315	62,464,302,315					
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32,590,400,402	32,590,400,402					
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34,368,200	34,368,200					
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	4 Dokumen			14,368,200	14,368,200	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Jenis Laporan			10,000,000	10,000,000	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Renja	2 Jenis Laporan			10,000,000	10,000,000	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,102,204,716	4,102,204,716					
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembayara gaji dan tunjangan ASN yang terselesaian tepat waktu	39 orang			3,943,804,716	3,943,804,716	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen honorarium pengelola keuangan SKPD	12 bulan			158,400,000	158,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									313,840,000	313,840,000		
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti diklat sesuai Tugas dan Fungsi	17 orang			50,000,000	50,000,000	
4 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk ASN	3 Kegiatan			20,000,000	20,000,000	
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	6 Kali			243,840,000	243,840,000	
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,260,163,641	1,260,163,641		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat dan Komponen instalasi listrik yang diperlukan	10 Jenis			30,993,844	30,993,844	
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	6 Jenis			90,408,960	90,408,960	
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Jumlah peralatan rumah tangga yang butuh	6 Jenis			66,662,800	66,662,800	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Semua Kelurahan									
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Logistik dan ATK	20 Jenis			240,510,050	240,510,050	
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 Jenis			150,349,787	150,349,787	
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Bacaan dan langganan surat kabar	6 jenis			70,000,000	70,000,000	
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	104 Kali			140,398,200	140,398,200	
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali			470,840,000	470,840,000	
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									450,640,660	450,640,660		
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua			Jumlah Pengadaan Mebel	3 Jenis			130,598,880	130,598,880	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kecamatan, Semua Kelurahan									
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis			320,041,780	320,041,780	
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,297,070,038	1,297,070,038	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Surat menyurat yang terselesaikan	4 jenis			10,000,000	10,000,000	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	4 Jenis Rekening			290,100,000	290,100,000	
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 jenis			996,970,038	996,970,038	
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,595,391,701	1,595,391,701	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perawatan Kendaraan Dinas Jabatan	4 Kali			321,306,330	321,306,330	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perbaikan kendaraan dinas operasional	4 kali			702,114,772	702,114,772	
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan mebeleur	2 kali			25,000,000	25,000,000	
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 kali			140,000,000	140,000,000	
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4 kali			347,570,410	347,570,410	
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4 kali			59,400,189	59,400,189	
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										23,426,721,446	23,426,721,446	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			Pembayaran gaji dan tunjangan Anggota DPRD tepat waktu	45 orang			22,851,320,771	22,851,320,771	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Semua Kelurahan									
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	5 stel			359,400,675	359,400,675	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan medical check Up DPRD	1 kali			216,000,000	216,000,000	
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD										110,000,000	110,000,000	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi kegiatan rapat fraksi DPRD	12 kali			40,000,000	40,000,000	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12 kali			70,000,000	70,000,000	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										29,873,901,913	29,873,901,913	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										3,284,988,600	3,284,988,600	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pembahasan program pembentukan Perda	10 dok			18,500,000	18,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen pembahasan raperda	12 dok			1,646,042,500	1,646,042,500	
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Peraturan daerah yang di kaji	15 dok			1,451,946,100	1,451,946,100	
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen naskah akademik yang terselesaikan	3 dok			148,500,000	148,500,000	
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat pembahasan perubahan tata tertib DPRD	4 kali			20,000,000	20,000,000	
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										2,316,620,350	2,316,620,350	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembahasan KUA dan PPAS yang tepat waktu	1 Kegiatan			271,829,750	271,829,750	
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS yang tepat waktu	1 Kegiatan			271,829,750	271,829,750	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
				Kelurahan									
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembahasan APBD yang tepat waktu	1 Kegiatan			652,400,850	652,400,850	
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kegiatan pembahasan perubahan APBD yang tepat waktu	1 Kegiatan			550,490,000	550,490,000	
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat laporan pembahasan laporan semester	1 kali			17,000,000	17,000,000	
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah keg pembahasan pertanggungjawaban yang tepat waktu APBD	1 Kegiatan			553,070,000	553,070,000	
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										235,576,300	235,576,300	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan rapat pengawasan bid pemerintahan dan hukum	6 kali			10,000,000	10,000,000	
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			Jumlah rapat pengawasan bidang infrastruktur	6 kali			10,000,000	10,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Semua Kelurahan									
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rapat pengawasan bidang kesra	6 kali			10,000,000	10,000,000	
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat pengawasan bidang perekonomian	4 kali			10,000,000	10,000,000	
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rapat pengawasan bidang SDA	6 Kali			10,000,000	10,000,000	
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rapat pembahasan Tindak lanjut Pemerisaan BPK RI	1 kali			85,243,000	85,243,000	
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat pembahasan LKPJ kepala Daerah	3 kali			100,333,300	100,333,300	
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										6,559,141,300	6,559,141,300	
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua			Jumlah pelaksanaan Bimbingan teknis DPRD	4 kali			2,980,000,000	2,980,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kecamatan, Semua Kelurahan									
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Publikasi dan Dokumentasi kegiatan DPRD	70 kali			836,193,600	836,193,600	
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok pakar dan Tim Ahli	4 kelompok			150,000,000	150,000,000	
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga Ahli Fraksi DPRD	6 orang			180,000,000	180,000,000	
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	24 kali			2,163,795,200	2,163,795,200	
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penyusunan program kerja DPRD	1 kali			249,152,500	249,152,500	
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										1,192,000,000	1,192,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kunjungan kerja dalam daerah Anggota DPRD	48 kali			75,000,000	75,000,000	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat penyusunan pikir DPRD	3 kali			10,000,000	10,000,000	
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Reses DPRD	3 keg			1,107,000,000	1,107,000,000	
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									20,000,000	20,000,000		
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat penyusunan kode etik DPRD	10 kali			20,000,000	20,000,000	
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD									16,265,575,363	16,265,575,363		
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	72 kali			15,275,220,558	15,275,220,558	
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Jumlah dokumen dan laporan Kinerja DPRD	1 Dokumen			251,010,805	251,010,805	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Semua Kelurahan									
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan rapat Badan Musyawarah DPRD	12 kali			45,000,000	45,000,000	
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi kegiatan Pimpinan DPRD	24 kali			694,344,000	694,344,000	
TOTAL											62,464,302,315	62,464,302,315	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	01				PERENCANAAN						8,670,355,340	9,132,561,972					
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,897,623,396	5,897,623,396					
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						116,569,870	116,569,870					
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Tersusun	8 dokumen			116,569,870	116,569,870	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,722,930,335	4,722,930,335					
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gajidan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan	1 Tahun			4,242,130,335	4,242,130,335	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan			480,800,000	480,800,000	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						354,091,681	354,091,681					
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	12 Bulan			10,441,860	10,441,860	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 Bulan			13,393,380	13,393,380	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Bulan			2,000,207	2,000,207	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah logistik kantor yang tersedia	12 Bulan			84,349,668	84,349,668	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan			15,668,566	15,668,566	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	12 Bulan			5,244,000	5,244,000	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan			222,994,000	222,994,000	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										452,191,810	452,191,810	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	12 Bulan			187,325,594	187,325,594	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
				Semua Kelurahan									
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Pelayanan Umum yang Tersedia	12 Bulan			264,866,216	264,866,216	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									251,839,700	251,839,700		
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12 Bulan			211,449,700	211,449,700	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	12 Bulan			19,990,000	19,990,000	
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	12 Bulan			20,400,000	20,400,000	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									984,510,745	984,510,745		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									435,000,000	435,000,000		
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota										80,000,000	80,000,000	
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi										15,000,000	15,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
	Musrenbang Kecamatan												
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	6 dokumen			340,000,000	340,000,000	
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									365,010,745	365,010,745		
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data Informasi Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Jenis			313,010,745	313,010,745	
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Profil Pembangunan Daerah yang dihasilkan	2 Jenis			52,000,000	52,000,000	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									184,500,000	184,500,000		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota										6,100,000	6,100,000	
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LKPJ yang disusun Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 laporan 3 laporan			178,400,000	178,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1,788,221,199	2,250,427,831			
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								204,427,831	207,427,831			
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 dokumen			13,374,636	13,374,636	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen			13,413,571	13,413,571	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat DaerahBidang Pemerintahan	1 Dokumen			30,759,500	30,759,500	
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen			2,438,785	3,000,000	
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen			Kab. Madiun, Semua			jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen			2,246,800	2,246,800	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)						
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen			13,600,915	13,600,915	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah buku Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 buku			14,635,605	14,635,605	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen			113,958,019	116,396,804	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										266,066,743	283,000,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata 1. Peningkatan Nilai Tambah		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen			32,508,400	40,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ekonomi Dan Pariwisata											
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen			6,198,000	8,000,000	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Kegiatan			20,064,000	22,000,000	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Kegiatan			61,073,600	63,000,000	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, Penanaman Modal, Perdagkop dan UKM	1 dokumen			12,435,968	15,000,000	
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan			Kab. Madiun, Semua Kecamatan,			Dokumen Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA,	1 dokumen			6,198,500	8,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Perangkat Daerah Bidang SDA			Semua Kelurahan			Penanaman Modal, Perdagkop dan UKM						
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, Penanaman Modal, Perdagkop dan UKM	1 dokumen			20,064,000	22,000,000	
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1. Peningkatan Nilai Tambah ekonomi Dan Pariwisata		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Kegiatan			123,778,475	125,000,000	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									1,317,726,625	1,760,000,000		
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersusunnya laporan hasil kordinasi	1 dokumen			300,000,000	110,000,000	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersusunnya laporan hasil asistensi	1 dokumen			50,000,000	55,000,000	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 dokumen			75,000,000	275,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Semua Kelurahan									
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersusunnya laporan hasil koordinasi	1 dokumen			100,000,000	440,000,000	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							389,221,950	500,000,000	
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur					tercapainya kegiatan pd kelurahan dan Kominfo	12 bulan			50,000,000	50,000,000	
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya program kewilayahan sesuai dengan RPJMD	1 tahun			75,000,000	330,000,000	
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua			terlaksananya program IPDMIP Kab. Madiun	3 OPD			278,504,675	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			Kecamatan, Semua Kelurahan									
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										809,706,995	612,907,473	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										809,706,995	612,907,473	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										156,799,523	156,799,523	
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum						rekomendasi bidang pemerintahan umum	1 dokumen			91,071,412	91,071,412	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						Laporan hasil kelitbangan	1 dokumen			65,728,111	65,728,111	
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Naskah Akademik yang Dihasilkan	1 Naskah Akademik			0	0	
5 05 02 2.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Evaluasi Kebijakan yang Dilaksanakan	1 Kebijakan			0	0	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										426,799,522	230,000,000	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Rekomendasi	2 kajian			201,799,522	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pariwisata yang Dihasilkan	1 Kajian			225,000,000	230,000,000	
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									75,000,000	75,000,000		
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup yang Dihasilkan	1 Kajian			0	0	
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum										75,000,000	75,000,000	
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi									151,107,950	151,107,950		
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah inovasi yang ditindaklanjuti	16 Inovasi			151,107,950	151,107,950	
TOTAL											9,480,062,335	9,745,469,445	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	02				KEUANGAN						451,147,378,678	451,147,378,678					
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						34,074,000,000	34,074,000,000					
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						168,431,130	168,431,130					
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 Dokumen			168,431,130	168,431,130	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32,219,000,000	32,219,000,000					
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan	12 bulan			32,074,000,000	32,074,000,000	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya rakor dan konsultasi	12 Bulan			145,000,000	145,000,000	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55,000,000	55,000,000					
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	15 Orang			55,000,000	55,000,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						466,314,242	466,314,242					
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	6. Peningkatan Kualitas		Kab. Madiun,			Jumlah kebutuhan komponen instalasi	12 Bulan			5,998,993	5,998,993	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelayanan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			listrik						
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan kantor yang tersedia	12 Bulan			38,706,215	38,706,215	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ATK yang diadakan, Jumlah snack rapat dan tamu yang terpenuhi	12 Bulan			326,371,364	326,371,364	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy yang diadakan	12 Bulan			95,237,670	95,237,670	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									623,371,218	623,371,218		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen surat menyurat	12 Bulan			2,000,000	2,000,000	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			152,082,710	152,082,710	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga kebersihan, resepsinis dan keamanan kantor yang tersedia	12 Bulan			469,288,508	469,288,508	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										541,883,410	541,883,410	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan rutin dan pajak kendaraan dinas/jabatan	12 Bulan			358,286,260	358,286,260	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan rutin alat kantor	12 Bulan			123,117,500	123,117,500	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan			60,479,650	60,479,650	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										415,041,849,790	415,041,849,790	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										1,291,730,032	1,291,730,032	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rancangan Perda tentang APBD	240 buku			106,128,400	106,128,400	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rancangan Perubahan Perda tentang APBD	240 buku			105,378,400	105,378,400	
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA SKPD APBD Kab. Madiun	54 Dokumen			30,752,700	30,752,700	
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD APBD Kab Madiun	54 Dokumen			30,752,700	30,752,700	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA SKPD APBD kab. Madiun	54 Dokumen			24,288,000	24,288,000	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD APBD Kab. Madiun	54 Dokumen			24,288,000	24,288,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah buku Raperda tentang APBD dan perubahan APBD	240 buku			500,000,000	500,000,000	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah buku rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD	240 buku			242,931,587	242,931,587	
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah regulasi dan kebijakan bidang anggaran	6 Dokumen			100,791,615	100,791,615	
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan daerah	12 Bulan			126,418,630	126,418,630	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										500,000,000	500,000,000	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan asistensi	1 kali			244,577,197	244,577,197	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan realisasi	4 laporan			159,500,338	159,500,338	
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan realisasi	12 laporan			95,922,465	95,922,465	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									315,874,558	315,874,558		
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan realisasi APBD dan prognosis	2 laporan			9,514,692	9,514,692	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan Prognosis dan realisasi APBD sesuai SAP	240 buku			250,480,254	250,480,254	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Kabupaten/Kota												
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah regulasi	1 regulasi			55,879,612	55,879,612	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									412,934,245,200	412,934,245,200		
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Khusus	12 Bulan			373,721,928,200	373,721,928,200	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Terduga	12 Bulan			30,000,000,000	30,000,000,000	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi	12 Bulan			9,212,317,000	9,212,317,000	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									2,031,528,888	2,031,528,888		
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									2,031,528,888	2,031,528,888		
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan penggunaan dan pemanfaatan BMD	12 Laporan			759,834,850	759,834,850	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen inventarisasi dan penghapusan aset	121 Dokumen			327,878,613	327,878,613	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Madiun	12 Bulan			887,410,800	887,410,800	
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen rekonsiliasi neraca aktiva tetap	1 Dokumen			56,404,625	56,404,625	
TOTAL											451,147,378,678	451,147,378,678	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
5																												
5	02																					8,847,187,899	8,847,187,899					
5	02	01																				7,688,675,564	7,688,675,564					
5	02	01	2.02																			6,502,975,564	6,502,975,564					
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan				Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Terpenuhinya belanja pegawai	100 persen							6,502,975,564	6,502,975,564					
5	02	01	2.06																			319,600,000	319,600,000					
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Tersedianya komponen listrik	100 persen							3,000,000	3,000,000					
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun							15,000,000	15,000,000					
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Tersedianya peralatan rumah tangga	1 tahun							5,000,000	5,000,000					
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Tersedianya bahan logistik kantor	1 tahun							143,000,000	143,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	1 tahun			29,000,000	29,000,000	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	1 tahun			6,500,000	6,500,000	
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan/material	1 tahun			7,100,000	7,100,000	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya rapat dan koordinasi	1 tahun			111,000,000	111,000,000	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										35,000,000	35,000,000	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya pengadaan mebel	1 tahun			15,000,000	15,000,000	
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Terlaksananya sarpras gedung kantor	1 tahun			10,000,000	10,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya sarpras gedung kantor	1 tahun			10,000,000	10,000,000	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										680,000,000	680,000,000	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun			1,000,000	1,000,000	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun			164,000,000	164,000,000	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 tahun			515,000,000	515,000,000	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										151,100,000	151,100,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	1 tahun			116,000,000	116,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan dan mesin lainnya	1 tahun			26,500,000	26,500,000	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 tahun			8,600,000	8,600,000	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										1,158,512,335	1,158,512,335	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										1,158,512,335	1,158,512,335	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pendataan obyek PAD Jumlah SPPT PBB yang tercetak	1 bendel 410.5 SPPT			218,750,000	218,750,000	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peningkatan target pajak daerah	8 milyar			172,492,147	172,492,147	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang dilaksanakan pemutakhiran	2 desa			309,142,752	309,142,752	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua			Jumlah dokumen verifikasi piutang Jumlah pengajuan	1 bendel 1300 berkas			25,000,000	25,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Daerah			Kecamatan, Semua Kelurahan			keberatan/pengurang an yang diverifikasi						
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang melunasi PBB Jumlah pelunasan SPPT PBB P2 Jumlah SPPT PBB yang terdistribusikan	90 DESA 343000 SPPT 410500 SPPT			248,498,700	248,498,700	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilaksanakan Jumlah sarana pemungutan PAD yang tercetak	2 desa 24 karcis			184,628,736	184,628,736	
TOTAL											8,847,187,899	8,847,187,899	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	03				KEPEGAWAIAN						7,571,943,158	7,173,647,278					
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,551,018,876	3,994,926,463					
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67,000,000	67,540,600					
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Terpenuhi	14 Dokumen			67,000,000	67,540,600	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,740,367,489	3,927,385,863					
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			GAJI BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022 TERBAYARKAN 100%	14 BULAN			3,740,367,489	3,927,385,863	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						246,002,107	0					
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya alat listrik/penerangan bangunan kantor	95 %			6,900,000	0	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	95 %			45,000,000	0	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua			terpenuhinya peralatan rumah tangga	95 %			20,050,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	95 %			54,880,000	0	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan	95 %			4,700,000	0	
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang undangan	95 %			3,600,000	0	
5 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya bahan/material untuk kebutuhan kantor	95 %			65,869,411	0	
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya fasilitasi untuk kunjungan tamu	95 %			3,800,000	0	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya penyelenggaraan untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	95 %			41,202,696	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									427,120,490	0		
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik kantor	95 %			159,120,490	0	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	95 %			268,000,000	0	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									70,528,790	0		
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dan pajak kendaraan dinas perorangan dan jabatan	95 %			20,352,435	0	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	95 %			30,176,355	0	
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	95 %			20,000,000	0	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									3,020,924,282	3,178,720,815		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN										517,291,064	535,087,597	
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang sesuai dengan Kebutuhan (Formasi dan Bezeting)	907 Pegawai			355,931,064	373,727,597	
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			PNS yang menerima SK Pensiun	500 orang			74,500,000	74,500,000	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Update data ASN	7000 ASN			86,860,000	86,860,000	
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN										587,414,578	587,414,578	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pegawai yang mutasi sesuai aturan yang berlaku	100 %			9,596,400	9,596,400	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN yang KP tepat waktu	100 %			61,343,070	61,343,070	
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							516,475,108	516,475,108	
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN										1,870,000,000	2,010,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center										200,000,000	340,000,000	
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan Latsar CPNS Pelaksanaan PKP (40 Peserta) Pengiriman Peserta PKN Pengiriman Peserta Prajabatan P3K	400 Orang 1 Angkatan 3 Orang 141 Orang			1,670,000,000	1,670,000,000	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										46,218,640	46,218,640	
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Hasil penghitungan PIP ASN	7000 ASN			25,000,000	25,000,000	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			ASN yang melanggar Disiplin	0 ASN			42,437,280	42,437,280	
TOTAL											7,571,943,158	7,173,647,278	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						5,645,108,774	6,947,500,000					
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,770,108,774	5,547,500,000					
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000	30,000,000					
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			JUmlah dokumen capaian kinerja dan anggaran yang terbit	8 dokumen			10,000,000	30,000,000	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,890,361,410	3,900,000,000					
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			prosentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %			3,890,361,410	3,900,000,000	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000	150,000,000					
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ASN yang mengikuti diklat	34 orang			50,000,000	150,000,000	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						367,247,364	547,500,000					
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			prosentase alat listrik yang diadakan	100 %			2,000,000	10,000,000	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/ Kota, Semua			prosentase tersedianya peralatan kantor	100 %			4,000,000	15,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Kecamatan, Semua Kelurahan									
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			prosentase tersedianya peralatan rumah tangga	100 %			15,000,000	40,000,000	
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			prosentase tersedianya bahan logistik	100 %			75,000,000	100,000,000	
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			prosentasetersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %			12,000,000	15,000,000	
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			prosentase tersediaanya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan			5,200,000	7,500,000	
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan			45,000,000	60,000,000	
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kabupaten/ Kota, Semua			jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang terselenggara	12 bulan			209,047,364	300,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
				Kecamatan, Semua Kelurahan									
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									40,000,000	200,000,000		
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	5 unit			40,000,000	200,000,000	
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									292,500,000	435,000,000		
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan			2,000,000	5,000,000	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan			120,000,000	180,000,000	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan			170,500,000	250,000,000	
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									120,000,000	285,000,000		
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas						terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	12 bulan			100,000,000	250,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Jabatan												
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpeliharanya peralatan dan mesin kantor lainnya	12 bulan			20,000,000	35,000,000	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										510,000,000	840,000,000	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal										275,000,000	540,000,000	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah OPD yang jumlah dokumen SAKIP nya sesuai ketentuan	53 OPD			75,000,000	150,000,000	
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen LHP yang terbit	24 LHP			25,000,000	75,000,000	
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHR Kinerja yang terbit	2 dokumen			15,000,000	40,000,000	
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHR yang terbit	1 dokumen			30,000,000	50,000,000	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa			Semua Kabupaten/ Kota, Semua			Jumlah dokumen pengawasan desa yang terbit	1 dokumen			30,000,000	50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kecamatan, Semua Kelurahan									
6 01 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP	10 OPD			50,000,000	75,000,000	
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			prosentase hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti prosentase hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	93 % 90 %			50,000,000	100,000,000	
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									235,000,000	300,000,000		
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kerugian daerah/negara yang selesai	380 jenis			35,000,000	50,000,000	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kasus pengaduan yang masuk	45 kasus			200,000,000	250,000,000	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									365,000,000	560,000,000		
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan									25,000,000	50,000,000		
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	10 dokumen			25,000,000	50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi										340,000,000	510,000,000	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen reviu yang terbit (RKA, RENJA, RKPD)	10 dokumen			20,000,000	60,000,000	
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			prosentase ASN yang telah melakukan pelaporan LHKASN	30 %			20,000,000	80,000,000	
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen tentang pencegahan korupsi yang diterbitkan (UPP, UPG, RADPK)	4 dokumen			250,000,000	300,000,000	
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah OPD yang sudah membangun zona integritas	6 OPD			50,000,000	70,000,000	
TOTAL											5,645,108,774	6,947,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Balerejo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Balerejo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
7																										
7	01																				2,555,130,418	2,564,942,357				
7	01	01																			2,425,130,418	2,429,970,457				
7	01	01	2.01																		2,052,961	2,500,000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																2,052,961	2,500,000				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																2,181,970,457	2,181,970,457				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan				Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %							2,181,970,457	2,181,970,457				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																115,907,000	118,500,000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan												2,400,000	2,500,000				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan				Terpenuhinya Penyediaan Alat tulis kantor	12 Bulan							11,607,000	12,000,000				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan				Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan							6,000,000	6,500,000				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			Kab. Madiun, Balerejo,				Terpenuhinya Bahan bakar kendaraan dinas	12 bulan							70,500,000	70,500,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Balerejo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Semua Kelurahan									
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	12 bulan			10,000,000	10,000,000	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 bulan			5,400,000	6,000,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Tepenuhinya makan minum untuk rapat dan koordinasi	12 bulan			10,000,000	11,000,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									94,200,000	95,000,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Jasa Air dan Listrik	12 bulan			34,200,000	35,000,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan			60,000,000	60,000,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									31,000,000	32,000,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	12 bulan			26,500,000	27,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Balerejo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (AC, Komputer, Printer, Scanner)	12 Bulan			4,500,000	5,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										46,773,000	47,000,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										6,773,000	7,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan Pelayanan pada Masyarakat di Kecamatan	1 Tahun			6,773,000	7,000,000	
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										40,000,000	40,000,000	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi terkait	12 bulan			40,000,000	40,000,000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										10,971,900	10,971,900	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										10,971,900	10,971,900	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Kesejahteraan dan Sosial di Kecamatan	1 Tahun			10,971,900	10,971,900	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										72,255,100	77,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										72,255,100	77,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Balerejo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa di Kecamatan	1 Tahun			23,414,100	24,000,000	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun			16,784,800	20,000,000	
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa										32,056,200	33,000,000	
TOTAL											2,555,130,418	2,564,942,357	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Dagangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						2,863,632,374	3,791,623,552					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,658,020,374	3,531,623,552					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,976,000	4,000,000					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	79 persen			2,976,000	4,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,430,364,271	3,159,473,552					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	80 persen			2,430,364,271	3,159,473,552	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						70,523,103	109,150,000					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76 persen			2,419,200	3,150,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor	79 persen			1,956,903	2,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Tersedianya Alat Tulis Kantor, Bahan Kebersihan, Makanan Minuman Pegawai, Makanan Minuman Rapat di SKPD	79 persen			31,265,000	35,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	6. Peningkatan Kualitas		Kab. Madiun,			Tersedianya bahan cetak dan	79 persen			2,882,000	7,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Dagangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Penggandaan	Pelayanan		Dagangan, Semua Kelurahan			penggandaan						
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Tersedianya Suvenir/Cinderamata/Karangan Bunga	79 persen			0	8,000,000	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Tersedianya Makanan Minuman Tamu di kecamatan	79 persen			0	4,000,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah dan luar daerah	79 persen			32,000,000	50,000,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	55,000,000		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Kantor dan Mesin lainnya	78 persen			0	55,000,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									67,773,000	80,000,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Komunikasi, internet, Tv, Pos dan Listrik	12 bulan			26,373,000	30,000,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Terbayarnya Gaji Tenaga Kebersihan kantor	12 bulan			41,400,000	50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Dagangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										86,384,000	124,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79 persen			75,000,000	95,000,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya agar berfungsi baik	79 persen			3,384,000	9,000,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun			8,000,000	20,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										25,000,000	35,000,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										25,000,000	35,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat yang terlaksana	78 persen			25,000,000	35,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										25,000,000	35,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										25,000,000	35,000,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	78 persen			25,000,000	35,000,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										86,422,000	105,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Dagangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							86,422,000	105,000,000				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Sinergitas Tiga Pilar di Kecamatan	78 persen			61,422,000	70,000,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama 7 tokoh masyarakat	78 persen			25,000,000	35,000,000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							10,000,000	20,000,000				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							10,000,000	20,000,000				
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pertemuan, sarasehan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang terlaksana	78 persen			10,000,000	20,000,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							59,190,000	65,000,000				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							59,190,000	65,000,000				
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang Terlaksana	12 bulan			59,190,000	65,000,000	
TOTAL									2,863,632,374	3,791,623,552			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01			KECAMATAN													
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										3,625,612,421	3,988,173,663	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan	12 bulan			5,324,565	5,857,022	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga, alat dan bahan pembersih	12 bulan			4,802,800	5,283,080	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 bulan			47,798,509	52,578,360	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 bulan			13,600,800	14,960,880	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	12 bulan			1,980,000	2,178,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	6. Peningkatan Kualitas		Kab. Madiun,			Terpenuhinya kebutuhan perjalanan	12 bulan			62,340,000	68,574,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Konsultasi SKPD	Pelayanan		Dolopo, Semua Kelurahan			dinas dalam dan luar daerah						
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									93,519,855	102,871,841		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			23,319,855	25,651,841	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan			70,200,000	77,220,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									93,125,810	102,398,391		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan			68,590,780	75,449,858	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga	12 bulan			7,982,250	8,740,475	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung kantor	12 bulan			16,552,780	18,208,058	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									6,508,000	7,158,800		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									6,508,000	7,158,800		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan berjalan efektif dan efisien	12 desa, kelurahan			6,508,000	7,158,800	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										14,039,050	15,442,955	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										14,039,050	15,442,955	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan berjalan efektif dan efisien	12 desa, kelurahan			14,039,050	15,442,955	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										9,975,000	10,972,500	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										9,975,000	10,972,500	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat terjalin dengan harmonis	12 desa, kelurahan			9,975,000	10,972,500	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										17,653,950	19,419,345	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										17,653,950	19,419,345	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional terlaksana dengan baik	1 paket kegiatan			17,653,950	19,419,345	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										14,240,000	15,664,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										14,240,000	15,664,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua			Administrasi pemerintahan desa tersusun dengan baik	10 desa			14,240,000	15,664,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
TOTAL										4,010,520,760	4,411,532,837		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Bangunsari Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						516,426,500	568,069,140					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						232,399,500	255,639,440					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	0					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			tercapainya pembangunan sarana dan prasarana Kel.Bangunsari Dolopo	100 %			0	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						99,372,589	109,309,848					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya kebutuhan alat listrik / penerangan knatr	12 bulan			3,044,976	3,349,474	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			2,651,699	2,916,869	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 bulan			61,746,564	67,921,220	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan pengadaan	12 bulan			16,949,350	18,644,285	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	12 bulan			1,980,000	2,178,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan			13,000,000	14,300,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Bangunsari Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										11,944,515	13,138,966	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	12 bulan			11,944,515	13,138,966	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										98,354,296	108,189,726	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			29,354,296	32,289,726	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya kebutuhan jasa kantor	12 bulan			69,000,000	75,900,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										22,728,100	25,000,900	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan			2,228,100	2,450,900	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya pemeliharaan alat kantor	12 bulan			500,000	550,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan			20,000,000	22,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										284,027,000	312,429,700	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										284,027,000	312,429,700	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Bangunsari Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari			terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kelurahan	12 bulan			100,000,000	110,000,000	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan			terpenuhinya kebutuhan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12 bulan			100,000,000	110,000,000	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya monev kelurahan	12 bulan			84,027,000	92,429,700	
TOTAL											516,426,500	568,069,140	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Mlilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						520,000,000	520,000,000					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						222,555,000	222,555,000					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7,245,000	7,245,000					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	3 dokumen			7,245,000	7,245,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						59,800,000	59,800,000					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	12 bulan			1,500,000	1,500,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	12 bulan			8,500,000	8,500,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			bahan logistik kantor yang tersedia	12 bulan			30,000,000	30,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	12 bulan			4,000,000	4,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Jumlah Bahan Bacaan dan Pertauran Perundang undangan yang Tersedia	12 bulan			1,800,000	1,800,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang	12 bulan			14,000,000	14,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Mlilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							dilaksanakan						
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									3,500,000	3,500,000		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara	12 bulan			3,500,000	3,500,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									120,055,000	120,055,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi	12 bulan			12,000,000	12,000,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Pelayanan Umum yang Tersedia	12 bulan			108,055,000	108,055,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									31,955,000	31,955,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 buah			9,600,000	9,600,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara	12 bulan			4,500,000	4,500,000	
7 01 01 2.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya pemeliharaan tanah bengkok	12 bulan			17,855,000	17,855,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Dolopo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Mlilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangu nan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											297,445,000	297,445,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											297,445,000	297,445,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			terlaksananya pembangunan di kelurahan mlilir	12 bulan				100,000,000	100,000,000	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			terlaksananya pemberdayaan masyarakat dikelurahan	12 bulan				100,000,000	100,000,000	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Dolopo, Mlilir			terlaksananya monev lembaga kelurahan	12 bulan				97,445,000	97,445,000	
TOTAL											520,000,000	520,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Geger

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01			KECAMATAN										2,704,905,160	2,953,395,676		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,565,846,183	2,800,430,801		
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,213,026,399	2,434,329,039		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										2,213,026,399	2,434,329,039	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										133,002,104	146,302,314		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 bulan			6,522,104	7,174,314	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia	12 bulan			5,000,000	5,500,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Kebutuhan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 bulan			37,850,000	41,635,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12 bulan			10,650,000	11,715,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	12 bulan			1,980,000	2,178,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	6. Peningkatan Kualitas		Kab. Madiun,			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dapat	12 bulan			71,000,000	78,100,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Geger

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Konsultasi SKPD	Pelayanan		Geger, Semua Kelurahan			terlaksana						
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									20,000,000	0		
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Pengadaan taplak meja rapat yang tersedia	1 paket			20,000,000	0	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									99,775,000	109,752,500		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	12 bulan			20,400,000	22,440,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 bulan			79,375,000	87,312,500	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									100,042,680	110,046,948		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang tersedia	12 bulan			64,490,000	70,939,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Kebutuhan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tersedia	12 bulan			15,000,000	16,500,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	6. Peningkatan Kualitas		Kab. Madiun,			Pemeliharaan Gedung Kantor yang tersedia	12 bulan			20,552,680	22,607,948	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Geger

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	dan Bangunan Lainnya	Pelayanan		Geger, Semua Kelurahan									
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										10,230,000	11,253,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										10,230,000	11,253,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dapat terlaksana	12 bulan			10,230,000	11,253,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										58,641,057	64,505,163	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										58,641,057	64,505,163	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Kegiatan Pemberdayaan Desa yang ada di Wilayah Kecamatan	19 desa			58,641,057	64,505,163	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										8,137,800	8,951,580	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										8,137,800	8,951,580	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berjalan dengan baik	19 desa			8,137,800	8,951,580	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										40,970,600	45,067,660	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										40,970,600	45,067,660	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional terlaksana dengan baik	19 desa			40,970,600	45,067,660	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										21,079,520	23,187,472	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Geger

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									21,079,520	23,187,472		
7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan			Administrasi Tata Pemerintahan Desa dapat terlaksana dengan baik	19 desa			21,079,520	23,187,472	
TOTAL										2,704,905,160	2,953,395,676		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Gemarang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						1,966,255,022	0					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,901,255,022	0					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,000,000	0					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			koordinasi dan penyusunan laporan capaian konerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilaksanakan	100 %			5,000,000	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,588,777,984	0					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	100 %			1,588,777,984	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						134,230,053	0					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			perlengkapan dan peralatan kantor tersedia	100 %			23,064,400	0	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			perlatan rumah tangga yang tersedia	100 %			3,713,710	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			logistik kantor yang tersedia	100 %			38,531,943	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	6. Peningkatan Kualitas		Kab. Madiun,			barang cetakan dan penggandaan yang	100 %			7,040,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Gemarang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
	Penggandaan	Pelayanan		Gemarang, Semua Kelurahan			tersedia						
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	100 %			1,980,000	0	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	100 %			59,900,000	0	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									105,385,195	0		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	100 %			26,785,195	0	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	100 %			78,600,000	0	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									67,861,790	0		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas kantor	100 %			56,429,170	0	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua			pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana	100 %			5,130,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Gemarang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang terlaksana	100 %			6,302,620	0	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										10,000,000	0	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										10,000,000	0	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			efektifitas pelaksanaan pelayanan yang ditingkatkan	100 %			10,000,000	0	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										35,000,000	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										35,000,000	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang ditingkatkan	100 %			35,000,000	0	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										10,000,000	0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										10,000,000	0	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat yang dilaksanakan	100 %			10,000,000	0	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										5,000,000	0	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										5,000,000	0	
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua			penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang	100 %			5,000,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Gemarang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan			terlaksana						
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										5,000,000	0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										5,000,000	0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan			fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang terlaksana	100 %			15,000,000	0	
TOTAL										1,966,255,022	0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN						2,912,314,860	3,013,390,096			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,833,570,460	2,930,235,096			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,697,600	1,850,000			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	14 Dokumen		1,697,600	1,850,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,501,323,000	2,551,323,000			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan		Gaji ASN yang dibayarkan	12 Bulan		2,501,323,000	2,551,323,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						90,852,500	105,395,000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan		Alat penerangan kantor yang tersedia	12 Bulan		1,050,000	1,750,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan		Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang tersedia	12 Bulan		10,057,500	11,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	12 Bulan		7,795,000	8,500,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan,		Barang cetak, penggandaan dan suvenir yang tersedia	12 bulan		14,545,000	15,999,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Semua Kelurahan									
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	12 bulan			1,980,000	2,178,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Mamin rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia	12 bulan			55,425,000	65,967,500	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										57,290,860	64,519,946	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Mebel kantor yang tersedia	1 Paket			5,000,000	7,500,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Peralatan kantor yang tersedia	1 paket			27,290,860	30,019,946	
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Sarana prasarana pendukung kantor yang terpenuhi	1 Paket			25,000,000	27,000,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										96,246,000	105,870,600	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Listrik, air dan telpon yang tercukupi	12 bulan			27,846,000	30,630,600	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			tenaga kerja non ASN siap pakai	12 bulan			68,400,000	75,240,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										86,160,500	101,276,550	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai	12 bulan			69,610,500	82,071,550	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Sarana pendukung kantor siap pakai	12 bulan			11,550,000	12,705,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			gedung/ bangunan kantor terawat baik	1 Paket			5,000,000	6,500,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										16,781,000	20,055,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										12,851,000	15,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggraan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan yang terlaksana	1 kegiatan			6,497,500	7,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pemerintah di kecamatan yang terselenggara	1 kegiatan			6,353,500	7,500,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									3,930,000	5,055,000		
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan perencanaan kegiatan pelayanan yang terlaksana	1 kegiatan			1,965,000	2,555,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelayanan yang terlaksana	1 kegiatan			1,965,000	2,500,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									1,310,000	2,100,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									1,310,000	2,100,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	1 kegiatan			1,310,000	2,100,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									1,310,000	1,750,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									1,310,000	1,750,000		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan kegiatan pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terlaksana	1 kegiatan			1,310,000	1,750,000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									20,080,000	21,300,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									20,080,000	21,300,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan kegiatan PHBN yang dilaksanakan	1 kegiatan			12,000,000	12,500,000	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar agama yang dilaksanakan	2 kegiatan			5,580,000	6,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan kegiatan tiga pilar yang dilaksanakan	1 kegiatan			2,500,000	2,800,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										39,263,400	37,950,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										39,263,400	37,950,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Administrasi desa yang tertib sesuai dengan peraturan perundang - undangan	14 desa			5,580,000	0	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Administrasi Keuangan dan Aset desa yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	14 Desa 1 kegiatan			2,980,000	3,500,000	
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan,			Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian	1 kegiatan			17,500,000	19,700,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Perangkat Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kelurahan			Perangkat Desa Yang Terlaksana						
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	1 kegiatan			7,440,000	8,500,000	
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan fasilitasi dan penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	1 kegiatan			14,513,400	16,100,000	
TOTAL										2,912,314,860	3,013,390,096		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kebonsari

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						2,104,525,244	2,298,752,768					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,039,545,754	2,211,630,568					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,700,250,574	1,870,275,631					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			terpenuhinya gaji dan tunjangan	12 bulan			1,700,250,574	1,870,275,631	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						122,754,689	86,133,982					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			Tersedianya Alat Listrik	12 bulan			3,355,300	3,690,830	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			jumlah penyediaan kebutuhan atk kiantor yang tersedia	12 bulan			30,052,654	28,170,967	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan Rumah tangga	12 bulan			6,803,296	3,720,365	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			tersedianya cetak dan foto copy	12 bulan			8,609,929	14,713,820	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kebonsari

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			tersedianya bahan bacaan	12 bulan			1,980,000	2,178,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			tersedianya perjalan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan			143,907,020	67,320,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										46,000,000	67,410,805	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	12 bulan			46,000,000	67,410,805	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										95,234,080	94,391,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			terpenuhinya telp dan listrik kantor	12 bulan			37,284,080	33,671,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan			57,950,000	60,720,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										75,306,411	93,419,150	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kebonsari

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			Terpenuhinya BBM,tersedianya suku cadang kendaraan,terpenuhinya servis kendaraan, terbayarnya pajak kendaraan	12 bulan			57,740,095	80,678,290	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			tersedianyan pendukung kantor	12 bulan			6,483,280	5,488,780	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			terpeliharayan gedung kantor	12 bulan			11,083,036	7,252,080	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										3,061,500	17,528,500	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										3,061,500	17,528,500	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			terselenggaranya pelayanan di kecamatan	12 bulan			3,061,500	17,528,500	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										25,000,000	20,649,200	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										25,000,000	20,649,200	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			terselenggaranya pemberdayaan dan pembangunan	14 Desa			25,000,000	20,649,200	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										10,072,800	9,828,500	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										10,072,800	9,828,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kebonsari

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			terselenggaranya kesejahteraan sosial	14 desa			10,072,800	9,828,500	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										16,851,030	16,281,100	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										16,851,030	16,281,100	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			terselenggaranya ketentraman dan ketertiban	14 desa			16,851,030	16,281,100	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										9,994,160	22,834,900	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										9,994,160	22,834,900	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan			teselenggaranya tata pemerintahan	14 desa			9,994,160	22,834,900	
TOTAL											2,104,525,244	2,298,752,768	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kare
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN						2,238,003,630	0			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,140,339,500	0			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7,270,300	0			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan					7,270,300	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,930,824,747	0			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan					1,930,824,747	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						56,166,000	0			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan					2,226,000	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan					10,000,000	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan					33,876,800	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan					5,866,600	0	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua					2,310,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kare
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan							1,886,600	0	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									89,384,000	0		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan							14,384,000	0	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan							75,000,000	0	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									56,694,453	0		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan							47,694,453	0	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan							3,000,000	0	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan							6,000,000	0	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									15,000,000	0		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									15,000,000	0		
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua							15,000,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kare
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Wilayah Kecamatan			Kelurahan									
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									43,000,000	0		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									3,000,000	0		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan						3,000,000	0		
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									40,000,000	0		
7 01 04 2.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan						40,000,000	0		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									39,664,130	0		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									39,664,130	0		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan						25,478,200	0		
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan						14,185,930	0		
TOTAL										2,238,003,630	0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Madiun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Madiun

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
7																										
7	01																				3,840,755,132	3,848,035,000				
7	01	01																			3,780,755,132	3,786,435,000				
7	01	01	2.01																		2,426,521	2,500,000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													2,426,521	2,500,000				
7	01	01	2.02																		3,434,011,761	3,435,000,000				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													3,434,011,761	3,435,000,000				
7	01	01	2.06																		113,537,760	115,235,000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													2,446,000	2,500,000				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													4,750,000	4,785,000				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													4,702,500	4,850,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Madiun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							26,409,260	26,500,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							6,250,000	6,500,000	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							1,980,000	2,100,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							67,000,000	68,000,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										39,598,500	39,700,000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							15,664,300	15,700,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,							23,934,200	24,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Madiun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Semua Kelurahan									
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									131,678,350	133,000,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							50,678,350	51,000,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							81,000,000	82,000,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									59,502,240	61,000,000		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							39,100,740	40,000,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							20,401,500	21,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									7,563,850	7,600,000		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									7,563,850	7,600,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,							7,563,850	7,600,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Madiun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Semua Kelurahan									
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									14,866,450	15,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									14,866,450	15,000,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						14,866,450	15,000,000		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									10,604,700	11,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									10,604,700	11,000,000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						10,604,700	11,000,000		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									26,965,000	28,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									26,965,000	28,000,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						11,599,300	12,000,000		
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						15,365,700	16,000,000		
TOTAL										3,840,755,132	3,848,035,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Madiun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0002 Kelurahan Nglames

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						541,950,000	541,950,000					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						165,700,000	165,700,000					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						40,000,000	40,000,000					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Madiun, Madiun, Nglames			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Nglames	100 %			8,000,000	8,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Madiun, Madiun, Nglames			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Nglames	100 %			32,000,000	32,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						113,900,000	113,900,000					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Madiun, Madiun, Nglames			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Nglames	100 %			11,300,000	11,300,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Madiun, Madiun, Nglames			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Nglames	100 %			102,600,000	102,600,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11,800,000	11,800,000					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Madiun, Madiun, Nglames			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Nglames	100 %			3,000,000	3,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Madiun, Madiun, Nglames			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Nglames	100 %			8,800,000	8,800,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						376,250,000	376,250,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Madiun

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0002 Kelurahan Nglames

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										376,250,000	376,250,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kab. Madiun, Madiun, Nglames			Keberhasilan dalam Bidang Pembangunan	100 %			200,000,000	200,000,000	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kab. Madiun, Madiun, Nglames							176,250,000	176,250,000	
TOTAL											541,950,000	541,950,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						4,567,849,210	4,567,849,210					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,407,950,116	4,407,950,116					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,242,081,316	4,242,081,316					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	100 %			4,242,081,316	4,242,081,316	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						37,422,000	37,422,000					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase peralatan rumah tangga yang tersedia	100 %			3,497,900	3,497,900	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase bahan logistik kantor yang tersedia	100 %			21,428,000	21,428,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %			2,356,100	2,356,100	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100 %			3,180,000	3,180,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara	100 %			6,960,000	6,960,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									75,266,300	75,266,300		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	100 %			31,766,300	31,766,300	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	100 %			43,500,000	43,500,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									53,180,500	53,180,500		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas yang tersedia	100 %			48,340,500	48,340,500	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %			4,840,000	4,840,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									20,828,200	20,828,200		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									20,828,200	20,828,200		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua			Persentase efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	80 %			20,828,200	20,828,200	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kelurahan			yang meningkat						
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									74,526,194	74,526,194		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									60,114,694	60,114,694		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang meningkat	80 %			60,114,694	60,114,694	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									14,411,500	14,411,500		
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang terfasilitasi	80 %			14,411,500	14,411,500	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									35,428,800	35,428,800		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									35,428,800	35,428,800		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang terlaksana	80 %			15,169,900	15,169,900	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang harmonis	80 %			20,258,900	20,258,900	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									25,418,600	25,418,600		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									25,418,600	25,418,600		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	6. Peningkatan Kualitas		Kab. Madiun,			Persentase persatuan dan kesatuan bangsa	80 %			7,498,300	7,498,300	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangu nan Nasional
		Pelayanan		Mejayan, Semua Kelurahan			yang terbina						
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase konflik sosial yang tertangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	80 %			17,920,300	17,920,300	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									3,697,300	3,697,300		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									3,697,300	3,697,300		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan			Persentase administrasi tata pemerintahan desa yang terfasilitasi	80 %			3,697,300	3,697,300	
TOTAL										4,567,849,210	4,567,849,210		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Bangunsari Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						534,000,000	0					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						199,503,545	0					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						67,828,545	0					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100 %			57,828,545	0	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %			10,000,000	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131,675,000	0					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	100 %			16,430,000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Tesediaya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %			230,490,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						334,496,455	0					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						334,496,455	0					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana	100 %			200,000,000	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	100 %			134,496,455	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Bangunsari Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
TOTAL									534,000,000	0			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Krajan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
7																											
7	01																										
7	01	01																									
7	01	01	2.06																								
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan				Peralatan Kebersihan yang tersedia	12 Bulan								6,000,000	6,000,000					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan				Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan								28,220,000	28,220,000					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Barang cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	12 Bulan								2,000,000	2,000,000					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan				Langganan Surat Kabar yang terbayar	12 Bulan								1,980,000	1,980,000					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Madiun, Mejayan, Krajan				Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	12 Bulan								7,500,000	7,500,000					
7	01	01	2.08																								
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan				Listrik,Air,Telepon dan Internet yang terbayar	12 Bulan								16,800,000	16,800,000					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terbayar	4 Orang								72,000,000	72,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Krajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										15,000,000	15,000,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Kendaraan Dinas yang terpelihara	2 Buah			3,000,000	3,000,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Peralatan dan Mesin yang terpelihara	12 Bulan			12,000,000	12,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										392,000,000	392,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										392,000,000	392,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Saluran Drainase yang dibangun	1 Paket			200,000,000	200,000,000	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Pemberdayan Masyarakat Kelurahan yang terpenuhi	12 Bulan			92,183,750	92,183,750	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan			Kab. Madiun, Mejayan, Krajan			Evaluasi Kelurahan yang terlaksana	12 Bulan			99,816,250	99,816,250	
TOTAL											541,500,000	541,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0004 Kelurahan Pandean

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						800,000,000	65,858,200,000					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						267,000,000	299,200,000					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						144,000,000	174,100,000					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Pandean			tercukupinya anggaran komponen listrik	1 tahun			4,000,000	4,100,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Mejayan, Pandean			tercukupinya anggaran penyediaan alat kantor	1 paket			100,000,000	125,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Pandean			tercukupinya anggaran logistik kantor	100 %			40,000,000	45,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107,000,000	108,000,000					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tercukupinya anggaran listrik air	1 tahun			20,000,000	21,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tercukupinya anggaran jasa pelayanan umum	1 tahun			87,000,000	87,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,000,000	17,100,000					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	6. Peningkatan Kualitas		Semua Kabupaten/			terdukupinya anggaran pemeliharaan dan	100 %			4,000,000	4,100,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0004 Kelurahan Pandean

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelayanan		Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pajak kendaraan dinas						
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tercukupinya anggaran pemeliharaan	100 %			12,000,000	13,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									508,000,000	65,530,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									448,000,000	530,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kab. Madiun, Mejayan, Pandean			Terbangunnya sarana prasarana Kelurahan	100 %			373,000,000	450,000,000	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Mejayan, Pandean			tercukupinya anggaran pemberdayaan masyarakat	1 tahun			75,000,000	80,000,000	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									60,000,000	65,000,000,000		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Mejayan, Pandean			tercukupinya anggaran Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1 tahun			60,000,000	65,000,000,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									25,000,000	29,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									25,000,000	29,000,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban		Kab. Madiun, Mejayan,			tercukupinya anggaran sinergitas	1 tahun			10,000,000	12,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0004 Kelurahan Pandean

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Umum, dan Ketahanan Bencana		Pandean									
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Mejayan, Pandean			tercukupinya anggaran harmonisasi	1 tahun			15,000,000	17,000,000	
TOTAL											800,000,000	65,858,200,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Pilangkenceng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Prioritas Pembangunan Nasional		
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						2,200,735,515	2,432,340,938					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,098,159,405	2,322,340,938					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,614,400	6,000,000					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan laporan keuangan terpenuhi	12 Bulan			5,614,400	6,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,764,340,938	1,964,340,938					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Pilangkenceng Terpenuhi	12 Bulan			1,764,340,938	1,964,340,938	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						135,653,492	148,000,000					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan instalasi listrik dan penerangan terpenuhi	12 Bulan			6,785,790	7,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	3 Bulan			14,848,550	17,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhi	12 Bulan			7,777,000	9,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Madiun, Pilangkenceng			Kebutuhan bahan logistik kantor terpenuhi	12 Bulan			50,853,552	55,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Pilangkenceng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				ng, Semua Kelurahan									
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhi	12 Bulan			11,578,600	13,000,000	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhi	12 Bulan			2,310,000	3,000,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terpenuhi	12 Bulan			83,000,000	88,000,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									107,173,320	116,000,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi	12 Bulan			24,448,320	26,000,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpenuhi	12 Bulan			82,725,000	90,000,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									85,377,255	88,000,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan			70,869,025	72,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Pilangkenceng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Jabatan												
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhi	12 Bulan			3,767,500	4,000,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya Terpenuhi	12 Bulan			10,740,730	12,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										12,236,400	14,000,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										12,236,400	14,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Peningkatan Efektivitas Pelayanan Terpenuhi	12 Bulan			12,236,400	14,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										44,951,180	46,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										44,951,180	46,000,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terpenuhi	12 Bulan			44,951,180	46,000,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										23,084,790	25,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										23,084,790	25,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan			23,084,790	25,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Pilangkenceng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Terpenuhi						
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									14,771,740	16,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									14,771,740	16,000,000		
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng, Semua Kelurahan			Kebutuhan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, RAS, dan Golongan Lainnya Terpenuhi	12 Bulan			14,771,740	16,000,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									7,532,000	9,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									7,532,000	9,000,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kebutuhan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terpenuhi	12 Bulan			7,532,000	9,000,000	
TOTAL										2,200,735,515	2,432,340,938		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Sawahan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						2,737,392,689	0					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,672,392,689	0					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,000,000	0					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan			Penyusunan dokumen perencanaan daerah yang terlaksanan	100 persen			5,000,000	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,322,409,168	0					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kebutuhan gaji dan tunjangan yang tercukupi	12 bulan			2,322,409,168	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						107,483,521	0					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyediaan komponen listrik	100 persen			6,000,000	0	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan			penyediaan peralatan rumah tangga	100 persen			6,000,000	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyediaan bahan logistik yang tercukupi	100 persen			36,383,521	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Sawahan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen			6,000,000	0	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyediaan bahan bacaan	100 persen			3,600,000	0	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ysng terpenuhi	100 persen			49,500,000	0	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									25,000,000	0		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi	100 persen			25,000,000	0	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									113,500,000	0		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 persen			28,500,000	0	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			penyediaan jasa pelayanan umum yang terpenuhi	100 persen			85,000,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Sawahan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Semua Kelurahan									
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									99,000,000	0		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang terpenuhi	100 persen			69,000,000	0	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi	100 persen			15,000,000	0	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemeliharaan/rahbililitasi prasaran gedung dan bangunan yang terpenuhi	100 persen			15,000,000	0	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									6,500,000	0		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									6,500,000	0		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			peningkatan efektifitas pelayanan masyarakat di Kecamatan yang terpenuhi	100 persen			6,500,000	0	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									15,900,000	0		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									15,900,000	0		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua			peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di	100 persen			15,900,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Sawahan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan, Semua Kelurahan			Kecamatan yang terpenuhi						
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									6,000,000	0		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									6,000,000	0		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat dan agama yang terlaksana	100 persen			6,000,000	0	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									36,600,000	0		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									36,600,000	0		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang terpenuhi	100 persen			21,600,000	0	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terpenuhi	100 persen			15,000,000	0	
TOTAL										2,737,392,689	0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Saradan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN						2,835,472,109	3,033,875,980			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,760,472,109	3,000,875,980			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,452,271,087	2,652,375,980			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			prosentase	12 bulan			2,452,271,087	2,652,375,980	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						119,201,022	132,500,000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			%	12 bulan			21,000,000	21,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			%	12 bulan			8,000,000	10,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			%	12 bulan			8,000,000	10,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan			%	12 bulan			25,000,000	30,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Saradan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%	12 bulan			11,301,022	11,500,000	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%	12 bulan			2,400,000	2,500,000	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%	12 bulan			9,000,000	10,000,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%	12 bulan			45,000,000	48,000,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										96,000,000	111,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%	12 bulan			25,000,000	27,000,000	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			prosesn	12 bulan			8,000,000	10,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Saradan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangu nan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
				Kelurahan										
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%		12 bulan			63,000,000	74,000,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									93,000,000	105,000,000			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%		12 bulan			60,000,000	65,000,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%		12 bulan			13,000,000	15,000,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%		12 bulan			20,000,000	25,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									30,000,000	33,000,000			
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									30,000,000	33,000,000			
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%		12 bulan			15,000,000	18,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Saradan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							15,000,000	15,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										15,000,000	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										15,000,000	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%	12 bulan			15,000,000	0	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										15,000,000	0	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										15,000,000	0	
7 01 04 2.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%	12 bulan			15,000,000	0	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										15,000,000	0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										15,000,000	0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			%	12 bulan			15,000,000	0	
TOTAL											2,835,472,109	3,033,875,980	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Wungu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						4,433,612,685	4,413,743,599					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,274,717,421	4,254,848,335					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,066,788,610	4,066,788,610					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Penyediaan Gaji	100 %			4,066,788,610	4,066,788,610	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						64,413,915	44,544,829					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Penyediaan Komponen instalasi	100 %			3,836,250	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan							16,032,836	0	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Penyediaan Alat Kebersihan	100 %			5,486,030	5,486,030	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Penyediaan Bahan Cetak	100 %			8,594,999	8,594,999	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Wungu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangu nan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Penyediaan SPPD	100 %			30,463,800	30,463,800	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									86,969,896	86,969,896		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Penyediaan Jasa Komunikasi	100 %			25,769,896	25,769,896	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Penyediaan Jasa PPPK	100 %			61,200,000	61,200,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									56,545,000	56,545,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan	100 %			56,545,000	56,545,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									11,515,500	11,515,500		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									11,515,500	11,515,500		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Terlaksananya Bimtek Pelayanan	1 Kegiatan			11,515,500	11,515,500	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									37,469,500	37,469,500		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									37,469,500	37,469,500		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Wungu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang, Bimtek Epdeskel dan Keg PKK	3 Kegiatan			37,469,500	37,469,500	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										36,769,014	36,769,014	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										36,769,014	36,769,014	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Penyediaan Fasilitasi Bimstek	100 %			36,769,014	36,769,014	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										73,141,250	73,141,250	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										73,141,250	73,141,250	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yg terlaksana	3 Kegiatan			25,220,950	25,220,950	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Kententraman dan Ketertiban yang Terlaksanakan	4 Kegiatan			47,920,300	47,920,300	
TOTAL											4,433,612,685	4,413,743,599	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Wungu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Munggut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01			KECAMATAN								523,050,000	549,202,500				
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								335,756,600	352,544,430				
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								47,173,680	49,532,364				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Madiun, Wungu, Munggut			Penyediaan ATK	100 %			12,815,108	13,455,863	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Munggut			Penyediaan Alat Kebersihan	100 %			5,990,477	6,290,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Munggut			Penyediaan Bahan Cetak	100 %			6,367,380	6,685,750	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Munggut			Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 %			22,000,715	23,100,751	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								151,310,000	158,875,500			
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemeliharaan	100 %			151,310,000	158,875,500	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129,371,000	135,839,550			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Munggut			Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air	100 %			19,271,000	20,234,550	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Wungu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Munggut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Munggut			Penyediaan Jasa PPPK	100 %			110,100,000	115,605,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									7,901,920	8,297,016		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan	100 %			7,901,920	8,297,016	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									187,293,400	196,658,070		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									187,293,400	196,658,070		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Munggut			Pemeliharaan Pendopo	100 %			149,940,000	157,437,000	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Munggut			Kegiatan Pemberdayaan	100 %			6,625,000	6,956,250	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Munggut			Kegiatan Pemerintahan	100 %			30,728,400	32,264,820	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									0	0		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									0	0		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Munggut							0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Wungu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Munggut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wungu, Munggut			Kegiatan Pencegahan Covid-19	100 %			0	0	
TOTAL											523,050,000	549,202,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Wonoasri

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Wonoasri

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
7																										
7	01																				2,165,615,294	2,078,631,974				
7	01	01																			2,072,108,094	2,070,631,974				
7	01	01	2.01																		2,000,000	2,500,000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan				jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	13 dokumen								4,000,000	5,000,000				
7	01	01	2.02																		1,811,306,974	1,811,306,974				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan				jumlah penyediaan gaji dan tunjangan lainnya	12 bulan								1,811,306,974	1,811,306,974				
7	01	01	2.06																		81,701,120	79,325,000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang tersedia	12 bulan								2,000,000	2,500,000				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket								20,000,000	0				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan				jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	12 bulan								6,752,240	7,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Wonoasri
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah ATK, materai dan minuman harian yang tersedia	12 bulan			23,000,000	25,000,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan			5,000,000	6,000,000	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	12 bulan			3,675,000	3,675,000	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah bahan publikasi yang tersedia	12 bulan			3,650,000	3,650,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang tersedia	12 bulan			31,000,000	35,000,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										6,000,000	0	
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 paket			6,000,000	0	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										108,100,000	113,500,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua			Jasa telepon, air, listrik dan internet yang terbayar	12 bulan			23,500,000	23,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Wonoasri

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah penyediaan jasa kebersihan, keamanan, supir dan administrasi perkantoran yang terbayar	12 bulan			84,600,000	90,000,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										63,000,000	64,000,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah servis, suku cadang, BBM dan pajak kendaraan yang tersedia	12 bulan			54,000,000	55,000,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang terlaksana	12 bulan			3,000,000	3,000,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah gedung yang dipelihara	1 unit			6,000,000	6,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										6,500,000	8,000,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										6,500,000	8,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksana	4 kegiatan			6,500,000	8,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										30,531,000	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										30,531,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Wonoasri

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	4 kegiatan			30,531,000	0	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										50,712,200	0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										50,712,200	0	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban yang terlaksana	4 kegiatan			37,743,200	0	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksana	4 kegiatan			12,969,000	0	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										5,764,000	0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										5,764,000	0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan			jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan yang terlaksana	4 kegiatan			5,764,000	0	
TOTAL											2,165,615,294	2,078,631,974	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						9,746,332,344	10,359,758,020					
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,213,009,474	3,323,009,474					
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30,000,000	35,000,000					
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan , Pelaporan SKPD	4 Dokumen			30,000,000	35,000,000	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,363,009,474	2,363,009,474					
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan	27 Orang			2,363,009,474	2,363,009,474	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						285,000,000	340,000,000					
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	12 Bulan			50,000,000	75,000,000	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Dan perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan			50,000,000	50,000,000	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah Logistik kantor Yang Disediakan	12 Bulan			60,000,000	75,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Bencana		Kelurahan									
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak Dan penggandaan Yang Disediakan	12 Bulan			25,000,000	30,000,000	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	12 Bulan			100,000,000	110,000,000	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									307,400,000	327,400,000		
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayarkan	12 Bulan			100,000,000	120,000,000	
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dilaksanakan	12 Bulan			207,400,000	207,400,000	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									227,600,000	257,600,000		
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan	12 Bulan			10,000,000	15,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Yang Dilaksanakan	12 Bulan			167,600,000	167,600,000	
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Yang Dilaksanakan	12 Bulan			50,000,000	75,000,000	
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										215,016,975	350,000,000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										215,016,975	350,000,000	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	300 Orang			215,016,975	350,000,000	
8 01 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik										1,191,728,977	1,191,728,977	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										1,191,728,977	1,191,728,977	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota Partai Politik yang mengikuti sosialisasi jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik	16 anggota parpol 9 parpol			1,191,728,977	1,191,728,977	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah												
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									2,420,019,569	2,520,019,569		
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									2,420,019,569	2,520,019,569		
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota Ormas yang dibina Jumlah Ormas yang mendapatkan hibah	68 anggota ormas 68 ormas			2,420,019,569	2,520,019,569	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									34,983,025	0		
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									34,983,025	0		
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	300 orang			34,983,025	0	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									2,671,574,324	2,975,000,000		
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									2,671,574,324	2,975,000,000		
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban		Kab. Madiun, Semua			Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan	40 kegiatan			665,692,000	725,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pengeluaran
	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Umum, dan Ketahanan Bencana		Kecamatan, Semua Kelurahan									
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pencegahan konflik sosial dengan baik	60 kegiatan			1,355,882,324	1,500,000,000	
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Ketahanan Bencana		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten	4 kegiatan			650,000,000	750,000,000	
TOTAL											9,746,332,344	10,359,758,020	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2022.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai ukuran capaian pembangunan daerah secara makro pada periode perencanaan tertentu. Adapun IKU Kabupaten Madiun Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target Capaian
1	Indeks Kesalehan Sosial	Skala	67,55
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,50
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,53
4	Angka Kemiskinan	%	10,77
5	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	72

Tabel 6.2
Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (*Impact*)
Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian
1	Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan	100%
2	Indeks Toleransi	47,11
3	Indeks Solidaritas	53,98
4	Indeks Stabilitas	56,92
5	Nilai SAKIP	A
6	Opini Atas Audit BPK	WTP
7	Tingkat Maturitas SPIP	3,4

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian
8	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	81
9	Indeks SPBE	2,7
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95
11	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)	4%
12	Pengeluaran Wisatawan	Rp. 2.424.000.000,-
13	Persentase Desa Mandiri	32,3%
14	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	77
15	Indeks Resiko Bencana	138,08
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,25
18	Pengeluaran per Kapita Makanan	Rp. 550.000,-
19	Indeks Kesehatan	0,80
20	Indeks Pendidikan	0,635
21	Indeks Pembangunan Gender	91,8

Sumber : RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja kunci pada RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Madiun

No.	Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2022	Akhir Periode
A	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan			
1.1	<i>Indeks Pendidikan</i>	<i>nilai</i>	0,635	0,64
	1.1.1 Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	angka	5,36	6,49
	1.1.2 APS SD	persen	100	100
	1.1.3 Persentase lembaga SD terakreditasi A	persen	3,45	4,58
	1.1.4 APS SMP	persen	100	100
	1.1.5 Persentase lembaga SMP terakreditasi A	persen	72,92	77,08
	1.1.6 APS PAUD	persen	56,78	58,41
	1.1.7 Persentase tenaga pendidika yang tersertifikasi	persen	77	78
	1.1.8 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi	persen	98,52	99,32
2	Kesehatan			
2.1	<i>Indeks Kesehatan</i>	<i>nilai</i>	0,8	0,8
	2.1.1 Angka Kematian Bayi	angka	0	0

No.	Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja	
				Tahun 2022	Akhir Periode
	2.1.2	Angka Kematian Balita	Angka	0	0
	2.1.3	Prevalensi Bayi Stunting	persen	20,1	20
	2.1.4	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	61	62
	2.1.5	Persentase pemenuhan saran, prasarana dan peralatan puskesmas	persen	62	63
	2.1.6	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standart	persen	79	81
	2.1.7	Pesentase desa siaga aktif purnama mandiri			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1	<i>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</i>		<i>nilai</i>	77	78
	3.1.1	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	persen	90,46	90,78
	3.1.2	Persentase peningkatan jaringan SPAM di kawasan perdesaan	persen	2,63	2,8
	3.1.3	Persentase kebutuhan air minum sehari-hari yang terlayani	persen	9,48	10,07
	3.1.4	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	persen	33,81	35,2
	3.1.5	Persentase panjang jalan dalam kondisi sedang	persen	42,18	42,18
	3.1.6	Persentase jumlah jembatan dan kondisi baik	persen	77,6	78,14
	3.1.7	Persentase sarana air limbah domestic setempat yang terbangun	persen	8,29	8,64
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
4.1	<i>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</i>		<i>nilai</i>	77	78
	4.1.1	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana dan utilitas umumnya	persen	70	73
	4.1.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	persen	4,49	4,86
	4.1.3	Jumlah Rumah Layak Huni yang terbangun bagi korban bencana	unit	36,02	36,95
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai Perlindungan Masyarakat				
5.1	<i>Indeks Stabilitas</i>		<i>nilai</i>	53,98	54,41
	5.1.1	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan	persen	100	100
	5.1.2	Persentase kasus pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan sesuai ketentuan	persen	100	100
5.2	<i>Indeks Resiko Bencana</i>		<i>Nilai</i>	138,08	138,08
	5.2.1	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana	desa	30	44
	5.2.2	Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	persen	100	100
	5.2.3	Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	persen	100	100
B	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	Tenaga kerja				
1.1	<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</i>		<i>angka</i>	4,32	4,08
	1.1.1	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	persen	77	78
	1.1.2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen	77	78
	1.1.3	Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun	angka	80	80
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				
2.1	<i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>		<i>nilai</i>	91,8	92
	2.1.1	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	persen	90,34	100
	2.1.2	Persentase perkawinan dengan usia istri di bawah 20 tahun	persen	6,95	6,8

No.	Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja	
				Tahun 2022	Akhir Periode
3	Pangan				
3.1	Pengeluaran per Kapita Makanan		rupiah	Rp 550.000,-	Rp 620.000,-
	3.1.1	Tingkat capaian Angka Kecukupan Energi	kalori	2200	2250
	3.1.2	Tingkat capaian Angka Kecukupan Protein		58	60
4	Lingkungan Hidup				
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		nilai	80	80
	5.1.1	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	persen	100	100
	5.1.2	Persentase sampah yang tertangani	persen	47,5	50
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
7.1	Persentase Desa Mandiri		persen	32,30	
	7.1.1	Persentase desa dengan kapasitas Pemerintah Desa yang baik	persen	73,2	84,8
	7.1.2	Persentase BPD yang berfungsi dengan baik	persen	70,7	90,9
	7.1.3	Persentase desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	persen	88,4	100
	7.1.4	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	persen	63	67
	7.1.5	Persentase BUMDesa yang aktif	persen	42,4	51,5
	7.1.6	Persentase lembaga ekonomi yang aktif	persen	66,8	73,7
6	Perhubungan				
9.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		nilai	77	78
	9.1.1	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	persen	85	95
	9.1.2	Persentase kendaraan laik jalan	persen	90	100
	9.1.3	Persentase angka tertib lalu lintas	persen	78	90
7	Komunikasi dan Informatika				
10.1	Indeks SPBE		nilai	2,7	2,75
	10.1.1	Persentase PD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik	persen	50	55
	10.1.2	Terselenggaranya program penunjang urusan komunikasi dan informatika	persen	100	100
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
11.1	Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)		persen	4	5
	11.1.1	Persentase peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah	Persen	1,21	1,81
9	Penanaman Modal				
12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat		nilai	83,95	86,2
	12.1.1	Persentase kepuasan masyarakat per jenis layanan	persen	80	85
10	Kebudayaan				
16.1	Persentase budaya local yang dilestarikan		persen	65	
	16.1.1	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	persen	100	100
C	Urusan Pilihan				
1	Pariwisata				
2.1	Pengeluaran Wisatawan		rupiah	2.424 juta	3.120 juta
	2.1.1	Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan	persen	4,8	5,6
2	Pertanian				
3.1	Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)		persen	4	5

No.	Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja	
				Tahun 2022	Akhir Periode
	3.1.1	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	persen	7	8
	3.1.2	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	persen	4	5
3	Perdagangan				
6.1	<i>Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)</i>		<i>persen</i>	4	5
	6.1.1	Persentase penjualan produk dalam negeri	persen	60	70
6.2	<i>Pengeluaran per Kapita Makanan</i>			<i>Rp 550.000,-</i>	<i>Rp 620.000,-</i>
	6.2.1	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	persen	80%	90%
4	Perindustrian				
7.1	<i>Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)</i>		<i>persen</i>	4	5
	7.1.1	Jumlah rencana pembangunan industri	dokumen	1	1
D	Urusan Penunjang Pemerintahan				
1	Perencanaan				
1.1	<i>Nilai SAKIP</i>		<i>nilai</i>	A	A
	1.1.1	Persentase penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100
2	Keuangan				
2.1	<i>Opini Atas Audit BPK</i>			<i>WTP</i>	<i>WTP</i>
	2.1.1	Persentase PD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	persen	100	100
	2.1.2	Persentase PD yang tertib tata kelola barang milik daerah	persen	100	100
3	Pengawasan				
3.1	<i>Nilai SAKIP</i>		<i>nilai</i>	A	A
	3.1.1	Persentase PD yang mendapatkan nilai hasil evaluasi SAKIP memuaskan (A)	persen	81	82
3.2	<i>Opini Atas Audit BPK</i>		<i>peringkat</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>
	3.2.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100
3.3	<i>Maturitas SPIP</i>		<i>level</i>	<i>3,4</i>	<i>3,5</i>
	3.3.1	Level kapabilitas APIP atau jumlah rumusan kebijakan teknis pengawasan	level	4	4
	3.3.2	Persentase pendampingan, asistensi dan verifikasi kepada PD yang sesuai peraturan yang berlaku	persen	100	100
4	Kepegawaian				
5.1	<i>Indeks Profesionalitas Aparatur</i>		<i>nilai</i>	81	81,5
	5.1.1	Persentase penetapan kebutuhan ASN	persen	97	98
	5.1.2	Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi	persen	98	99
	5.1.3	Persentase kedisiplinan ASN	persen	100	100
	5.1.4	Persentase penilaian kinerja ASN	persen	80	85
	5.1.5	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	80	85
E	Urusan Penunjang Pendukung Pemerintahan				
1	Sekretariat Daerah				
1.1	<i>Indeks Toleransi</i>		<i>nilai</i>	47,11	47,49
	1.1.1	Persentase terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	100	100
F	Unsur Pemerintahan Umum				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik				

No.	Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja	
				Tahun 2022	Akhir Periode
1.1	<i>Indeks Toleransi</i>			47,11	47,49
	1.1.1	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	persen	100	100
1.2	<i>Indeks Solidaritas</i>			53,98	54,41
	1.2.1	Persentase penyelenggaraan penguatan deology Pancasila dan karakter kebangsaan	persen	100	100

Sumber : RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023

BAB VII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2022, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Madiun Tahun 2022
- b. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Madiun Tahun 2022;
- c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Bilamana pada pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Madiun, 7 Juli 2021

BUPATI MADIUN

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Madiun.....	II-2
Gambar 2.2	Wilayah Agropolitan di Kabupaten Madiun.....	II-27
Gambar 2.3	Rencana Sub Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Madiun.....	II-30
Gambar 2.4	Jalur Ring 1 Selingkar Wilis di Kabupaten Madiun.....	II-31
Gambar 2.5	Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis.....	II-32
Gambar 2.6	Peta Kerawanan Gempa Bumi Kabupaten Madiun.....	II-46
Gambar 2.7	Peta Kerawanan Tanah Longsor Kabupaten Madiun	II-47
Gambar 2.8	Peta Kerawanan Kebakaran Kabupaten Madiun.....	II-48
Gambar 2.9	Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Madiun.....	II-49
Gambar 2.10	Peta Kerawanan Puting Beliung Kabupaten Madiun.....	II-50
Gambar 4.1	Tema Pembangunan RKP, Provinsi dan Kabupaten Madiun ..	IV-5